



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 - 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan dan mengingat akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah maka guna menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Gubernur harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 – 92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Pejabat Gubernur dan Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri untuk Pejabat Bupati dan Pejabat Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban gubernur, bupati, dan walikota dalam kurun waktu tertentu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 yang berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RPD
Pasal 2

(1) Sistematika RPD terdiri atas:

a. Lampiran I :

- 1) BAB I PENDAHULUAN;
- 2) BAB II GAMBARAN UMUM;
- 3) BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- 4) BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
- 5) BAB V TUJUAN DAN SASARAN;
- 6) BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
- 7) BAB VII ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH;

- 8) BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- 9) BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
- 10) BAB X PENUTUP.

b. Lampiran II Cascading Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026.

- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RPD dilaksanakan oleh:

- a. Penjabat Gubernur, sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya; dan
- c. Perangkat Daerah untuk penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Badan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. capaian target Tujuan dan Sasaran RPD;
 - b. capaian target Indikator Kinerja Daerah RPD;
 - c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
 - d. efektivitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah.

Pasal 5

- (1) Hasil dari pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menjadi acuan dalam melakukan perubahan RPD.
- (2) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/ atau
 - d. Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Program dapat disesuaikan pada RPD tahun berkenaan.
- (4) Perubahan RPD menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Mei 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR **12** TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023. Sejalan dengan mandat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-undang maka pemilihan umum (pemilu) kepala daerah serentak secara nasional akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kebijakan tersebut berdampak pada kekosongan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada sisi perencanaan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Oleh karena itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 atau RPD Tahun 2024-2026. Selain itu, seluruh perangkat daerah juga harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau perkara kemudian akan menjadi pedoman bagi Pejabat (Pj) Gubernur Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode yang sama, demikian pula dengan Renstra PD akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Proses penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Persiapan penyusunan RPD meliputi penyusunan Rancangan Awal RPD dengan tahapan analisis data dan informasi, evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD Tahun 2018-2023 (sampai dengan tahun 2022), perumusan isu strategis, perumusan pohon kinerja dan *cascading*, dan penyusunan dokumen rancangan awal RPD; 2) Penyusunan rancangan RPD; 3) Pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik; 4) Perumusan rancangan akhir

RPD; 4) Fasilitasi rancangan akhir RPD kepada Kementerian Dalam Negeri; dan 5) Penetapan Perkada RPD. Penyusunan dokumen RPD dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan dokumen Renstra PD.

Secara substansi, penyusunan RPD Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; 2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2025; 3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2018-2023; 4) Isu-isu strategis yang berkembang; 5) Kebijakan nasional; dan 6) Regulasi yang berlaku saat ini. Selain itu, perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah dalam RPD Tahun 2024-2026 juga memperhatikan keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang dinilai masih relevan di Jawa Tengah hingga tahun 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022 menggambarkan bahwa dari 13 indikator kinerja utama (IKU) daerah Jawa Tengah, sebanyak lima indikator dinilai telah melampaui target RPJMD Tahun 2018-2023 atau sebesar 38,46 persen, dan delapan indikator dinilai akan tercapai sesuai target RPJMD Tahun 2018-2023 atau sebesar 61,54 persen. Delapan indikator tersebut adalah angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks Gini, indeks Williamson, dan indeks pembangunan manusia. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023 tersebut dan analisis yang telah dilakukan pada proses persiapan penyusunan rancangan awal RPD, didapatkan beberapa isu strategis yang masih relevan di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2026.

Isu strategis Jawa Tengah yang utama adalah tentang kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi serta pendapatan per kapita masyarakat yang masih rendah jika dibandingkan tingkat nasional dan provinsi lain, terutama di Jawa dan Bali. Isu kesejahteraan masyarakat tersebut terkait dengan isu perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Dengan memperhatikan gambaran isu tersebut, dalam RPD Tahun 2024-2026 dirumuskan isu strategis Provinsi Jawa Tengah adalah: 1) Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; 2) Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; 3) Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta 4) Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Selanjutnya, berdasarkan isu strategis tersebut dan tetap memperhatikan berbagai kebijakan nasional dan amanat regulasi, dengan menggunakan instrumen pohon kinerja dan *cascading* maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Sampai dengan tahun 2026, tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah diarahkan pada "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari". Tujuan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat sasaran daerah yaitu: 1) Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; 3) Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta 4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

RPD Tahun 2024-2026 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RPD Tahun 2024-2026 juga menjadi pedoman penyusunan RKPD untuk periode tahun 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

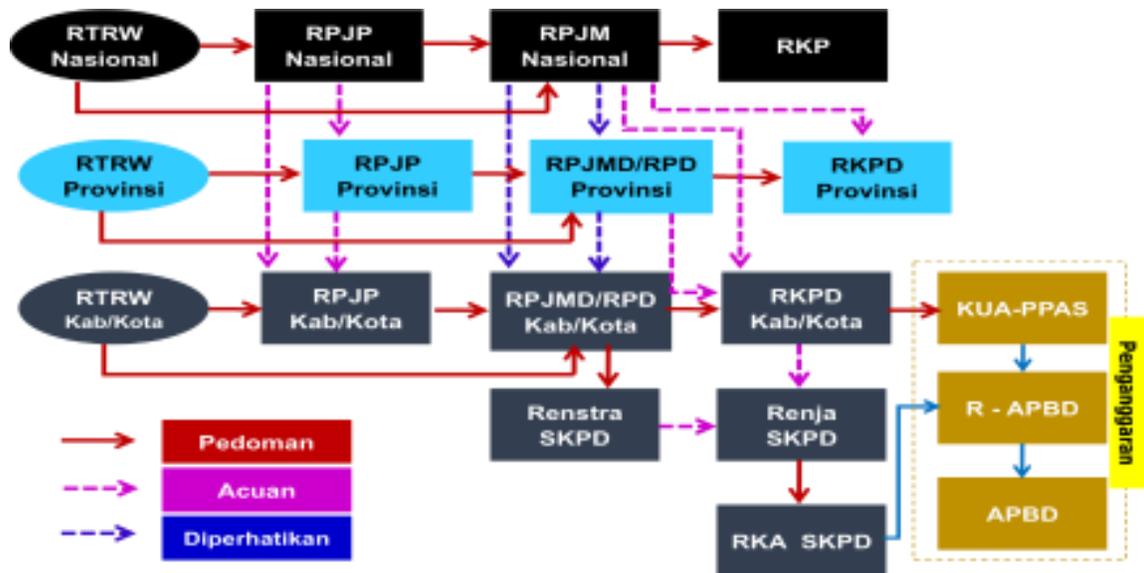
Dasar hukum penyusunan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016

- tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB).

1.3. Hubungan Antardokumen

Dokumen RPD tidak berbeda dengan RPJMD terkait posisinya dengan regulasi lainnya. RPD Tahun 2024-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dokumen RPD disusun dengan memedomani RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta memperhatikan RPD/RPJMD Provinsi lainnya yang berbatasan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah. RPD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra PD dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) setiap tahun, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Gambaran keterkaitan RPD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 1.1
Keterkaitan RPD dengan Dokumen Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPD Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut.

a. Maksud

Maksud penyusunan RPD Tahun 2024-2026 adalah merumuskan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2024-2026.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RPD Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2024-2026;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi berbatasan, dan Pemerintah;
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Renstra PD Tahun 2024-2026; serta
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dokumen RPD Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RPD.

- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat kondisi umum daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum yang diuraikan dalam gambaran kondisi geografi dan demografi, kondisi kesejahteraan masyarakat, kondisi perekonomian daerah, kondisi kualitas sumber daya manusia, kondisi sumber daya alam, lingkungan hidup, dan kebencanaan, kondisi tata kelola pemerintahan, kondisi kondisivitas wilayah.
- BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Memuat kondisi perekonomian daerah; gambaran kondisi keuangan daerah, dan proyeksi keuangan daerah.
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum kondisi daerah dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya.
- BAB V TUJUAN DAN SASARAN
Memuat tentang tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026, serta *cascading* kinerja mulai dari tujuan dan sasaran daerah beserta indikatornya, sedangkan *cascading* sampai dengan *outcome* disajikan dalam lampiran *cascading*.
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
Memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan *cascading* pada bab sebelumnya.
- BAB VII ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH
Memuat arah kebijakan pengembangan wilayah Jawa Tengah, analisis kinerja per wilayah pengembangan, analisis daya saing daerah per wilayah pengembangan, arah kebijakan, dan indikasi rencana program pembangunan per wilayah pengembangan.
- BAB VIII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Memuat kerangka pendanaan seluruh program perangkat daerah dan daftar program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.
- BAB IX KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) beserta targetnya yang akan dicapai pada tahun 2024-2026.
- BAB X PENUTUP
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 serta menggarisbawahi tentang pentingnya RPD bagi pembangunan daerah Jawa Tengah sepanjang tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km² atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan, serta meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan.

b. Letak Geografis dan Kondisi Topografi

Secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur, sehingga secara ekonomi posisi sangat strategis karena berada di diantara dua titik pertumbuhan Pulau Jawa (Jakarta – Surabaya). Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km.

Topografi wilayahnya sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Dengan kemiringan lereng yang beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah. 2018

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah

c. Kondisi Geologi

Kondisi geologi terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemasang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah meliputi *organosol*, *alluvial*, *planosol*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *grumosol*, *mediteran*, *latosol*, *podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol*, *aluvial*, serta *gromosol* yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Potensi sumber daya mineral yang tersebar meliputi 32 jenis mineral non logam (*Phospat*, *Asbes*, *Talk*, *Mika*, *Leusite*, *Oker*, *Granit*, *Dasit*, *Diorit*, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, *Kaolin*, *Feldspar*, *Gips*, *Bentonite*, Batuapung, *Trass*, *Diatome*, *Marmer*, Batu gamping, *Dolomit*, *Basal*, *Andesit*, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, *Kalsit*, *Zeolit*, Sirtu, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

d. Hidrologi

Kondisi hidrologi memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Tengah terdapat 10 (sepuluh) Wilayah Sungai (WS) yang kewenangan pengelolaannya terbagi pada kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Sungai yang pengelolaannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah Wilayah Sungai Pemali Comal (panjang sungai 930,44 km dan luas DAS 4.425,36 km²) dan Wilayah Sungai Bodri Kuto (panjang sungai 355,03 km dan luas DAS 1.647,40 km²). Sedangkan 6 (enam) WS lainnya merupakan WS kewenangan Pusat dan 2 (dua) WS kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2.1.**Kewenangan Pengelolaan Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Tengah**

	Kewenangan	Wilayah Sungai	Luas DAS (km²)
	Pusat	Cimanuk Cisanggarung	6.888,35
		Jratun Seluna	9.576,01
		Bengawan Solo	19.778,00
		Progo Opak Serang	3.238,89
		Serayu Bogowonto	7.344,61
		Citanduy	4.450,44
	Provinsi	Pemali Comal	4.425,36
		Bodri Kuto	1.647,40
	Kabupaten/Kota	Wiso Gelis	654,27

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 04/PRT/M/2015

e. Klimatologi

Suhu udara tahun 2021 rata-rata mencapai 28,33°C, dengan suhu minimum sebesar 22,85°C dan maksimum sebesar 33,84°C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata mencapai 83 persen, dengan kelembaban minimum sebesar 60 persen, dan maksimum sebesar 96,58 persen. Sementara itu banyaknya curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan curah hujan sebanyak 694 mm³ dan lama hujan adalah 27 hari.

Tabel 2.2.**Suhu Udara dan Kelembaban Udara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021**

Uraian	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Suhu Udara (°C)	22,85	28,33	33,84
Kelembaban Udara (%)	60,00	83,00	96,58

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.3.**Curah Hujan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

Bulan	Curah Hujan (mm³)	Hari Hujan	Bulan	Curah Hujan (mm³)	Hari Hujan
Januari	273	24	Juli	15	7
Februari	694	27	Agustus	65	8
Maret	122	7	September	199	15
April	131	10	Oktober	119	8
Mei	205	17	November	349	15
Juni	134	10	Desember	173	8

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

f. Penggunaan Lahan

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.436.615,35 hektar. Penggunaan lahan paling besar adalah sawah dengan luas 1.181.758,99 hektar (34,39%), dan luas penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah Kebun dengan luas 638.419,21 hektar (18,58%) dan Permukiman seluas

558.687,35 hektar (16,26%). Luas lahan sawah provinsi di Jawa Tengah mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2016, karena pada tahun tersebut luas lahan sawah sebesar 991.524 hektar (30,47). Penambahan luas lahan sawah merupakan salah satu komitmen Jawa Tengah dalam menjaga ketahanan pangan.

Sepanjang tahun 2014-2016, terjadi perubahan komposisi penggunaan lahan. Luas lahan sawah bertambah dari 990.652 hektar (30,44%) menjadi 991.524 hektar (30,47%), sementara lahan bukan sawah berkurang dari 2.263.760 hektar (69,56) menjadi 2.262.888 hektar (69,53%). Penambahan luas lahan sawah menunjukkan adanya upaya pengembangan sawah baru serta komitmen menjaga pertanian lahan pangan berkelanjutan (LP2B). Penggunaan lahan di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Cagar Alam	2.770,02	0,08%
2	Danau	16.731,58	0,49%
3	Hutan Lindung	86.866,17	2,53%
4	Hutan Produksi Terbatas	181.439,19	5,28%
5	Hutan Produksi Tetap	366.459,45	10,66%
6	Industri	10.547,83	0,31%
7	Kebun	638.419,21	18,58%
8	Lahan Terbuka	5.179,25	0,15%
9	Mangrove	2.894,14	0,08%
10	Pasir Darat	178,62	0,01%
11	Permukiman	558.687,35	16,26%
12	Sawah	1.181.758,99	34,39%
13	Semak	30.941,91	0,90%
14	Suaka Margasatwa	102,48	0,00%
15	Sungai	23.718,78	0,69%
16	Taman Hutan Raya	249,66	0,01%
17	Taman Nasional	11.888,17	0,35%
18	Taman Nasional Laut	183,65	0,01%
19	Taman Wisata Alam	216,39	0,01%
20	Tambak	56.925,79	1,66%
21	Tegalan	260.456,73	7,58%
22	TOTAL	3.436.615,35	100,00%

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, potensi dan karakter wilayahnya dibagi atas 8 wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong, dan Bregasmalang. Potensi keseluruhan terbagi sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dibawah ini :

1) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi seluas 546.290 hektar terbagi ke dalam 20 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas ±362.360 hektar, dan hutan produksi tetap seluas ±183.930 hektar. Kawasan hutan produksi terbatas berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo) dan satu kota yaitu Kota Semarang. Sedangkan kawasan hutan produksi tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar).

b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat seluas 345.822,96 hektar (10,63% luas Jawa Tengah), berada di 29 kabupaten dan 5 kota, kecuali Kota Tegal.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas ±990.652 hektar, dan kawasan pertanian lahan kering seluas + 995.587 hektar, yang diarahkan dikembangkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 hektar.

d. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas ±885.344 hektar, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 hektar (96%), PTPN IX seluas 28.212 hektar (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS seluas 11.464 hektar (1%).

e. Kawasan Peruntukan Peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

f. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan seluas ±24.802 hektar, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi:

- (1) Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan pantai utara dan pantai selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung;
- (2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

g. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota, meliputi:

- 1) Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, Serayu-Pantai Utara, Gunung Slamet, Sindoro-Sumbing-Dieng, Merapi-Merbabu-Ungaran, Gunung Muria, Pegunungan Kendeng Utara, Kendeng Selatan, dan Gunung Lawu;
- 2) Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi kompleks/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyuwangi, Mangunan-Wanayasa, dan Condroidimuka;
- 3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, dan pengembangan sumur tua/marginal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

h. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan untuk pengembangan produk-produk unggulan berbasis industri manufaktur. Wilayah industri/kawasan peruntukan industri tersebar di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang.

i. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor Borobudur-Prambanan-Surakarta; Borobudur-Dieng; Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Pati-Rembang-Blora; Semarang-Ambarawa-Salatiga; Batang-Pekalongan-Pemalang-Tegal-Brebes; Cilacap-Banyumas-Purbalingga-Banjarnegara; dan Cilacap-Kebumen-Purworejo.

j. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, meliputi :

- 1) Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan;
- 2) Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal dan perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran kawasan perkotaan.

k. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil diarahkan pada kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 (dua puluh tujuh) pulau terletak di Kepulauan Karimunjawa, 2 (dua) pulau

di Kabupaten Jepara (Pulau Panjang, dan Pulau Mandalika); 3 (tiga) pulau di Kabupaten Rembang (Pulau Marongan, Gede dan Sualan,); serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

2) Kawasan Lindung

Target rencana Kawasan lindung di Jawa Tengah tahun 2009–2029 seluas 561.404 hektar (17,4% dari luas wilayah provinsi). Pemanfaatan ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar, sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai dan sempadan.

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara diarahkan penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes. Untuk kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan Semarang).

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan seluas ±114.822 hektar. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa. Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas ±59.918 hektar, meliputi:

- (1) Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas ±23.583 hektar;
- (2) Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas ±8.786 hektar yang terdiri dari kawasan pesisir pantura dan pansela sejauh 100 meter dari garis pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50 meter dari garis pasang tertinggi;
- (3) Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas ±24.618,2 hektar, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang, Pemalang, Tegal dan Brebes;

- (4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pengembangan RTH tersebar di tiap kabupaten/kota, terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dengan luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal 20% sedangkan RTH privat 10%.
- d. Kawasan Lindung Lainnya
Kawasan lindung lainnya meliputi:
- (1) Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang, dan Tegal;
 - (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar di kabupaten/ kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan;
- e. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:
- (1) Kawasan cagar alam, taman wisata alam, dan suaka marga satwa tersebar di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang, dengan luas yang telah ditetapkan sebesar ±2.923,3 hektar. Sebaran kawasan ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.5.
Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah

No	Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
A Konservasi Wilayah I Pati			
1	Cagar Alam Keling I a, b, c	Kabupaten Jepara	6,8
2	Cagar Alam Keling II, III	Kabupaten Jepara	61
3	Cagar Alam Kembang	Kabupaten Jepara	1,8
4	Cagar Alam Gunung Celering	Kabupaten Jepara	1328,4
5	Cagar Alam Bekutuk	Kabupaten Blora	25,4
6	Cagar Alam Cabak I/II	Kabupaten Blora	30
7	Cagar Alam Gunung Butak	Kabupaten Rembang	45,1
B Konservasi Wilayah II Surakarta			
1	Cagar Alam Gebugan	Kabupaten Semarang	1,8
2	Cagar Alam Sepakung	Kabupaten Semarang	10
3	Cagar Alam Donoloyo	Kabupaten Wonogiri	8,3
4	Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan	Kabupaten Sragen	103,9
C Konservasi Wilayah III Cilacap			
1	Cagar Alam Pantodomas	Kabupaten Wonosobo	4,1
2	Cagar Alam Telogo Dringo	Kabupaten Banjarnegara	26,1
3	Cagar Alam Telogo Sumurup	Kabupaten Banjarnegara	20,1
4	Cagar Alam Pringamba I / II	Kabupaten Banjarnegara	58
5	Cagar Alam Nusakambangan Barat	Kabupaten Cilacap	675

No	Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
6	Cagar Alam Nusakambangan Timur	Kabupaten Cilacap	277
7	Cagar Alam Wijaya Kusuma	Kabupaten Cilacap	1
8	Cagar Alam Karangbolong	Kabupaten Cilacap	0,5
D. Konservasi Wilayah IV Pemalang			
1	Cagar Alam Pagerwunung Darupono	Kabupaten Kendal	33,2
2	Cagar Alam Peson Subah I	Kabupaten Batang	10,4
3	Cagar Alam Peson Subah II	Kabupaten Batang	10
4	Cagar Alam Ulolanang Kecubung	Kabupaten Batang	69,7
5	Cagar Alam Bantarbolang	Kabupaten Pemalang	24,5
6	Cagar Alam Curug Bengkawah	Kabupaten Pemalang	1,5
7	Cagar Alam Moga	Kabupaten Pemalang	3,5
8	Cagar Alam Vak 53 Comal	Kabupaten Pemalang	29,1
9	Cagar Alam Guci	Kabupaten Tegal	2
10	Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara	Kabupaten Tegal	6,6
11	Cagar Alam Telaga Renjeng	Kabupaten Brebes	48,5
Jumlah			2.923.3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

- (2) Kawasan Taman Nasional ditetapkan seluas ± 12.135 hektar, meliputi: a) Taman Nasional Gunung Merapi seluas ± 6.410 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan sebagian Sleman (Provinsi DIY); b) Taman Nasional Gunung Merbabu seluas ± 5.725 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang; serta c) Taman Nasional Karimunjawa seluas ± 111.625 hektar berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
- (3) Kawasan pelestarian alam berupa taman hutan raya dan kebun raya, yaitu kawasan Taman Hutan Raya KGPA Mangkunegoro I berada di Berjo-Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluas $\pm 231,3$ hektar, dan Kebun Raya Baturaden di Kabupaten Banyumas seluas ± 150 hektar.
- (4) Pengembangan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi: Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap; Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo; Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar; Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang; Taman Wisata Alam Laut Ujung Negro-Roban di Kabupaten Batang;
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan untuk melindungi 597 benda cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Benda cagar budaya tersebut terdiri dari candi, situs purbakala, benteng kuno, makam kuno, masjid, gereja, klenteng, dan bangunan bersejarah lainnya;
- (6) Daerah pantai berhutan bakau seluas $\pm 10.718,51$ hektar tersebar di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati,

Jejara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang. Kawasan mangrove terluas di pantai selatan berada di Kabupaten Cilacap (77,99%), sedangkan di pantai utara berada di Kabupaten Demak (9,19%).

2.1.2. Kondisi Demografi

Dalam kurun waktu RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 terjadi satu sensus penduduk yaitu Sensus Penduduk 2020. Hasil Sensus Penduduk 2020 sebanyak 36.516.035 jiwa, naik sebesar 4,1 juta jiwa dibandingkan Sensus Penduduk 2010 atau rata-rata sebanyak 400 ribu jiwa setiap tahun. Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 2022 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 sebanyak 37.032.410 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Tengah per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,17 persen meningkat 0,8 persen poin dibandingkan periode 2000-2010 sebesar 0,37 persen.

Tabel 2.6.
Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan per tahun (%)	Rasio jenis kelamin
2018	34.358.487	0,77	98,49
2019	34.552.331	0,76	98,49
2020	36.516.035	1,17	101,15
2021	36.742.501	0,83	101,11
2022	37.032.410	0,81	101,07

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2021-2023

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2018-2022 terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Pada tahun 2022, kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,26 persen. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah Kabupaten Purbalingga dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen, diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan Kabupaten Pemalang 1,11 persen. Selain 19 kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan penduduk di atas Provinsi Jawa Tengah, 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05 persen terdapat di dua kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)
2018-2022

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab cilacap	1.712.871	1.718.824	1.944.857	1.963.824	1.988.622
Kab Banyumas	1.672.817	1.685.078	1.776.918	1.789.630	1.806.013
Kab Purbalingga	921.639	929.403	998.561	1.007.794	1.019.840
Kab Banjarnegara	914.523	918.715	1.017.767	1.026.866	1.038.718
Kab Kebumen	1.190.280	1.192.013	1.350.438	1.361.913	1.376.825
Kab Purworejo	713.761	714.816	769.880	773.588	778.257
Kab Wonosobo	784.353	786.703	879.124	886.613	896.346
Kab Magelang	1.274.881	1.284.627	1.299.859	1.305.512	1.312.573
Kab Boyolali	976.026	980.086	1.062.713	1.070.247	1.079.952
Kab Klaten	1.166.748	1.169.330	1.260.506	1.267.272	1.275.850
Kab Sukoharjo	881.673	887.484	907.587	911.603	916.627
Kab Wonogiri	953.250	954.646	1.043.177	1.049.292	1.057.087
Kab Karanganyar	875.946	882.473	931.963	938.808	947.642
Kab Sragen	884.448	886.196	976.951	983.641	992.243
Kab Grobogan	1.366.498	1.371.423	1.453.526	1.460.873	1.470.150
Kab Blora	858.153	860.957	884.333	886.147	888.224
Kab Rembang	631.293	635.294	645.333	647.766	650.770
Kab Pati	1.248.286	1.253.363	1.324.188	1.330.983	1.339.572
Kab Kudus	858.153	867.154	849.184	852.443	856.472
Kab Jepara	1.236.006	1.252.090	1.184.947	1.188.510	1.192.811
Kab Demak	1.147.557	1.157.421	1.203.956	1.212.377	1.223.217
Kab Semarang	1.036.929	1.049.002	1.053.094	1.059.844	1.068.492
Kab Temanggung	762.776	768.405	790.174	794.403	799.764
Kab Kendal	960.322	966.313	1.018.505	1.025.020	1.033.367
Kab Batang	759.529	764.970	801.718	807.005	813.791

Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kab Pekalongan	888.491	893.290	968.821	976.504	986.455
Kab Pemasang	1.294.639	1.296.559	1.471.489	1.484.209	1.500.754
Kab Tegal	1.431.375	1.433.464	1.596.996	1.608.611	1.623.595
Kab Brebes	1.795.513	1.800.142	1.978.759	1.992.685	2.010.617
Kota Magelang	121.372	121.555	121.526	121.610	121.675
Kota Surakarta	515.865	517.045	522.364	522.728	523.008
Kota Salatiga	190.872	193.231	192.322	193.525	195.065
Kota Semarang	1.779.757	1.806.319	1.653.524	1.656.564	1.659.975
Kota Pekalongan	303.235	305.505	307.150	308.310	309.742
Kota Tegal	248.008	248.635	273.825	275.781	278.299
Jawa Tengah	34.358.487	34.552.531	36.516.035	36.742.501	37.032.410

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak homogen di setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah angka pertumbuhan penduduk. Meskipun angka pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, akan tetapi tidak berarti peningkatan jumlah penduduk juga rendah. Secara absolut pertumbuhan penduduk Jawa Tengah lebih besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Jawa Tengah yang memang sudah sangat besar bila dibandingkan provinsi lain terutama provinsi di luar Pulau Jawa.

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan dan masih harus dihadapi oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Terdapat beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan pembangunan wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Tabel 2.8.
Kepadatan Penduduk Menurut eks-Karesidenan di Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

Tahun	Jawa Tengah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²) eks- karesidenan					
		Banyumas	Kedu	Surakarta	Pekalongan	Pati	Semarang
2018	1.047	1.012	925	1.095	1.199	853	1.197
2019	1.053	1.018	929	1.099	1.203	860	1.209
2020	1.113	1.112	994	1.174	1.320	863	1.214
2021	1.120	1.122	1.000	1.180	1.329	866	1.221
2022	1.129	1.134	1.008	1.189	1.342	870	1.228

Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023)

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km² diikuti eks-Keresidenan Semarang 1.228 jiwa/km², sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km². Eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Untuk kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km². Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km².

Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2018-2022 angka beban ketergantungan di Jawa Tengah fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022 angka beban ketergantungan Jawa Tengah sebesar 43,71 persen, artinya setiap 100

penduduk produktif masih menanggung beban 43 penduduk tidak produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan komposisi usia penduduk, menurunnya angka beban ketergantungan lebih dipengaruhi oleh menurunnya proporsi penduduk usia 0-14 tahun yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 23,02 persen dan terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 21,94 persen. Di sisi lain, proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas berfluktuasi dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun proporsinya.

Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 8,65 persen, meningkat menjadi 8,90 persen pada tahun 2019, menurun pada tahun 2020 menjadi 7,72 persen, namun kemudian terus meningkat menjadi 8,10 persen pada tahun 2021 dan mencapai 8,48 persen pada tahun 2022. Sementara proporsi penduduk usia produktif sendiri juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, proporsinya penduduk usia 15-64 tahun mencapai 68,33 persen, terus meningkat menjadi 69,85 persen pada tahun 2020 dan kemudian menunjukkan penurunan menjadi 69,58 persen pada tahun 2022.

Tabel 2.9.

Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	0-14	15-64 Th +	65 Th+	Angka beban Ketergantungan (Jiwa)
2018	7.909.540	23.476.490	2.972.460	46,35
2019	7.839.940	23.636.420	3.076.170	46,18
2020	8.190.778	24.506.691	2.818.566	43,15
2021	8.148.545	25.619.556	2.924.400	43,42
2022	8.123.792	25.768.441	3.140.177	53,71

Sumber: BPS Jawa Tengah 2022 (Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Hasil SUPAS 2015. Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020, Proyeksi Penduduk Interim 2020 – 2023)

Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat dimaknai sebagai hal yang positif karena hal tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik sehingga penduduk memiliki usia dan harapan hidup yang lebih panjang. Di sisi lain, hal tersebut menjadi tantangan karena jika penduduk usia tua tersebut semakin banyak maka akan semakin meningkatkan angka beban ketergantungan.

Peningkatan proporsi penduduk usia produktif disebut sebagai bonus demografi. Kondisi ini juga merupakan dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Bonus demografi bisa menguntungkan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi ketika sebagian besar penduduk usia produktif tersebut terserap sebagai tenaga kerja. Sebaliknya jika lapangan usaha yang ada saat ini ternyata tidak mampu menyerap sebagian besar dari penduduk usia produktif tersebut, maka justru akan mendorong peningkatan instabilitas sosial dan politik. Bonus demografi yang terjadi di Jawa Tengah sepertinya mulai berakhir. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia 65

tahun ke atas dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan 0,38 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini perlu segera diwaspadai oleh pemerintah dengan mendorong peningkatan kualitas penduduk usia produktif yang saat ini proporsinya masih sangat besar. Jika penduduk usia produktif memiliki kualitas yang baik, maka akan mampu menanggung beban ketergantungan yang kemungkinan akan semakin besar di masa mendatang.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kemiskinan

Kondisi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2018 – 2019 menurun dari 11,32% (3.897,20 ribu orang) menjadi 10,58% (3.679,40 ribu orang). Namun mengalami peningkatan pada periode Maret 2020 menjadi 11,41% (3.980,90 ribu orang) dan mengalami peningkatan lagi pada periode September 2020 menjadi 11,84% (4.119,93 ribu orang). Kenaikan tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Seiring dengan upaya intervensi pemerintah kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 11,25 persen pada September 2021 menjadi 10,98 persen pada September 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 75,78 ribu orang dari 3.934,01 ribu orang (September 2021) menjadi 3.858,23 ribu orang (September 2022). Periode September 2021 - September 2022, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 10,16% menjadi 10,02% atau bertambah sebanyak 5,08 ribu orang. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 12,44% menjadi 12,05% atau berkurang sebanyak 80,86 ribu orang.

Tabel 2.10.

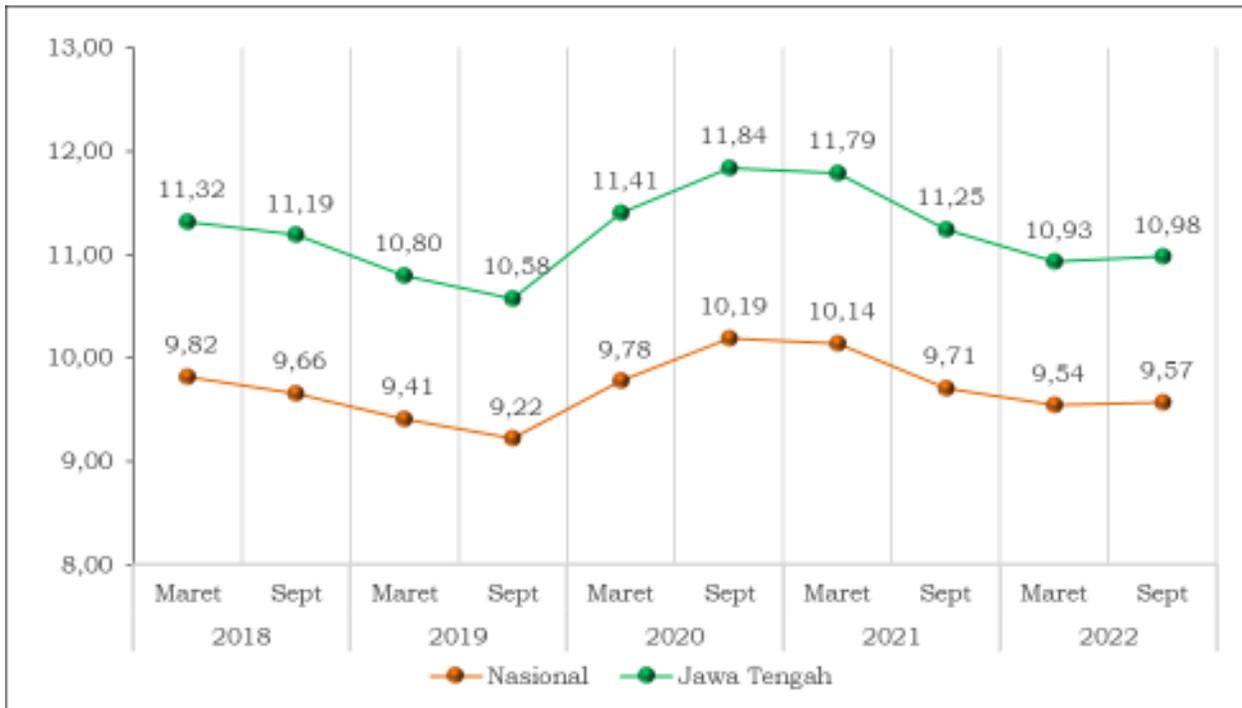
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Maret 2018 – September 2022

Tahun	Bulan	Penduduk Miskin					
		(ribu orang)			(%)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2018	Maret	1.716,16	2.181,04	3.897,20	9,73	12,99	11,32
	September	1.709,56	2.157,86	3.867,42	9,67	12,8	11,19
2019	Maret	1.633,96	2.109,26	3.743,23	9,20	12,48	10,80
	September	1.602,26	2.077,15	3.679,40	8,99	12,26	10,58
2020	Maret	1.805,65	2.175,25	3.980,90	10,09	12,80	11,41
	September	1.890,49	2.229,44	4.119,93	10,57	13,20	11,84
2021	Maret	1.908,29	2.201,44	4.109,73	10,58	13,07	11,79
	September	1.847,09	2.086,92	3.934,01	10,16	12,44	11,25
2022	Maret	1.818,25	2.013,20	3.831,44	9,92	12,04	10,93
	September	1.852,17	2.006,06	3.858,23	10,02	12,05	10,98

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Maret 2018 - September 2022

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun

terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

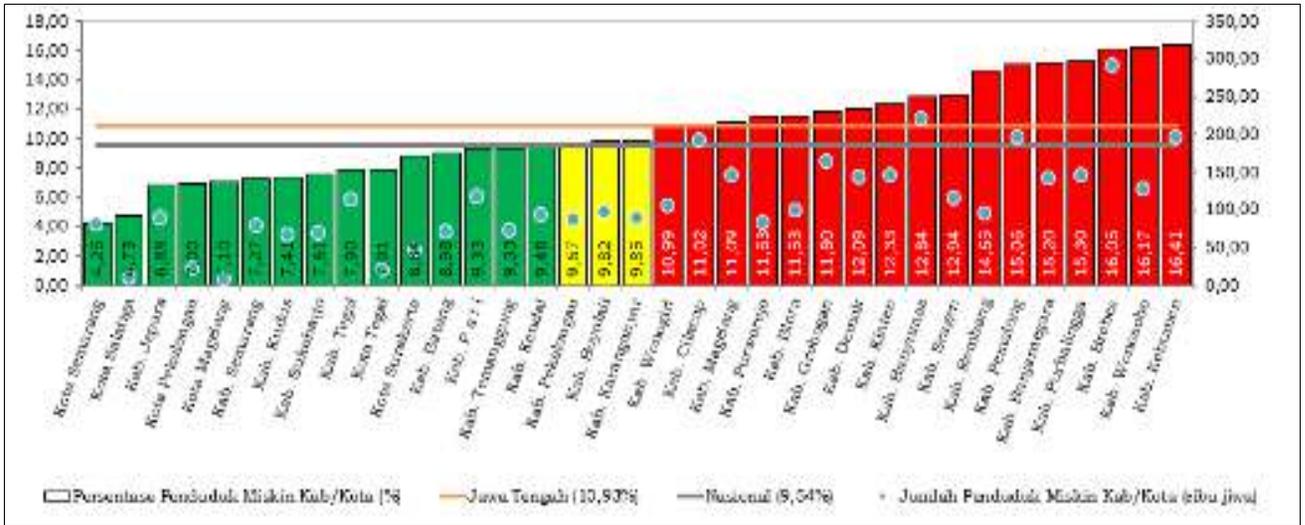


Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.2.
Persentase Kemiskinan Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2018 – 2022

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota berdasarkan data per Maret tahun 2022 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 17 kabupaten meliputi Kabupaten Magelang, Blora, Purworejo, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Brebes, Wonosobo, Kebumen, Wonogiri dan Cilacap;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 3 kabupaten meliputi Kabupaten Karanganyar, Boyolali dan Pekalongan;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kendal.

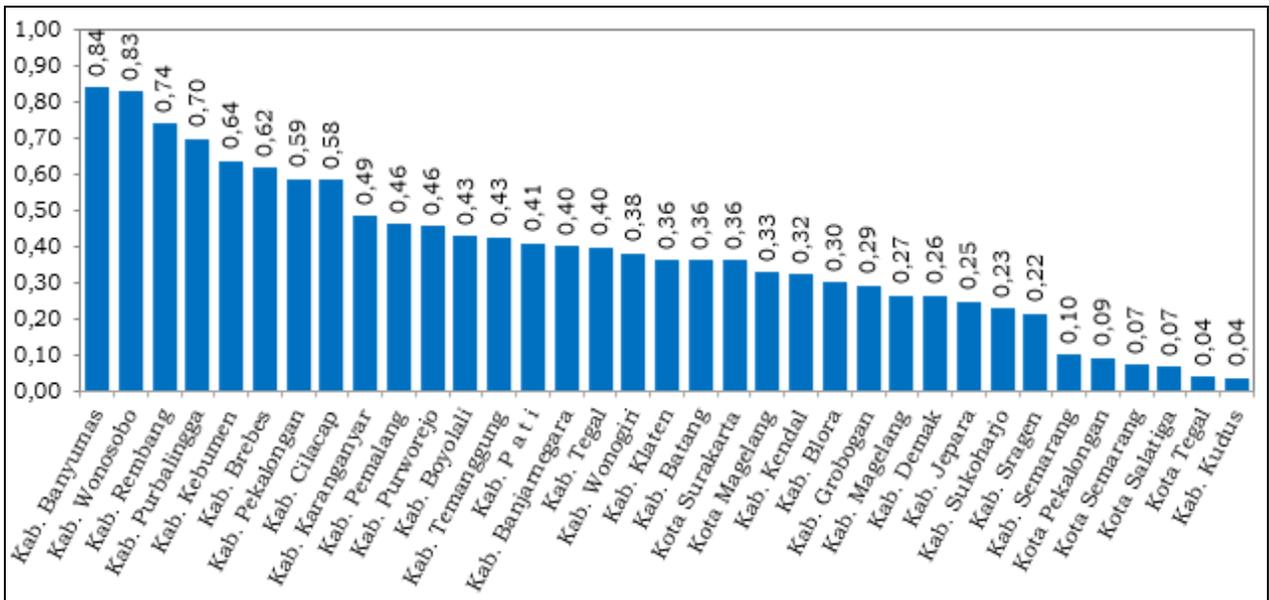


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.3.

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per Maret 2022

Dilihat dari rata-rata kinerja penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada kurun waktu lima tahun (2018-2022), kabupaten dengan kinerja yang paling tinggi adalah Kabupaten Banyumas yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,84 persen. Rata-rata kinerja tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2018-2022 sebagaimana gambar berikut.



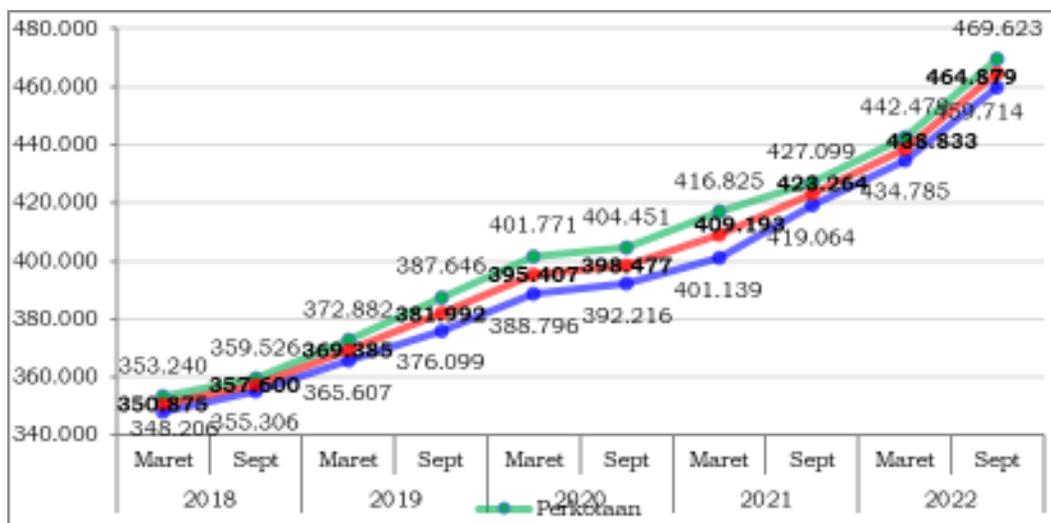
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018-2022

Gambar 2.4.

Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (%)

Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2022 sebesar Rp. 464.879 per kapita per bulan, meningkat 9,83 persen dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar Rp. 423.264 per kapita per bulan.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan periode September 2022 sebesar Rp. 469.623 per kapita per bulan atau naik 9,96 persen dari kondisi September 2021 yang sebesar Rp. 427.099 per kapita per bulan. Sedangkan Garis Kemiskinan di perdesaan periode September 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 9,70 persen menjadi sebesar Rp. 459.714 per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar Rp. 419.064 per kapita per bulan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2022

Gambar 2.5.

Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Garis kemiskinan dipengaruhi komponen bahan makanan dan non makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Terdapat tiga komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan pada periode September 2022 baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Komoditi lainnya relatif berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik.

Tabel 2.11.

Komoditi Makanan dan Bukan Makanan yang Memberi Pengaruh Besar Pada Kenaikan Garis Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2022

Perkotaan		Perdesaan	
Komoditi	Kontribusi (%)	Komoditi	Kontribusi (%)
Makanan	74,66	Makanan	75,79
Beras	18,16	Beras	19,58
Rokok kretek filter	9,55	Rokok kretek filter	8,76
Daging ayam ras	4,07	Daging ayam ras	4,29
Telur ayam ras	4,01	Telur ayam ras	4,12
Tempe	2,70	Tempe	2,78
Gula pasir	2,65	Tahu	2,54
Tahu	2,55	Gula pasir	2,44
Kue basah	2,54	Mie instan	2,40
Mie instan	2,52	Bawang Merah	2,37

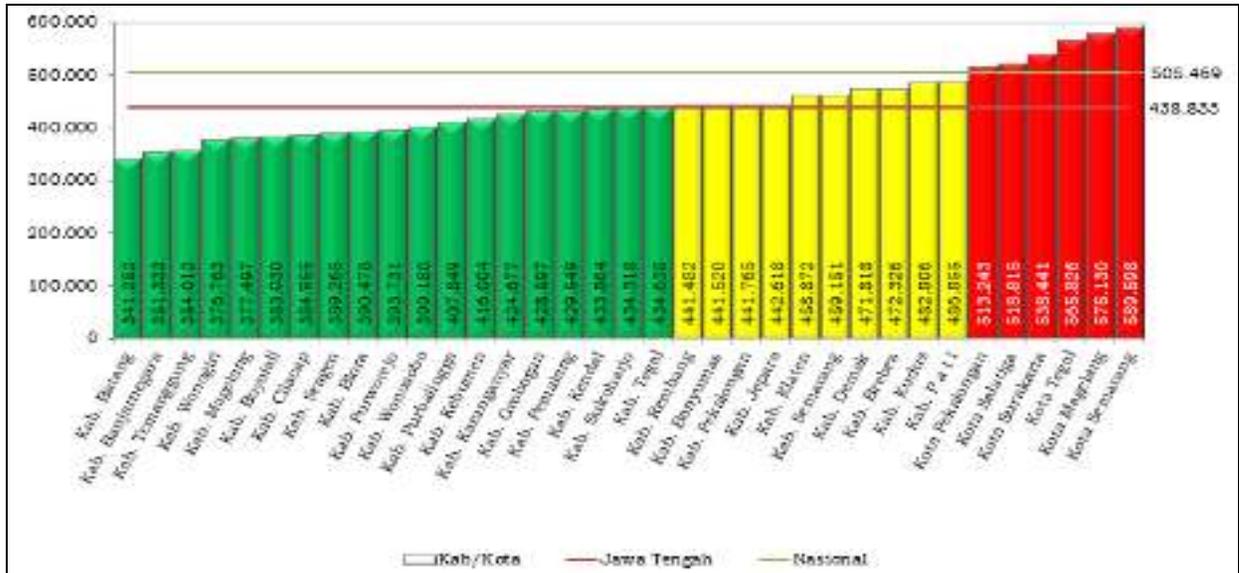
Perkotaan		Perdesaan	
Komoditi	Kontribusi (%)	Komoditi	Kontribusi (%)
Bawang Merah	2,24	Cabe rawit	2,18
Lainnya	23,67	Lainnya	24,34
Bukan Makanan	25,34	Bukan Makanan	24,21
Perumahan	7,18	Perumahan	8,31
Bensin	4,73	Bensin	3,77
Listrik	2,30	Listrik	1,35
Pendidikan	2,00	Perlengkapan mandi	1,21
Perlengkapan mandi	1,26	Pendidikan	1,15
Pajak kendaraan bermotor	0,68	Kayu bakar	0,78
Kesehatan	0,65	Sabun Cuci	0,77
Lainnya	6,55	Lainnya	6,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 19 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Magelang, Wonogiri, Boyolali, Sragen, Cilacap, Blora, Wonosobo, Purworejo, Purbalingga, Kebumen, Karanganyar, Pemalang, Grobogan, Tegal, Kendal dan Sukoharjo
2. Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Rembang, Semarang, Pekalongan, Banyumas, Jepara, Klaten, Demak, Brebes, Kudus dan Pati;
3. Garis Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis kemiskinan provinsi dan nasional, terdapat di 6 kota, yaitu Kota Pekalongan, Salatiga, Surakarta, Tegal, Magelang dan Semarang.

Kabupaten/kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Batang sebesar 341.252 rupiah per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Semarang sebesar 589.598 rupiah per kapita per bulan.

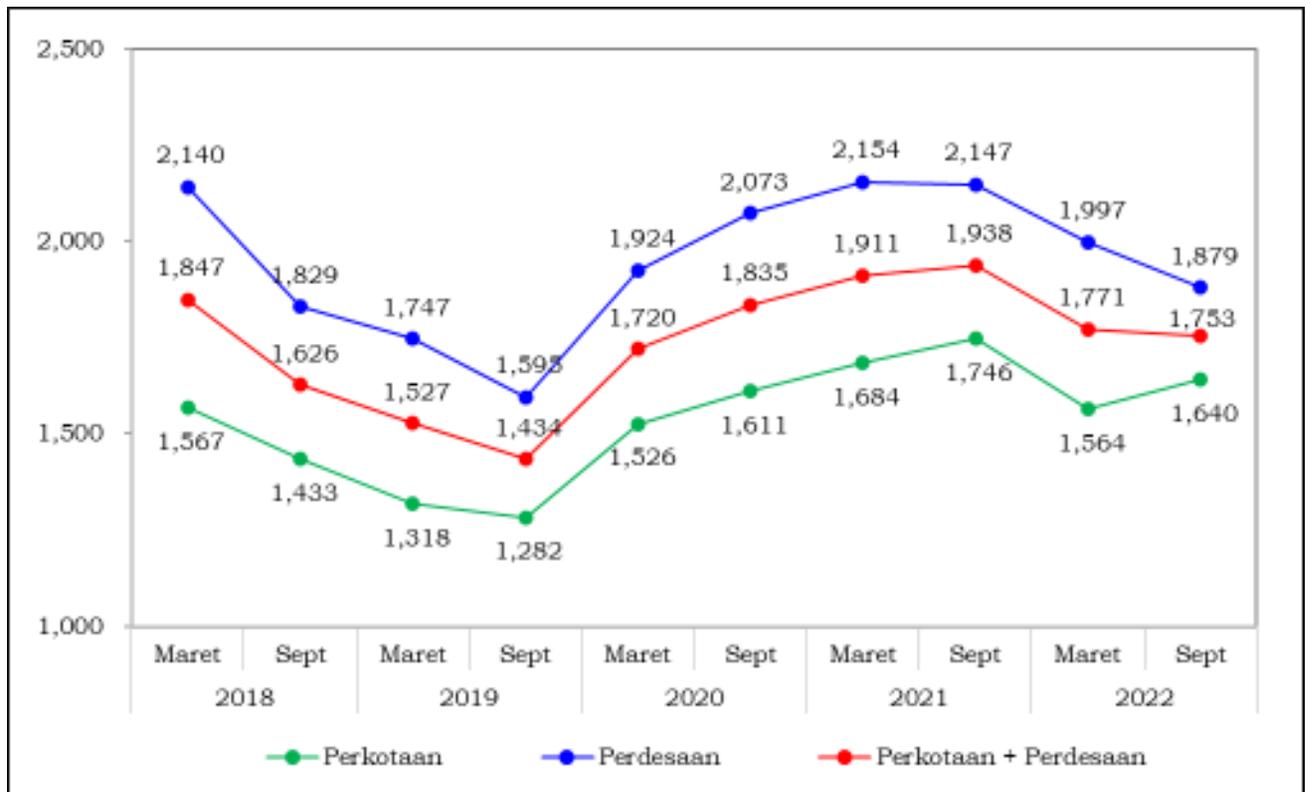


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.6.

Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018 – 2019 menurun dari 1,847 menjadi 1,434 pada September 2019, namun pada September 2020 meningkat menjadi 1,835 dan meningkat kembali menjadi 1,938 pada September 2021 (naik 0,103 dibandingkan September 2020). Pada September 2022, P1 Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 1,753 (turun sebesar 0,185 dibandingkan dengan September 2021). Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2022 di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan sebesar 1,640 dari 1,746 (turun 0,106 dibandingkan September 2021) sedangkan di perdesaan sebesar 1,879 dari 2,147 (turun 0,268 dibandingkan September 2021). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

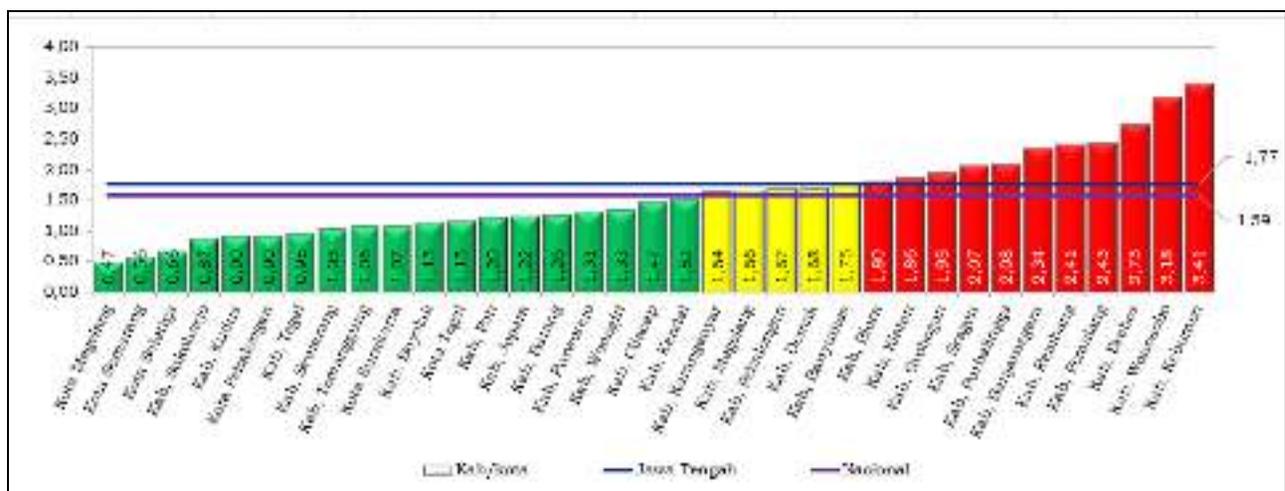


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018 – 2022 (September)

Gambar 2.7.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2022, apabila dibandingkan dengan P1 Provinsi sebesar 1,77 dan P1 Nasional sebesar 1,59 diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi sebesar 3,41 dan Kota Magelang terendah sebesar 0,47.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.8.

Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

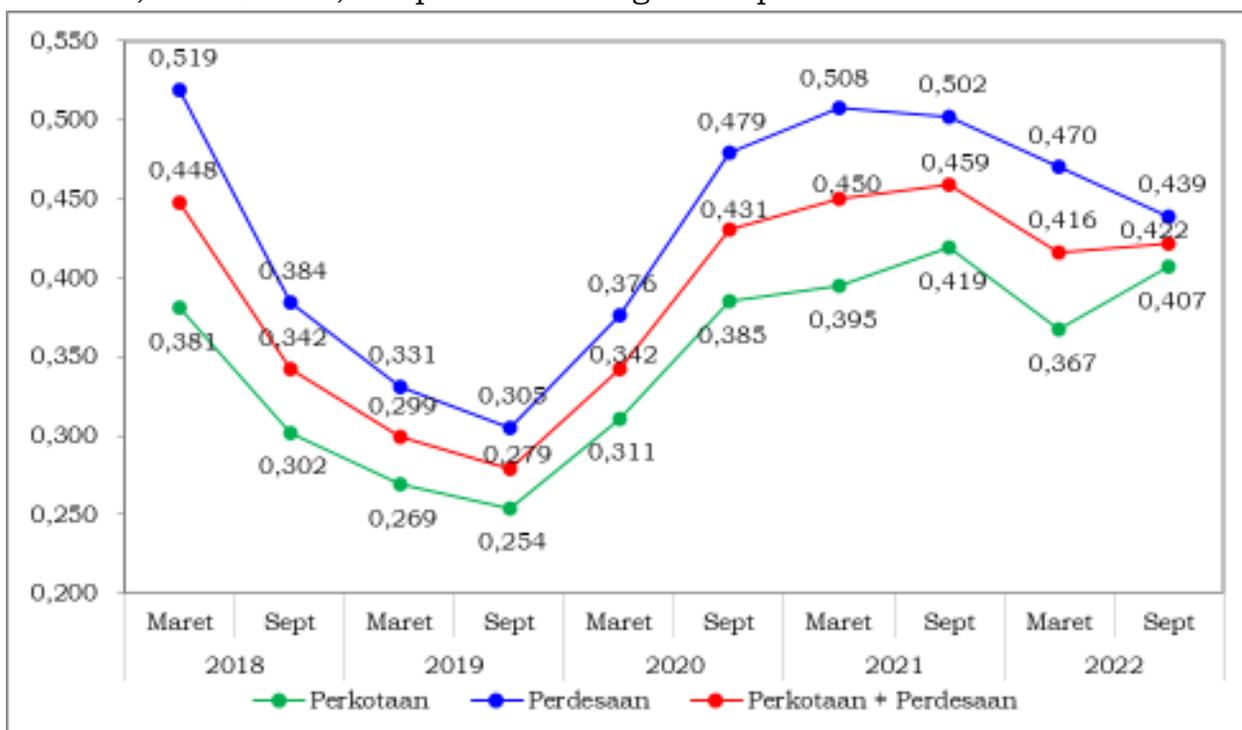
Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi Kabupaten

Purbalingga, Sragen, Wonosobo, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Brebes, Kebumen, Klaten, Blora dan Grobogan;

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas nasional dan dibawah provinsi, sebanyak 5 kabupaten yaitu Kabupaten Demak, Banyumas, Pekalongan, Karanganyar dan Magelang;
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 19 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Batang.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 – 2019 menurun dari 0,448 menjadi 0,279, namun meningkat pada September 2020 menjadi 0,431 dan meningkat kembali pada September 2021 menjadi 0,459. Periode September 2022, P2 Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 0,422 (turun sebesar 0,037 dibandingkan dengan September 2021). Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2022 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Periode September 2022, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk daerah perkotaan sebesar 0,407 turun 0,012 poin dibandingkan September 2021. Sedangkan pada periode yang sama (P2) untuk daerah perdesaan mencapai sebesar 0,439 turun 0,063 poin dibandingkan September 2021.

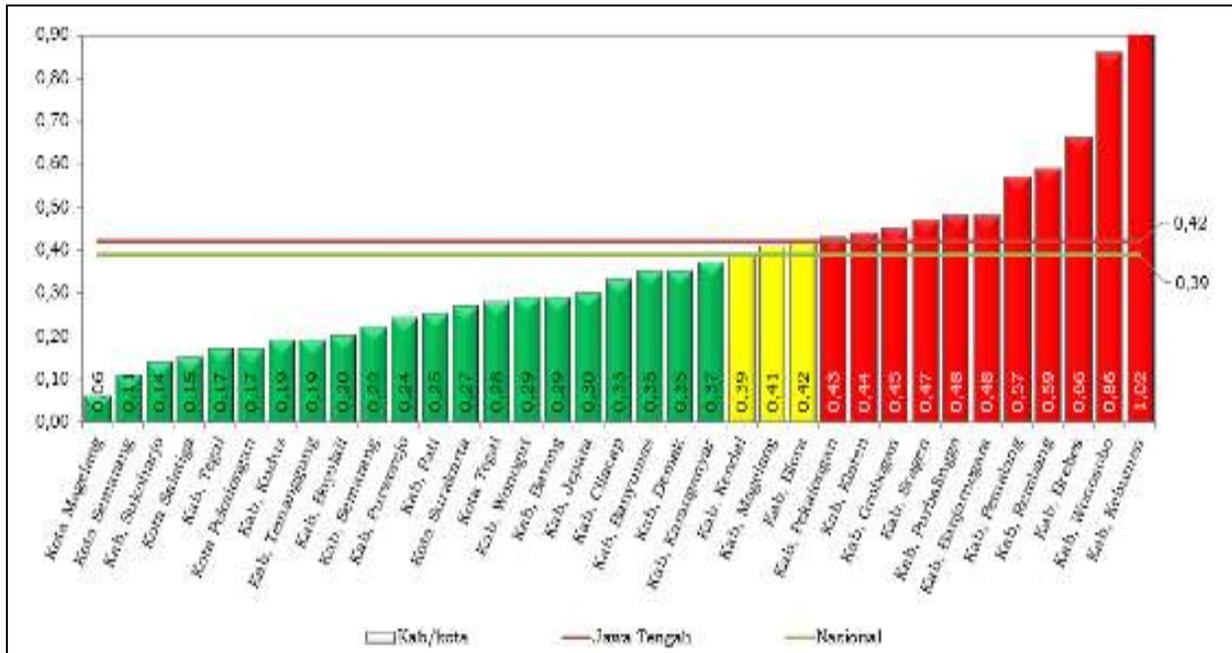


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.9.
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota pada periode Maret 2022, apabila dibandingkan dengan P2 Provinsi sebesar 0,42 dan P2 Nasional sebesar 0,39 diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki Indeks

Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 1,02 dan Kota Magelang terendah sebesar 0,06.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.10.

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi, Kabupaten Purbalingga, Grobogan, Klaten, Pekalongan, Sragen, Wonosobo, Rembang, Brebes, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumehen;
2. Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah nasional dan diatas provinsi, sebanyak 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Magelang, Blora dan Kendal;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kabupaten Jepara, Pati, Semarang, Tegal, Sukoharjo, Kudus, Purworejo, Cilacap, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, Temanggung, Batang, Banyuwangi dan Demak.

Jika dibandingkan dengan Provinsi se Jawa-Bali, perubahan penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode September 2021 – September 2022 sebesar 0,27 persen atau menduduki urutan ke-1 dari 7 Provinsi se Jawa-Bali.

Tabel 2.12.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun Periode September 2021 – September 2022

No.	Provinsi	Periode				Perubahan Kenaikan	
		September 2021		September 2022		(Ribun Org)	(%)
		(Ribun Org)	(%)	(Ribun Org)	(%)		
1	JAWA TENGAH	3.934,01	11,25	3.858,23	10,98	-75,78	-0,27

No.	Provinsi	Periode				Perubahan Kenaikan	
		September 2021		September 2022			
		(Ribuan Org)	(%)	(Ribuan Org)	(%)	(Ribuan Org)	(%)
2	JAWA TIMUR	4.259,60	10,59	4.236,51	10,49	-23,09	-0,10
3	BANTEN	852,28	6,50	829,66	6,24	-22,62	-0,26
4	DI YOGYAKARTA	474,49	11,91	463,63	11,49	-10,86	-0,42
5	BALI	211,46	4,72	205,36	4,53	-6,10	-0,19
6	DKI JAKARTA	498,29	4,67	494,93	4,61	-3,36	-0,06
7	JAWA BARAT	4.004,86	7,97	4.053,62	7,98	48,76	0,01

Sumber: BPS, 2022

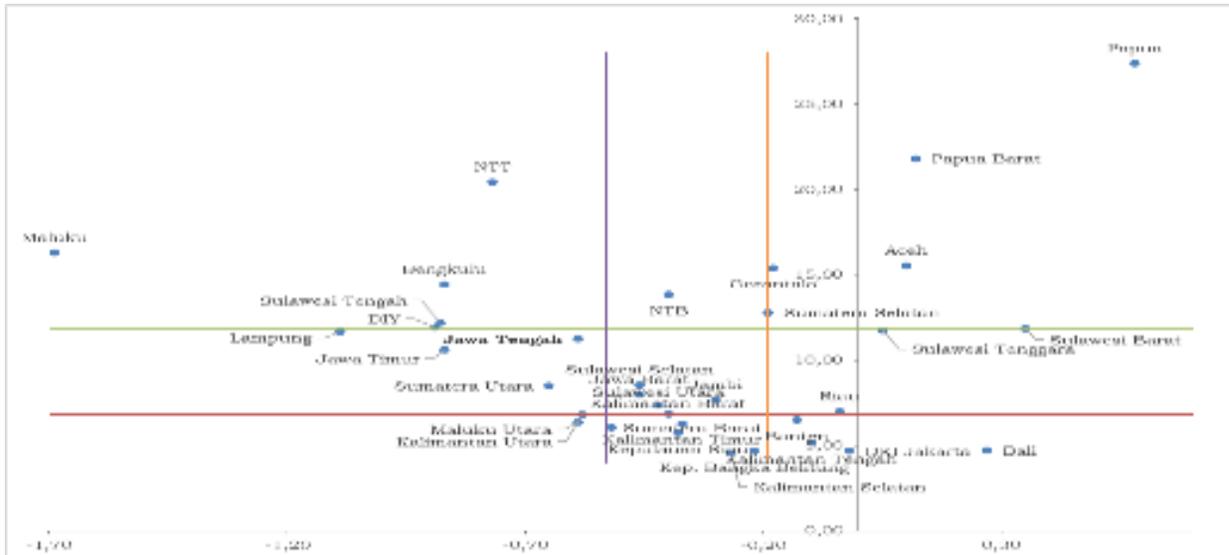
Dengan membandingkan kondisi kemiskinan pada wilayah yang setara dengan Provinsi Jawa Tengah dari variabel persentase penduduk miskin tahun 2021 pada rentang persentase 6,84 sampai dengan 11,86 persen, sebanyak 11 provinsi berada kelompok yang sama dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 9,25 persen. Dalam wilayah yang setara persentase penduduk miskin Jawa Tengah lebih tinggi 2,00 poin dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara. Sedangkan jika dilihat dari variabel perubahan persentase penduduk miskin tahun 2020-2021 pada rentang -0,53 sampai dengan -0,19 poin, sebanyak 10 provinsi berada dalam wilayah yang setara dengan Jawa Tengah, dengan rata-rata perubahan sebesar -0,86 poin. Dari variabel ini, angka Jawa Tengah tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang setara atau berada lebih rendah 0,27 poin di bawah rata-rata. Dan jika membandingkan antara persentase kemiskinan dan perubahan persentase kemiskinan, ada 3 provinsi yang setara dengan Jawa Tengah, yaitu Lampung, Sumatra Utara dan Jawa Timur.

Tabel 2.13.

Persentase Kemiskinan Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Kemiskinan Tahun 2021 – 2022 Di Wilayah Setara

Provinsi	Persentase Kemiskinan (%)	Perubahan Persentase Kemiskinan (poin)	Provinsi
Kalimantan Barat	6,84	-1,69	Maluku
Riau	7,00	-1,09	Lampung
Sulawesi Utara	7,36	-0,89	DIY
Jambi	7,67	-0,88	Sulawesi Tengah
Jawa Barat	7,97	-0,87	Bengkulu
Sumatera Utara	8,49	-0,87	Jawa Timur
Sulawesi Selatan	8,53	-0,77	NTT
Jawa Timur	10,59	-0,65	Sumatera Utara
Jawa Tengah	11,25	-0,59	Jawa Tengah
Lampung	11,67	-0,59	Maluku Utara
Sulawesi Tenggara	11,74	-0,58	Kalimantan Utara
Sulawesi Barat	11,85		
Rata-rata	9,25	-0,86	Rata-rata

Sumber: BPS, 2022(hasil analisis)



Sumber: BPS, 2021 (hasil analisis)

Gambar 2.11.

Posisi Provinsi Jawa Tengah Dalam Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 – 2022 dengan Wilayah Setara

Selain kemiskinan, mandatori kebijakan pemerintah pusat melalui arahan/instruksi presiden untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024. Persentase penduduk miskin ekstrem Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 berada di atas nasional sedangkan pada tahun 2022 berada di bawah nasional. Persentase penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak 0,31 persen dari 2,28 persen pada tahun 2021 menjadi 1,97 persen pada tahun 2022. Secara absolut, jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah berkurang sebanyak 105,972 ribu orang dari 795,506 ribu orang pada tahun 2021 menjadi 689,714 ribu orang pada tahun 2022.

Tabel 2.14.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 - 2022

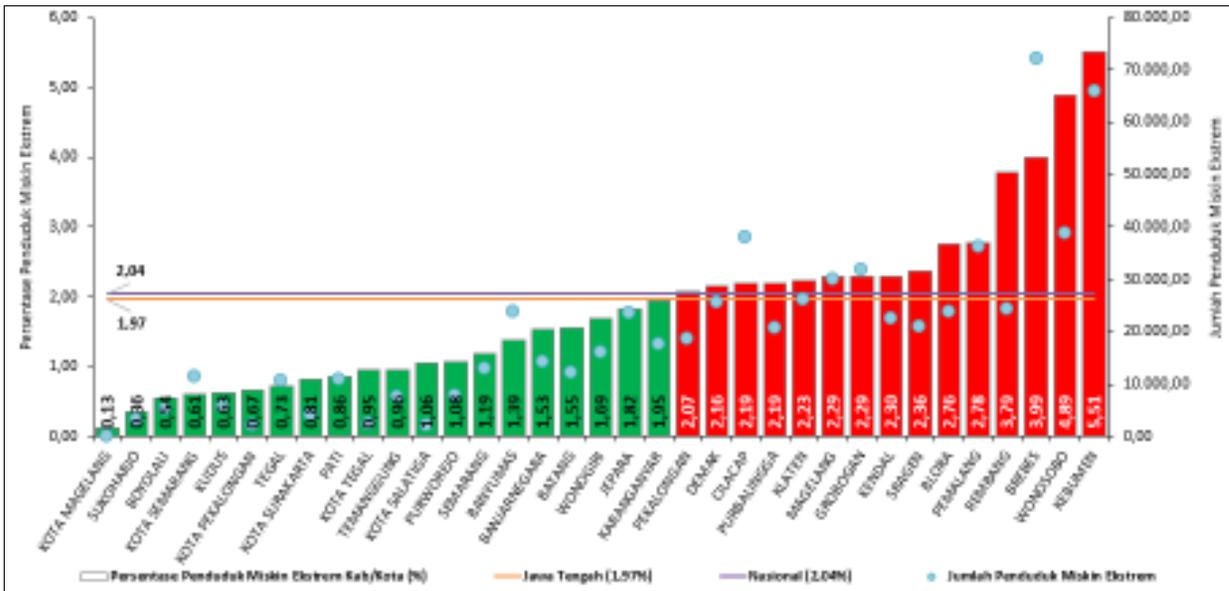
Provinsi	Persentase Kemiskinan Ekstrem 2021	Persentase Kemiskinan Ekstrem 2022	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 2021 (ribu jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem 2022 (ribu jiwa)
JAWA TENGAH	2,28	1,97	795,506	689,714
NASIONAL	2,14	2,04	5.800,05	5.590,72

Sumber: BPS, 2022

Persebaran penduduk miskin ekstrem di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional dan kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin ekstrem di kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di atas provinsi dan nasional sebanyak 15 kabupaten meliputi Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Brebes, Rembang, Pemalang, Blora, Sragen, Kendal, Grobogan, Magelang, Klaten, Purbalingga, Cilacap, Demak dan Pekalongan
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin ekstrem di bawah provinsi dan nasional sebanyak 20 kabupaten/kota meliputi Kabupaten

Karanganyar, Jepara, Wonogiri, Batang, Banjarnegara, Banyumas, Semarang, Purworejo, Temanggung, Pati, Tegal, Kudus, Boyolali, Sukoharjo, Kota Salatiga, Tegal, Surakarta, Pekalongan, Semarang dan Magelang.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.12.

Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022

Pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 telah menetapkan kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024.

Tabel 2.15.

Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Tengah Tahun 2022-2024

NO	TAHUN	KABUPATEN/KOTA PRIORITAS	JUMLAH
1	2022	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes	19
2	2023-2024	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Magelang dan Kota Salatiga	35

Sumber: BPS, 2022

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro salah satunya dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Kemudian adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian.

Pembangunan ekonomi Jawa Tengah semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan mulai dari Tahun 2016-2019, dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi covid-19 yang juga dialami oleh semua daerah. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah turun sebesar minus 2,65 persen, penurunan juga terlihat pada PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Tahun 2021 dan Tahun 2022 perkembangan ekonomi sudah semakin membaik seiring menurunnya angka kasus covid-19 dan banyaknya masyarakat yang sudah vaksin, sehingga mobilitas masyarakat dapat terus meningkat. Capaian Tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,31 persen, meningkat dari capaian Tahun 2021 yang tumbuh sebesar 3,33 persen. Capaian ini sudah mendekati capaian sebelum pandemi yaitu sebesar 5,36 persen Tahun 2019.

Tabel 2.16.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2022

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 (Miliar Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi Jateng (%) (c-to-c)	Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%) (c-to-c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2016	849.099	1.087.316	5,25	5,03
2.	2017	893.750	1.172.794	5,26	5,07
3.	2018	941.091	1.268.261	5,30	5,17
4.	2019	991.516	1.360.960	5,36	5,02
5.	2020	965.225	1.347.922	-2,65	-2,07
6.	2021	997.345	1.419.986	3,33	3,70
7.	2022	1.050.322	1.560.899	5,31	5,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada Gambar 2.13 dapat dilihat grafik pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2011 – 2022. Pada Tahun 2011 – 2013 capaian ekonomi Jawa Tengah berada di bawah capaian nasional. Kemudian pada Tahun 2014 – 2019 capaian ekonomi Jawa Tengah meningkat dan lebih tinggi dari capaian nasional. Tahun 2020 ekonomi Jawa Tengah turun akibat terjadi pandemi covid-19 mencapai minus 2,65 persen dibawah capaian nasional sebesar minus 2,07 persen. Tahun 2021 ekonomi mulai membaik dan mengalami perbaikan (recovery) tumbuh sebesar 3,33 persen (nasional 3,70 persen). Tahun 2022 kembali meningkat baik Jawa Tengah dan Nasional sama-sama tumbuh sebesar 5,31 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan Tahun 2022 meliputi Transportasi dan Pergudangan sebesar 73,03 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,99 persen dan Jasa Lainnya sebesar 11,79 persen. Secara struktur, perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 33,93 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,59 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,53 persen; dan Konstruksi sebesar 11,03 persen.

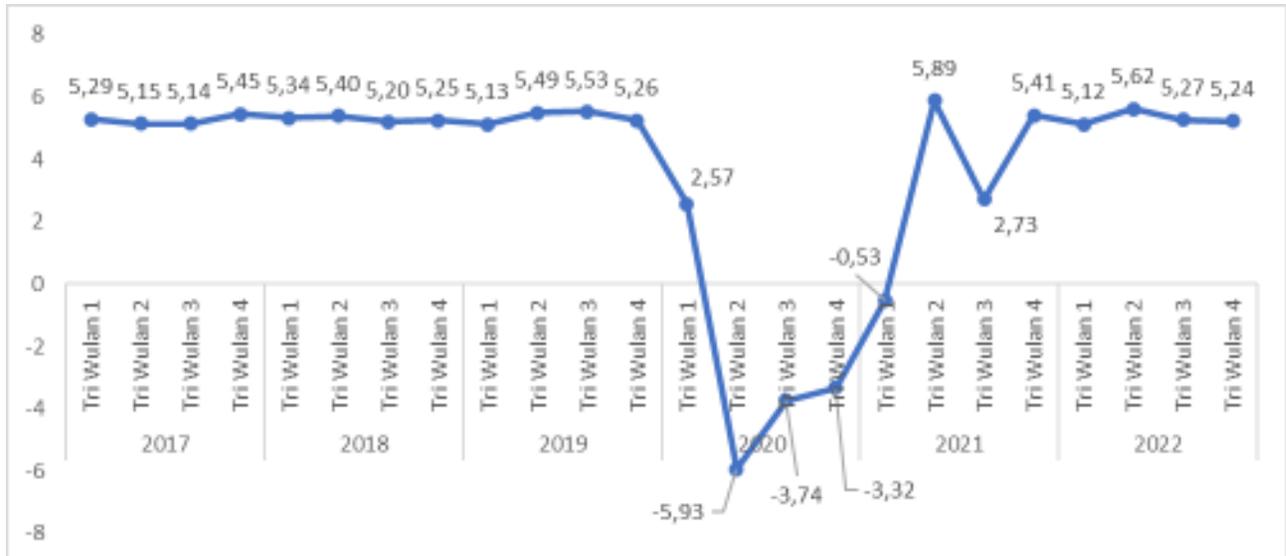


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.13.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional (c-to-c),
Tahun 2011 – 2022 (Persen)

Pertumbuhan ekonomi dilihat secara year on year (yoy) yang mana memperbandingkan pertumbuhan PDRB tahun sekarang (t) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (t-1) sering disebut dengan istilah laju pertumbuhan PDRB dalam setahun. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan ke IV-2022 tumbuh sebesar 5,24 persen (yoy), menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,27 persen (yoy) dan dibawah capaian perekonomian nasional sebesar 5,31 persen (yoy). Gambaran lebih detail terlihat secara year on year (y-on-y) dimana capaian ekonomi Jawa Tengah yang sempat resesi dengan pertumbuhan negative selama lebih dari dua triwulan berturut-turut yaitu pada triwulan II

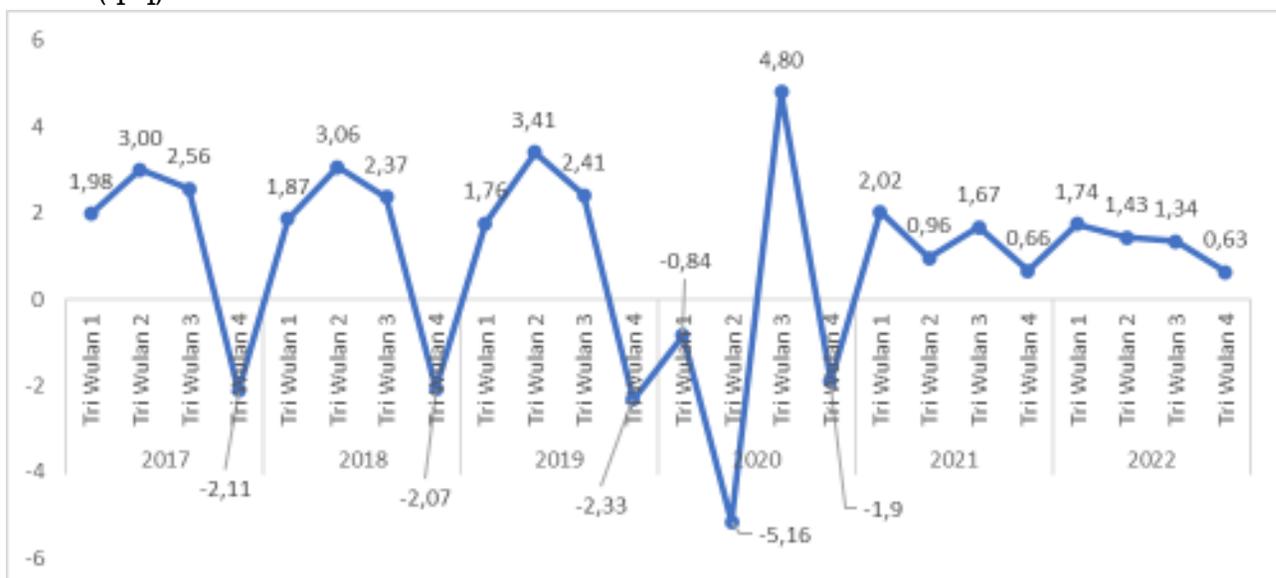
Tahun 2020 sampai dengan triwulan I Tahun 2021 karena pandemi covid-19 dan kemudian mulai bangkit pada Triwulan II-2021 sampai sekarang Triwulan IV-2022, capaian nya sudah menyamai capaian sebelum pandemi yaitu Tahun 2019. Capaian pada Triwulan IV 2022 ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,01 persen (yoy). Pertumbuhan positif tersebut mengidentifikasi pemulihan ekonomi Jawa Tengah masih terus berlanjut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.14.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (y-on-y) Tahun 2017-2022 (Persen)

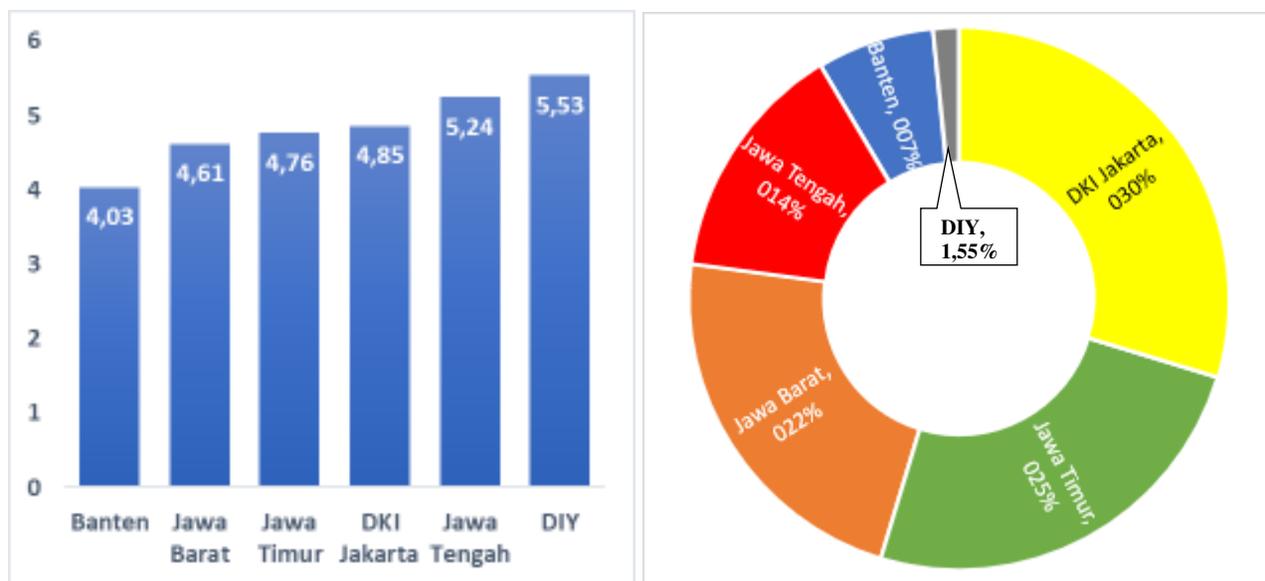
Pertumbuhan ekonomi dilihat secara quarter-to-quarter (q-to-q) dimana memperbandingkan pertumbuhan PDRB kuartal tahun sekarang (t) dibandingkan dengan kuartal tahun sebelumnya (t-1) sering disebut dengan istilah laju pertumbuhan PDRB dalam satu kuartal. Secara triwulanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada Triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 0,63 persen (qtq), melambat dibandingkan Triwulan III-2022 sebesar 1,34 persen (qtq).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.15.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (q-to-q), Tahun 2017 -2022 (Persen)

Jika dibandingkan dengan provinsi lain se pulau jawa, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (Triwulan IV 2022 secara yoy) rata-rata lebih tinggi daripada provinsi lain di Jawa, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jawa Tengah tumbuh 5,24 persen (yoy) dan DIY tumbuh 5,53 persen. Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,33 persen terhadap perekonomian Jawa. Jawa Tengah masih menjadi penyumbang keempat terbesar nasional maupu pulau jawa setelah provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat.



Sumber: BPS, diolah, 2023

Gambar 2.16.

Laju Pertumbuhan PDRB dan Distribusi PDRB Menurut Provinsi Sepulau Jawa Pada Triwulan IV-2022 (yoy, persen)

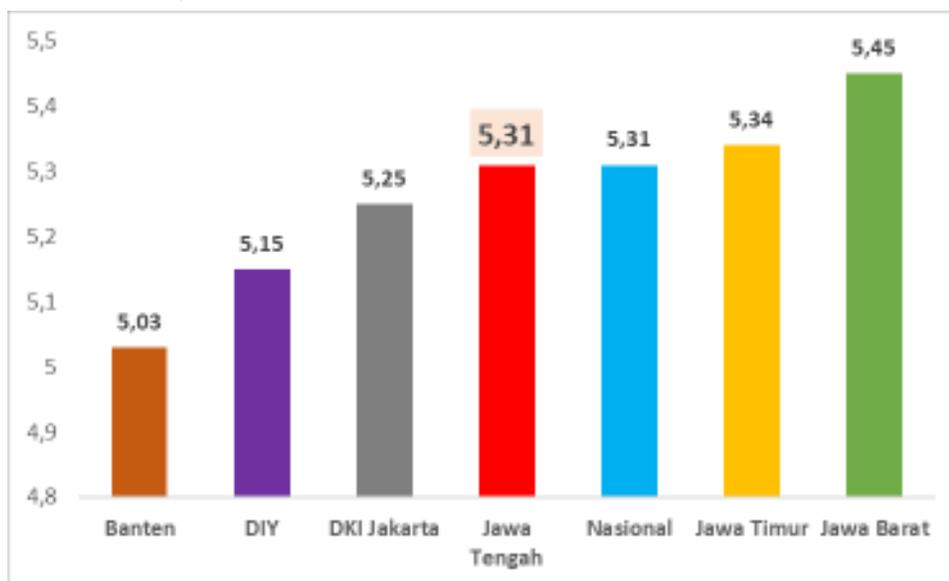
Perbandingan Pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertumbuhan c-to-c se pulau jawa pada Tahun 2022 tertinggi di capai oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 5,45 persen (c-to-c) dan paling rendah oleh Propinsi Banten sebesar 5,03 persen (c-to-c). Jika dibandingkan dengan capaian Nasional (5,31 persen) terdapat dua provinsi di pulau jawa yang diatas capaian nasional dan tiga provinsi di bawah capaian nasional. Sedangkan provinsi jawa tengah memiliki capaian yang sama dengan nasional.

Tabel 2.17.

Pertumbuhan Ekonomi (c-to-c) Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2018 -2022 (%)

No	Provinsi	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Banten	5,98	5,90	-3,38	4,44	5,03
2	Jawa Barat	5,64	5,07	-2,44	3,74	5,45
3	DKI Jakarta	6,17	5,96	-2,36	3,56	5,25
4	Jawa Tengah	5,30	5,40	-2,65	3,32	5,31
5	DIY	6,20	6,60	-2,69	5,53	5,15
6	Jawa Timur	5,65	5,54	-2,39	3,57	5,34
7	Rata2 Jawa	5,82	5,75	-2,65	4,03	5,26
8	Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber: BPS, 2022



Sumber: BPS, diolah, 2022

Gambar 2.17.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Se Pulau Jawa dan Nasional Pada Tahun 2022 (c-to-c, persen)

Pertumbuhan ekonomi dapat tergambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Perkembangan ekonomi Jawa Tengah dari sisi lapangan usaha pada tahun 2022 bersumber dari 3 (tiga) lapangan usaha (LU) yaitu transportasi dan pergudangan (73,03 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (16,99 persen), serta jasa lainnya (11,79 persen). Sementara, tiga LU utama lainnya seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan konstruksi tetap tumbuh meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.18.

Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	121.554,48	123.150,02	126.110,20	127.128,60	130.801,32
B. Pertambangan dan Penggalian	20.855,98	21.557,12	21.385,27	22.326,16	20.942,66
C. Industri Pengolahan	322.143,29	338.470,98	325.617,67	333.156,60	346.169,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.028,92	1.085,27	1.104,73	1.170,51	1.214,86
E. Pengadaan Air, Pengelo-laan Sampah, Limbah & Daur Ulang	658,88	687,51	703,22	744,50	752,41
F. Konstruksi	98.393,74	103.262,32	99.380,71	106.701,15	108.657,61
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	136.581,24	144.729,67	139.233,05	147.313,38	153.670,44
H. Transportasi dan Pergudangan	32.121,01	34.848,59	23.564,63	24.342,19	42.108,26
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.660,79	33.442,26	30.773,74	32.595,12	38.132,45

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
J. Informasi dan Komunikasi	45.500,91	50.789,28	58.739,21	62.288,94	63.846,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	25.635,54	26.533,03	27.106,15	27.555,91	27.690,76
L. Real Estate	17.797,50	18.782,40	18.730,35	19.133,49	20.107,09
M,N. Jasa Perusahaan	3.609,30	3.989,82	3.702,92	3.816,62	4.051,19
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24.137,86	25.033,50	24.687,07	24.528,68	24.915,02
P. Jasa Pendidikan	36.286,32	39.040,75	38.948,07	38.974,99	39.589,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.187,91	8.738,37	9.454,46	9.471,68	9.709,66
R,S,T,U. Jasa lainnya	15.937,47	17.375,66	15.984,26	16.068,57	17.963,16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	941.091,14	991.516,54	965.225,71	997.317,10	1.050.322,13

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Jika dilihat dari nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, diketahui bahwa nilai PDRB ADHK tahun 2021 sebesar 997.317,10 miliar rupiah meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 965.225,71 miliar rupiah. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK mencapai sebesar 1.050.322,13 miliar rupiah.

Tabel 2.19.

Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	178.352,88	184.130,94	192.610,19	196.876,47	211.244,85
B. Pertambangan dan Penggalan	32.321,26	33.727,39	33.082,14	36.660,13	37.723,92
C. Industri Pengolahan	436.424,70	468.374,05	464.609,13	487.445,10	529.612,56
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.225,34	1.294,44	1.309,17	1.377,81	1.438,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	743,87	790,46	855,45	915,06	938,29
F. Konstruksi	136.153,70	147.205,58	142.205,67	158.056,34	172.199,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	172.944,07	187.064,45	181.860,78	195.399,04	212.208,01
H. Transportasi dan Pergudangan	39.583,09	43.834,35	30.262,62	32.092,97	59.263,55
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.498,49	43.634,69	40.359,71	43.513,47	52.883,12
J. Informasi dan Komunikasi	43.963,89	49.587,27	57.428,84	60.910,56	62.593,23
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	37.488,38	39.403,66	40.267,89	42.959,77	46.920,61

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
L. Real Estate	21.450,33	22.920,25	23.010,53	23.741,78	25.420,79
M,N. Jasa Perusahaan	5.021,62	5.712,08	5.417,73	5.650,01	6.259,70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	34.653,13	36.431,29	36.457,41	35.853,14	37.421,33
P. Jasa Pendidikan	56.951,69	62.396,85	63.862,38	64.584,46	65.985,53
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.283,42	12.275,40	13.658,16	13.800,24	14.372,31
R,S,T,U. Jasa lainnya	20.201,31	22.176,97	20.664,88	20.963,55	24.413,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.268.261,17	1.360.960,13	1.347.922,69	1.420.799,91	1.560.899,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Apabila berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) diketahui bahwa nilai PDRB tahun 2021 adalah sebesar 1.420.799,91 miliar rupiah meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 1.347.922,69 miliar rupiah. Dan pada tahun 2022 nilai PDRB ADHB mencapai sebesar 1.560.899,02 miliar rupiah. Sumber pertumbuhan terbesar berasal dari Lapangan Usaha (LU) transportasi dan pergudangan dengan andil 1,78 persen dan tumbuh sebesar 62,78 persen.

Tabel 2.20.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (%)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,2	1,82	2,62	1,31	2,4	0,78	2,92
B	Pertambangan dan Penggalian	18,98	5,11	2,45	3,36	-0,8	4,4	-6,2
C	Industri Pengolahan	4,1	4,33	4,33	5,07	-3,8	2,34	3,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,57	5,22	5,36	5,48	1,79	5,95	3,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,17	6,51	4,88	4,34	2,29	5,92	1,01
F	Konstruksi	6,52	7,13	6,07	4,95	-3,76	7,37	1,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,67	5,87	5,77	5,97	-3,8	5,8	4,32
H	Transportasi dan Pergudangan	4,91	6,3	7,55	8,49	-32,38	3,28	73,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,26	6,45	8,15	9,07	-7,98	5,92	16,99
J	Informasi dan Komunikasi	8,31	13,27	12,39	11,62	15,65	6,04	2,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,77	5,17	3,58	3,5	2,16	1,62	0,53
L	Real Estate	6,81	6,48	5,58	5,53	-0,28	2,15	5,09
M,N	Jasa Perusahaan	10,62	8,72	9,48	10,54	-7,19	3,07	6,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	2,37	2,57	3,58	3,71	-1,38	-0,64	1,58

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Sosial Wajib							
P	Jasa Pendidikan	7,35	6,97	7,76	7,59	-0,24	0,07	1,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,86	8,6	8,8	6,72	8,19	0,18	2,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,64	8,98	9,45	9,02	-8,01	0,53	11,79
	PDRB	5,25	5,26	5,30	5,36	-2,65	3,33	5,31

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Laju pertumbuhan PDRB (Perekonomian) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 mengalami kontraksi turun sebesar -2,65 persen. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami penurunan kecuali sektor Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan, Jasa Keuangan dan Asuransi serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Sedangkan pada Tahun 2021 kondisi perekonomian berangsur pulih dengan semakin banyaknya masyarakat yang telah mendapatkan vaksin dan meningkatnya mobilitas masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 3,33 persen, walaupun lebih rendah dari Nasional sebesar 3,70 persen. Sektor yang sudah tumbuh lebih cepat atau pemulihan lebih cepat adalah Sektor Kontruksi; Informasi dan Komunikasi; Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Pada Tahun 2022 Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,31 (c-to-c), sudah berangsur pulih seiring mobilitas masyarakat yang sudah kembali seperti sebelum pandemi. Sektor Transportasi dan Pergudangan menyumbang pertumbuhan terbesar dengan tumbuh sebesar 73,03 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 16,99 persen, sedangkan terdapat sektor yang tumbuh negatif yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan yang turun sebesar minus 6,20 persen.

Tabel 2.21.

Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (%)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,06	13,53	14,30	13,86	13,53
B	Pertambangan dan Penggalan	2,55	2,48	2,45	2,58	2,42
C	Industri Pengolahan	34,41	34,44	34,52	34,31	33,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,1	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,73	10,81	10,55	11,12	11,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,64	13,74	13,49	13,75	13,60
H	Transportasi dan Pergudangan	3,12	3,22	2,21	2,26	3,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,11	3,20	2,99	3,06	3,39
J	Informasi dan Komunikasi	3,47	3,64	4,26	4,29	4,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,96	2,89	2,98	3,02	3,01

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
L	Real Estate	1,69	1,68	1,71	1,67	1,63
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,42	0,40	0,4	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,73	2,68	2,70	2,52	2,40
P	Jasa Pendidikan	4,49	4,58	4,74	4,55	4,23
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,89	0,90	1,01	0,97	0,92
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,59	1,63	1,53	1,48	1,56
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran pada tahun 2021 semua komponen mengalami pertumbuhan positif dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen Net Ekspor Antar Daerah yaitu sebesar 52,70 persen, diikuti Komponen Impor Luar Negeri sebesar 35,69 persen, dan Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 21,85 persen. Begitu juga dengan tahun 2022 yang menunjukkan semua komponen tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen Net Ekspor Antar Daerah yaitu 31,66 persen, diikuti oleh Impor Luar Negeri tumbuh 15,84 persen dan Ekpor Luar Negeri yang tumbuh 10,67 persen.

Tabel 2.22.

Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,69	4,62	-1,42	1,82	5,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,62	10,90	-3,72	1,25	4,89
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,70	4,04	-4,14	0,55	0,12
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,68	4,85	-6,98	6,84	1,95
Ekspor Luar Negeri	11,79	5,10	-3,79	21,85	10,67
Impor Luar Negeri	36,36	-6,70	-20,49	35,69	15,84
Net Ekspor Antar Daerah	57,00	-7,10	-33,49	52,70	31,66
Total	5,30	5,36	-2,65	3,33	5,31

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Struktur PDRB Jawa Tengah dari sisi pengeluaran pada tahun 2021 juga tidak mengalami perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 60,17 persen, dan diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,78 persen. Bahkan selama kurun waktu tahun 2016-2021 perekonomian Jawa Tengah menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekonomi Jawa Tengah sangat tergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, meskipun tren kontribusinya fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

Demikian juga kondisi pada tahun 2022 yang menunjukkan struktur yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mendominasi dengan angka sebesar 60,28 persen, diikuti dengan komponen PMTB sebesar 30,69 persen.

Tabel 2.23.

Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,30	60,39	61,02	60,17	60,28
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,14	1,21	1,19	1,18	1,22
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,78	7,58	7,32	7,11	6,53
Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,62	32,94	31,01	31,78	30,69
Perubahan Inventori	1,36	0,83	0,95	0,84	0,99
Ekspor Luar Negeri	9,77	9,38	9,12	11,18	11,76
Impor Luar Negeri	18,55	14,99	11,09	14,13	15,41
Net Ekspor Antar Daerah	5,57	2,64	0,47	1,87	3,94
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 2.24.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2022 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	764.808,38	821.948,11	822.095,50	854.472,69	940.909,56
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	14.491,86	16.443,22	16.064,61	16.784,70	18.971,57
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	98.717,17	103.209,52	98.678,84	100.905,61	101.999,40
Pembentukan Modal Tetap Bruto	413.749,15	448.351,59	417.815,40	451.241,16	479.064,88
Perubahan Inventori	17.201,59	11.362,19	12.797,37	11.936,47	15.501,14
Ekspor Luar Negeri	123.868,88	127.703,21	122.859,71	158.820,64	183.486,73
Impor Luar Negeri	235.222,13	203.947,07	149.426,64	200.678,36	240.550,14
Net Ekspor Antar Daerah	70.646,26	35.889,36	6.337,70	26.503,70	61.515,55
Total PDRB	1.268.261,17	1.360.960,13	1.347.222,49	1.419.986,62	1.560.899,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2022 juga telah mengalami perbaikan. Semua kabupaten/kota telah tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Boyolali dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6,33 persen, diikuti oleh Kota Surakarta sebesar 6,25 persen, dan Kabupaten Grobogan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,98 persen. Tahun 2021 hanya Kabupaten Kudus yang mengalami pertumbuhan yang minus (kontraksi) sebesar -1,98 persen yang diakibatkan karena industri

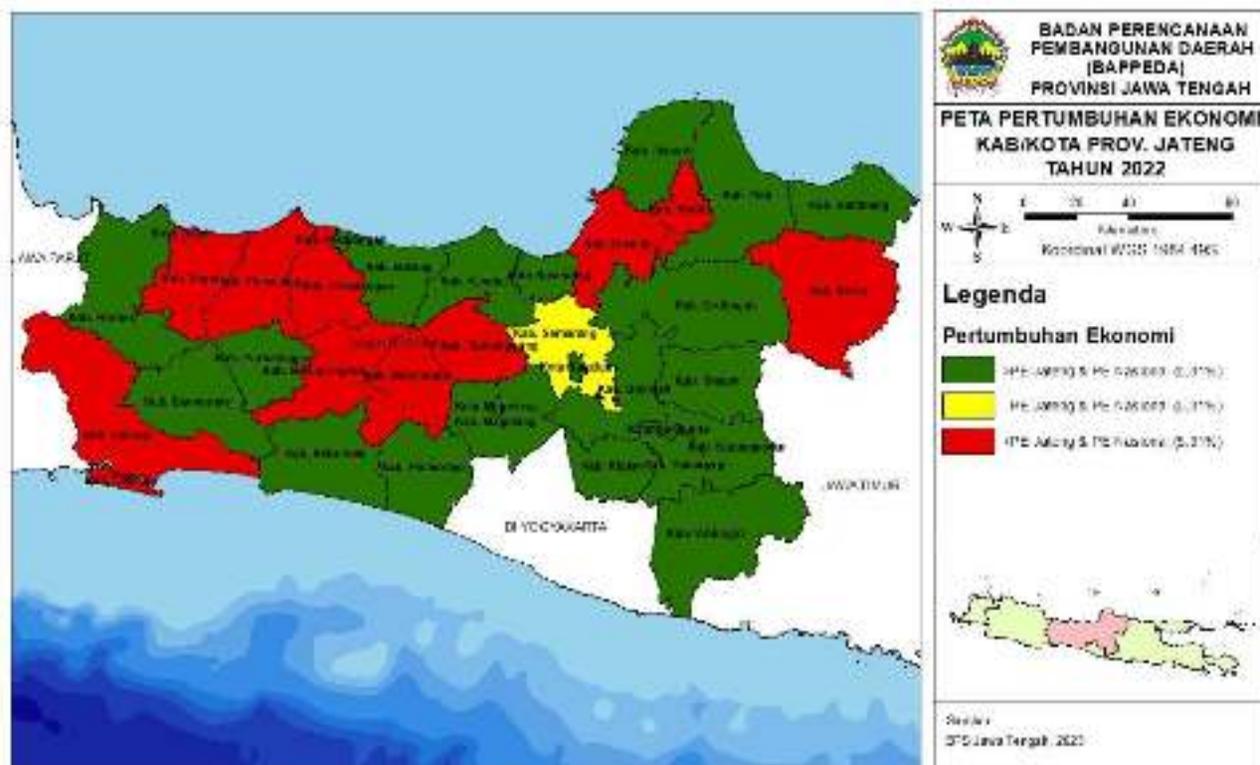
tembakau di Kudus yang masih mengalami pertumbuhan negatif, di tahun 2022 Kabupaten Kudus sudah tumbuh positif sebesar 2,23 persen.

Tabel 2.25.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022 (%)**

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Cilacap	2.99	2.27	-10.28	2.15	5.13
2	Kabupaten Banyumas	6.45	6.32	-1.65	4	5.86
3	Kabupaten Purbalingga	5.42	5.64	-1.18	3.19	5.41
4	Kabupaten Banjarnegara	5.67	5.6	-1.32	3.26	5.29
5	Kabupaten Kebumen	5.53	5.52	-1.45	3.71	5.79
6	Kabupaten Purworejo	5.33	5.44	-1.61	3.31	5.36
7	Kabupaten Wonosobo	5.06	5.57	-1.64	3.68	5.02
8	Kabupaten Magelang	5.28	5.3	-1.67	3.48	5.46
9	Kabupaten Boyolali	5.72	5.96	-1.2	4.63	6.33
10	Kabupaten Klaten	5.47	5.48	-1.17	3.82	5.9
11	Kabupaten Sukoharjo	5.79	5.92	-1.7	3.82	5.61
12	Kabupaten Wonogiri	5.41	5.14	-1.41	3.35	5.63
13	Kabupaten Karanganyar	5.98	5.76	-1.87	3.57	5.87
14	Kabupaten Sragen	5.75	5.9	-1.81	3.75	5.76
15	Kabupaten Grobogan	5.83	5.37	-1.57	3.78	5.98
16	Kabupaten Blora	4.38	4.05	-4.56	3.68	2.68
17	Kabupaten Rembang	5.89	5.2	-1.49	3.85	5.55
18	Kabupaten Pati	5.71	5.81	-1.16	3.38	5.56
19	Kabupaten Kudus	3.24	3.09	-3.11	-1.54	2.23
20	Kabupaten Jepara	5.85	6.02	-1.92	4.63	5.95
21	Kabupaten Demak	5.4	5.36	-0.23	2.62	5.25
22	Kabupaten Semarang	5.67	5.39	-2.67	3.63	5.31
23	Kabupaten Temanggung	5.13	5.05	-2.13	3.34	5.2
24	Kabupaten Kendal	5.77	5.71	-1.51	3.89	5.69
25	Kabupaten Batang	5.72	5.39	-1.29	4.88	5.97
26	Kabupaten Pekalongan	5.76	5.35	-1.89	3.54	5.11
27	Kabupaten Pemalang	5.69	5.8	-0.61	4.28	5.08
28	Kabupaten Tegal	5.51	5.56	-1.48	3.71	5.14
29	Kabupaten Brebes	5.26	5.76	-0.47	2.57	5.61
30	Kota Magelang	5.46	5.41	-2.45	3.2	5.77
31	Kota Surakarta	5.75	5.78	-1.76	4.01	6.25
32	Kota Salatiga	5.84	5.9	-1.68	3.35	5.53
33	Kota Semarang	6.48	6.81	-1.85	5.16	5.73
34	Kota Pekalongan	5.69	5.5	-1.87	3.59	5.76
35	Kota Tegal	5.87	5.77	-2.29	3.12	5.16
	Jawa Tengah	5.30	5.40	-2.65	3.32	5.31

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber: BPS, 2023 (diolah).

Gambar 2.18.

Peta Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (c-to-c, persen)

Terdapat 23 Kabupaten/Kota yang capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 melebihi capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional, serta terdapat 11 Kabupaten/Kota yang capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 dibawah capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Tiga capaian tertinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Boyolali sebesar 6,33 persen, Kota Surakarta 6,25 persen dan Kabupaten Grobogan 5,98 persen. Sedangkan Tiga capaian terendah pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Kudus sebesar 2,23 persen, Kabupaten Blora 2,68 persen, dan Kabupaten Wonosobo 5,02 persen.

b. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2016-2019, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Namun tahun 2020 mengalami penurunan sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19 menjadi sebesar 36,96 juta rupiah, turun sebesar 6,15 persen dari sebelum Pandemi yaitu Tahun 2019. Pada Tahun 2021 sudah mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dan mobilitas masyarakat sebesar 38,65 juta rupiah kemudian naik Kembali di Tahun 2022 sebesar 42,15 juta rupiah.

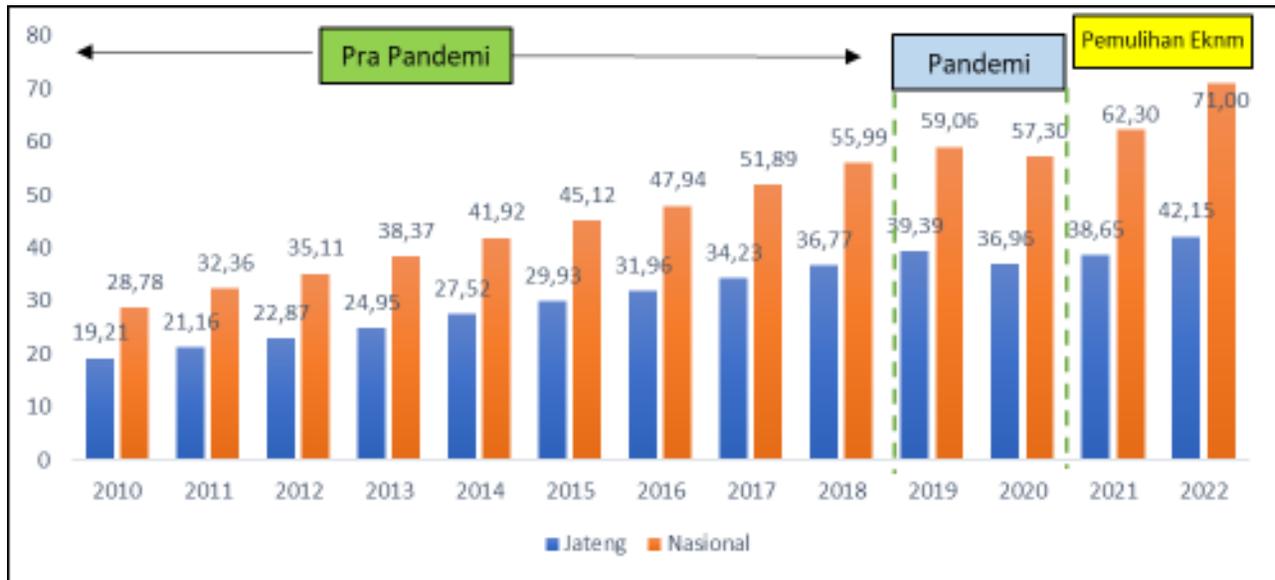
Tabel 2.26.

PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

No	Komponen	2020	2021	2022
1	PDRB ADHB (Milyar Rp)	1.347.222,49	1.419.986,62	1.560.899,02
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	36.446.115	36.742.501	37.032.410
3	PDRB Per Kapita ADHB :			

No	Komponen	2020	2021	2022
	• Nilai (Juta Rp)	36,96	38,65	42,15
	• Perkembangan (%)	-6,15	4,55	9,06

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

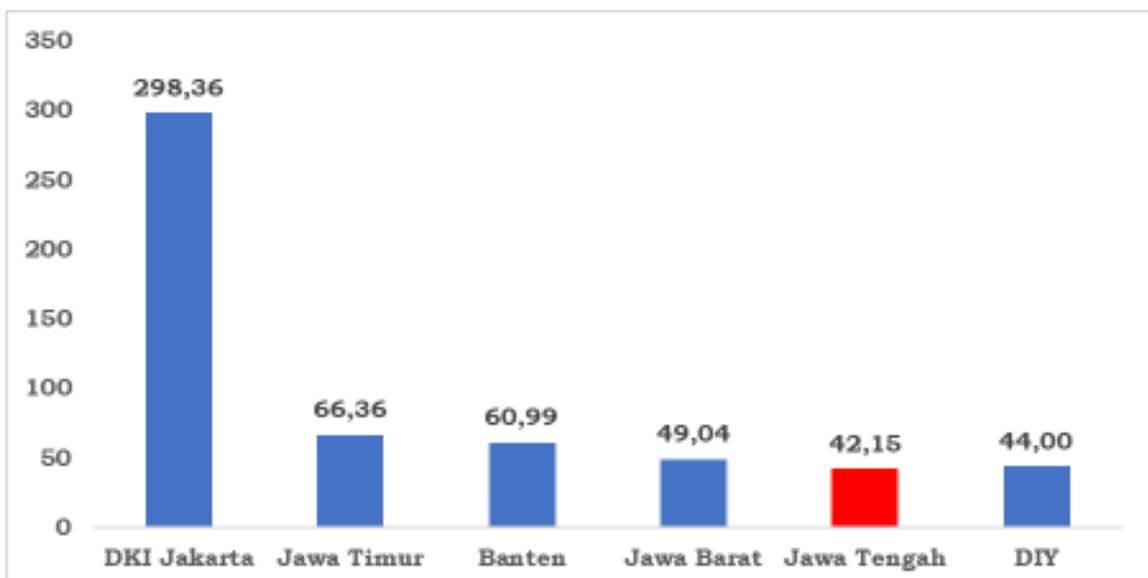


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.19.

PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2010 – 2022

PDRB per kapita Jawa Tengah jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Nasional dari Tahun 2010 – 2022 menunjukkan trend kenaikan, kecuali pada Tahun 2020 yang menurun saat terjadi Pandemi Covid-19. Tahun 2021 dan 2022 perekonomian Jawa Tengah dan Nasional sudah berangsur pulih seiring terkendalinya pandemi covid-19.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.20.

PDRB Per Kapita Provinsi Se Pulau Jawa Tahun 2022

Capaian PDRB Per Kapita Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Provinsi Se Pulau Jawa tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 298,36 Juta, diikuti Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY.

Tabel 2.27.

**PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Cilacap	63.8	66.39	53.92	55.84	60.82
2	Kabupaten Banyumas	29.72	32.02	30.28	31.81	34.8
3	Kabupaten Purbalingga	25.07	26.81	25.2	26.19	28.26
4	Kabupaten Banjarnegara	21.86	23.51	21.38	22.23	24.06
5	Kabupaten Kebumen	21.79	23.44	20.8	21.71	23.68
6	Kabupaten Purworejo	24.3	26.1	24.26	25.34	27.43
7	Kabupaten Wonosobo	22.22	23.91	21.49	22.4	24.09
8	Kabupaten Magelang	23.71	25.3	25.01	26.18	28.53
9	Kabupaten Boyolali	30.88	33.33	30.83	32.61	35.94
10	Kabupaten Klaten	31.58	34.01	31.74	33.36	36.54
11	Kabupaten Sukoharjo	38.65	41.63	40.7	42.77	46.71
12	Kabupaten Wonogiri	28.35	30.42	28.01	29.14	31.88
13	Kabupaten Karanganyar	39.05	41.94	39.82	41.71	45.5
14	Kabupaten Sragen	39.53	42.7	38.83	40.75	44.63
15	Kabupaten Grobogan	18.52	19.89	18.79	19.72	21.64
16	Kabupaten Blora	28.57	30.16	27.16	30.39	34.87
17	Kabupaten Rembang	27.92	29.82	29.39	30.99	33.97
18	Kabupaten Pati	31.84	34.34	32.74	34.23	37.41
19	Kabupaten Kudus	120.79	127.52	129.14	127.55	133.88
20	Kabupaten Jepara	22.57	24.14	25.49	26.96	29.34
21	Kabupaten Demak	21.21	22.62	22.1	22.81	24.73
22	Kabupaten Semarang	44.38	47.3	46.67	48.87	53
23	Kabupaten Temanggung	26.42	28.17	27.33	28.48	30.93
24	Kabupaten Kendal	41.02	44.03	41.9	44.06	48.1
25	Kabupaten Batang	26.47	28.22	27.02	28.66	31.32
26	Kabupaten Pekalongan	23.9	25.59	23.6	24.61	26.36
27	Kabupaten Pemalang	18.21	19.65	17.6	18.49	19.96
28	Kabupaten Tegal	22.8	24.57	22.15	23.21	25.12
29	Kabupaten Brebes	23.84	25.65	23.83	24.57	26.74
30	Kota Magelang	67.29	72.45	71.7	75.48	82.91
31	Kota Surakarta	85.79	92.83	91.17	96.36	107.01
32	Kota Salatiga	64.41	68.89	69.14	72.39	78.99
33	Kota Semarang	98.1	105.93	114.19	123.67	137.12
34	Kota Pekalongan	33.14	35.59	35.36	37.17	40.68
35	Kota Tegal	56.64	61.47	55.72	58.08	63.62
	Provinsi Jawa Tengah	36.77	39.39	36.96	38.65	42.15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023 diolah

Gambar 2.21.

PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Tahun 2022

Dilihat dari sebaran per Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah PDRB per kapita Tahun 2022, Kota Semarang menjadi yang tertinggi capaiannya yaitu sebesar Rp.137,12 juta, kemudian Kabupaten Kudus sebesar Rp.133,88 juta, dan Kota Surakarta sebesar Rp.107,01 juta (peta warna hijau). Sedangkan capaian PDRB Perkapita yang dibawah Rp.100 juta dan diatas capaian Jawa Tengah Rp. 42,15 Juta terdapat 9 Kabupaten/Kota (peta warna kuning). Kemudian untuk capaian PDRB Perkapita yang dibawah capaian Provinsi sebesar Rp. 42,15 Juta terdapat 23 Kabupaten/Kota (peta warna merah).

c. Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen. Bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,70 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember tahun 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,70 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,08 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,12 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen. Kelompok

pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar -0,08 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,06 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).

Laju inflasi Indonesia Tahun 2022 mengalami kenaikan akibat gejala ekonomi global akibat konflik geopolitik dan perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan gangguan sisi *supply* yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan inflasi di banyak negara. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an. Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara-negara berkembang dan emerging market.

Pada bulan Februari 2023 inflasi Jawa Tengah sebesar 5,81%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen makanan dan minuman. Penyebab utama inflasi bulan Februari 2023 adalah kenaikan harga beras, rokok kretek filter, bawang merah, bawang putih, dan tarif air minum PAM. Penyebab inflasi lain adalah adanya cuaca ekstrem menyebabkan beberapa komoditas gagal panen sehingga terjadi lonjakan harga. Inflasi di Indonesia masih terkendali dan menjadi terbaik kedua setelah negara Jepang dibandingkan inflasi negara yang tergabung dalam G-20.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.22.

**Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – Februari 2023 (%)**

d. Rasio Gini dan Indeks Williamson

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0 -1, semakin tinggi nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, sebaliknya jika nilainya mendekati satu maka angka ketimpangan berkurang (semakin baik). Selama kurun waktu tahun 2019 – 2022 perkembangan Rasio Gini di Jawa Tengah relative menurun. Pada September 2022, Rasio Gini Jawa Tengah tercatat sebesar 0,366, lebih tinggi dibandingkan September 2021 yang sebesar 0,368. Jika dibandingkan dengan nasional, Rasio

Gini Jawa Tengah masih lebih rendah sebesar 0,381. Dengan demikian pemerataan pendapatan di Jawa Tengah relative lebih baik dibandingkan dengan nasional.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

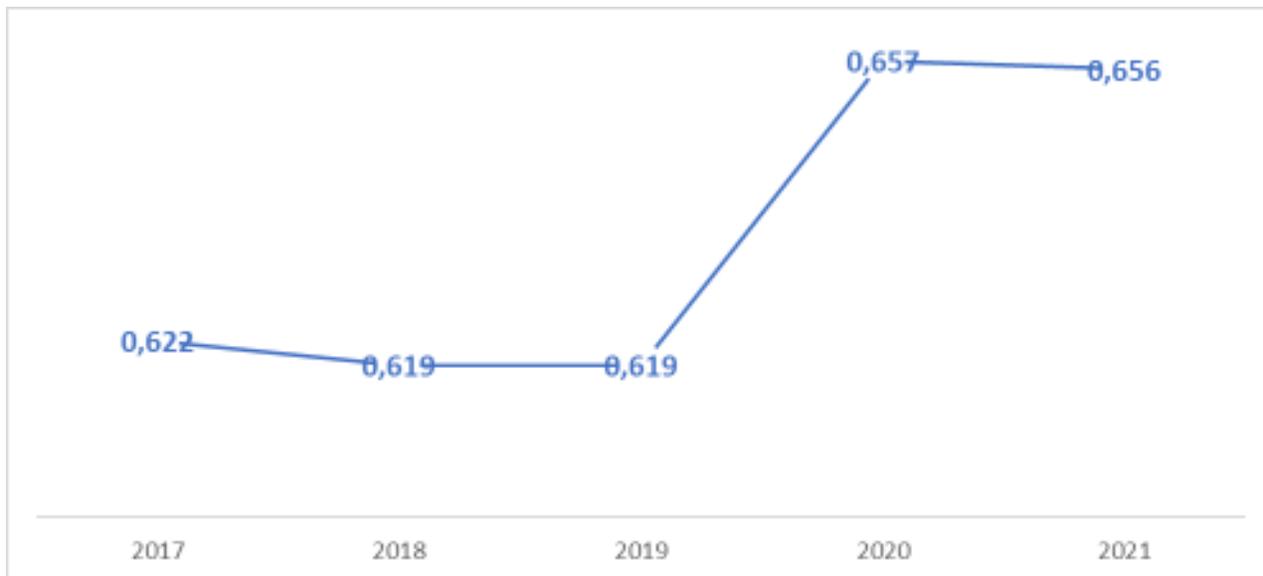
Gambar 2.23.

Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2022

Berdasarkan wilayahnya, tingkat ketimpangan di kawasan perkotaan lebih tinggi dibandingkan kawasan pedesaan. Pada September 2022, koefisien Gini perkotaan Jawa Tengah sebesar 0,392; lebih tinggi dibandingkan pedesaan yang sebesar 0,326. Fenomena peningkatan ketimpangan yang tinggi pada kawasan perkotaan tersebut juga berlangsung di tingkat nasional, mencerminkan bahwa golongan masyarakat berpenghasilan rendah lebih terpapar dampak pelemahan ekonomi yang lebih besar dibandingkan kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kapasitas tabungan/dana darurat serta menurunnya penghasilan di tengah penurunan aktivitas produksi.

Dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Jawa, koefisien Gini Jawa Tengah merupakan yang terendah setelah Provinsi Jawa Timur dengan perbedaan 0,001. Peningkatan ketimpangan terbesar yang berlangsung dalam rentang September 2021 sampai dengan September 2022 terjadi di Provinsi DI Yogyakarta.

Kemudian dalam rangka melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah, digunakan indikator Indeks Williamson. Selama kurun waktu tahun 2016 – 2021, Indeks Williamson Jawa Tengah menurun yaitu dari 0,622 menjadi 0,656. Namun terjadinya pandemi Covid-19 di akhir Maret 2020 berdampak pada peningkatan ketimpangan antar wilayah di Jawa Tengah. Tahun 2020 Indeks Williamson Jawa Tengah meningkat signifikan menjadi 0,657 atau meningkat 0,038 poin dibandingkan tahun 2019. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi untuk memperbaiki perekonomian daerah memberikan dampak positif pada perbaikan perekonomian dan mengurangi ketimpangan antar wilayah di tahun 2021 menjadi 0,656.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.24.

Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021

e. Nilai Investasi

Peningkatan realisasi investasi di Jawa Tengah didukung dengan keberadaan kawasan industri yang ada, terutama penambahan tenant di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan promosi investasi yang fokus pada sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja dan negara tujuan prioritas dengan meningkatkan kerja sama antara stakeholder terkait dan terobosan inovasi digitalisasi promosi. Optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri yang ada di Jawa Tengah terus diupayakan melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur pendukung, air baku dan peningkatan pengelolaan Kawasan Industri yang lebih berkualitas.

Tabel 2.28.

Perkembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Nama Kawasan Industri	Pengelola	Total Luas	Lahan Digunakan	Lahan Tersedia	Jumlah Tenant
1.	Kawasan Industri Kendal (Kawasan Ekonomi Khusus)	PT. Kawasan Industri Kendal	1.000 Ha	460 Ha (tenant, Jalan, Sarana & Prasarana)	- 656,9 Ha (Telah Bersertifikat) - 35,9 Ha (Dalam Proses Sertifikat)	84
2.	Grand Batang City	PT. Kawasan Industri Terpadu Batang	4.300 Ha (Luas Klaster Industri 3.100 Ha)	182,2 Ha (dari luas total Fase I: 450 Ha)	- Fase I: 450 Ha - Fase II: 2.650 Ha (dalam proses penyiapan lahan)	13
3.	Batang Industrial Park	PT. Perkebunan dan Industri Segajung	287 Ha	60 Ha	227 Ha	3
4.	Jatengland Industrial Park Sayung	PT. Jawa Tengah Lahan Andalan	300 Ha	100,76 Ha	227 Ha	5
5.	Aviarna Industrial	PT. Bumi Raya	462 Ha	+ 15 Ha	447 Ha	3

No.	Nama Kawasan Industri	Pengelola	Total Luas	Lahan Digunakan	Lahan Tersedia	Jumlah Tenant
	Estate	Perkasa Nusantara				
6.	Kawasan Industri Wijayakusuma	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	250 Ha	144,9 Ha	± 9 Ha	117
7.	BSB Industrial Park	PT. Karyadeka Alam Lestari	112 Ha	80,75 Ha	4 Ha (tidak dalam 1 hamparan)	48
8.	Tanjungmas Export Processing Zone	PT. Lamicitra Nusantara	30 Ha	27 Ha	3 Ha	75

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah 2012 - 2025, untuk peluang investasi rentang tahun 2024 - 2026 mencakup pengembangan industri skala besar yang terintegrasi dan pengembangan investasi di sektor inovasi teknologi tinggi.- Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang berkompeten, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Realisasi investasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp68,41 triliun yang terdiri atas realisasi investasi yang dilaporkan melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar Rp58,89 triliun dan realisasi investasi non LKPM sebesar Rp9,52 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghitung angka realisasi investasi Usaha Mikro Kecil (UMK) diluar LKPM sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Penanaman Modal Sektor Usaha Mikro Dan Kecil Di Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi investasi PMA/PMDN sebesar Rp58,89 triliun merupakan rekapitulasi realisasi investasi bernilai diatas Rp5 miliar yang wajib dilaporkan melalui LKPM dengan rincian realisasi PMA sebesar Rp33,9 triliun dan realisasi PMDN sebesar Rp24,99 triliun. Terdapat peningkatan realisasi PMA sebesar Rp12,5 triliun, sedangkan untuk realisasi PMDN mengalami penurunan sebesar Rp6,32 triliun. Realisasi investasi tahun 2022 meningkat lebih besar Rp6,18 triliun (11,72%) dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Jumlah proyek investasi di Jawa Tengah sebanyak 19.374 proyek yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 16.287 proyek dan PMA 3.087 proyek, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 215.775 orang. Sementara itu, realisasi investasi sektor UMK (non LKPM) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Realisasi sektor ini sebesar Rp9,52 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,44 triliun (31,28%). Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.181.350 orang (95,92%) dari jumlah tenaga kerja yang terserap tahun sebelumnya. Jumlah unit UMKM sebesar 227.483 unit dan tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Investasi PMDN, termasuk sektor UKM, menjadi kekuatan yang terus didorong dalam kerangka pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, pemulihan ekonomi daerah juga harus didukung dengan program kebijakan prioritas pemerintah, pemberian insentif daerah dan kemudahan berusaha, peningkatan pelayanan perizinan berusaha, ketersediaan tenaga kerja yang berkompeten sesuai kebutuhan DUDI, penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi yang berkualitas serta komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan iklim investasi yang kondusif.

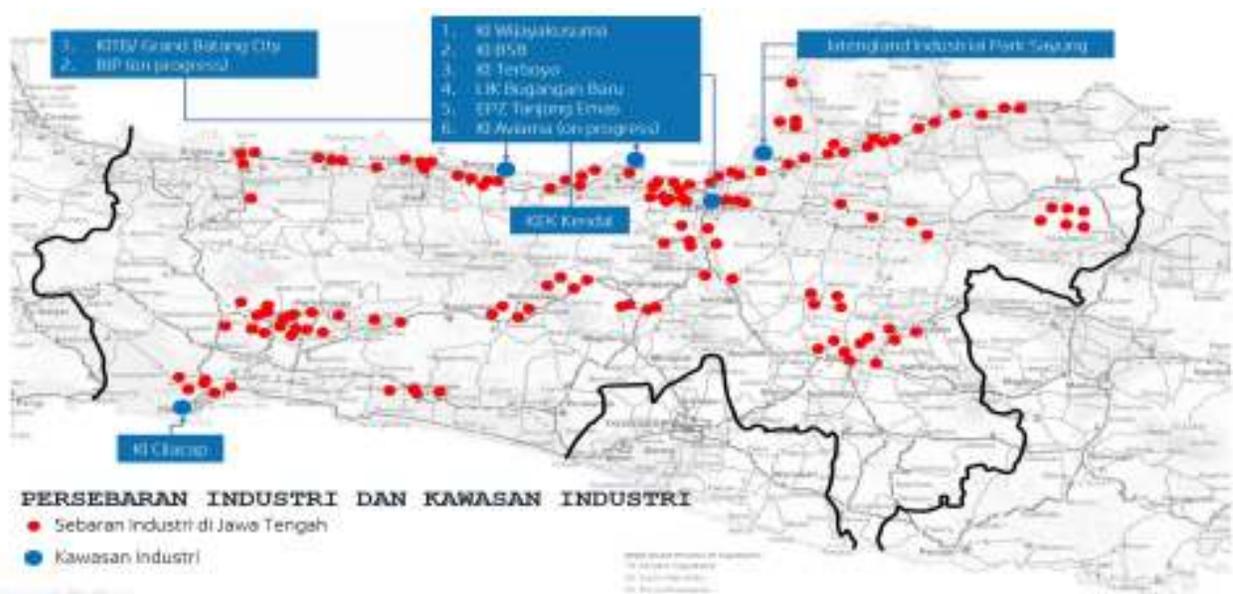
Tabel 2.29.

Jumlah Nilai Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM dan Non LKPM Tahun 2016 – 2022

Tahun	Nilai Realisasi Investasi (Rp Trilyun)				Pertumbuhan (%)
	PMA	PMDN		Jumlah	
		LKPM	Non-LKPM		
2016	14,113	24,070	-	38,183	46,63
2017	31,673	19,866	-	51,539	34,98
2018	31,794	27,474	-	59,269	15,00
2019	40,859	18,655	-	59,503	0,39
2020	19,63	30,61	5,83	56,07	-5,8
2021	21,4	31,31	7,08	59,79	6,56
2022	33,9	24,99	9,52	68,41	4,4

Sumber: DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berkaitan dengan kawasan industri di Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu sumber investasi, berikut peta persebarannya.



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.25.

Kawasan Industri Existing di Provinsi Jawa Tengah

Dari data di atas, nampak bahwa sampai dengan tahun 2022, persebaran kawasan industri paling banyak berada di wilayah utara Jawa Tengah dengan dominasi berada di Kota Semarang, dan pada saat ini bertambah dengan

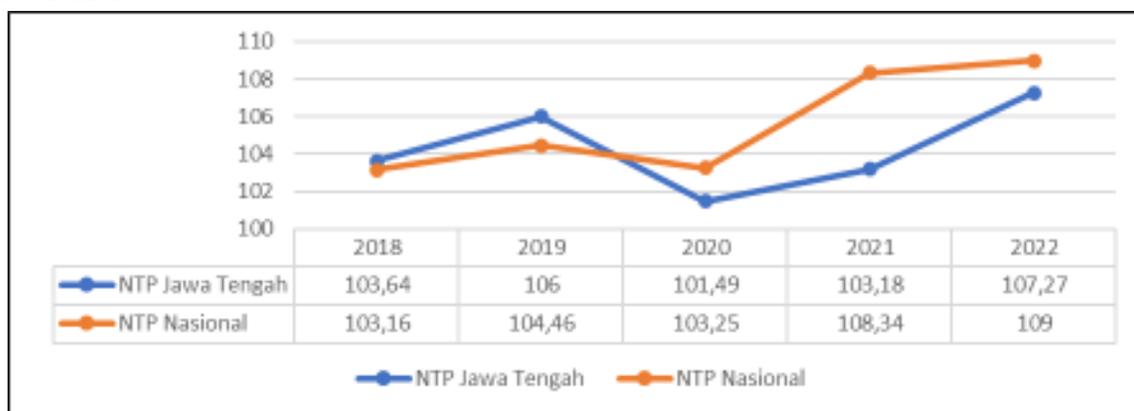
berdirinya Kawasan Industri di Kendal dan Demak. Sedangkan dari sisi kebijakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Tahun 2012 - 2025 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong kinerja di urusan penanaman modal.

Untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai macam inovasi melalui terobosan Layanan Konsultasi dan Pendampingan Terpadu Secara Elektronik (Lakon-e Pandu), layanan perizinan secara online menggunakan Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP Jateng) yang telah dilengkapi dengan fitur digital signature, maupun digitalisasi promosi melalui aplikasi *Central Java Investment Platform (CJIP)*. Selain itu, dalam rangka mempermudah dan memperluas layanan perizinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memfasilitasi pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2022, telah beroperasi 21 MPP di 21 Kabupaten/Kota.

1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). It menggambarkan stok dan harga di tingkat produsen termasuk yang dikuasai oleh pedagang dan tengkulak, sedangkan Ib menggambarkan pengeluaran untuk biaya produksi dan kebutuhan rumah tangga. Penghitungan dan rilis NTP dilakukan setiap bulan dan dibandingkan dengan tahun dasar 2018.

Pada kurun waktu tahun 2018-2022, NTP per Bulan Desember cenderung fluktuatif dengan tren yang meningkat. Selama lima tahun terakhir, NTP Jawa Tengah terendah terjadi pada Desember tahun 2020 yaitu sebesar 101,49 poin, sedangkan tertinggi terjadi pada Desember tahun 2022 yaitu sebesar 107,27. Adapun bila dibandingkan dengan NTP Nasional pada periode tahun 2018–2022, NTP Jawa Tengah lebih baik pada tahun 2018 dan 2019. Namun, pada tahun 2020 hingga 2022 NTP Jawa Tengah di bawah NTP nasional.



Sumber: BPS, 2022

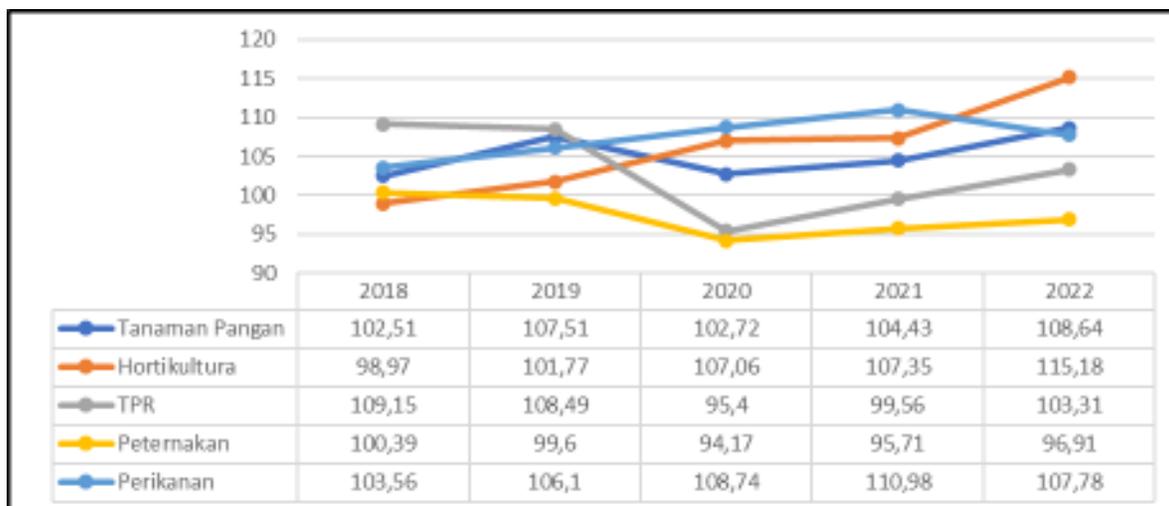
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.26.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022

Dilihat berdasarkan sub sektor, pada kurun waktu tahun 2018-2022, masing-masing sub sektor cenderung fluktuatif. Pada sub sektor Tanaman

Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat dan Perikanan cenderung mengalami tren yang meningkat, walaupun pada tahun 2020 beberapa sub sektor sempat mengalami penurunan. Tren yang meningkat menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki tingkat kemampuan dan daya beli yang relatif stabil. Namun sebaliknya, sub sektor peternakan mengalami trend yang menurun hingga tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022.



Sumber: BPS, 2021

Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 2.27.

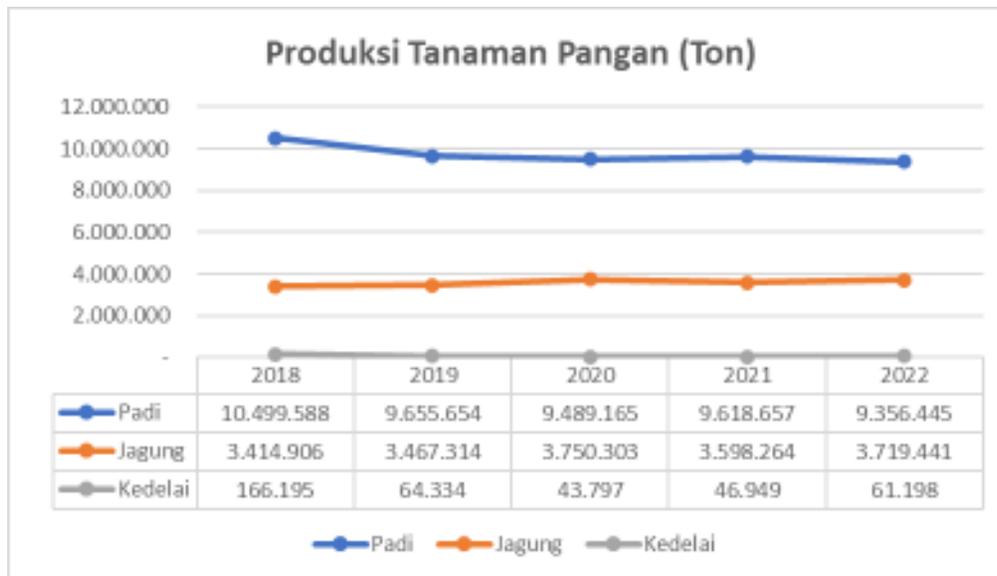
**Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022**

2. Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah. Urusan pertanian mencakup sektor tanaman pangan dengan komoditas utama yaitu padi, jagung, kedelai; sektor hortikulturan dengan komoditas utama bawang merah dan cabai besar; dan sektor perkebunan dengan komoditas utama tebu, kopi, dan kelapa.

Pada kurun waktu 2018-2022, jumlah produksi pada sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sangat fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan perubahan iklim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi yang sangat berpengaruh terhadap hasil panen petani di Jawa Tengah, selain hal tersebut, kualitas SDM petani juga masih membutuhkan intervensi untuk dapat memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah produksi di sektor pertanian.

Pada periode Tahun 2018-2020, komoditas padi mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan perubahan standar pengukuran produksi pada komoditas padi menggunakan Kerangka Sampling Area (KSA). Produksi pada komoditas jagung juga masih fluktuatif. Sedangkan pada komoditas kedelai produksi menurun dikarenakan menurunnya luas tanam kedelai yang semakin menurun dan minat petani untuk menanam kedelai berkurang dibandingkan komoditas lain.

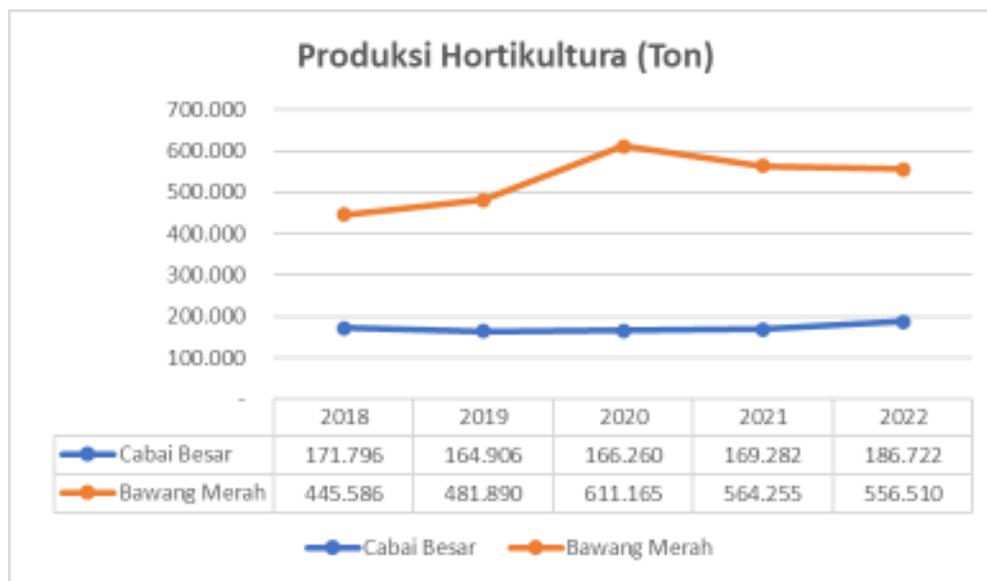


Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022

Gambar 2.28.

Perkembangan Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2018-2022

Komoditas utama Hortikultura di Jawa Tengah terdiri dari bawang merah dan cabai besar. Produksi bawang merah dan cabai besar pada kurun waktu Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi, dengan produksi tertinggi bawang merah pada Tahun 2020 sebesar 611,165 Ton, sedangkan produksi tertinggi cabai besar pada Tahun 2022 sebesar 186,722 Ton. Pada komoditas bawang merah dan cabai besar masih diperlukan intervensi pada penyimpanan hasil panen dan fasilitasi distribusi untuk menjaga stabilitas stok dan harga mengingat komoditas ini menjadi contributor inflasi di Jawa Tengah.



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022

Gambar 2.29.

Perkembangan Produksi Bawang Merah, Cabai Besar Tahun 2018-2022

Komoditas utama tanaman perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari tebu, kopi, dan kelapa. Produksi komoditas tebu mengalami fluktuasi dengan produksi tertinggi pada 2019 sebesar 2.894.884 Ton, diperlukan upaya peningkatan produktivitas pada komoditas tebu antara lain melalui bongkar rotan dan penggunaan bibit unggul. Demikian juga dengan produksi kopi dan kelapa juga

mengalami fluktuasi dengan produksi kopi tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 26.549 Ton dan produksi kelapa tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 174.041 Ton.



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 2022

Gambar 2.30.

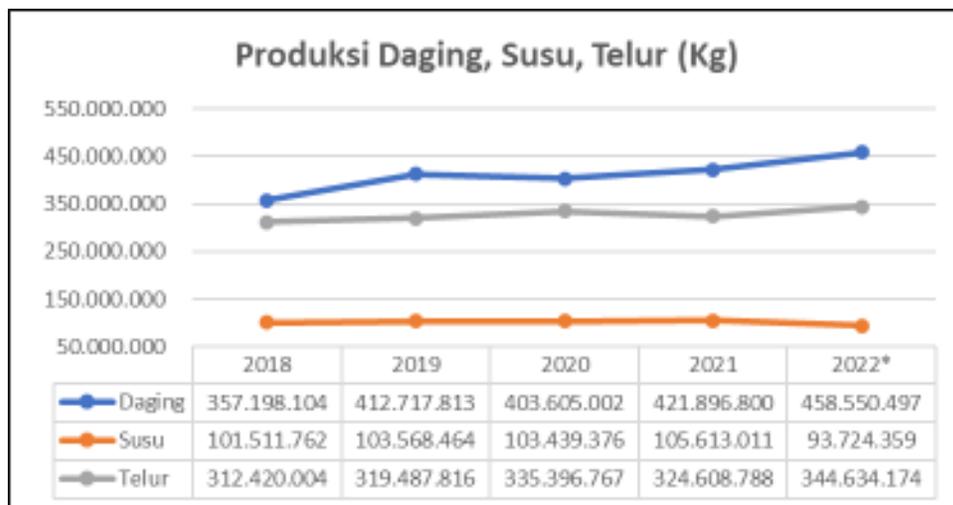
Perkembangan Produksi Tebu, Kopi, Kelapa Tahun 2018-2022

Produksi hasil peternakan di Jawa Tengah mengalami fluktuasi pada daging, susu, dan telur. Produksi daging tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 458,550,497 Kg, sedangkan produksi terendah pada Tahun 2018 sebesar 357,198,104 Kg; produksi susu tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 105.613.011 Kg dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 101,511,762 Kg; serta produksi telur mencapai titik tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 344,634,174 Kg dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 312,420,004 Kg.

Produksi susu tahun 2020 menurun dari produksi tahun 2019, karena adanya penurunan populasi sapi perah dan penurunan kualitas genetik sapi perah di Jawa tengah. Banyak peternak sapi perah beralih ke usaha lain yang dianggap lebih menguntungkan. Faktor ketersediaan hijauan pakan yang belum kontinu, masih ditemukan peredaran pakan konsentrat yang belum sesuai SNI yang mengakibatkan produksi susu tidak optimal.

Produksi daging menurun pada tahun 2020 disebabkan adanya pemotongan ternak di RPH sebagai akibat dari penurunan permintaan konsumen dan pandemic Covid-19, sementara kebutuhan daging terbesar untuk kebutuhan hotel , rumah makan, catering. Sedangkan pandemic Covid-19 menuntut adanya *social distancing* dan pembatasan kegiatan bersifat massal. Selain itu juga mengakibatkan siklus usaha ayam broiler juga mengalami penurunan, banyak usaha kandang *close house* berhenti memproduksi karena menurunnya permintaan daging, meningkatnya biaya produksi dan sarpras pendukung.

Produksi telur menurun pada tahun 2021 disebabkan harga pakan yang tinggi, ketersediaan pakan asal jagung yang belum kontinyu, sementara ketergantungan peternak terhadap jagung sangat tinggi dan produktivitas menurun sehingga banyak ayam yang diafkir.



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 2022
*angka sementara s.d TW IV 2022

Gambar 2.31.
Perkembangan Produksi Daging, Susu, Telur
Tahun 2018-2022

3. Pangan.

Kondisi ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah diukur dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Perwujudan ketahanan pangan dicapai melalui 3 pilar yaitu: (1) Ketersediaan pangan; (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari Tahun 2019 – 2022 dengan perkembangan semakin baik atau secara Nasional IKP Jawa Tengah terbaik ke-2. Hal ini ditunjukkan dengan Capaian IKP pada Tahun 2022 sebesar 82,95 lebih tinggi jika dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 82,73. Tahun 2020 sebesar 82,31 dan Tahun 2019 sebesar 78,85.

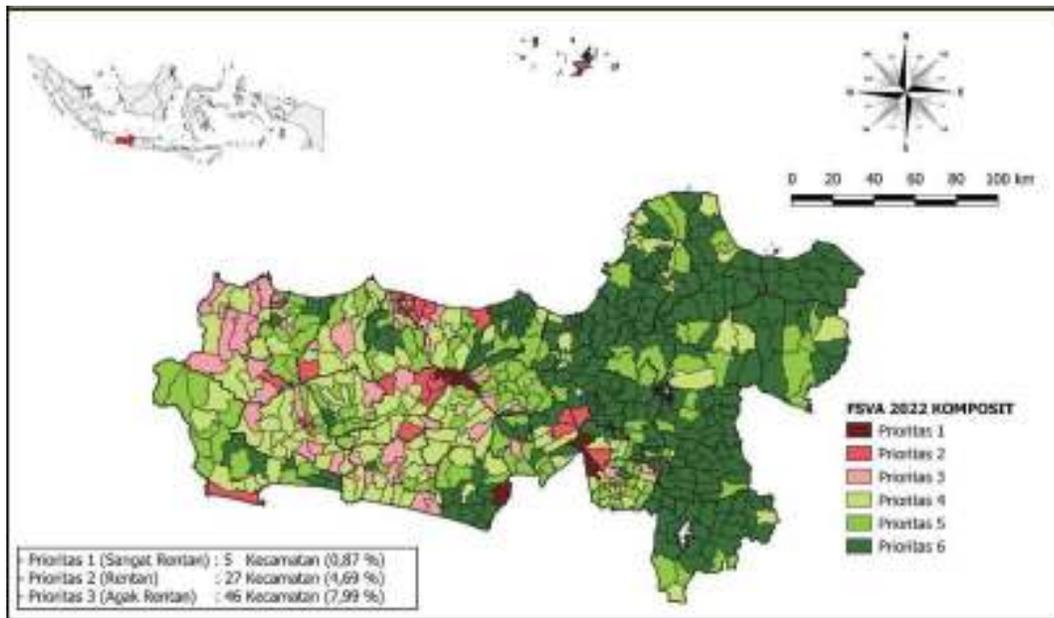
Ketersediaan pangan Jawa Tengah digambarkan dalam AKE Ketersediaan, Adapun ketersediaan energi Tahun 2021 sebesar 3,797 Kkal/hari merupakan kontribusi dari pangan nabati sebesar 3,680 Kkal/hari, sedangkan pangan hewani sebesar 118 Kkal/hari. Ketersediaan protein Tahun 2021 sebesar 95,98 gram/hari merupakan kontribusi pangan nabati 83,82 gram/hari, sedangkan pangan hewani sebesar 11,75 gram/hari. Ketersediaan lemak Tahun 2021 sebesar 57,99 gram/hari merupakan kontribusi pangan nabati 50,82 gram/hari dan pangan hewani sebesar 7,17 gram/hari.

Tabel 2.30.
Perkembangan Ketersediaan Energi, Protein Dan Lemak
Provinsi Jawa Tengah

Tahun Penyusunan	ATAP	Energi (Kkal/hari)			Protein (Gram/hari)			Lemak (Gram/hari)		
		Total	Nab	Hew	Total	Nab	Hew	Total	Nab	Hew
2016	2015	4,618	4,499	118	100.92	90.65	11.19	48.15	42.3	5.84
2017	2016	4,055	3,925	130	109.03	97.84	11.19	62	55.24	6.76
2018	2017	4,027	3,886	141	114.46	98.77	15.69	60.88	52.92	7.96
2019	2018	3,730	3,605	125	87.83	75.45	12.38	76.24	68.38	7.86
2020	2019	3,732	3,604	128	87.97	74.69	13.27	40.41	32.75	7.65
2021	2020	3,736	3,607	129	98.17	84.51	13.66	56.38	48.74	7.63
2022	2021	3,797	3,680	118	95.98	83.82	11.75	57.99	50.82	7.17

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan dengan peta Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang diukur berdasarkan aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang dirilis setiap 3 tahun. Melalui peta FSVA dapat dilihat tingkat kerawanan pangan yang diukur pada prioritas 1 sampai 6. Peta FSVA tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 576 Kecamatan, kecamatan dengan kategori agak rentan (prioritas 3) terdapat 46 kecamatan, kecamatan dengan kategori rentan (prioritas 2) terdapat 27 kecamatan dan kecamatan dengan kategori sangat rentan (prioritas 1) terdapat 5 kecamatan. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih diperlukan upaya untuk peningkatan ketahanan pangan terutama pada wilayah dengan prioritas 1 sampai 3.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.32.

Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Selanjutnya keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai berikut.

Tabel 2.31.

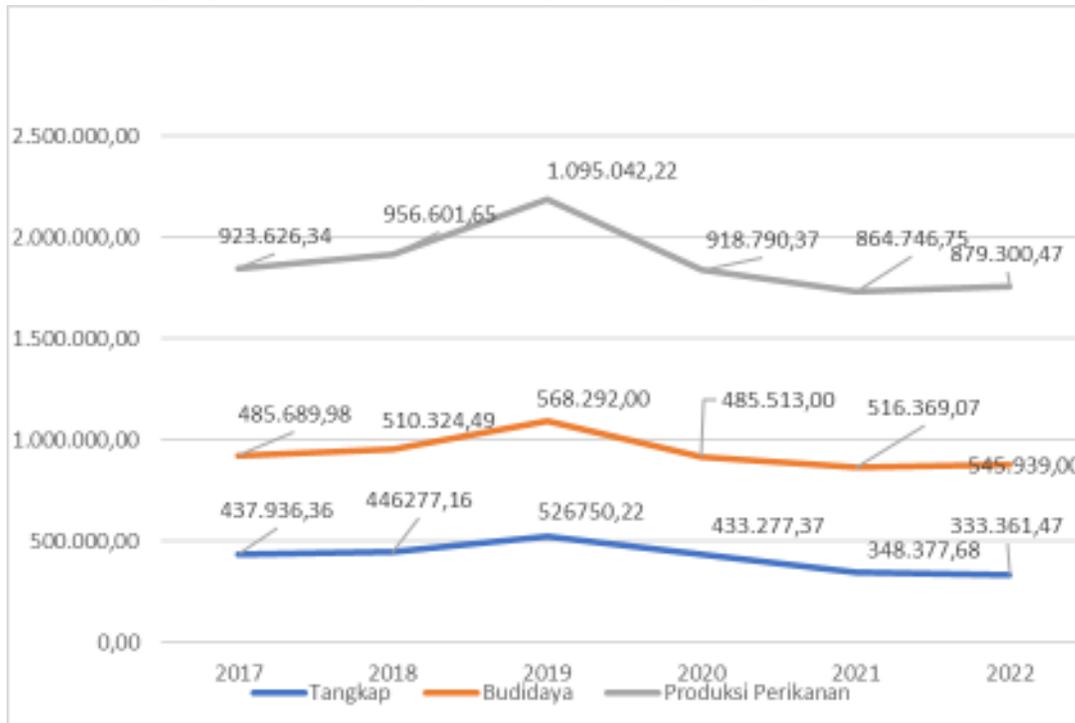
Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No,	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi-padian	25,0	25,00	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,5	1,42	1,1	0,9	0,9	1,1
3	Pangan Hewani	24,0	17,09	20,0	20,4	21,0	22,9
4	Minyak & lemak	5,0	5,00	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	0,70	0,5	0,4	0,4	0,4
6	Kacang-kacangan	10,0	10,00	6,4	6,1	6,3	8,0
7	Gula	2,5	2,37	2,1	2,1	2,1	2,0
8	Sayur & buah	30,0	25,71	29,5	27,1	26,0	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,0	91,80	86,41	89,6	87,1	94,4
Skor PPH Nasional		100,0	85,20	90,40	90,8	87,9	92,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2022

Berdasarkan Skor PPH Jawa Tengah tahun 2017 - 2022 untuk kelompok pangan umbi-umbian dan pangan hewani masih dibawah standar sehingga perlu upaya untuk peningkatan konsumsi.

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dengan meningkatkan produksi perikanan dan garam, mengoptimalkan usaha pengolahan ikan, serta mempertahankan kelestarian ekosistem perikanan. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

*) Realisasi 2022 merupakan angka sementara (belum dilakukan validasi)

Gambar 2.33.

Produksi Perikanan (Ton/Th) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Produksi perikanan total (perikanan tangkap dan budidaya) selama tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif. Produksi perikanan tangkap menunjukkan penurunan dari tahun 2019 – 2022, salah satu penyebabnya karena belum seluruhnya nelayan memiliki keterampilan. Berdasarkan data jumlah nelayan yang memiliki kompetensi sebanyak 3.444 (18%) dari jumlah total sebanyak 129.620 nelayan. Selain itu kapal yang menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) sangat sedikit yaitu sebanyak 204 kapal atau (0,74%) dari total kapal di Jawa Tengah sebanyak 27.488 unit.

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan tangkap, Provinsi Jawa Tengah memiliki 11 (sebelas) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Secara umum Pelabuhan Perikanan di Jawa Tengah telah memiliki kriteria yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Akan tetapi seiring dengan meningkatnya jumlah kapal, beberapa pelabuhan telah melebihi kapasitas daya tampung kapal yang ditetapkan sebagai PPP maka diperlukan peningkatan kapasitas dermaga maupun kolam pelabuhan, juga

perbaikan atau pembangunan breakwater (penahan gelombang) dengan panjang yang sesuai.

Tabel 2.32.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Jawa Tengah

KRITERIA TEKNIS :		PPP TEGA LSARI	PPP KARIM UNJAWA	PPP TASIK AGUNG	PPP BAJO MULYO	PPP MORO DEMAK	PPP TAWANG	PPP KLIDANGLO	PPP WONOKERTO	PPP ASEMDYOYONG	PPP LARANGA	PPP LOHGENDING
<i>Fasilitas</i>	<i>Standar</i>											
Tambat labuh Kapal	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≥ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT	≤ 10 GT
Panjang Dermaga	≥ 100 m	694 m	160 m	2400 m	693 m	400 m	450 m	300 m	450 m	215 m	130 m	414 m
Kedalaman Kolam	Min >2 m	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	Sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	Sesuai
Daya tampung	30 Unit Kapal /Total 300 GT	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal	≥ 30 Unit Kapal
Lahan	5 Ha	16,3 Ha	16,4 Ha	9,659 Ha	6,36 Ha	3,9 Ha	0,7 Ha	50 Ha	0,8 Ha	2,2 Ha	5,1 Ha	18,7 Ha
PENUNJANG :												
Hasil Perikanan	rata-rata 5 Ton/Hari	169 Ton	5,2 Ton	19,2 Ton	87 Ton	13 Ton	1,5 Ton	51 Ton	0,5 Ton	29 Ton	2,8 Ton	0,9 Ton
Terdaftar Industri Pengolahan Ikan	Perusahaan / UPI mikro	27	5	220	10	127	Ada	62	Ada	95	Ada	Ada
Industri Penujangan Lainnya	perusahaan	478	1	2	19	4	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
KETERANGAN :												
Jumlah Kapal		335	358	359	318	46	759	153	421	253	138	83
< 10 GT		1	351	0	0	0	700	0	332	227	109	83
10-30 GT		54	7	155	34	46	59	114	89	26	29	0

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Di sisi lain, risiko kecelakaan yang dihadapi nelayan saat melaut cukup tinggi, kasus yang terbaru pada tahun 2022 terjadi kebakaran kapal di Cilacap dan Kota Tegal dengan jumlah 70 kapal dengan nilai kerugian Rp 212.000.000.000. Oleh karena itu, perlu diberikan perlindungan kepada nelayan dalam bentuk asuransi nelayan. Asuransi Nelayan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi individu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan paruh waktu, nelayan buruh, wanita nelayan dan ABK kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT). Nelayan Jawa Tengah yang sudah memperoleh bantuan premi asuransi sebesar 40.000 nelayan dari total 129.620 nelayan. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 50 klaim dengan

nilai Rp.1.216.262.959, pada tahun 2021 sebanyak 12 klaim dengan nilai Rp.201.846.000, dan pada tahun 2022 sebanyak 93 klaim dengan nilai Rp 1.536.491607

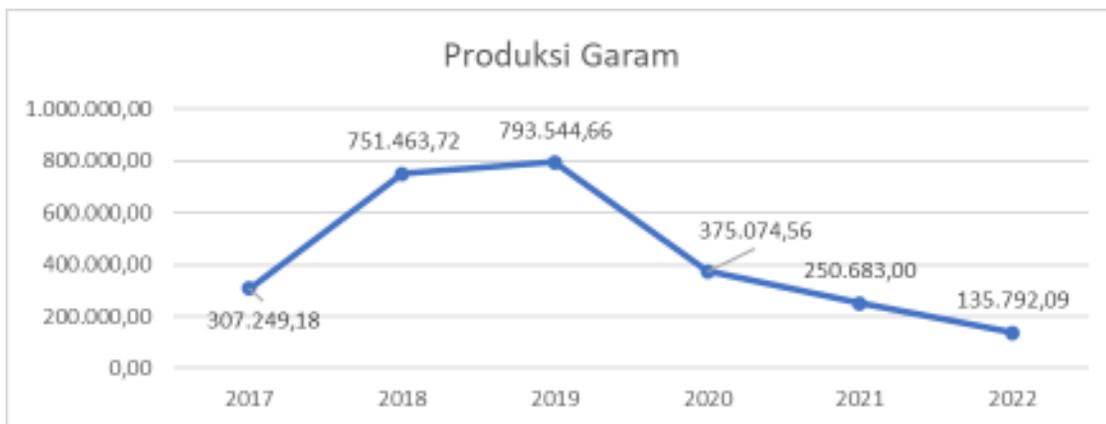
Sedangkan pada produksi perikanan budidaya juga fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan karena luas lahan budidaya di Jawa tengah meningkat dan adanya pemberian bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan. Peningkatan luas lahan terlihat dari saat ini total seluas 419.394.272 m² yang terdiri dari lahan budidaya intensif - semi intensif 59.938.532 m² dan lahan tradisional 359.455.740 m², serta didukung dengan jumlah pembudidaya tradisional sebanyak 220.229 orang dan pembudidaya intensif-semi intensif sebanyak 4.948 orang. Adapun jumlah pembudidaya yang berkompeten/terampil 1.323 orang (0,60%) dari keseluruhan pembudidaya. Selain itu, terdapat sejumlah pembudidaya yang bersertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik sebanyak 231, Cara Pembenihan Ikan Yang Baik sebanyak 93, serta Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik sebanyak 9 unit.

Dari sisi prasarana yang menunjang produksi perikanan budidaya, Provinsi Jawa Tengah memiliki 10 (sepuluh) loka perikanan budidaya, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Budidaya Air Tawar dan Payau Nomor B.22151/DJPB/X/2021, bahwa Pemerintah Provinsi berperan sebagai penyedia induk unggul dan benih bermutu di lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi. Dalam 5 (lima) tahun terakhir produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan, namun terdapat beberapa tantangan dalam mengelola perikanan budidaya antara lain kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai serta penurunan kualitas dan kuantitas induk Nila, Lele, dan Gurame. Penurunan kualitas induk tersebut menyebabkan calon induk yang dihasilkan menurun performa dan jumlahnya. Penurunan performa terjadi pada induk kelas GGPS (Great Grand Parent Stock), kelas GPS (Grand Parent Stock) maupun benih kelas sebar.

Selain itu, pada aspek kelestarian sumber daya ikan perlu dilakukan upaya pelestarian ikan jenis endemik lokal Jawa Tengah, misalnya jenis ikan beong, wader, nilem, tawes, derbang, gabus, dan dewa. Upaya pelestarian ini memberi manfaat untuk aspek konservasi maupun aspek ekonomi. Dalam aspek konservasi berfungsi untuk mempertahankan dari kepunahan plasma nutfah serta mempertahankan keanekaragaman jenis ikan lokal di perairan umum. Sedangkan secara ekonomi akan meningkatkan pendapatan nelayan perairan umum daratan karena ikan endemik memiliki rasa yang khas, unik serta bermanfaat bagi kesehatan sehingga harganya mahal. Namun masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu belum adanya sarana dan prasarana secara khusus untuk mengembangkan ikan endemik.

Sedangkan pada produksi garam cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena musim kemarau basah cukup lama. Hal ini dapat diminimalisir dengan penerapan teknologi pergaraman berupa penggunaan geoisolator (geomembran), rumah tunnel, gudang garam yang standar serta peralatan pencucian garam. Eksisting luas tambak garam yang menerapkan teknologi seluas 3.316,2 hektar atau 51% dari luas total 6.419,7 hektar.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan harga garam perlu ditingkatkan kapasitas sumber daya manusianya, antara lain dengan sertifikasi kompetensi bagi petambak garam. Saat ini sudah sebanyak 10 petambak garam yang disertifikasi, dari jumlah total petambak garam 10.307 orang. Sehingga masih banyak petambak garam yang perlu disertifikasi.



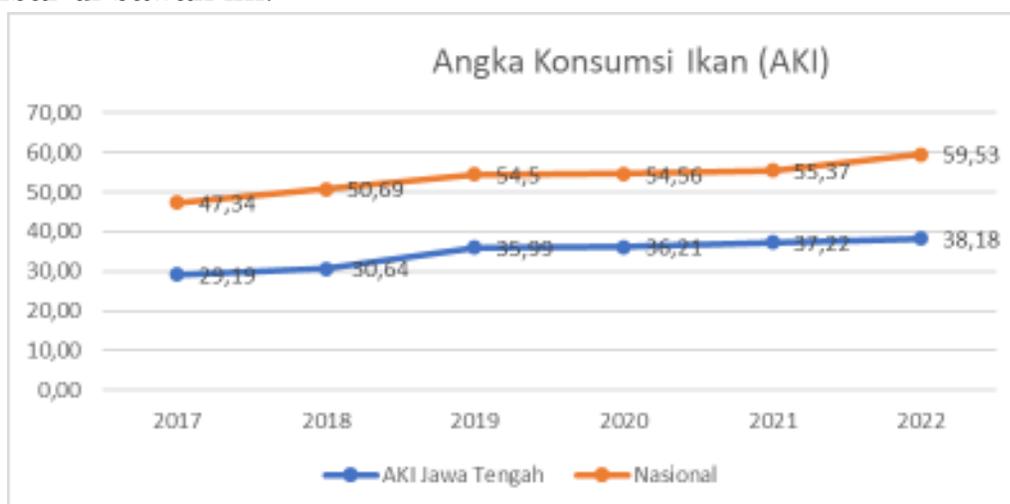
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

*) Realisasi 2022 merupakan angka sementara (belum dilakukan validasi)

Gambar 2.34.

Produksi Garam Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

Di sisi lain, tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah pada periode 2017 – 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih berada di bawah angka nasional. Tingkat konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

*) Angka Sementara

Gambar 2.35.

Angka Konsumsi Ikan di Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar 2.1 angka konsumsi ikan Jawa Tengah masih dibawah nasional disebabkan beberapa hal : 1) secara tradisional ikan bukan merupakan pilihan utama pemenuhan gizi karena ikan memberikan dampak buruk (gatal, bau amis, alergi dan lain lain); 2) Tidak semua daerah mempunyai cukup sumber daya ikan, terutama di daerah pedalaman; 3) Produksi ikan tidak untuk dikonsumsi sendiri tetapi dijual; 4) Harga produk ikan relatif lebih tinggi dibandingkan produk pemenuhan gizi lainnya, seperti daging, telur, tempe dll; 5) Ragam pengolahan ikan yang belum bervariasi. Dari permasalahan tersebut diperlukan upaya keras agar nilai Angka Konsumsi Ikan naik (mendekati angka nasional).

Selanjutnya pada pengolahan, secara umum masih didominasi oleh usaha skala mikro dan kecil dengan segala keterbatasan terutama pada aspek pemenuhan standar kelayakan produksi. Berikut data Unit Pengolahan Ikan yang ada di Jawa Tengah:

Tabel 2.33.
Unit Pengolahan Ikan di Provinsi Jawa Tengah

No	Pelaku Usaha	Potensi
1	Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan skala mikro dan kecil	8.064 Unit
2	Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan skala menengah besar	166 Unit
3	Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Nonpangan	100 Unit
4	Data Coldstorage	106 Unit

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

4. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Jumlah koperasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 – 2022 cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Apabila pada tahun 2019 jumlah koperasi sebanyak 22.274 unit dengan presentase koperasi aktif sebesar 84,22%, maka pada tahun 2020 sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap perekonomian Jawa Tengah dan kinerja koperasi, maka jumlah koperasi meskipun mengalami kenaikan, tetapi dari tingkat keaktifan terus menunjukkan penurunan. Selain dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, meningkatnya jumlah koperasi tidak aktif juga disebabkan

tingginya jumlah koperasi yang sedang menunggu pengesahan status pembubaran dan pencabutan badan hukumnya dari lembaran berita negara sebagai dampak dari kebijakan percepatan pembubaran koperasi oleh Kementerian Koperasi UKM RI dalam rangka mewujudkan koperasi modern. Sejak tahun 2017 terdapat 3.768 unit koperasi yang telah resmi dibubarkan, dan 115 koperasi yang masih dalam proses penelaahan di Kementerian Koperasi UKM RI untuk dilakukan pembubaran. Secara lengkap data koperasi se-Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.36.

Tabel 2.34.

Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022
Koperasi Se- Jawa Tengah

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
1.	Jumlah Koperasi	26.458	22.274	19.447	20.777	22.173
2.	Jumlah Koperasi aktif	21.832	18.759	13.090	10.770	10.980
3.	Prosentase Koperasi Aktif (%)	82,51	84,22	67,35	48,16	49,52

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.

**Data tahun 2022 merupakan data sementara pra rekonsiliasi dengan Kabupaten/kota*

Sedangkan hasil pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah mengalami kontraksi dimana pada tahun 2018 sebesar 19,62 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 16,27 persen, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penurunan rasio rentabilitas KSP/USP pada masa pandemi COVID-19 yang disebabkan anggota melakukan penarikan simpanan dan anggota kesulitan untuk melakukan pembayaran pinjaman serta adanya perubahan metodologi penilaian kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi UKM RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dimana saat ini klasifikasi kesehatan koperasi selain rasio keuangan juga memperhitungkan kualitas tata kelola manajemen dan profil

risiko. Untuk Perkembangan tingkat Kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.35.

Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Se-Jawa Tengah (KSP/USP)	16.344	13.101	12.774	12.903	13.166
2.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam Provinsi (KSP/USP) yang dinilai kesehatannya	474	454	128	222	375
3.	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (unit)	93	115	30	29	61
4.	Prosentase Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) Provinsi Sehat (%)	19,62	25,33	23,44	13,06	16,27

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara sinergi bersama dengan segenap pihak senantiasa melakukan pembinaan UMKM berkelanjutan. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 143.738 unit pada tahun 2018 menjadi 180.579 unit pada tahun 2022. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM juga meningkat dari sebesar 1.043.320 orang pada tahun 2018 menjadi sebanyak 1.330.343 orang pada tahun 2022. Aset UMKM juga meningkat dari sebesar Rp.29.824 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp 38.898 milyar pada tahun 2022. Demikian juga omset mengalami peningkatan dari sebesar Rp.55.691 milyar pada tahun 2018 menjadi Rp 68.581 milyar pada tahun 20. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36.

Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah UMKM Binaan	UMKM	143,738	161,458	167,391	173,431	180,579
	– Produksi/Non Pertanian	UMKM	49,328	55,275	57,527	60,449	65,063
	– Pertanian	UMKM	23,956	26,833	27,653	28,284	28,400
	– Perdagangan	UMKM	53,063	59,836	62,083	63,965	65,979
	– Jasa	UMKM	17,391	19,514	20,128	20,733	21,137
2	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	1,043,320	1,312,400	1,298,007	1,311,015	1,330,343
3	Asset	Rp. Milyar	29,824	38,158	38,353	38,521	38,898
4	Omzet	Rp. Milyar	55,691	67,550	67,087	68,242	68,581

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.

Dukungan kredit perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank menjadi hal yang cukup penting dalam rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari tahun 2018-2022 per kabupaten/kota yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37.

Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana dari Tahun 2018-2022 per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Penyaluran Kur per wilayah	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		UMKM	Realisasi (Rp)								
1	KAB. CILACAP	38	856,659,249,002	41,355	960,285,860,282	49,966	1,394,346,710,619	67,017	2,129,737,861,185	71,016	2,624,919,833,453
2	KAB. BANYUMAS	50,460	1,178,085,177,264	55,115	1,282,747,263,690	62,067	1,722,310,316,244	81,032	2,592,038,105,781	84,593	3,076,948,656,311
3	KAB. PURBALINGGA	22,649	501,592,223,432	25,654	602,714,584,855	27,689	803,732,756,908	40,839	1,299,152,047,779	40,276	1,442,972,839,914
4	KAB. BANJARNEGARA	26,102	523,179,431,304	29,766	632,705,263,546	36,186	899,705,181,588	42,432	1,251,222,195,514	44,733	1,521,610,585,804
5	KAB. KEBUMEN	24,158	538,823,990,024	25,513	573,708,207,067	34,149	952,579,273,357	42,936	1,388,686,443,433	41,576	1,645,011,183,407
6	KAB. PURWOREJO	20,917	376,431,320,603	21,332	408,576,873,790	28,451	698,850,237,182	35,719	1,027,427,376,945	36,796	1,332,611,684,888
7	KAB. WONOSOBO	25,026	461,715,984,838	23,057	515,131,370,783	29,502	786,462,223,780	32,089	1,087,479,988,575	34,258	1,335,876,474,453
8	KAB. MAGELANG	30,992	702,174,782,519	32,030	732,548,594,861	40,950	1,097,838,191,734	46,039	1,460,713,188,234	49,489	1,867,082,199,837
9	KAB. BOYOLALI	26,929	676,618,908,508	31,959	828,780,579,519	37,366	1,112,557,697,460	45,996	1,606,818,765,940	49,694	2,077,453,794,156
10	KAB. KLATEN	34,572	879,808,412,373	37,544	982,285,115,877	51,196	1,444,646,931,716	61,939	2,121,148,190,896	63,467	2,681,277,315,450
11	KAB. SUKOHARJO	24,163	615,378,379,858	25,087	706,836,957,302	34,744	1,081,776,881,390	42,854	1,582,353,275,797	41,976	1,920,002,945,800
12	KAB. WONOGIRI	23,421	574,459,496,201	25,496	685,671,001,093	35,877	1,087,998,374,407	46,919	1,590,755,342,861	49,380	2,044,594,999,547
13	KAB. KARANGANYAR	25,500	610,990,807,640	27,911	722,856,807,398	35,901	1,088,590,422,286	43,330	1,569,531,753,495	44,436	2,053,690,544,527
14	KAB. SRAGEN	30,639	761,472,883,668	34,534	899,981,114,268	40,635	1,300,547,042,229	52,677	2,013,289,872,710	54,400	2,541,688,588,633
15	KAB. GROBOGAN	44,130	802,071,291,527	49,175	979,056,006,113	67,026	1,542,288,553,779	82,266	2,405,075,535,917	89,416	3,173,851,980,803
16	KAB. BLORA	55,268	1,035,403,109,778	57,549	1,210,374,601,719	73,654	1,699,912,069,917	75,130	2,104,246,917,986	76,514	2,611,075,351,064
17	KAB. REMBANG	22,861	462,869,548,005	25,223	544,814,780,697	28,769	699,336,336,217	32,345	1,010,725,024,881	36,240	1,369,369,188,553
18	KAB. PATI	60,583	1,316,275,974,087	66,826	1,486,154,011,274	79,555	2,249,691,305,260	80,544	2,797,359,822,366	83,493	3,631,451,274,447
19	KAB. KUDUS	21,345	541,886,029,299	23,425	589,874,956,352	26,887	780,606,313,383	29,209	1,061,448,572,509	32,328	1,436,607,198,786
20	KAB. JEPARA	29,831	651,902,295,805	35,160	740,258,155,922	36,752	954,019,977,024	46,850	1,474,838,409,206	50,478	1,976,896,899,818
21	KAB. DEMAK	29,097	627,563,823,928	32,212	769,213,338,424	36,477	1,020,473,479,231	42,974	1,527,633,391,898	48,849	2,037,771,456,030
22	KAB. SEMARANG	27,386	672,318,320,669	30,419	765,945,740,676	41,340	1,098,366,277,769	44,383	1,651,074,085,410	46,723	2,095,318,514,959
23	KAB. TEMANGGUNG	22,851	463,444,943,399	23,732	522,430,931,880	32,682	812,940,656,417	37,125	1,149,057,568,683	40,697	1,449,775,849,161

No	Penyaluran Kur per wilayah	Tahun									
		2018		2019		2020		2021		2022	
		UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)						
24	KAB. KENDAL	21,407	504,425,741,198	27,899	652,804,255,069	39,596	999,378,230,464	42,382	1,403,642,495,261	44,397	1,722,038,355,016
25	KAB. BATANG	17,048	365,752,159,664	21,407	443,649,337,912	24,481	661,257,570,763	32,120	1,066,373,925,602	37,065	1,353,706,515,946
26	KAB. PEKALONGAN	15,636	310,398,836,804	18,725	378,276,899,231	24,150	629,124,933,039	31,580	981,476,531,591	35,577	1,222,824,400,202
27	KAB. PEMALANG	30,058	569,317,904,509	36,203	739,922,402,326	48,814	1,164,357,376,954	62,162	1,773,175,921,199	65,552	2,157,929,858,009
28	KAB. TEGAL	43,492	867,744,725,423	47,475	1,021,705,034,995	56,474	1,432,849,120,987	73,900	2,057,898,435,824	77,384	2,450,206,822,298
29	KAB. BREBES	72,596	1,256,158,500,939	75,573	1,417,876,938,238	86,856	1,956,644,782,697	93,977	2,558,951,345,370	102,660	3,080,273,062,920
30	KOTA MAGELANG	3,118	84,218,967,491	3,417	79,949,600,586	4,993	130,892,399,071	4,793	159,603,112,815	4,827	216,101,106,000
31	KOTA SURAKARTA	12,767	354,224,755,149	13,086	391,251,167,491	19,305	593,619,780,111	30,071	1,047,482,051,404	27,952	1,290,010,839,228
32	KOTA SALATIGA	4,532	124,949,506,233	4,771	128,492,192,604	5,926	179,309,053,998	5,676	220,769,639,245	6,110	320,100,400,000
33	KOTA SEMARANG	18,922	626,331,699,058	21,371	695,195,395,549	31,861	1,070,732,933,645	37,328	1,702,978,989,436	42,230	2,430,847,721,262
34	KOTA PEKALONGAN	5,711	119,476,891,400	6,464	150,943,612,600	7,247	224,298,605,237	10,143	323,354,337,497	11,052	386,682,529,242
35	KOTA TEGAL	7,507	193,973,622,844	7,676	229,764,739,800	7,889	262,776,282,173	9,515	360,062,578,224	10,930	464,287,866,282

Sumber : Dinkop UKM Prov. Jateng, 2022.

5. Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2016 hingga tahun 2021 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan tiga besar sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan, dan pertanian. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan tahun 2021 sebesar 195.399.044,07 juta rupiah, dan memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,75 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2016-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38.

Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai total PDRB (Juta Rp)	1.268.261.165,59	1.361.567.356,73	1.347.922.689,03	1.420.799.908,38	1.157.316.832,47 *) TW 3
2	Nilai Sektor Perdagangan (Juta Rp)	172.944.065,63	187.064.449,89	181.860.778,05	195.399.044,07	156.645.772,33 *) TW 3
3	Kontribusi (%)	13,64	13,74	13,48	13,75	13,54 *) TW 3

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Nilai ekspor non migas pada tahun 2016 sampai dengan 2021 selalu mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan dari tahun 2019 yang merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19. Nilai ekspor non migas pada tahun 2021 tercatat sebesar US\$10.257,35 juta atau lebih tinggi dari target RPJMD sebesar 152,21 persen, dimana target tercatat tahun 2021 sebesar US\$ 6.739 Juta.

Sedangkan ekspor migas Jawa Tengah dari tahun 2016 sampai dengan 2021 juga selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 ekspor migas Jawa Tengah tercatat di angka US\$ 438,96 juta, sementara di tahun 2020 realisasi tercatat mencapai US\$ 384,06 juta, sehingga total ekspor Jawa Tengah US\$10.696,31 juta.

Penurunan terbesar nilai ekspor non migas pada Desember 2021 terhadap November 2021 pada sepuluh komoditas terutama terjadi pada komoditas kayu dan barang dari kayu yang turun sebesar US\$ 16,73 juta (13,25 persen). Komoditas ini memberikan peran terhadap total ekspor non migas sebesar 11,40 persen pada periode Januari – Desember 2021. Komoditas lain yang juga mengalami penurunan adalah serat stapel buatan yang turun sebesar US\$ 12,48 juta (25,97 persen); lemak dan minyak hewani/nabati turun sebesar US\$ 12,16 juta (41,15 persen); alas kaki turun US\$ 6,14 juta (5,70 persen); perabotan, lampu dan alat penerangan turun US\$ 5,98 juta (6,39 persen); barang dari kulit samak turun sebesar US\$ 4,96 juta (8,81 persen); serta pakaian dan aksesorinya (rajutan) turun US\$ 2,97 juta (2,22

persen). Sedangkan pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan) naik US\$ 34,81 juta (18,00 persen); mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya naik sebesar US\$3,44 juta (10,24 persen); dan barang dari bulu unggas, bunga artifisial, dan wig naik US\$ 0,61 juta (2,65 persen). Untuk perkembangan ekspor Jawa Tengah baik migas dan non migas dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.39.
Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022 (Juta US\$)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor	8.260,18	8.516,70	8.088,30	10.696,31	10.900,69*) Nop 2022
- Migas	168,55	303,86	384,06	438,96	552,94
- Non Migas	8.091,62	8.212,84	7.704,24	10.257,35	N/A

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Nilai impor Jawa Tengah untuk migas sejak tahun 2016 berfluktuatif, dimana pada tahun 2016 tercatat impor migas sebesar US\$ 3.653,80 juta, dan di tahun 2021 sebesar US\$ 4.440,52 juta. Nilai impor non migas Jawa Tengah tahun 2021 sebesar US\$ 7.341,27 juta, naik 11,82 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yang sebesar US\$ 6.565,04 juta.

Nilai impor Desember 2021 naik sebesar US\$ 532,79 juta (69,11 persen) jika dibandingkan dengan Desember 2020. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan impor migas sebesar US\$ 438,11 juta (208,47 persen) dan non migas meningkat sebesar US\$ 94,68 juta (16,88 persen). Meningkatnya impor komponen migas disebabkan oleh peningkatan impor hasil minyak sebesar US\$ 82,91 juta (229,71 persen), dan impor minyak mentah sebesar US\$ 355,20 juta (204,07 persen). Nilai impor non migas Jawa Tengah Desember 2021 mencapai US\$ 655,47 juta, turun US\$ 60,69 juta (8,47 persen) dibanding November 2021. Apabila dilihat lebih rinci berdasarkan sepuluh golongan komoditas utama diketahui bahwa penurunan terbesar dialami golongan biji dan buah mengandung minyak yang turun sebesar US\$ 26,95 juta (69,84 persen); kain rajutan turun sebesar US\$ 11,12 juta (29,75 persen); mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya turun sebesar US\$ 8,22 juta (13,49 persen); kapas turun sebesar US\$ 5,31 juta (10,58 persen); filament buatan turun sebesar US\$ 4,36 juta (16,37 persen); sereal turun sebesar US\$ 2,81 juta (18,75 persen); serta mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya turun sebesar US\$ 1,03 juta (1,14 persen). Sedangkan serat stapel buatan naik sebesar US\$ 4,62 juta (18,35) persen; plastik dan barang dari plastik naik US\$ 2,21 juta (3,83 persen); dan komoditas kendaraan dan bagiannya turun sebesar US\$ 1,46 juta (8,25 persen). Perkembangan impor Jawa Tengah baik migas dan non migas dapat dilihat di tabel sebagai berikut.

Tabel 2.40.
Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022 (Juta US\$)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Impor	14.779,38	12.567,62	8.719,80	11.781,79	13.862,75 *) Nop 2022
- Migas	5.635,27	3.906,03	2.154,76	4.440,52	6.854,21
- Non Migas	9.144,12	8.661,59	6.565,04	7.341,27	7.008,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Total neraca perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2021 rata-rata mencatatkan nilai defisit sebesar US\$ 3.395,98 juta, yang disumbang oleh neraca perdagangan migas dengan rata-rata defisit sebesar US\$ 3.724,2 juta. Sedangkan neraca perdagangan non migas tercatat surplus dengan rata-rata surplus sebesar US\$ 328,22 juta. Data realisasi sampai dengan bulan Desember 2021 menyebutkan ekspor non migas Jawa Tengah tercatat sebesar US\$ 10.257,35 juta atau tumbuh 33,14 persen (*c-to-c*), dengan tujuan ekspor ke sejumlah kawasan tradisional dan nontradisional. Secara kumulatif ekspor non migas selama Bulan Januari – Desember 2021 tercatat surplus sebesar US\$ 2.916,08 juta. Total neraca perdagangan (non migas dan migas) di tahun 2021 tercatat defisit sebesar US\$ 1.085,48 juta.

Tabel 2.41.
Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022 (Juta US\$)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor	8,260.18	8.516,70	8.088,30	10.696,31	10.900,69*) Nop 2022
- Migas	168,55	303,86	384,06	438,96	552,94
- Non Migas	8,091.62	8.212,84	7.704,24	10.257,35	10.347,75
Impor	14,779.38	12.567,62	8.719,80	11.781,79	13.862,75 *) Nop 2022
- Migas	5.635,27	3.906,03	2.154,76	4.440,52	6.854,21
- Non Migas	9.144,12	8.661,59	6.565,04	7.341,27	7.008,54
Surplus/Defisit	(6.519,20)	(4.050,92)	(631,5)	(1.085,48)	(2.962,06)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Untuk penerbitan sertifikasi mutu barang sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 mengalami capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2016 mencapai 1.416 sertifikat, namun pada tahun 2017 dan 2018 menurun menjadi sebesar 256 dan 260 sertifikat untuk 5 jenis barang, dan ditahun 2021 menjadi 1.925 sertifikat untuk 6 jenis barang. Jumlah ijin usaha perdagangan luar negeri dan penerbitan sertifikat mutu barang di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42.
Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Usaha Perdagangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)	260 sertifikat. 5 jenis barang	2.437 sertifikat, 5 jenis barang	1.767 sertifikat, 7 jenis barang	1.925 sertifikat, 6 jenis barang	sertifikat, 7 jenis barang

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, yang diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Namun demikian apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Jumlah LPKSM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3 unit yaitu di 3 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.43.
Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota)	14	8	4	1	0
2	Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota)	28 di 29 Kab/Kota	18 di 9 Kab/Kota	18 di 9 Kab/Kota	3 di 3 kab kota	5 di 4 Kab/Kota
3	Persentase penyelesaian sengketa Konsu-men melalui BPSK kabupaten/kota (%)	68 Kasus (100%)	111 kasus (100%)	27 kasus (100%)	6 kasus (100%)	0 kasus (-)
4	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis)	1.124	3.512	2.741	1.228	305

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Lebih lanjut dalam rangka lebih memperkuat daya tahan industri dan perdagangan di dalam negeri telah diinisiasi pula upaya untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; serta memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM dari dalam negeri. Adapun sasaran peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian/kementerian/lembaga negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta maupun masyarakat; peningkatan capaian nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN); peningkatan jumlah produk yang tersertifikasi TKDN; serta peningkatan kecintaan dan kebanggaan masyarakat akan produk dalam negeri.

6. Perindustrian

Kinerja kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2021 sebesar 487.445.099,28 juta rupiah, dan memberikan kontribusi sebesar 34,31 persen terhadap total PDRB yang sebesar 1.420.799.908,38 juta rupiah. Nilai dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44.

**Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai total PDRB (Juta Rp)	1.268.454.783,96	1.362.457.380,57	1.347.922.689,03	1.420.799.908,38	1.157.316.832,47
2	Nilai Sektor Industri (Juta Rp)	436.477.149,74	468.992.159,77	464.609.134,06	487.445.099,28	392.749.654,42
3	Kontribusi (%)	34,41	34,41	34,47	34,31	33,94

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Industri besar dari 972 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 2.417 unit usaha pada tahun 2021. Untuk jumlah IKM di tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. IKM di tahun 2021 sebanyak 912.421 unit usaha meningkat dibanding tahun 2016 yang sebesar 449.090 unit usaha.

Tabel 2.45.
Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Industri	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Besar	1.228	1.584	1.591	2.417	2.982
2	Kecil dan Menengah	325.091	327.110	327.200	912.421	204.608

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari sejumlah industri yang berkembang di Jawa Tengah, beberapa jenis industri menjadi industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri meliputi industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif, dan kerajinan. Pola pengembangan industri tersebut diarahkan melalui pendekatan pembentukan klaster industri potensial untuk meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah yang melibatkan industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk kelembagaan klaster industri sebanyak 19 klaster terdiri dari 6 klaster logam mesin dan tekstil, 7 klaster komponen otomotif, elektronika, aneka, serta 6 klaster agro, kimia dan hasil hutan.

Tabel 2.46.
Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Jenis industri	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	jumlah klaster logam, mesin, tekstil	6	6	6	6	6
2	jumlah klaster komponen otomotif, elektronika dan aneka	7	7	7	7	7
3	Jumlah klaster agro, kimia dan hasil hutan	6	6	6	6	7
	Jumlah klaster industri	19	19	19	19	20

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selain itu dalam pengembangan kelembagaan usaha sektor industri tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3 (tiga) lembaga industri meliputi Pokja Industri pada Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), dan Mitra Praja Utama.

7. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Dalam pelaksanaannya capaian indikator kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.47.
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Indikator	Capaian
1	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	9,63 %
2	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	3,39 %
3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	16,99%
4	Rata-rata jumlah pengeluaran belanja wisatawan nusantara (Rp/Orang)	Rp. 4,184,389,00
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	144.691 orang
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	46.465.437 orang
7	Rata-rata lama menginap Wisatawan Nusantara	1,36 hari
8	Rata-rata lama menginap Wisatawan Mancanegara	2,57 hari
9	Daya Tarik Wisata (DTW)	1235 (DTW Alam 607, DTW Budaya 456 dan DTW Buatan 172)
10	SDM Ekonomi Kreatif yang tersertifikasi	700 orang
11	SDM Pariwisata yang tersertifikasi	3,609 orang
12	Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTaKreatif) Indonesia	9 Kab/Kota Kreatif

Sumber: Dinporapar Provinsi Jawa Tengah, 2023

Jumlah kunjungan wisatawan 46.610.128 orang yang terdiri dari Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sebesar 144.691 orang dan Wisatawan Nusantara 46.465.437 orang. Pengeluaran Wisatawan Nusantara sebesar 4.184.389 per orang dan Wisatawan mancanegara sebesar \$ 670 per orang. Penetapan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTaKreatif) Indonesia 9 Kabupaten/Kota (Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Karanganyar dan Kab. Kebumen. Ini menunjukkan sektor pariwisata Jawa Tengah mengalami pertumbuhan di tahun 2022.

2.3.2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan di Jawa Tengah sebesar 31.165,85 km yang terbagi sesuai kewenangan sebagai berikut:

1. Kewenangan provinsi sebesar 7,73 persen;
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 87,39 persen;
3. Kewenangan Nasional sebesar 4,88 persen.

Sedangkan jalan tol yang sudah fungsional sepanjang 330,71 km dalam kondisi baik dan Jalan Non Status (NS) sepanjang 109,82 km yang merupakan bagian dari Jalur JJLS Jawa Tengah. JJLS merupakan jaringan jalan strategis yang menghubungkan PKW Cilacap – Yogya, dan merupakan jaringan jalan pulau terluar negara yang berbatasan dengan Australia. JJLS di ruas Kebumen – Cilacap juga dapat berperan menjadi tanggul mitigasi penanggulangan bencana tsunami yang mengancam wilayah di sepanjang pantai selatan.

Kondisi jalan kewenangan provinsi tahun 2022 yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 1046,035 km atau 43,50 persen. Sedangkan berdasarkan kondisi perkerasan jalan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48.
Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan Tahun 2022

Kewenangan	Kondisi Ruas Jalan								Total Panjang Jalan (Km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	Km	%	km	%	km	%	Km	%	
Nasional	560,93	36,95	820,79	54,07	122,75	8,09	13,61	0,90	1518,09
Provinsi	2.010,27	83,60	213,89	8,89	68,33	2,84	112,25	4,67	2404,74
Kabupaten/ Kota	14.909,02	54,83	7.385,37	27,16	2.587,33	9,51	2.312,08	8,50	27.193,81
Jumlah Jateng	17.480,22	56,18	8.420,05	27,06	2.778,42	8,93	2.437,95	7,83	31.116,64
Jalan Non Status	15,74	242,99	52,62	199,35	13,30	66,30	25,45	91,37	109,82
Jalan Tol	330,71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,71

Sumber: SNVT P2JN Jawa Tengah, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Perkembangan kondisi jalan kewenangan provinsi dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Kondisi permukaan jalan baik sejak tahun 2019 mengalami penurunan hingga tahun 2021, namun pada tahun 2022 dapat diperbaiki dengan kondisi baik sebesar 83,60 %, dan kondisi rusak berat sebesar 4,67% Jalan Provinsi dengan kondisi rusak berat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.49.
Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	Kondisi							
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
2018	2.169,076	90,20	196,145	8,16	39,520	1,64	0,000	0,00
2019	2.041,459	84,89	244,111	10,15	119,171	4,96	0,000	0,00
2020	1.852,191	77,02	312,125	12,98	240,425	10,00	0,000	0,00
2021	965,605	40,15	1.219,454	50,71	219,682	9,14	0,000	0,00
2022	2.010,27	83,60	213,89	8,89	68,33	2,84	112,25	4,67

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

Adapun persebaran kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota untuk tiap-tiap daerah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50.
Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Kondisi Jalan Kabupaten / Kota Tahun 2021								Total Panjang (km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
		(km)	%	(km)	%	(km)	%	(km)	%	
1	Banjarnegara	714,96	76,17	132,69	14,14	19,44	2,07	71,56	7,62	938,65
2	Banyumas	765,294	50,749	319,243	21,170	277,852	18,425	145,611	9,656	1.508,000
3	Batang	317,96	57,56	148,75	26,93	56,88	10,30	28,83	5,22	552,42
4	Blora	481,35	39,75	330,51	27,30	63,96	5,28	335,02	27,67	1.210,84
5	Boyolali	412,88	60,90	148,88	21,96	67,22	9,91	49,01	7,23	678,00
6	Brebes	199,25	31,10	242,13	37,79	98,86	15,43	100,49	15,68	640,73
7	Cilacap	864,28	68,10	137,70	10,85	124,28	9,79	142,94	11,26	1.269,20
8	Demak	175,43	20,55	589,92	69,12	75,71	8,87	12,46	1,46	853,52
9	Grobogan	571,700	60,660	231,723	24,590	62,049	6,580	76,917	8,160	942,389
10	Jepara	329,43	37,77	442,79	50,77	74,38	8,53	25,54	2,93	872,14
11	Karanganyar	437,54	41,81	420,58	40,19	145,71	13,92	42,69	4,08	1.046,52
12	Kebumen	292,18	30,42	416,84	43,40	162,03	16,87	89,31	9,30	960,36
13	Kendal	518,03	67,25	169,03	21,94	47,20	6,13	36,07	4,68	770,33
14	Klaten	437,44	61,10	214,36	29,94	55,98	7,82	8,11	1,13	715,89
15	Kudus	560,16	87,63	36,53	5,71	14,29	2,24	28,28	4,42	639,26
16	Magelang	680,20	67,96	206,28	20,61	79,30	7,92	35,05	3,50	1.000,83
17	Pati	412,20	56,23	92,10	12,56	121,40	16,56	107,42	14,65	733,115
18	Pekalongan	384,700	61,99	139,011	19,40	50,103	7,61	96,081	14,34	669,895
19	Pemalang	482,64	63,03	76,34	9,97	67,60	8,83	139,15	18,17	765,72
20	Purbalingga	566,68	63,81	191,73	21,59	64,70	7,29	64,98	7,32	888,09
21	Purworejo	214,09	27,83	414,78	53,92	97,74	12,71	42,65	5,54	769,26
22	Rembang	332,35	68,98	89,90	15,15	59,70	10,36	94,20	16,35	576,15
23	Semarang	485,79	66,22	191,39	26,09	29,73	4,05	26,73	3,64	733,62
24	Sragen	800,64	78,47	65,01	6,37	86,07	8,44	68,53	6,72	1.020,25
25	Sukoharjo	141,04	23,31	399,70	66,05	63,51	10,50	0,88	0,15	605,12
26	Tegal	577,01	76,78	95,48	10,97	73,34	5,17	101,44	11,97	847,27
27	Temanggung	465,76	71,60	107,61	16,54	49,51	7,61	27,61	4,24	650,48
28	Wonogiri	1.110,63	77,08	158,64	11,01	133,46	9,26	38,20	2,65	1.440,93
29	Wonosobo	193,39	19,35	455,20	45,55	133,47	13,36	217,22	21,74	999,28
30	Kota Magelang	71,56	60,17	29,11	24,48	17,26	14,51	1,01	0,85	118,93
31	Kota Pekalongan	101,00	65,83	24,12	15,72	9,58	6,25	18,71	12,20	153,41
32	Kota Salatiga	235,40	69,75	87,41	25,90	11,25	3,33	3,41	1,01	337,47
33	Kota Semarang	381,72	45,45	377,70	44,97	52,14	6,21	28,34	3,37	839,90
34	Kota Surakarta	86,14	40,18	102,34	47,73	25,43	11,86	0,50	0,23	214,41
35	Kota Tegal	108,20	46,75	99,85	43,14	16,21	7,00	7,17	3,10	231,44
	JUMLAH	14.909,02	54,83	7.385,37	27,16	2.587,33	9,51	2.312,08	8,50	27.193,81

Sumber: DPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan 10 tahun terhitung sejak diundangkan jalan provinsi harus sesuai dengan standar. Standar jalan provinsi dilihat dari aspek dimensi jalan (lebar perkerasan jalan minimal 7 m), aspek konstruksi perkerasan jalan (muatan sumbu terberat sebesar 8 ton) dan aspek ketersediaan bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan (saluran drainase dan dinding penahan tanah serta bahu jalan).

Sampai dengan tahun 2022, panjang Jalan Provinsi yang telah sesuai dengan standar (dari sisi lebar jalan ≥ 7 m dan konstruksi sesuai MST 8 ton) sepanjang 1.046,035 km. Sedangkan jalan provinsi yang telah sesuai dengan standar dengan kondisi permukaan mantap adalah sepanjang 2.224,15 km atau mencapai 92,49 persen. Penyesuaian standar jalan provinsi perlu dilakukan secara bertahap utamanya untuk penuntasan jalan yang mempunyai nilai strategis dengan tetap menjaga kondisi permukaan seluruh Jalan Provinsi.

Tabel 2.51.

Kondisi Permukaan Provinsi Jawa Tengah Menurut Lebar Jalan Tahun 2022

No.	Lebar Perkerasan Jalan	Panjang (km)	Persen-tase (%)	Kondisi							
				Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
				Panjang (km)	Persen-tase (%)	Panjang (km)	Persen-tase (%)	Panjang (km)	Persen-tase (%)	Panjang (km)	Persen-tase (%)
1	≥ 7 m	1.046,035	43,50	904,758	37,62%	88,586	3,68%	29,177	1,21%	23,514	0,98%
2	< 7 m	1.358,706	56,50	1105,579	45,98%	125,229	5,21%	39,171	1,63%	88,727	3,69%
Total		2.404,741	100	2010,337	83,60%	213,815	8,89%	68,348	2,84%	112,241	4,67%

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023

b. Air Minum dan Sanitasi

Cakupan akses air minum layak pada tahun 2022 sebesar 88,27 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 86,87 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air minum aman pada tahun 2022 sebesar 36,93 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 34,06 persen. Sedangkan untuk cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2022 sebesar 48,82 persen yang juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 44,37 persen.

Cakupan akses air limbah domestik layak pada tahun 2022 sebesar 90,38 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 88,67 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air limbah domestik aman pada tahun 2022 sebesar 9,94 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 10,75 persen dikarenakan terjadi kerusakan pada prasarana yang sudah ada dan tidak ada pembangunan baru.

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh air minum di Jawa Tengah terdapat 5 (lima) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas, Keburejo dan Petanglong, serta sedang dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wosokusas, dan proses inisiasi yaitu SPAM Regional Dadimuria. Sedangkan dalam rangka percepatan pencapaian akses menyeluruh air limbah domestik, diinisiasi penyediaan sarana prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Jawa Tengah

Tabel 2.52.
Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2022

No	Uraian	Tahun (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Akses Air Minum						
	Layak	-	79,35	81,77	85,11	86,87	88,27
	Aman	-	22,66	26,7	32,24	34,06	36,93
	Jaringan Perpipaan	-	36,8	39,08	43,74	44,37	48,82
2	Akses Air Limbah Domestik						
	Layak	80	82,04	89,57	90,72	88,67	90,38
	Aman	-	-	-	10,69	10,75	9,94

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam rangka pengelolaan air minum dan air limbah domestik yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola layanan air minum dan air limbah domestik di kabupaten/kota dengan kondisi pengelolannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53.
Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Minum Kabupaten/Kota di
Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kab/Kota	Akses Air Minum (%)			Kondisi SPAM Perkotaan PDAM (Buku BPPW 2021)			Kondisi BP/KP-SPAMS			
		Layak	Aman	Jaringan Perpipaan	Kapasitas Produksi (Lps)	Idle Capacity (Lps)	Status Kinerja	Jumlah BP/KPS PAMS	Jumlah Fungsi Baik	Jumlah Fungsi Sebagian	Jumlah Tidak Fungsi
1	Cilacap	89.25	31.67	29.99	809.12	110.88	Sehat	165	149	16	0
2	Banyumas	76.99	20.74	31.67	974.67	159.31	Sehat	192	182	4	6
3	Purbalingga	94.61	46.43	46.43	544.42	204.08	Sehat	167	166	0	1
4	Banjarnegara	95.73	25.92	26.15	101.84	33.17	Kurang Sehat	194	190	2	2
5	Kebumen	92.42	12.06	19.17	300.00	140.00	Sehat	179	174	3	2
6	Purworejo	96.86	35.89	27.32	237.66	69.34	Sehat	222	216	2	4
7	Wonosobo	93.77	49.95	86.02	1067.67	349.33	Sehat	176	176	0	0
8	Magelang	91.24	85.88	41.98	849.09	193.51	Sehat	234	227	7	0
9	Boyolali	94.11	38.87	52.58	511.00	202.00	Sehat	187	187	0	0
10	Klaten	93.19	32.63	32.67	512.83	-	Sehat	155	147	1	7
11	Sukoharjo	93.18	14.90	28.87	275.43	84.57	Sehat	88	88	0	0
12	Wonogiri	89.82	27.91	42.00	440.13	76.13	Sehat	185	182	3	0
13	Karanganyar	98.00	30.71	75.50	659.00	12.00	Sehat	154	150	3	1
14	Sragen	87.08	20.11	42.00	765.89	163.90	Sehat	160	160	0	0
15	Grobogan	86.30	17.63	21.86	384.00	67.00	Sehat	186	176	0	10
16	Blora	93.00	9.50	25.00	192.00	95.00	Sehat	186	180	0	6
17	Rembang	90.72	39.87	28.81	181.66	84.34	Sehat	175	163	7	5

No	Kab/Kota	Akses Air Minum (%)			Kondisi SPAM Perkotaan PDAM (Buku BPPW 2021)			Kondisi BP/KP-SPAMS			
		Layak	Aman	Jaringan Perpipaan	Kapasitas Produksi (Lps)	Idle Capacity (Lps)	Status Kinerja	Jumlah BP/KPS PAMS	Jumlah Fungsi Baik	Jumlah Fungsi Sebagian	Jumlah Tidak Fungsi
18	Pati	81.53	35.81	35.81	305.72	102.88	Kurang Sehat	204	191	6	7
19	Kudus	98.25	38.06	38.06	428.30	260.60	Sehat	87	83	0	4
20	Jejara	97.48	19.92	19.92	627.10	106.40	Kurang Sehat	88	88	0	0
21	Demak	83.65	41.47	79.95	509.86	173.74	Sehat	184	174	4	6
22	Semarang	98.80	37.34	40.52	386.00	80.00	Sehat	178	177	1	0
23	Temanggung	95.17	31.00	76.07	444.77	108.23	Sehat	199	199	0	0
24	Kendal	94.29	70.75	69.00	670.19	73.11	Sehat	154	154	0	0
25	Batang	90.00	47.00	47.00	467.79	97.21	Sehat	183	181	1	1
26	Pekalongan	87.62	87.62	58.00	203.75	-	Sehat	188	188	0	0
27	Pemalang	88.00	40.97	43.00	424.78	317.72	Sehat	180	168	7	5
28	Tegal	66.80	32.80	34.00	365.57	46.65	Sehat	171	163	3	5
29	Brebes	60.00	23.04	23.04	356.75	517.25	Sehat	158	152	0	6
30	Kota Magelang	98.05	85.88	91.02	775.16	-	Sehat	0	0	0	0
31	Kota Surakarta	95.84	58.00	61.30	858.98	113.81	Sehat	0	0	0	0
32	Kota Salatiga	75.32	74.12	75.32	389.78	103.58	Sehat	0	0	0	0
33	Kota Semarang	79.76	61.95	79.76	3965.13	-	Sehat	88	85	0	3
34	Kota Pekalongan	86.00	52.00	86.00	356.00	291.00	Sehat	47	43	3	1
35	Kota Tegal	93.77	59.28	92.91	277.33	127.67	Sehat	0	0	0	0
	Jawa Tengah							5114	4959	73	82

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.54.

Kondisi Akses dan Pengelolaan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik		
		Layak	Aman	Nama/Lokasi IPLT	Status Operasi	Jumlah KPP
1	Cilacap	90,37	0,19	IPLT Tritih Lor Desa Tritih Lor Kec. Jeruk Legi	Beroperasi	1
2	Banyumas	90	1,4	IPLT Gunung Tugel Desa Kedungrandu Kec. Patikraja	Beroperasi tidak sebagaimana mestinya	30
3	Purbalingga	93,18	belum ada IPLT	-		2
4	Banjarnegara	71,99	belum ada IPLT	-		2
5	Kebumen	93	3,09	IPLT Kaligending Desa Kaligending Kec. Karang Sambung	Beroperasi	14
				IPLT Semali Desa Semali Kec. Sempor	Beroperasi	
6	Purworejo	89,43	20	IPLT Gunung	Tidak	17

No	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik		
		Layak	Aman	Nama/Lokasi IPLT	Status Operasi	Jumlah KPP
				Tumpeng Desa Jetis Kec. Loano	Dioperasikan	
7	Wonosobo	71,61	0,35	IPLT Wonorejo Desa Wonorejo Kec. Selomerto	Beroperasi tidak sebagaimana mestinya	n/a
8	Magelang	91,11	belum ada IPLT	-		12
9	Boyolali	98,28	29,19	IPLT Winong Desa Jelok Kec. Boyolali	Tidak Dioperasikan	32
10	Klaten	100	1,32	IPLT Jomboran Desa Jomboran Kec. Klaten Tengah	Beroperasi	50
11	Sukoharjo	97,91	2,31	IPLT Mojorejo Desa Mojorejo Kec. Bendosari	Beroperasi	10
12	Wonogiri	99,86	IPLT belum beroperasi	IPLT Ngadirojo Desa Kerjo Lor Kec. Ngadirojo	Belum Beroperasi	33
13	Karanganyar	99,38	2,9	IPLT Mojogedang Desa Kaliboto Kec. Mojogedang	Beroperasi	30
14	Sragen	84	1,91	IPLT Tanggan Desa Tanggan Kec. Gesi		20
15	Grobogan	77,37	19,97	IPLT Ngembak Desa Ngembak Kec. Purwodadi	Beroperasi	n/a
16	Blora	95,6	1,4	IPLT Temurejo Desa Temurejo Kec. Blora	Beroperasi tidak sebagaimana mestinya	20
17	Rembang	96,56	n/a	IPLT Landoh Desa Landoh Kec. Sulang	Tidak beroperasi	21
18	Pati	100	15,45	IPLT Sukoharjo Desa Sukoharjo Kec. Margorejo	Beroperasi	22
19	Kudus	100	24	IPLT Tanjungrejo Desa Tanjungrejo Kec. Jekulo	Beroperasi	50
20	Jepara	74,45	3,15	IPLT Bandengan Desa Bandengan Kec. Jepara	Beroperasi	95
21	Demak	98,31	3,55	IPLT Kalikondang Desa Kalikondang Kec. Demak	Beroperasi	6
22	Semarang	94,7	0,42	-		39
23	Temanggung	85,76	2,5	IPLT Sanggrahan Desa Sanggrahan Kec. Kranggan	Beroperasi	n/a
24	Kendal	87,57	belum ada IPLT	-		13
25	Batang	81	5	IPLT Randu Kuning Desa Tegalsari Kec. Kandeman	Beroperasi	4
26	Pekalongan	87	61,86	IPLT Kab. Pekalongan Desa Bener Kec. Wiradesa	Beroperasi	4
27	Pemalang	75,99	49,17	IPLT Pegongsoran Desa Pegongsoran Kec. Pemalang	Beroperasi	3
28	Tegal	95,34	n/a	IPLT Kedungjati Desa	Beroperasi	n/a

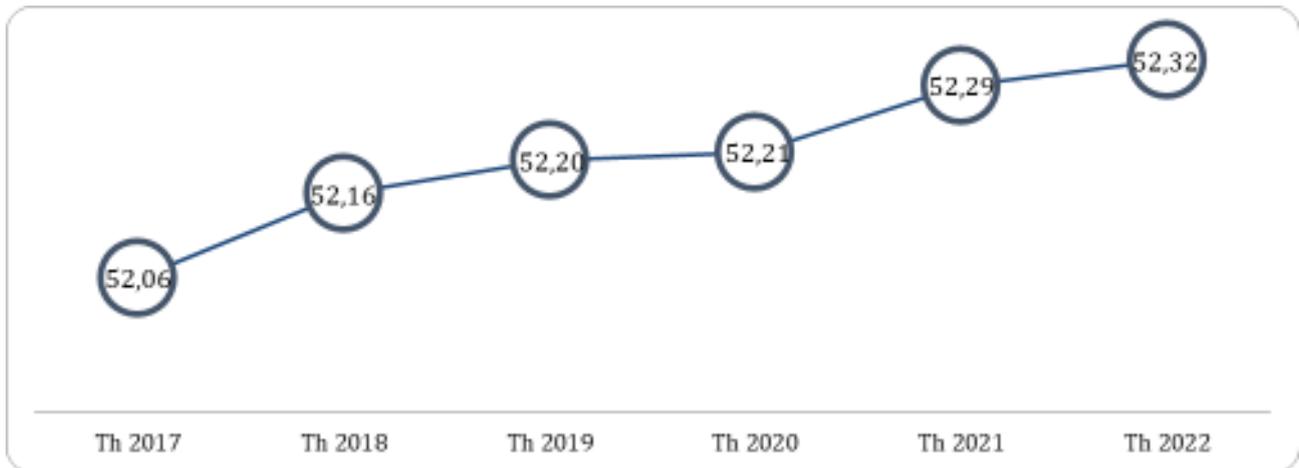
No	Kab/Kota	Akses Air Limbah Domestik (%)		Kondisi Layanan Air Limbah Domestik		
		Layak	Aman	Nama/Lokasi IPLT	Status Operasi	Jumlah KPP
				Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah		
29	Brebes	78,87	1,25	-		1
30	Kota Magelang	98,68	13,24	IPLT Dumpoh Kel. Tegalrejo Kec. Magelang Utara	Beroperasi	21
31	Kota Surakarta	97,32	61	IPLT Putri Cempo Kel. Mojosongo Kec. Jebres	Beroperasi	50
32	Kota Salatiga	94,37	8,37	IPLT Ngronggo Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo	Beroperasi	n/a
33	Kota Semarang	92,63	2,87	IPLT Tambak Lorok Kel. Terboyo Kulon Kec. Genuk	Beroperasi	1
34	Kota Pekalongan	100	8,95	IPLT Degayu Kel. Degayu Kec. Pekalongan Utara	Beroperasi	50
35	Kota Tegal	75,77	3,21	IPLT Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat	Beroperasi	8
	Jawa Tengah					

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2022

c. Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Wilayah Sungai (WS) yang pengelolannya menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah adalah WS Pemali Comal (panjang 946,35 km/luas DAS 4.898,54 km²) dan WS Bodri Kuto (panjang 377,32 km/luas DAS 1.282,85 km²).

Kondisi baik sungai kewenangan provinsi pada tahun 2022 tercatat 52,32 persen (692,56 km dari 1.323,67 km), sedikit meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 52,29 persen. Hal ini merupakan hasil kegiatan normalisasi sungai, perkuatan tebing sungai dan konservasi DAS.



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.36.

Persentase Sungai Dalam Kondisi Baik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022 (%)

Kebutuhan air irigasi rata-rata per tahun sebesar 19.636.378.014m³/tahun dengan asumsi memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga). Dukungan terhadap ketahanan pangan ditempuh dengan pengelolaan irigasi serta pembangunan penampungan air seperti waduk dan embung. Di Jawa Tengah, total luas area Daerah Irigasi (DI) seluas 953.804 ha, yang terdiri dari 33 DI kewenangan pusat seluas 347.674 ha (36,45 persen), 108 DI kewenangan provinsi seluas 86.865 ha (9,11 persen) dan 11.401 DI kewenangan kabupaten/kota seluas 519.265 ha (54,44 persen).

Tabel 2.55.

Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
1.	Pusat	347.674	36,45%	37
2.	Provinsi	86.865	9,11%	108
3.	Kab/Kota	519.265	54,44%	11.401
Total Jawa Tengah		953.804	100,00%	11.546

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, dalam kurun waktu tahun 2016-2022 masih terdapat jaringan irigasi dalam kondisi rusak sedang hingga rusak ringan yang jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi.

d. Kondisi Fisik Jaringan Irigasi

Tabel 2.56.

Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2016 – 2022

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi								Total
	Baik		Ringan		Sedang		Berat		Luas
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	(Ha)
2016	1.730	6	67.754	73	17.044	19	337	2	86.865
2017	4.433	6	64.207	74	18.225	20	0	0	86.865
2018	4.941	7	63.349	75	18.575	18	0	0	86.865
2019	4.941	6	66.723	77	15.201	17	0	0	86.865
2020	4.333	5	67.178	77	15.354	18	0	0	86.865
2021	4.333	5	67.513	78	15.019	17	0	0	86.865
2022	4.333	5	67.595	78	14.937	17	0	0	86.865

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan sebaran kondisi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota, persentase kondisi baik irigasi tercatat ada 11 kabupaten dibawah 50 persen, 11 kabupaten antara 50 – 70 persen, serta 10 kabupaten antara 70– 95 persen. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membantu rehabilitasi daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan.

Tabel 2.57.

Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah DI	Luas DI (ha)	Kondisi Fisik Irigasi %			
				Baik	Rusak Ringan (RR)	Rusak Sedang (RS)	Rusak Berat (RB)
1	Cilacap	702	21,745	42.69	2.25	0.15	54.90
2	Banyumas	573	23,716	80.35	12.62	2.66	4.37
3	Purbalingga	255	19,159	48.00	-	31.00	21.00
4	Banjarnegara	322	16,483	70.30	10.87	8.02	10.92
5	Kebumen	283	12,260	75.17	1.23	1.55	22.04
6	Purworejo	250	9,470	21.48	25.40	28.20	24.92
7	Wonosobo	705	21,050	67.54	7.42	9.29	15.75
8	Magelang	993	35,662	52.16	18.72	14.57	14.54
9	Boyolali	255	9,821	60.77	8.46	24.23	6.54
10	Klaten	478	29,713	40.89	-	41.99	17.12
11	Sukoharjo	70	4,353	19.29	24.70	50.04	5.97
12	Wonogiri	403	28,784	72.67	6.34	6.80	14.18
13	Karanganyar	351	18,867	35.06	10.20	16.52	38.54
14	Sragen	118	12,323	78.68	-	10.30	11.02
15	Grobogan	268	20,194	24.54	18.76	41.82	14.88
16	Blora	183	13,351	51.03	14.55	12.73	21.68
17	Rembang	318	21,193	65.11	6.16	18.90	9.80
18	Pati	327	20,965	83.26	3.34	3.40	10.00
19	Kudus	231	10,295	87.90	7.12	4.98	0.00
20	Jepara	834	28,247	28.00	9.00	20.50	42.50
21	Demak	4	1,627	94.90	-	-	5.10
22	Semarang	666	32,687	60.01	13.11	10.59	16.29

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah DI	Luas DI (ha)	Kondisi Fisik Irigasi %			
				Baik	Rusak Ringan (RR)	Rusak Sedang (RS)	Rusak Berat (RB)
23	Temanggung	577	17,709	45.32	-	25.58	29.09
24	Kendal	686	10,427	63.94	-	-	36.06
25	Batang	573	18,231	34.43	23.84	15.75	25.98
26	Pekalongan	339	13,818	49.19	4.00	7.34	39.47
27	Pemalang	91	7,343	70.26	9.15	11.26	9.32
28	Tegal	208	9,281	60.27	20.27	15.77	3.69
29	Brebes	449	25,731	65.08	2.97	8.49	23.46
30	Kota Salatiga	12	373	84.00	0.00	16.00	0.00
31	Kota Semarang	41	2,339	78.70	6.79	8.42	6.07
32	Kota Tegal	6	489	59.50	16.85	10.91	12.74

Sumber: Bappeda Kabupaten/Kota Tahun 2022

Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air semakin dirasakan meningkat, salah satunya penyediaan air untuk air baku. Pemenuhan air baku penting bahkan utama karena digunakan utamanya untuk pemenuhan kebutuhan air minum. Selain air minum, air baku juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata).

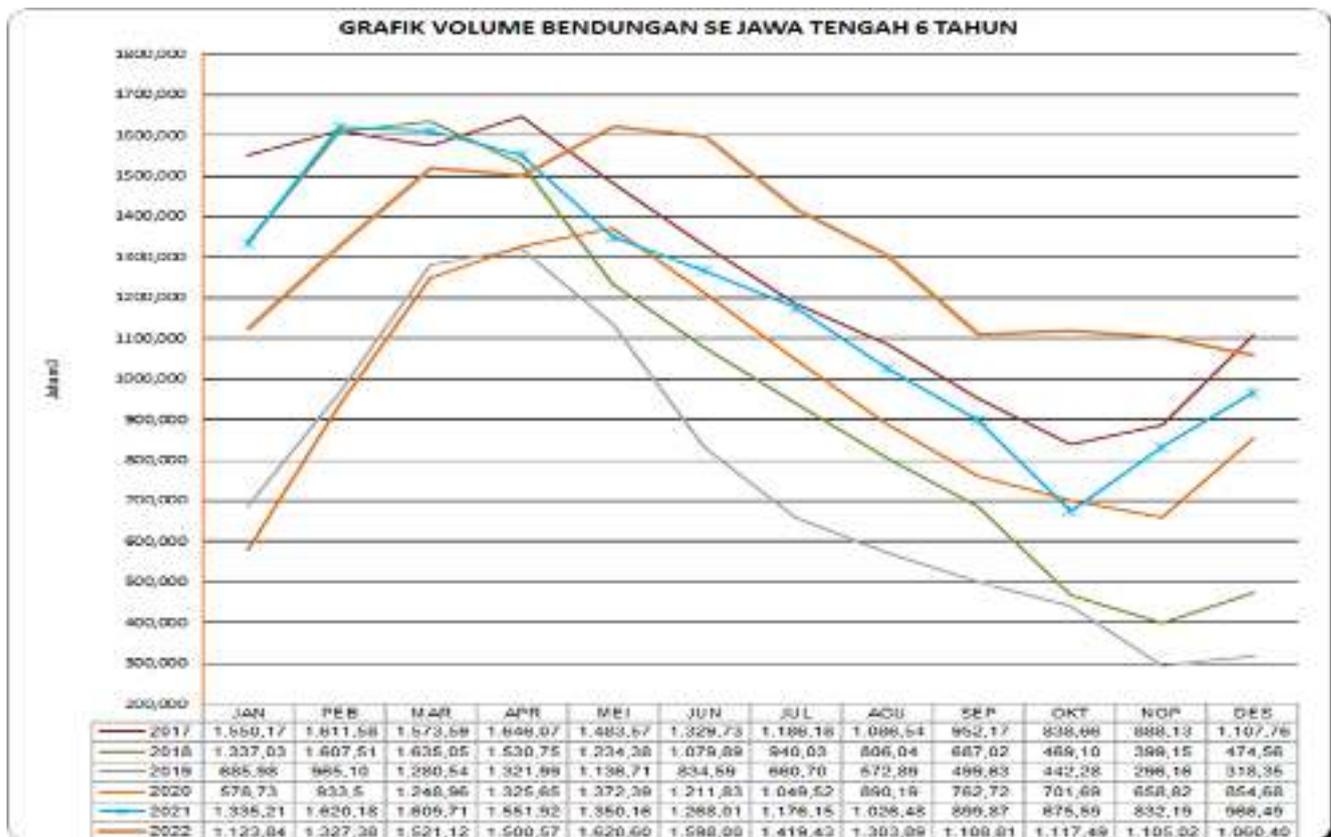
Ketersediaan air khususnya untuk air baku dipengaruhi oleh jumlah bangunan bendungan/waduk. Sampai saat ini terdapat 41 bangunan bendungan/waduk (9 waduk besar dan 32 waduk kecil). Kebutuhan air baku khususnya air minum sejalan dengan besaran tingkat pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu diharapkan meningkatnya pertumbuhan penduduk dapat diimbangi secara positif dengan ketersediaan air baku.

Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan dari tahun 2016 dari 56,49 persen menjadi menjadi 62 persen di tahun 2022.

Tabel 2.58.
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kebutuhan Air Baku (juta m ³ /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	739,65	745,02	750,25	755,35	760,33	760,33	770,08
Ketersediaan Air Baku (juta m ³ /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	417,83	435,84	456,83	466,78	466,78	467,62	477,45
Ketersediaan Air Baku (%)	56,49	58,5	60,89	61,8	61,39	61,50	62

Sumber : Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023



Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.37.

**Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m³)
Tahun 2017 - 2022**

Gambar diatas menunjukkan bahwa ketersediaan air waduk dari tahun ke tahun memiliki pola yang hampir sama yaitu debit tertinggi berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan April dan debit terendah pada bulan Oktober sampai dengan bulan November, artinya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk mengalami penurunan kebutuhan air tetap bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan air mendukung ketahanan pangan yaitu melalui Program 1000 Embung yang sebagian besar menggunakan prinsip memanen hujan. Program 1000 embung ini diinisiasi pada tahun 2016 dan pada tahun 2022 sudah melebihi target. Tercatat sudah ada 1.156 embung yang dibangun untuk mencukupi kebutuhan air baku masyarakat. se-Jawa Tengah.

Tabel 2.59.

Jumlah embung di Jawa Tengah berdasarkan sumbernya

No	INSTANSI/LEMBAGA	SUMBER PENDANAAN	EMBUNG (lokasi)	LONG STORAGE (lokasi)	JUMLAH (lokasi)
1.	Pemerintah Pusat (BBW S)	APBN	141	3	144
2.	Dinas PUSDATARU	APBD	75	17	92
3.	Distanbun	APBD	4	-	4

No	INSTANSI/LEMBAGA	SUMBER PENDANAAN	EMBUNG (lokasi)	LONG STORAGE (lokasi)	JUMLAH (lokasi)
		APBN	512	-	512
4.	DLHK	DAK	390	-	390
5.	Pemkab (Bankeu)	APBD	11	-	11
6.	CSR/TJSPL	Hibah	3	-	3
TOTAL			1.136	20	1.156

Sumber: Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, 2023

a) Jasa Konstruksi

Sertifikasi Hasil Uji pada tahun 2021 mencapai 2.312 SHU mengalami peningkatan kondisi jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 1.138 SHU. Sedangkan pelaku jasa konstruksi yang difasilitasi di tahun 2021 sejumlah 1.000 orang berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 3.288 orang.

Tabel 2.60.

Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sertifikasi Hasil Uji (SHU)	1.853	1.080	750	1.138	2.312	2.702
2	Informasi Jasa Konstruksi pelaksanaan event / pameran}	4	4	4	0	1	4
3	Pelaku Jasa Konstruksi (orang) sosialisasi, bintek terkait jakon (peraturan jasa konstruksi, HSD, HSPK, dsb),	1.228	2.038	2.798	3.288	1.000	1260

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2021

b) Bangunan Gedung Milik Daerah

Hingga tahun 2022, Bangunan Gedung Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 1.030 unit. Pendataan teknis Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah sudah dilakukan terhadap sejumlah 189 komplek. Bantuan Teknis untuk pengelolaan Bangunan Gedung Milik Daerah telah diberikan kepada 147 komplek bangunan Gedung.

Tabel 2.61.

Bangunan Gedung Yang Sudah Dilakukan Pendataan Teknis

Lokasi Pendataan Teknis BGMD	TA	JUMLAH
BGMD Kab. Rembang + Kab. Blora	2019	51
BGMD Kota + Kab Pekalongan	2021	36
BGMD Kab. Pemalang	2021	27
BGMD Kab. Brebes	2022	32
BGMD Kota + Kab Tegal	2022	43
TOTAL		189

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2023

2.3.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

a. Perkembangan Jumlah dan Kebutuhan Rumah

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, selain berfungsi sebagai tempat tinggal rumah juga berfungsi sebagai tempat untuk belajar, berkumpul dan tempat untuk saling berinteraksi antara anggota keluarga. Rumah menjadi hak

dasar yang harus dipenuhi sesuai kriteria standar agak layak untuk dihuni. Namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang belum mempunyai rumah layak huni khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Jumlah rumah dan rumah layak huni di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.62.

Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Asumsi Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni
Provinsi Jawa Tengah		8,731,768	5,804,006
1	Cilacap	455,869	248,859
2	Banyumas	441,410	272,306
3	Purbalingga	229,802	126,598
4	Banjarnegara	234,361	67,519
5	Kebumen	306,407	205,722
6	Purworejo	189,603	120,625
7	Wonosobo	212,495	91,904
8	Magelang	339,627	220,011
9	Boyolali	269,043	189,514
10	Klaten	306,594	268,086
11	Sukoharjo	217,000	184,212
12	Wonogiri	255,108	221,715
13	Karanganyar	220,546	195,580
14	Sragen	242,574	168,201
15	Grobogan	386,693	170,880
16	Blora	235,302	122,239
17	Rembang	171,604	115,987
18	Pati	359,459	283,541
19	Kudus	212,789	188,957
20	Jepara	313,884	152,736
21	Demak	303,265	230,178
22	Semarang	279,683	210,546
23	Temanggung	199,797	102,296
24	Kendal	251,502	166,495
25	Batang	186,489	105,124
26	Pekalongan	194,914	133,809
27	Pemalang	289,862	186,208
28	Tegal	290,648	218,190
29	Brebes	435,007	289,410
30	Kota Magelang	25,208	19,609
31	Kota Surakarta	113,983	88,610
32	Kota Salatiga	51,113	44,535
33	Kota Semarang	409,676	276,326
34	Kota Pekalongan	56,033	49,505
35	Kota Tegal	48,905	41,730

Sumber : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, 2022

Program pembangunan perumahan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berdampak pada terpenuhinya kebutuhan dasar hunian, namun juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakatnya secara berkelanjutan. Kualitas rumah yang baik sebagai tempat tinggal dapat memberikan pengaruh positif pada psikologis dan kesehatan penghuni rumah. Kondisi ini akan mempengaruhi peningkatan produktivitas penghuni rumah tangga. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya pendapatan secara berkelanjutan sehingga mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Ketika secara ekonomi masyarakat sudah mampu dan terpenuhi, maka kecenderungan kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas rumah dan lingkungan sekitarnya pun meningkat. Dengan demikian, penurunan kualitas lingkungan perumahan di masa yang akan datang dapat diminimalisir.

Terpenuhinya kebutuhan rumah/tempat tinggal sangat bergantung pada sisi kebutuhan (demand) dan sisi penyediaan (supply). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan backlog rumah. Pengertian backlog berdasarkan laman Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR (<https://ppdpp.id/konsep-backlog>) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu backlog kepemilikan dan backlog kepenghunian. Backlog kepenghunian merupakan perspektif untuk konsep 1 (satu) keluarga menghuni 1 (satu) rumah, sehingga menghitung backlog kepenghunian menggunakan rumus jumlah keluarga dikurangi dengan data jumlah rumah yang tersedia. Konsep menghuni yang dimaksud adalah keluarga atau rumah tangga yang tidak memiliki rumah tetapi menghuni rumah yang layak baik sewa/ kontrak, beli/ menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga. Sedangkan untuk backlog kepemilikan adalah berdasarkan pada presentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, sehingga backlog kepemilikan adalah rumah tangga yang tidak memiliki rumah milik sendiri seperti sewa/ kontrak, beli/ menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/ keluarga.

Tabel 2.63.
Backlog Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018–2022

No	Kabupaten/Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
		Backlog Milik	Backlog Huni								
1	Kab.Cilacap	33.567	27.166	34.111	23.125	22.526	17.075	29.037	73.366	16.154	12.923
2	Kab.Banyumas	35.597	20.585	33.423	24.345	44.736	30.901	47.953	33.166	35.908	24.419
3	Kab.Purbalingga	17.222	12.611	11.125	8.786	7.922	4.699	201.781	263.865	10.132	7.593
4	Kab.Banjarnegara	15.998	13.472	12.192	10.331	18.299	14.116	17.261	44.477	11.919	8.878
5	Kab.Kebumen	32.727	28.145	28.297	24.976	28.397	22.483	17.808	13.461	17.789	15.602
6	Kab.Purworejo	42.034	35.907	32.790	25.503	32.200	25.976	26.772	21.180	22.658	19.198
7	Kab.Wonosobo	17.374	13.274	16.849	12.882	16.047	11.028	16.047	11.028	4.686	3.433
8	Kab.Magelang	26.327	20.343	31.944	24.903	33.259	22.981	55.735	17.205	21.877	14.372

No	Kabupaten/Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
		Backlog Milik	Backlog Huni								
9	Kab.Boyolali	18.443	12.296	16.071	9.757	19.935	16.073	19.075	15.843	13.377	9.066
10	Kab.Klaten	46.233	37.381	43.185	39.418	38.820	32.972	51.993	45.235	39.450	33.198
11	Kab.Sukoharjo	45.826	28.524	44.202	28.604	45.798	23.418	21.852	17.398	45.957	32.155
12	Kab.Wonogiri	13.596	10.417	11.662	9.692	7.094	6.044	69.931	68.606	10.874	9.472
13	Kab.Karanganyar	15.296	11.247	32.653	24.576	24.198	16.944	19.662	17.632	22.701	18.075
14	Kab.Sragen	24.891	22.439	17.038	14.313	18.156	16.427	43.997	18.782	16.620	14.308
15	Kab.Grobogan	24.885	19.207	20.734	20.339	16.211	14.602	15.187	13.828	15.473	14.150
16	Kab.Blora	17.298	14.118	23.472	20.845	18.263	15.633	17.010	14.530	14.447	12.933
17	Kab.Rembang	9.345	7.824	7.411	5.804	9.748	8.749	43.152	43.152	9.945	5.362
18	Kab.Pati	23.240	20.447	15.515	13.516	16.547	14.479	20.426	16.820	12.591	9.785
19	Kab.Kudus	15.271	11.077	23.326	14.470	18.549	12.982	19.313	14.014	15.613	9.306
20	Kab.Jepara	31.954	26.733	20.669	18.628	27.554	24.872	29.352	26.514	31.038	26.925
21	Kab.Demak	15.832	12.934	14.634	12.565	17.955	14.195	15.795	12.717	13.650	11.260
22	Kab.Semarang	20.992	10.294	25.991	15.958	25.107	16.006	39.813	37.301	32.713	12.658
23	Kab.Temanggung	11.566	8.316	10.154	6.231	11.927	8.831	54.193	49.095	7.674	5.397
24	Kab.Kendal	27.457	22.103	24.458	20.025	20.982	17.093	26.958	23.800	21.542	16.437
25	Kab.Batang	13.732	11.734	11.414	9.762	10.986	9.387	8.698	7.601	12.040	11.210
26	Kab.Pekalongan	32.780	29.183	13.480	8.593	23.825	18.516	103.300	103.300	18.767	16.903
27	Kab.Pemalang	44.367	35.865	44.389	40.135	48.802	42.771	45.335	41.240	38.182	33.413
28	Kab.Tegal	72.469	70.231	78.245	68.920	64.604	56.942	161.943	150.751	84.584	77.132
29	Kab.Brebes	71.536	66.400	79.803	71.429	43.631	39.929	43.765	39.133	44.139	38.084
30	Kota Magelang	12.775	7.236	12.572	6.617	11.443	5.388	12.376	6.188	12.694	7.878
31	Kota Surakarta	60.653	33.446	57.627	29.602	65.282	32.914	63.665	34.427	56.254	34.717
32	Kota Salatiga	19.772	6.732	18.215	5.182	15.574	4.918	11.259	9.441	14.961	4.645
33	Kota Semarang	163.643	94.962	164.448	100.313	154.725	80.195	83.532	100.905	152.361	88.306
34	Kota Pekalongan	21.994	17.208	23.484	20.049	21.473	17.426	19.542	14.512	23.578	21.854
35	Kota Tegal	30.142	24.290	23.796	19.213	22.431	19.195	22.292	19.959	22.797	18.833
	Jumlah Total	1.126.837	844.148	1.079.379	809.410	1.023.008	736.159	1.495.810	1.440.472	950.089	703.141

Sumber : Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, 2022

Dari data tersebut terlihat bahwa kebutuhan kepenghunian Rumah (backlog kepenghunian) cukup besar di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kota Semarang.

Salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan rumah yang layak huni adalah dengan menyediakan bantuan stimulan bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan backlog kepemilikan di Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui Bantuan Sosial Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat. Program Pembangunan Baru Rumah Sederhana Sehat di Provinsi Jawa Tengah baru dimulai tahun 2020. Berikut ini adalah capaian pembangunan baru rumah di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai sumber pembiayaan dari tahun 2019-2022.

Tabel 2.64.
Pembangunan Baru Rumah
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Tahun	Sumber Pembiayaan				
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	Asosiasi Perumahan	CSR & Swadaya
2019	1.279	-	-	11.483	-
2020	25	200	-	30.193	-
2021	220	186	5.799	30.595	-
2022	2.201	326	143	24.709	224
Total	3.725	5.942	96.980	224	3.725

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2022

b. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta didukung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta. Penanganan RTLH ini dilakukan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa Tengah. Adapun perkembangan penanganan RTLH dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.65.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016–2022

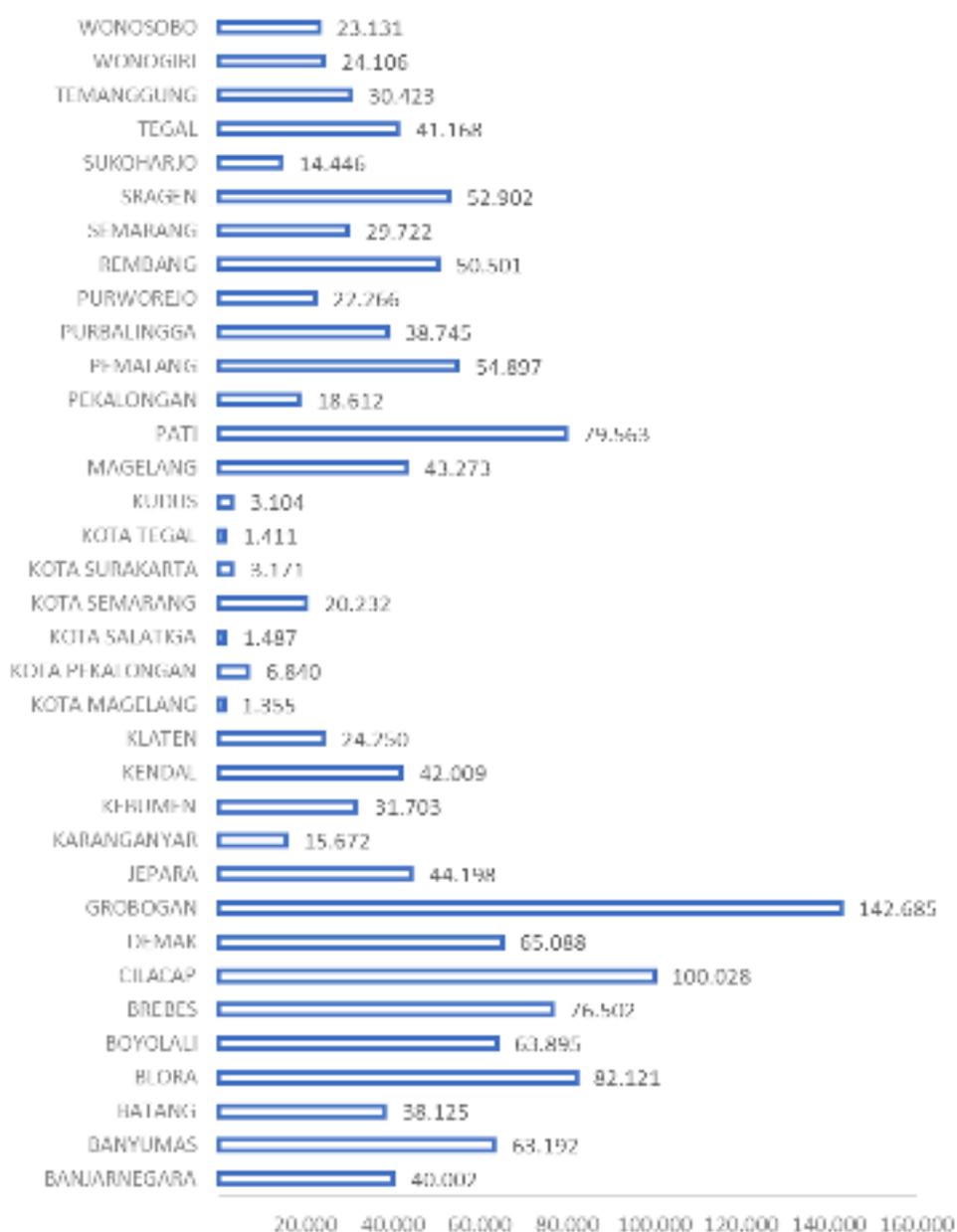
Tahun	Sumber Pembiayaan				Penanganan melalui penganggaran (Unit)	Verivali lapangan
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	CSR & Swadaya		
2019	36.725	23.208	26.651	15.986	102.570	
2020	48.809	10.298	12.855	3.268	75.230	
2021	32.623	11.293	11.370	1.593	56.879	397.572
2022	35.771	11.487	12.714	2.659	62.631	231.279
Total	153.928	56.286	63.590	23.524	297.310	628.851

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2022

Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, terdapat 1.582.024 unit RTLH yang menjadi baseline data RPJMD By Name By Address (BNBA) calon penerima bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diintervensi mulai tahun 2019. Peningkatan kualitas RTLH dari sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibility (CSR) dan lain-lain dari tahun 2019-2022 sebanyak 297.310 unit, sedangkan 628.851 unit merupakan hasil verifikasi dan validasi data lapangan tahun 2019 sampai dengan 2022. Sehingga secara keseluruhan baik melalui intervensi sumber pembiayaan dan verivali lapangan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, RTLH sudah tertangani sebanyak 926.161 unit.

Sampai dengan akhir tahun 2022, dari baseline data RPJMD masih terdapat sisa RTLH yang harus ditangani sebanyak 755.143 unit rumah, namun tidak dapat dipungkiri terdapat pertumbuhan data jumlah RTLH pada kurun tahun waktu tahun 2018-2022 berdasarkan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM) tahun 2018 dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2018-2022 yaitu sebanyak 635.682 unit RTLH telah ditangani baik melalui intervensi fisik dari berbagai sumber pendanaan maupun proses verifikasi dan validasi data jumlah RTLH. Sehingga sesuai baseline data dari PBDT tahun 2015 dan pembaharuan tahun 2018-2022 dari DTPFMOTM dan DTKS maka pada akhir tahun 2022 jumlah RTLH yang masih harus ditangani sebanyak 1.390.825 unit dengan sebaran sebagai berikut :

Sisa RTLH di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos

Gambar 2.38.

Persebaran Jumlah Sisa RTLH di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

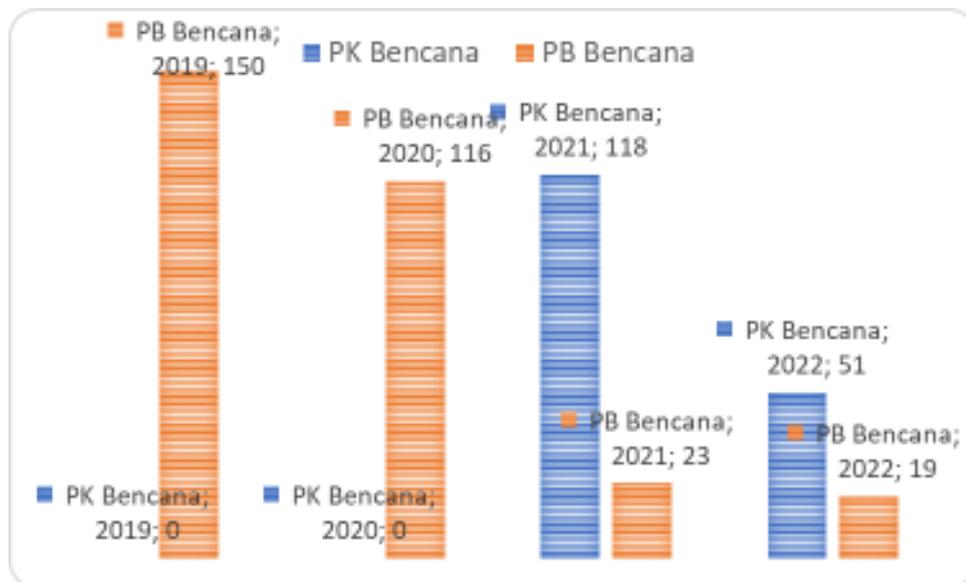
c. Upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan

Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan intervensi terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana Provinsi. Melalui bantuan sosial pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah terdampak bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan. Adapun rekap penanganan rumah korban bencana pemerintah Provinsi dapat dilihat pada diagram berikut :



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2022

Gambar 2.39.

Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

d. Penanganan Kawasan Kumuh

Rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor tumbuhnya kawasan permukiman kumuh. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yang disertai dengan peningkatan pemanfaatan lahan permukiman secara swadaya masyarakat khususnya kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali tidak difasilitasi dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai, seperti tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, mengakibatkan penurunan kualitas kawasan permukiman yang dibangun pengembang dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru yang dibangun MBR.

Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota/Bupati. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, pembagian urusan luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, luasan kumuh 10-15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan identifikasi dan menetapkan kawasan permukiman kumuh seluas 3.004,59 Ha dengan kumuh 10-15 Ha seluas 474,66 Ha. Penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati/ Walikota sampai dengan Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah menyisakan luasan kawasan kumuh sebesar 571,10 Ha sedangkan untuk sisa luasan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar 152,85 Ha. Namun, terjadi penambahan kawasan permukiman kumuh sampai dengan Tahun 2022 menjadi 10.671,84 Ha. Beberapa penanganan telah dilakukan untuk menangani kawasan permukiman kumuh, hingga pada akhir Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah sisa kawasan permukiman kumuh total di Provinsi Jawa Tengah sebesar 6.094,91 Ha, dan untuk sisa luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar 1.101,02 Ha.

Secara detail sebaran penanganan Kawasan Permukiman Kumuh berdasarkan SK Kumuh Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66.
Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan
SK Kumuh Sampai Dengan Tahun 2022 Di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Sisa Luasan Tahun 2022			Total Sisa Kumuh
		<10	10-15	>15	
1	Kab. Cilacap	0,00	0,00	63,74	63,74
2	Kab. Banyumas	30,77	14,44	43,37	88,568
3	Kab. Purbalingga	72,64	48,91	184,39	305,94
4	Kab. Banjarnegara	83,51	87,98	290,64	462,13
5	Kab. Kebumen	153,09	122,05	36,71	311,86
6	Kab. Purworejo	4,27	5,60	0,00	9,865
7	Kab. Wonosobo	0,00	0,00	149,53	149,53
8	Kab. Magelang	116,86	74,66	53,26	244,78
9	Kab. Boyolali	0,00	5,59	58,63	64,22
10	Kab. Klaten	0,00	0,00	1,45	1,45
11	Kab. Sukoharjo	0,99	26,69	19,69	47,36
12	Kab. Wonogiri	8,80	11,15	51,54	71,49
13	Kab. Karanganyar	75,15	10,38	17,34	102,87
14	Kab. Sragen	12,48	3,94	39,39	55,81
15	Kab. Grobogan	32,65	0,00	70,64	103,29
16	Kab. Blora	20,71	44,40	309,20	374,31
17	Kab. Rembang	71,15	81,04	107,03	259,22
18	Kab. Pati	46,77	91,73	35,67	174,17
19	Kab. Kudus	5,95	0,00	0,00	5,95
20	Kab. Jepara	11,16	6,79	36,89	54,84

No	Kabupaten/Kota	Sisa Luasan Tahun 2022			Total Sisa Kumuh
		<10	10-15	>15	
21	Kab. Demak	4,08	59,73	100,27	164,08
22	Kab. Semarang	34,20	10,28	269,27	313,75
23	Kab. Temanggung	3,87	23,91	93,60	121,38
24	Kab. Kendal	33,51	12,24	31,20	76,95
25	Kab. Batang	16,88	2,98	52,45	72,31
26	Kab. Pekalongan	28,16	36,29	224,67	289,12
27	Kab. Pemalang	0,00	0,00	235,91	235,91
28	Kab. Tegal	31,34	28,82	177,78	237,94
29	Kab. Brebes	22,91	178,34	584,21	785,46
30	Kota Magelang	6,41	12,80	0,00	19,21
31	Kota Surakarta	13,23	0,00	74,05	87,27
32	Kota Salatiga	13,91	8,85	1,10	23,86
33	Kota Semarang	103,37	77,09	150,19	330,65
34	Kota Pekalongan	21,97	14,35	243,76	280,08
35	Kota Tegal	6,41	0,00	99,13	105,54
Jumlah		1087,19	1101,02	3906,69	6094,91

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng (Status : Akhir Desember 2022)

2.3.4 Perhubungan.

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah yang berdaya saing diperlukan peningkatan kualitas pelayanan transportasi, utamanya : konektivitas jaringan, keselamatan perjalanan dan kualitas layanan angkutan umum.

1. Konektivitas Jaringan Transportasi

Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 0,30 yang lebih rendah dibandingkan dengan target Rasio Konektivitas Transportasi Nasional di Tahun 2022 sebesar 0,695.

Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian Sasaran Utama Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 diperlukan upaya peningkatan komponen penyusun Rasio Konektivitas Provinsi yang terdiri dari : Angkutan darat; Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP); Angkutan Laut dan Angkutan Perkotaan.

a) Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Jawa Tengah pada tahun 2022 sejumlah 221 terminal yang terdiri dari 19 terminal tipe A (kewenangan pusat), 24 terminal tipe B (kewenangan provinsi) dan 178 terminal tipe C (kewenangan kabupaten/kota). Untuk terminal tipe B, pada Terminal Nampurejo di Kabupaten Purworejo dalam proses penghapusan (Revisi SK Gub Nomor 551.22/31 Tahun 2019).

Tabel 2.67.

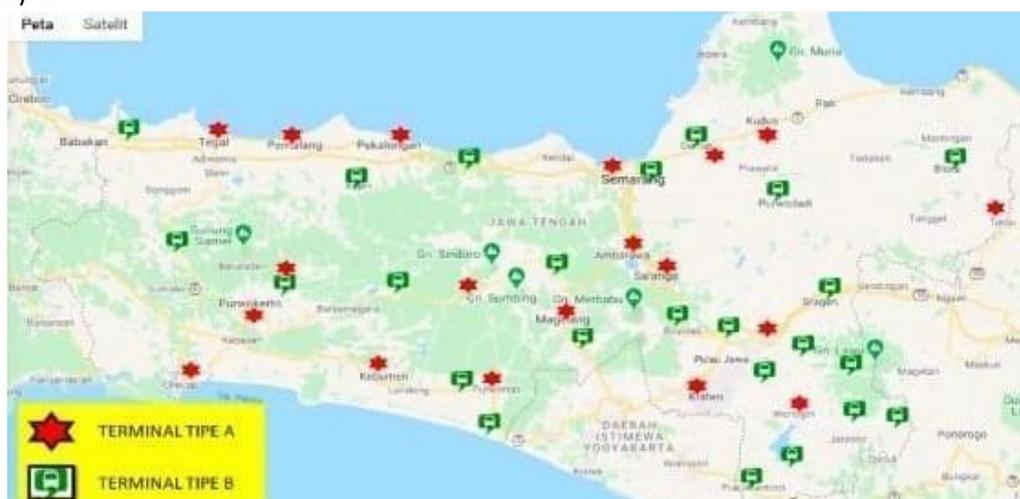
Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah terminal tipe A	17	17	19	19	19
2.	Jumlah terminal tipe B	24	24	24	24	24
3.	Jumlah terminal tipe C	151	178	178	178	178
Total Terminal di Jawa Tengah		120	118	219	221	221

Keterangan:

- Sumber Terminal Tipe A = Kementerian Perhubungan,
- Sumber Terminal Tipe B = Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,
- Sumber Terminal Tipe C = BAPPEDA Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Jumlah dan persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan dengan kebutuhan terminal berdasarkan Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah masih belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2022 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 8 kabupaten/kota dan tipe B di 11 kabupaten/kota.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.40.

Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.68.

Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	Revisi RTRW Provinsi	Eksisting	Revisi RTRW Provinsi
	Kedungsepur				
1	Kab. Kendal				Ada
2	Kab. Demak	Demak*	Ada	Bintoro	Ada
3	Kab. Semarang	Bawen	Ada		
4	Kota Semarang	Mangkang	Ada	Penggaron	Ada
5	Kota Salatiga	Tingkir	Ada		

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	Revisi RTRW Provinsi	Eksisting	Revisi RTRW Provinsi
6	Kab. Grobogan		Ada	Purwodadi	Ada
	Jekutibanglor				
7	Kab. Jepara		Ada		Ada
8	Kab. Kudus	Jati	Ada		
9	Kab. Pati		Ada		Ada
10	Kab. Rembang		Ada		Ada
11	Kab. Blora	Cepu	Ada	Gagak Rimang	Ada
	Subosukowonosraten				
12	Kab. Sukoharjo			Kartosuro, Sukoharjo	Ada
13	Kab. Boyolali		Ada	Pengagung	Ada
14	Kota Surakarta	Tirtonadi	Ada		
15	Kab. Karanganyar			Tegalgede, Tawangmangu	Ada
16	Kab. Wonogiri	Giri Adipura	Ada	Jatisrono, Pracimantoro, Purwantoro, dan Baturetno	Ada
17	Kab. Sragen		Ada	Pilangsari	Ada
18	Kab. Klaten	Ir. Soekarno	Ada		
	Bregasmalang				
19	Kab. Brebes			Bumiayu dan Tanjung	Ada
20	Kab. Tegal				Ada
21	Kota Tegal	Tegal	Ada		Ada
22	Kab. Pemalang	Induk Pemalang	Ada		Ada
	Petanglong				
23	Kab. Pekalongan			Kajen	Ada
24	Kab. Batang			Banyuputih	Ada
25	Kota Pekalongan	Pekalongan	Ada		
	Barlinmascakeb				
26	Kab. Banjarnegara		Ada	Banjarnegara	Ada
27	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Ada	Purbalingga	Ada
28	Kab. Banyumas	Purwokerto	Ada		Ada
29	Kab. Cilacap	Bangga Bangun Desa	Ada		Ada
30	Kab. Kebumen	Kebumen	Ada		Ada
	Purwomanggung				
31	Kab. Purworejo	Purworejo	Ada	Kutoarjo* dan Nampurejo**	Ada
32	Kab. Wonosobo	Mendolo	Ada		
33	Kab. Magelang			Drs. Prayitno	Ada
34	Kota Magelang	Tidar	Ada		
35	Kab. Temanggung			Madureso	Ada
J U M L A H		19 Terminal	26 Terminal	24 Terminal	27 Terminal

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

Catatan : * Terminal Kutoarjo proses pembangunan dan ** Terminal Nampurejo proses penghapusan aset.

Terminal Kutoarjo mulai dibangun pada tahun 2021, dilanjutkan pada tahun 2022-2023 dan masih direncanakan lanjutan pembangunannya di tahun 2024-2026. Adapun Terminal Nampurejo dalam proses penghapusan karena sudah ada pembangunan terminal baru di Kutoarjo. Pada tahun 2022, terdapat 178 buah

terminal Tipe C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hanya Kota Pekalongan dan Kota Tegal yang tidak mempunyai Terminal Tipe C.

Tabel 2.69.

Persebaran Terminal Tipe C di Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Perwilayahan / kabupaten / kota	Terminal Tipe C Eksisting	
		Data Sumber Bappeda Kab./Kota Tahun 2022	
KEDUNGSEPUR			
1.	Kab. Kendal	4	Sukorejo, Boja*, Weleri dan Kendal* (* : SK Bupati Kendal No. 231/211/2008)
2.	Kab. Demak	2	Karangawen dan Pucanggading (Mranggen)
3.	Kab. Semarang	9	Sisemut Ungaran, Ambarawa, Sumowono, Sruwen Tengaran, Suruh, Pos Terminal Bringin, Pos Terminal Kopeng Getasan, Palbapang dan Bandungan
4.	Kota Semarang	2	Cangkiran dan Gunungpati (SK Walikota Semarang No. 551.22/1169 Tahun 2016)
5.	Kota Salatiga	1	Tamansari
6.	Kab. Grobogan	5	Sulursari, Wirosari, Angkotdes Purwodadi, Godong dan Gubug
JEKUTIBANGLOR			
7.	Kab. Jepara	5	Welahan, Pecangaan, Jepara, Bangsri dan Kelet (SK Bupati Jepara No. 551.22/172 Tahun 2016)
8.	Kab. Kudus	4	Jetak, Kalirejo, Getas, Singocandi
9.	Kab. Pati	3	Kembang Joyo*, Juwana dan Tayu (* : SK Bupati Pati No. 551.22/2174 2016, Juwana dan Tayu belum ada SK)
10.	Kab. Rembang	7	Rembang, Lasem, Pamotan, Sarang, Sulang, Sumber dan Gunem (SK Bupati Rembang No. 551.4/0984/2016)
11.	Kab. Blora	4	Todanan, Kunduran, Ngawen, dan Wulung
SUBOSUKO WONOSRATEN			
12.	Kab. Sukoharjo	4	Sukoharjo, Bekonang, Watukelir dan Tawang Sari
13.	Kab. Boyolali	13	Karanggede, Guwo, Klewor, Nogosari, Simo, Cepogo, Ampel, Sunggingan, Randuasri, Tambak, Tamansari, Bangak dan Selo
14.	Kota Surakarta	2	Kadipiro dan Semanggi
15.	Kab. Karanganyar	10	Matesih, Palur, Gondangrejo, Jongke, Jambangan, Jenawi, Ngargoyoso, Karangpandan, Jumapolo dan Jatipuro
16.	Kab. Wonogiri	18	Wonogiri, Ngadirojo, Baturetno, Batuwarno, Tirtomoyo, Pracimantoro, Wuryantoro, Eromoko, Giri Belah, Manyaran, Slogohimo, Purwantoro, Bulukerto, Puhpelem, Jatisrono, Jatiroto, Sidoharjo dan Girimarto
17.	Kab. Sragen	7	Kragilan, Batujamus, Gondang, Tangen, Pasar Bunder, Sumberlawang dan Gemolong
18.	Kab. Klaten	7	Penggung, Cawas, Teloyo, Pasar Klaten, Bendogantungan, Tulung, dan Delanggu
BREGASMALANG			
19.	Kab. Brebes	7	Ketanggungan, Brebes, Bumiayu, Jatibarang, Banjarharjo, Larangan dan Losari
20.	Kab. Tegal	3	Dukuhsalam, Adiwerna dan Trayeman (SK Bupati Tegal No. 769 Tahun 2017)
21.	Kota Tegal	0	Belum ada Terminal Tipe C
22.	Kab. Pemalang	8	Belik, Moga, Comal, Randudongkal, Grosir Comal, Angkutan Kota Pemalang, Petarukan dan Warungpring
PETANGLONG			
23.	Kab. Pekalongan	5	Wiradesa, Kedungwuni, Doro, Kesesi dan Sragi
24.	Kab. Batang	5	Bandar, Bawang, Reban, Limpung, dan Blado
25.	Kota Pekalongan	0	Belum ada Terminal Tipe C
BARLINGMASCAKEB			
26.	Kab. Banjarnegara	4	Mandiraja, Karangkoobar, Kalibening & Banjarnegara (Angkudes)
27.	Kab. Purbalingga	4	Bukateja, Kejobong, Jompo, dan Penaruban
28.	Kab. Banyumas	3	Wangon*, Ajibarang* dan Baturaden**

No.	Perwilayahan / kabupaten / kota	Terminal Tipe C Eksisting	
		Data Sumber Bappeda Kab./Kota Tahun 2022	
			(*sesuai SK Bupati Banyumas No. 480/324 Tahun 2016), ** : Terminal Baturaden dikelola oleh pariwisata)
29.	Kab. Cilacap	8	Karangpucung, Sidareja, Majenang, Kawunganten, Adipala, Sampang, Wanareja dan Kroya (SK Bupati Cilacap No. 551.2/591/17/2015)
30.	Kab. Kebumen	3	Kebumen, Gombong (bus dan non bus) dan Karanggayam (Perdesaan)
PURWOMANGGUNG			
31.	Kab. Purworejo	3	Kutoarjo, Kongsu dan Terminal non bus Pasar Kutoarjo
32.	Kab. Wonosobo	4	Sawangan, Terminal Keselamatan Jalan Reco, Mendolo dan Stasiun (meliputi Pasar Induk/TPR Bhayangkara/Jl. Resimen (SK Bupati Wonosobo No. 551.21/630/2019)
33.	Kab. Magelang	6	Borobudur, Salaman, Secang, Grabag, Tegalrejo dan Bandongan
34.	Kota Magelang	1	Magersari
35.	Kab. Temanggung	7	Maron, Kerkop, Ngadirejo, Candiroto, Kranggan, Pingit dan Plaza
Jumlah se-JATENG		178	

Sumber: Bappeda Kabupaten/Kota se - Jawa Tengah, 2022

Kondisi terminal Tipe B di Jawa Tengah pada tahun 2022 sebagian besar masih layak operasi. Untuk Terminal Nampurejo Purworejo dalam proses penghapusan dengan mulai beroperasinya Terminal Kutoarjo.

Tabel 2.70.

Kondisi dan Status Aset Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Nama Terminal	Kondisi	Status Aset
1.	Kota Semarang	1. Penggaron	Layak Operasi	Milik Pemprov
2.	Kab. Grobogan	2. Purwodadi	Layak Operasi	Milik Pemprov
3.	Kab. Blora	3. Gagak Rimang	Layak Operasi	Milik Pemprov
4.	Kab. Demak	4. Bintoro	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
5.	Kab. Batang	5. Banyu Putih	Layak Operasi	Milik Pemprov
6.	Kab. Pekalongan	6. Kajen	Layak Operasi	Milik Pemprov
7.	Kab. Temanggung	7. Madureso	Layak Operasi	Milik Pemprov
8.	Kab. Magelang	8. Drs. Prayitno	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
9.	Kab. Boyolali	9. Penggung	Layak Operasi	Milik Pemprov (2019)
10.	Kab. Sragen	10. Pilangsari	Layak Operasi	Milik Pemprov
11.	Kab. Karanganyar	11. Tegalgede	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
		12. Tawangmangu	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
12.	Kab. Wonogiri	13. Jatisrono	Layak Operasi	Milik Pemprov
		14. Baturetno	Layak Operasi	Milik Pemprov
		15. Pracimantoro	Layak Operasi	Milik Pemprov
		16. Purwantoro	Layak Operasi	Milik Pemprov
13.	Kab. Purworejo	17. Kutoarjo	Proses Pembangunan	Milik Pemprov (2020)

No	Kabupaten / Kota	Nama Terminal	Kondisi	Status Aset
		18. Nampurejo	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso, Proses Penghapusan
14.	Kab. Sukoharjo	19. Kartosuro	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso
		20. Sukoharjo	Layak Operasi	Milik Pemprov
15.	Kab. Banjar	21. Banjarnegara	Layak Operasi	Milik Pemprov
16.	Kab. Purbalingga	22. Purbalingga	Layak Operasi	Milik Pemprov
17.	Kab. Brebes	23. Bumiayu	Layak Operasi	Milik Pemprov
		24. Tanjung	Layak Operasi	Milik Pemprov

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sesuai dengan Sasaran Strategis (Utama) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terminal Penumpang Tipe B tahun 2022 dengan rata-rata nilai 78,25.

Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022 sebanyak 452.746 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan bus besar dengan jumlah 271.242 kendaraan. Terminal dengan jumlah kendaraan masuk terbanyak ada di terminal Tipe B Purbalingga sebanyak 51.309 kendaraan.

Tabel 2.71.

Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Nama Terminal	Kabupaten / Kota	Kendaraan Masuk				Jumlah
			Bis Besar	Bis Sedang	Bis Kecil	Mobil Penumpang Umum	
1	Penggaron	Kota Semarang	11.449	1.079	605	1.343	14.476
2	Purwodadi	Grobogan	15.166	20.423	-	-	35.589
3	Bintoro	Kab. Demak	5.194	2.609	3.100	-	10.903
4	Gagak Rimang	Kab. Blora	23.376	-	-	-	23.376
5	Penggung	Kab. Boyolali	40.981	330	-	-	41.311
6	Pilangsari	Kab. Sragen	18.918	118	2.057	-	21.093
7	Kartosuro	Sukoharjo	17.442	6.178	-	-	23.620
8	Sukoharjo	Sukoharjo	22.631	5.227	-	2.229	30.087
9	Tegalgede	Karanganyar	3.672	2.251	440	3.829	10.192
10	Tawangmangu	Karanganyar	8.914	4.163	2.370	-	15.447
11	Baturetno	Kab. Wonogiri	7.990	-	-	-	7.990
12	Jatisrono	Kab. Wonogiri	11.969	-	-	-	11.969
13	Pracimantoro	Kab. Wonogiri	11.533	687	-	-	12.220
14	Purwantoro	Kab. Wonogiri	16.499	-	-	-	16.499
15	Madureso	Temanggung	12.466	10.848	1.555	-	24.869
16	Dr. Prayitno Muntilan	Kab. Magelang	-	-	6.801	-	6.801
17	Kutoarjo	Purworejo	-	-	-	-	-
18	Nampurejo	Purworejo	-	-	-	-	-

No.	Nama Terminal	Kabupaten / Kota	Kendaraan Masuk				
			Bis Besar	Bis Sedang	Bis Kecil	Mobil Penumpang Umum	Jumlah
19	Banjarnegara	Banjarnegara	17.717	7.805	15.655	1.589	42.766
20	Purbalingga	Purbalingga	3.843	5.973	5.229	36.264	51.309
21	Banyuputih	Batang	4.777	6.611	10.327	-	21.715
22	Kajen	Kab. Pekalongan	9.161	1.335	4.271	-	14.767
23	Tanjung	Brebes	7.379	-	6.427	-	13.806
24	Bumiayu	Brebes	165	1.712	64	-	1.941
	JUMLAH		271.242	77.349	58.901	45.254	452.746

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

b) Trayek Angkutan Umum

Pelayanan angkutan umum di Jawa Tengah, utamanya angkutan pariwisata pada tahun 2022 sejumlah 2.754 kendaraan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 sejumlah 3.093 kendaraan, selain merupakan lanjutan dampak dari pandemi Covid-19 juga masyarakat lebih berminat menggunakan moda angkutan pribadi.

Tabel 2.72.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	902	902	902	902	902
2.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	269	269	272	272	272
3.	Angkutan wisata (kendaraan)	4.666	4.666	4.666	3.093	2.754
4.	Jumlah bus (unit)	12.737	12.737	12.737	12.737	10.825
5.	Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Untuk pelayanan angkutan pemadu moda telah ditetapkan jaringan trayek sebagai berikut:

1. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Kudus PP
2. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Salatiga PP
3. Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Pekalongan PP
4. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Wonogiri PP
5. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Sragen PP
6. Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP

Dari jaringan trayek pemadu moda di atas sampai dengan saat ini baru terlayani 2 (dua) trayek, yaitu Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP dan Bandara Adi Sumarmo - Sragen oleh DAMRI namun saat ini pelayanannya dihentikan sementara.

c) Halte Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan diperlukan peningkatan cakupan wilayah yang telah terlayani koridor Trans Jateng. Fasilitas yang mempengaruhi cakupan wilayah adalah pemenuhan jumlah halte yang representatif untuk memudahkan penumpang naik dan turun bus Trans Jateng. Antara Tahun 2018 – 2022 telah terbangun 272 halte di 6 koridor Trans Jateng. Pada Bulan Agustus 2023 direncanakan mulai beroperasi koridor ke-7 Trans Jateng pada koridor Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri, dengan kebutuhan halte sejumlah 122 unit, dimana sejumlah 32 unit sudah tersedia / terbangun karena berhimpitan dan merupakan fasilitas integrasi dengan layanan angkutan umum perkotaan eksisting di beberapa koridor Batik Solo Trans /BST.

Tabel 2.73.

Jumlah Halte Pelayanan Trans Jateng Tahun 2018 – 2022

Koridor Trans Jateng	Inventarisasi Halte			
	Kebutuhan	Terbangun		Belum Terbangun*
		Aset Pemprov	Aset Kab/Kota/Swasta	
Kota Semarang – Kabupaten Banyumas (Bawen)	94	40	52	2
Kabupaten Banyumas (Purwokerto) - Purbalingga	62	60	2	0
Kota Semarang – Kendal (Weleri)	53	40	13	0
Kabupaten Magelang – Purworejo (Kutoarjo)	49	36	0	13
Surakarta – Sragen (Sumberlawang)	85	17	0	68
Kota Semarang – Grobogan (Gubug – Godong)	69	20	0	49
Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri (Rencana Operasional Agustus 2023)	122	Rencana dibangun mulai 2023	32	90
Total	534	213	99	222

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

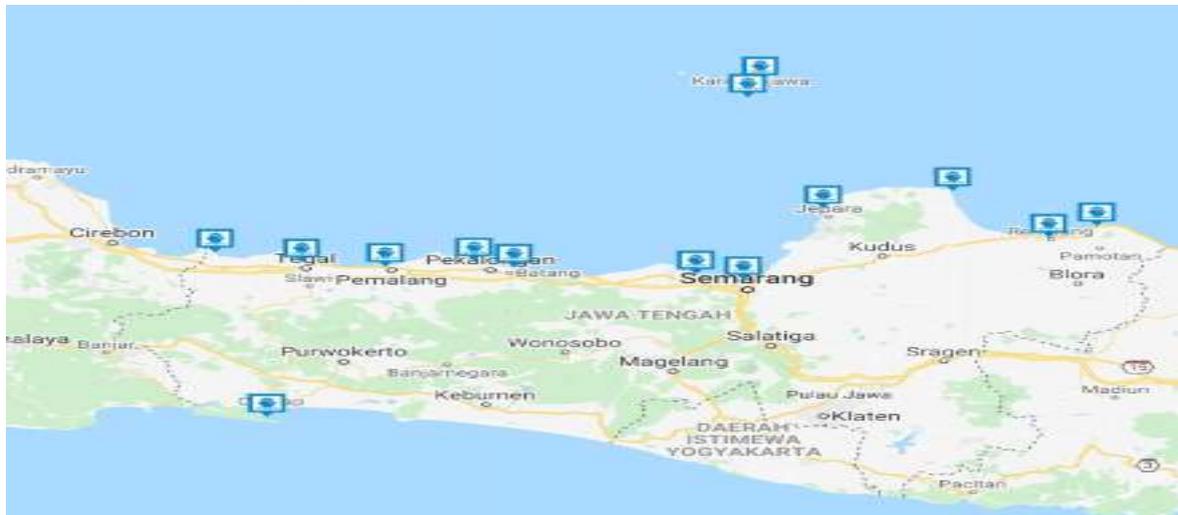
Catatan : * Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT

d) Perhubungan Laut

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017, terdapat 14 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap, dan Tegal), 8 Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Kendal, Jepara, Legok Bajak, Karimunjawa, Juwana, Tasik Agung dan Sluke), dan 3 Pelabuhan Lokal (Brebek, Pekalongan dan Pemalang). Secara umum, kondisi Pelabuhan Pengumpul Regional sebagai berikut : Pelabuhan Juwana berada pada alur sungai, Pelabuhan Tasik Agung tidak ada aktivitas karena di dasar kolam terdapat karang hidup. Pelabuhan Batang dan Kendal kedalaman kolam dan alur pelayarannya tidak ideal karena sedimentasi. Pelabuhan Kendal terdapat usulan untuk menjadi satu kesatuan

dengan Pelabuhan Tanjung Emas. Untuk Pelabuhan Jepara, Legonbajak, Karimunjawa dan Sluke secara fisik masih dalam kondisi yang cukup baik.

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelabuhan pengumpan regional merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, sampai dengan akhir tahun 2022 proses penlimpahan aset dari Pemerintah Pusat ke Provinsi belum diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.41.

Sebaran Pelabuhan Laut Strategis di Jawa Tengah

Tabel 2.74.

Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah

No.	Pelabuhan	Hierarki dalam RIPN	Keterangan
1.	Tanjung Emas Semarang	Utama	RTRWN : Pemantapan Pel. Utama
2.	Tanjung Intan Cilacap	Pengumpul	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl
3.	Tegal	Pengumpul	
4.	Batang	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl RIPN : Pel. Pengumpul (2027)
5.	Sluke Rembang	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl RIPN : Pel. Pengumpul (2027)
6.	Tasik Agung Rembang	Pengumpan Regional	
7.	Juwana Pati	Pengumpan Regional	RTRWN : Pemantapan Pel. Pngmpl
8.	Jepara	Pengumpan Regional	
9.	Karimunjawa Jepara	Pengumpan Regional	
10.	Legon Bajak Jepara	Pengumpan Regional	
11.	Kendal	Pengumpan Regional	RTRWN : Pel. Angk. Penyeberangn Saat ini = Wil. Ker. Tanjung Emas
12.	Brebes	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)
13.	Pekalongan	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)
14.	Pemalang	Pelabuhan Lokal	RIPN : Pel. Pengumpan Reg. (2027)

Sumber : PP 13/2017 tentang Perub. PP 26/2008 tentang RTRWN & SK Menhub. KP.432/2017 tentang RIPN

Kondisi pelabuhan pengumpan regional di Jawa Tengah secara umum, laju sedimentasi pada kolam labuh dan alur pelayaran sangat tinggi yang memerlukan upaya penanganan berupa normalisasi secara berkala dengan periode 3 – 4 tahun sekali. Jumlah kunjungan kapal tahun 2022 di Pelabuhan Tanjung Emas mencapai 3.537 *call*. Mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 3.634 *call*, hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ekspor-impor.

Tabel 2.75.

**Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pelabuhan	14	14	14	14	14
2	Pelabuhan Tanjung Emas					
	a. Kunjungan kapal (<i>call</i>)	3.410 ^{*)}	3.804	2.663	3.634	3.537
	b. GRT (GT)	24.902.093 ^{*)}	30.236.211	22.999.480	21.505.841	28.396.326
	c. Kargo (ton)	13.919.940 ^{*)}	14.682.120	14.185.650	4.292.136	6.342.781
	d. Kontainer (<i>Teus</i>)	539.158 ^{*)}	658.303	355.774	797.020	810.544
	e. Penumpang (orang)	280.142 ^{*)}	390.693	134.997	182.342	341.244
	f. <i>Dweelling Time</i> TPKS Impor	4,5	4,91	3,84	3,93	3,65
	g. <i>Dweelling Time</i> TPKS Expor	3,4	2,48	2,78	3,52	3,05
3	Pelabuhan Tanjung Intan					
	a. Kunjungan kapal (<i>call</i>)	354 ^{*)}	1.240	1.441	1.030	150 ^{*)}
	b. GRT (GT)	1.971.910 ^{*)}	23.713.251	28.826.775	18.658.236	2.355.920
	c. Kargo (ton)	6.276.236 ^{*)}	16.586.884	8.524.893	7.525.056	3.530.857

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selama tahun 2022 *dwelling time* Pelabuhan Tanjung Emas (sebagai Pelabuhan utama di Jawa Tengah) mencapai 3,65 hari (impor) yang mengalami peningkatan kinerja jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,93 hari. Sedangkan untuk ekspor juga mengalami penurunan kinerja dari 3,52 hari di tahun 2021 menjadi 3,05 hari di tahun 2022.

e) Aktivitas Penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang – Karimunjawa. Jumlah penumpang KM. Siginjai pengganti KM. Muria yang melayani lintas Jepara – Karimunjawa pp pada tahun 2022 melayani penumpang sejumlah 98.293 orang yang meningkat dibandingkan tahun 2021 sejumlah 98.173 orang. Sedangkan penumpang KM Bahari Ekspres 1 yang melayani Jepara-Karimunjawa, di tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah penumpang menjadi 118.599 orang dibandingkan tahun 2021 sejumlah 112.378 orang.

Tabel 2.76.
Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai*)	75.525	75.679	72.962	98.173	98.293
2.	Penumpang KMC. Kartini I (orang)	1.796	2.725	0	0	0
3.	Penumpang KMC. Bahari Ekspres 1 (Jepara –Karimunjawa) (orang)	103.617	102.684	98.998	112.378	118.599
4.	Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspres 2 (Kendal –Karimunjawa) (orang)	off	off	off	off	off

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

f) Perhubungan Udara

Terdapat 3 bandara komersial yang sudah beroperasi yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Boyolali dan JB. Soedirman Purbalingga, serta 3 bandara perintis yang sudah beroperasi yaitu Bandara Dewadaru Karimunjawa Jepara, Tunggul Wulung Cilacap dan Ngloram Blora.

Untuk Bandara Adi Sumarmo Surakarta pada tahun 2020 telah terdapat intermoda transportasi dengan adanya kereta api bandara yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo dengan Stasiun Solo Balapan. Dari Stasiun Solo Balapan sudah terintegrasi langsung dengan *sky bridge* ke Terminal Tipe A Tirtonadi.

Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo baik domestik dan internasional tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah barang baik domestik maupun internasional di Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2021.

Tabel 2.77.
Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bandara	4	6	6	6	6
2	Bandara Ahmad Yani					
	- Penumpang domestik (orang)	4.943.701	3.678.104	1.342.341	884.970	1.618.109
	- Penumpang internasional (orang)	216.548	228.700	35.728	9	77
	- Barang domestik (kg)	29.485.686	15.788.447	9.157.070	6.763.331	6.222.664
	- Barang internasional (kg)	2.226.842	2.086.421	239.699	1.212.031	3.578.079
3	Bandara Adi Soemarmo					
	- Penumpang domestik (orang)	1.303.570	1.565.093	516.780	427.536	839.773
	- Penumpang internasional (orang)	60.032	155.400	17.198	15	33.739
	- Barang domestik (kg)	7.808.387	7.074.726	1.596.685	1.856.723	1.760.287
	- Barang internasional (kg)	968.226	2.982.541	-	15.158	0

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa, telah dikembangkan Bandara Dewandaru pada tahun 2019 melalui perpanjangan *runway* dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter dan pada Tahun 2022 terdapat perluasan gedung terminal penumpang dengan luas bangunan lantai 1 seluas 980 m² dan lantai 2 seluas 880 m² untuk memenuhi kebutuhan jasa angkutan udara terkait dengan kepariwisataan.



Sumber: Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Dewandaru, 2022

Gambar 2.42.

Apron, Terminal dan Runway Bandara Dewandaru Karimunjawa

Bandara Tunggul Wulung Cilacap dominan digunakan sebagai sarana pendidikan sekolah penerbangan. *Runway* sepanjang 1.400 meter dengan lebar 30 meter dapat dilandasi oleh pesawat sejenis ATR 72 atau CN 235 (kapasitas 60 – 70 penumpang) atau yang lebih kecil. Kondisi saat ini terutama untuk landas pacu Bandara Tunggul Wulung tidak memungkinkan untuk diperpanjang karena terdapat kendala dilapangan (*obstacle*).

Untuk mendukung pengembangan Jawa Tengah khususnya untuk wilayah timur sedang dilakukan Pengembangan Bandara Ngloram Kabupaten Blora, sampai dengan tahun 2021 sudah terbangun *runway* sepanjang 1.500 meter, landas parkir dan landas hubung, gedung terminal, jalan akses dan fasilitas penunjang lainnya serta mulai operasional pada November 2021. Pada Tahun 2022 Bandara Ngloram kembali diperluas melalui pengadaan lahan yang direncanakan untuk fasilitas keselamatan penerbangan.



Sumber: Satuan Pelayanan Bandara Ngloram, 2022.

Gambar 2.43.

Apron dan Terminal Bandara Ngloram Kabupaten Blora

Untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih diperlukan persebaran bandara untuk pemerataan pembangunan. Untuk wilayah tengah dan selatan, karena Bandara Tunggul Wulung Cilacap sulit untuk dikembangkan, maka dilakukan pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba) di Kabupaten Purbalingga. Di Bandara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga telah terbangun *runway* sepanjang 1.600 meter, *apron*, *taxiway* dan jalan akses.



Sumber: PT. Angkasa Pura II, 2022

Gambar 2.44.

Apron dan *Runway* Bandara J.B. Soedirman Purbalingga

g) Perkeretaapian

Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022, sepanjang 1.680,26 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional (55,32 persen dari total panjang rel), dan 750,757 km jalur rel non aktif/belum operasional (44,68 persen dari total panjang rel). Posisi Jawa Tengah yang sangat strategis karena berada diantara 2 kota besar (Kota Jakarta dan Kota Surabaya), jalur rel di Jawa Tengah sangat padat, sehingga pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara dan Lintas Selatan masih diperlukan lanjutan penanganan sampai dengan semua jaringan rel tuntas dengan rel ganda. Dari 929,50 km/sp rel aktif terdiri dari 292,44 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.45.

Peta Jaringan Loop Rel Kereta Api di Jawa Tengah

Tabel 2.78.

Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penumpang (orang)	25.624.133	24.638.063	8.318.591	4.982.954	6.434.642
2.	Barang terangkut (ton)	1.939.940	2.056.546	1.902.245	2.661.209	2.053.983
3.	Stasiun Kereta (buah)	140	106	106	115	115
4.	Perlintasan KA (unit)	1.369	1.168	1.369	1369	1369

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Jawa Tengah telah dikembangkan sistem angkutan rel di wilayah perkotaan Solo Raya yaitu pengembangan Kereta Bandara Internasional Adi Soemarmo (KA BIAS) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (mulai operasional Desember 2019). Jaringan KA BIAS menghubungkan Stasiun Bandara Adi Soemarmo dengan Stasiun Solo Balapan (sepanjang 12,77 km) yang direncanakan diperpanjang sampai dengan Stasiun Klaten sepanjang 43,77 km.

Tabel 2.79.

Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah

No.	Reaktivasi Jalur KA Lintas	Panjang ± (km)	Keterangan
1.	Kedungjati – Tuntang	32	FS 2009, MoU & PKS 2013, DED 2014, AMDAL 2015, Tanah 2016, Proses Review DED
2.	Stasiun Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas	2,9	FS 2012, MoU 2014, PKS 2015, DED 2015, UKL-UPL 2015, Ijin Lingkungan 2016, Pembebasan lahan sudah selesai dan dalam tahap konstruksi, namun terdapat 8 bidang yang masih perlu ditertibkan untuk aspek keselamatan dan pintu perlintasan
3.	Purwokerto - Wonosobo	94	FS 2009, Study Trase 2015, Rekom Gub kesesuaian RTRW 2016, Penetapan Trase 2016, Rencana : 2018 - 2023

No.	Reaktivasi Jalur KA Lintas	Panjang ± (km)	Keterangan
4.	Semarang – Demak – Kudus	52	Studi KA Regional Semarang – Demak – Rembang 2006, FS Semarang – Rembang – Bojnegoro 2015, Studi SID APBN 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali Tahun 2021. Studi SID APBN 2021. Rencana 2021 – 2030
5.	Kudus – Pati – Rembang	60	Studi KA Regional Semarang – Demak – Rembang 2006, FS Semarang – Rembang – Bojnegoro 2015, Rencana 2021 – 2030
6.	Bedono – (Secang – Parakan) – Magelang – Yogyakarta : - Magelang – Yogyakarta - Magelang – Secang –Parakan	46 37	FS 2013, Kajian Trase Bedono – Secang – Magelang 2014, Rekom Gubernur 2019, Studi Kelayakan Survei Investigasi dan Rancangan Dasar akses jalur kereta 2018, Studi DED APND 2020 terkena Refocussing dan diusulkan Kembali 2022. Rencana 2018 – 2024
7.	Cepu – Rembang	72	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030
8.	Purwosari – Wonogiri - Baturetno	82	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030
9.	Wonosobo – Magelang	29,6	Belum Ada Persiapan Dokumen
Total Panjang		507,5	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

2. Keselamatan Perjalanan Transportasi

Keselamatan perjalanan transportasi diukur dengan Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi (dalam 1 Juta Keberangkatan), dimana capaian Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 sebesar 16,91 yang lebih baik jika dibandingkan dengan target ditingkat Nasional pada Tahun 2022 sebesar 28,85.

Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian Sasaran Utama Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 diperlukan upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi yang diantaranya meliputi : Pemasangan fasilitas keselamatan jalan, Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); Pelaksanaan *ramp check*; Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan; Penanganan perlintasan sebidang dan Pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai.

a) Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Data kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah pada tahun 2022 terdapat 30.730 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 4.409 jiwa meninggal dunia, 77 orang luka berat, 35.869 orang luka ringan dan jumlah kerugian materiil Rp. 24.819.905.000,-.

Tabel 2.80.

Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Satuan	Jumlah				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Laka	Kejadian	19.016	25.962	21.396	22.521	30.730
2.	Jumlah Korban MD	Jiwa	4.116	4.141	3.508	3.750	4.409
3.	Korban Luka	Orang	97	96	48	77	77

No.	Uraian	Satuan	Jumlah				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Berat						
4.	Korban Luka Ringan	Orang	21.679	30.555	24.495	25.847	35.869
5.	Kerugian Materiil	Rupiah (Rp.000)	14.138.632	17.858.087	14.746.525	16.836.435	24.819.905.000

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2022

Pada tahun 2022, dari 52.817 kendaraan yang terlibat kecelakaan sebesar 0,55 persen atau 290 kendaraan merupakan mobil bus (AKAP, AKDP, Angkutan Kota/Pedesaan, Pariwisata).

b) Perlengkapan Jalan (Fasilitas Keselamatan) di Ruas Kewenangan Provinsi

Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan kewenangan provinsi pada tahun 2022 mencapai 30,03 persen, selalu terdapat peningkatan dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang kereta api pada tahun 2022 sebesar 17,88 persen yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.81.

Fasilitas Perlengkapan Jalan Terpasang dan Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang di Perlintasan Sebidang KA di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu, RPPJ, Marka, Guard-rail, LPJU, APILL, WL, Deliniator, Cermin Tikung, dan ATCS) terpasang (%)	7,74	12,18	16,93	25,06	30,03
2.	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (%)	3,85	4,55	4,55	9,09	17,88

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.82.

Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rambu Jalan	375	600	-	478	245
2.	RPPJ	50	60	-	46	-
3.	APILL	8	6	-	2	-
4.	Guardrail	448	290	30	176	31
5.	Marka Jalan	12.001	102.000	-	52.444	73.976
6.	LPJU	263	513	150	174	355

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

c) Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)

Di ruas jalan kewenangan provinsi, pada Tahun 2022 masih terdapat 86 titik ruas jalan yang termasuk kategori Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang masih belum tertangani.

Tabel 2.83.

Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) di Ruas Jalan Provinsi yang Belum Tertangani Tahun 2022

No.	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP)	DRK (Lokasi)	%
1.	BPSPP Wilayah I Kelas A (Wilayah Semarang)	18	20,93
2.	BPSPP Wilayah II Kelas B (Wilayah Pati)	16	18,60
3.	BPSPP Wilayah III Kelas A (Wilayah Surakarta)	9	10,47
4.	BPSPP Wilayah IV Kelas A (Wilayah Magelang)	14	16,28
5.	BPSPP Wilayah V Kelas B (Wilayah Banyumas)	4	4,65
6.	BPSPP Wilayah VI Kelas A (Wilayah Pekalongan)	25	29,07
Jumlah		86	100%

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

d) Kendaraan Laik Jalan

Untuk meningkatkan keselamatan transportasi diperlukan peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan. Uji laik jalan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Adapun kewenangan Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan pembinaan kepada Kabupaten/Kota. Semakin banyak Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji sebagai salah satu indikator penting terwujudnya keselamatan di jalan.

Tabel 2.84.

Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022

No.	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	KBWU Yang Diuji	KBWU Yang Lulus Uji	KBWU Yang Tidak Lulus Uji
1.	Kota Semarang	65.138	65.138	0
2.	Kab. Semarang	16.360	16.101	269
3.	Kota Salatiga	5.649	4.929	720
4.	Kab. Demak	11.403	10.861	544
5.	Kab. Grobogan	10.082	10.082	0
6.	Kab. Kendal	8.133	8.038	95
7.	Kab. Batang	7.520	7.474	45
8.	Kab. Pekalongan	6.106	6.048	75
9.	Kota Pekalongan	7.019	6.963	53
10.	Kota Tegal	6.421	6.421	87
11.	Kab. Tegal	18.131	17.876	255
12.	Kab. Pemalang	11.889	11.554	0
13.	Kab. Brebes (Pagojengan)	4.002	3.996	6
14.	Kab. Brebes (Kluwut)	12.736	12.732	4
15.	kab. Boyolali	7.514	7.223	291
16.	Kota Surakarta	23.549	23.534	15
17.	Kab. Sukoharjo	12.864	12.549	315
18.	Kab. Wonogiri	12.082	12.014	68

No.	Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	KBWU Yang Diuji	KBWU Yang Lulus Uji	KBWU Yang Tidak Lulus
19.	Kab. Klaten	15.015	14.209	811
20.	Kab. Sragen	12.136	12.122	14
21.	Kab. Karanganyar	13.785	13.738	44
22.	Kab. Kudus	9.730	9.715	15
23.	Kab. Pati	9.599	9.555	44
24.	Kab. Rembang	8.663	8.494	169
25.	Kab. Blora	3.392	3.392	0
26.	Kab. Jepara	16.111	15.528	583
27.	Kota Magelang	7.244	6.449	795
28.	Kab. Magelang	19.156	19.156	0
29.	Kab. Kebumen	8.060	8.060	0
30.	Kab. Purworejo	5.554	5.267	287
31.	Kab. Temanggung	8.266	8.085	181
32.	Kab. Wonosobo	11.098	10.286	812
33.	Kab. Banyumas	13.886	11.606	2.267
34.	Kab. Cilacap (Majenang)	1.045	1.045	0
35.	Kab. Cilacap	11.951	11.776	175
36.	Kab. Purbalingga	12.455	11.933	522
37.	Kab. Banjarnegara	12.914	12.914	0
Jumlah		446.658	436.863	9.561

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

e) Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah

Ramp check bertujuan untuk meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan *ramp check* dilakukan pada 23 Terminal Tipe B. Selama tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan pada 37.564 kendaraan dengan hasil 28.559 kendaraan tidak terdapat pelanggaran dan 9.005 kendaraan melakukan pelanggaran yang didominasi pelanggaran administrasi.

Tabel 2.85.

Pelaksanaan Ramp Check di Terminal Tipe B Jawa Tengah Tahun 2022

Uraian	Jumlah Kendaraan			Pelanggaran		
	Diperiksa	Tidak Melanggar	Melanggar	Administrasi	Operasional	Teknis
Ramp Check di Terminal Tipe B	37.564	28.559	9.005	8.353	0	2.000

Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Tengah, 2022

f) Perlintasan Jalur Kereta Api dengan Jalan

Di Jawa Tengah terdapat 1.370 titik perlintasan jalur kereta api dengan jalan, sebagian besar terdapat di jalan kewenangan kabupaten/kota sebesar 1.304 titik atau 95,18 persen dari total perlintasan. Kondisi perlintasan terdiri dari 109 perlintasan tidak sebidang (terdiri dari 24 *fly over* dan 85 *underpass*) dan 1.261 sebidang (372 berpalang pintu/dijaga dan 889 belum dilengkapi dengan palang pintu). Perlintasan sebidang yang terletak di perkotaan yang lalu lintasnya cukup

tinggi berpotensi berkontribusi menyebabkan kemacetan. Perlintasan yang belum dilengkapi dengan palang pintu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu-lintas.

Tabel 2.86.

Perlindungan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Status Jalan	Jumlah Perlintasan Dengan Rel Kereta Api		Perlindungan Tidak Sebidang				Perlindungan Sebidang			
				Fly Over		Underpass		Berpalang Pintu & Dijaga		Tidak Ada Palang Pintu	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	Nasional	39	2,85	10	41,67	6	7,06	22	5,91	1	0,11
2.	Provinsi	27	1,97	1	4,17	1	1,18	24	6,45	1	0,11
3.	Kab/Kota	1.304	95,18	13	54,16	78	91,76	326	87,63	887	99,78
Jumlah		1.370	100	24	100	85	100	372	100	889	100

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Khusus untuk jalan yang merupakan kewenangan provinsi, terdapat 27 titik perlindungan dengan jalur rel kereta api yang terdiri dari 25 titik perlindungan sebidang dan 2 titik tidak sebidang yang tersebar di 13 kabupaten/kota yang meliputi 4 Daerah Operasi (DAOP) PT. KAI. Beberapa titik sudah mendesak memerlukan penanganan dengan perlindungan tidak sebidang karena telah menyebabkan kemacetan utamanya pada Kabupaten Grobogan dan Cilacap.

Tabel 2.87.

Perlindungan Rel Kereta Api di Ruas Jalan Provinsi Tahun 2022

No	Jalan / Daerah	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan
Perlindungan Sebidang					
DAOP 3 Cirebon					
1.	Ketanggungan - Kersana - Bantarsari	263	264+138	Kab. Brebes	Berpalang Pintu
DAOP 4 Semarang					
2.	Slawi - Jatibarang / Bts. Kab. Brebes	28	13+643	Kab. Tegal	Berpalang Pintu
3.	Wiradesa - Kajen	115	94+425	Kab. Pekalongan	Berpalang Pintu
4.	Tegowanu - Tanggung - Kapung	33	23+025	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
5.	Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang	39	30+840	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
6.	Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang	27	33+832	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
7.	Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang	81	58+880	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
8.	Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang	6	006+833	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
9.	Singget / Bts Kab. Grobogan - Dopleng - Cepu	99	65+202	Kab. Blora	Berpalang Pintu
10.	Wirosari - Sulursari - Singget / Bts Kab. Blora	72	42+634	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
11.	Kuwu - Galeh / Bts Kab. Sragen	54	32+897	Kab. Grobogan	Berpalang Pintu
DAOP 5 Purwokerto					
12.	Buntu - Kroya - Slarang	409	402+292	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
13.	Menganti - Kesugihan	2	387+325	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
14.	Menganti - Kesugihan	464	387+966	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
15.	Sidareja - Cukangleuleus	441	339+819	Kab. Cilacap	Berpalang Pintu
16.	Sidareja - Cukangleuleus	446	346+950	Kab. Cilacap	Tidak Ada Pintu
17.	Kutoarjo - Ketawang	610	479+174	Kab. Purworejo	Berpalang Pintu
DAOP 6 Yogyakarta					
18.	Gemolong / Bts Kab. Grobogan	123	80+144	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
19.	Gemolong / Bts Kab. Grobogan	138	84+703	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
20.	Gemolong - Andong / Bts Kab. Boyolali	146	89+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu

No	Jalan / Daerah	JPL	KM	Kab / Kota	Kelengkapan
21.	Sragen - Batujamus/ Bts. Karanganyar	72	233+038	Kab. Sragen	Berpalang Pintu
22.	Karangwuni / Bts.Prov. Diy	251	130+530	Kab. Klaten	Berpalang Pintu
23.	Lingkar Timur Sukoharjo	19	14+990	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu
24.	Lingkar Timur Sukoharjo	9	10+185	Kab. Sukoharjo	Berpalang Pintu
25.	Palur - Karanganyar	108	256+761	Kab.Karanganyar	Berpalang Pintu
	Perlintasan Tidak Sebidang				
1.	Jl. A. Yani (Surakarta)	-	-	Kota Surakarta	<i>Underpass</i>
2.	Semarang – Godong	15&17	13+257	Kab. Demak	<i>Fly Over</i>

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

g) Fasilitas Penyeberangan Sungai

Sebagai dukungan pencapaian terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), diperlukan peningkatan kondisi dan kinerja angkutan penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota dalam 1 wilayah provinsi (yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi). Pada tahun 2020 telah dilakukan identifikasi aktivitas penyeberangan sungai di Jawa Tengah, dimana setidaknya terdapat 5 aktivitas penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota. Sehingga setidaknya diperlukan 10 sisi dermaga (plengsengan) untuk meningkatkan keselamatan aktivitas penyeberangan sungai di Jawa Tengah. Pada tahun 2021 sudah ditetapkan trayek lintas penyeberangan dan fasilitasi proses perijinannya.

Sesuai dengan Sasaran Strategis (Utama) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Terwujudnya Konektivitas Nasional dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Rasio Konektivitas Transportasi Nasional, kondisi Rasio Konektivitas Transportasi Laut (Penyeberangan Sungai) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan nilai 0,24.

Tabel 2.88.

Aktivitas dan Kondisi Fasilitas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Sisi Dermaga	Fasilitas Penyeberangan	
			Dermaga	Lampu Penerangan
1.	Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Lutungmati (Batang)	Non Permanen	Ada (2019)
		Desa Tegalsari (Kendal)	Non Permanen	Ada (2018)
2.	Sungai Kalkutho Kab. Batang – Kab. Kendal	Desa Yosorejo (Batang)	Non Permanen	Ada (2021)
		Desa Jatipurwo (Kendal)	Non Permanen	Ada (2021)
3.	Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal	Desa Tegalwangi (Brebes)	Non Permanen	Ada (2022)
		Desa Bojong (Kab. Tegal)	Non Permanen	Ada (2022)
4.	Sungai Kaligangsa Kab. Brebes – Kota Tegal	Desa Randusangawetan (Brebes)	Non Permanen	Ada (2019)
		Desa Kajongan (Kota Tegal)	Non Permanen	Sudah Ada
5.	Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo	Desa Sangkrah (Kota Surakarta)	Non Permanen	Belum Ada
		Desa Gading (Sukoharjo)	Non Permanen	Belum Ada

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

3. Pelayanan Angkutan Umum

Kualitas pelayanan angkutan umum diukur melalui *On Time Performance* (OTP) dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum. OTP Jawa Tengah (yang diukur pada angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan / Trans Jateng) Tahun 2022 sebesar 82,21, lebih tinggi dibandingkan dengan target OTP Nasional di Tahun 2022 sebesar 78,44. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng) berdasarkan survei Tahun 2022 mencapai 83,21, lebih rendah jika dibandingkan dengan target Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Angkutan Umum di tingkat Nasional Tahun 2022 sebesar 85,00.

Untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian Sasaran Utama Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 diperlukan upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi OTP, diantaranya : peningkatan kualitas layanan angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dan fasilitasi penyediaan angkutan umum pada saat lebaran, natal dan tahun baru.

a) Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Besaran bangkitan tarikan perjalanan yang membebani jalan di Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk mengetahui pergerakan perjalanan, dimana pergerakan internal didominasi ke pusat – pusat kegiatan seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta. Pusat – pusat kegiatan tersebut belum dilayani angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah perkotaan. Sehingga kebutuhan untuk pelayanan angkutan umum yang melayani antar wilayah perkotaan sudah menjadi suatu kebutuhan untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan raya.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.46.
Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan Di Jawa Tengah

Untuk membantu mengatasi kemacetan pada ruas jalan utamanya pada wilayah perkotaan, diperlukan upaya untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu, peningkatan layanan angkutan umum penumpang di perkotaan perlu ditingkatkan kenyamanan, kehandalan serta keamanannya. Salah satu upaya yang ditempuh dengan pengembangan transportasi perkotaan pada wilayah aglomerasi.

Angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng. Kondisi sampai dengan tahun 2022 telah terdapat pelayanan di 6 (enam) koridor, yaitu Terminal Bawen Kabupaten Semarang – Stasiun Tawang Kota Semarang, Terminal Bulupitu Purwokerto – Terminal Bukateja Purbalingga, Terminal Mangkang Kota Semarang – RTH Weleri Kabupaten Kendal, Terminal Tirtonadi Surakarta – Sumber Lawang Kabupaten Sragen via Sangiran, Stasiun Kutoarjo Purworejo – Terminal Borobudur Kabupaten Magelang dan Terminal Pengaron Kota Semarang - Terminal Gubug Kabupaten Grobogan Via Godong. Pada 22 Agustus 2022 telah diresmikan perpanjangan Trans Jateng Koridor Kota Semarang - Kendal dari semula Terminal Mangkang hanya sampai Terminal Bahurekso diperpanjang sampai RTH Weleri. Hal ini mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kendal. Sehingga dari kebutuhan jumlah koridor angkutan aglomerasi sejumlah 14 koridor, pada tahun 2022 masih terdapat kekurangan 8 (delapan) koridor.

Tabel 2.89.

Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan di Jawa Tengah

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek
1	KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Grobogan)	1. Semarang – Bawen (Op. 7 Juli 2017)
		2. Semarang – Kendal (Op. 28 Oktober 2019)
		3. Semarang – Demak
		4. Semarang – Purwodadi (Op.13 Oktober 2021)
2	SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)	5. Boyolali – Surakarta
		6. Surakarta – Sragen (Op. 3 September 2020)
		7. Surakarta – Karanganyar
		8. Surakarta – Wonogiri
		9. Sukoharjo – Klaten
3	BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen)	10. Purwokerto – Purbalingga (Op. 13 Agus. 2018)
		11. Purwokerto – Wangon
4	PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung)	12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur)
		13. Terminal Secang – Terminal Parakan
		14. St. Kutoarjo – Borobudur (Op. 1 Sep. 2020)

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Adanya angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan yang dilayani Trans Jateng memiliki kontribusi riil terhadap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mendukung peningkatan pengguna moda transportasi umum di perkotaan (target tahun 2030 mencapai 32 persen). Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Trans Jateng telah melayani total 18.768.235 orang,

dengan jumlah penumpang setiap tahun terus mengalami kenaikan dari 724.320 orang di tahun 2017 menjadi 6.506.462 orang di tahun 2022.

Tabel 2.90.
Perkembangan Jumlah Penumpang Moda Transportasi Umum di Perkotaan yang Dilayani Trans Jateng Tahun 2018 – 2022

No	Wilayah Pengembangan / Koridor Trans Jateng	Jumlah Penumpang yang Dilayani (Orang)					Total 2018-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
Kedungsepur							
1.	Terminal Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017)	1.886.694	2.117.390	1.051.768	1.136.921	1.686.921	7.882.017
2.	Terminal Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019). Diperpanjang ke RTH Weleri (Agustus 2022)	-	178.943	592.411	682.477	1.235.294	2.689.125
3.	Terminal Penggaron - T. Gubug Via Godong (Okt.2021)	-	-	-	133.380	774.188	907.568
Barlingmascakeb							
4.	Purwokerto – Purbalingga (Agustus 2018)	351.896	1.141.126	613.804	673.120	1.261.351	4.041.297
Subosukowonosraten							
5.	Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020)	-	-	55.442	327.786	676.153	1.059.381
Purwomanggung							
6.	Kutoarjo – Borobudur (September 2020)	-	-	106.124	485.848	872.555	1.464.527
Total 5 Koridor		724.320	2.238.590	3.437.459	2.419.549	6.506.462	18.043.915

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pada tahun 2021, mulai dilakukan survey perhitungan jumlah perpindahan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk mengetahui kontribusi Trans Jateng dalam meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan. Hal ini untuk meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi Jateng dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada indikator pengguna moda transportasi umum di perkotaan.

Selain itu angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan Trans Jateng memiliki kontribusi untuk mendorong perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sebagaimana hasil survey Kepuasan Masyarakat terdapat perpindahan moda sebesar 46,39% pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 48,16%.

Tabel 2.91.
Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Pelayanan Trans Jateng Tahun 2021 – 2022

No.	Koridor	Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng (%)	
		2021	2022
1.	Semarang-Bawen	43,79	46,06

2.	Purwokerto-Purbalingga	59,05	52,81
3.	Semarang-Kendal	36,94	41,21
4.	Kutoarjo-Borobudur	43,22	47,84
5.	Solo-Sangiran Via Sumberlawang	49,28	48,16
6.	Semarang-Gubug Via Godong	-	56,15
Persentase Total Perpindahan Kendaraan Pribadi ke Trans Jateng		46,39	48,16

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat (Perpres No. 79 Tahun 2019 dan Perpres No. 109 Tahun 2020) terkait pembangunan kawasan industri di Brebes dan Batang diperlukan kajian kelayakan kebutuhan angkutan umum untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas kawasan industri.

b) Angkutan pada Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Angkutan pada masa lebaran, natal dan tahun baru merupakan penyelenggaraan / pengelolaan angkutan (disemua moda transportasi) pada masa lalu lintas tinggi pada waktu tertentu (*peak season*). Penyelenggaraan ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang bertujuan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Pada Tahun 2022 pengguna angkutan umum sebanyak 15.477.634 orang pada masa lebaran dan 9.986.033 orang pada masa nataru. Hal ini mengalami lonjakan pada tahun sebelumnya dikarenakan sudah tidak diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Tabel 2.92.
Jumlah Penumpang (Orang) Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru

No	Jumlah Penumpang	2021	2022
1.	Lebaran	7.851.683	24.343.824
a.	Angkutan Umum	5.295.715	15.477.634
b.	Pribadi	2.555.968	8.866.190
2.	Nataru	15.653.528	16.978.216
a.	Angkutan Umum	11.446.488	9.986.033
b.	Pribadi	4.207.039	6.992.183
Total		23.505.211	41.322.039

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan dimasa lebaran, natal dan tahun baru lebih banyak yang menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Namun, hal ini masih tetap diperlukan peningkatan layanan angkutan umum untuk mengatasi permasalahan yang terkait kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

c) Angkutan Umum Online

Mendasarkan Permen Perhubungan No. PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permen Perhubungan No. PM 118 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi, mengatur penerbitan ijin operasi angkutan sewa khusus/daring (*online*). Pada Tahun 2022 telah diterbitkan 30 Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO).

Tabel 2.93.

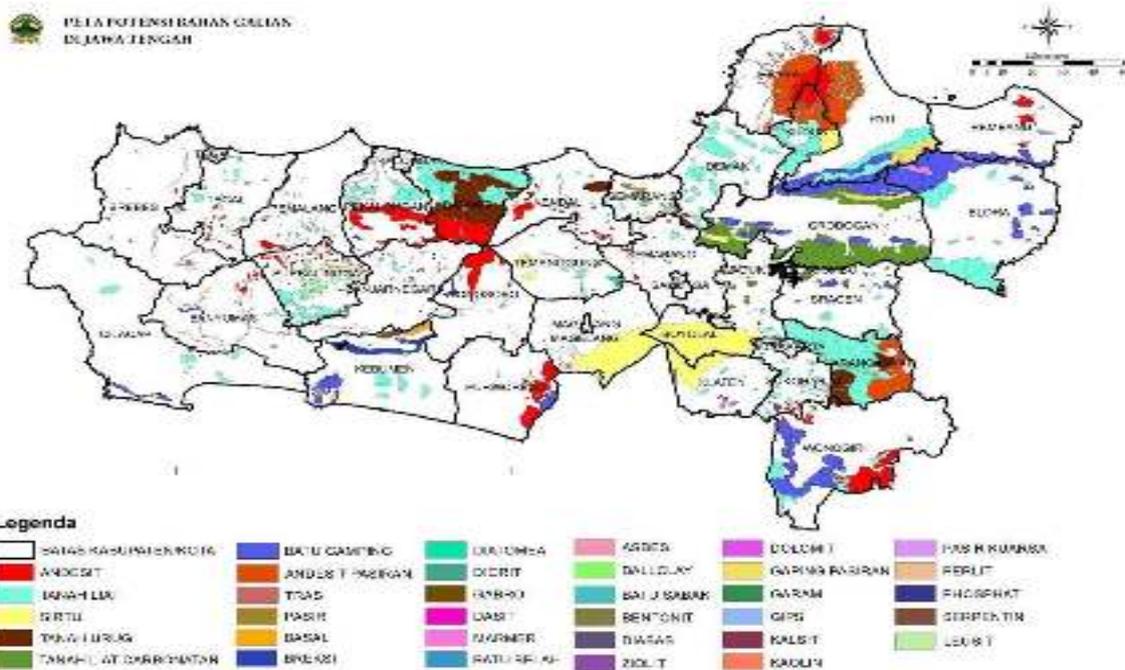
Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa Khusus/Daring (*Online*) Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kedungsepur	77	1.196	405	2	16
2.	Bregasmalang	-	47	28	-	-
3.	Barlingmascakeb	12	180	219	-	-
4.	Subosukowonosraten	-	721	115	2	8
5.	Purwomanggung	-	76	235	-	-
6.	Petanglong	-	17	26	-	6
7.	Banglor	-	-	-	-	-
8.	Wanarakuti	-	23	2	-	-
JUMLAH		89	2.237	1.030	4	30

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

4. Pertambangan

Potensi mineral dan batuan di Jawa Tengah tersebar di 35 kabupaten/kota yang menjadi komoditas utama sebagai bahan konstruksi pembangunan, baik untuk proyek infrastruktur Jawa Tengah maupun Proyek Strategis Nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perkiraan kebutuhan material untuk Proyek PSN di Jawa Tengah adalah sebesar \pm 113 Juta m³. Akan tetapi Jawa Tengah hanya mampu memenuhi \pm 31 Juta m³. Potensi mineral dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya sehingga diharapkan penambangan yang dilakukan tidak berdampak besar pada kerusakan lingkungan hidup.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.47.
Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah

Tantangan yang di hadapi Provinsi Jawa Tengah terkait urusan pertambangan adalah pertambangan ilegal yang keberadaanya hilang dan timbul. Hilang setelah dilakukan penertiban tetapi muncul lagi di kemudian hari. Aktivitas ilegal mining di Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan perkembangan yang fluktuatif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas pertambangan melalui penegakan hukum agar fungsi dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Berikut kondisi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018-2022.

Tabel 2.94.
Kondisi PETI di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas PETI (ha)	489,55	133	128	85,98	278,97
Sidak PETI (obyek)	169	114	107	89	160
Proses Hukum (kasus)	11	9	8	23	23
Lokasi di Kab/Kota	29	28	26	24	24

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Karakter pertambangan tanpa izin bersifat sporadik sehingga luas areanya tidak bisa ditetapkan secara pasti. Pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar peraturan sektor mineral dan batubara, tetapi dapat diduga melanggar sektor lain

seperti lingkungan dan tata ruang sehingga penertiban dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang di sektor tersebut, baik instansi provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Satgas Puser Bumi yang terdiri dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangani penambangan liar. Penertiban pertambangan tanpa izin selain dengan cara penegakan hukum tetapi juga diarahkan pada pemenuhan aspek legalitas sehingga dapat dilakukan penindakan dan pengendalian yang didukung dengan Sistem Pelaporan Usaha Pertambangan (SILUP).

Aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan masalah lingkungan, sehingga perlu dorongan untuk melaksanakan kaidah penambangan yang baik. Kaidah penambangan yang baik artinya penambangan yang menaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dengan berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi, memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta ikut serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kaidah penambangan yang baik dapat diukur melalui persentasi Good Mining Practice. Di Jawa Tengah selama kurun waktu 2018 hingga 2022 persentase Good Mining Practice mengalami peningkatan dari 54,82 persen tahun 2018 menjadi 89,00 persen tahun 2022. Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.95.
Perkembangan Good Mining Practice (GMP) di Jawa Tengah
Tahun 2016 - 2021

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Total Pemegang IUP	425	360	355	355	309
Jumlah Pemegang IUP yang melaksanakan GMP	233	306	302	306	275
Persentase <i>Good Mining Practice</i> (%)	54,82	85,00	85,07	86,20	89,00

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Kedepan penilaian *Good Mining Practice* periode 2024 sampai dengan 2026 menggunakan penilaian baru yang lebih detail, yaitu terkait 5 aspek kewajiban diantaranya:

- Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan (K3 Pertambangan)
- Keselamatan Operasi Pertambangan (KO Pertambangan)
- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk reklamasi dan pasca tambang

- Upaya konservasi sumberdaya mineral dan batubara
- Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan baik cair, padat, gas, sampai memenuhi baku mutu lingkungan

5 aspek kewajiban kemudian dijabarkan menjadi 15 poin kriteria sebagai berikut :

- Kepala Teknik Tambang
- Tanda Batas WIUP
- Statistik kecelakaan tambang
- Laporan Kegiatan
- Kelengkapan sarana pendukung
- Tenaga teknis
- Pembayaran pajak mineral
- Teknik pertambangan
- Pengolahan lanjutan
- Konservasi bahan tambang
- Keselamatan operasional pertambangan
- Keselamatan dan kesehatan kerja
- Pengelolaan lingkungan hidup
- Program pemberdayaan masyarakat/CSR
- Reklamasi dan pascatambang

a. Pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDTT dengan gambaran sebagai berikut.

dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal. Desa dengan status tertinggal berkurang dari 266 pada tahun 2020 menjadi 147 di tahun 2021. Di Tahun 2021 status desa mandiri mengalami peningkatan dari 140 di tahun 2020 menjadi 199 pada tahun 2021. Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar

Desa, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.

Tabel 2.96.

Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah lanjut usia terlantar Tahun 2018-2022

No	Jenis Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah (unit) s.d. Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BUMDesa	2.511	4.215	5.539	6.776	n/a
2	Pasar desa	1.369	1.349	1.671	1.671	n/a
3	UED-SP	1.029	1.029	1.029	1.029	n/a
3	UP2K-PKK	22.326	22.326	22.326	22.326	n/a

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2017-2021 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 2.230 unit di tahun 2017 menjadi 6.776 unit di tahun 2021. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97.

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021

NO	KABUPATEN	JML DS	PENILAIAN BUMDES 2021					KETERANGAN		
			DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU	JUMLAH	2021 BARU	% progress input	pertumbuhan BUMDES 2020-2021
1	Banjarnegara	266	103	67	1	-	171	-	100	0,00%
2	Banyumas	301	120	153	23	3	299	30	100	10,03%
3	Batang	239	132	68	7	1	208	86	100	41,35%
4	Blora	271	131	101	10	3	245	40	100	16,33%
5	Boyolali	261	84	96	16	4	200	66	100	33,00%
6	Brebes	292	116	161	14	1	292	10	100	3,42%
7	Cilacap	269	59	179	27	4	269	18	100	6,69%
8	Demak	243	111	67	7	-	185	69	100	37,30%
9	Grobogan	273	163	99	7	4	273	11	100	4,03%
10	Jepara	184	81	93	10	-	184	-	100	0,00%
11	Karanganyar	162	80	65	8	1	154	37	100	24,03%
12	Kebumen	449	78	275	44	5	402	13	100	3,23%
13	Kendal	266	124	91	6	1	222	75	100	33,78%
14	Klaten	391	157	177	34	12	380	49	100	12,89%
15	Kudus	123	41	3	1	-	45	13	100	28,89%
16	Magelang	367	137	167	23	6	333	144	100	43,24%
17	Pati	401	222	172	5	2	401	-	100	0,00%
18	Pekalongan	272	91	85	8	7	191	56	100	29,32%
19	Pemalang	211	106	93	9	3	211	-	100	0,00%

NO	KABUPATEN	JML DS	PENILAIAN BUMDES 2021					KETERANGAN		
			DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU	JUMLAH	2021 BARU	% progress input	pertumbuhan BUMDES 2020-2021
20	Purbalingga	224	98	75	25	4	202	49	100	24,26%
21	Purworejo	469	152	240	20	5	417	43	100	10,31%
22	Rembang	287	144	69	8	5	226	90	100	39,82%
23	Semarang	208	51	107	15	1	174	44	100	25,29%
24	Sragen	196	110	80	1	1	192	4	100	2,08%
25	Sukoharjo	150	45	77	3	-	125	55	100	44,00%
26	Tegal	281	63	97	18	4	182	83	100	45,60%
27	Temanggung	266	43	150	11	1	205	-	100	0,00%
28	Wonogiri	251	97	122	6	-	225	80	100	35,56%
29	Wonosobo	236	114	44	3	2	163	72	100	44,17%
	JUMLAH	7.809	3.053	3.273	370	80	6.776	1.237	100	0,18355608

Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori berkembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan



Gambar 2.48.

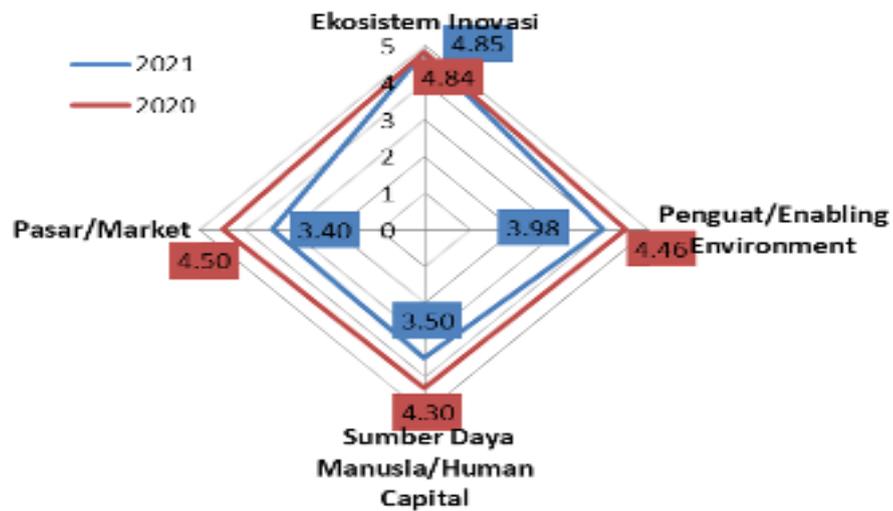
Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

5. Indeks Daya Saing Daerah

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) didasarkan pada empat aspek, yaitu aspek Ekosistem Inovasi, aspek Pasar/*Market*, aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital*, dan aspek Penguat/*Enabling Environment*. Secara keseluruhan, ada 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator penilaian yang merepresentasikan ke-empat aspek tersebut. Berdasarkan nilai IDSD yang dikeluarkan oleh Kemenristek atau BRIN, Jawa Tengah tahun 2020 termasuk daerah pada kategori sangat inovatif, dengan nilai 4,52 sedangkan tahun 2021 nilai tersebut turun menjadi 4,0 hal dipengaruhi kondisi Covid-19 di Jawa Tengah.

Dari empat aspek IDSD hanya aspek Ekosistem Inovasi yang mengalami peningkatan, sedangkan tiga aspek yang lain mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi pada penilaian aspek Pasar, di mana kontributor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah pada pilar dan dimensi Ukuran Pasar. Walaupun demikian, sebagian dimensi mengalami peningkatan, seperti pada regulasi, penelitian dan pengembangan, serta tata kelola pemerintahan.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.49.
Nilai Aspek IDSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan 2021

2.4. Sumber Daya Manusia

2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata geometric, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2018 hingga 2022, namun masih berada di bawah nasional.



Gambar 2.50.

IPM Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022

Perkembangan kinerja IPM sempat melambat di tahun 2020 disebabkan pandemi covid-19. Namun secara perlahan mulai bangkit di tahun 2021, bahkan tahun 2022 laju pertumbuhan semakin cepat sebesar 0,87 menyamai dengan saat sebelum terjadi pandemic covid-19. Faktor yang sangat mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan IPM di tahun 2020 adalah komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

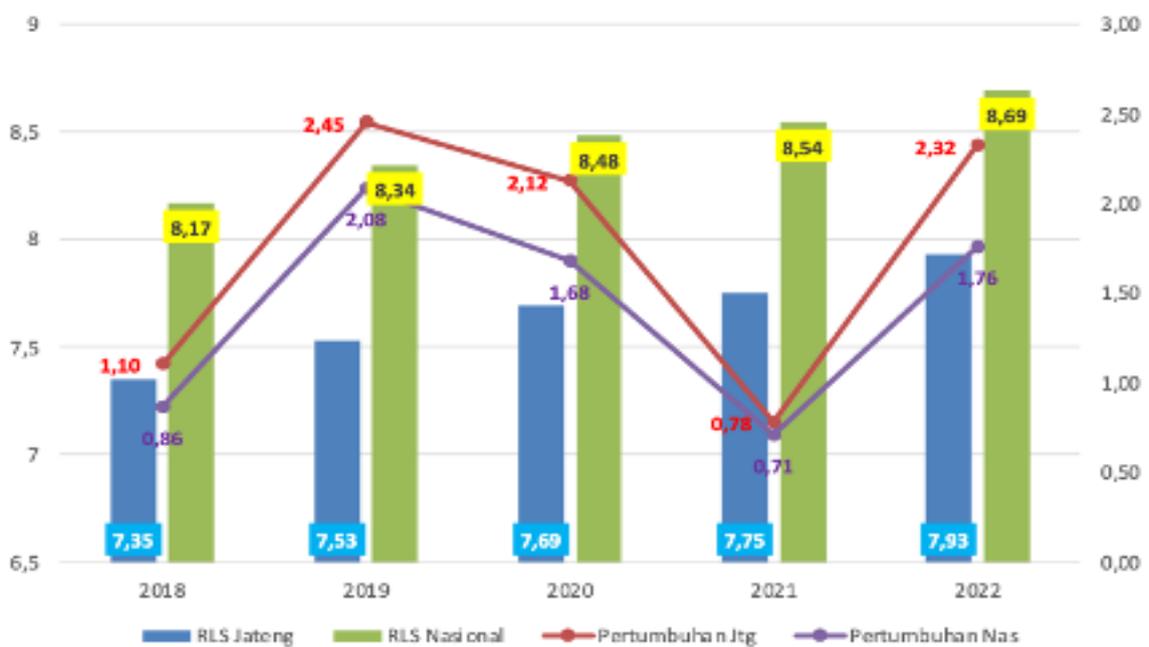


Gambar 2.51.

Pengeluaran/kapita/thn disesuaikan Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022

Namun, pada tahun 2022 percepatan pertumbuhan IPM bukan hanya dipengaruhi oleh komponen pengeluaran per kapita tetapi juga komponen Rata-rata

Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat partisipasi pendidikan di suatu wilayah, termasuk untuk mengetahui pemenuhan terhadap Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun. RLS Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 7,93, maknanya rata-rata penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal selama 7,93 tahun atau setara kelas VIII (SMP Kelas 2). Upaya untuk meningkatkan RLS, salah satunya dengan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Kinerja RLS Jawa Tengah masih di bawah nasional, namun laju pertumbuhan lebih baik dibandingkan nasional bahkan meningkat signifikan dari 0,78 pada tahun 2021 menjadi 2,32 pada tahun 2022. Peningkatan laju pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa program-program penanganan ATS yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terutama intervensi melalui pendidikan non formal dan kesetaraan mulai menunjukkan hasil.

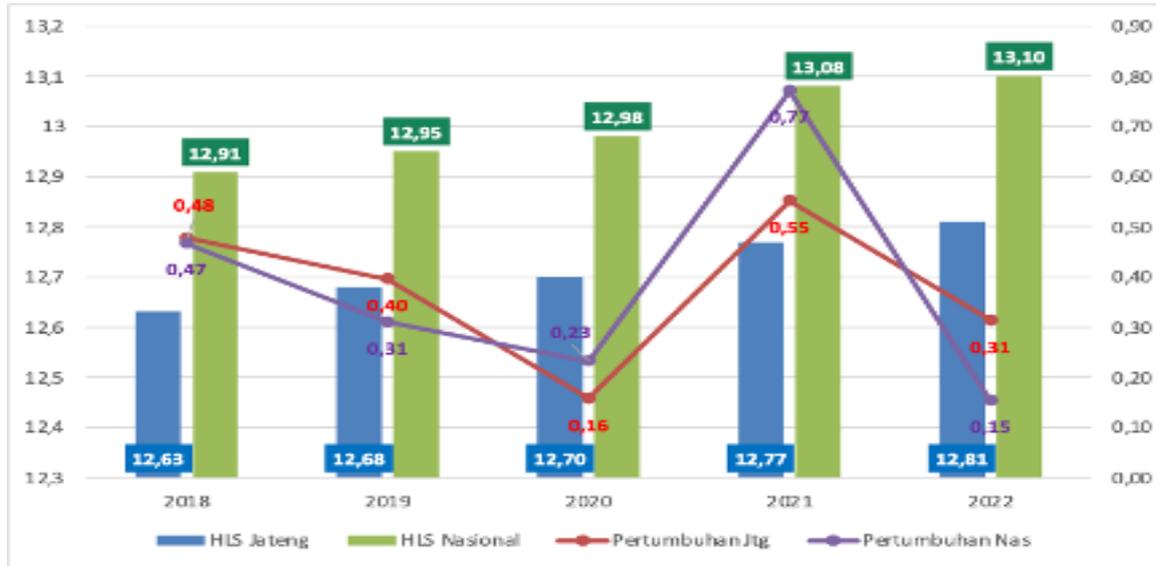


Gambar 2.52.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jateng dan Nasional Tahun 2018-2022

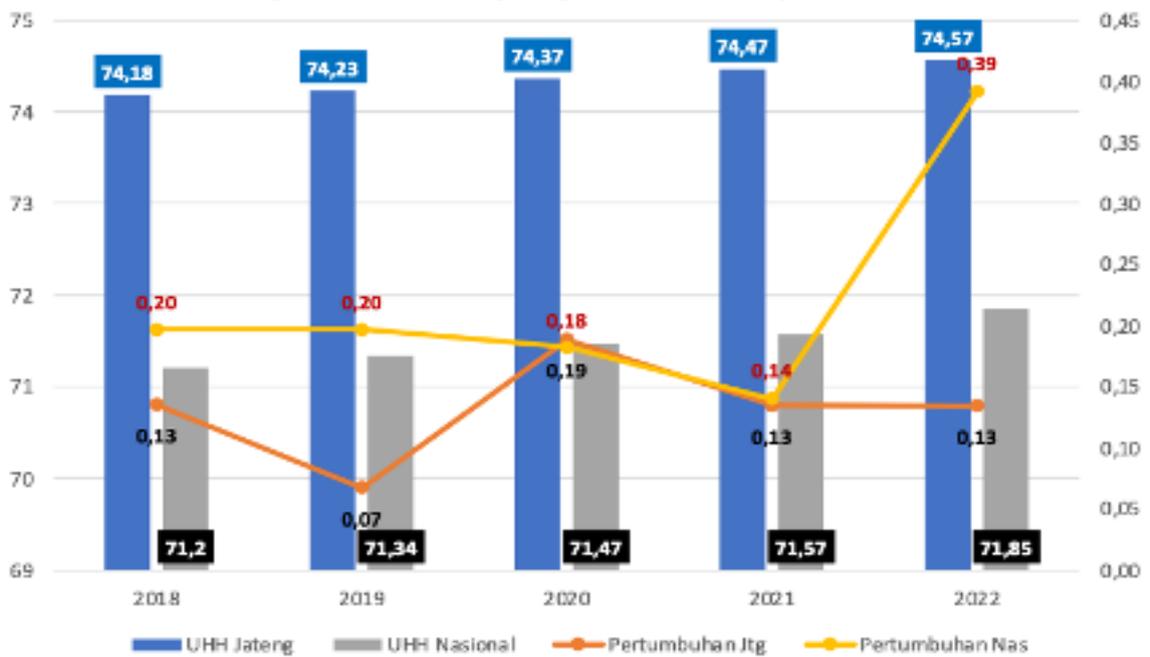
Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan formal di berbagai jenjang antara lain direpresentasikan dalam penyediaan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan. HLS Jawa Tengah sebesar 12,81 pada tahun 2022 artinya bahwa peluang bagi penduduk usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal selama 12,81 tahun atau setara Diploma 1 (D1). Capaian HLS Jawa Tengah masih berada di bawah nasional, dan laju pertumbuhan cenderung melambat dari 0,55 menjadi 0,31 di tahun 2022. Pelambatan ini terjadi antara lain disebabkan peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), ditunjukkan dari jumlah peserta PKBM yang terus meningkat dari 93.408 siswa di tahun 2019 menjadi 124.646 siswa tahun 2021. Ke depan, nampaknya jalur pendidikan formal bukan satu-satunya pilihan untuk memperoleh akses layanan pendidikan tetapi terdapat juga jalur pendidikan

non formal umum maupun keagamaan seperti PKBM dan pondok pesantren. Sehingga pendidikan non formal baik umum maupun keagamaan perlu ditingkatkan kualitasnya, meskipun secara kewenangan berada pada pemerintah kabupaten/kota dan pusat.



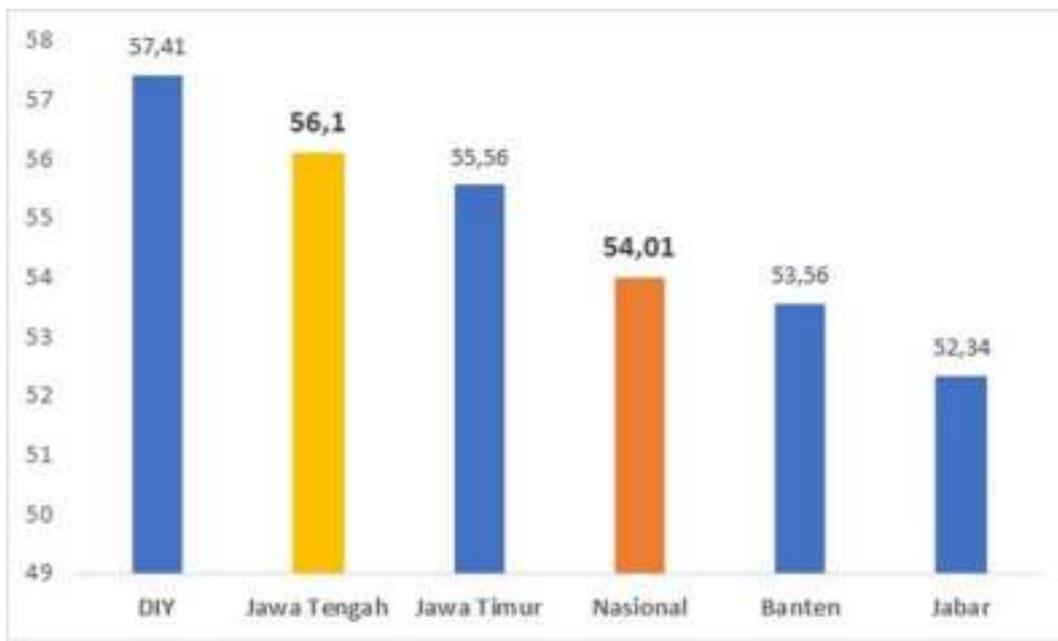
Gambar 2.53.
Harapan Lama Sekolah (HLS) Jateng dan Nasional

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Jawa Tengah melampaui nasional, namun laju pertumbuhan Jateng melambat di tahun 2022 sebesar 0,13 dibandingkan nasional yang melesat menjadi 0,39 di tahun 2022.



Gambar 2.54.
Usia Harapan Hidup (UHH) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan SDM menghadapi kondisi yang perlu untuk terus mendapat perhatian. Berdasarkan capaian indek pembangunan keluarga (ibangga) tahun 2021 tercatat Jawa Tengah sebesar 56,1 menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 58. Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga ibangga Jawa Tengah berada di urutan kedua setelah DIY (57,41) dan lebih baik dari Jawa Timur, Banten dan Jabar.



Gambar 2.55.

Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Tetangga dan Nasional Tahun 2021

a. Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial di Jawa Tengah selain masih dihadapkan pada tingginya angka kemiskinan juga masih tingginya penduduk yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS). Berdasarkan perkembangan data PPKS lima tahun terakhir, PPKS di Jawa Tengah relatif mengalami perkembangan yang fluktuatif yang mengarah pada peningkatan jika mendasarkan base line pada tahun 2018. Tahun 2019 PPKS mengalami penurunan menjadi 3.042.030 jiwa, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 4.056.054 jiwa dan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 4.654.151 jiwa dan tahun 2022 sedikit turun menjadi 4.579.790 jiwa. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum sebanding dengan penambahan PPKS baru, baik yang disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun dampak pandemi covid-19 di tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam penanganan PPKS baik melalui layanan panti maupun bantuan sosial yang hanya sebesar 0,47% atau hanya 19.214 penerima manfaat. Diperlukan kolaborasi semua pihak baik

Pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota, swasta maupun masyarakat sesuai kewenangannya untuk terus bersama-sama memberikan layanan kepada PPKS.

Tabel 2.98.

Populasi dan Penanganan PPKS di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Populasi PPKS	Jumlah Penanganan	Persentase
		(Orang)	(Orang)	
1	2018	4.045.143	60.381	1,49
2	2019	3.042.030	19.214	0,47
3	2020	4.056.054	19.214	0,47
4	2021	4.654.151	19.214	0,47
5	2022	4.579.790	19.214	0,47

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sementara itu, peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diharapkan dapat menjadi faktor dominan dalam penyelenggaraan sosial termasuk membantu para PPKS untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya belum dapat diharapkan sepenuhnya. Beberapa hal yang masih menjadi tantangan pada PSKS dalam menjalankan perannya yaitu terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM PSKS, termasuk tingkat kesejahteraan SDM PSKS yang masih rendah sehingga berpengaruh pada komitmen dalam penyelenggaraan sosial maupun pengkaderisasian SDM PSKS. Data perkembangan jumlah PSKS menunjukkan bahwa jumlah PSKS makin menurun sejak tahun 2019 sebesar 32.874 PSKS menjadi 30.632 PSKS pada tahun 2022.

Tabel 2.99.

Kondisi PSKS Tahun 2018-2022

No	Jenis	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Karang Taruna (KT)	8.578	8.578	8.562	8.562	8.562
2	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	920	902	866	866	866
3	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	13.794	16.260	12.540	11.440	11.440
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	573	576	576	576	576
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	35	39	38	38	37
6	Dunia Usaha	58	63	63	63	56
7	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	934	1.090	1.123	1.123	1.019
8	Family Care Unit (FCU)	0	2	2	2	1
9	Sakti Peksos	0	63	63	63	69
10	Pekerja Sosial Profesional (PSP)/Fungsional	399	120	117	117	123
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	20	38	38	38	38
12	Penyuluh Sosial Fungsional	0	0	25	25	46
13	Penyuluh Sosial Masyarakat	710	710	77	77	77

No	Jenis	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
14	PPNS	0	3	3	3	3
15	Pelopor Perdamaian	0	0	230	230	245
16	SDM PKH	0	2.348	5.495	5.495	5026
17	SLRT	0	11	21	21	21
18	Puskesmas	0	52	306	385	405
	Total	28.039	32.874	32.165	31.145	30.632

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selain itu, kondisi data penerima bansos by name by address masih dihadapkan pada tantangan data yang belum valid dan akurat sehingga terjadi *exclusion error* dan *inclusion error*. Masalah lain terkait data adalah adanya jarak waktu antara data penetapan sasaran dengan pelaksanaan bansos sehingga sering terjadi keterserapan/realisasi pelaksanaan bansos tidak mencapai 100% yang disebabkan karena perubahan secara alami penduduk seperti meninggal dunia, pindah alamat, menjadi mampu atau telah mendapat bantuan lain. KJS menjadi program dengan tingkat keterserapan terendah dibanding dengan program bansos lainnya, dimana pada tahap II dan III serapannya hanya sekitar 75% dari total sasaran yang seharusnya disalurkan. Sementara PKH, BLT DBHCHT, BLT DID sudah cukup baik mendekati angka 100%.

Tabel 2.100.
Keterserapan Bansos Tahun 2022

Tahap	PKH			DBHCHT (BLT Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok) 2022			BLT DID 2022			KJS 2022		
	Quota KPM	Realisasi	%	Quota KPM	Realisasi	%	Quota KPM	Realisasi	%	Quota KPM	Realisasi	%
Tahap I	1.707.511	1.688.044	98,86	71.000	69.090	97,31	71.745	70.557	98,34	12.764	10.252	80,32
Tahap II	1.622.754	1.592.052	98,11	71.000	70.445	99,22	-	-	-	12.764	9.804	76,81
Tahap III	1.603.536	1.591.558	99,25	-	-	-	-	-	-	12.764	9.525	74,62
Tahap IV	1.681.053	1.593.651	94,80	-	-	-	-	-	-	12.764	11.539	90,40

Sumber : Diolah

Upaya lain dalam penanganan PPKS adalah Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program ini bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha sebagai dukungan dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP), namun sampai dengan tahun 2022 karena berbagai permasalahan diantaranya belum maksimalnya sinergi dan kolaborasi program dan kegiatan antar OPD sehingga program ini belum optimal. Total saat ini terdapat 2.839 KUBE di Jawa Tengah dan sebanyak 1.745 KUBE telah mendapatkan bantuan baik melalui APBN, APBD, maupun donor asing, sisanya sebanyak 1.094 KUBE belum mendapatkan bantuan.

Tabel 2.101.
Data KUBE Di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
A.	Total KUBE di Jawa Tengah	2.839
1	Akumulasi KUBE yang sudah mendapat bantuan APBN / APBD/Donasi	1.745
	a. KUBE yang sudah mendapat bantuan APBN / APBD	1.196
	b. KUBE yang mendapat bantuan APBD TA 2022	30
	c. Bantuan kepada KUBE dari Pemerintah Australia (Queensland) 2022	528
2	KUBE belum mendapatkan bantuan	1.094

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan SPM Sosial mendasarkan pada capaian tahun 2022 menunjukkan bahwa layanan terhadap rehabilitasi sosial dalam panti untuk anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta dan layanan penanganan saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana telah mencapai 100 persen. Namun demikian, capaian 100 persen belum menunjukkan coverage seluruh kebutuhan penanganan di Jawa Tengah dan masih sebatas sasaran yang ditangani saja. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya kapasitas sarpras, pendanaan dan SDM panti. Berikut tabel capaian pelaksanaan SPM Sosial Tahun 2022.

Tabel 2.102.
Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Penerima layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (Rp000)	Realisasi (Rp000)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	3.762 Orang	3.762 Orang	100	20.248.253	19.714.490	97,36
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di dalam panti	2.795 Orang	2.795 Orang	100	14.894.872	14.270.684	95,81
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia Terlantar di dalam panti	1.685 Orang	1.685 Orang	100	13.273.822	12.921.217	97,34
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan & pengemis di Dalam panti	810 Orang	810 Orang	100	5.346.951	5.180.769	96,89

No	Jenis Pelayanan	Penerima layanan Dasar			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD (Rp000)	Realisasi (Rp000)	Capaian Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat & Setelah tanggap Darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	145.407 Orang	145.407 Orang	100	1.050.000	1.049.980	100,00
	Jumlah	154.459 Orang	154.459 Orang	100	54.813.898	53.137.142	96,94

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

b. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Ketimpangan gender diukur dari indeks komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPG Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2018-2022 berada di atas nasional dan menunjukkan tren kecenderungan yang terus meningkat. Tercatat hanya di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,06 poin dibanding tahun 2018, sementara periode 2020 hingga 2022 terus mengalami peningkatan yaitu dari 92,18 menjadi 92,83. Capaian ini mengindikasikan bahwa proses pembangunan gender yang terus dilakukan di Jawa Tengah kian berdampak positif.

Tabel 2.103.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Tahun	IPG Prov Jateng	IPG Nasional
1	2018	91,95	90,99
2	2019	91,89	91,07
3	2020	92,18	91,06
4	2021	92,48	91,27
5	2022	92,83	91,63

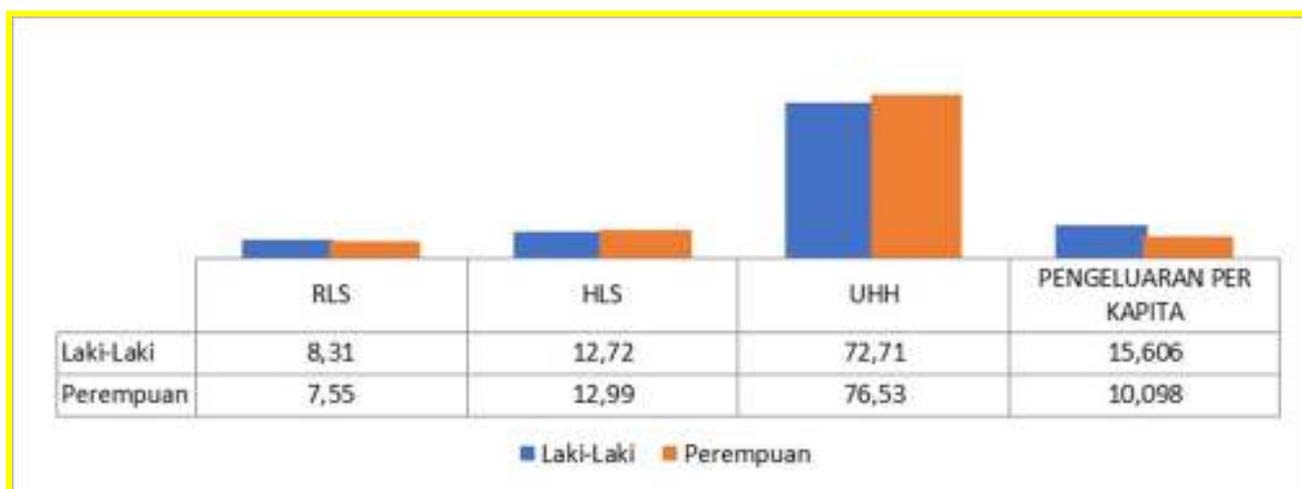
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2022, diketahui bahwa komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan

lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian kedepan antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pengeluaran per kapita yang disesuaikan, kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2022 UHH perempuan di Jawa Tengah telah mencapai 76,53 tahun, sementara laki-laki mencapai 72,71 tahun. Nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya mengalami peningkatan yang berarti, indikasi tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan. Di sisi yang lain, selisih UHH antara perempuan dan laki-laki di Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kedepannya, fenomena female advantages tidak terjadi di Jawa Tengah. Sementara itu pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2022, HLS perempuan adalah 12,99 tahun dan laki-laki sebesar 12,72 tahun. Dengan nilai pencapaian yang relatif hampir sama, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

Rata-rata lama sekolah Jawa Tengah tahun 2022 untuk laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan yaitu laki laki adalah sekitar 8,31 tahun, sedangkan perempuan 7,35 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SMP kelas 1. Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 10,098 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 15,606 juta rupiah per kapita per tahun. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya. Selain itu juga karena perempuan lebih banyak berada pada sektor usaha informal atau nonformal yang terkadang tidak tercatat resmi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.56.

IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2022

Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah sebesar 71,64 poin pada 2021. Nilai tersebut turun 0,09 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 71,73. Skor IDG Jawa Tengah pada 2021 merupakan yang terendah sejak lima tahun terakhir. Artinya, peranan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik di Jawa Tengah semakin menurun. Penurunan IDG di Jawa Tengah pada 2021 terjadi pada beberapa indikator pembentuknya.

Tabel 2.104.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 201-2022

No	Tahun	IDG Prov Jateng	IDG Nasional
1	2018	74,03	72,1
2	2019	72,18	75,24
3	2020	71,73	75,57
4	2021	71,64	76,26
5	2022	n/a	n/a

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami tren yang terus menurun, pada tahun 2017 sebesar 75,10 mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 74,03 kemudian secara berurutan terus mengalami penurunan yaitu di tahun 2019 sebesar 72,18 tahun 2020 sebesar 71,73 dan tahun 2021 sebesar 71,64. Kondisi tersebut berbeda

dengan IDG Nasional yang secara konsisten terus mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2017 sebesar 71,74 menjadi 76,26 di tahun 2021. Penurunan IDG Jawa Tengah tahun 2021 terutama terjadi karena penurunan salah satu komponen yakni persentase keterlibatan perempuan di parlemen.

Keterlibatan perempuan di parlemen cenderung menurun pada kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2017 sebesar 24 persen menurun menjadi 18,33 persen pada tahun 2021. Kondisi tersebut berbeda dengan nasional yang mengalami pergerakan stagnan dari tahun 2017 hingga 2018, dan kemudian meningkat pada tahun 2020 (21,09 persen) dan tahun 2021(21,89 persen).

Kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan pembangunan global membutuhkan aksi nyata dalam upaya meraihnya. Perempuan selama ini memiliki capaian lebih rendah dibanding laki-laki serta mengalami berbagai diskriminasi sebagai dampak budaya patriarki. Isu kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat digaungkan lebih tegas ketika perempuan mampu berpartisipasi dan menduduki jabatan yang strategis dalam parlemen. Keterlibatan perempuan di lembaga eksekutif diharapkan mampu membawa peluang perubahan bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia. Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh signifikan terhadap disahkannya peraturan-peraturan yang memperjuangkan kesetaraan gender, baik di level nasional maupun daerah.

Tabel 2.105.

Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2018	22	17,32
2	2019	19,17	20,52
3	2020	18,80	21,09
4	2021	18,33	21,89
5	2022	n/a	n/a

Sumber: BPS, 2022

Dilihat dari indikator komposit perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, dan teknisi di Provinsi Jawa Tengah, terjadi pergerakan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari 46,97 pada tahun 2017 sampai 50,67 pada tahun 2021. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi Nasional yang juga meningkat.

Tabel 2.106.

Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi di Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2017	46,97	46,31
1	2018	47,57	47,02

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
2	2019	49,36	47,46
3	2020	50,20	48,76
4	2021	50,67	49,99
5	2022	n/a	n/a

Sumber: BPS, 2022

Lonjakan atas indikator ini dipengaruhi oleh kualitas pendidikan perempuan. Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), 48,83 persen perempuan di perkotaan telah mencapai pendidikan SMA ke atas, sementara di pedesaan baru mencapai 23,93 persen. Capaian ini telah merubah posisi perempuan penganggur menjadi bekerja, karyawan menjadi pekerja profesional. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi merupakan indikator untuk menghitung kemampuan dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal dapat memperkuat peningkatan indikator ini adalah meningkatnya jumlah PNS perempuan serta jumlah PNS yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Terdapat 31,13 persen perempuan yang telah mampu berada di eselon tiga dan dua.

Kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja merupakan fenomena yang umum terjadi terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi. Kesenjangan upah di beberapa sektor di negara-negara Asia bahkan mencapai 40 persen. Kesenjangan dalam upah pada akhirnya berimbas pada munculnya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan.

Kesenjangan pendapatan yang diterima tidak terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan adalah karakteristik terpenting dalam menjelaskan fenomena ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan. Penurunan kesenjangan upah dalam beberapa dekade terakhir terjadi karena peningkatan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja perempuan.

Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan juga dipengaruhi oleh sektor pekerjaan. Menurut data KPPPA di sektor formal, laki-laki menempati porsi sebesar 65,78 persen dan perempuan 34,22 persen. Pada sektor informal laki-laki sebanyak 57,96 persen dan perempuan 42,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pekerja perempuan di sektor informal lebih banyak dibanding di sektor formal. Pekerja informal perempuan lebih banyak ditemukan dalam pekerjaan yang cukup riskan, seperti pekerja domestik serta pekerja rumahan atau pekerja keluarga.

Pekerja perempuan di sektor informal juga berpenghasilan lebih rendah. Banyak risiko yang terjadi dari kecenderungan perempuan untuk bekerja di sektor informal seperti bekerja tanpa proteksi sosial dan hukum, tidak mendapat dana pensiun, tidak mendapatkan cuti, dan tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Perempuan yang bekerja di sektor informal juga mendapatkan upah yang relatif rendah serta rentan terhadap keadaan yang tidak aman seperti pelecehan seksual. Meskipun jumlah perempuan bekerja di sektor informal lebih tinggi di bandingkan

sektor formal, namun hal lain yang menghambat adalah penghasilan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jenis usaha yang digeluti juga lebih ke arah pekerjaan domestik.

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2017-2021 relatif stabil pada kisaran angka 34 persen. Jawa Tengah pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 34,29 persen setelah secara berturut-turut sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2021 sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 34,60 persen. Kondisi tersebut berbeda dengan nasional yang mengalami kecenderungan naik dari tahun 2017 (36,62 persen) hingga tahun 2020 (37,26 persen) dan menurun pada tahun 2021 (37,22). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.107.
Kondisi Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Nasional di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)

No	Tahun	Prov Jateng	Nasional
1	2017	34,13	36,62
2	2018	34,28	36,70
3	2019	34,31	37,10
4	2020	34,29	37,26
5	2021	34,60	37,22

Sumber: BPS, 2022

c. Seni Budaya dan Olahraga

1) Kebudayaan

Kontribusi kebudayaan dalam pembangunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Namun demikian, pembangunan kebudayaan di Jawa tengah menghadapi tantangan tersendiri, yaitu menurunnya nilai pembangunan kebudayaan yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. IPK dibentuk melalui 7 dimensi yang memiliki ruang lingkup cukup luas dan bersifat lintas sektor, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.105.

Tabel 2.108.
Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2018 - 2021

Dimensi IPK	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Ekonomi Budaya	37,67	44,45	37,17	25,96
Pendidikan	69,71	71,46	72,64	71,21
Ketahanan Sosial Budaya	79,57	80,30	80,97	72,37
Warisan Budaya	55,16	51,95	45,58	50,12

Ekspresi Budaya	44,70	45,45	43,69	34,79
Budaya Literasi	51,64	56,67	59,90	50,00
Gender	60,05	58,95	58,57	58,28
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah	60,05	60,94	59,12	55,24
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional	53,74	55,91	54,65	51,9

Sumber: Kemendikbud, 2022

Nilai IPK Jawa Tengah selama empat tahun terakhir berada di atas angka IPK Nasional namun kecenderungan semakin menurun dalam tiga tahun terakhir. Penurunan angka IPK Jawa Tengah didorong oleh penurunan pada 3 dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi ekspresi budaya dan dimensi gender.

Kecenderungan penurunan dimensi ekonomi budaya mengindikasikan bahwa minat masyarakat yang menurun untuk menjadikan aktivitas seni budaya sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan ekonomi mereka. Hal tersebut bisa saja terjadi karena “pasar budaya lokal” di Jawa Tengah belum memberikan reward yang menjanjikan untuk para pelaku seni budaya lokal. Selain itu, pengukuran ekonomi kreatif/industri ekonomi kreatif juga belum terukur dalam dimensi ini.

Penurunan dimensi ekspresi budaya menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan peralihan cara masyarakat untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yaitu melalui media digital. Sementara itu, pengukuran dimensi ekspresi budaya (indikator) masih terbatas pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat, kegiatan organisasi, penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni, dan rumah tangga yang menyelenggarakan/menghadiri acara adat. Pada dimensi ekspresi budaya, penurunan angka didorong oleh menurunnya indikator persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dan persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.

Hal yang sama juga berlaku bagi dimensi gender. Menurunnya angka dimensi gender didorong oleh penurunan indikator rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki pada dua tahun terakhir (2020-2021).

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan sebagai penggerak roda pembangunan berkelanjutan bukan merupakan hal yang baru. Unsur kebudayaan menjadi hal penting yang patut diperhatikan, saat arah pembangunan berkelanjutan saat ini tidak hanya bertumpu pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan semata.

Dengan segala karakteristik penduduknya, keanekaragaman budaya di Jawa Tengah merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, rancangan

kebijakan yang berfokus kepada pengembangan dan pelestarian budaya, sekaligus sebagai *booster* untuk mendorong laju pembangunan perlu dilakukan. Isu-isu sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sehingga perwujudan agenda SDGs (Goals 11.4 Mempromosikan dan Menjaga Warisan Budaya Dunia dan Warisan Alam Dunia) dapat dipetakan dengan baik.

Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (UU No. 5 Tahun 2017). Upaya tersebut dilakukan untuk memajukan objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang meliputi: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Data perkembangan OPK yang tersedia di Jawa Tengah dijelaskan dalam Tabel 2.103 berikut.

Tabel 2.109.
Perkembangan Warisan Budaya Benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022*
Warisan Budaya Benda (WBB)					
Museum	54	62	62	n/a	n/a
Cagar Budaya (CB)	397	527	273	n/a	n/a
Pengelolaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya**					
CB dikelola	93	93	93	65	65
CB dimanfaatkan	11	28	33	29	36
Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)					
Penetapan WBTB	9	9	14	n/a	n/a

Sumber: Statistik Kebudayaan Kemdikbud, Laporan Kinerja BPCB Jateng, 2019-2021

*) data belum tersedia/belum rilis

**) Publikasi Laporan Kinerja BPCB Jateng 2021

2) Olahraga

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Ada tiga faktor yang berdampak pada partisipasi olahraga, yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya. Peran olahraga mendukung terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas fisik yang baik. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan

individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.

Sport Development Indeks (SDI) merupakan metode pengukuran keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia. Terdapat 9 dimensi dalam SDI, yaitu ketersediaan SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran jasmani, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, performa, dan ekonomi.

Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada indeks pembangunan olahraga/ Sport Development Index (SDI).

Capaian SDI Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif. Capaian Tahun 2019 sebesar 0,55, mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi 0,60 namun mengalami penurunan pada Tahun 2021 sebesar 0,34.

2.5. Aspek Pelayanan Umum

2.5.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Keberhasilan pencapaian Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun salah satunya ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan. Partisipasi pendidikan digambarkan sebagai jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan merupakan salah satu indikator pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan kecenderungan partisipasi pendidikan semakin turun, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.107.

Tabel 2.110.

Persentase Penduduk Usia 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Persen)

Tahun	PENDUDUK KELOMPOK UMUR								
	7-12			13-15			16-18		
	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tdk Sekolah Lagi
2016	0,39	99,58	0,03	0,32	95,41	4,27	0,33	67,95	31,72
2017	0,38	99,62	0	0,42	95,48	4,1	0,48	68,48	31,04
2018	0,15	99,76	0	0,35	95,79	3,86	0,35	69,02	30,63
2019	0,05	99,77	0,18	0,11	96,11	3,78	0,49	69,65	29,86
2020	0,22	99,73	0,05	0,24	96,37	3,39	0,28	70,14	29,58
2021	0,32	99,66	0,02	0,32	96,84	2,84	0,28	70,80	28,92
2022*									

Sumber: Susenas, BPS (2021)

*) Data belum rilis

Data Susenas BPS memperlihatkan bahwa masih terdapat penduduk usia sekolah tidak/belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi, yang kemudian dikategorikan sebagai kelompok Anak Tidak Sekolah (ATS). Hasil olahan terhadap data Susenas mencatat bahwa tahun 2021 jumlah ATS Usia 7-18 tahun di Jawa Tengah sebesar 555.575 jiwa.

Tabel 2.111.**Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021**

TAHUN	Usia 7-12 th		Usia 13-15 th		Usia 16-18 th		Jumlah ATS Usia 7-18 th
	Tdk/Bl m Pernah Sekolah	Tdk Sekola h Lagi	Tdk/Bl m Pernah Sekola h	Tdk Sekola h Lagi	Tdk/Bl m Pernah Sekola h	Tdk Sekolah Lagi	
2017	12.824	-	7.080	69.116	8.501	549.718	647.239
2018	5.031	-	5.814	64.117	6.204	542.899	624.065
2019	1.688	6.075	1.821	62.577	8.253	502.951	583.365
2020	7.909	1.798	4.046	57.157	4.816	508.724	584.449
2021	10.494	656	5.340	47.390	4.715	486.980	555.575
2022*							

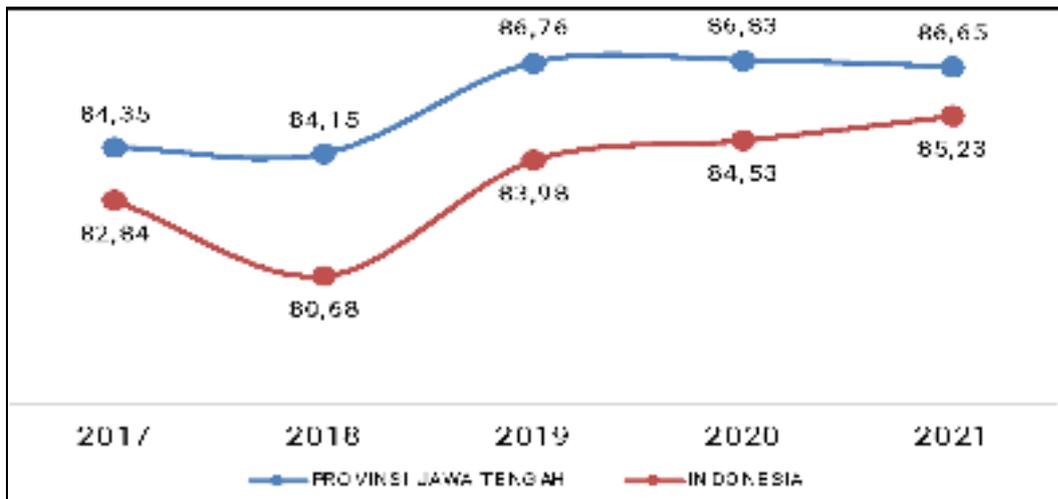
Sumber: Susenas, BPS, diolah (2021)

*) Data belum rilis

Kondisi ini memperlihatkan perlunya penanganan secara serius terhadap ATS di Jawa Tengah, mengingat penanganan ATS juga merupakan bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk semua. Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya partisipasi pendidikan khusus untuk penduduk disabilitas usia 4-18 tahun yang merupakan indikator SPM yaitu sebesar 23,21% pada tahun 2022 (Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud 2023).

Selain partisipasi pendidikan, akses pemerataan layanan pendidikan juga perlu untuk diperhatikan. Akses pemerataan layanan pendidikan yang direpresentasikan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional, meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan.

Penyebab penurunan tersebut diindikasikan karena terdapatnya perubahan metode pembelajaran pasca covid-19 yaitu mengoptimalkan pemanfaatan IT untuk pembelajaran *hybrid* (kombinasi daring dan luring).



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.57.

APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Meskipun secara nasional capaian APK SMA/SMK/Sederajat Jawa Tengah lebih baik, namun distribusi akses layanan pendidikan di 35 kab/kota belum merata. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.109, dimana APK SMA/SMK/Sederajat di 35 kabupaten/kota sangat bervariasi dari kisaran 50% hingga di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan yang cukup tinggi antar kabupaten dan kota. Persoalan kesenjangan dan distribusi pemerataan akses layanan pendidikan telah diupayakan untuk diatasi oleh pemerintah, salah satunya melalui zonasi pendidikan. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan, tidak hanya secara distribusi akses namun juga kualitas layanan pendidikan. Zonasi juga dianggap efektif, hal ini terlihat pada tahun 2017 APK SMA/SMK/Sederajat di atas 100% didominasi wilayah kota, namun rentang 2018 hingga 2021 terjadi pergeseran khususnya untuk Kota Magelang dan Kota Surakarta. Melalui zonasi ini diharapkan wilayah kota bukan satu-satunya tempat dan tujuan favorit untuk menempuh pendidikan.

Tabel 2.112.**Sebaran APK SMA/SMK/Sederajat di Jawa Tengah Tahun 2017-2021**

KABUPATEN/KOTA	APK SMA/SMK/Sederajat				
	2017	2018	2019	2020	2021
PROVINSI JAWA TENGAH	84,35	84,15	86,76	86,83	86,65
Kabupaten Cilacap	87,28	95,83	91,42	91,73	91,5
Kabupaten Banyumas	85,43	89,77	101,68	100,42	108,66
Kabupaten Purbalingga	72,83	68,08	71,56	71,28	69,89
Kabupaten Banjarnegara	66,77	74,98	71,9	71,37	70,02
Kabupaten Kebumen	104,89	95,1	104,39	103,71	102,46
Kabupaten Purworejo	102,81	95,04	92,67	93,63	95,57
Kabupaten Wonosobo	52,98	54,8	55,2	56,29	57,43
Kabupaten Magelang	75,56	69,59	70,56	70,13	67,7
Kabupaten Boyolali	77,45	78,46	81,37	80,4	79,36
Kabupaten Klaten	100,58	104,48	109,2	108,59	106,85
Kabupaten Sukoharjo	96,11	92,74	81,17	83,41	84,16
Kabupaten Wonogiri	86,58	83,48	90,45	92,36	90,3
Kabupaten Karanganyar	83,11	75,74	77,28	78,2	75,34
Kabupaten Sragen	106,49	100,86	114,62	110,98	108,05
Kabupaten Grobogan	81,28	85,26	93,21	93,6	92,47
Kabupaten Blora	84,82	94,12	86,39	87,3	85,16
Kabupaten Rembang	72,05	71,12	72,99	74,53	71,94
Kabupaten Pati	91,14	89,84	101,67	101,34	102,6
Kabupaten Kudus	93,35	91,66	91,45	90,1	92,16
Kabupaten Jepara	87,05	85,55	87,65	88	90,31
Kabupaten Demak	91,7	110,29	106,41	102,7	100,07
Kabupaten Semarang	78,21	66,93	78,44	78,77	80,91
Kabupaten Temanggung	70,09	71,31	77,34	77,59	75,27
Kabupaten Kendal	87,1	106,43	105,77	103,73	106,32
Kabupaten Batang	73,93	62,13	67,57	69,78	72,27
Kabupaten Pekalongan	55,13	60,36	61,24	64,22	62,3
Kabupaten Pemasang	71,38	69,9	75,14	74,18	72,03
Kabupaten Tegal	75,44	81,13	81	80,26	78,78
Kabupaten Brebes	76,51	69,29	68,96	70,34	73,73
Kota Magelang	107,24	91,97	89,74	90,07	88,16
Kota Surakarta	103,55	80,85	77,92	81,43	79,62
Kota Salatiga	109,61	120,18	121,91	119,1	118,12
Kota Semarang	107,82	103,54	106,63	104,6	105,01
Kota Pekalongan	92,04	74,41	74,92	78,66	76,12
Kota Tegal	87,08	79,7	83,2	82,32	84,39

Sumber : Diolah

Selain akses pemerataan layanan pendidikan, mutu pendidikan juga masih menjadi persoalan di Jawa Tengah. Mutu pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri. Relevansi pendidikan, kualitas guru, kondisi sarana prasarana pendidikan serta kemampuan literasi dan numerasi siswa dapat menggambarkan bagaimana kondisi mutu pendidikan di Jawa Tengah. Relevansi pendidikan ditunjukkan melalui kualitas lulusan pendidikan terutama pada kesesuaian lulusan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja. Data memperlihatkan bahwa serapan tamatan SMK belum optimal, ditandai dengan penurunan jumlah lulusan

SMK yang bekerja, sebaliknya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha justru mengalami peningkatan. Namun demikian, dari hasil penilaian Rapor Pendidikan Kemendikbud menunjukkan hasil yang cukup baik untuk tingkat penyerapan lulusan SMK di Jateng sudah mencapai 92,53% pada tahun 2022. Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan serapan lulusan SMK lebih banyak ke arah berwirausaha daripada bekerja di dunia usaha maupun industri.

Tabel 2.113.

Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
• Jumlah siswa kelas III/IV	195.354	164.231	167.751	248.065	208.194
• Jumlah lulusan	194.768	164.231	167.751	248.065	208.194
• Bekerja	100.500	111.096	99.278	73.778	65.241
• Wirausaha	1.266	13.159	35.517	1.012	14.480
• Melanjutkan	55.762	22.568	1.720	31.727	18.155
• Belum bekerja	37.240	17.048	21.081	141.548	75.269

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan peningkatan keterserapan lulusan SMK pada DUDI salah satunya melalui penyelenggaraan Uji Kompetensi Siswa SMK yang sesuai kebutuhan DUDI serta mengoptimalkan fasilitasi dari Pemerintah Pusat untuk SMK melalui program *Center of Excellent (CoE)* dan DAK Fisik Sarpras Pendidikan SMK.

Kualitas guru salah satunya dapat dinilai melalui kompetensi yang dimiliki. Sampai dengan tahun 2021 persentase guru dengan sertifikat kompetensi cenderung tidak mengalami peningkatan signifikan, berada pada rentang cakupan 40 hingga 65 persen. Beberapa kendala dijumpai dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi mulai dari belum memiliki ijazah D4/S1, sudah memiliki ijazah D4/S1 namun tidak linier dengan bidang yang diajar hingga keterbatasan jumlah kuota sertifikasi kompetensi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Tabel 2.114.

Sertifikat Kompetensi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021

		2018		2019		2020		2021	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum
Sertifikat Kompetensi	SMA	65	35	66,7	33,3	65,1	34,9	57,1	42,9
	SMK	41	59	43,6	56,4	44,2	55,8	44,2	55,8
	SLB	50,8	49,2	52,2	47,8	46,1	53,9	40,3	59,7

Sumber Kemendikbud, 2022

Kualifikasi guru minimal D4/S1 dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Kondisi tersebut diperkuat dengan data sebagaimana table 2.112, memperlihatkan bahwa di Jawa Tengah

masih terdapat Guru belum memiliki kualifikasi minimal D4/S1 dan paling banyak dijumpai pada jenjang pendidikan khusus.

Tabel 2.115.

Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018-2021

		2018		2019		2020		2021	
		Sudah D4/S1	Belum D4/S1						
Kualifikasi Guru	SMA	98,1	1,9	98,2	1,8	89	11	98,8	1,2
	SMK	95,5	4,5	96,2	3,8	88,5	11,5	97,3	2,7
	SLB	92,3	7,7	92	8	92,7	7,3	96,3	3,7

Sumber Kemendikbud, 2022

Mutu pendidikan lainnya tergambarkan melalui kondisi sarpras pendidikan di Jawa Tengah. Jawa Tengah masih memiliki ruang kelas kondisi rusak berat, sedang maupun ringan. Terhadap kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya melakukan peningkatan sarpras pendidikan melalui rehabilitasi sarpras pendidikan baik dengan optimalisasi APBN (DAK Fisik Sarpras Pendidikan) maupun APBD.

Tabel 2.116.

Kondisi Sarpras Pendidikan Tahun 2018-2021

	2018			2019			2020			2021		
	Rusak berat	Rusak sedang	Baik+ Rusak ringan	Rusak berat	Rusak sedang	Baik+ Rusak ringan	Rusak berat	Rusak sedang	Baik+ Rusak ringan	Rusak sedang +berat	Rusak ringan	Baik
SMA	278	434	12.927	296	456	12.861	215	688	13.269	3	6.349	8.502
SMK	296	452	23.373	295	431	23.434	204	698	25.105	-	13.070	14.797
SLB	-	-	-	106	104	1.825	82	249	2.514	25	1.656	1.517

Sumber Kemendikbud, 2022

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahamai konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, kemampuan literasi dan numerasi Jawa Tengah telah melampaui nasional dan mencapai kompetensi minimum, namun untuk pendidikan khusus perlu perhatian karena kecenderungan mengalami penurunan di tahun 2022.

Tabel 2.117.
Kemampuan Literasi dan Numerasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2021-2022

TAHUN	JENJANG PENDIDIKAN	LITERASI (nilai)		NUMERASI (nilai)	
		Jateng	Nasional	Jateng	Nasional
2021	SMA	68.58	60,03	53.79	49,40
	SMK	63.21	59,64	50.89	58,41
	SDLB	65.43	57,75	56.75	48,19
	SMPLB	65.49	63,32	58.47	56,39
	SMALB	62.34	60,77	51.63	50,70
2022	SMA	70.5	58,72	58.04	50,65
	SMK	63.52	49,27	53.33	50,26
	SDLB	64.98	60,05	54.72	49,88
	SMPLB	65.46	63,54	59.54	57,53
	SMALB	58.59	57,25	53.38	52,42

Sumber: Rapor Pendidikan Jawa Tengah, 2023

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa melalui 3 iklim yaitu iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas. Iklim keamanan menggambarkan kondisi satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang terhindar dari perundungan, pelecehan seksual serta kekerasan. Iklim kebhinekaan merepresentasikan penerimaan terhadap perbedaan, kebebasan berpendapat, nalar kritis, kreativitas, sikap saling menghargai, toleransi, gotong royong serta ketaqwaan. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan iklim. Rerata nilai karakter siswa Jawa Tengah pada kisaran nilai 80 lebih baik dibandingkan nasional dengan kisaran nilai 60.

Tabel 2.118.
Nilai Karakter Siswa Jateng Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2021-2022

TAHUN	JENJANG PENDIDIKAN	IKLIM KEAMANAN	IKLIM KEBHINEKAA N	IKLIM INKLUSIVITAS
2021	SMA	83,98	83,47	71,09
	SMK	79,42	70,11	67,61
	SDLB	83,32	63,48	79,09
	SMPLB	82,14	73,19	79,32
	SMALB	78,15	71,44	75,95
2022	SMA	84,09	94,20	82,54
	SMK	80,64	88,14	77,03
	SDLB	82,17	90,29	78,25
	SMPLB	79,26	77,65	79,80
	SMALB	77,23	73,77	77,75

Sumber: Rapor Pendidikan Jawa Tengah, 2023

Transformasi digital menuntut pemahaman dan skill/keterampilan terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Data memperlihatkan bahwa proporsi penduduk usia 15-24 tahun dengan keterampilan TIK jauh lebih baik dibandingkan

penduduk usia 15-59 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penguasaan TIK masih didominasi oleh kelompok usia muda produktif.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, 2021

Gambar 2.58.

Proporsi Remaja Dan Dewasa Usia 15-24 Tahun dan Usia 15-59 Tahun Dengan Keterampilan TIK di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)

b. Kesehatan

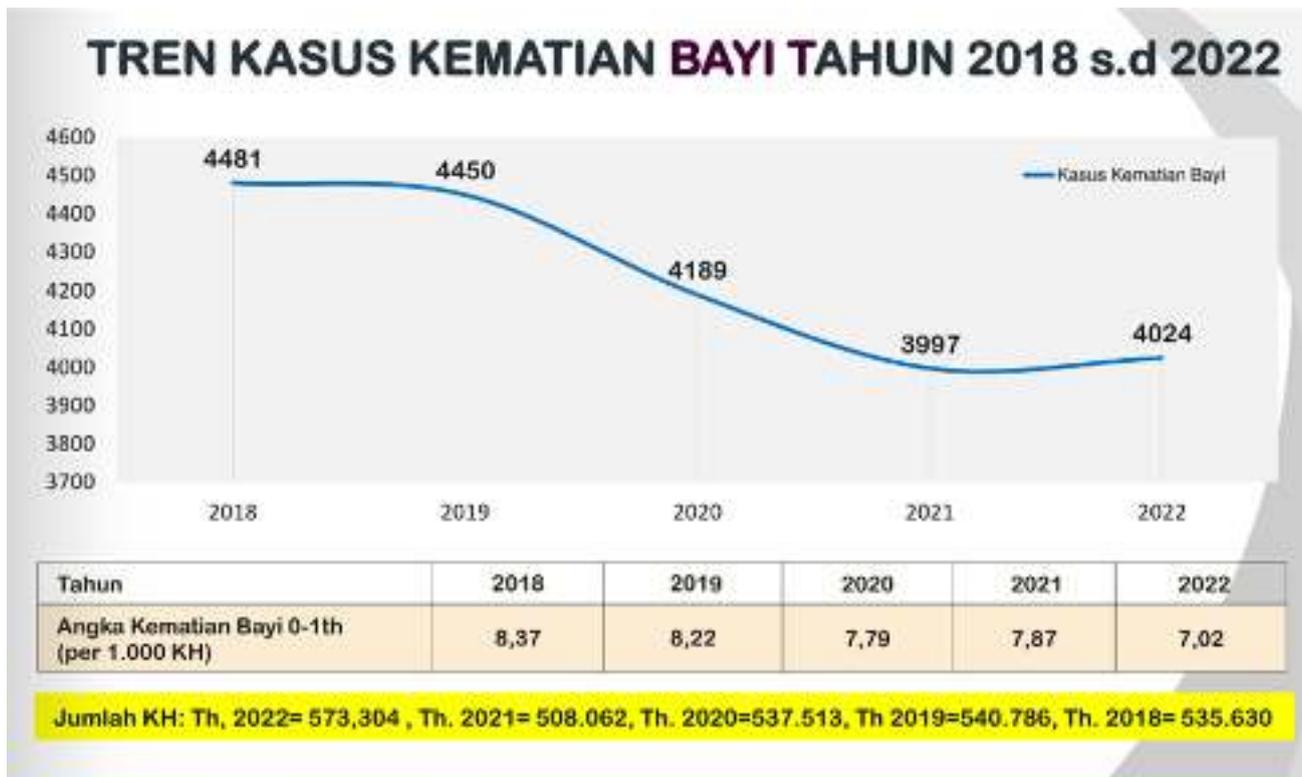
1) Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2018 – 2019 menunjukkan tren yang semakin baik dari 78,60 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada 2019 menjadi 76,93 per 100.000 KH. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 menimbulkan perburukan kasus kematian ibu secara signifikan pada 2020 dan 2021 menjadi 98,60 pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan menjadi 199 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2021. Keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil selama pandemi, potensi keterpaparan virus, dan komplikasi kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, jantung, diabetes) menjadi faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi naiknya angka kematian ibu. Jika dilihat dari data tahun 2022 menunjukkan bahwa Angka kematian ibu di Jawa Tengah sebanyak 485 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 35 Kasus dan terendah di Kota Magelang 1 kasus. Angka Sementara di tahun 2022 tersebut menurun dibanding Angka kematian Ibu tahun 2021 yang sebanyak 1.011 kasus.



Gambar 2.59.
Tren Kasus Kematian Ibu Tahun 2018-2022

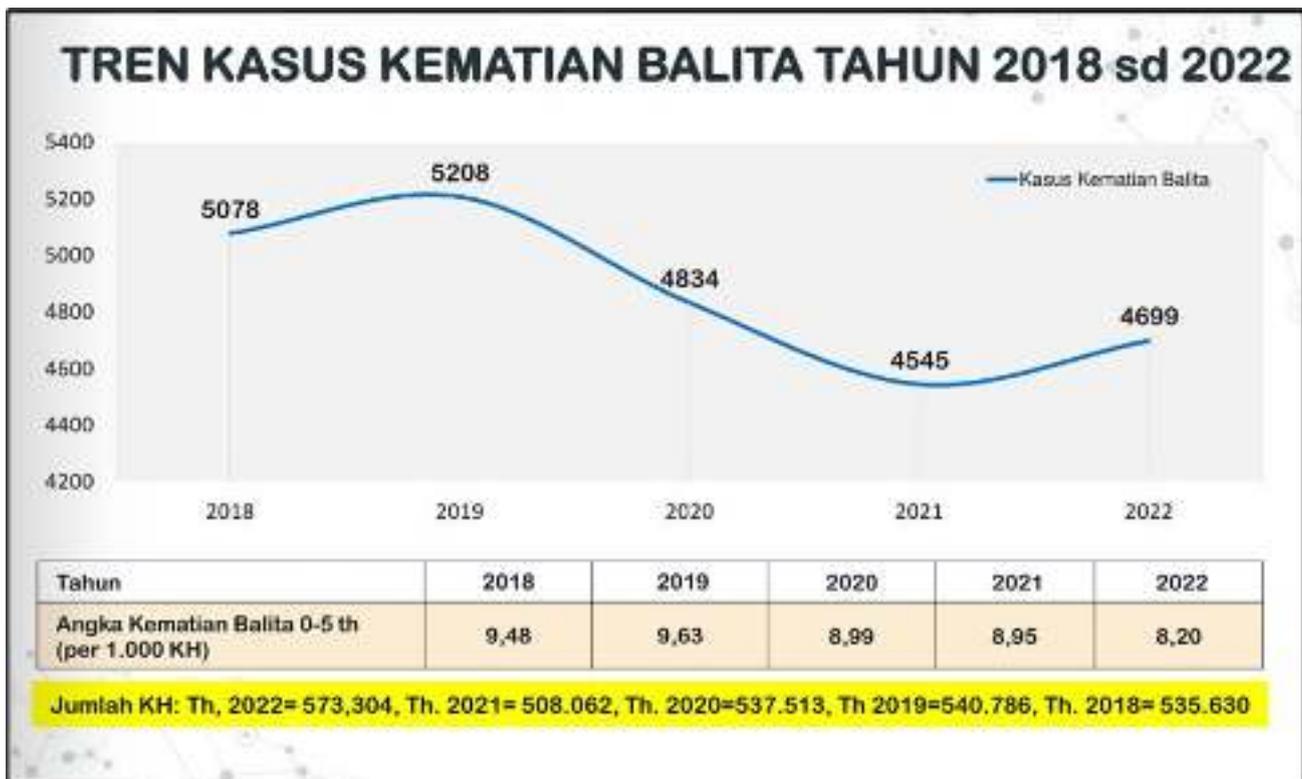
Angka Kematian Bayi (AKB) periode tahun 2018 hingga 2021 menunjukkan tren membaik yaitu sebesar 8,37 per 1.000 KH pada tahun 2018 menjadi sebesar 7,87 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2021. Meskipun AKB telah menunjukkan kinerja membaik, namun secara absolut jumlah kasus kematian bayi masih tinggi. Faktor penyebab kematian bayi antara lain kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan komplikasi kehamilan serta keterbatasan layanan kesehatan ibu dan anak pada masa pandemi Covid-19. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa Kasus kematian bayi di Jawa Tengah sebanyak 4.024 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 259 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 11 kasus.



Gambar 2.60.

Tren Kasus Kematian Bayi Tahun 2018-2022

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah pada 2018 sampai dengan 2021 menunjukkan tren membaik dari 9,48 per 1.000 KH pada 2018 menjadi 8,95 per 1.000 KH pada 2021. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus kematian balita di Jawa Tengah sebanyak 4.699 Kasus. Tertinggi di Kabupaten Brebes sebanyak 310 Kasus dan terendah di Kota Magelang sebanyak 11 kasus. Beberapa penyebab kematian balita antara lain pneumonia, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita. Masih perlu upaya edukasi dan peningkatan pemahaman orang tua dan pengasuh untuk menerapkan pola asuh secara benar kepada balita.



Gambar 2.61.

Tren Kasus Kematian Balita Tahun 2018-2022

1) Kasus gizi buruk

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah mengindikasikan peningkatan pula dari 961 pada tahun 2018 menjadi 2999 pada tahun 2022 seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4. Hal ini terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu :ekonomi, sanitasi, pendidikan orangtua, dan perilaku orangtua. Kemiskinan salah satu determinan social-ekonomi, merupakan akar dariketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan, dan tidak sehat serta ketidakmampuanmengakses fasilitas kesehatan. Malnutrisi masih saja melatarbelakangi penyakit dan kematiananak. Kurang kalori protein sesungguhnya berpeluang menyerap siapa saja, terutama bayidan anak yang tengah tumbuh-kembang. Gizi buruk cenderung menyerang setelah merekaberusia 18 bulan. Penilaian status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjaminsetiap anggota masyarakat mendapatkan makanan yang cukup jumlah dan mutunya. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari. Kecukupan zat giziberpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak.Kasus gizi buruk bukanlah jenis penyakit yang datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi karena proses yang menahun terus bertumpuk danmenjadi kronik saat mencapai puncaknya. Masalah defisiensi gizi khususnya menjadiperhatian karena berbagai penelitian menunjukkan adanya efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak manusia.



Gambar 2.62.

Tren Kasus Balita Gizi Buruk Tahun (BB/TB) 2018-2022

Permasalahan gizi yang terjadi di Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh masalah kekurangan dan kelebihan gizi. Kekurangan gizi dalam waktu lama maupun infeksi berulang yang mengganggu intake zat gizi menyebabkan masalah gizi kronis sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (stunting). Kekurangan gizi dalam waktu singkat, misalnya karena wabah penyakit dan kelaparan menyebabkan masalah gizi akut sehingga mengakibatkan anak menjadi kurus (underweight dan wasted). Selain permasalahan kekurangan gizi, kelebihan gizi juga menimbulkan masalah karena menyebabkan anak menjadi obesitas. Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa tren permasalahan gizi di Jawa Tengah menunjukkan angka yang semakin membaik. Prevalensi balita underweight dan wasted sebesar 14 persen dan 6,7 persen pada 2021. Prevalensi balita stunted turun dari 27,67 persen pada 2019 menjadi 20,9 persen pada 2021. Berdasarkan standar WHO, suatu wilayah dikatakan baik jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut jika prevalensi balita pendek <20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi kronis apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus <5 persen. Suatu wilayah dikatakan memiliki permasalahan gizi kronis dan akut apabila prevalensi balita pendek >20 persen dan prevalensi balita kurus >5 persen. Berdasarkan standar tersebut, Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah dengan permasalahan gizi kronis dan akut.

Penanganan permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan angka prevalensi stunting pada balita menjadi 14 persen dan angka prevalensi wasting pada balita menjadi 7 persen

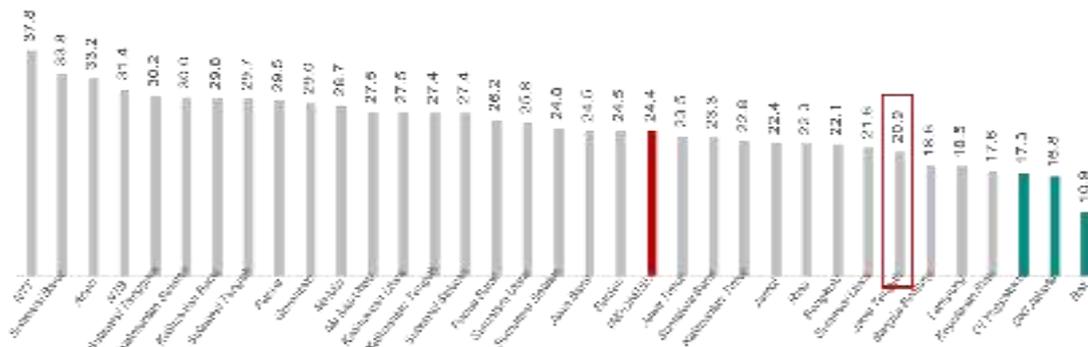
sampai dengan tahun 2024. Angka prevalensi stunting di Jawa Tengah terus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Jika mengacu pada target nasional maka perlu upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Jawa Tengah pada tahun 2023 menjadi di bawah 16 persen dan menjaga angka prevalensi wasting tidak lebih dari 7 persen.

Tabel 2.119.

Prevalensi Stunting Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	Stunting	Sumber
2018	31,2%	Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2019	27,68%	Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI telah terintegrasi dengan riskesdas)
2020	-	Tidak dilakukan pengukuran karena pandemi
2021	20,9%	Survey Status Gizi Indonesia
2022	n/a	n/a

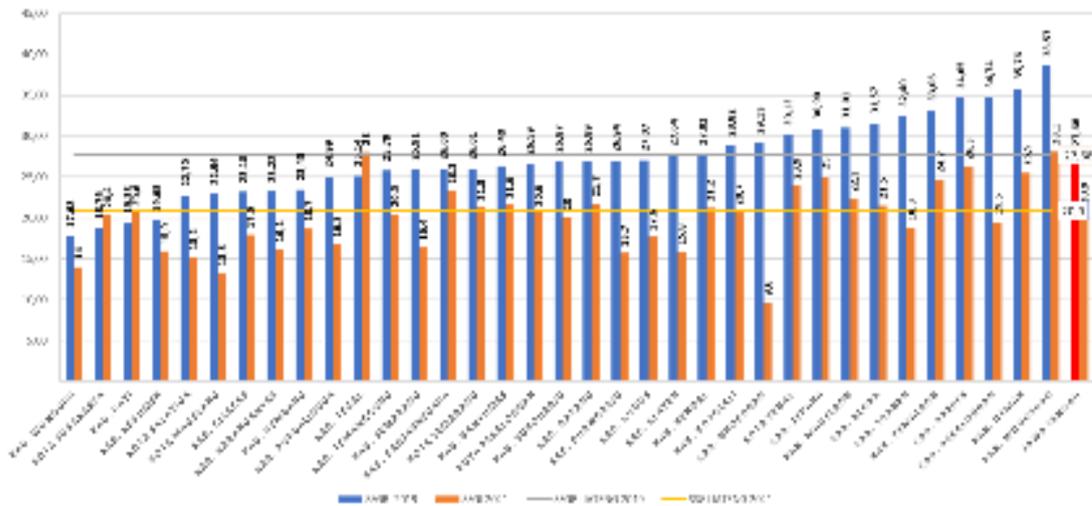
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.63.

Angka Prevalensi Stunting Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Provinsi Lainnya Tahun 2022



Gambar 2.64.

Angka Prevalensi *Stunting* Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan SSGBI 2019 dan SSGI 2021

Terjadinya kondisi *stunting* secara umum dipengaruhi oleh asupan gizi dan status kesehatan. Asupan gizi berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi. Status kesehatan berkaitan dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan permukiman, serta lingkungan sosial (norma dan pola asuh, pendidikan, lingkungan kerja).

2) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Beban ganda penyakit saat ini menjadi tantangan kesehatan Jawa Tengah, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit tersebut sangat dipengaruhi antara lain oleh perubahan lingkungan, perilaku masyarakat, transisi demografi, teknologi, ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

Kondisi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IR DBD) di Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021 dibanding tahun 2020 yaitu menjadi 12,80 per 100.000 penduduk setelah tahun sebelumnya di angka 16,30 per 100.000 penduduk. Dengan penurunan kasus menyebabkan angka kematian DBD meningkat dibanding tahun 2020 yaitu dari 1,9 persen pada tahun 2020 menjadi 2,71 persen pada tahun 2021. Angka ini perlu menjadi perhatian serius karena menyangkut angka kematian yang disebabkan oleh DBD, dimana angka kesakitan

menurun, namun angka kematian meningkat. Sementara itu ancaman kenaikan kasus kematian dapat terjadi seiring dengan adanya kenaikan pula pada angka kesakitan DBD (CFR DBD) yaitu dari 1,9 persen di tahun 2020 menjadi 2,71 persen di tahun 2021.

Angka Kesakitan Malaria (API) berdasarkan data triwulan III tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,021 dibandingkan Tahun 2021 sebesar 0,024. Saat ini dari 35 Kabupaten/Kota yang mempunyai kasus Malaria tertinggi sebesar 366 kasus hanya di Kabupaten Purworejo. Hal ini dipengaruhi adanya Migrasi Kasus dari Pendetang.

Sementara itu penemuan kasus TB yang ternotifikasi (CNR TB) mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 118 persen menjadi 116,2 persen di tahun 2021, namun harapan penanganan TB mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu ditandai dengan turunnya angka keberhasilan pengobatan TB (SRTB) dari tahun 2020 sebesar 84,5 persen menjadi sebesar 83,5 persen di tahun 2021. Penemuan kasus TB semakin membaik seiring dengan dilakukannya deteksi dini oleh petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat.

Pada penyakit HIV/AIDS perlu diwaspadai secara serius, mengingat terjadi lonjakan angka yang cukup besar pada tahun 2020, tercatat kasus HIV menurun dari 2.749 kasus di tahun 2020 menjadi 2.708 kasus di tahun 2021. Kasus AIDS juga menurun dari 1.549 kasus di tahun 2020 menjadi 835 kasus di tahun 2021. Angka Sementara Per Semester III tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus HIV di Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak 2.163 Kasus. sedangkan kasus AIDS di tahun 2022 meningkat sebanyak 914 kasus. Kasus HIV dan AIDS perlu menjadi perhatian bersama dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Meskipun kinerja pelayanan HIV/AIDS semakin baik, hal ini dipengaruhi karena semakin efektifnya pemanfaatan Voluntary Conselling Test (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Tabel 2.120.

Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

2Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	API Malaria (%)	CNR TB (%)	SR TB (%)	HIV / AIDS	
						Kasus HIV	Kasus AIDS
2017	21,6	1,24	0,03	121	67,77	2.033	1.296
2018	8,68	1,25	0,02	143	77,13	2.654	1.879
2019	26,21	1,4	0,012	210,8	83,93	2.704	2.316
2020	16,30	1,9	0,009	118	84,5	2.749	1.549
2021	12,80	2,71	0,024	116,2	83,5	2.708	835
2022*	25,99	2,11	0,021	113,8	82,9	2.163	914

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Keterangan : *) Data Triwulan III Tahun 2022

Tantangan besar yang saat ini dihadapi bersama adalah ditemukannya jenis corona virus baru yang menjadi wabah pandemi hampir diseluruh dunia. Corona virus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19 yaitu Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Penularan Covid-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dan tidak langsung yakni percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid-19 batuk, bersin atau berbicara. Penularan kontak tidak langsung dapat terjadi melalui benda dan permukaan benda yang terkontaminasi percikan orang yang terinfeksi seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan.

Untuk mengurangi penyebaran kasus yang semakin banyak dan mengurangi kasus kematian akibat Covid-19, berbagai upaya promotif dan preventif terus dilakukan antara lain edukasi penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat dengan menjaga jarak minimal satu meter, memakai masker, mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih. Disamping itu, penanganan kuratif dan rehabilitatif terus dilakukan dengan melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment) di tempat karantina terpusat dan fasilitas kesehatan rujukan Covid-19. Beberapa upaya tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, stakeholder dan masyarakat.

Vaksin diakui dan terbukti dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kontribusi vaksin pada turunnya angka penularan penyakit tertentu sangat besar. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd imunity), dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin Covid-19, akan membantu proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat.

Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Peningkatan beban akibat penyakit tidak menular sejalan dengan meningkatnya faktor risiko yang meliputi meningkatnya tekanan darah, gula darah, indeks massa tubuh atau obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas sik, dan merokok serta alkohol. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Data menunjukkan bahwa hipertensi menjadi penyakit tidak menular yang perlu diwaspadai, dimana jumlah penderita hipertensi mengalami lonjakan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2.543.723 kasus pada tahun 2020 menjadi 3.329.052 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2022 per triwulan III jumlah penderita hipertensi mengalami penurunan

menjadi 2.014.942. Sementara itu diabetes melitus mengalami tren penurunan dari 582.559 kasus pada tahun 2020 menjadi 467.365 kasus pada tahun 2021 dan menjadi 338.686 kasus di tahun 2022 per triwulan III. Penyakit kanker juga perlu diwaspadai, dimana jumlah penderita kanker mengalami peningkatan dari 12.702 kasus di tahun 2020 menjadi 12.886 kasus di tahun 2021. Data Per Triwulan III tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan pada kasus penyakit kanker menjadi 10.310 kasus.

Tabel 2.121.

Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2022

Tahun	Jenis PTM		
	Diabetes Milletus	Hipertensi	Kanker
2017	247.793	635.545	7.554
2018	508.881	1.393.751	21.298
2019	490.444	2.073.852	13.256
2020	582.559	2.543.732	12.702
2021	467.365	3.329.052	12.886
2022			

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

3) Kesehatan Lingkungan

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program Open Defacation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga.

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 21 kabupaten/kota yang telah ODF yakni Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Magelang. Sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya belum ODF dan akan dilakukan percepatan pencapaian target seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah Bebas Buang Air Besar Sembarangan.

Perkembangan desa/kelurahan ODF di Jawa Tengah dari tahun 2019 hingga 2020 terus meningkat yaitu sebanyak 5.836 desa/kelurahan ODF di tahun 2019 menjadi 6.818 desa/kelurahan ODF di tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah desa/kelurahan ODF meningkat menjadi 7.162 desa/kelurahan dan tahun 2022 per triwulan III meningkat menjadi 7.516 desa/kelurahan.

Tabel 2.122.
Perkembangan Desa/Kelurahan ODF Di Jawa Tengah
Tahun 2017 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kelurahan/Desa ODF
1	2017	2.728
2	2018	3.668
3	2019	5.863
4	2020	6.818
5	2021	7.162
6	2022*	7.516

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Keterangan :*) Data Triwulan III tahun 2022

4) Kesehatan Usia Lanjut

Dalam rangka antisipasi pasca bonus demografi dimasa mendatang, penduduk usia lanjut (penduduk usia 60 tahun keatas) perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan agar lansia dapat tetap menjalani aktivitas fisik, menjaga kesehatan, tidak menggantungkan kepada orang lain dalam kehidupan bahkan masih bisa produktif. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah, data yang tersaji adalah periode 2017 sampai 2021. Tahun 2017 cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 50,40 persen yang kemudian meningkat menjadi 65,00 persen di tahun 2018, tahun 2019 menjadi 74,90 persen, namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 65,90 persen. Tahun 2021 Pelayanan Kesehatan Usia lanjut di Provinsi Jawa Tengah Mengalami kenaikan menjadi 70,90 persen. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan promosi kesehatan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan lanjut usia, Kerjasama dengan universitas dan Lembaga penelitian untuk pengembangan program, pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri di usia lanjut, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan lanjut usia.

Tabel 2.123.
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022 (%)

No	Tahun	Cakupan Layanan Kesehatan Lansia
1	2017	50,40
2	2018	65,00
3	2019	74,90
4	2020	65,90
5	2021	70,90
	2022	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2022

c. Sosial

Urusan sosial mempunyai peranan besar dalam memberikan pelayanan umum khususnya terkait dengan layanan pemenuhan kesejahteraan sosial. Beberapa layanan yang tersedia dan menjadi kewenangan provinsi antara lain layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS terlantar di dalam panti, layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), dan layanan SLRT/Puskessos.

(1) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam Panti

Layanan PPKS dalam Panti menghadapi beberapa tantangan antara lain kondisi sarpras panti, kapasitas dan kuantitas SDM panti serta pemenuhan layanan panti yang terbatas. Kondisi sarpras panti mengalami perkembangan yang terus memburuk secara fisik jika dilihat dari kondisi bangunan. Tercatat tahun 2022 kondisi bangunan baik sebanyak 548 unit menurun sejak tahun 2018 (578). Hal ini dikarenakan tidak adanya peningkatan/pemeliharaan sarpras secara masif tiap tahunnya. Sementara total kapasitas daya tampung panti tercatat 4.602 orang. Daya tampung ini masih jauh dari harapan jika dibanding jumlah PPKS yang mencapai 4,5 juta orang lebih.

Tabel 2.124.

Jumlah dan Kondisi Bangunan Sosial 2022

No	Tahun	Panti/Rumpel	Jumlah Unit Bangunan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	2018	54	767	578	93	70	26
2	2019	54	770	572	95	71	32
3	2020	54	789	570	105	70	44
4	2021	54	789	548	110	73	58
5	2022	54	790	548	111	73	58

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari sisi SDM Panti, beberapa kebutuhan tenaga layanan yang ada saat ini masih jauh dari kebutuhan untuk memberikan layanan di 56 panti/rumah pelayanan sosial. Beberapa pos SDM yang dibutuhkan antara lain pekerja sosial terampil dari kebutuhan 57 orang baru tersedia 35 orang, pekerja sosial ahli dari kebutuhan 426 orang baru tersedia 65, penyuluh sosial ahli dari 104 kebutuhan baru tersedia 40 orang, perawat dari 68 orang hanya tersedia 1 orang dan dokter belum ada.

Tabel 2.125.

Kondisi dan Kebutuhan SDM Panti Tahun 2022

PEKSOS TERAMPIL		PEKSOS AHLI		PENYSOS AHLI		PERAWAT		DOKTER	
Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan	Kondisi	Kebutuhan
35	57	65	426	40	104	1	68	0	0

Kondisi terbatasnya panti milik provinsi baik menyangkut kapasitas maupun SDM sehingga dalam penanganan PPKS kurang optimal, maka penting untuk mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan PPKS. Sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan rumah singgah yang berfungsi untuk melakukan penanganann PPKS yang sifatnya sementara dan melakukan assesment terhadap PPKS hasil penjarangan. Sampai dengan tahun 2022 tercatat baru 27 kabupaten/kota yang telah memiliki rumah singgah baik dibiayai APBD masing-masing maupun bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Tersisa delapan kabupaten/kota yang belum memiliki rumah singgah yaitu Cilacap, Banjarnegara, Pemalang, Wonosobo, Sukoharjo. Kab. Semarang, Kudus, dan Kota Magelang.

(1) Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)

Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) adalah upaya yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi dan melindungi hak anak. Pelaksanaan PKSAI memberikan dampak signifikan terhadap jumlah kasus yang direspon. Rujukan dan layanan yang disediakan dalam model PKSAI bertujuan untuk menghubungkan layanan perlindungan anak (seperti bantuan psikososial, pengasuhan alternatif dan bantuan hukum serta pendampingan bagi anak berkonflik dengan hukum), layanan penguatan keluarga (seperti konseling keluarga), dengan layanan perlindungan sosial dan kebutuhan dasar. Layanan PSKAI menghadapi tantangan antara lain makin terbatasnya SDM yang peduli dan memiliki pemahaman mengenai perlindungan anak, ketersediaan sarana prasarana belum layak, intervensi layanan cenderung masih bersifat sektoral/belum terintegrasi dengan layanan anak lainnya dan data kerentanan belum diintervensi secara holistik integrative. Sampai dengan tahun 2022, jumlah PKSAI yang terbentuk baru di 10 kab/kota, oleh sebab itu masih perlu didorong kepada kab/kota di Jawa Tengah untuk membentuk PKSAI sebagai bentuk penyelenggaraan layanan perlindungan dan kesejahteraan anak di daerah.

(2) Layanan Puskessos-SLRT

Puskessos-SLRT sebagai lembaga dan sistem layanan untuk membantu dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan (berupa mengidentifikasi kebutuhan, menangani aduan dan sebagai rujukan masyarakat miskin/rentan miskin) masih dihadapkan pada tantangan pada konsistensi/keaktifan layanan dikarenakan terbatasnya kapasitas SDM pengelola dan kurangnya kemitraan dengan pemangku kepentingan termasuk dunia usaha. Selain itu juga masih terbatasnya Puskessos-SLRT yang belum merata terbentuk di semua desa/kelurahan. Kondisi sampai dengan tahun 2021, Puskessos –SLRT tingkat kabupaten/kota telah terbentuk 100%, sedangkan Puskessos-SLRT tingkat desa/kelurahan baru mencapai 405 Puskessos-SLRT.

Tabel 2.126.
Pembentukan SLRT Desa/Kelurahan s/d Tahun 2021

Sumber Dana	Pembentukan Puskessos-SLRT Desa/Kelurahan
APBN	64
APBD Prov	127
APBD Kab/Kota	214
Total	405

2.5.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2021 sebesar 5,95 persen turun sebesar 0,53 poin dari kondisi TPT pada Agustus 2020 yang sebesar 6,48 persen. Bulan Agustus 2022 TPT di Jawa Tengah sebesar 5,57 persen, turun sebesar 0,38 point dibandingkan Bulan Agustus 2021. Di tingkat nasional TPT Januari 2022 lebih besar dari Jawa Tengah yaitu sebesar 5,86 persen turun sebesar 0,63 point dibandingkan dengan TPT Nasional bulan Agustus 2021.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.67.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – Agustus 2022 (%)

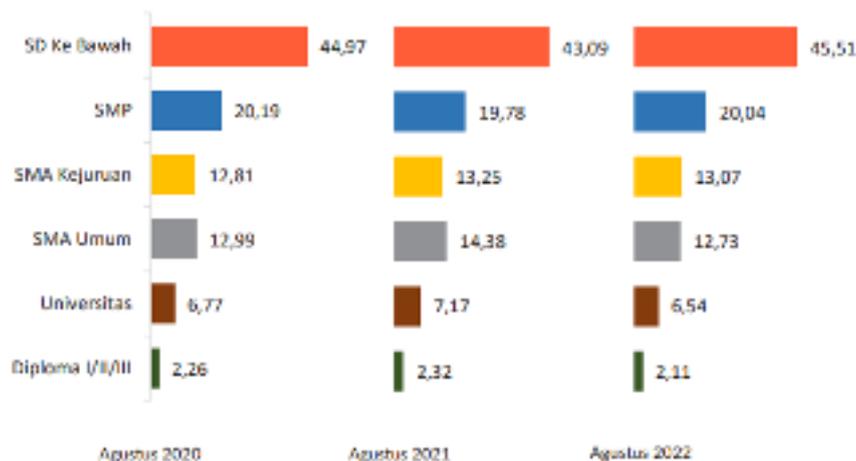
Salah satu imbas dari persoalan kependudukan dan dihadapi hampir di semua wilayah adalah pengangguran. Bahkan di negara maju pun pengangguran masih menjadi masalah serius. Tingkat pengangguran akan semakin meningkat saat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut rendah. Tingkat tenaga kerja yang tinggi tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai

menambah beban persoalan yang ada. Struktur ketenagakerjaan di Jawa Tengah tahun 2022 menurut BPS, diperlihatkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.68.
Struktur Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2022

Dari 36,74 juta jiwa penduduk Jawa tengah, 27,49 juta jiwa merupakan penduduk usia kerja dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sebesar 19,47 juta orang. Dimana sebanyak 18,39 juta orang bekerja dan 1,08 juta orang pengangguran. Meskipun jumlah bekerja lebih banyak dibandingkan pengangguran, namun secara kualitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Mengingat karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah mendasarkan tingkat pendidikan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.69.
Karakteristik Penduduk bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agustus 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2022 TPT tertinggi berasal dari lulusan SMK sebesar 8,42 persen, meskipun menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 10,00 persen. TPT untuk lulusan

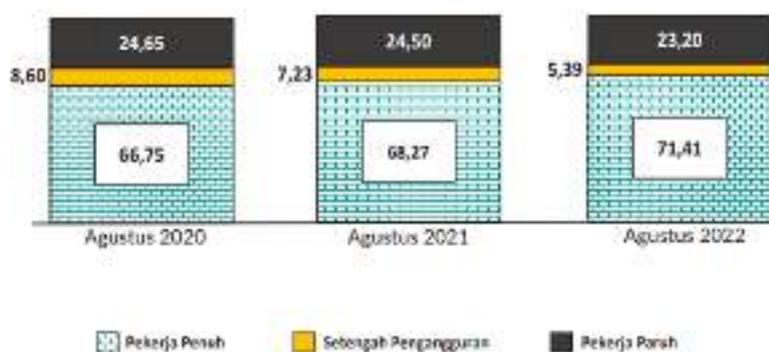
SD ke bawah justru mengalami kenaikan dari sebelumnya 3,70 persen di tahun 2021 menjadi 4,59 persen di tahun 2022. TPT terendah berasal dari lulusan Diploma yang sebesar 2,95 persen.

Tabel 2.127.

TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (%)

No.	Tahun	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	SMK	Diploma	Univ
1.	2018	2,14	4,62	6,50	10,60	3,64	5,47
2.	2019	2,09	4,64	6,26	9,92	3,59	5,44
3.	2020	3,70	6,40	8,41	13,20	6,46	7,01
4.	2021	3,70	6,87	7,32	10,00	5,66	5,62
5.	2022	4,59	5,55	7,21	8,42	2,95	4,02

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022



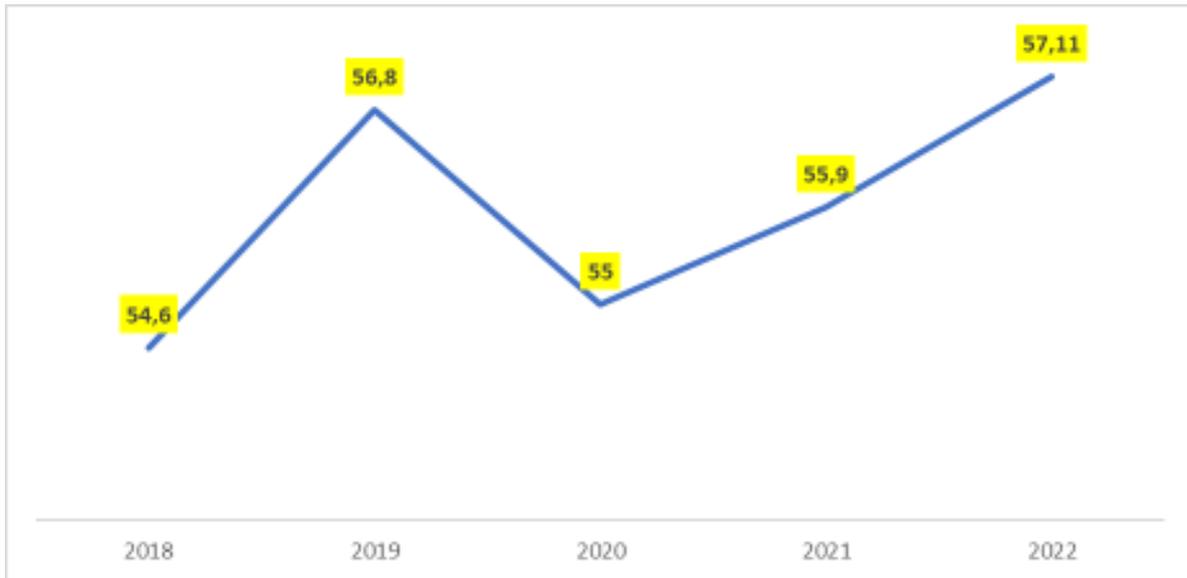
Gambar 2.70.

Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022 (%)

Pada tahun 2022 71,41 persen penduduk bekerja Jawa Tengah merupakan pekerja penuh waktu, 23,20 persen merupakan pekerja paruh waktu dan 5,39 persen merupakan setengah pengangguran. Dibandingkan dengan tahun 2021, pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan sebesar 1,84 persen poin dan 1,30 persen poin. Setengah pengangguran dan pekerja tidak penuh waktu merupakan pekerja yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan lain. Hal ini perlu menjadi perhatian karena menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah yang masih rendah.

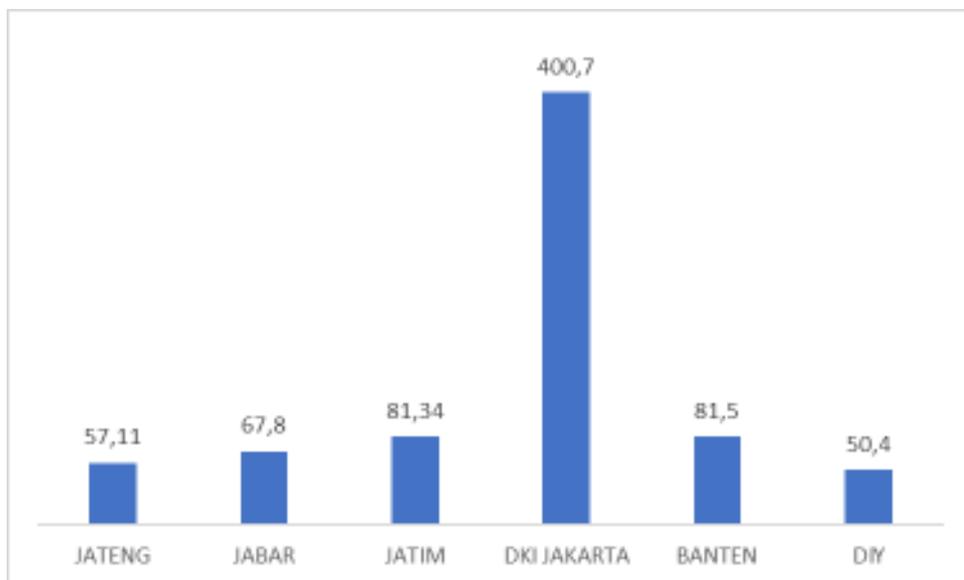
Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 57,11 juta rupiah, tertinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 54,6 juta rupiah. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain di pulau Jawa, tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah masih jauh tertinggal dibandingkan dengan

provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur, namun masih diatas provinsi DI Yogyakarta.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.71.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Tengah
Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023.

Gambar 2.72.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2022 (Juta Rupiah)

Tingkat pendidikan penduduk bekerja di Jawa Tengah pada tahun 2022 masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah sebanyak 45,51%, hanya 8,65% merupakan penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke atas). Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) menurut pendidikan (BPS, Agustus 2022) ternyata paling tinggi berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 8,42%. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mengingat filosofi adanya SMK agar para lulusan kejuruan sudah siap kerja atau bahkan sudah direkrut oleh dunia usaha atau industri sebelum lulus. Sehingga perlu dicari apa penyebab mendasar dari kondisi itu. Apakah karena ketidakseimbangan antara demand dan supply atau terjadinya asimetri antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Rasio kesempatan kerja pada tahun 2022 sebesar 66,90% naik 1,45 persen poin dibanding dengan tahun 2021 dan 1,97 persen poin dibanding dengan tahun 2020. Rasio kesempatan kerja yang naik ini menandakan bahwa peluang penduduk usia kerja yang bekerja semakin meningkat, dan menandakan juga semakin baiknya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Adanya peningkatan kesempatan kerja merupakan suatu indikator yang penting karena hal itu dapat diartikan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja pada pasar kerja dapat dipenuhi.

Tabel 2.128.

**Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1.	2018	17 245 548	26.340.000	69,21
2.	2019	17.440.000	26.610.000	69,22
3.	2020	17.540.000	27.010.000	64,93
4.	2021	17.835.770	27.253.914	65,45
5.	2022	18.390.459	27.490.000	66,90

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang selalu naik. Pada tahun 2022 TPAK sebesar 70,84% naik sebanyak 1,26 persen poin dibanding dengan TPAK tahun 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang selalu naik menandakan bahwa pasokan tenaga kerja (labour supply) di Jawa Tengah yang tersedia semakin tinggi dan mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi semakin naik. TPAK yang tinggi ini harus diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang luas juga agar tidak berdampak negatif terhadap peningkatan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah.

Tabel 2.129.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja (orang)	Angkatan Kerja*)	TPAK (%)
1.	2018	26.340.000	18.228.952	68,81
2.	2019	26.610.000	18.421.193	68,85
3.	2020	27.010.000	18.751.277	69,43
4.	2021	27.250.000	18.963.993	69,58
5.	2022	27.490.000	19.474.934	70,84

Sumber: BPS 2022 diolah dari Sakernas

Keterangan : *) data per Agustus tahun bersangkutan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2017-2019 cenderung meningkat. Namun di tahun 2020 kondisinya menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana di tahun 2019 sebesar 70,27 persen menjadi 37,07 persen di tahun 2020. Kondisi ini merupakan salah satu dampak terjadinya pandemi Covid-19 dimana perekonomian terpuruk akibat pandemi. Namun di tahun 2021 mulai kembali meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah. Untuk itu ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

Tabel 2.130.
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022 (%)

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2018	240.246	167.247	69,61
2019	300.098	210.889	70,27
2020	220.763	81.835	37,07
2021	269.810	136.611	50,63
2022	322.041	227.088	70,52

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2.131.**Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Peserta Program Jamsostek
1	2018	56.574	1.698.265
2	2019	69.866	1.781.754
3	2020	76.196	1.908.465
4	2021	83.511	2.003.518
5	2022	89.016	3.196.431

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) berfluktuasi selama tahun 2018-2022. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2022, hal ini dikarenakan penambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Selanjutnya mengalami penurunan sangat signifikan pada tahun 2021 menjadi 310.785 orang disebabkan dampak pandemi Covid-1.

Tabel 2.132.**Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang) Peserta Program Jamsostek
1	2018	1.465.847
2	2019	1.378.435
3	2020	892.866
4	2021	310.785
5	2022	1.192.763

Sumber: Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, jumlah kasus hubungan industrial sebanyak 1.927 kasus yang 100 persen terselesaikan. Tahun-tahun berikutnya jumlah kasus terus menurun sejalan dengan meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan. Sehingga di tahun 2021, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 35 kasus yang 100 persen dapat terselesaikan.

Tabel 2.133.
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2018	265	100% terselesaikan
2	2019	124	100% terselesaikan
3	2020	96	100% terselesaikan
4	2021	35	100% terselesaikan
5	2022	66	100% terselesaikan

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Not in Employment, Education or Training (NEET) adalah penduduk usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak dalam pendidikan (sekolah), dan tidak dalam pelatihan. Jumlah NEET di Jawa Tengah relatif meningkat sejak tahun 2017 dari 1.044.465 orang menjadi 1.205.564 orang pada tahun 2019, demikian pula pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.298.297 orang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.097.209 orang. Hal tersebut menandakan bahwa dalam masyarakat masih terdapat sekelompok orang yang mempunyai ketergantungan secara permanen pada orang tua dan dapat menjadi beban ekonomi keluarga.

Tabel 2.134.
Jumlah *Not in Employment, Education or Training* (NEET) di Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah NEET (orang)	Penduduk Usia Kerja Muda	Persentase
1	2018	1.171.567	5.521.380 orang	21,21
2	2019	1.205.564	5.524.810 orang	21,82
3	2020	1.298.297	5.407.899 orang	24,00
4	2021	1.097.209	5.388.228 orang	20,36
5	2022	562.474	2.751.828 orang	20,44

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022

Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disusun oleh perusahaan selama periode tahun 2018-2022 mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih kurang optimalnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Tabel 2.135.
Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
1	2018	4.857	830
2	2019	3.967	579
3	2020	4.230	614
4	2021	4.540	661
5	2022	4.641	661

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 menunjukkan perbaikan. Terdapat 19 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di bawah capaian provinsi dan nasional (peta warna hijau), terdapat 3 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di antara capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah (peta warna kuning), dan terdapat 13 Kabupaten/Kota yang capaian TPT nya di atas capaian nasional (peta warna merah)



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023. Diolah.

Gambar 2.73.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es dimana kejadian yang tampak dipermukaan (terlapor) tidak sebanding dengan kejadian sesungguhnya yang diperkirakan jauh lebih tinggi. Adanya budaya malu dan takut melapor karena bisa dianggap aib menjadi kendala di masyarakat sehingga ini perlu terus didorong untuk memberikan penyadaran dan keberanian kepada masyarakat utamanya kaum perempuan dan anak. Sampai dengan Triwulan III, 2022 tercatat rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 2,78 dengan rasio korban yaitu sebesar 3,03. Rasio korban kekerasan terhadap anak mendominasi yaitu sebesar 3,46 dibanding rasio korban terhadap perempuan yang hanya sebesar 1,88.

Tabel 2.136.

Kondisi Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Tahun	Rasio Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban Kekerasan terhadap Perempuan (per 100.000 penduduk)	Rasio Korban kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)
2018	8,2	8,44	5,93	12,76
2019	7,78	8,25	5,89	12,44
2020	8,49	8,99	5,75	12,15
2021	8,35	8,97	5,11	11,02
2022*	2,78	3,03	1,88	3,46

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id | Aplikasi Simfoni-PPA 2022

*triwulan III 2022

Sementara itu, upaya pemenuhan hak anak secara umum telah mencapai tahap yang cukup menggembirakan jika dilihat dari capaian program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), meskipun berbagai persoalan pemenuhan hak dan perlindungan anak masih menjadi tantangan untuk dipecahkan. Sampai dengan tahun 2022 secara bervariasi sesuai tingkatkan penghargaan tercatat sudah 100 persen kabupaten/kota memperoleh penghargaan KLA (kategori pratama, madya, nindya dan utama). Sehingga diharapkan ke depan program KLA tidak hanya sebatas kegiatan memperoleh penghargaan semata tetapi secara riil dapat berdampak pada pemenuhan hak anak. Kota Surakarta merupakan satu-satunya Kota di Jawa Tengah yang telah memperoleh penghargaan tertinggi kategori Utama.

Tabel 2.137.

Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak Di Jawa Tengah Tahun 2022

Pratama	Madya	Nindya	Utama
Pati, Banyumas, Purworejo, Blora, Kudus, Purbalingga, Banjarnegara,	Temanggung, Tegal, Boyolali, Demak, Pemalang, Wonogiri, Wonosobo, Kota	Rembang, Kota Semarang, Cilacap, Brebes, Sragen, Kota Tegal, Magelang	Kota Surakarta

Pratama	Madya	Nindya	Utama
Semarang, Jepara dan Kendal	Magelang, Kebumen, Batang, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Pekalongan, Grobogan, Klaten, Kota Salatiga, Pekalongan		

Sumber : Diolah

Dari sisi jenis kekerasan yang dialami perempuan dan anak, paling banyak yang dialami oleh perempuan dewasa adalah kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sementara pada anak tertinggi adalah kekerasan seksual disusul psikis dan fisik. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 hal ini menunjukkan bahwa aspek pencegahan belum sepenuhnya berhasil.

Tabel 2.138.

Jenis Kekerasan Yang Dialami Perempuan dan Anak 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022 TW III
Jenis kekerasan yang dialami korban perempuan dewasa:					
Fisik	565	604	484	539	288
psikis	409	438	297	372	226
seksual	122	146	126	145	101
penelantaran	201	203	119	135	60
trafficking	38	1	5	10	1
eksploitasi	8	2	0	7	4
lainnya	43	44	26	47	30
Total	1.386	1.438	1.057	1.255	710
Jenis kekerasan yang dialami korban anak:					
Fisik	324	293	205	204	96
psikis	306	312	296	327	159
seksual	734	700	789	807	388
penelantaran	91	85	58	66	39

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022 TW III
trafficking	48	8	8	16	1
eksploitasi	5	9	15	9	11
lainnya	85	51	56	72	40
Total	1.593	1.458	1.427	1.501	734

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id | AplikasiSimfoni-PPA 2022

Isu lain terkait anak adalah mengenai perkawinan anak, data per semester I tahun 2022 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Jawa Tengah sebanyak 5.085 kasus, tertinggi berada di Kabupaten Grobogan (390 kasus) dan terendah di Kota Salatiga (11 kasus). Data sementara di tahun 2022 tersebut menurun dibanding tahun 2021 yang sebesar 13.595 kasus. Perkawinan anak dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, khususnya pada anak perempuan jika segera diikuti dengan kehamilan. Selain melahirkan, norma yang masih banyak berlaku di masyarakat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada istri untuk mengasuh anak dan mengelola rumah tangga. Di sisi lain, norma sosial mengenai peran laki-laki dalam keluarga dapat menyebabkan suami yang masih berusia muda rentan mengalami tekanan mental jika tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya. Tekanan ini dapat memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan perceraian.

Tabel 2.139.

**Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2022**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2017	1.633	1.141	2.774
2018	1.942	1.264	3.206
2019	1.513	3.726	5.239
2020	1.671	11.301	12.972
2021	1.909	11.686	13.595
2022*)	861	4.224	5.085

Sumber: DP3AP2KB dan Kemenag, 2022

Keterangan: *) Data semester I tahun 2022

c. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pembangunan kependudukan ke depan dihadapkan pada tantangan mengimplementasikan sinergitas pembangunan kependudukan lima pilar yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas, serta penataan data dan informasi kependudukan termasuk

administrasi kependudukan. Implementasi ini kian sulit terwujud manakala capaian kab/kota yang seharusnya telah menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) masih belum 100% di Jawa Tengah. Rakapitulasi data Kab/Kota di Jawa Tengah yang telah menyusun GDPK sampai dengan tahun 2022 baru tercatat 14 Kab/kota yaitu Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Blora, Kabupaten Brebes.

Sementara itu, upaya menggalakkan kembali program keluarga berencana perlu untuk terus dilakukan mengingat mengingat program KB beberapa tahun terakhir mengalami tren yang terus menurun. Hal ini terindikasi dari capaian indikator Contraceptive Prevalence Rate (CPR) yang mengalami tren penurunan, tercatat terus tahun 2018 sebesar 74,69% menjadi 70,35% di tahun 2021. Meski demikian, angka kelahiran total (Total Fertility Rate) justru mengalami tren yang sama yaitu turun dari 2,4 menjadi 2,09. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penurunan kelahiran bukan disebabkan karena faktor KB tetapi faktor lain misalnya tingkat kesuburan, kondisi kesehatan/ penyakit atau belum adanya keinginan untuk mempunyai anak. Disisi lain unmetneed justru mengalami tren yang terus meningkat yaitu dari 13,59 di tahun 2018 menjadi 14,29 di tahun 2021. Meningkatnya Unmetneed memberikan sinyal yang perlu diwaspadai di Jawa Tengah akan terjadinya ledakan penduduk dimasa depan jika tren indicator ini tidak terkontrol atau mendorong mereka ber-KB. Sementara itu, TFR yang kian menurun juga perlu diwaspadai karena kelahiran yang rendah akan makin mempersempit pasokan generasi penerus (generasi muda) dan makin meningkatnya proporsi penduduk usia tua.

Tabel 2.140.

Perkembangan CPR, TFR dan Unmetneed 2018-2021

Tahun	CPR	TFR	Unmet Need
2018	74,69	2,4	13,59
2019	73,48	2,23	13,03
2020	73,26	2,27	12,90
2021	70,35	2,09	14,29

Sumber: BKKBN dan DP3AP2KB Prov.Jateng, 2022

Tri bina memiliki peranan penting dalam pembangunan keluarga. Melalui tri bina (Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR dan Bina Keluarga Lansia/BKL) diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orang tua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita, remaja dan mempersiapkan kelak di masa lansia agar tetap memiliki produktifitas. Data perkembangan BKB, BKR dan BKL menunjukkan tren yang menurun baik jumlahnya maupun keaktifannya, ini menjadi tantangan ke depan untuk bagaimana meningkatkan Tri Bina ini lebih berkembang dan berkualitas.

Tabel 2.141.
Perkembangan Tri Bina 2018-2022

Tahun	BKB			BKR			BKL Jateng		
	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%
2018	12.717	12.204	95,97	6.418	6.236	97,16	8.673	8.273	95,39
2019	19.465	11.473	58,94	10.268	6.145	59,85	13.496	7.948	58,89
2020	11.071	10.533	95,14	5.947	5.921	99,56	7.763	7.696	99,14
2021	10.473	10.338	98,71	5.860	5.794	98,87	7.804	7.724	98,97
2022	9.184	9.049	98,53	5.490	5.311	96,74	7.180	7.010	97,63

Sumber : Diolah

d. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, setiap harinya terdapat penambahan penduduk wajib KTP. Peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP dan mendekatkan layanan terus didorong dalam rangka mewujudkan target semua penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk. Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran Kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2019 meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,16 persen. Tingkat kepemilikan akte kelahiran kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 99,01 persen. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (three in one), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, sms gateway, dan layanan online. Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

e. Kepemudaan dan olahraga

Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai kekuatan utama berupa daya pikir revolusioner, kreatif, agresif, inovatif, dan produktif sehingga mampu memunculkan ide-ide konstruktif dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa. Pemuda merupakan kekuatan moral, control social, dana gen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang dimaksud dengan pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 16-30 Tahun. Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2021, jumlah pemuda di Jawa Tengah mencapai 7,77 juta jiwa atau sebanyak 22,30% dari total penduduk Jawa Tengah.

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Permasalahan terkait pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian serius. Pengangguran dapat menjadi sumber utama kemiskinan, mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Jawa Tengah merupakan persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan dan tidak sedang mempunyai pekerjaan. TPT Pemuda Jawa Tengah tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif. TPT pemuda Jawa Tengah pada Tahun 2021 sebesar 14,83 %, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2019 sebesar 11,87%.

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari banyaknya jumlah pemuda yang bekerja. Salah satu indikator kemandirian pemuda dapat dilihat dari persentase Pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha. Dengan adanya kewirausahaan pemuda diharapkan mampu menciptakan lapangan usaha sendiri, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesempatan bekerja. Tingginya jumlah pemuda yang berstatus sebagai buruh/karyawan menggambarkan masih rendahnya kewirausahaan di kalangan Pemuda Jawa Tengah. Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Di sisi lain persentase pemuda yang berusaha sendiri mengalami peningkatan dari Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pemuda yang berusaha sendiri/berwirausaha, dan masih tingginya pemuda yang bekerja sebagai buruh/karyawan.

Perkembangan Kepemudaan di Jawa Tengah tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.142.

Perkembangan Kepemudaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Jumlah Pemuda di Jawa Tengah (Juta Jiwa)	7,84	7,79	7,75	7,77	Na

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda	12,33	11,87	14,83	13,23	Na
Persentase pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan	55,36	60,91	54,18	58,21	Na
Persentase pemuda yang berusaha sendiri	12,05	12,31	11,83	12,05	Na

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2022 *) Keterangan : Data 2021 belum dirilis

Perkembangan prestasi olahraga di Jawa Tengah salah satunya dapat diukur dari peringkat kejuaraan tingkat nasional melalui Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) bagi atlet penyandang disabilitas. Pelaksanaan kejuaraan PON dan PEPARNAS dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Perkembangan prestasi atlet Jawa Tengah pada perhelatan PON mengalami fluktuatif dari Tahun 2012-2021 yaitu menduduki peringkat 4 pada Tahun 2012, meningkat keperingkat 2 pada Tahun 2016, namun mengalami penurunan cukup drastis pada Tahun 2021 pada peringkat 6 nasional. Sedangkan prestasi olahraga Jawa Tengah pada kejuaraan PEPARNAS terus mengalami penurunan dari 3 kali penyelenggaraan. Perkembangan prestasi olahraga Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.143.
Perkembangan Prestasi Olahraga Jawa Tengah
pada Kejuaraan Tingkat Nasional

Kejuaraan	Peringkat		
	Tahun 2012	Tahun 2016	Tahun 2021
Pekan Olahraga Nasional (PON)	4	2	6
Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS)	1	2	3

Sumber: DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah, 2022

f. Perpustakaan

Literasi merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan rangkaian pembelajaran yang memungkinkan individu untuk dapat mencapai tujuan mereka, mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, serta berpartisipasi penuh dalam masyarakat luas. Peradaban yang berliterasi selalu ditandai dengan kepedulian yang tinggi terhadap perpustakaan. Perpustakaan selalu menjadi transportasi literasi ketika suatu peradaban mencapai puncak keemasan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang peradaban manusia tidak dapat lepas dari perpustakaan. Oleh karenanya, perpustakaan memegang peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berikut merupakan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah.

Tabel 2.144.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah
Tahun 2019 – 2022

Unsur Pembentuk Literasi Masyarakat (UPLM)	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1)	0,00140	0,00080	0,00066	0,0033
Ketercukupan Koleksi (UPLM 2)	0,05210	0,06760	0,04780	1,5831
Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3)	0,00000	0,00000	0,00003	0,0045
Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari (UPLM 4)	0,00020	0,00050	0,00057	0,3342
Perpustakaan ber-SNP (UPLM 5)	0,00000	0,00000	0,00006	2,3270
Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM 6)	0,03270	0,03380	0,03249	0,2727
Anggota Perpustakaan (UPLM 7)	0,03040	0,03260	0,03160	0,6471
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	11,68	13,54	11,33	15,62

Sumber: Perpunas 2019 - 2022



Sumber: Perpunas, 2020

Gambar 2.74.

Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 13,54 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 11,33. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena literasi masyarakat merupakan salah satu pembentuk karakter sumber daya manusia.

Tabel 2.145.

Koleksi Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Koleksi	2018		2019		2020		2021		2022	
		Judul	Eks								
1	Koleksi Perpustakaan Provinsi dan Keliling	1.028.856	1.805.519	1.053.825	1.906.840	1.061.697	1.920.846	1.111.585	1.914.474	1.190.688	2.092.799
2	Koleksi e-book	20.672	12.6913	50.085	235.236	75.998	452.112	68.802	516.436	79.949	527.485
3	Koleksi Khusus untuk pemustaka berkebutuhan khusus	3.545	6.697	8.462	16.096	9.165	17.618	10.756	19.665	4.480	6.525
TOTAL		1.053.073	1.939.129	1.112.372	2.158.172	1.146.860	2.390.576	1.184.867	2.437.435	1.275.117	2.626.809

Sumber: Dinas Kersipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Koleksi pada 36 Perpustakaan Umum Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan perpustakaan keliling (perpusling) pada tahun 2018 sebanyak 1.028.856 judul, kemudian perlahan meningkat menjadi 1.190.688 tahun 2022. Sedangkan untuk koleksi e-book pada tahun 2018 semula sejumlah 20.672 judul menjadi 79.949 judul pada tahun 2022.

Sedangkan untuk pengunjung pada 36 Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2020-2021 mengalami tren penurunan. Kondisi

ini antara lain disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 dimana diterapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kunjungan perpustakaan mulai 2020 jumlahnya menurun.

Tabel 2.146.
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Orang)

NO	Tahun	Pengunjung
1	2018	5.611.358
2	2019	5.871.814
3	2020	3.160.335
4	2021	3.131.755
5	2022	4.891.435

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Menurut survei yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2021 meningkatnya koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ternyata belum berbanding lurus dengan persentase koleksi yang dipinjam per tahun yang hanya berada di kisaran 13,5 persen, hal ini menunjukkan bahwa koleksi bahan Pustaka baik fisik maupun digital yang ada belum secara optimal dimanfaatkan oleh pemustaka. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penilaian kegemaran membaca masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 61,88 atau termasuk kategori sedang. Menunjukkan bahwa minat membaca masyarakat Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan.



Sumber: Perpustakaan Nasional, 2020

Gambar 2.75.
Capaian Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat (NTGM) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020

g. Transmigrasi

Upaya sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui kerjasama dengan daerah transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi lahan transmigrasi yang ideal yaitu 2C (*clean and clear*) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan) bagi calon transmigran. Upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama dengan 22 provinsi lokasi transmigrasi diluar Jawa yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Utara, Aceh, dan Bangka Belitung. Kerjasama tersebut direalisasikan dengan penyusunan *MoU* antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 22 Provinsi tersebut.

Selama tahun 2016 – 2021, persentase penempatan transmigran Jawa Tengah cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 13,26 persen menurun menjadi 10,23 persen di tahun 2019, dan sempat terjadi kekosongan penempatan transmigran di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 dan di tahun 2021 menjadi sebesar 0,79 persen. Apabila dilihat dari animo masyarakat terhadap transmigrasi cukup baik namun terkendala kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga realisasi penempatannya tidak cukup besar setiap tahunnya.

Tabel 2.147.

Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Animo (KK)	Kuota Pusat (KK)	Jumlah Penempatan (KK)	Persentase
1	2018	2.246	170	169	7,52
2	2019	2.160	257	221	10,23
3	2020	1.263	0	0	0
4	2021	1.263	10	10	0,79
5	2022				
Jumlah					

Sumber: *Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2022*

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatranspenca) Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Latihan Pertanian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara. Di tahun 2021, Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Banjarnegara tidak lagi melatih calon transmigran. Namun demikian para calon transmigran dari

Provinsi Jawa Tengah tetap mengikuti pelatihan di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPLM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.6. Aspek Daya Dukung, Daya Tampung Dan Penanggulangan Bencana

2.6.1 Daya Dukung dan Daya Tampung

Keberadaan sumberdaya alam di bumi tidak tersebar merata sehingga daya dukung lingkungan pada setiap daerah akan berbeda-beda. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dijaga agar terus berkesinambungan dan tindakan eksploitasi harus dihindari. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus memperhatikan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah menentukan keadaan surplus atau defisit dari lahan dan air untuk mendukung kegiatan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan dokumen Daya Dukung dan daya Tampung Provinsi Jawa Tengah, Indeks Jasa Penyedia Air, Jasa Penyedia Pangan, Jasa Pengaturan Air, Jasa Pengaturan Iklim, Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Perlindungan Bencana masih dalam rentang sedang. Akan tetapi status daya dukung dan daya tampung air dan pangan telah terlampaui.

Tabel 2.148.

Profil Daya Dukung dan Daya Tampung Air Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Populasi Penduduk	Ketersediaan Air (Juta M3/Tahun)	Populasi Penduduk Per Grid	Kebutuhan Air Domestik (Juta M3/Tahun)	Kebutuhan Air Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan (Juta M3/Tahun)	Kebutuhan Total (Juta M3/Tahun)	Ambang Batas Penduduk Sistem Per Grid	Status
36.516.035,00	31.568,92	36.516.035,00	3.154,99	29.537,15	32.692,14	39.460.942,00	Terlampaui

Sumber: Dokumen D3TLH Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan hasil pemetaan di Provinsi Jawa Tengah, Daya Dukung dan Daya Tampung Air ditinjau dari ketersediaan air yang ada yaitu sebesar 31.568,92 juta m³/tahun dan Kebutuhan total akan air yaitu sebesar 32.692,14 m³/tahun, jika dibandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tersebut maka didapatkan selisih sebesar 1.123,23 juta m³ /tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Jawa Tengah sudah terlampaui.

Pada Keputusan Menteri LHK No. SK. 297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional ditetapkan bahwa kondisi

daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Jawa Tengah telah terlampaui dimana ketersediaan air sebesar 30.913.591.105 m³ (30.913,59 juta m³/tahun) dan kebutuhan air sebesar 31.765.737.732 m³ (31.765,74 juta m³/tahun).



Sumber: Dokumen D3TLH Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.76.

Perbandingan Jumlah Populasi dan Ambang Batas Penduduk dalam D3T Air Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan grafik diatas wilayah Kota di Jawa Tengah cenderung melampaui ambang batas penduduk yang dapat didukung, hal ini disebabkan kondisi wilayah terkait jasa lingkungan hidup penyedia air tidak terlalu baik, tetapi disisi lain wilayah tersebut memiliki jumlah populasi yang banyak. Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan ketersediaan dan kebutuhan air. Hal ini disebabkan perubahan penutupan lahan di Jawa Tengah di ikuti dengan peningkatan jumlah populasi.

Tabel 2.149.

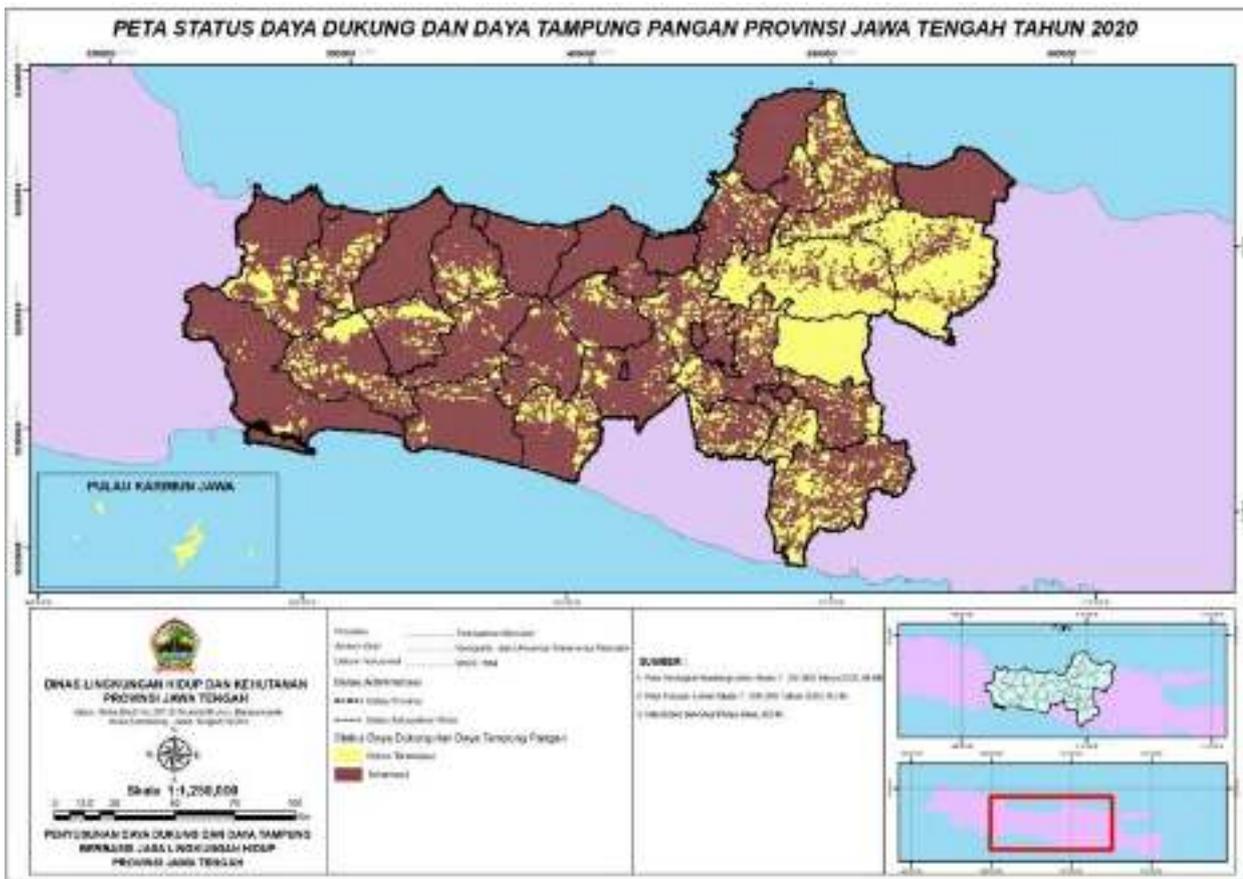
Profil Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Provinsi Jawa Tengah

JUMLAH POPULASI PENDUDUK	Ketersediaan Pangan (Kkal/Thn)	POPULASI PENDUDUK PER GRID	Kebutuhan Total (Kkal/Thn)	AMBANG BATAS PENDUDUK SISTEM PER GRID	STATUS
36.516.035	19.462.549.359.649,10	36.516.035	26.656.768.330.000,00	26.659.780,00	-9.856.341,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Berdasarkan hasil pemetaan di Provinsi Jawa Tengah, Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan ditinjau dari ketersediaan pangan yang ada yaitu sebesar 19.462.549.359.649,10 Kkal/Tahun dan Kebutuhan total akan pangan yaitu

sebesar 26.656.768.330.000,00 Kkal/Tahun, didapatkan hasil nilai status kebutuhan pangan sebesar - 9.856.341,00 KKal/Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Provinsi Jawa Tengah telah melebihi ambang batas kebutuhan pangan. Untuk ambang batas penduduk yang dapat didukung pada tahun 2020 yaitu sebesar 26.659.780 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 36.742.501. Artinya, jumlah penduduk tahun 2021 telah terlampaui dari ambang batas pangan. Di bawah ini merupakan peta status D3T Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, dengan keterangan wilayah yang berwarna coklat artinya telah terlampaui daya D3T pangannya dan wilayah berwarna kuning berarti belum terlampaui.

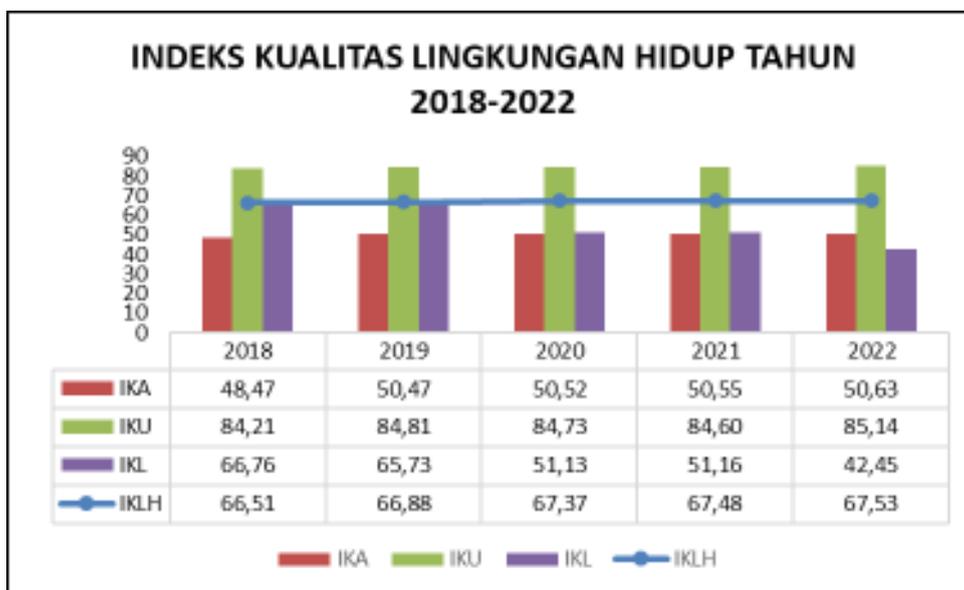


Sumber: Dokumen D3TLH Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.77.

Peta Status Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Provinsi Jawa Tengah

Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah secara umum menunjukkan peningkatan. Upaya perbaikan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menggambarkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan yang telah mengalami perbaikan.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Gambar 2.78.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Perkembangan capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 menunjukkan hasil cukup baik, dengan nilai capaian IKLH tahun 2018 sebesar 66,51 dan tahun 2022 sebesar 67,53 atau terjadi peningkatan sebesar 1,02 poin atau 1,53%. Hal ini mengindikasikan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah merupakan salah satu prioritas utama pembangunan.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Gambar 2.79.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 - 2022

Nilai IKLH Nasional untuk tahun 2022 adalah 72,42 lebih tinggi dari nilai IKLH Jawa Tengah sebesar 67,53. Meningkatnya IKLH Nasional 2021 sebanyak 1,18 poin disebabkan adanya perbaikan IKU dan IKA Nasional. Nilai IKLH Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018-2022. Jika dibandingkan dengan capaian IKLH Nasional, capaian IKLH Jawa Tengah pada Tahun 2018-2019 berada di atas capaian IKLH Nasional. Sedangkan tahun 2020-2021 capaian Jateng berada di bawah nasional.

Nilai IKLH dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diketahui bahwa perhitungan nilai IKLH Provinsi mengalami perubahan nilai pembobotan dan penambahan indikator Indeks kualitas air laut (IKAL) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKLH Provinsi} = (0,34 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$$

Perubahan metode perhitungan nilai IKLH berimplikasi terhadap perubahan nilai IKLH secara total, namun demikian tidak menurunkan target capaian akhir RPJMD Provinsi Jawa Tengah (2018-2023). Dalam rangka mendorong dan memperkuat pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon terutama aspek IKLH, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan target IKLH 2024 sebesar 67,55 (Kategori Sedang) dengan rincian nilai IKU = 85,01; Nilai IKA = 50,66; dan nilai IKL = 42,45, dengan menggunakan baseline data tahun 2022 didasarkan pada :

1. Perhitungan IKU menggunakan hasil pemantauan dari 2 stasiun AQMS Kota Surakarta dan Kota Semarang (semula hanya menggunakan hasil pemantauan 1 stasiun AQMS di Kota Semarang), sehingga ada penyesuaian terhadap baseline nilai IKU di tahun 2022 sebesar 84,96 dan indeks SO₂ dan NO₂ sebesar 0,3707.
2. Penambahan data titik sampel pemantauan kualitas air dari Kabupaten/ Kota sehingga menyebabkan penyesuaian terhadap baseline nilai indeks pencemar air di tahun 2022 sebesar 3,38. Namun perubahan angka tersebut tidak menyebabkan perubahan terhadap nilai IKA karena di dalam metode perhitungan IKA, nilai indeks pencemar air tersebut masih berada pada status mutu yang sama yaitu cemar ringan, sehingga dalam pembobotan nilai indeks dengan persentase status mutu masih sama.

Penetapan target IKLH Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024-2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Peningkatan jumlah kejadian bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan;
2. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Berdasarkan SK Menlhk 297/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung air Nasional, terindikasi bahwa sejak tahun 2019 Jawa Tengah daya dukung air telah terlampaui sehingga perlu lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya air.

4. Kebijakan Nasional dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan iklim investasi di Jawa Tengah.

a. Perubahan Iklim

Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dan ekonomi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perubahan iklim secara global. Perubahan iklim berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti adanya bencana hidrometeorologi, perubahan musim dan kenaikan muka air laut. Penanganan dampak dari perubahan iklim dapat dilakukan melalui aksi mitigasi maupun aksi adaptasi guna meningkatkan resiliensi atau ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah menunjukkan 1 kota (Kota Magelang) berada pada kategori kerentanan sangat rendah (skor indeks 1), 2 kabupaten/kota (Kabupaten Wonosobo dan Kota Pekalongan) dalam kategori kerentanan rendah (skor indeks 2), dan 32 kabupaten/kota berada dalam kategori kerentanan sedang (skor indeks 3). Jika dilihat dari kondisi geografis maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan peningkatan banjir dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadi peningkatan banjir, dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor rentan terhadap bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman terjangan gelombang laut terhadap aktivitas nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir.



Sumber: diolah dari SIDIK KLHK, 2023

Gambar 2.80.

Persebaran Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Tahun 2021

Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah sebesar 145.961,97 GgCO₂e dengan kontributor utama penyumbang emisi GRK Provinsi Jawa Tengah adalah sektor energi mencapai 70.260,22 GgCO₂e (48,14 persen). Untuk penyumbang emisi kedua adalah sektor limbah dengan kontribusi sebesar 53.160,83 GgCO₂e (36,42 persen) yang dikontribusikan dari pengelolaan sampah

dan limbah cair. Ada kenaikan yang signifikan pada sektor limbah karena adanya penambahan data dari kabupaten/kota untuk limbah industri yang sebelumnya belum terdata. Selain menghasilkan emisi GRK, Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi dalam menyimpan cadangan karbon terutama berasal dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang mampu menyerap emisi sebesar 2.861,16 GgCO₂e (1,96 persen).

Tabel 2.150.
Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2021

No	Sektor	Emisi (Gg CO ₂ eq)	Persentase (%)
1	Energi	70.260,22	48,14
2	Pertanian	21.467,71	14,71
3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	3.934,38	2,70
4	Limbah	53.160,83	36,42
5	Kehutanan dan Penggunaan Lahan	-2.861,16	-1,96
	Total Emisi GRK	145.961,97	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

*Keterangan: Perhitungan besaran emisi GRK tahun 2021, merupakan data tahun 2020 yang dihitung tahun 2021.

Apabila dilihat dari tren pertumbuhan emisi GRK Provinsi Jawa Tengah terjadi peningkatan emisi dari tahun ke tahun, terutama dari sektor energi. Hal ini dikarenakan Jawa Tengah menjadi lokasi beberapa sumber pembangkit untuk wilayah Jawa dan Bali. Untuk itu kebijakan terkait pembangunan rendah karbon perlu menjadi prioritas di Jawa Tengah.



Sumber: SIGNSMART KLHK, 2022

Gambar 2.81.
Tren Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020

Salah satu upaya dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim adalah Pembangunan Rendah Karbon. Pembangunan Rendah Karbon merupakan platform pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalisasi eksploitasi sumber daya alam. Strategi dan kebijakan di dalam Pembangunan Rendah Karbon merupakan aksi mitigasi yang melibatkan multi sektor dan multi pihak. Aksi-aksi mitigasi Pembangunan Rendah Karbon yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota dilaporkan ke dalam aplikasi AKSARA Bappenas.

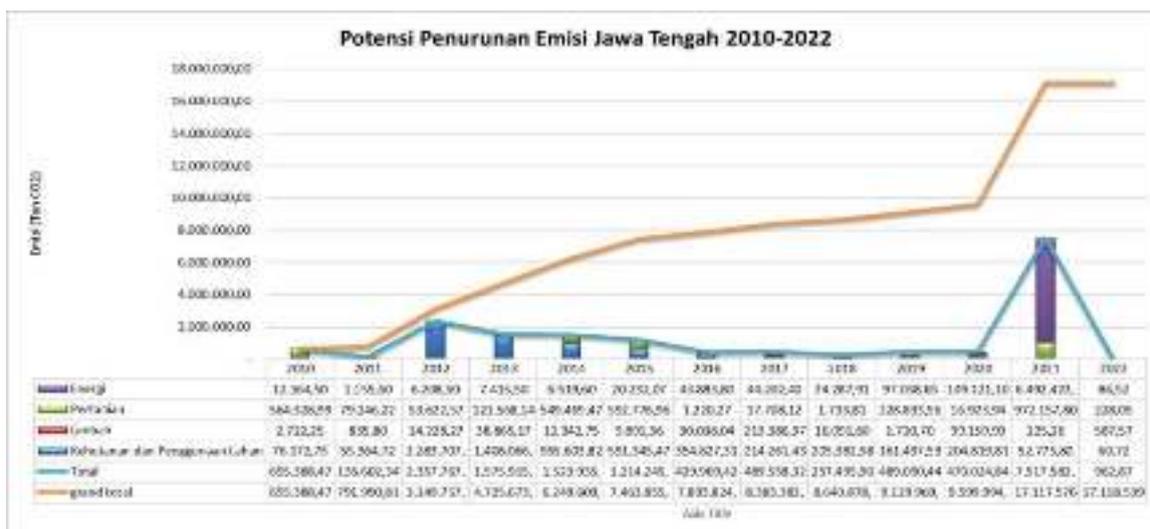
Berdasarkan pelaporan yang dilakukan pada aplikasi AKSARA BAPPENAS, potensi penurunan emisi GRK Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2010-2022 adalah sebesar 17,118 juta ton CO₂eq. Sedangkan potensi penurunan emisi untuk tahun 2021 saja adalah sebesar 7,517 juta ton CO₂eq dengan kontributor utama potensi penurunan emisi GRK dari sektor Energi yang mencapai 6,492 juta ton CO₂e. Peningkatan Aksi-aksi mitigasi pada sektor Energi berasal dari sektor transportasi yang merupakan dukungan kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.151.

Aksi Penurunan Emisi GRK untuk Setiap Sektor pada Tahun 2021

No	Sektor	Emisi (Ton CO ₂ eq)
1	Energi	6.492.423,75
2	Pertanian	972.157,80
3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	-
4	Pengelolaan Limbah	225,26
5	Kehutanan dan Penggunaan Lahan	52.775,80
	Total Emisi GRK	7.517.582,61

Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (<https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>), 2023 (data masuk sampai dengan 20 januari 2023)



Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (<https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>), 2023 (data masuk sampai dengan 20 januari 2023)

Gambar 2.82.

Aksi Penurunan Emisi GRK Setiap Sektor di P rovinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2021

Jawa Tengah tercatat memiliki 4.532 aksi penurunan emisi GRK (total kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan dari tahun 2010-2022). Penurunan emisi GRK ini merupakan data agregasi kabupaten/kota dan PD provinsi. Data rincian kontribusi kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152.

Besaran Penurunan Emisi GRK Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2019–2022

No	Kabupaten/ Kota	Potensi penurunan Emisi (Ton CO ₂ Eq)				
		2019	2020	2021	2022	Grand Total
1	Banjarnegara	334,03	-	-	-	334,03
2	Banyumas	-	4.812,39	-	-	4.812,39
3	Batang	Belum melaporkan aksi mitigasi				
4	Blora	-	2,93	-	-	2,93
5	Boyolali	-	63,73	-	-	63,73
6	Brebes	-	-	-	46,62	46,62
7	Cilacap	-	253,35	-	-	253,35
8	Demak	-	18,40	2,41	0,82	21,63
9	Grobogan	33,48	292,50	-	10,06	336,04
10	Jepara	62,55	3.394,83	1.279,90	765,07	5.502,35
11	Karanganyar	139,07	385,31	961.150,45	-	961.674,84
12	Kebumen	-	18,76	135,63	-	154,39
13	Kendal	136,27	17,68	-	-	153,95
14	Klaten	430,84	5.653,31	5.255,11	-	11.339,26
15	Kudus	39,45	86.342,53	10,58	-	86.392,55
16	Magelang	195,00	180,65	-	-	375,65
17	Pati	165,94	2.050,44	-	-	2.216,38
18	Pekalongan	-	1,85	-	-	1,85
19	Pemalang	2.947,22	3.620,00	57,03	-	6.624,25
20	Purbalingga	36,79	-	-	-	36,79
21	Purworejo	Belum melaporkan aksi mitigasi				
22	Rembang	668,87	27,97	12,12	3,12	712,08
23	Semarang	113,11	1.067,18	1.182,76	-	2.363,04
24	Sragen	-	38,29	-	-	38,29
25	Sukoharjo	46,31	48,83	-	-	95,14
26	Tegal	-	6.028,02	-	-	6.028,02
27	Temanggung	160,26	88,10	18,25	-	266,61
28	Wonogiri	11,99	6.606,37	-	-	6.618,36
29	Wonosobo	111,05	0,86	-	-	111,91
30	Kota Magelang	87,56	96,37	7,73	-	191,66
31	Kota Salatiga	6.177,55	41.371,32	90,93	60,72	47.700,53

No	Kabupaten/ Kota	Potensi penurunan Emisi (Ton CO ₂ Eq)				
		2019	2020	2021	2022	Grand Total
32	Kota Semarang	809,81	728,07	-	-	1.537,88
33	Kota Surakarta	-	0,15	17,58	-	17,74
34	Kota Tegal	12.707,17	163.210,21	969.220,47	886,41	1.146.024,26
35	Kota Pekalongan	Belum melaporkan aksi mitigasi				
TOTAL		25.414,34	326.420,42	1.938.440,94	1.772,81	2.292.048,51

Sumber: Aplikasi AKSARA BAPPENAS, (<https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>), 2023 (data masuk sampai dengan 20 Januari 2023)

Selain aksi-aksi mitigasi pembangunan rendah karbon, upaya lain dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim adalah melalui aksi adaptasi perubahan iklim. Aksi adaptasi ini dibagi menjadi empat sektor yaitu sektor air, pesisir dan kelautan, pertanian, dan kesehatan. Peningkatan ketahanan iklim ditujukan melalui kegiatan-kegiatan untuk menurunkan tingkat kerentanan dan meningkatkan kapasitas ketahanan iklim, sehingga mampu bertahan terhadap dampak dari perubahan iklim, yang dilaksanakan pada lokasi intervensi aksi ketahanan iklim. Lokasi intervensi aksi ketahanan iklim adalah lokasi terdampak perubahan iklim yang dikategorikan dalam 3 tingkatan prioritas yaitu super prioritas, top prioritas, dan prioritas berdasarkan tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana yang berpotensi terjadi.

Pada sektor air aksi adaptasi berupa pembangunan infrastruktur untuk penyediaan sumber air dan pengendalian banjir seperti pembangunan embung, pembangunan pelindung tepian atau tebing sungai (dari beton maupun vegetasi), dan pengerukan waduk, danau, sungai, dan saluran air. Untuk sektor kelautan dan pesisir aksi adaptasi berupa penyediaan bangunan/vegetasi pelindung pantai, pengembangan sentra pengelolaan produksi perikanan tangkap laut, dan penguatan regulasi pengelolaan ruang laut. Sementara itu aksi adaptasi pada sektor pertanian berupa rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, peningkatan kapasitas masyarakat terkait climate smart agriculture, dan pengembangan varietas tanaman unggul yang tahan cekaman iklim dan organisme pengganggu tanaman (OPT). Dan pada sektor kesehatan, upaya adaptasi yang dilakukan berupa penambahan fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait pencegahan KLB penyakit.

Berdasarkan hasil kajian dari Bappenas dalam buku PBI (Pembangunan Berketahanan Iklim) disebutkan bahwa lokasi prioritas ketahanan iklim untuk empat sektor yang berada di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.153.**Lokasi Prioritas Ketahanan Iklim di Provinsi Jawa Tengah**

Sektor	Super Prioritas	Top Prioritas	Prioritas	Keterangan
Kelautan dan Pesisir				
Sub Sektor Kelautan	Batang Pati Pemalang Rembang	Brebes Jepara Pekalongan Purworejo Tegal Wonogiri Kota Pekalongan	Cilacap Demak Kebumen Kendal Kota Semarang Kota Tegal	-
Sub Sektor Pesisir		Batang Brebes Jepara Pekalongan Pemalang Purworejo Tegal Kota Pekalongan	Cilacap Demak Kebumen Kendal Kota Semarang Kota Tegal	Dari hasil analisis, didapatkan hasil bahwa sebagian besar kawasan pesisir di provinsi Jawa Tengah didominasi pada tingkat kerentanan tinggi. Untuk provinsi Jawa Tengah, tingkat kerentanan tinggi didominasi oleh faktor erosi pantai, Significant Wave Height, geomorfologi, kemiringan, dan Sea Level Rise (SLR).
Air	Banjarnegara Boyolali Grobogan Pati Purbalingga Purworejo Wonogiri Kota Pekalongan	Banyumas Batang Blora Brebes Demak Jepara Karanganyar Kebumen Kendal Klaten Kudus Magelang Pekalongan Pemalang Rembang Semarang Sragen Sukoharjo Tegal Kota Magelang Kota Salatiga Kota Semarang Kota Surakarta Kota Tegal	Cilacap Temanggung Wonosobo	Secara umum, kondisi ketersediaan air di Provinsi Jawa Tengah cenderung berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara supply dengan demand air di wilayah Jawa Tengah. Dari hasil analisis diperoleh bahwa hampir seluruh WS di provinsi Jawa Tengah berada pada tingkat kekritisitas langka absolut kecuali WS Bodri-Kuto (diproyeksikan sampai dengan tahun 2045). Tentunya, hal ini menjadi catatan tersendiri untuk stakeholder terkait untuk merumuskan langkah mitigasi guna menghadapi kelangkaan air.
Pertanian	Blora Boyolali Brebes	Banjarnegara Banyumas Batang	Kendal Semarang Wonosobo	

Sektor	Super Prioritas	Top Prioritas	Prioritas	Keterangan
	Grobogan Pati Pekalongan Pemalang Purworejo Rembang Tegal Wonogiri	Cilacap Demak Jepara Karanganyar Kebumen Klaten Kudus Magelang Purbalingga Sragen Sukoharjo Temanggung	Kota Semarang	
Kesehatan	-	Banjarnegara Wonogiri	Semarang Klaten Kudus Magelang Semarang Sukoharjo Temanggung	

Sumber: Buku Pembangunan Berketahanan Iklim Bappenas, 2021

b. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Kualitas air sungai dilihat dari hasil perhitungan dan pengujian status mutu kualitas air sungai tahun 2022 menunjukkan bahwa sungai-sungai dalam kondisi cemar ringan sebanyak 24 sungai dan 1 danau, serta cemar sedang sebanyak 1 sungai yaitu sungai Babon.

Tabel 2.154.
Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Nama Sungai	2018		2019		2020		2021		2022	
		Nilai IP	Status Mutu								
1	Baki	3,84	Cemar Ringan	3,66	Cemar Ringan	5,2	Cemar Sedang	4,72	Cemar Ringan	4,09	Cemar Ringan
2	Premulung	4,46	Cemar Ringan	4,06	Cemar Ringan	3,5	Cemar Ringan	4,57	Cemar Ringan	3,41	Cemar Ringan
3	Mungkung	4,22	Cemar Ringan	3,01	Cemar Ringan	2,85	Cemar Ringan	3,55	Cemar Ringan	3,39	Cemar Ringan
4	Grompol	4,67	Cemar Ringan	4,03	Cemar Ringan	5,33	Cemar Sedang	3,84	Cemar Ringan	3,33	Cemar Ringan
5	Samin	3,76	Cemar Ringan	2,61	Cemar Ringan	5,18	Cemar Sedang	4,35	Cemar Ringan	3,69	Cemar Ringan
6	Jlntah	2,82	Cemar Ringan	3,36	Cemar Ringan	3,02	Cemar Ringan	3,16	Cemar Ringan	4,32	Cemar Ringan
7	Palur	4,57	Cemar Ringan	4,06	Cemar Ringan	6,12	Cemar Sedang	5,08	Cemar Sedang	4,92	Cemar Ringan
8	Pepe	4,37	Cemar Ringan	4,35	Cemar Ringan	3,42	Cemar Ringan	3,12	Cemar Ringan	3,69	Cemar Ringan
9	Babon	2,8	Cemar Ringan	3,97	Cemar Ringan	6,62	Cemar Sedang	4,03	Cemar Ringan	5,04	Cemar Sedang

No	Nama Sungai	2018		2019		2020		2021		2022	
		Nilai IP	Status Mutu								
10	Bogowonto	2,09	Cemar Ringan	3,51	Cemar Ringan	4,02	Cemar Ringan	3,22	Cemar Ringan	2,91	Cemar Ringan
11	Garang	5,58	Cemar Sedang	6,53	Cemar Sedang	3,4	Cemar Ringan	2,88	Cemar Ringan	3,40	Cemar Ringan
12	Gung	2,93	Cemar Ringan	3,51	Cemar Ringan	2,9	Cemar Ringan	3,78	Cemar Ringan	3,33	Cemar Ringan
13	Kupang	2,36	Cemar Ringan	3,15	Cemar Ringan	3,86	Cemar Ringan	3,30	Cemar Ringan	3,53	Cemar Ringan
14	Luk Ulo	1,31	Cemar Ringan	2,94	Cemar Ringan	0,91	Kondisi baik	3,30	Cemar Ringan	2,74	Cemar Ringan
15	Lusi	2,15	Cemar Ringan	3,35	Cemar Ringan	3,75	Cemar Ringan	2,95	Cemar Ringan	1,56	Cemar Ringan
16	Pemali	1,85	Cemar Ringan	4,66	Cemar Ringan	0,77	Kondisi baik	3,89	Cemar Ringan	3,90	Cemar Ringan
17	Sambong	2,66	Cemar Ringan	3,74	Cemar Ringan	3,41	Cemar Ringan	3,04	Cemar Ringan	2,73	Cemar Ringan
18	Serang	2,19	Cemar Ringan	4,66	Cemar Ringan	2,29	Cemar Ringan	2,32	Cemar Ringan	2,14	Cemar Ringan
19	Serayu	1,57	Cemar Ringan	3,7	Cemar Ringan	2,24	Cemar Ringan	2,89	Cemar Ringan	2,78	Cemar Ringan
20	Tuntang	2,68	Cemar Ringan	3,19	Cemar Ringan	3,59	Cemar Ringan	3,09	Cemar Ringan	2,84	Cemar Ringan
21	Wulan	1,77	Cemar Ringan	2,13	Cemar Ringan	4	Cemar Ringan	4,89	Cemar Ringan	3,94	Cemar Ringan
22	Bengawan Solo	3,91	Cemar Ringan	3,85	Cemar Ringan	2,68	Cemar Ringan	1,98	Cemar Ringan	2,46	Cemar Ringan
23	Progo	1,25	Cemar Ringan	4,03	Cemar Ringan	2,03	Cemar Ringan	1,94	Cemar Ringan	1,95	Cemar Ringan
24	Citanduy	1,97	Cemar Ringan	4,62	Cemar Ringan	1,97	Cemar Ringan	2,14	Cemar Ringan	2,62	Cemar Ringan
25	Cisanggrung	2,83	Cemar Ringan	5,28	Cemar Sedang	1,94	Cemar Ringan	2,75	Cemar Ringan	0,61	Baik
26	Danau Rawapening	2,43	Cemar Ringan	2,32	Cemar Ringan	2	Cemar Ringan	2,27	Cemar Ringan	3,02	Cemar Ringan
Nilai IP Jawa Tengah		2,98	Cemar Ringan	3,84	Cemar Ringan	3,4	Cemar Ringan	3,39	Cemar Ringan	3,17	Cemar Ringan

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023

Permasalahan utama pencemaran air sungai di Provinsi Jawa Tengah berasal dari pembuangan air limbah domestik, sampah rumah tangga, limbah industri maupun UMKM, serta limbah pertanian dan peternakan. Sektor pertanian dalam arti luas juga termasuk salah satu penyumbang pencemar, terutama terkait penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan. Pada DAS Bengawan Solo terdapat industri tekstil dan industri rayon yang membuang air limbahnya langsung ke Sungai Bengawan Solo. Beberapa penanganan pencemaran sungai dapat dilakukan melalui (1) pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan besar yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap pengolahan air limbah; (2) mengevaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelaku

usaha/kegiatan skala besar melalui program Propernas dan Properda; (3) pemantauan dan uji laboratorium kualitas air sungai dan anak-anak sungainya dan evaluasi terhadap kondisi kualitas air sungai atas dasar laporan hasil pengujian kualitas air sungai dari para pihak terkait; serta (4) revitalisasi IPAL komunal yang telah terbangun untuk meningkatkan kinerja IPAL.

Tabel 2.155.

Persentase Sampah Yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Jumlah Timbunan Sampah (Ton/tahun)	5.418.184	5.604.080,65	6.055.617,05	6.152.654,76	4.996.421,95
2	Jumlah Sampah Yang Dapat Dikurangi (ton/tahun)	725.047,58	1.069.308,62	1.175.675,24	1.128.400,92	1.025.342,09
3	Jumlah sampah yang tertangani (Ton/tahun)	1.992.430,5	2.774.189,20	2.626.441,58	2.408.372,35	2.020.129,3
4	Total Pengelolaan Sampah	2.717.478,1	3.843.497,82	3.802.116,82	3.536.773	3.045.472,0
	Persentase Pengelolaan Sampah (%)	50,15	68,58	62,79	57,48	60,95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (2023)

Keterangan: * Data Sementara, masih ada 9 Kab/Kota yang belum melakukan input data

Jumlah timbunan sampah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2018 sejumlah 5.418.184 ton/tahun menjadi 6.152.654,76 ton/tahun pada tahun 2021. Jumlah sampah yang dapat dikurangi sebesar 1.128.400,92 ton/tahun, sedangkan sampah yang tertangani baru mencakup 2.408.372,35 ton/tahun dengan total pengelolaan sampah sebanyak 3.536.773 ton/tahun pada tahun 2021 atau sebesar 57,48 persen. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah timbunan sampah sebesar 4.996.421,95 ton/tahun dengan jumlah sampah yang dapat dikurangi sebesar 1.025.342,09 ton/tahun, sedangkan sampah yang tertangani baru mencakup 2.020.129,3 ton/tahun dengan total pengelolaan sampah sebanyak 3.045.472 ton/tahun atau sebesar 60,95 persen. Berdasarkan data TPA di Jawa Tengah, luas total TPA yang ada sejumlah 58 TPA adalah 258,1 Ha. Berikut adalah tipe pengelolaan TPA di Jawa Tengah.

Tabel 2.156.
Usia Pakai dan Tipe Pengelolaan Sampah TPA di Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			Control Landfill	Unmanag ed Shallow	Unmana ged Deep		
1	Cilacap 1	TPA Majenang			√	1,6	2025
2	Cilacap 2	TPA Sidareja			√	1,4	2025
3	Cilacap 3	TPA Kroya			√	0,8	2017
4	Cilacap 4	TAP Jeruklegi	√			6,3	2019
5	Banyumas 1	TPA Kaliori	√			4,7	2018
6	Banyumas 2	TPA Gunung Tugel			√	6,7	2014
7	Banyumas 3	TPA Ajibarang			√	2,0	2014
8	Purbalingga	TPA Banjaran			√	4,0	2018
9	Banjarnegara	TPA Winong			√	3,8	2049
10	Kebumen 1	TPA Kaligending			√	5,0	2033
11	Kebumen 2	TPA Semali	√			3,7	2033
12	Purworejo	TPA Jetis Loana	√			4,7	2019
13	Wonosobo	TPA Wonorejo			√	4,5	2018
14	Kab. Magelang 1	TPA Pasuruhan			√	1,8	2017
15	Kab. Magelang 2	TPA Klegen			√	0,2	2017
16	Boyolali	TPA Winong		√		3,7	---
17	Klaten 1	TPA Jomboran			√	0,2	2014
18	Klaten 2	TPA Joho			√	0,9	2015
19	Klaten 3	TPA Candirejo			√	1,0	2016
20	Klaten 4	TPA Pedan			√	7,0	belum beroperasi
21	Sukoharjo	TPA Mojorejo			√	3,7	2017
22	Wonogiri 1	TPA Ngadirojo			√	8,2	2023
23	Wonogiri 2	TPA Baturetno			√	1,5	2026
24	Wonogiri 3	TPA Purwantoro			√	0,5	2021
25	Wonogiri 4	TPA Slogohimo			√	0,3	2026
26	Karanganyar	TPA Sukosari			√	4,4	2021
27	Sragen	TPA Tanggan			√	4,2	2016
28	Grobogan 1	TPA Ngembak	√			9,8	2033
29	Grobogan 2	TPA Godong		√		1,0	2015
30	Grobogan 3	TPA Mojorebo		√		1,0	2013
31	Grobogan 4	TPA Gubug			√	1,0	2013
32	Blora 1	TPA Lebok			√	1,5	2019
33	Blora 2	TPA Temurejo	√			4,0	2018

No	Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			Control Landfill	Unmanaged Shallow	Unmanaged Deep		
34	Rembang	TPA Kerep			√	3,2	2035
35	Pati 1	TPA Sukoharjo	√			12,5	2026
36	Pati 2	TPA Plosojenar			√	1,7	2018
37	Kudus	TPA Tajungrejo	√			5,6	2019
38	Jepara 1	TPA Bandengan	√			5,5	2015
39	Jepara 2	TPA Krasak			√	0,7	2020
40	Jepara 3	TPA Gemulung			√	0,9	2016
41	Demak 1	TPA Kalikondang			√	2,5	2016
42	Demak 2	TPA Candisari			√	0,8	2016
43	Kab. Semarang	TPA Blondo	√			5,7	2009
44	Temanggung	TPA Sanggrahan	√			4,0	2031
45	Kendal 1	TPA Darupono			√	0,9	2015
46	Kendal 2	TPA Pagergunung			√	1,8	2025
47	Batang	TPA Randu Kuning			√	2,5	2019
48	Kab.Pekalongan	TPA Linggoasri	√			4,7	2019
49	Pemalang	TPA Pegongsoran	√			6,0	2031
50	Kab. Tegal	TPA Penujah			√	3,0	2018
51	Brebes 1	TPA Kaliwlingi			√	4,0	2040
52	Brebes 2	TPA Kalijurang			√	2,0	2021
53	Kota Magelang	TPA Banyu Urip			√	7,8	2016
54	Surakarta	TPA Putri Cempo			√	17,0	2018
55	Salatiga	TPA Ngronggo			√	5,3	2017
56	Kota Semarang	TPA Jatibarang			√	46,0	2026
57	Kota Pekalongan	TPA Degayu			√	4,0	2013
58	Kota Tegal	TPA Muararejo		√		5,0	2022
	JUMLAH		13	4	41	258,1	

Sumber: Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, 2022

Data di atas menunjukkan bahwa dari 58 TPA, secara teknis terdapat 35 TPA yang telah melebihi usia pakai atau sebesar 60,34 persen dari total TPA. Berdasarkan sistem pengelolaannya hanya 22,41 persen TPA yang menggunakan sistem controlled landfill, sedangkan sisanya sebesar 71 persen atau 41 TPA masih menggunakan sistem open dumping dengan ketinggian lebih dari 5 meter. Hal tersebut karena masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan

terbatasnya infrastruktur reduksi sampah di pedesaan, serta masih adanya kebiasaan penduduk yang membuang sampah di sungai.

Dalam rangka peningkatan pemenuhan dasar untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan (Perpres Nomor 79/2019) yang mendukung KSPN Borobudur, maka diperlukan sistem persampahan terpadu, yakni Pembangunan TPST Regional di Kabupaten Magelang. Adapun perkembangan pelaksanaan TPST Regional Magelang adalah penyusunan Feasibility Study (DLHK, 2019), penyusunan dokumen lingkungan UKL-UPL (DLHK, 2020), penyusunan DED (DLHK, 2021) dan Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan, Feasibility Study jalan masuk serta proses persiapan pengadaan tanah (DLHK, 2022) dan pada tahun 2023 proses pelaksanaan pengadaan tanah oleh Tim BPN serta proses pelepasan kawasan hutan (DLHK, Maret 2023).

Selain timbulan sampah, peningkatan aktivitas seperti industri, pelayanan (rumah sakit, hotel dan lain sebagainya) juga akan menambah sumber pencemar dan volume limbah yang dihasilkan. Sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang biasa disebut limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) umumnya dihasilkan dari sektor industri.



Sumber : DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.83.

Jumlah Limbah B3 Per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2022

Total Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 1.589.621,42 ton/tahun. Produksi limbah B3 paling besar berasal dari

Kabupaten Cilacap karena adanya industri semen, beton dan PLTU Batubara yang berasal dari FABA (Fly Ash and Bottom Ash).

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup, Pemerintah melaksanakan kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Pengawasan lingkungan yang diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) identik dengan kegiatan pengawasan yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.157.

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Izin	46	62	69	83	89
2	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha dan / atau kegiatan	25	35	57	38	63
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Usaha dan / atau kegiatan	-	27	49	19	47
4	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Orang	-	-	-	6	7

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2023

c. Kualitas Lahan di Provinsi Jawa Tengah

Kualitas lahan dinilai dari kondisi tutupan lahan terhadap fungsi lahan. Kondisi ini juga berkaitan dengan semakin meningkatnya luas lahan kritis di Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, sebesar 375.733 ha (11,45 persen dari luas daratan Provinsi Jawa Tengah).

Pada tahun 2021, hutan negara/kawasan hutan di Jawa Tengah seluas 649.354,96 ha dan hutan rakyat seluas 684.317,70 ha, sehingga total luas hutan di Jawa Tengah seluas 1.333.672,66 ha. Berdasarkan status lahan, lahan kritis tersebut 86 persen tersebar di lahan masyarakat/tanah hak, sedangkan sisanya 14 persen tersebar di kawasan hutan (hutan negara). Penanganan lahan kategori kritis di Jawa Tengah dilakukan melalui kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan pada lahan-lahan yang dibebani hak/lahan masyarakat.

Sedangkan pada lahan kritis yang tersebar di kawasan hutan/hutan negara dilakukan melalui reboisasi hutan baik pada hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi. Pemulihan lahan kritis di kawasan hutan negara, khususnya yang berkaitan erat dengan permasalahan sosial seperti konflik tenurial, terbatasnya akses kelola hutan dan lain sebagainya dilakukan melalui program perhutanan sosial dengan 5 skema yaitu : (1) Hutan Desa (HD); (2) Hutan Kemasyarakatan (HKm); (3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR); (4) Hutan Adat (HA); (5) Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial. Untuk menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial dalam implementasi penanganan lahan kritis diterapkan melalui agroforestry. Perkembangan upaya penanganan lahan kritis tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Luas Lahan Kritis Dan Penanganannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Hutan dalam dan luar kawasan (ha)	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13	1.334.232,13
Luas Kritis (ha)	375.733*)	375.733*)	375.733*)	375.733*)	375.733
Luas lahan yang direhabilitasi per tahun (ha)	23.361	23.431	32.389	23.477	21.371
Perbandingan luas yang direhabilitasi per tahun (%)	6,22	6,24	8,62	6,24	5,69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

* Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional

Penanganan lahan kritis di Jawa Tengah tahun 2018-2022 secara konsisten dilakukan pada lahan seluas 124.029 Ha (33%) terhadap luas lahan kritis sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Keberadaan lahan kritis ini telah berkontribusi terhadap penurunan daya dukung DAS, sehingga rehabilitasi lahan kritis difokuskan pada 19 DAS prioritas yang perlu dipulihkan daya dukungnya dan 12 DAS prioritas yang perlu dipertahankan daya dukungnya di di Jawa Tengah

Tabel 2.158.

Daerah Aliran Sungai Prioritas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Nama DAS	Keterangan	No.	Nama DAS	Keterangan
1	DAS Progo	Dipulihkan	1	DAS Rambut	Dipertahankan
2	DAS Serayu	Dipulihkan	2	DAS Lampir	Dipertahankan
3	DAS Bogowonto	Dipulihkan	3	DAS Banger	Dipertahankan
4	DAS LukUlo	Dipulihkan	4	DAS Babon	Dipertahankan
5	DAS Tuntang,	Dipulihkan	5	DAS Blorong	Dipertahankan
6	DAS Pemali,	Dipulihkan	6	DAS Jragung	Dipertahankan
7	DAS Solo,	Dipulihkan	7	DAS Kaliombo	Dipertahankan
8	DAS Citandui.	Dipulihkan	8	DAS Gede	Dipertahankan
9	DAS Bodri,	Dipulihkan	9	DAS Randugunting	Dipertahankan
10	DAS Garang,	Dipulihkan	10	DAS Jalicokroyasan	Dipertahankan
11	DAS Serang,	Dipulihkan	11	DAS Ijo	Dipertahankan
12	DAS Cacaban,	Dipulihkan	12	DAS Tipar	Dipertahankan
13	DAS Juwana,	Dipulihkan			
14	DAS Comal,	Dipulihkan			
15	DAS WawarMedono	Dipulihkan			
16	DAS Babakan	Dipulihkan			
17	DAS Gangsa	Dipulihkan			
18	DAS Kupang	Dipulihkan			
19	DAS Lasem	Dipulihkan			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2023

Selain rehabilitasi lahan kritis/ pemulihan DAS, dilakukan juga upaya mempertahankan tutupan lahan melalui inisiatif - inisiatif konservasi kawasan melalui pembentukan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial) dan Cagar Biosfer.

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. KEE menjadi upaya daerah untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang, dan dinamis dalam perkembangannya. KEE juga dapat menjadi fungsi pemanfaatan yang memperhatikan keberlanjutan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat ekologi (lestari). Saat ini di Jawa Tengah sudah ditetapkan 3 (tiga) KEE yang merupakan kawasan ekosistem lahan basah mangrove, sedangkan KEE pada ekosistem terestrial dalam tahap inisiasi untuk penetapan.

Cagar Biosfer merupakan kawasan/ situs yang ditetapkan oleh UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan atas upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang terpercaya. Usulan penetapan Cagar Biosfer diajukan oleh pemerintah pusat, setiap calon cagar harus memenuhi kriteria tertentu dan sesuai dengan persyaratan minimum sebelum dimasukkan ke dalam jaringan Cagar Biosfer dunia. Cagar Biosfer merupakan kawasan yang ideal untuk menguji dan mendemonstrasikan pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional. Pengelolaan Cagar Biosfer dibagi menjadi 3 zona yang saling berhubungan, yaitu area inti (Core Area), zona penyangga (Buffer zone), dan area transisi (Transition zone). Hingga tahun 2022, UNESCO telah menetapkan 2 (dua) Cagar Biosfer di Jawa Tengah yaitu Cagar Biosfer Karimun Jawa – Jepara – Muria seluas 1.236.083,97 ha dan Cagar Biosfer Merapi – Merbabu – Menoreh seluas 254.876,75 ha

Kondisi tutupan lahan dan hutan bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, diantaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, pencurian kayu dan kebakaran hutan. Kerusakan kawasan hutan mengalami penurunan, dari tahun sebelumnya, yaitu untuk luas pencurian pohon dari 17,41 Ha berhasil diturunkan menjadi 14,6 Ha, serta luas kebakaran hutan dari 281,50 Ha berhasil diturunkan menjadi 99,97 Ha. Gambaran mengenai kerusakan kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159.

Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Luas pencurian pohon	29,00	22,88	17,41	14,6	91
2.	Luas Kebakaran hutan	4.215,64	3.628,84	281,50	99,97	10,79
	Total Luas Kerusakan hutan	4.244,64	3.651,72	298,91	114,57	101,79

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Penanganan lahan juga dilaksanakan di daerah lahan basah/ pesisir melalui konservasi dan rehabilitasi mangrove. Konservasi ekosistem mangrove salah satunya melalui inisiatif pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). Sampai dengan tahun 2022 telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi 2 (dua) KEE Lahan Basah Mangrove yaitu KEE Segara Anakan dan KEE Kaliwlingi.

Tabel 2.160.

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah Mangrove di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Nama KEE	Wilayah Administrasi	Status
1	KEE Mojo	Kab.Pemalang	Penetapan (SK Bupati Pemalang nomor 188.4/564/tahun 2017 tanggal 16 Juni 2017)
2	KEE Muara Kali Ijo	Kab.Kebumen	Penetapan (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 552.52/31 tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020)
3	KEE Pasar Bangi	Kab.Rembang	Penetapan (Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 552.52/31 tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Rehabilitasi lahan basah mangrove dilakukan melalui penanaman mangrove yang dimaksudkan untuk melindungi pantai dari arus dan hempasan ombak, sebagai tempat memijah, membesar dan mencari makan berbagai biota. Perkembangan rehabilitasi lahan basah mangrove sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.161.

Rehabilitasi Mangrove Tahun 2018-2022 Di Jawa Tengah

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Keterangan
1.	Luas rehabilitasi mangrove (Ha)	30,20	58	19,4	174,12	27	DLHK
2.	Luas Penanaman Mangrove (Ha)	10,20	19.6	6.4	9	8,89	DKP

Sumber: 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

d. Pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan berkelanjutan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional. Sedangkan pengolahan hasil hutan berkelanjutan ditentukan sejauh mana pengguna kawasan hutan (yang bersifat perorangan, kelompok masyarakat maupun badan hukum

swasta) memenuhi kewajiban terhadap izin/kerjasama yang telah ditetapkan dan industri pengolahan hasil hutan tertib dalam penatausahaan hasil hutan Berikut gambaran perkembangan produksi kayu di Jawa Tengah.

Tabel 2.162.

Produksi Kayu Dari Hutan Rakyat dan Hutan Negara Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi Kayu Asal Hutan Rakyat (m3)	2.597.954,53	2.632.756,10	2.682.476,19	1.821.315,97	2,149,541.51
2	Produksi Kayu Asal Hutan Negara (m3)	254.657	278.118,06	361.641,11	249.517.67	328,451.67
	Total Produksi Kayu (m3)	2.852.611,53	2.910.874,16	3.044.117,30	1.821.315,97	2,477,993.17

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Produksi kayu dari hutan rakyat dan hutan negara pada periode 2018 – 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan kenaikan kecuali untuk tahun 2021 yang mengalami penurunan produksi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 terutama karena adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang secara total mengalami penurunan sebesar 40.17 persen dibandingkan tahun 2020. Sedangkan untuk produksi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 36.06 persen dibandingkan tahun 2021 walaupun masih tetap lebih rendah dibandingkan periode 2018 – 2020.

Salah satu instrumen untuk mencapai pengelolaan hutan lestari adalah Kepatuhan industri pengolahan hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan melalui Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Industri pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikasi SVLK akan memiliki keunggulan kompetitif terutama di pasar internasional karena memenuhi kriteria produk ramah lingkungan (ecolabel) sehingga akan mendorong implementasi pengelolaan hutan lestari. Berikut gambaran perkembangan pengguna kawasan, industri pengolahan hasil hutan dan di Jawa Tengah.

Tabel 2.163.

Jumlah Pengguna Kawasan, Industri Pengolahan Hasil Hutan dan SVLK di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengguna kawasan hutan	Unit	179	193	201	203	207
2	Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m3 berizin	Unit	938	967	999	1.007	1.026
3	Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu	Unit	636	736	838	894	905

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pengguna kawasan hutan setiap tahun bertambah, dengan jumlah pengguna kawasan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 207 unit. Selain itu jumlah industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m³ berizin setiap tahun terus bertambah, dengan jumlah sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.026 unit. Jumlah Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu pada industri hasil hutan meningkat setiap tahun dimana sampai dengan tahun 2022 berjumlah 905 unit. Hal tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja ekspor produk hasil hutan.

Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses kelola serta pemanfaatan hutan oleh masyarakat, memberi kesempatan masyarakat mengelola hutan secara legal dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan yang tinggal di kawasan hutan. Berikut gambaran perkembangan perhutanan sosial di Jawa Tengah tahun 2018 - 2022.

Tabel 2.164.

Perkembangan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemberian Akses kelola kawasan hutan untuk masyarakat (ha)	28.300,87	35.173,63	35.828,84	79.461,49	79.461,49
2	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi (kelompok)	54	79	81	90	90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dalam kurun waktu 2018 - 2022, telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 90 SK untuk 90 Kelompok Perhutanan Sosial di Jawa Tengah dengan luas total sebesar 79.461,49 Ha. Sebagai salah satu upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19 dilakukan penguatan perhutanan sosial yang diarahkan pada penataan kelembagaan, pengembangan usaha kelompok dalam bentuk pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok serta pengelolaan kawasan berdasar perencanaan teknis.

e. Penataan Ruang

Pemerintah provinsi telah menyelesaikan revisi RTRW pada tahun 2019, namun demikian sesuai dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja maka provinsi Jawa Tengah akan melakukan revisi kembali dengan mengintegrasikan matra darat

dengan matra laut. Pada tahun 2022 pemerintah provinsi Jawa Tengah telah menyusun materi teknis revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 serta melakukan integrasi dengan matra laut. Disisi lain, beberapa pemerintah Kabupaten/Kota telah menyelesaikan penyusunan RTRW masing-masing. Perkembangan status penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.161.

Tabel 2.165.

UPDATE STATUS RTRW KAB/KOTA DI JATENG

per 27 Maret 2023

Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan revisi RTRW sebanyak 24, sedangkan 11 RTRW Kabupaten/Kota sedang berproses

NO	KABUPATEN	Revisi & PK	Tahapan di Prov		Proses <i>Persub ATR (Sudah Terbit Rekom Gub/BA TKPRD Prov)</i>	Proses <i>Evaluasi Gub (Sudah Terbit Persub ATR)</i>	Perda Baru
			Rekom Gub (Sebelum UU CK)	BA TKPRD Prov (Pasca UU CK)			
1	Kabupaten Cilacap						Perda 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda 9/2011 tentang RTRW Kab Cilacap 2011 - 2031 (1 April 2021)
2	Kabupaten Banyumas						BA TKPRD tanggal 17 Juni 2021
3	Kabupaten Purbalingga						Perda 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda 5/2011 tentang RTRW Kab Purbalingga 2011 - 2031 (28 Agustus 2020)
4	Kabupaten Banjarnegara						Linsek pada tanggal 15 Maret 2023
5	Kabupaten Kebumen						BA TKPRD tanggal 9 Juni 2020
6	Kabupaten Purworejo						Perda No.10 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Purworejo 2021 - 2041 (30 Juli 2021)
7	Kabupaten Wonosobo						Evaluasi dengan FPR Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 Maret 2023
8	Kabupaten Magelang						BA TKPRD tanggal 15 Agustus 2019
9	Kabupaten Boyolali						Perda 8 Th 2019 tentang perubahan atas Perda 9 Th 2011 tentang RTRW Boyolali 2011 - 2031. (17 Juli 2019)
10	Kabupaten Klaten						Perda Kab. Klaten No. 10 tahun 2021 tentang RTRW Kab. Klaten Tahun 2021-2041 (24 November 2021)

11	Kabupaten Sukoharjo					Perda 1 Th 2018 tentang perubahan atas Perda 14 Th 2011 tentang RTRW Sukoharjo 2011 – 2031. (9 maret 2018)
12	Kabupaten Wonogiri					Perda No.2 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Wonogiri 2020 - 2040
13	Kabupaten Karanganyar					Perda 19 Th 2019 tentang perubahan atas Perda 1 Th 2013 tentang RTRW Karanganyar 2013 – 2032. (27 Agust 2019)
14	Kabupaten Sragen					Perda 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Sragen tahun 2011 – 2031 tanggal 5 Mei 2020
15	Kabupaten Grobogan					Perda Kab. Grobogan No. 12 Tahun 2021 ttg RTRW Kab Grobogan Tahun 2021-2041 ditetapkan 17 Des 2021
16	Kabupaten Blora					Perda 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kab Blora 2021 - 2041 tanggal 1 April 2021
17	Kabupaten Rembang					Linsek pada tanggal 15 November 2022
18	Kabupaten Pati					Perda 2/2021 tentang Perubahan Atas Perda 5/2011 tentang RTRW Kab Pati 2010 - 2030 tgl 1 April 2021
19	Kabupaten Kudus					Perda 1/2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 tgl 30 Maret 2022
20	Kabupaten Jepara					Linsek pada tanggal 19 Desember 2022
21	Kabupaten Demak					Perda No.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Demak Tahun 2011 - 2031 tanggal 28 Feb 2020
22	Kabupaten Semarang					Evaluasi dengan FPR Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 21 Maret 2023
23	Kabupaten Temanggung					BA TKPRD 26 Febuari 2019
24	Kabupaten Kendal					Perda 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda 20 Tahun 2011 tentang RTRW Kab Kendal tahun 2011 – 2031 tanggal 22 Mei 2020
25	Kabupaten					Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab

	Batang						Batang 2019 – 2039. (26 Des 2019)
26	Kabupaten Pekalongan						Perda 3 Tahun 2020 tentang RTRW Kab Pekalongan 2020 - 2040 (5 Agustus 2020)
27	Kabupaten Pemalang						Perda 1 Tahun 2018 tentang RTRW Pemalang 2018 – 2038 (8 Feb 2018)
28	Kabupaten Tegal						Linsek pada tanggal 15 Maret 2023
29	Kabupaten Brebes						Perda 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab Brebes 2019 – 2039. (23 Des 2019)
30	Kota Magelang						Perda 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011 - 2031 (17 Juli 2020)
31	Kota Surakarta						Perda No.4 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Surakarta 2021 - 2041 tanggal 9 Juli 2021
32	Kota Salatiga						Evaluasi oleh Kemendagri pada tanggal 10 Maret 2023
33	Kota Semarang						Perda No. 5 Th 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Semarang No.14 Th 2011 tentang RTRW Kota Semarang 2011 - 2031
34	Kota Pekalongan						Perda 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No.30 Th 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan 2009 - 2029
35	Kota Tegal						Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kota Tegal No.4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011 - 2031 tanggal 24 Feb 2021
	JUMLAH	35	28	7	35	26	24
	%	100	80,00	20,00	100,00	74,29	68,57

Sumber: Data diolah

Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 24 Kabupaten/Kota telah menerbitkan Perda RTRW dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan revisi RTRW akan selesai pada tahun 2023. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidaksinkronan antar dokumen rencana tata ruang di Jawa Tengah sehingga dapat berdampak pada pembangunan serta investasi. Mengantisipasi hal tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk dapat mensinkronkan antar dokumen rencana tata ruang sehingga dapat meminimalisir berbagai masalah dalam proses selanjutnya. Selain itu pemerintah provinsi perlu melakukan upaya untuk mendorong percepatan penyelesaian penyusunan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.

Tabel 2.166.

**PROGRESS LEGISLASI RDTR KAB/KOTA DI
JATENG**

per 27 Maret 2023

Terdapat 3 Perda RDTR dan 14 Perkada RDTR

NO	KABUPATEN	PENYUS UNAN	PROSES PERSUB ATR	PROSES Fasilitasi	PERDA/ PERKADA BARU	KETERANGAN
KAB BANYUMAS						
1	RDTR Kaw Perkotaan Purwokerto					Perda Kab Banyumas No.6 Tahun 2019 tentang RDTR Kaw Perkotaan PurwokertoTh. 2019 - 2039
2	RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas					Perbup No. 9 Tahun 2023 tentang RDTR KP Banyumas Tahun 2023-2043
3	RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja					Perbup No. 4 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja
KOTA SALATIGA						
1	RDTR Kota Salatiga					Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2018tentang RDTR BWP PK I, II, III, IV Kota Salatiga 2017 - 2030
KAB SUKOHARJO						
1	RDTR Kec Sukoharjo					Perbup 91/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Sukoharjo Tahun 2020 - 2039
2	RDTR Kec Kartasura					Perbup 93/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Kartasura Tahun 2020 -2039
3	RDTR Kec Grogol					Perbup 92/2020 tentang RDTR Kaw Perkotaan Kec Grogol Tahun 2020 - 2039
4	RDTR Kecamatan Nguter					
5	RDTR Kecamatan Bendosari					
KAB BOYOLALI						
1	RDTR Kec Sawit					Perbup 77/2021 tentang RDTR Kec. SawitTahun 2021-2041 (12 November 2021)
2	RDTR Wilayah Perencanaan Mojosongo					Perbup RDTR Mojsongko No. 68 Tahun 2022 (4 Juli 2022)
3	RDTR Kecamatan Banyudono					Perbup RDTR Kecamatan Banyudono No.106 Tahun 2022 tgl 1 Desember 2022
4	RDTR Cepogo					

NO	KABUPATEN	PENYUS UNAN	PROSES PERSUB ATR	PROSES Fasilitasi	PERDA/ PERKADA BARU	KETERANGAN
KAB SRAGEN						
1	RDTR Perkotaan Sragen					Perbup 69 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sragen (22 Desember 2021)
2	RDTR OSS Kawasan Kota Industri Sambungmacan-Gondang					Fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi tanggal 20 Maret 2023
3	RDTR Gemolong					
KAB PEMALANG						
1	RDTR Kaw Perkotaan Pematang					
KAB BATANG						
1	RDTR Kec Limpung					Perbup No. 13 Tahun 2023 tentang RDTR WP Limpung
2	RDTR Kec Tulis					Perda Kab Batang No.6 Tahun 2020 tentang RDTR BWP Tulis Th. 2020 - 2040
3	RDTR Gringsing					Perbup No. 12 Tahun 2023 tentang RDTR WP Gringsing
KOTA SEMARANG						
1	RDTR Kec Tugu					belum melakukan pengajuan terkendaladengan RTRW Kota Semarang
KAB PEKALONGAN						
1	RDTR Kec Kedungwuni					Perbup Pekalongan 21/2021 tentang RDTR BWP Kecamatan Kedungwuni 2021 - 2041 (9 Juni 2021)
2	RDTR Kec. Siwalan					
KAB PURBALINGGA						
1	RDTR Kaw Perkotaan Purbalingga					Perbup Purbalingga 46/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga Tahun 2021 - 2041 (10 Juni 2021)
2	RDTR Kawasan Perkotaan Bobotsari					
KAB JEPARA						
1	RDTR Kec Jepara					Perbup Jepara No 55 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Jepara Tahun 2021 - 2041 (26 Oktober 2021)
2	RDTR Mayong					
Kab PURWOREJO						
1	RDTR Perkotaan Purworejo Kutoarjo					Perbup No 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo Tahun 2022-2041
KAB KUDUS						
1	RDTR Kawasan Perkotaan Jekulo					
KAB KLATEN						
1	RDTR Kecamatan Karangdowo					
2	RDTR Kecamatan Gantiwarno					
3	RDTR Kecamatan Bayat					
KAB. TEMANGGUNG						

NO	KABUPATEN	PENYUS UNAN	PROSES PERSUB ATR	PROSES Fasilitasi	PERDA/ PERKADA BARU	KETERANGAN
1	RDTR Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh					
	KAB CILACAP					
1	RDTR Kaw Perkotaan Cilacap					Perbup Cilacap 75/2021 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 -2041 (9 Juni 2021)
2	RDTR Kawasan Perkotaan Kroya					
3	RDTR Kawasan Perkotaan Maos					
4	RDTR Kawasan Perkotaan Majenang					
5	RDTR Kawasan Perkotaan Dayeuhluhur					
6	RDTR Kawasan Perkotaan Sidareja					sedang proses fasilitasi di biro hukum
	KAB KENDAL					
1	RDTR Kecamatan Kaliwungu					
2	RDTR Kecamatan Brangsong					
	KAB. KARANGANYAR					
1	RDTR KP Karanganyar					
	KAB WONOGIRI					
1	RDTR Kawasan Perkotaan Kecamatan Wonogiri					Peraturan Bupati Wonogiri No. 63 Tahun2022 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Wonogiri Tahun 2022-2042
	17 Kab/Kota	43	22	21	20	20

Sumber : Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, (27 Maret 2023)

Dalam rangka pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20 persen, pemerintah provinsi perlu melakukan upaya pendorongan untuk mewujudkan hal tersebut. Rata-rata luasan RTH publik di Jawa Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 7,86 persen dari luas perkotaan di Jawa Tengah. Proporsi ini tentunya masih jauh dari angka sebagaimana yang diamanatkan.

Tabel 2.167.

Rata - Rata Luasan RTH Di Kawasan Perkotaan Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Kota Semarang	2.700,68	2.700,68	2.700,68	6,99%	6,99%	6,99%
2	Kab. Semarang	756,48	756,48	382,87	6,73%	6,73%	6,31%
3	Kota Salatiga	482,16	482,16	482,16	8,33%	8,33%	8,33%
4	Kab. Kendal	477,62	477,62	393,82	5,43%	5,43%	4,48%
5	Kab. Demak	392,02	392,02	311,56	5,49%	5,49%	4,37%
6	Kab. Grobogan	869,91	869,91	869,91	11,70%	11,70%	11,70%
7	Kab. Pati	615,39	615,39	352,47	5,66%	5,66%	3,88%
8	Kab. Kudus	1.036,77	1.036,77	1.036,77	9,92%	9,92%	9,92%
9	Kab. Jepara	449,05	468,35	468,35	4,72%	4,88%	4,88%
10	Kab. Blora	547,84	547,84	547,84	12,34%	12,34%	12,34%
11	Kab. Rembang	448,48	448,48	448,48	16,33%	16,33%	16,33%
12	Kab. Klaten	611,43	611,43	547,82	6,17%	6,17%	5,58%
13	Kab. Boyolali	114,44	195,68	195,68	3,20%	4,96%	4,96%
14	Kab. Wonogiri	357,85	357,85	316,59	5,80%	5,80%	7,24%
15	Kab. Sukoharjo	998,32	998,32	177,40	6,15%	6,15%	2,59%
16	Kab. Sragen	208,64	242	242	2,78%	5,57%	5,57%
17	Kota Surakarta	583,78	583,78	583,78	12,35%	12,35%	12,35%

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2020	2021	2022
18	Kab. Karanganyar	252,65	252,65	252,65	7,40%	7,40%	7,40%
19	Kab. Purworejo	524,41	524,41	524,41	7,30%	7,30%	7,30%
20	Kab. Temanggung	245,45	245,45	245,45	7,56%	7,56%	7,56%
21	Kab. Wonosobo	504,13	504,13	504,13	14,41%	14,41%	14,41%
22	Kab. Kebumen	1.434,68	1.434,68	1.434,68	11,00%	11,00%	11,00%
23	Kab. Magelang	543,62	1.055,54	1.055,54	3,47%	9,30%	9,30%
24	Kota Magelang	449,15	449,15	449,15	24,22%	24,22%	24,22%
25	Kab. Banjarnegara	403,23	403,23	403,23	10,03%	10,03%	10,03%
26	Kab. Banyumas	1.178,83	1.178,83	1.178,83	5,79%	5,79%	5,79%
27	Kab. Batang	345,47	345,47	345,47	7,51%	7,51%	7,51%
28	Kab. Brebes	1.185,43	1.185,43	1.185,43	9,62%	9,62%	9,62%
29	Kab. Cilacap	1.677,33	1.677,33	1.677,33	6,48%	6,48%	6,48%
30	Kota Pekalongan	294,91	294,91	294,91	6,35%	6,35%	6,35%
31	Kota Tegal	592,9	592,9	592,9	15,12%	15,12%	15,12%
32	Kab Pekalongan	196,09	120,17	120,17	3,89%	4,53%	4,53%
33	Kab. Pemasaran	1.267,67	1.267,67	1.267,67	16,72%	16,72%	16,72%
34	Kab. Purbalingga	164,49	164,49	164,49	5,89%	5,89%	5,89%
35	Kab. Tegal	377,46	377,46	203,53	5,70%	5,70%	6,97%
36	Jumlah Provinsi Jawa Tengah	23.288,76	23.858,66	21.958,15	7,49%	7,91%	7,86%

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, 2022

Selain itu upaya pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan pengawasan terhadap kinerja Penataan Ruang baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui sistem pengawasn teknis (SIWASTEK). Pengawasan penataan ruang merupakan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 212 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan penataan ruang dilaksanakan terhadap kinerja pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pelaksanaan penataan ruang; kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; kinerja pemenuhan standar pelayanan bidang penataan ruang; serta kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 216 PP No. 21/2021 diamanatkan bahwa Gubernur melakukan pengawasan penataan ruang terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Untuk itu, Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 telah melaksanakan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN melalui sistem SIWASTEK. Selain itu juga sebagai bentuk provinsi melaksanakan tugas pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Provinsi Jawa Tengah juga telah membentuk Tim Pengawas Provinsi sebagai pelaksana kegiatan pengawasan kinerja penyelenggaraan penatan ruang pada tahun 2022.

Tujuan dari Pengawasan Kinerja TURBINLAK Penataan Ruang dan Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai indikator kemajuan Penataan Ruang suatu daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Hasil Siwastek kabupaten kota pada tahun 2022 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.168.**Tabel Hasil Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang**

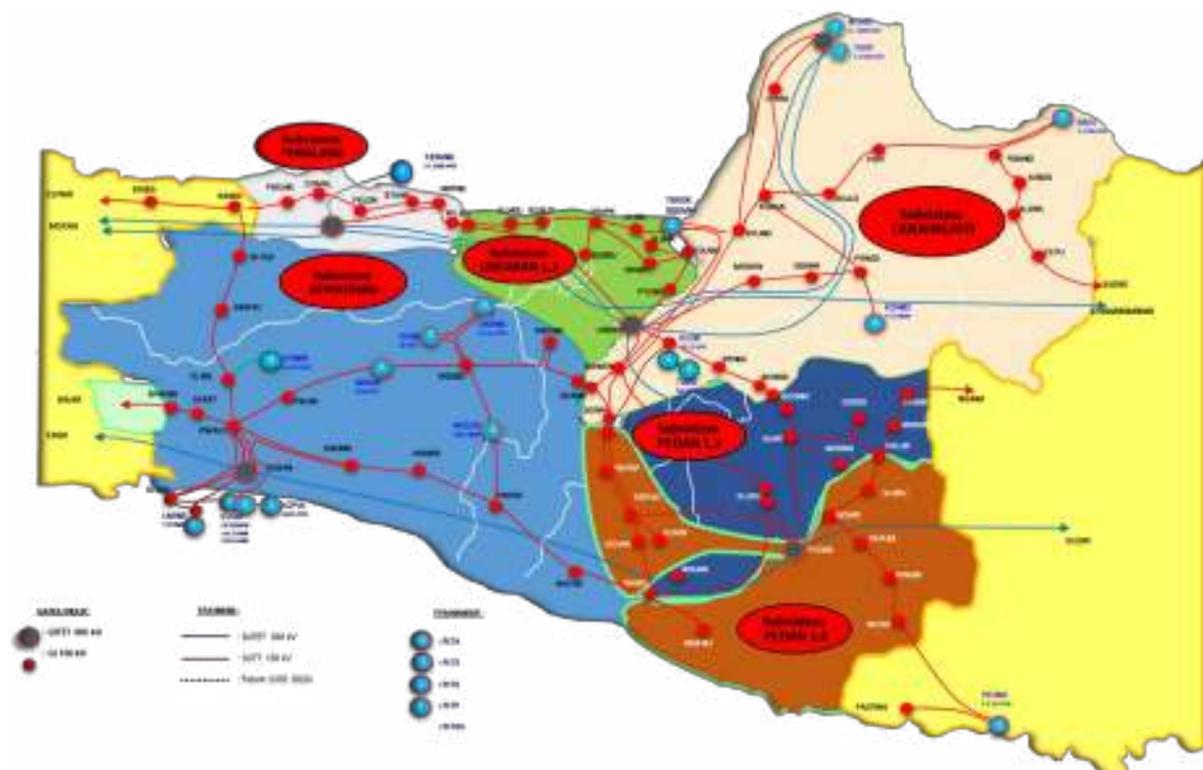
Kab/Kota	Nilai Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kategori
Jepara	86	baik
Cilacap	83	baik
Purbalingga	79	sedang
Klaten	79	sedang
Batang	77	sedang
Blora	77	sedang
Pati	75	sedang
Kota Pekalongan	75	sedang
Boyolali	74	sedang
Kota Semarang	73	sedang
Kota Magelang	73	sedang
Kota Tegal	73	sedang
Brebes	71	sedang
Temanggung	70	sedang
Purworejo	69	sedang
Grobogan	68	sedang
Pekalongan	68	sedang
Sukoharjo	67	sedang
Rembang	66	sedang
Sragen	66	sedang
Kudus	66	sedang
Banyumas	63	sedang
Wonogiri	63	sedang
Surakarta	61	sedang
Pemalang	60	sedang
Kendal	60	sedang
Magelang	60	sedang
Semarang	60	sedang
Salatiga	60	sedang
Demak	58	sedang
Banjarnegara	58	sedang
Kebumen	56	sedang
Karanganyar	56	sedang
Wonosobo	50	sedang
Tegal	46	buruk

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng, 2022

f. Energi dan sumber daya mineral

Sistem ketenagalistrikan Jawa Tengah ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi antar Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Jawa Tengah tidak hanya ditopang oleh pembangkit yang ada di Jawa Tengah namun juga Jawa Barat, Jawa Timur, Madura dan Bali. Sistem ketenagalistrikan di Jawa Tengah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem di Pulau Jawa, Pulau Madura dan Pulau Bali yang terhubung secara interkoneksi dengan Saluran Udara Tegangan

Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV. kecuali wilayah di Kepulauan Karimunjawa. Wilayah Kepulauan Karimunjawa merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang tidak terhubung dengan sistem JAMALI karena merupakan pulau berlistrik mandiri (Isolated). Pasokan energi di Karimunjawa disuplai oleh PLTD Legon Bajak dengan kapasitas sebesar 2 x 2,2 MW sehingga mulai tahun 2016 penduduk di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan sudah dapat menikmati listrik 24 jam. Selain itu berdasarkan nota kesepahaman antara PLN dan Pemkab Jepara tentang pengalihan pengelolaan kelistrikan di Pulau Karimunjawa pada tanggal 21 Juli 2022, pengelolaan kelistrikan di Pulau Parang, Genting, dan Nyamuk, Kecamatan Karimunjawa telah di ambil alih PLN. Pulau Parang disupply oleh PLTS eksisting sebesar 135,8 KWp dan diesel 350 KVA, melayani pelanggan sebanyak 342KK. Pulau Nyamuk dengan kapasitas PLTS 111KWp dan diesel 100KVA melistriki 177KK serta Pulau Genting disupply oleh PLTS sebesar 36 KWp dan diesel 30KVA melistriki 86 KK. Rencana kedepan PLN melalui Program dedieselisasi, pada tahun 2023 untuk ketiga pulau tersebut akan dilakukan penambahan kapasitas PLTS, Pulau Parang sebesar 645KWp, Pulau Nyamuk sebesar 345KWp dan Pulau Genting sebesar 155KWp. Diharapkan setelah dilakukan penambahan kapasitas PLN, maka diesel sudah tidak digunakan lagi dan 3 pulau tersebut menggunakan green energy. Karimunjawa diharapkan menuju *Green Tourism* di Jawa Tengah.



Sumber: PLN, 2022

Gambar 2.84.
Sistem Ketenagalistrikan Jawa Tengah dan DIY

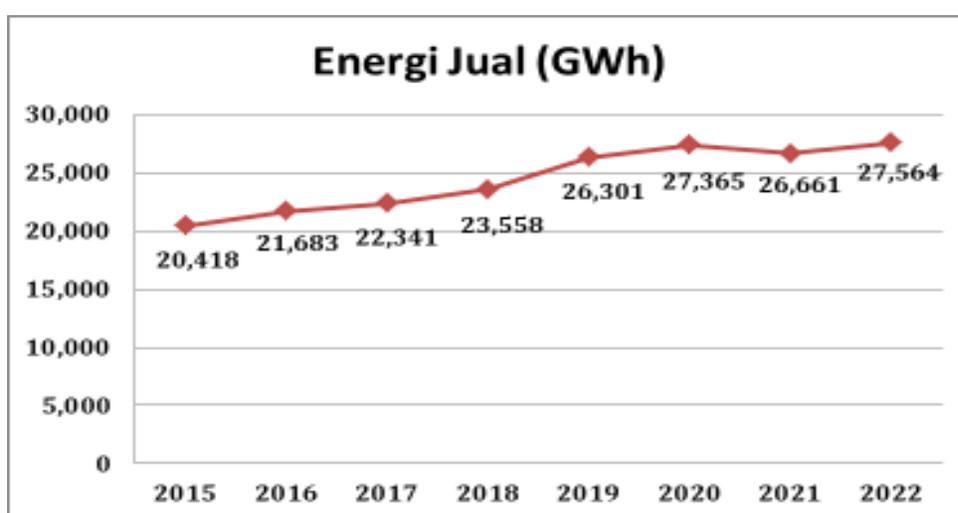
Kelistrikan Jawa Tengah dan DIY disuplai dari 6 subsistem, antara lain : Subsistem Ungaran 1-2, Subsistem Pedan 1-2, Subsistem Pedan 3-4, Subsistem Tanjung Jati, Subsistem Kesugihan, dan Subsistem Pemalang. Beban Puncak Sistem Jateng dan DIY sebesar 4851 MW dengan reserve power sebesar 2621 MW.

Selain itu terdapat beberapa pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun dan sedang dibangun di Jawa Tengah dalam rangka mendukung

Program Listrik 35.000 MW secara nasional. Progress pembangunan pembangkit interkoneksi di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022, yaitu:

- 1) PLTU Jawa Tengah/ PLTU Batang (2x1000 MW): *overall progress* 100 persen (per Desember 2022); telah COD Unit 1 pada 15 Agustus 2022 dan Unit 2 pada 31 Agustus 2022;
- 2) PLTU Jawa 4/ PLTU Tj. Jati B Unit 5 dan 6 (2x1.000 MW): *overall progress* 100 persen (per Desember 2022); telah COD Unit 5 pada 17 Maret 2022 dan Unit 6 pada 30 September 2022;
- 3) PLTGU Jawa-Bali 1/ Tambaklorok (779 MW): *overall progress* 90,83 persen (per Desember 2022); Rencana COD pada 26 Juni 2023 (*estimated*).

Seiring dengan peningkatan kapasitas daya listrik terpasang berbanding lurus dengan konsumsi energi listrik di Jawa Tengah. Selama kurun waktu 2015 hingga 2021 menunjukkan peningkatan konsumsi energi listrik dari 20.418 GWh pada tahun 2015 menjadi 27.365 GWh pada tahun 2020, yang kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 26.661 GWh. Meskipun demikian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 27.564 GWh.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.85.
Konsumsi Energi Listrik di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015 - 2022 (GWh)

Selain itu peningkatan kebutuhan energi listrik juga terlihat dari Konsumsi listrik per kapita. Selama kurun waktu 2021 hingga tahun 2022 mengalami trend peningkatan dari 725,62 menjadi 745,59 kWh per Kapita. Konsumsi listrik perkapita erat kaitanya dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi konsumsi listrik perkapita disuatu daerah maka semakin tinggi juga potensi kesejahteraan di daerah tersebut. Konsumsi Listrik di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Menurut data dari PLN UID Jateng DIY, konsumsi listrik Jawa Timur sudah mencapai 907 kWh/kapita, Jawa Barat sebesar 1.012 kWh/kapita, dan DKI Jakarta telah mencapai 3.248 kWh/kapita. Dengan demikian, potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan. Tidak hanya mendorong pemanfaatan untuk kegiatan konsumtif tetapi utamanya juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif.

Tahun 2021 rasio elektrifikasi Jawa Tengah sebesar 99,88 persen sehingga masih terdapat 0,12 persen KK belum berlistrik. KK belum berlistrik tersebut sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Perkembangan rasio

elektrifikasi selama tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.169.
Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Elektrifikasi (%)	98,52	99,88	99,88	99,88	99,88
2.	Sambungan Listrik Murah	13.092	27.225	40.173	55.280	78.955

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kecukupan pemenuhan listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Rasio Ketersediaan Daya Listrik yang merupakan perbandingan daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan. Idealnya Rasio Ketersediaan Daya Listrik menunjukkan angka 1 atau 100 persen yaitu menunjukkan bahwa antara daya terpasang sesuai dengan jumlah kebutuhan listrik.

Tabel 2.170.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Daya Listrik Terpasang (MW)	6.325,24	6.365	7.203	7.203	9.200
2	Kebutuhan Listrik (MW)	5.635	5.480	5.588	5.720	6.306
3	Rasio Ketersediaan Daya Listrik (angka)	1,12	1,16	1,29	1,26	1,46

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa pasokan listrik di Jawa Tengah sangat memadai bahkan memiliki reserve margin/cadangan sebesar 46 %. Reserve margin yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru khususnya di Kawasan Industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya Batang Industrial Park (KI Segayung), Grand Batang City (KIT Batang), KI Kendal (KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas Export Processing Zone (Lamicitra Nusantara), KI Terboyo, LIK Bugangan Baru Semarang, Jatengland Industrial park Sayung, KI Candi, Taman Industri BSB, dan KI Cilacap. Tantangan Ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi ditribusinya dan keberlanjutan dari sisi produksi energi listriknya.

Jawa Tengah masih memiliki ketergantungan pada energi fosil. Hal tersebut terlihat dari jumlah persentase penggunaan energi fosil sebesar 86,62 persen pada tahun 2021 yang berdampak masih tingginya emisi gas rumah kaca di Jawa Tengah. Akan tetapi, peta jalan Provinsi Jawa Tengah terkait transisi energi menuju energi baru terbarukan ada dalam Perda RUED Provinsi Jateng No 12 Tahun 2018. Dalam perda tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah menargetkan persentase EBT dalam bauran energi sebesar 21,32% tahun 2025 dan 28,82% di tahun 2050. Kolaborasi multi-pihak, yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/provinsi menjadi kebutuhan bersama dan masing-masing pihak punya resources dan capacity yang bisa dikontribusikan untuk menyiapkan fasilitas energi terbarukan. Dalam hal ini semua pihak memberikan kontribusi sesuai kewenangan.

Walaupun penggunaan energi fosil masih relatif tinggi tetapi penggunaan EBT menunjukkan trend positif setiap tahunnya. Persentase pemanfaatan energi

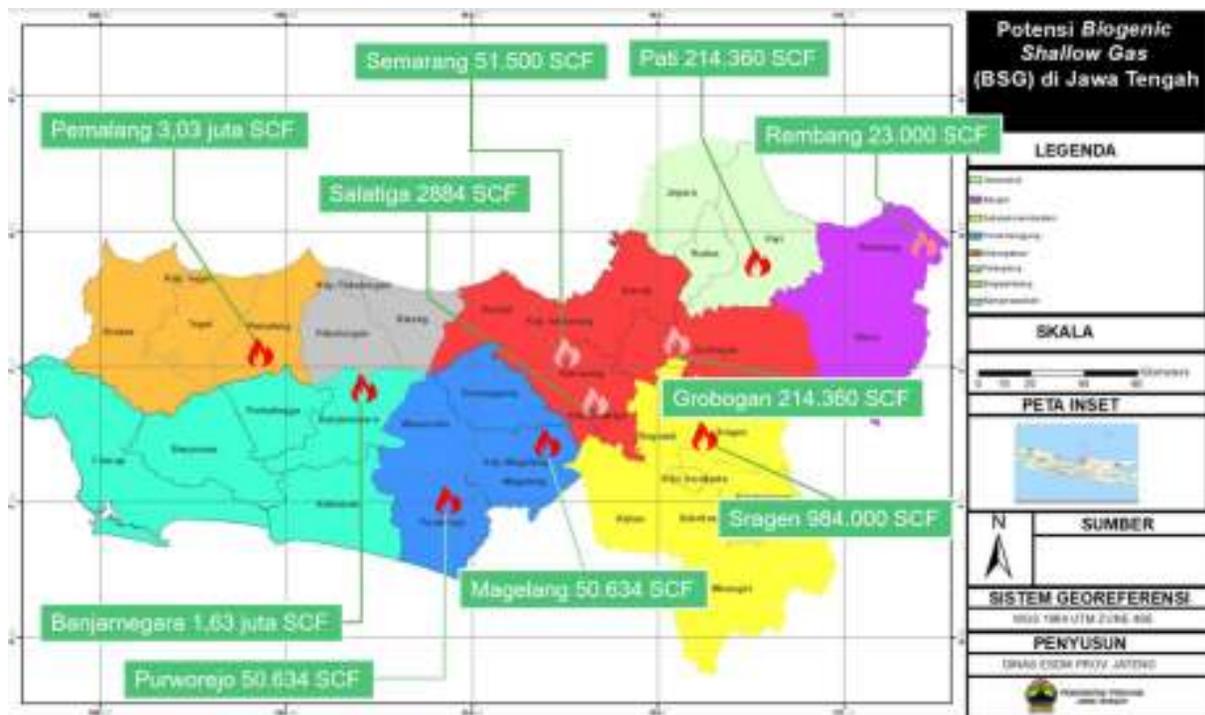
baru terbarukan dalam bauran energi, hingga akhir Tahun 2022 telah mencapai 15,76% dari kondisi awal pada tahun 2014 sebesar 7,01%. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus tetap mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan yaitu EBT, mengingat potensi EBT di Jawa Tengah cukup banyak, antara lain energi surya, air, biogas, waste to energy (biomassa), gas rawa, dan panas bumi. Peta Potensi EBT di Jateng dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, dan IESR 2022

Gambar 2.86.
Potensi Teknis PLTS Terapung di Jawa Tengah

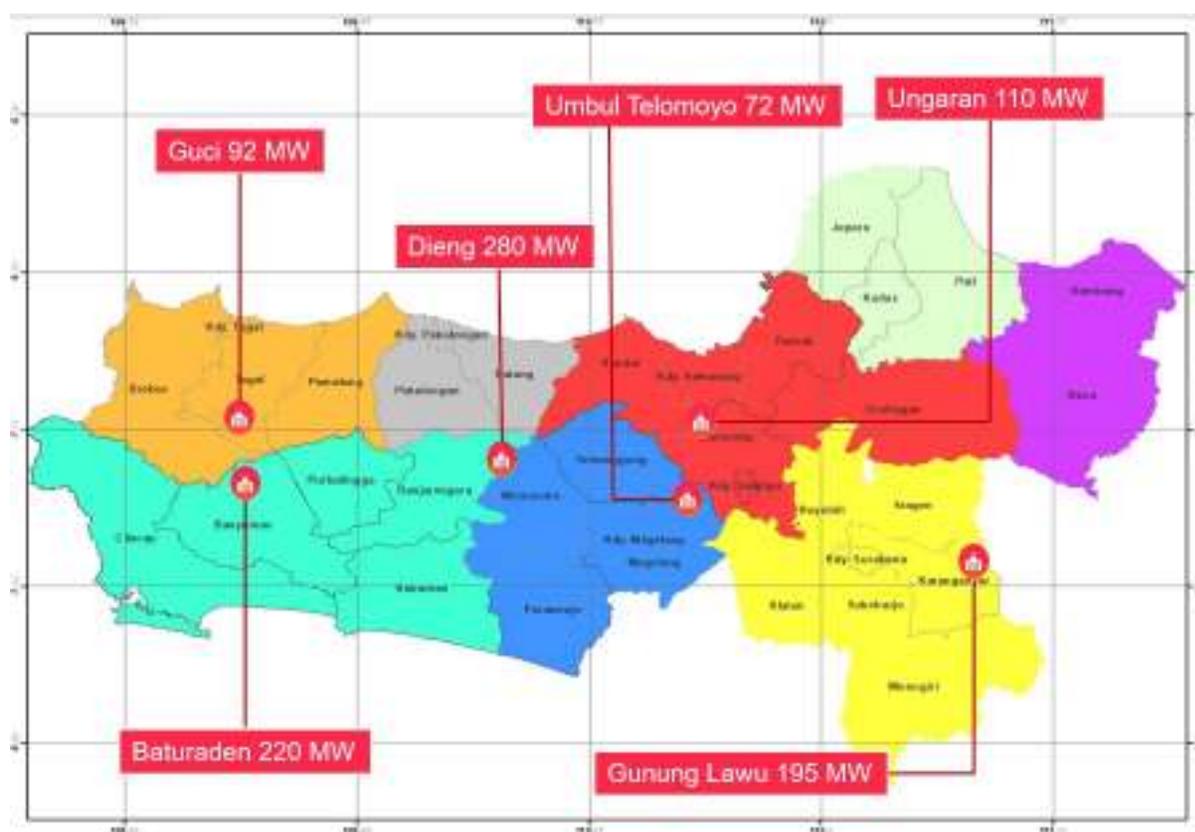
Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya terapung di Jawa Tengah mencapai 723,07 MWp. Dua Bendungan dengan potensi terbesar adalah Kedung Ombo dan Gajahmungkur. Kedua bendungan tersebut telah masuk dalam RUPTL PLN 2021-2030 sebagai pembangkit yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.87.
Potensi Biogenic Shallow Gas (Gas Rawa) di Jawa Tengah

Total potensi BSG yang diketahui di Jawa Tengah adalah sekitar 14,47 juta SCF (Standart Cubic Feet). Potensi terbesar terpetakan di Kabupaten Pemalang dengan 3,03 juta SCF dan terendah dideteksi di Kota Salatiga sebesar 2.884 SCF. Potensi lainnya tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan variasi besaran potensi cadangan gas rawa (lihat gambar Peta Potensi BSG). Potensi yang besar dapat menjadikan pergeseran gas rawa sebagai sumber energi primer yang dapat secara langsung digunakan dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat sehari-hari. Bentuk optimalisasi sumber daya gas rawa ini, terlihat pada kegiatan pembangunan infrastruktur instalasi gas rawa (biogenic shallow gas) di Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini telah tersebar pada 6 titik lokasi di 4 kabupaten dengan jumlah jangkauan sambungan sebanyak 340 sambungan rumah.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.88.
Potensi Panas Bumi di Jawa Tengah

Jawa Tengah juga memiliki potensi panas bumi cukup besar. Potensi panas bumi yang diperkirakan dapat dikembangkan di Jawa Tengah mencapai 1.981 MW. Potensi panas bumi yang sudah dimanfaatkan di Jawa Tengah sebagai pembangkit adalah di PLTPanas Bumi Dieng dengan kapasitas 70 MW. Baru 3,53 % yang telah termanfaatakan dari total potensi. Pengembangan potensi panas bumi menjadi prioritas karena diharapkan akan menambah pasokan energi listrik berbasis EBT di Jawa Tengah. Melalui pengembangan dan pemanfaatan EBT ini, maka diharapkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terutama dari sektor energi dapat ditekan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menurunkan emisi GRK sektor energi dari 24.512 tCO₂e pada tahun 2019 menjadi 123.401 tCO₂e tahun 2023 adalah melalui pembangunan infrastruktur EBT. Perkembangan persentase EBT dalam bauran energi selama tahun 2014-2022 sebagai berikut:



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.89.
Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2022

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, upaya dalam penurunan emisi gas rumah kaca, antara lain melalui pelaksanaan penghargaan Desa Mandiri Energi, Hemat Energi dan Air, dan Audit Energi. Penghargaan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pemerintah Desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan diversifikasi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah. Adapun upaya konservasi energi diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan penghargaan Gerakan Hemat Energi dan Air serta audit energi. Gerakan Hemat Energi dan Air menjadi sebuah tindakan promotif untuk mendorong peran serta pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor Industri dalam menggerakkan perilaku budaya hemat energi dan air di masa yang akan datang serta mendorong upaya konservasi energi untuk menjaga ketahanan energi. Sedangkan kegiatan Audit Energi dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik gedung, baik instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan konservasi energi.

Sebagai motor penggerak peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan diperlukan langkah strategis untuk mengajak peran serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi daerah, melalui program penyuluh energi. Program penyuluh energi bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih, memakai, mengembangkan energi baru terbarukan yang tersedia dan berpotensi di sekitarnya, sehingga akan ada perubahan perilaku masyarakat dari penggunaan energi konvensional (energi fosil) sebagai sumber energi utama menjadi pemanfaatan energi baru terbarukan serta memberikan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan pengelolaan energi di daerah. Adanya program penyuluh energi dapat menjadi katalis terwujudnya desa mandiri energi di Jawa Tengah. Capaian Desa Mandiri Energi (DME) sampai dengan tahun 2022 sejumlah 2.353 desa, yang kemudian berdasarkan tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni DME Inisiatif dengan kondisi eksisting 2.167 desa, DME Berkembang dengan kondisi eksisting 160 desa, dan DME Mapan dengan kondisi eksisting 26 desa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Energi maupun Hemat Energi dan Air perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengembangan pemanfaatan EBT di desa tersebut.

Pengembangan suatu wilayah dan pembangunan di berbagai sektor akan mempengaruhi keberadaan air tanah dan siklus air tanah. Penggunaan air yang tidak sesuai kebutuhan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan mengakibatkan potensi air tanah semakin berkurang. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Indeks Ketersediaan Air Tanah Jawa Tengah cenderung menurun secara fluktuatif selama kurun waktu 2016 hingga 2020, sedangkan pada tahun 2022 meningkat.

Tabel 2.171.

Indeks Ketersediaan Air Tanah di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah potensi aman pengambilan air tanah	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750	820.185.750
Jumlah pengam-bilan air tanah	267.633.695	263.724.945	269.109.632	228.463.997	223.483.855
Indeks Ketersediaan Air Tanah	3,06	3,08	3,05	3,59	3,67

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan tabel di atas kecenderungan ketersediaan air tanah meningkat, yang menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku yang bersumber dari air permukaan bisa dikatakan juga meningkat. Potensi Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah cukup memadai, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.37. Jawa Tengah memiliki 31 Cekungan Air Tanah (CAT), yang terdiri dari 6 CAT merupakan lintas provinsi, 19 CAT lintas kabupaten/kota (merupakan kewenangan provinsi), dan 6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota. Potensi air tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah selengkapnya ditunjukkan tabel di bawah.

Tabel 2.172.

Potensi Air Tanah pada 31 CAT di Jawa Tengah

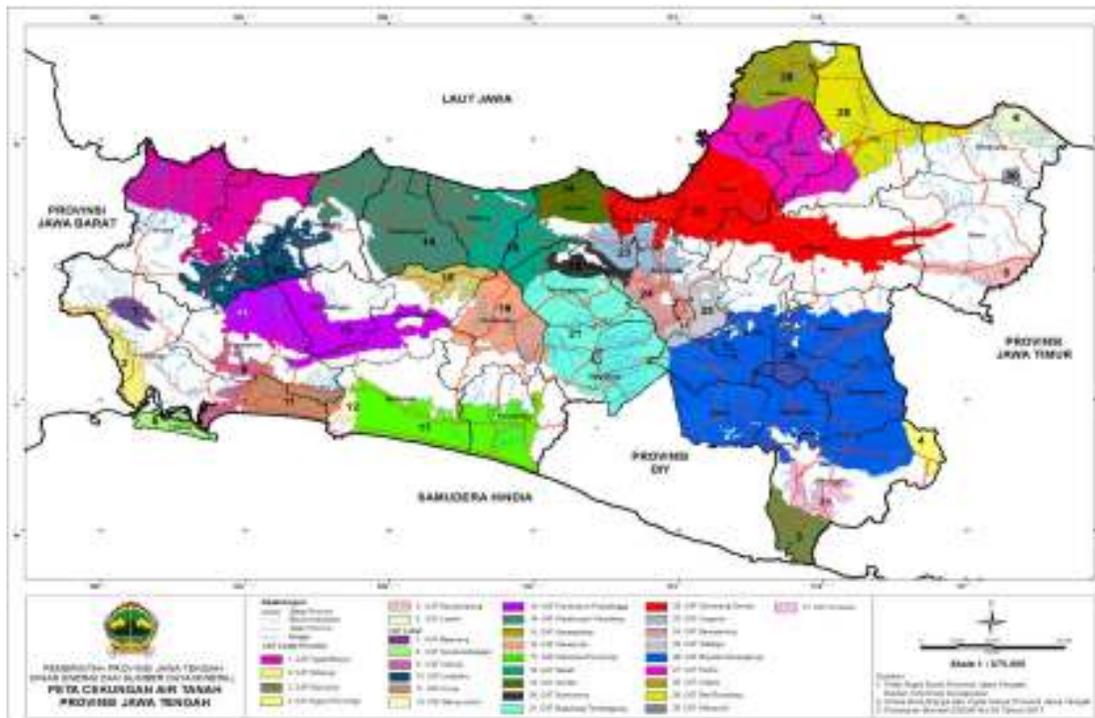
Jumlah CAT	Potensi Air Tanah (Juta m ³ /tahun)	
	Bebas	Tertekan
19 CAT lintas kab/kota	6.575,64	140,70
6 CAT lokal (kabupaten)	355,20	5,80
6 CAT lintas provinsi	411,15	11,30
Jumlah Total	7.341,99	157,80

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pada 25 Cekungan Air Tanah di Jawa Tengah yang berada di CAT dalam Provinsi, 21 CAT telah disusun zona pemanfaatan dan konservasi, yang berdasarkan Permen ESDM No. 31 Tahun 2018 tentang Penyusunan Zona Konservasi Air Tanah. Zona Konservasi Air Tanah dibagi menjadi 4 kategori, yaitu zona imbuhan air tanah, zona aman, zona rawan, zona kritis, zona rusak. Dari 21 CAT yang telah disusun zona pemanfaatan dan konservasi air tanah, terdapat 3 CAT yang masuk zona kritis serta 2 CAT yang masuk zona rusak. 3 CAT yang terdapat Zona Kritis adalah pada CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali. Sedangkan 2 CAT yang terdapat zona

rusak adalah CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang. Kondisi CAT Semarang-Demak, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Karanganyar-Boyolali yang terdapat zona kritis dan rusak disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- a. Kondisi kualitas air tanah yang memiliki nilai daya hantar listrik (DHL) tinggi, >1000 $\mu\text{s}/\text{cm}$, serta nilai zat terlarut (TDS) >1500 ppm;
- b. Kondisi muka air tanah mengalami penurunan kedudukan >40% dari kedudukan awal.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2021

Gambar 2.90.
Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah

Dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air tanah maka diperlukan konservasi air tanah berupa pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah. Pentingnya konservasi air tanah belum banyak disosialisasikan dalam bentuk visualisasi meskipun upaya visualisasi telah dilakukan kepada masyarakat khususnya generasi muda, melalui penghargaan Hemat Energi dan Air di sekolah-sekolah, sebagai upaya membudayakan hemat pemakaian air.

Kedepan penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah periode 2024 sampai dengan 2026 menggunakan penilaian baru yang lebih detail, yaitu terkait dengan faktor pengambilan air tanah. Pada periode 2018 sampai dengan 2023, penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah untuk faktor pengambilan hanya menggunakan parameter jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin saja. Pada periode 2024 sampai dengan 2026 untuk penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah, faktor pengambilan akan menggunakan parameter sebagai berikut :

- Jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin;
- Jumlah pengambilan air tanah dari yang tidak berizin;
- Jumlah pengambilan air tanah dari penduduk non PDAM.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk menjaga ketersediaan air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah. Pemanfaatan air tanah dapat dilakukan antara lain melalui pembangunan sumur bor/eksplorasi, sumur resapan/dangkal, dan sumur pantau. Sumur bor/eksplorasi bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, sehingga

prioritas sasaran pada daerah rawan kekeringan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan dari 8.569 desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 7 Desa/Kelurahan termasuk dalam Kelas Bahaya Tinggi kekeringan dan 2.809 Desa/Kelurahan masuk pada Kelas Bahaya Sedang kekeringan.

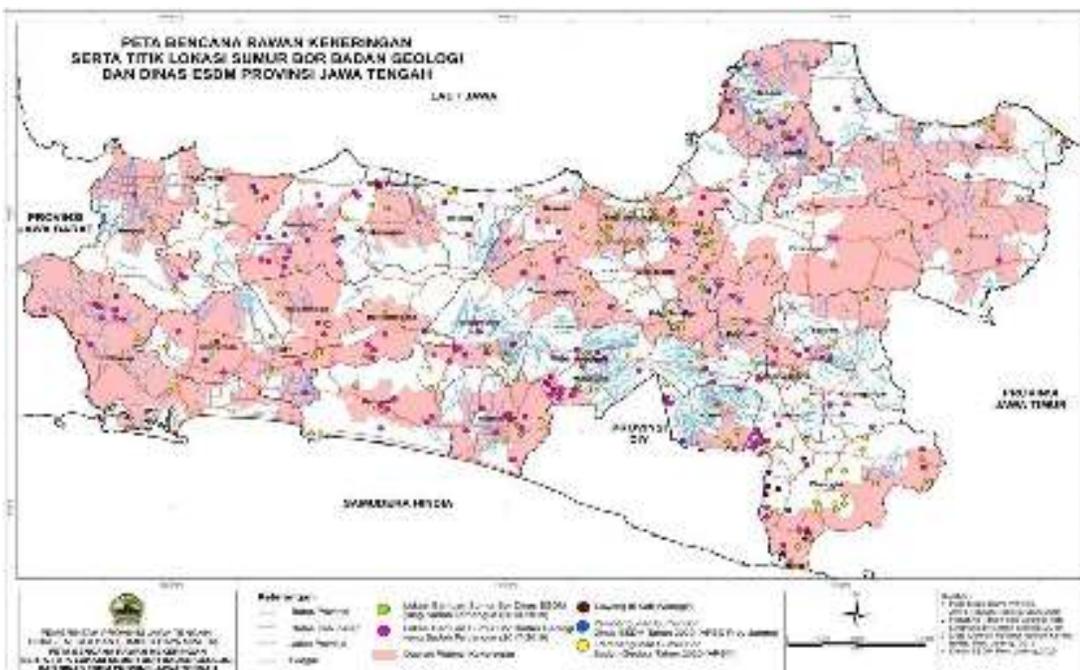
Tabel 2.173.

Potensi Ancaman Kekeringan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah

PROVINSI JAWA TENGAH JUMLAH DESA/KELURAHAN : 8.569	
KELAS BAHAYA TINGGI	7 DESA/KELURAHAN
KELAS BAHAYA SEDANG	2.809 DESA/KELURAHAN

Sumber : Katalog Desa/Kelurahan Rawan Kekeringan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2019

Selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2020, Dinas ESDM Provinsi telah membangun sebanyak 92 unit sumur di 27 kabupaten/kota, 69 kecamatan, dan 85 desa/kelurahan, sehingga meningkatkan akses air tanah untuk masyarakat di daerah rawan kekeringan. Peta sebaran lokasi bantuan sumur bor untuk daerah rawan kekeringan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2021

Gambar 2.91.

Peta Titik Lokasi Sumur Bor Badan Geologi dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah overlay dengan Peta Bencana Rawan Kekeringan

g. Penanggulangan Bencana

1) Wilayah Rawan Bencana

- a) Kawasan Potensi Bahaya Banjir, Banjir didefinisikan sebagai kenaikan drastis dari aliran sungai, kolam, danau, dan lainnya, dengan kelebihan aliran tersebut menggenangi keluar dari tubuh air (Smith & Ward 1998). Apabila suatu peristiwa terendahnya air di suatu wilayah yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis maka banjir tersebut dapat disebut Bencana Banjir. Berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian

genangan. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 935.504 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu kelas bahaya dengan kelas rendah seluas 19.340 Ha, kelas sedang seluas 469.909 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi seluas 446.255 Ha.

Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.384 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 47.626 Ha. Sedangkan pada kelas tinggi adalah Kabupaten Demak dengan luas 53.960 Ha.

Kabupaten/kota dengan potensi bahaya banjir tinggi meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal.

- b) Kawasan Potensi Bahaya Banjir Bandang, Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai. Ukuran bahaya banjir bandang mengacu pada Pedoman Pembuatan Peta Rawan Longsor dan Banjir Bandang akibat runtuhnya bendungan alam yang dibuat oleh Kementerian PU (2012) yaitu asumsi ketinggian genangan banjir bandang setinggi 5 meter.

Potensi luas bahaya banjir bandang dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kota yang terdampak bahaya banjir bandang.

Potensi luas bahaya banjir bandang berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah seluas 104.332 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.678 Ha, kelas sedang seluas 32.757 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 58.897 Ha.

Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah, sedang dan tinggi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 1.465 Ha, 4.746 Ha dan 9.574 Ha.

- c) Kawasan Potensi Bahaya Cuaca ekstrim, Cuaca ekstrim merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini pembahasan cuaca ekstrim lebih dititikberatkan kepada angin kencang. Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB).

Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus angin kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya angin kencang.

Potensi bahaya cuaca ekstrim pada tabel tersebut di atas memaparkan jumlah luas kabupaten/kotayang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Jawa Tengah terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah seluas 2.832.304 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas rendah seluas 997.704 Ha, pada kelas sedang seluas 324.567 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 1.510.033 Ha.

Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah dengan luas 84.966 Ha adalah Kabupaten Blora. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas sedang dengan luas 37.207 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 104.032 Ha adalah Kabupaten Grobogan.

- d) Kawasan Potensi Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Perka No. 2 BNPB Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai.

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari kabupaten/kotayang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Jawa Tengah adalah 15.705 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Potensi luas bahaya tersebut meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 8.891 Ha, pada kelas sedang seluas 2.282 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 4.532 Ha. Sebaran luas bahaya di Provinsi Jawa Tengah untuk untuk kabupaten/kota terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi,

dimana Kabupaten Cilacap memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas rendah, yaitu seluas 1.632 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas sedang adalah Kabupaten Jepara dengan luas 1.684 Ha, Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi pada kelas tinggi adalah Kabupaten Cilacap, yaitu 1.027 Ha.

- e) Kawasan Potensi Bahaya Gempa Bumi, Gempabumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi, atau runtuhnya batuan (BNPB). Metode kajian untuk gempabumi pada dokumen ini menggunakan data guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan. Konversi ini dilakukan karena gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal. potensi luas bahaya gempabumi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terpapar bencana gempabumi. Potensi bahaya gempabumi tersebut merupakan luasan kabupaten/kota yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempabumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan total luas bahaya kabupaten/kota. Sedangkan kelas bahaya gempabumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terdampak bahaya gempabumi. Potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya gempabumi tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.793.772 Ha, kelas sedang seluas 451.437 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya gempa bumi pada kelas tinggi seluas 31.898 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.103 Ha. Kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas sedang dengan luas 68.662 Ha adalah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya gempabumi pada kelas tinggi seluas 17.341 Ha adalah Kabupaten Klaten.
- f) Kawasan Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Peraturan Menteri Kehutanan No P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia. Analisis bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkembang adalah analisis multi-kriteria yang menggabungkan beberapa parameter yang memiliki hubungan sebagai faktor penyebab terjadinya ancaman karhutla.

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya di Provinsi Jawa

Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 963.331 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 304.437 Ha, kelas sedang seluas 548.759 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas tinggi seluas 110.135 Ha.

- g) Kawasan Potensi Bahaya Kekeringan, Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) yang dikembangkan oleh Vicente-Serrano dkk pada tahun 2010. Penentuan kekeringan dengan SPEI membutuhkan data curah hujan dan suhu udara bulanan dengan periode waktu yang cukup panjang. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Thornthwaite, maka data suhu yang digunakan adalah hanya suhu bulanan rata-rata. Potensi bahaya kekeringan dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan. Total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdampak bencana kekeringan. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya kekeringan tersebut dirinci menjadi kelas sedang seluas 2.336.056 Ha dan kelas tinggi seluas 941.051 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 196.387 Ha adalah Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas tinggi seluas 107.775 Ha.
- h) Kawasan Potensi Bahaya Tanah Longsor, Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Potensi luas bahaya tanah longsor dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Jawa

Tengah secara keseluruhan adalah 1.020.772 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya tanah longsor tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 78.622 Ha, kelas sedang seluas 207.456 Ha dan kelas tinggi seluas 734.693 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas rendah adalah Kabupaten Semarang dengan luas 5.959 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor pada kelas sedang adalah Kabupaten Wonosobo dengan luas 24.364 Ha. Pada kelas tinggi, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tanah longsor adalah Kabupaten Wonogiri dengan luas 62.658 Ha.

- i) Kawasan Potensi Bahaya Tsunami, Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivasi tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi. Ukuran bahaya tsunami yang dikaji adalah pada seberapa besar potensi inundasi (genangan) di daratan berdasarkan potensi ketinggian gelombang maksimum yang tiba di garis pantai. Penentuan tingkat bahaya tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman (2006) berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi (ketinggian genangan), nilai jarak terhadap lereng dan kekasaran permukaan. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya tsunami pada kelas rendah seluas 3.447 Ha, pada kelas sedang seluas 2.827 Ha, dan pada kelas tinggi dengan luas 19.372 Ha.
- j) Kawasan Potensi Bahaya Epidemik, Epidemik adalah suatu keadaan yang menunjukkan kejadian penyakit meningkat dalam waktu singkat dan penyebarannya telah mencakup wilayah yang luas. Wabah adalah kejadian suatu penyakit menular yang meningkat secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Jadi secara harfiah dalam konteks potensi bencana, Epidemik dan Wabah Penyakit (EWP) merupakan potensi ancaman bencana non-alam yang diakibatkan oleh kejadian suatu penyakit menular pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat menimbulkan dampak (risiko) kematian dan gangguan aktivitas masyarakat. Metode yang digunakan dalam penyusunan peta bahaya EWP adalah metode skoring dan pembobotan terhadap parameter berbasis wilayah administrasi kecamatan. Parameter yang digunakan untuk penyusunan peta bahaya EWP adalah terjadinya kepadatan atau prevalensi dari bahaya EWP (berdasarkan data yang tersedia secara nasional), yaitu: Malaria, Demam Berdarah, Campak, Difteri, dan Hepatitis. sebaran luas bahaya epidemik dan wabah penyakit di Provinsi Jawa Tengah untuk kabupaten/kota terdampak bencana epidemik dan wabah penyakit. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya epidemik dan wabah penyakit pada kelas rendah adalah Kabupaten Grobogan dengan luas 201.386 Ha.
- k) Kawasan Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi, Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri. Berdasarkan parameter-parameter tersebut, diperoleh hasil pengkajian bahaya kegagalan teknologi yang meliputi luas bahaya terdampak kegagalan teknologi. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi

pada kelas rendah adalah Kabupaten Boyolali seluas 3.607 Ha dan Kabupaten Cilacap adalah wilayah yang memiliki luas tertinggi bahaya kegagalan teknologi pada kelas sedang dengan luas 375 Ha.

- l) Kawasan Potensi Bahaya Covid-19, Penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan pandemi global dan telah dinyatakan oleh WHO, sehingga merupakan suatu isyarat bahwa dalam menghadapi pandemi ini segala focus kebijakan dan rekomendasi pencegahan harus diprioritaskan. Apalagi wabah penyakit Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara berdasarkan bukti ilmiah (Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/413/2020). Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan penilaian risiko meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari penilaian risiko ini diharapkan dapat digunakan untuk menentukan rekomendasi penanggulangan kasus Covid-19. Potensi luas bahaya Covid-19 adalah 3.277.108 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Covid-19 tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 2.346.083 Ha, kelas sedang seluas 605.417 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya Covid-19 pada kelas tinggi seluas 325.608 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas rendah adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 190.358 Ha. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Covid-19 pada kelas sedang seluas 50.337 Ha dan pada kelas tinggi seluas 33.967 Ha adalah Kabupaten Wonogiri.
- m) Kawasan Potensi Bahaya Likuefaksi, Likuefaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/infrastruktur yang lebih besar. Potensi luas bahaya likuefaksi dari tabel di atas merupakan luasan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana likuefaksi berdasarkan kajian bahaya. Total luas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak likuefaksi, sedangkan kelas bahaya Provinsi Jawa Tengah ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah kabupaten/kota terdampak. Total luas bahaya likuefaksi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 729.062 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya likuefaksi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 49.145 Ha, kelas sedang seluas 641.289 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya likuefaksi pada kelas tinggi adalah seluas 38.627 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuefaksi pada kelas rendah dengan luas 15.054 Ha dan pada kelas tinggi dengan luas 16.881 Ha adalah Kabupaten Cilacap. Sedangkan pada kelas sedang, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya likuefaksi adalah Kabupaten Brebes dengan luas 65.705 Ha.
- n) Kawasan Potensi Bahaya Gunungapi, Gunungapi dibedakan menjadi bahaya primer (langsung) dan bahaya sekunder (tidak langsung). Bahaya primer merupakan bahaya yang diakibatkan secara langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: aliran lava, awan panas, jatuhnya piroklastik (lontaran batu pijar dan hujan abu), gas beracun, dan lahar

erupsi. Sedangkan, bahaya sekunder merupakan bahaya yang diakibatkan secara tidak langsung oleh produk erupsi gunungapi, yaitu: lahar dan longsor gunungapi.

- ✓ Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 3.816 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Dieng tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.168 Ha, kelas sedang seluas 2.054 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Dieng pada kelas tinggi seluas 594 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya letusan gunungapi pada kelas rendah seluas 1.059 Ha, kelas sedang seluas 1.304 Ha dan kelas tinggi seluas 568 Ha adalah Kabupaten Banjarnegara.
- ✓ Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 10.116 Ha dan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya Letusan Gunungapi Lawu tersebut dirinci menjadi 2 (dua) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 5.546 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas sedang seluas 4.570 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Lawu pada kelas rendah seluas 4.652 Ha, dan kelas sedang seluas 4.570 Ha adalah Kabupaten Karanganyar.
- ✓ Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 28.239 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Merapi tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 12.441 Ha, kelas sedang seluas 8.182 Ha, dan kelas tinggi seluas 7.616 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas rendah seluas 7.957 Ha adalah Kabupaten Boyolali. Sedangkan Kabupaten Magelang adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merapi pada kelas sedang dengan luas 3.930 Ha dan kelas tinggi seluas 5.275 Ha.
- ✓ Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 19.819 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Merbabu tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 11.474 Ha, kelas sedang seluas 5.820 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas tinggi seluas 2.526 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Merbabu pada kelas rendah seluas 4.790 Ha, kelas sedang seluas 3.163 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.358 Ha adalah Kabupaten Boyolali.
- ✓ Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 22.740 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Slamet tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14.631 Ha, kelas sedang seluas 6.288 Ha, dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 1.820 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas rendah seluas 3.905 Ha dan kelas sedang seluas 2.533 Ha adalah Kabupaten Banyumas. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Slamet pada kelas tinggi seluas 723 Ha adalah Kabupaten Pemasang.

- ✓ Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbingdi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 25.650 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Sumbing tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas16.553 Ha, kelas sedang seluas7.876 Ha,dan daerah yang terdampak bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas tinggi seluas 1.221 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sumbing pada kelas rendah seluas6.681 Ha, pada kelas sedang seluas 4.443 Ha dan kelas tinggi seluas 563 Ha adalah Kabupaten Temanggung.
- ✓ Potensi luas bahayaLetusan Gunungapi Sundorodi Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan adalah 23.580 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Sundoro tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.468 Ha, kelas sedang seluas 8.372 Ha, dan kelas tinggi seluas 1.739 Ha. Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sundoro pada kelas rendah dengan luas 8.236 Ha dan kelas tinggi seluas 981 Ha adalah Kabupaten Wonosobo. Sedangkan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Sundoro pada kelas sedang adalah Kabupaten Temanggung dengan luas 4.474 Ha.
- ✓ Potensi luas bahaya Letusan Gunungapi Ungarandi ProvinsiJawa Tengahsecara keseluruhanseluas15.404Hadan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya Letusan Gunungapi Ungaran tersebut dirinci menjadi 3 (tiga) kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 13.787 Ha, kelas sedang seluas 526 Ha dan kelas tinggi seluas 1.091 Ha. Kabupaten Semarang merupakan kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya Letusan Gunungapi Ungaran pada kelas rendah seluas 9.254 Ha, sedang seluas 312 Ha dan pada kelas tinggi seluas 617 Ha.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban terdampak bencana di Jawa Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.174.

Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
1	Banjarnegara	272	20	58	185	263
2	Banyumas	189	32	88	113	233
3	Batang	34	8	5	50	63
4	Blora	25	9	12	43	64
5	Boyolali	23	0	5	50	55
6	Brebes	79	56	25	286	367
7	Cilacap	215	40	44	444	528
8	Demak	23	8	34	322	364
9	Grobogan	82	47	24	133	204
10	Jebara	98	16	25	430	471
11	Karanganyar	30	13	21	102	136

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
12	Kebumen	75	7	7	197	211
13	Kendal	41	7	15	117	139
14	Klaten	45	2	11	36	49
15	Kota Magelang	17	1	1	21	23
16	Kota Pekalongan	8	0	0	0	0
17	Kota Salatiga	10	1	1	4	6
18	Kota Semarang	206	26	40	99	165
19	Kota Surakarta	18	1	4	2	7
20	Kota Tegal	21	3	0	0	3
21	Kudus	90	4	9	117	130
22	Magelang	259	10	32	316	358
23	Pati	54	27	11	640	678
24	Pekalongan	19	3	2	10	15
25	Pemalang	40	31	43	115	189
26	Purbalingga	22	4	10	140	154
27	Purworejo	15	1	1	15	17
28	Rembang	32	18	37	99	154
29	Semarang	39	12	9	34	55
30	Sragen	37	10	1	50	61
31	Sukoharjo	9	0	3	0	3
32	Tegal	45	162	181	236	579
33	Temanggung	134	9	72	126	207
34	Wonogiri	19	1	4	24	29
35	Wonosobo	115	22	34	60	116
	TOTAL	2.440	611	869	4.616	6.096

Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kejadian bencana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 2.396 kejadian di tahun 2022 menjadi 2.396 kejadian di tahun 2022. Selama periode tersebut, kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yang meliputi tanah longsor, angin topan, banjir dan kebakaran. Dari total desa/kelurahan di Jawa Tengah teridentifikasi sejumlah 1.674 desa/kelurahan (19,5 persen) dari total 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan (24,9 persen) rawan tanah longsor.

Tabel 2.175.

Kejadian Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018– 2022

	Jenis Bencana	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Angin topan	407	706	629	439	671
2	Banjir	171	171	459	242	374
3	Gas beracun	0	0	2	0	0
4	Gempa bumi	3	5	2	5	4
5	Kebakaran	589	718	356	229	312

	Jenis Bencana	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Kekeringan	0	30	0	0	0
7	Letusan gn.Api	5	2	12	5	1
8	Tanah longsor	5	18	387	0	1.010
9	Tsunami	0	0	0	0	0
10	Gelombang pasang	4	6	3	6	24
Jumlah		1.734	1.356	2.870	1.753	2.396

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data TW II Tahun 2022

Selama kurun waktu 2018-2022, kejadian bencana telah menimbulkan korban jiwa paling banyak diakibatkan oleh bencana tanah longsor, pada tahun 2022 saja terdapat 22 orang meninggal dunia, 27 luka berat dan 100 luka ringan.

Tabel 2.176.

Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban (Orang)			
		Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2018	1.734	39	4	17	124
2019	2.356	39	4	24	175
2020	2.909	32	3	15	91
2021	1.753	34	5	14	73
2022	2.440	22	2	27	100
Jumlah		166	18	97	563

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah,

Taksiran kerugian pada tahun 2018 hingga 2022 jumlah tingkat kerugian fluktuatif dan taksiran kerugian tertinggi terjadi akibat bencana Tanah longsor dengan kerugian Rp 7.052.281.000,- dan kerugian keseluruhan termasuk kebakaran pemukiman ditaksir sebesar Rp 234.248.846.000,-.

Tabel 2.177.

Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

No	Jenis Bencana	2018		2019		2020		2021		2022	
		Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)						
1	Angin Topan	407	5.445.666	706	15.367.598	NA	5.469.095	437	4.288.779	671	6.267.966
2	Banjir	171	2.924.463	171	2.777.845		32.798.305	242	44.106.000	374	2.367.000
3	Tanah Longsor	555	5.111.856	718	9.354.277		16.806.207	740	7.098.159	1.010	7.052.281
4	Kekeringan	-	-	30	0		0	0	0	0	0
5	Kebakaran	589	33.866.505	718	55.387.150		18.779.138	229	52.965.785	312	217.955.599
6	Gempa Bumi	3	65.000	5	65.000		0	5	0	4	0
7	Letusan Gunung Api	5	-	2	0		0	5	0	1	0
8	Ombak Besar	4	57.000	6	0		0	6	45.000	24	25.000
9	Lainnya	-	-	-	-		0	46	131.687,50	44	581.000
Jumlah		1.734	47.470.620	2.356	82.951.870	2.870	73.582.747	1.753	108.823.410,5	2.440	234.248.846

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2022



Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, data per tanggal 24 Desember 2022
 Sumber: BNPB, IRBI 2022

Gambar 2.92.

Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah mendasarkan indeks rawan dan risiko bencana yang diterbitkan BNPB termasuk provinsi dengan indeks bencana sedang. Indeks risiko bencana 2022 Provinsi Jawa Tengah pada urutan 10 dengan nilai skor 115,38 dengan kategori sedang, sedangkan untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Kabupaten Brebes mendapat urutan tertinggi untuk indeks risiko bencana dengan urutan 1 Provinsi Jawa Tengah dengan nilai skor 171,01 dan urutan 68 Nasional.

Tabel 2.178.

Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah

No.	Tahun	Skor	Kategori
1	2018	146,43	Tinggi
2	2019	144,91	Tinggi
3	2020	132,99	Sedang
4	2021	125,73	Sedang
5	2022	115,38	Sedang

Sumber: BNPB, IRBI 2022

Untuk menurunkan nilai indeks risiko bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan upaya mitigasi struktural maupun non-struktural. Upaya mitigasi struktural dilakukan antara lain melalui pemasangan sistem peringatan dini (early warning system/EWS) berbasis masyarakat dan penempatan rambu-rambu jalur evakuasi di lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2022, telah terpasang sebanyak 89 unit peralatan EWS dan 377 unit rambu jalur evakuasi.

Tabel 2.179.

Pemasangan EWS Dan Rambu Jalur Evakuasi Tahun 2018 – 2022

Tahun	EWS			Rambu Jalur Evakuasi
	BPBD	ESDM	Total EWS Terpasang (Akumulatif)	
2018	9	-	60	150
2019	15	-	75	230

Tahun	EWS			Rambu Jalur Evakuasi
	BPBD	ESDM	Total EWS Terpasang (Akumulatif)	
2020	1	-	76	-
2021	10	-	86	347
2022	3	-	89	377

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Implementasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang dilakukan oleh Jawa Tengah antara lain melalui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana. Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Dengan adanya Desa/kelurahan tangguh bencana, warga desa akan mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan, dan cara penanganannya. Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 132 desa, dari total seluruh desa/kelurahan sebanyak 8.562 desa/kelurahan di Jawa Tengah.

Tabel 2.180.
Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2016 – 2022

Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Terbentuk
2018	8	74 desa
2019	18	92 desa
2020	3	95 desa
2021	30	125 Desa
2022	7	132 Desa

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hadir dan berperan serta dalam pemulihan pasca bencana melalui pemberian bantuan akibat bencana di Provinsi Jawa Tengah yang diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2014. Dari 2018 hingga 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya membantu korban bencana meliputi rumah atau tempat usaha, rumah ibadah dan sarana prasarana yang musnah/terbakar habis atau roboh yang datanya dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.181.
Data Bantuan Tidak Terduga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah Kejadian	Roboh	Rusak Berat	Nominal
1	2019	9	277	34	4.495.000.000
2	2020	7	60	18	1.080.000.000
3	2021	7	206	122	4.310.000.000
4	2022	4	9	120	1.335.000.000
	Total	27	552	294	11.220.000.000

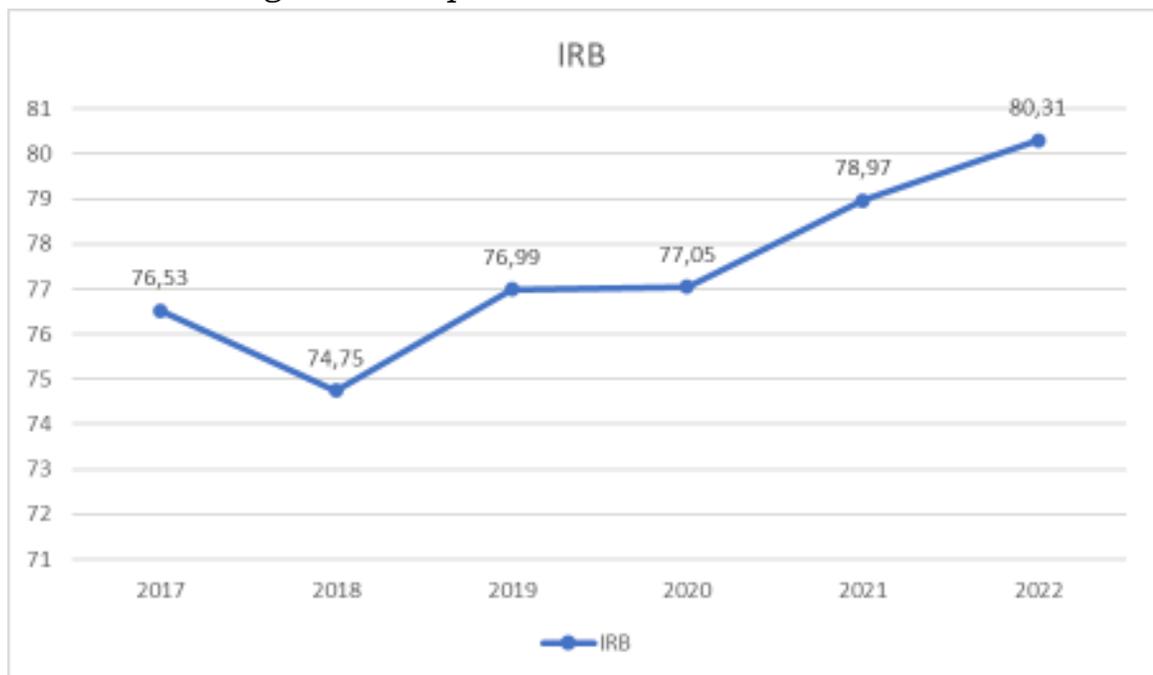
Sumber: BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2022

2.7. Aspek Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Kondusivitas Daerah

2.7.1 Tata Kelola Pemerintahan

1. Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian pada tahun 2022 mencapai angka 80,31, meningkat 1,34 dari tahun 2021 yang sebesar 78,97. Jika dilihat secara 5 tahun, kinerja Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah juga terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan baik sesuai dengan *roadmap* nasional.



Sumber: Kemenpan RB, 2023

Gambar 2.93.

Capaian Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah

Salah satu komponen yang mendukung capaian reformasi birokrasi adalah hasil antara. Terdapat beberapa hasil antara yang memerlukan perhatian karena tidak mengalami peningkatan pada tahun 2022, yaitu kualitas kebijakan dan kualitas pengelolaan pengadaan barang jasa. Hal tersebut mengindikasikan adanya pekerjaan rumah dalam tata kelola sektor tersebut, baik dalam hal kinerja atau tertib administrasinya.

Tabel 2.182.**Catatan Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB Tahun 2021 - 2022**

No	Hasil Antara	2021	2022
1	Kualitas Kebijakan	37,97	35,65
2	ASN Profesional	51,85	54,56
3	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,74	3,34
4	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	78,88	65,70
5	Kualitas Pelayanan Publik	4,48	4,54
6	Kapabilitas APIP	3	3
7	Maturitas SPIP	2	3
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	73,49	93,14
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	91,31	93,45
10	Reformasi Hukum	-	76,25

Sumber: Kemenpan RB, 2023

Adapun menurut catatan hasil evaluasi dari Kemenpan RB, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Provinsi Jawa Tengah yaitu :

- a. Memperkuat kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengawal capaian makro dan menciptakan reformasi birokrasi yang berdampak
- b. Mengoptimalikan digitalisasi reformasi birokrasi dan budaya berAkhlak
- c. Menetapkan arah pembangunan reformasi birokrasi ke depan sesuai dengan isu prioritas yang akan diselesaikan
- d. Memperkuat komponen hasil antara yang kurang baik
- e. Memperkuat performance based budgeting melalui formalisasi dan pengacuan kebijakan TPP
- f. Optimalisasi peran Pemerintah Provinsi sebagai pendamping Pemerintah Kabupaten/Kota terkait implementasi reformasi birokrasi berdampak.

Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan e Government memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan e-Government/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Media sosial, audio-visual dan aplikasi digunakan untuk menyapa masyarakat, membangun kesamaan persepsi pembangunan dengan perangkat daerah dan mengkomunikasikan pembangunan dengan masyarakat, memahami permasalahan pembangunan langsung dari masyarakat dan sekaligus eksekusinya, serta pemecahan aduan masalah pembangunan. Diskominfo, menjadi perangkat daerah yang dipercaya Kepala Daerah dalam mewujudkan pemenuhan persyaratan-persyaratan indikasi SPBE yang baik untuk menunjang kinerjanya. Selama periode 2018-2023, anggaran Diskominfo terkait substansi tugas dan fungsi telah ditingkatkan secara signifikan.

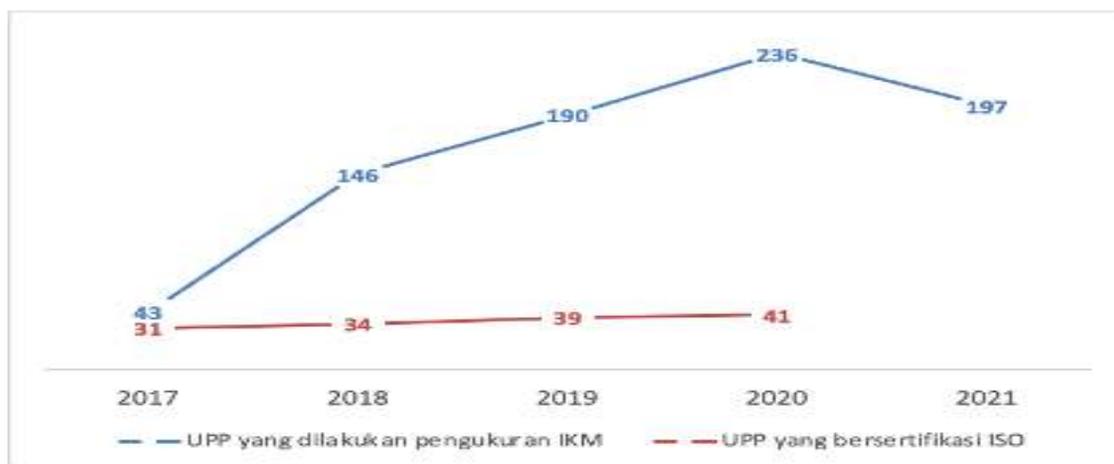
2. Pelayanan Publik

a) Indeks Kepuasan Masyarakat

Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, berkualitas, terjangkau, dan teratur sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam kurun waktu 2017-2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan standar manajemen mutu melalui fasilitasi dan pendampingan sertifikasi ISO,

serta pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran IKM terus meningkat, dari tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan jumlah UPP yang dilakukan pengukuran disebabkan adanya berbagai permasalahan dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terutama di Satuan Pendidikan (SMA/SMK). Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya sarana dan prasarana yang belum memadai, pergantian petugas pelaksana, pelaksanaan SKM yang lebih dari 1 tim dalam 1 OPD dan tidak saling bersinergi, serta petugas pelaksana tidak melaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

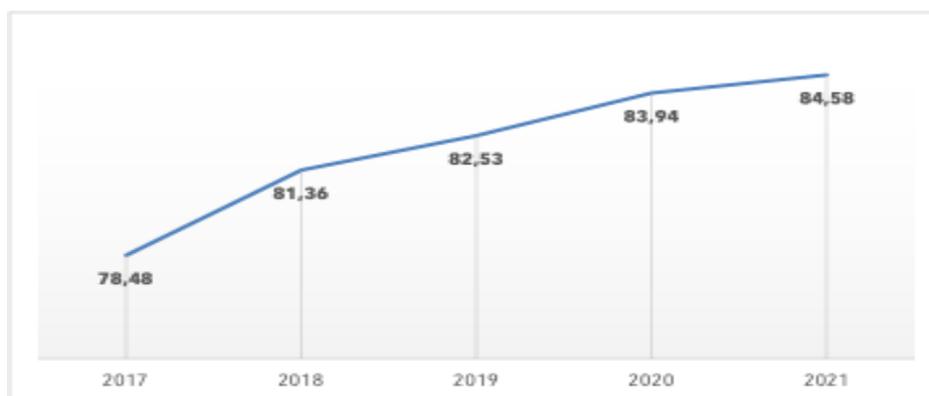


Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.94.

Jumlah UPP Bersertifikasi ISO dan UPP Yang Melakukan Pengukuran IKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (Unit)

Hasil dari pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks ini merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selama kurun waktu tahun 2017 – 2021 IKM terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2021 IKM Jawa Tengah sebesar 84,58, meningkat 0,64 poin dari tahun 2020 yang sebesar 83,94. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkat dan semakin diterima oleh masyarakat.



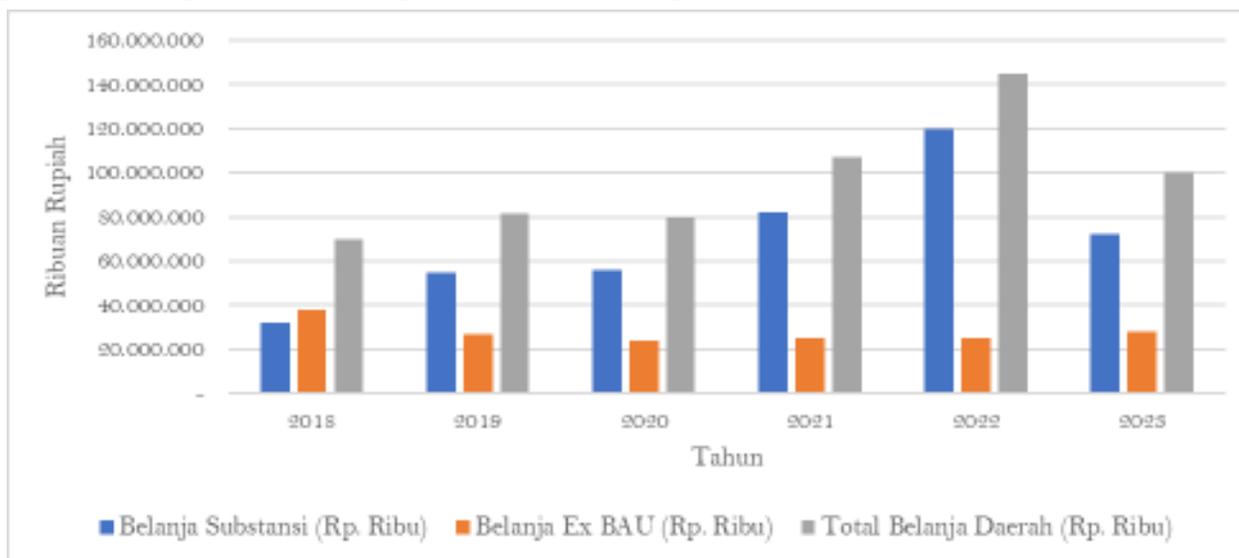
Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.95.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

b) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

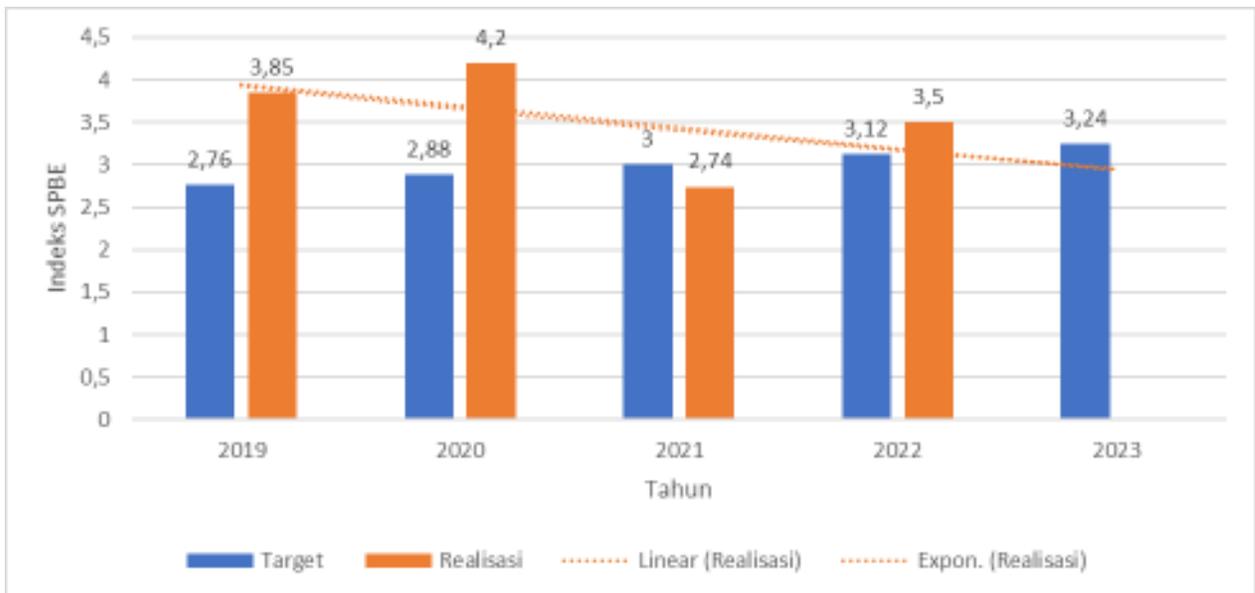
Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan e Government memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan e-Government/SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Media sosial, audio-visual dan aplikasi digunakan untuk menyapa masyarakat, membangun kesamaan persepsi pembangunan dengan perangkat daerah dan mengkomunikasikan pembangunan dengan masyarakat, memahami permasalahan pembangunan langsung dari masyarakat dan sekaligus eksekusinya, serta pemecahan aduan masalah pembangunan. Diskominfo, menjadi perangkat daerah yang dipercaya Kepala Daerah dalam mewujudkan pemenuhan persyaratan-persyaratan indikasi SPBE yang baik untuk menunjang kinerjanya. Selama periode 2018-2023, anggaran Diskominfo terkait substansi tugas dan fungsi telah ditingkatkan secara signifikan.



Gambar 2.96.

Perkembangan Anggaran Diskominfo Tahun 2018-2023

Gambar 2.97 di atas menunjukkan bahwa anggaran substansi selalu meningkat signifikan sepanjang Tahun, bahkan pernah sampai 4 kali lipat pada Tahun 2022 dari Tahun Anggaran 2018. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pembangunan infrastruktur TIK seperti pembangunan jaringan Fiber Optic, pengadaan server dan storage; pengadaan sarana dan prasarana studio visual - ruang Multi Media Center (MMC), pembangunan pusat data, sewa internet dan sewa aplikasi analisis media serta, sarpras layanan keamanan informasi. Anggaran juga digunakan untuk biaya operasional komunikasi dan koordinasi pemecahan masalah-masalah pembangunan (video conference, iklan layanan dan, layanan aduan) dan penyediaan portal data.



Gambar 2.97.

Target dan Realisasi Indeks SPBE Tahun 2019-2023

Upaya pemenuhan persyaratan implementasi e Government / SPBE yang baik ternyata berpengaruh pada capaian Indeks SPBE-nya. Gambar 2.98 diatas menunjukkan bahwa, sepanjang 2019-2020 target akhir SPBE sudah terlampaui sejak awal penetapan target RPJMD Tahun 2018-2023. Meskipun pada Tahun 2021 sempat mengalami penurunan drastis karena perubahan metode perhitungan dari PermenPan RB No. 5 Tahun 2018 ke PermenPan RB No. 59 Tahun 2020, pada Tahun 2022 dengan perbaikan persyaratan sebagaimana PermenPan RB yang baru dapat naik lagi dan diperkirakan target akhir Indeks SPBE Tahun 2023 tetap terlampaui.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan SPBE telah dilakukan berbagai kegiatan urusan komunikasi informatika, statistik dan persandian.

a. Komunikasi dan Informatika

Pada Urusan Komunikasi dan Informatika telah dilakukan melalui 3 (tiga) layanan yaitu Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra dan Layanan Data Terbuka. Ketiga layanan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Layanan Pusat Data (Data Centre)

Pada akhir Tahun 2022, dalam upaya meningkatkan layanan SPBE telah diselesaikan pembangunan data center. Pembangunan data center telah memperbaiki kondisi data center seperti lokasi data center dapat dipindah ke lokasi yang aman (seperti rawan banjir, pernah mengalami konsleting listrik dan terganggu/terdapat kegiatan lain dalam satu gedung). Kapasitas juga telah ditingkatkan.



Sumber: Diskominfo, 2022

Gambar 2.98.

Gambar Rencana Bangunan Data Center Provinsi Jawa Tengah

Meskipun demikian kondisi pusat data saat ini masih perlu ditingkatkan, karena berada dalam tingkatan standard 1 / rated 1, dimana fasilitas pusat data masih belum memiliki *redundancy* seperti belum memiliki *redundancy* jalur power atau kelistrikan, *redundancy genset*, *redundancy panel listrik*, *redundancy UPS* dan belum memiliki tangki penyimpanan BBM harian, mingguan maupun bulanan

2) Layanan Jaringan Intra

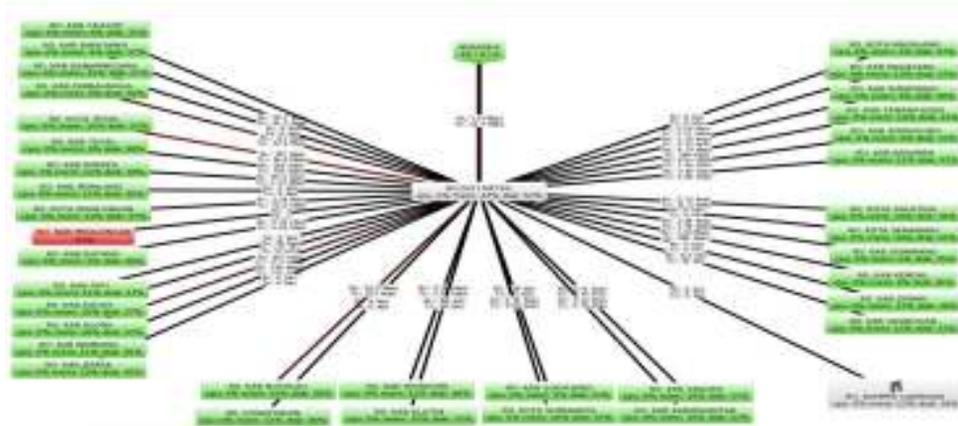
Layanan jaringan intra merupakan bagian dari layanan data center sebagaimana diterangkan diatas. Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam instansi pemerintah daerah (Gambar 2.). Pengembangan jaringan intra dilakukan seperti dengan pemasangan jaringan Fiber Optic untuk menghubungkan antar perangkat daerah dengan data center, pemenuhan kapasitas bandwidth internet yang lebih cepat dan aman pada semua OPD.



Gambar 2.99.

Topologi Jaringan Perangkat Daerah

Selanjutnya setelah infrastruktur jaringan intra pemerintah terimplementasi dapat digunakan untuk sarana atau media pengembangan teknologi informasi seperti aplikasi berbagi pakai, integrasi aplikasi layanan pemerintah, media video conference, media blow up berita melalui televisi digital (IPTV), media komunikasi jarak jauh dengan internet (VOIP).



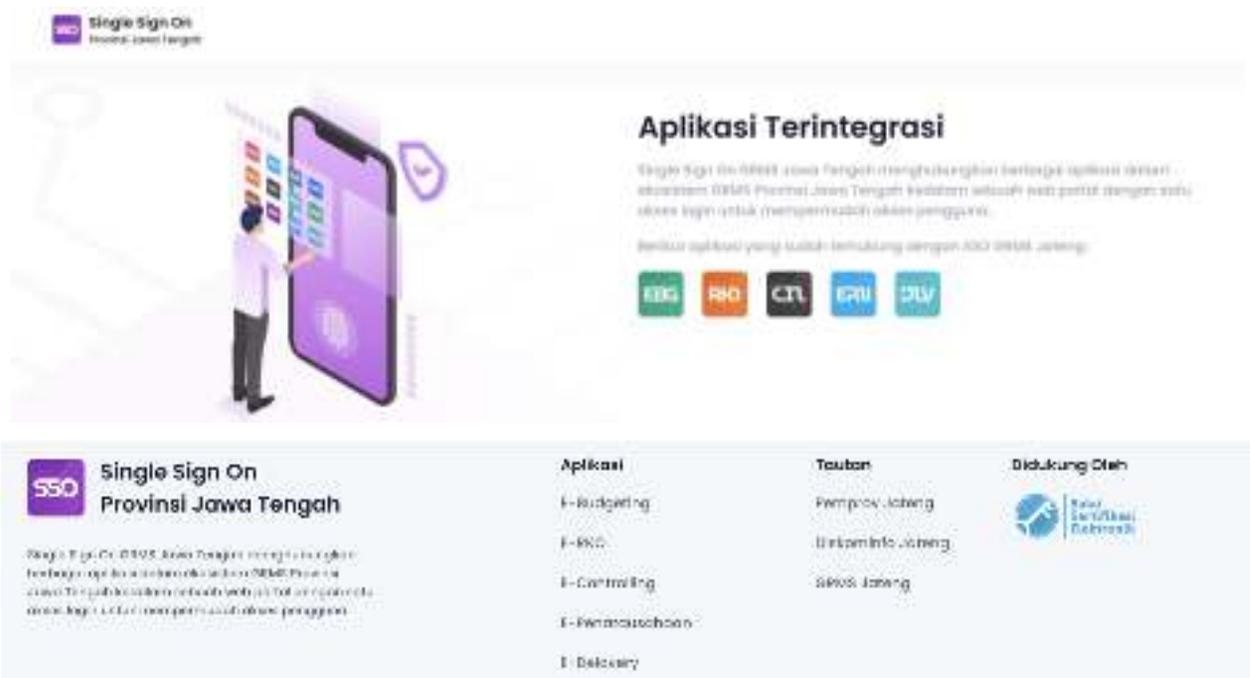
Gambar 2.100.
Topologi Jaringan Metro Kab/Kota

Selama 2017-2023, Diskominfo telah menghubungkan 86 perangkat daerah dengan fiber optic mandiri dan 35 kabupaten/ kota (Gambar 3) dengan fiber optic metro (pihak ke 3) dan tentunya jaringan tersebut terintegrasi dengan data center . Dengan kapasitas bandwidth sebesar 10.000 Mbps.



Gambar 2.101.
Kegiatan Live Streaming dan Video Conference

Selain itu Diskominfo telah menyediakan 95 server/storage termasuk collocation sewa aplikasi media masa, media sosial dan layanan keamanan informasi berupa Assesment Aplikasi, layanan Email Sanapati, Video Live Streaming dan Video Conference; dan pengembangan 15 unit aplikasi terintegrasi berbagi pakai (Gambar 4). Diskominfo juga Selama 5 Tahun terakhir juga telah memberikan rekomendasi bagi 7 Sistem aplikasi perangkat daerah.



Gambar 2.102.
Aplikasi Terintegrasi

Upaya pemenuhan fasilitas sarpras jaringan intra tersebut sesuai dengan Pergub no. 15 Tahun 2013. Pergub mengharapkan agar Diskominfo mampu memfasilitasi keterpaduan jaringan komputer intranet. Fasilitasi penyusunan aplikasi juga sesuai atas perubahan pergub diatas dengan Pergub No. 45 Tahun 2013 yang memberikan kewenangan Diskominfo untuk melakukan audit terkait usulan sistem informasi / aplikasi / website yang diajukan oleh perangkat daerah. Upaya pengembangan layanan jaringan intra diduga telah berpengaruh pada tingkat kematangan layanannya. Tingkat kematangan level sudah masuk tahap terakhir, yaitu dengan nilai 5. Artinya, pada kematangan kapabilitas layanannya masuk dalam level optimalisasi. Optimalisasi berarti bahwa layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Adapun pada kapabilitas prosesnya masuk pada tahap optimum. Optimum berarti pengaturannya telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

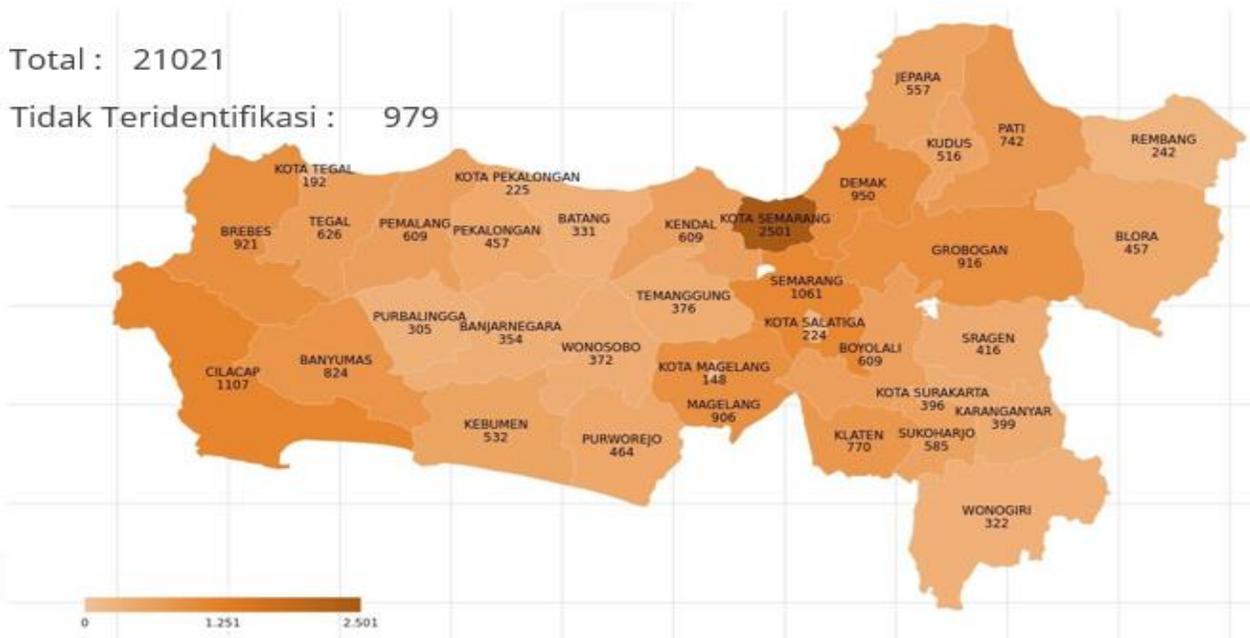
Meskipun demikian, masih dijumpai adanya sejumlah permasalahan dalam layanan jaringan intra pemerintah. Permasalahan yang sangat besar dampaknya terhadap pelayanan yaitu Fiber Cut atau putusnya jalur fiber optic. Putusnya jalur *fiber optic* bisa disebabkan karena pekerjaan bangunan/galian oleh pihak eksternal di titik yang dilewati jalur kabel fiber. Permasalahan juga muncul dari jaringan local masing masing perangkat daerah, karena peralatan jaringan seperti router, switch, kabel utp, *accespoint* belum memenuhi standard yang sesuai, sehingga distribusi bandwidth internet tidak terdistribusi dengan maksimal. Belum lagi realitas perangkat daerah masih melakukan belanja internet / sewa internet mandiri karena alasan untuk mempunyai backup internet. Sebenarnya bukan hanya sewa internet yang diambil alih pengelolaannya oleh Diskominfo, pengadaan server juga seharusnya dikoordinasikan dengan Diskominfo. Pengkoordinasikan tersebut penting mengingat, agar server dapat didata, terstandarisasi, menjadi satu wadah dan, disinergiskan terlebih, saat ini Diskominfo sedang

menyelesaikan pembangunan Data Center pada Tahun 2022 dimana, data center sudah dirancang dan memiliki kapasitas yang besar dalam mengelola file data dan aplikasi Perangkat Daerah. Server dan storage sebaiknya menyatu dalam data center. Dalam upaya men-standar-kan, mensinergiskan dan efisiensi anggaran diskominfo perlu mengidentifikasi kebutuhan/distribusi jaringan FO dan bandwidth bagi masing-masing Perangkat Daerah.

Hasil pemantauan dinamika aplikasi Perangkat Daerah juga menunjukkan bahwa, aplikasi di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat diberbagai Perangkat Daerah seperti tingkat keaktifannya, perkembangannya, dan ragam layanannya. Meskipun demikian, dari total 667 aplikasi yang terdaftar yang ada di Perangkat Daerah, 129 aplikasi (19,34 %) posisinya tidak aktif. Ketidakatifan aplikasi dalam perhitungan terakhir meningkat 30 aplikasi dan 15 aplikasi yang sebelumnya tidak aktif menjadi aktif. Kondisi ini menggambarkan bahwa aplikasi online sudah biasa digunakan Perangkat Daerah tetapi belum semuanya dapat diakses oleh publik. Adapun perkembangannya dari 667 aplikasi sebanyak 258 aplikasi (38,68%) berstatus transaksional, 229 aplikasi (34,33 %) masih bersifat informatif dan sisanya tidak ada keterangan. Secara umum aplikasi yang ada digunakan untuk memperlancar tugas kedinasan. Hanya sebanyak 261 bisa diakses masyarakat. Gambaran diatas menunjukkan bahwa belum semua aplikasi berjalan aktif, belum bersifat transaksional dan belum sinergis dan terintegrasi satu dengan lainnya. Kebanyakan baru untuk layanan kedinasan saja, masih dibutuhkan perbaikan-perbaikan.

3) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Layanan pengaduan pelayanan publik menggunakan media online seperti website, whatsapp, android, instagram, SMS, facebook, twitter, layanan hotline, aduan langsung, youtube dan aplikasi Laporgub sendiri. Total pengaduan pada Tahun 2021 adalah 21.021 aduan. Sebaran aduan sebagaimana Gambar 6 terlihat untuk 35 Kabupaten/Kota. Pengaduan umumnya menyangkut permohonan perbaikan jalan, permohonan Bansos Covid, permohonan informasi vaksinasi Covid, aduan bantuan tidak tepat sasaran dan, permohonan penanggulangan banjir. Aduan tersebut dijawab langsung Perangkat Daerah Provinsi, Sektor Vertikal di Provinsi dan, Kabupaten/Kota. Dari 47 Perangkat Daerah sebanyak 5.180 aduan yang semua ditindaklanjuti; aduan kepada 25 instansi lain sebanyak 1.483 aduan yang semua dapat ditindaklanjuti; dan kepada 35 Kabupaten/Kota sebanyak 11.495 aduan yang hampir semua dapat ditindaklanjuti.



Sumber: Diskominfo, 2022

Gambar 2.103.
Peta Persebaran Wilayah Aduan Tahun 2021

Masyarakat dapat melihat aduan pada laman LapoGub! dan dapat juga mengunggah bukti aduannya ke dalam sistem seperti yang dapat dilihat pada bukti dukung LapoGub! Setiap aduan yang masuk ke dalam LapoGub!, otomatis akan di disampaikan kepada instansi terkait. Setiap progres aduan akan terlihat oleh admin LapoGub!, apakah aduan tersebut sudah diverifikasi, proses maupun selesai seperti yang disertakan pada data dukung Indikator Progres Aduan LapoGub! dan Indikator. Progres Aduan LapoGub!. Admin juga dapat mendownload aduan untuk bahan laporan kepada atasan dengan bukti dukung: - Indikator Download Laporan LapoGub! - Indikator Tampilan Review Laporan – Indikator REKAP LapoGub!. Kemudian sistem LapoGub! sudah melakukan Konsolidasi data dengan SP4N LAPOR! Kemenpan-RB, Sehingga aduan LapoGub! dapat juga dilihat di aplikasi SP4N LAPOR! milik Kemenpan-RB dengan proses. Aduan memang tidak semua dijawab, terdapat 431 aduan ditolak dan 714 aplikasi diluar wewenang Pemerintah Daerah. Dari laporan implementasi LapoGub!, baru terinformasikan secara global bahwa aduan sudah terjawab tetapi tingkat solutifnya belum terinformasikan dalam rekapitulasi aduan LapoGub!.

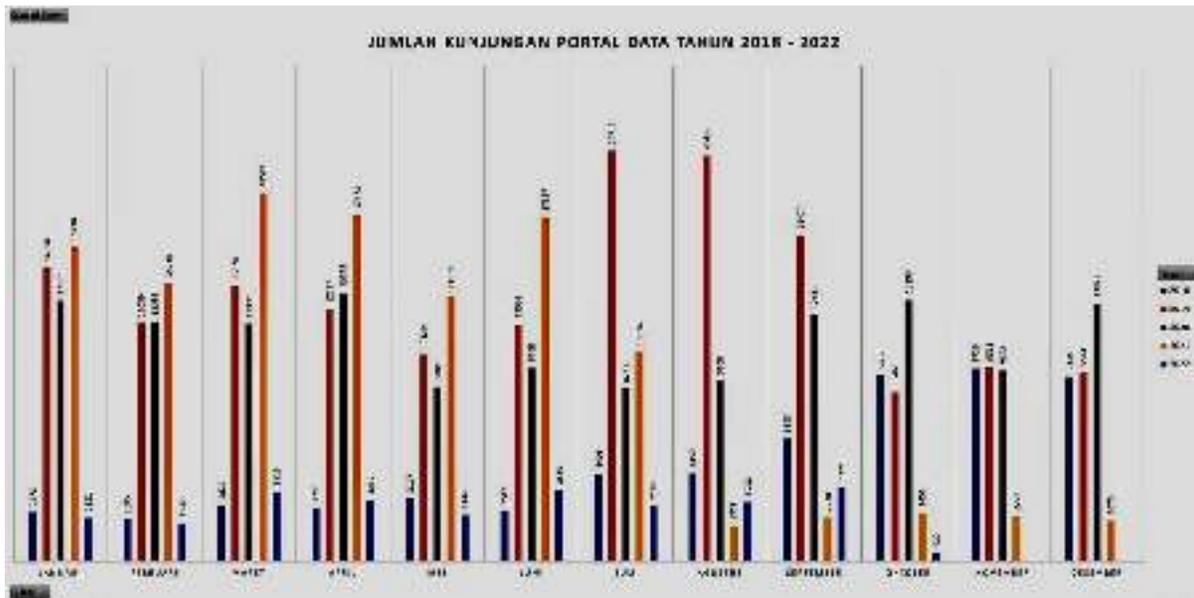
Meskipun demikian tidak semua layanan mendapatkan jawaban yang solutif atau tidak dapat dijawab. Kondisi ini disebabkan karena level kematangan layanannya belum maksimal. Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik baru mencapai level 3. Artinya, layanan pengaduan publik melalui LapoGub! Secara kapabilitas layanan SPBE masuk dalam kriteria Transaksi, yaitu dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan. Secara kapabilitas proses masuk dalam kriteria terstandarisasi, yaitu pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah. Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya terstandarisasi. Pada level 3 ini dalam SPBE sudah masuk predikat Baik (2,6- <3,5). Kenaikan level kematangan misalkan sampai level 4 memungkinkan secara kapabilitas layanannya sudah terkolaborasi sehingga bukan hanya terjadi pertukaran informasi tetapi terjadi integrasi layanan dengan SPBE

lainnya sehingga, sesuatu yang dianggap bukan tugas dan fungsinya dapat dikoordinasikan segera.

b. Statistik.

Sepanjang 2018-2023 telah dilakukan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup Provinsi (SDS). Kegiatan ini berupa Pengumpulan, Pemeriksaan dan Publikasi Data Statistik Sektoral di Lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Melaksanakan Forum Data Satu Data Jawa Tengah sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar penyelenggara Satu Data Jawa Tengah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Menyediakan data dan informasi hasil pembangunan lebih cepat dan akurat untuk perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah melalui Single Data System serta mendukung Pengambilan Kebijakan Pimpinan.

Selanjutnya, dalam menjamin keterbukaan informasi public telah dilakukan difasilitasi melalui aplikasi portal data. Dalam aplikasi portal data, masyarakat umum dapat mengakses data dan informasi Perangkat Daerah dan mendapatkan informasi publik yang diperlukan. Portal data diharapkan menjadi sarana OPD dalam mempublikasikan data dan informasi yang perlu diketahui publik atas sektor pembangunan yang ditangani. Jadi, aplikasi portal data adalah mendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi / PPID Utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi sektor-sektor publik. Aplikasi portal data diharapkan akan menjadi sarana untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, karena data dari berbagai OPD yang masuk harus melalui tahap pemeriksaan prinsip SDI sebelum dipublikasikan dalam portal data.



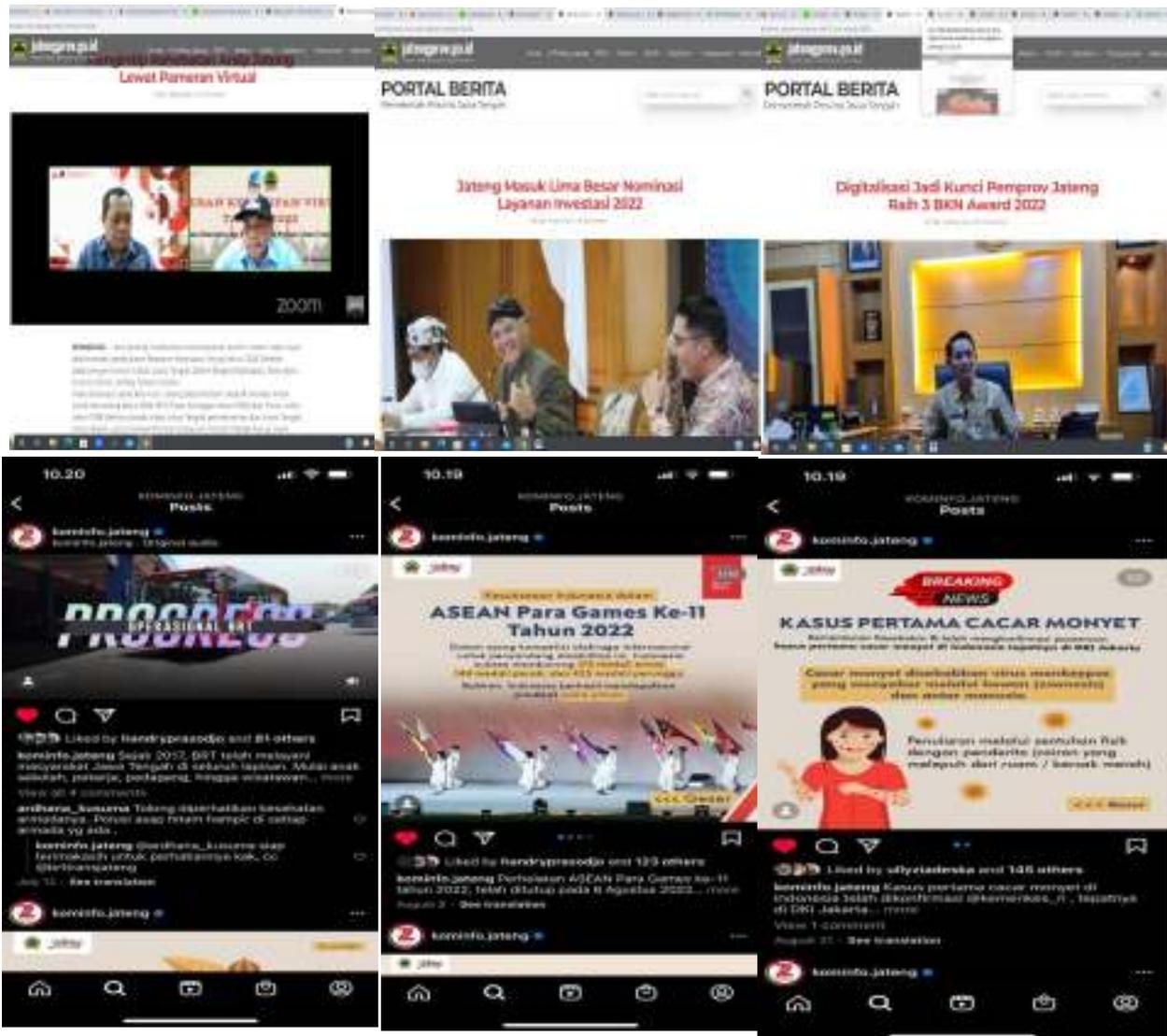
Sumber: Diskominfo, 2022

Gambar 2.104.

Grafik Kunjungan Portal Data Tahun 2018-2023

Trend data yang masuk dalam portal data sepanjang 2018-2023 menunjukkan kenaikan yaitu Tahun 2018 sebanyak 13.000 data; Tahun 2019 sebanyak 19.756 data; Tahun 2020 sebanyak 25.439 data; Tahun 2021 sebanyak 30.349 data; Tahun 2022 sebanyak 33.664 data (s.d TW 2) dan; Tahun 2023 sebanyak 36.500 data (Prediksi). Meskipun demikian, memperhatikan Gambar 7. Menunjukkan bahwa trend jumlah kunjungan portal dari Tahun 2018-2022

menunjukkan tendensi penurunan. Penurunan terekam dari bulan ke bulan dan dari Tahun ke tahun. Penurunan minat kunjungan diduga faktor internal berupa aplikasi portal data memiliki kelemahan-kelemahan seperti tampilan aplikasi kurang menarik, data kurang menarik, data tidak ter update rutin/kosong dan kurang jelas kemanfaatannya. Adapun faktor eksternal adalah tersedianya penyedia data saingan yang lebih dapat dipercaya/sesuai kebutuhan (Misalkan BPS, data hasil penelitian akademis dan data Perangkat Daerah). Penurunan trend kunjungan tersebut harus dievaluasi untuk perbaikan. Hasil pencermatan terhadap aplikasi juga, belum diketahui siapa saja yang memanfaatkan portal data tersebut. Pemahaman pengunjung diperlukan untuk mengetahui apakah data dimanfaatkan atau sekedar dilihat sekilas.



Sumber: Diskominfo, 2022

Gambar 2.105.
Tampilan Aplikasi Portal Data Jawa Tengah

Selain disampaikan fasilitasi publikasi hasil pembangunan satu arah dalam bentuk tayangan berita dalam PPID, urusan statistik juga memfasilitasi dukungan website untuk komunikasi dua arah seperti melalui portal berita pada website jatengprov.go.id. Diskominfo juga mengaktifkan website [kominfo.jateng](http://kominfo.jateng.go.id) untuk komunikasi yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi dengan Diskominfo terkait suatu topik pembangunan sebagaimana terlihat pada Gambar 2.106. Terhadap layanan komunikasi dua arah tersebut terdapat hambatan dalam merespon pihak-pihak yang berkomunikasi, tentu membutuhkan

spesialisasi siapa pihak yang menangani, kualitas pemahaman substansi topik yang dibahas dan, jaringan komunikasi antar pihak yang memadahi.

c. Persandian.

Sepanjang Tahun 2018-2023 pada urusan persandian, telah dilakukan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan upaya pengamanan informasi. Upaya pengamanan informasi dilakukan melalui assessment aplikasi; layanan e mail sanapati, 49 SSL, 520 antivirus bagi 50 OPD, live streaming dan, conference. Kegiatan-kegiatan ini untuk menjamin keamanan informasi perangkat daerah. Sejak Tahun 2018 hingga saat ini, sudah 45 OPD yang aplikasinya sudah di pentest dan melakukan tindak lanjut atas hasil pentest nya. Sampai saat ini juga secara aktif terus dilakukan peningkatan kualitas keamanan informasi. Upaya peningkatan keamanan informasi seperti sedang dalam tahap pembuatan Pergub SMKI, Risk Manajemen, Arsitektur Keamanan dan SOP.

Upaya pengamanan informasi lebih detil sebagai berikut: dilakukan Digital Forensik dilaksanakan pada alat komunikasi milik Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; Pada layanan pengelolaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Bidang Persandian dan KI menyediakan aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik (MSE) sebagai aplikasi untuk membantu pendaftaran dan pengelolaan Sertifikat elektronik / Tanda Tangan Elektronik untuk seluruh Pejabat / Fungsional hingga staf pelaksanaan di seluruh OPD Pemprov Jateng dengan basis website dan Aplikasi Mobile. Selain itu Bidang Persandian dan KI juga menyediakan Chatbot "SORE MASE" sebagai layanan helpdesk bagi pemilik TTE yang dapat digunakan bagi pemilik TTE untuk mengecek data yang berkaitan dengan TTE secara realtime dan 24 jam. Hingga saat ini sudah terbit sejumlah 297 TTE; Pengamanan distribusi/pengiriman data atau surat sudah menggunakan email terenkripsi Sanapati baik dari pusat ke provinsi hingga ke kab/kota; Fasilitas layanan Video Conference untuk komunikasi pejabat VVIP seperti Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; Layanan publikasi kegiatan yang ada di Pemprov Jateng melalui Video Live Streaming pada kanal medsos (Youtube, Facebook, Twitter, Tiktok dan Instagram).

Dalam menjamin keamanan informasi, Provinsi juga sudah membentuk Tim CSIRT atau Computer Security Incident Response Team pada Tahun 2020. Tugas Tim CSIRT adalah menerima, meninjau, dan merespon laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Provinsi juga melakukan fasilitasi pembentukan Tim CSIRT di Kabupaten / Kota. Sampai saat ini sudah 10 Kab/Kota telah memiliki Tim CSIRT. Kabupaten/Kota di maksud yaitu Kabupaten: Kebumen, Banyumas, Klaten, Sukoharjo, Demak, Batang, Purworejo dan Pati serta Kota Salatiga dan Semarang.

Tim CSIRT Provinsi Jawa Tengah selalu secara rutin melakukan layanan penetration testing, sertifikasi elektronik, kontra penginderaan dan jamming. Pentest / Penetration Testing dan IT Security Assement Mandiri adalah kegiatan pengujian kerentanan aplikasi yang digunakan di lingkup Pemprov Jateng oleh tenaga ahli pada bidang Persandian dan Keamanan Informasi baik pada saat aplikasi belum di rilis maupun pada saat aplikasi sudah di rilis atau sudah berjalan, hal ini sudah dimulai pada tahun 2019, hingga saat ini suda ada 47 OPD dari total 49 OPD aplikasinya telah di pentest dengan status akhir kerentanan LOW; SSL (security Socket Layer) adalah sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi melalui jaringan internet, SSL sudah diterapkan pada semua sub domain yang digunakan pada aplikasi yang ada di Pemprov

Jateng; Anti virus yang bertujuan untuk mengamankan data yang ada pada computer/desktop dari serangan virus atau malware, sebanyak 31 OPD sudah menerapkan anti virus pada desktop atau perangkat komputer yang digunakan; Pengamanan signal atau (Jamming) dilakukan untuk kegiatan yang menghadirkan pejabat VVIP atau Presiden dan Wakil Presiden serta pada kegiatan tes atau ujian kompetensi; Kontra penginderaan merupakan kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap pengawasan pihak lain, termasuk metode yang melibatkan peralatan elektronik dan mendeteksi adanya peralatan surveillance (alat sadap), hal ini dilakukan pada kediaman, ruang kerja dan kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Upaya peningkatan keamanan informasi juga dilakukan melalui jalur regulasi, agar langkah-langkahnya lebih tertata dan didukung semua perangkat daerah. Regulasi tersebut adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang digunakan sebagai acuan atau dasar pelaksanaan Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi Jawa Tengah. Atas capaian pengamanan informasi, Indeks KAMI selalu mengalami peningkatan sejak 2019-2022. Pada Tahun 2019 masuk dalam score 419 atau Tingkat Kematangan II, Tahun 2020 score 482 atau Tingkat Kematangan II+, Tahun 2021 score 558 atau Tingkat Kematangan II dan Tahun 2022 dengan score 634 atau Tingkat Kematangan IV. Hal ini telah melampaui Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023. Provinsi sudah mendapatkan pengakuan ISO 27001 pada Tahun 2022 tentang Keamanan Informasi dan Data Center.

d. Penelitian dan Pengembangan

Sesuai dengan Perpres 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional maka dalam rangka optimalisasi urusan penelitian dan pengembangan serta terciptanya integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Provinsi Jawa Tengah maka telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi penelitian dan pengembangan adalah dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi penelitian yang dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Selama kurun waktu tahun 2017-2021 dokumen dan rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.183.

Jumlah Dokumen Penelitian dan Rekomendasi/Implementasi Penelitian

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dokumen Penelitian	6	9	4	2	n/a
2.	Rekomendasi/Implementasi Penelitian	6	9	4	2	n/a

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu 2017 - 2021 dokumen penelitian dan rekomendasi/implementasi hasil penelitian fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan setelah pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan litbang daerah sejak 2017, kegiatan penelitian dalam bentuk Riset Unggulan Daerah (RUD) dan penelitian mandiri sudah tidak difasilitasi lagi. Pada tahun 2021

dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya volume kegiatan penelitian karena pemerintah memfokuskan pada kegiatan dalam upaya penanggulangan dampak pandemi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan hasil litbang dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas SDM Peneliti melalui pendidikan dan pelatihan, membangun komunikasi melalui Jaringan Penelitian dan Inovasi, kerjasama dengan pemerintah pusat (Ristek dan LIPI), serta koordinasi dan membangun jejaring antara penelitian dan perencanaan.

Guna mendukung fungsi kelitbangan maka dibentuk beberapa lembaga pendukung kelitbangan di Jawa Tengah antara lain berbentuk *technopark*, *agro technopark*, *marine science technopark*, digitalisasi *technopark* dan taman teknologi pertanian. Bentuk kelembagaan *technopark* di Jawa Tengah di Kabupaten/Kota dikelola oleh PD teknis dan mendapatkan pendanaan dari anggaran daerah. *Technopark* dengan bidang fokus dibidang pertanian dan pangan terdapat di Ganesha Sragen dikelola oleh UPT Dinas Tenaga Kerja, *technopark* Lebaksiu yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tegal, *Agrotechnopark* Klaten yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, *Technopark* Pangan Kabupaten Grobogan yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan dan *technopark* perikanan di Kota Pekalongan dikelola oleh UPT Dinas kelautan Perikanan, serta *technopark* dengan bidang fokus otomotif di Kota Surakarta (Solo *Technopark*).

Kelembagaan lain yang memiliki peran untuk menghilirkan inovasi agar dapat menjadi produk yang bisa dijual dan mampu menghasilkan *start up* inovasi adalah Inkubator Bisnis dan Teknologi yang melakukan kegiatan proses pra inkubasi dan inkubasi. Pada proses Pra inkubasi dilakukan dengan meningkatkan sumberdaya manusia untuk mengubah pola pikir dan membentuk calon *start up* menjadi *start up*. Sedangkan proses inkubasi dilakukan dengan melakukan pendampingan, mentoring, pelayanan, fasilitasi, promosi untuk meningkatkan kapasitas produk. Di Jawa Tengah setidaknya terdapat 22 inkubator yang berfungsi aktif dalam memberikan layanan inkubasi.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki Inkubator Wirausaha Inovasi Jawa Tengah (Inwinov Jateng) yang berada di bawah naungan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Alokasi sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBN (melalui Kementerian Ristekdikti, BRIN dan Kemenkop UKM). Selama lima tahun terakhir, Inwinov Jateng telah melakukan pembinaan terhadap tenant yang dikelola masyarakat melalui fasilitasi program penguatan inkubator/tenant yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.184.

Jumlah Tenant Binaan Inwinov Jateng yang difasilitasi Program Penguatan Inkubator/Tenant

No	Tahun	Total Tenant	Program	Sumber Pendanaan
1	2018	3 Tenant	Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Kemenristekdikti
2	2019	6 Tenant	Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	Kemenristekdikti
3	2020	1 Tenant	Startup Inovasi Indonesia (SSI)	BRIN
4	2021	40 Tenant	Fasilitasi Lembaga Inkubator	Kemenkop UKM

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (SIDa) Provinsi Jawa Tengah adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah. Pengembangan SIDa di Jawa Tengah ada 4 pilar tematik yaitu 1) Provinsi Inovatif; 2) Kabupaten Kota Inovatif; 3) Desa Inovatif; dan 4) UMKM Inovatif. Semenjak digulirkan tahun 2013, telah difasilitasi pengembangan system inovasi di 35 Kabupaten/Kota, pengembangan inovasi di 90 desa, serta pada 43 UMKM di Jawa Tengah.

Kegiatan lainnya adalah memfasilitasi inovasi masyarakat melalui Krenova atau Kreativitas dan Inovasi Masyarakat, Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk lomba krenova dan penjangingan inovasi. Kegiatan krenova dilakukan dengan 2 jalur dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki inovasi untuk bisa terlibat dalam kegiatan lomba krenova dan seleksi inovasi dengan jalur penjangingan inovasi. Kegiatan ini diikuti oleh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah menghasilkan karya inovasi sehingga mampu untuk mengatasi kebutuhan teknologi di sekitarnya atau dapat direplikasi di daerah lain, sehingga memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Jawa Tengah.

Partisipasi masyarakat Jawa Tengah mengikuti kegiatan KRENOVA Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai tahun 2022 terjadi fluktuasi, pada tahun 2017 ke 2018 terjadi peningkatan sedangkan tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dikarenakan ada 2 kabupaten yang tidak mengikuti lomba krenova dan pembatasan jumlah peserta dari masing-masing Kabupaten/Kota maksimal 5 inovasi. Tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan disebabkan karena dilakukannya 2 mekanisme proses krenova melalui lomba krenova dan penjangingan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki inovasi, perlu diberikan kesempatan dan wadah agar inovasi tersebut tersalurkan.

Tabel 2.185.

Jumlah Inovasi Hasil Krenova di Jawa Tengah Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah Inovasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi	Keterangan
1	2017	167	35 Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai tahun 2019 Lomba Krenova dibatasi maksimal 5 inovasi per kabupaten/kota; • Lomba krenova belum semua Kabupaten/Kota mengirimkan; • Penjangingan Inovasi Masyarakat baru dimulai tahun 2021.
2	2018	201	35 Kabupaten/Kota	
3	2019	169	35 Kabupaten/Kota	
4	2020	167	34 Kabupaten/Kota	
5	2021	230	35 Kabupaten/Kota	
6	2022	276	34 Kabupaten/Kota	

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi daerah serta untuk mendorong kompetisi positif antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perhitungan Indeks Inovasi Daerah didasarkan pada 16 indikator satuan pemda dan 20 indikator satuan inovasi. Predikat penilaian IID terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut: 0 (tidak dapat dinilai); 0,01-29,99 (Kurang Inovatif); 30,00-59,99 (Inovatif) dan 60,00-100,00 (Sangat Inovatif).

Tabel 2.186.

Capaian Nilai Indeks Inovasi Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID)	Predikat	Keterangan
1	2018	720	Inovatif	Perubahan Penilaian IID mulai tahun 2021 dengan menggunakan skala perhitungan 0 - 100
2	2019	22.560	Sangat Inovatif	
3	2020	36.357	Sangat Inovatif	
4	2021	62.57	Sangat Inovatif	
5	2022	Dalam tahap penilaian		

e. Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain masih perlunya pengolahan kearsipan sesuai ketentuan, serta belum optimalnya digitalisasi arsip.

Tabel 2.187.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2018-2022

NO	Tahun	Nilai	Kategori
1	2018	92,20	Sangat Baik
2	2019	79,33	Sangat Baik
3	2020	92,08	Sangat Memuaskan
4	2021	91,314	Sangat Memuaskan
5	2022	93,45	Sangat Memuaskan

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2021

Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat masih perlu dioptimalkan. Berikut data jumlah kunjungan pengguna arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.188.**Jumlah Pengunjung Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah**

No	Jenis Layanan	Tahun (orang)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penelitian atau Mencari Arsip	721	757	780	209	346	496
2	Kunjungan atau Wisata Arsip	2.852	1.890	2.036	15.001	112	3.206
3	Magang atau PKL	238	219	151	103	67	97
4	Konsultasi Kearsipan atau Perpustakaan	1.033	669	485	206	127	288
5	Umum atau lain-lain	-	3535	594	33	81	338
6	Layanan SIKS, Website	-				11.289	41.718
	Jumlah	4.844	7.070	4.046	15.552	12.022	46.413

f. Akuntabilitas Kinerja

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh MenPAN-RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berturut-turut pada tahun 2018-2022 mendapatkan predikat A. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun 2016-2017 sebelumnya yang hanya mendapatkan predikat BB.

Dari 5 komponen SAKIP yang dievaluasi di tahun 2022, komponen Perencanaan Kinerja mengalami penurunan dari 26,66 menjadi 25,53 atau turun 1,13 poin. Akan tetapi 3 komponen lainnya mengalami peningkatan dan satu komponen yaitu Capaian Kinerja tidak dilakukan penilaian di tahun 2022. Meski ada komponen yang mengalami penurunan dan peningkatan, capaian 2022 sebenarnya tidak dapat begitu saja diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena berdasarkan PermenpanRB no 86 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilainya. Akan tetapi nilai pada tahun 2022 menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja mengalami perbaikan.

Terdapat beberapa catatan berdasarkan hasil evaluasi dari KemenpanRB terkait akuntabilitas kinerja :

- Melakukan reviu dan penyempurnaan penjenjangan kinerja;
- Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment dan meningkatkan keselarasan kinerja individu dengan organisasinya;
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja.

Tabel 2.189.**Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,38	26,77	26,64	26,66	25,53

2.	Pengukuran Kinerja	25	19,87	20,50	20,23	20,23	23,63
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,68	11,99	12,08	12,27	12,84
4.	Evaluasi Internal	10	8,26	8,26	7,02	7,21	19,13
5.	Capaian Kinerja	20	13,99	14,04	14,28	14,35	n/a
	Hasil Nilai SAKIP	100	80,18	81,56	80,25	80,72	81,13
	Predikat		A	A	A	A	A

Sumber: Kemenpan RB, Maret 2022

g. Manajemen ASN

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN, Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penilaian dengan sistem merit ini meliputi 8 aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi dan Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; serta Sistem Informasi.

Pada tahun 2021, nilai penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Tengah sebesar 335,5. Nilai tersebut terus meningkat dari nilai penerapan sistem merit pada tahun 2020 yaitu sebesar 289 yang berarti penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Provinsi Jawa Tengah dalam Kategori Sangat Baik.

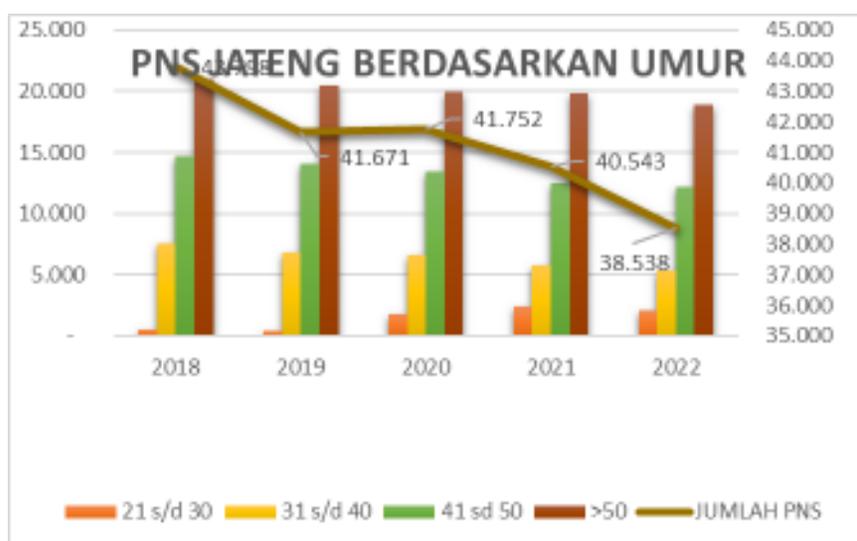
Tabel 2.190.

Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

NO	Aspek	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perencanaan Kebutuhan	60	10	37,5	40	n/a
2	Pengadaan	18	30	38	40	n/a
3	Pengembangan Karier	62,5	72,5	55	75	n/a
4	Promosi dan Mutasi	31	30	20	35	n/a
5	Manajemen Kinerja	42,5	50	67,5	70	n/a
6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	22,5	30	35	37,5	n/a
7	Perlindungan dan Pelayanan	8	10	16	14	n/a
8	Sistem Informasi	23	20	20	24	n/a
Skor Nilai		267,5	280	289	335,5	n/a
Indeks Sistem Merit		0,66	0,70	0,70	0,81	n/a

Sumber: KASN, 2021

Capaian Nilai Sistem Merit Provinsi Jawa Tengah dari aspek Perlindungan dan Pelayanan tahun 2021 sebesar 14 mengalami penurunan nilai sebesar 2 poin dibandingkan 2020 sebesar 16, dikarenakan proses penyesuaian dasar hukum terkait perlindungan hukum kepada pegawai yang terkena kasus hukum dan perlindungan pegawai belum selesai ketika proses penilaian sistem merit tahun 2021 berakhir.



Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah 2022, diolah

Gambar 2.106.

Perkembangan Jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah Kurun Waktu Tahun 2018-2022

Dalam perkembangannya, jumlah PNS Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami penurunan sebesar 5.260 orang. Hal ini selaras dengan kebijakan *zero-growht* yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Namun, jumlah PNS Jawa Tengah sekarang masih didominasi oleh usia lebih dari 50 tahun dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan PNS usia 20-30 tahun. Sehingga menguatkan dugaan produktivitas PNS menurun, sehingga perlu adanya modernisasi birokrasi dengan penerapan teknologi informasi. Perlu pemetaan kebutuhan pegawai untuk mengetahui posisi esensial serta pelaksanaan manajemen talenta untuk menyiapkan kader suksesi yang lebih siap, produktif dan berkinerja untuk mengisi jabatan PNS dan mendukung kinerja organisasi.

Tabel 2.191.

PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Mengajukan Tugas Belajar

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					JUMLAH
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	S1/DIV/PROFESI	7	13	0	0	10	30
2	S2	37	15	22	16	26	116
3	PPDS	11	5	5	2	6	29
4	S3	6	3	1	3	11	24
5	SUB SPESIALIS	0	2	2	1	2	7
	JUMLAH	61	38	30	22	55	206

Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Salah satu upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi ASN yaitu melalui jalur pendidikan lanjutan dalam bentuk Tugas Belajar. Kurun waktu tahun 2018-2022 Provinsi Jawa Tengah sudah memfasilitasi tugas belajar sebanyak 206 orang. 30 orang untuk jenjang S1/DIV/Profesi, 116 orang untuk jenjang S2, 29 orang untuk jenjang PPDS, 24 orang untuk jenjang S3, dan 7 orang untuk jenjang Sub Spesialis. Pemberian fasilitasi tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Selain melalui jalur pendidikan lanjutan, peningkatan kompetensi ASN juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2018-2022 kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terus meningkat secara kuantitas. Hal ini menunjukkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan dapat mencakup kalangan ASN secara luas yang tidak terbatas pada ASN Provinsi Jawa Tengah tetapi juga seluruh ASN di Jawa Tengah. Selain pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BPSDMD, pengembangan kompetensi ASN juga dilakukan melalui sertifikasi. Pada tahun 2022 dari jumlah 50.115 peserta terdapat 46.012 sertifikat terkirim atau sebesar 91,8% peserta tersertifikasi. Hal ini menunjukkan potensi kompetensi SDM ASN yang cukup mumpuni tetapi juga menjadi pekerjaan rumah untuk menuntaskan 9,2% potensi yang tidak tersertifikasi. Hal itu bisa jadi disebabkan karena peserta tidak lulus sertifikasi atau tidak melaporkan kepada BPSDMD selaku leading sector pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.192.

Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2018-2022

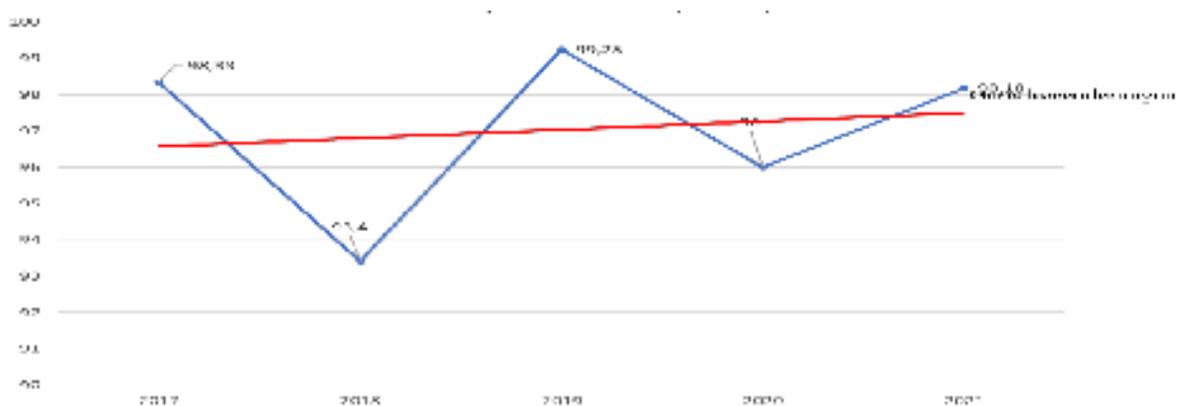
Tahun	Target Peserta (orang)	Realisasi Peserta (orang)
2018	104	100
2019	10.110	9.820
2020	2.789	2.763
2021	6.935	6.956
2022	18.932	19.838

Sumber : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 2022

Meski telah mengalami peningkatan kuantitas pendidikan dan pelatihan yang signifikan, pendidikan dan pelatihan ASN di Jawa Tengah belum terstruktur untuk perbaikan kompetensi dan kinerja ASN. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya Road Map pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN yang menjadi acuan untuk pengembangan kompetensi dan karir ASN. Kondisi tersebut menyebabkan gap kompetensi dan kinerja ASN belum terpetakan dengan baik, pengembangan kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan kinerja, serta penilaian kinerja ASN belum akurat dalam suatu sistem yang terintegrasi..

h. Administrasi Kependudukan

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena data penduduk wajib KTP yang sangat dinamis, setiap harinya terdapat penambahan penduduk wajib KTP.



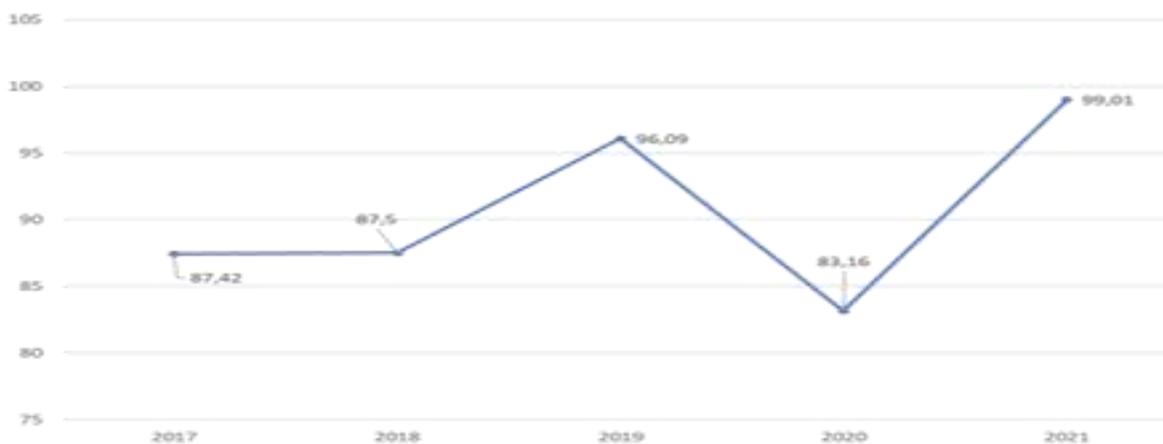
Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.107.

Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Peningkatan layanan kependudukan melalui perekaman, penerbitan KTP dan mendekatkan layanan terus didorong dalam rangka mewujudkan target semua penduduk wajib KTP memiliki identitas resmi penduduk.

Kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2019 meningkat dari 87,42 persen menjadi 96,09 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,16 persen. Tingkat kepemilikan akte kelahiran kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 99,01 persen.



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.108.

Perkembangan Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (%)

Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan karena pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik serta adanya inovasi yang dilakukan di kabupaten/kota, seperti pelayanan dokumen kependudukan 1 (satu) hari jadi, pelayanan 3 in 1 (*three in one*), bayi lahir pulang dari rumah sakit langsung mendapatkan akta kelahiran, *sms gateway*, dan layanan *online*.

Pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari jumlah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tahun 2021, sebanyak 24 antara lain, Dinas Sosial, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pandapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, RS Karyadi, RSJD Surakarta, Biro Kesejahteraan Rakyat, Balkesmas Provinsi, Balkesmas Pati, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, BPR BKK Jawa Tengah, RS Panti Wiloso, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di desa dilaksanakan dengan konsep Pemberdayaan Masyarakat dengan tujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Untuk memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, dan PDTT dengan gambaran sebagai berikut.

Tabel 2.193.

Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2017-2021

Status Desa	Jumlah (desa) s.d. Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sangat tertinggal	52	15	2	-	n/a
Tertinggal	1.444	603	266	147	n/a
Berkembang	5.203	5.580	5.560	5.168	n/a
Maju	1.038	1.494	1.841	2.295	n/a
Mandiri	72	117	140	199	n/a
Total Desa	7.809	7.809	7.809	7.809	n/a

Sumber: Dispermasdesdukcapi Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari data tersebut, pada tahun 2021 sudah tidak ada lagi status desa sangat tertinggal. Desa dengan status tertinggal berkurang dari 266 pada tahun 2020 menjadi 147 di tahun 2021. Di Tahun 2021 status desa mandiri mengalami peningkatan dari 140 di tahun 2020 menjadi 199 pada tahun 2021.

Selanjutnya salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Tengah adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa meliputi BUMDes, Pasar Desa, UP2K-PKK dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Perkembangan lembaga ekonomi desa di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.194.

Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2017-2021

No	Jenis Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah (unit) s.d. Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BUMDesa	2.511	4.215	5.539	6.776	n/a
2	Pasar desa	1.369	1.349	1.671	1.671	n/a
3	UED-SP	1.029	1.029	1.029	1.029	n/a
3	UP2K-PKK	22.326	22.326	22.326	22.326	n/a

Sumber: Dispermasdesdukcapi Provinsi Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2017-2021 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 2.230 unit di tahun 2017 menjadi 6.776 unit di tahun 2021. Untuk melihat perkembangan BUMDes berdasarkan Klasifikasi pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

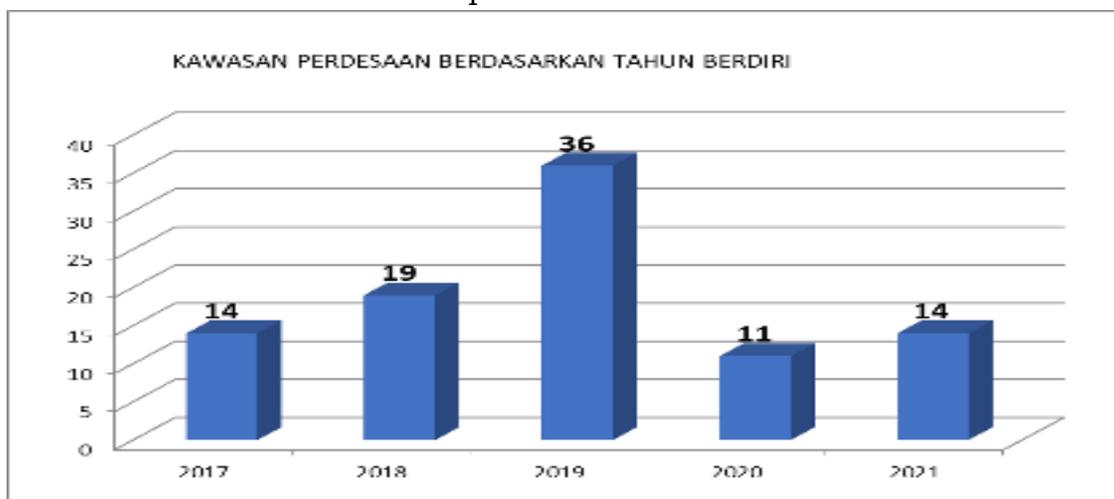
Tabel 2.195.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Jawa Tengah
Berdasarkan Klasifikasi Perkembangan BUMDesa Tahun 2021

No	KABUPATEN	JML DS	PENILAIAN BUMDES 2021					KETERANGAN		
			DASAR	TUMBUH	BERKEMBANG	MAJU	JUMLAH	2021 BARU	% progres input	pertumbuhan BUMDES 2020-2021
1	Banjarnegara	266	103	67	1	-	171	-	100	0,00%
2	Banyumas	301	120	153	23	3	299	30	100	10,03%
3	Batang	239	132	68	7	1	208	86	100	41,35%
4	Blora	271	131	101	10	3	245	40	100	16,33%
5	Boyolali	261	84	96	16	4	200	66	100	33,00%
6	Brebes	292	116	161	14	1	292	10	100	3,42%
7	Cilacap	269	59	179	27	4	269	18	100	6,69%
8	Demak	243	111	67	7	-	185	69	100	37,30%
9	Grobogan	273	163	99	7	4	273	11	100	4,03%
10	Jepara	184	81	93	10	-	184	-	100	0,00%
11	Karanganyar	162	80	65	8	1	154	37	100	24,03%
12	Kebumen	449	78	275	44	5	402	13	100	3,23%
13	Kendal	266	124	91	6	1	222	75	100	33,78%
14	Klaten	391	157	177	34	12	380	49	100	12,89%
15	Kudus	123	41	3	1	-	45	13	100	28,89%
16	Magelang	367	137	167	23	6	333	144	100	43,24%
17	Pati	401	222	172	5	2	401	-	100	0,00%
18	Pekalongan	272	91	85	8	7	191	56	100	29,32%
19	Pemalang	211	106	93	9	3	211	-	100	0,00%
20	Purbalingga	224	98	75	25	4	202	49	100	24,26%
21	Purworejo	469	152	240	20	5	417	43	100	10,31%
22	Rembang	287	144	69	8	5	226	90	100	39,82%
23	Semarang	208	51	107	15	1	174	44	100	25,29%
24	Sragen	196	110	80	1	1	192	4	100	2,08%
25	Sukoharjo	150	45	77	3	-	125	55	100	44,00%
26	Tegal	281	63	97	18	4	182	83	100	45,60%
27	Temanggung	266	43	150	11	1	205	-	100	0,00%
28	Wonogiri	251	97	122	6	-	225	80	100	35,56%
29	Wonosobo	236	114	44	3	2	163	72	100	44,17%
	JUMLAH	7.809	3.053	3.273	370	80	6.776	1.237	100	0,18355608

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, April 2022

Berdasarkan data Penilaian Klasifikasi BUMDesa, dari 7.809 Desa di Jawa Tengah di tahun 2021 BUMDesa dengan kategori Maju sejumlah 80 unit (1,02 persen) dan kategori ber kembang 370 unit (4,73 persen), sedangkan BUMDesa dengan kategori Tumbuh sejumlah 3.273 unit (41,91 persen) dan kategori dasar sejumlah 3.053 unit (39,09 persen). Kondisi tersebut cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDesa, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, produk unggulan belum mampu menembus pasar yang luas, serta kualitas SDM pengelola BUMDesa yang masih kurang.

Pembangunan di desa dengan pendekatan keruangan, selain dilakukan melalui domain pembangunan desa juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan, yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk 94 kawasan perdesaan.



Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, April 2022

Gambar 2.109.

Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Walaupun dari sisi kuantitas meningkat, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain 1) Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap regulasi pembangunan kawasan perdesaan; 2) Belum sinerginya pembangunan kawasan perdesaan baik di Provinsi maupun di Kabupaten; serta 3) Masih lemahnya komitmen pelaku dalam pembangunan.

j. Unsur Penunjang Pemerintahan

a) Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kinerja penyelenggaran urusan Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 bidang program dan 7 indikator kinerja. Pada Tahun 2020 realisasi capaian kinerja perencanaan persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) pada lingkup bidang perekonomian, bidang pemerintahan dan sosial budaya, infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada masing – masing bidang mencapai target 90 persen dan untuk Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan pada Tahun 2020 juga sebesar 90 persen. Sehingga indikator urusan Perencanaan sebanyak 7 indikator dengan keseluruhan indikator berstatus telah tercapai.

b) Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*). Mendasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMD dan Renstra PD, kinerja bidang pengawasan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2017-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.196.
Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2021

No.	Kinerja Pengawasan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai 3,023	Nilai 3,158	NA	3,115	
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	

Sumber: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 2022

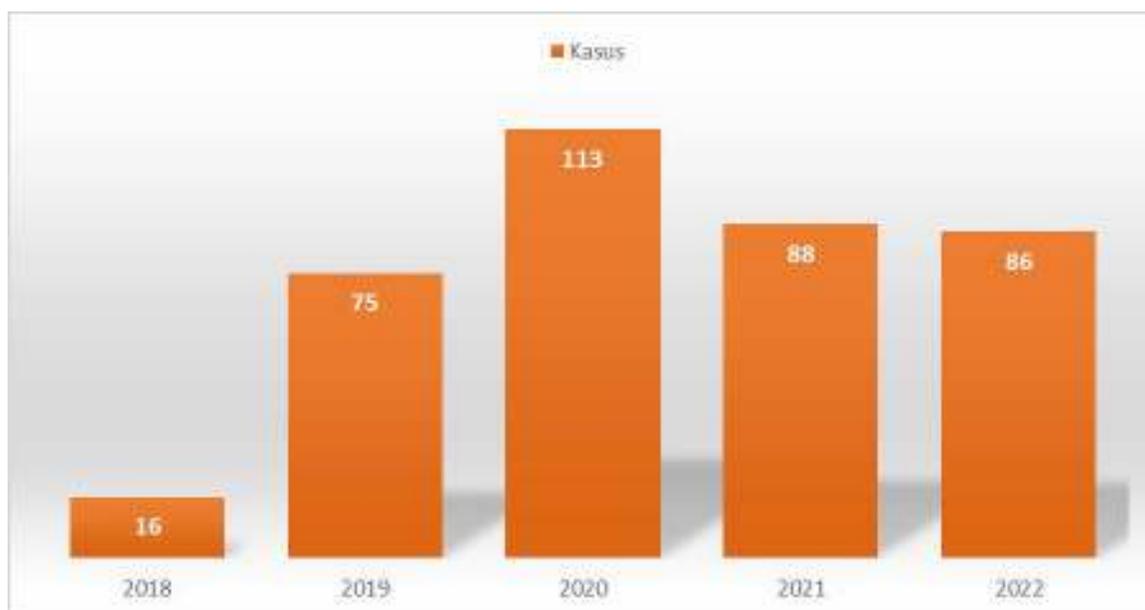
Hasil penilaian maturitas SPIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019 cenderung meningkat, artinya kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan tahun 2020, tidak dilakukan *quality assurance* oleh BPKP serta terdapat perubahan pedoman aplikasi SPIP online, sehingga berakibat tidak ada penilaian maturitas SPIP tahun 2020 yang telah berjalan dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Sedangkan nilai maturitas SPIP pada tahun 2021 sebesar 3,115 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,043. Hal ini disebabkan karena belum menerapkan manajemen resiko sebagai indikator unit kerja.

Sesuai dengan hasil reuiu atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai dengan 2021 Kapabilitas APIP sudah mencapai Level 3 penuh. Ini artinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner*.

2.7.2 Kondusivitas Daerah

Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari apakah daerah tersebut kondusif, sehingga peran pemerintah untuk dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat menjadi mutlak. Mewujudkan kemandirian perlu juga menciptakan kondisi yang teratur, tertib sesuai norma yang berlaku dan juga yang ada di masyarakat. Dengan perwujudan tersebut, maka potensi konflik akan secara simultan dapat ditekan dan stabilitas daerah terjaga. Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 saat adanya pandemi *Covid-19* tercatat 113 kasus kejadian konflik. Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2022, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir konflik

masih memerlukan upaya yang cukup keras, karena di tahun 2018 dapat diminimalisir hingga hanya terjadi 18 kasus saja.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.110.

Rekap Kejadian Konflik di Provinsi Jawa Tengah

Potensi radikalisme di Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan nilai 6,8% atau masih diatas rata-rata nasional. Potensi radikalisme lebih tinggi pada perempuan, generasi muda, dan mereka yang aktif diinternet. Masih menjadi satu kesatuan riset yang dilakukan oleh BNPT, Indeks kebhinekaan masyarakat di Jawa Tengah adalah 89,6% dengan dimensi sikap masih tergolong rendah jika dibanding dengan dimensi pemahaman, hal ini dikarenakan kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses internet dan sosial media, termasuk pada kalangan rural. Melihat pentingnya akses internet dalam meningkatkan internalisasi kebhinekaan, perlu juga disiapkan tentang literasi digital yang ada di masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut karena pada mereka yang aktif diinternet memiliki potensi radikalisme yang lebih tinggi.

Hal lain yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kondusivitas wilayah adalah dengan melihat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB. Provinsi Jawa Tengah pada IKUB mengalami penurunan dimana skors tahun 2021 sebesar 75,12, sedangkan di tahun 2022 sebesar 74,28. Selain itu pada penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 81,15. Aspek kesetaraan pada penilaian IDI Provinsi Jawa Tengah dikategorikan sedang, dimana pada aspek tersebut memperlihatkan kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, serta anti monopoli sumber daya ekonomi.

Data unjuk rasa pasca terjadinya pandemi *covid-19* memperlihatkan adanya penurunan, namun terkait dengan unjuk rasa berdasarkan tuntutan yang dibawa, dimana tuntutan yang ada dalam kategori sosbud masih tergolong tinggi.

Tabel 2.197.**Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022**

No	Tuntutan	Tahun					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Ideologi	0	0	0	0	n/a	
2	Politik	7	25	9	15	n/a	
3	Ekonomi	65	56	87	52	n/a	
4	Sosbud	200	181	234	109	n/a	
5	Kamtibmas	9	17	13	13	n/a	
6	Pendidikan	5	4	7	2	n/a	
7	Kesehatan	1	5	7	8	n/a	
	Jumlah	287	288	357	199	n/a	

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2022

Melihat kondisi existing Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kondusivitas wilayah, cipta kondisi secara optimal terus ditingkatkan guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menegakan norma yang berlaku, tidak terkecuali norma hukum. Penegakan norma hukum adalah ditujukan untuk menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan kepada seluruh masyarakat melalui penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah.

Tabel 2.198.**Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022**

No	Tahun	Jumlah Pelanggar	Jumlah Pelanggar yang dibina	Persentase
1	2018	1.000	1.000	100
2	2019	1095	1095	100
3	2020	293	293	100
4	2021	435	435	100
5	2022	250	250	100

Sumber; Satpol PP Provinsi Jawa Tengah

Melihat data yang ada terlihat adanya penurunan intensitas karena adanya pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2020. Namun jika dilihat berdasarkan tabel tersebut kinerja penyelesaian pelanggaran Produk hukum daerah tahun 2017-2021 sudah sangat baik dengan persentase 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap pelanggaran produk hukum daerah yang terdata dapat diselesaikan melalui cara persuasif dan represif. Namun apabila terindikasi adanya sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, maka dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Hingga saat ini tercatat 147 Perda yang masih aktif, dengan Perda yang memiliki sanksi hukum (sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana) sebanyak 65 Perda. Beberapa Perda tidak dapat

ditegakkan karena Instansi Teknis sebagai pengampu Perda tidak dapat menjalankan fungsinya dalam sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian karena keterbatasan sumber daya. Disamping itu, informan yang ada tidak dapat mencakup keseluruhan luas wilayah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu adanya alternatif lain untuk memiliki informan di beberapa titik yang terindikasi rawan terjadinya pelanggaran yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Salah satu alternatif yang ada adalah melakukan mobilisasi linmas yang ada di daerah. Persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus terkait dengan alternatif tersebut adalah menurunnya rasio linmas yang ada.

Tabel 2.199.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2018	311.746	34.257.865	90,99
2	2019	230.782	34.490.835	66,91
3	2020	239.430	36.516.035	66,57
4	2021	240.958	36.516.035	65,98
5	2022	n/a	n/a	n/a

Sumber : Sat. Polisi Pamong Praja Prov. Jateng dan BPS Jateng, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, rasio jumlah linmas terhadap jumlah penduduk Jawa Tengah semakin menurun karena rendahnya minat masyarakat menjadi anggota linmas, banyak anggota linmas yang meninggal dunia, dan adanya perpindahan anggota linmas keluar provinsi.

2.8 Pertanahan

Untuk mendukung kegiatan pembangunan di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanahan merupakan pendukung kegiatan pembangunan fisik dalam hal mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran yaitu ijin penetapan lokasi (penlok) yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan mendapat ganti untung yang layak dari pemerintah. Pada Tahun 2022 terdapat, penetapan lokasi aktif sebanyak 14 ijin yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.200.
Penetapan lokasi aktif Untuk mendukung kegiatan pembangunan
di Jawa Tengah

No	Nama Penetapan Lokasi
1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang
2	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Magelang
3	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Di Kabupaten Semarang
4	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Lahan Bagi Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak Seksi 2

No	Nama Penetapan Lokasi
5	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
6	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Penambahan Kawasan Industri Cilacap Di Kabupaten Cilacap
7	Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo - Yogyakarta Di Kabupaten Klaten
8	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran – Pedan Sirkuit 2 Section 2 (Ampel – Pedan) Di Provinsi Jawa Tengah
9	Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Jragung Kabupaten Semarang
10	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Pidekso di Kabupaten Wonogiri
11	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar
12	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Magelang
13	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora
14	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Tingal di Kabupaten Temanggung

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 2.201.

Capaian Penerbitan Ijin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemantauan Penetapan Lokasi	-	-	-	3.268	526	2.217
2	Penetapan Lokasi	-	-	7.414	400	5928	2.811

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mempertahankan lahan dikawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan insentif berupa sertipikasi gratis tanah yang masuk dalam kawasan LP2B. Melalui program ini diharapkan masyarakat berkomitmen menjaga fungsi lahan serta status lahan yang memiliki kepastian hukum (bersertipikat). Namun hal ini masih perlu dukungan program lainnya yang dapat memberikan insentif dan disinsentif untuk lebih meningkatkan keuntungan bagi masyarakat petani yang memiliki lahan dikawasan LP2B. Capaian stimulasi pembuatan sertipikat lahan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.202.**Capaian Sertifikasi Lahan Di Jawa Tengah Tahun 2022**

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Sertifikat	Jumlah Bidang
1	Cilacap	Sampang	Paberasan	150	50
2	Blora	Kundurana	Botoreco		50
3	Semarang	Bringin	Gogodalem		50
Total				150	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2022

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah menginventarisasi potensi penataan aset dan mengkoordinasi serta melakukan fasilitasi penataan akses bagi penerima program Reforma Agraria. Penataan akses yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan subyek program reforma agraria antara lain seperti pelatihan kepada kelompok tani dikawasan LP2B dan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah menjadi pupuk organik. Capaian pelaksanaan program Reforma Agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.198.

Tabel 2.203.**Capaian Reforma Agraria Di Jawa Tengah Tahun 2022**

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
1	Kabupaten Tegal	Kecamatan Balapulang	Desa Balapulang Kulon	Sebagian besar masyarakat Desa Balapulang Kulon dengan pekerjaan pokok adalah petani, namun belum didukung dengan irigasi teknis dan merupakan sawah tadah hujan dengan irigasi non teknis, sehingga yang diperlukan adalah pembangunan jaringan irigasi, dan pembangunan embung desa (namun sulit terealisasi karena jauh dari sumber mata air) atau pun dengan pembuatan sumur bor. Dalam rangka mengatasi atau memperbaiki jaringan irigasi sawah tersebut Pemerintah Desa Balapulang Kulon telah menginisiasi kerjasama dengan Desa sekitar dan Instansi terkait bail Kabupaten maupun Provinsi, namun sampai saat ini belum terealisasi, hal ini menyebabkan 50% nya lahan sawah gagal terutama yang letaknya jauh dari sumber air. Selain itu menurut warga penggarap hama yang serig menyerang lahan pertanian adalah hama wereng.	50 KK	Pelatihan "Pengelolaan Lahan Pertanian Tadah Hujan" dan "Penanggulangan Hama Wereng"

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
2	Kabupaten Sragen	Kecamatan Sambirejo	Desa Jetis	Permasalahan yang dihadapi di Desa Jetis yaitu terkait masalah pupuk dikarenakan pembelian pupuk sekarang di batasi sehingga tidak bias mencakupi luas lahan para petani yang mengakibatkan hasil pertanian yang kurang optimal, sebagian kecil warga masyarakat Desa Jetis berinisiatif untuk membuat pengolahan pupuk kandang organik namun harapannya sebagian besar masyarakat desa dapat menerapkan pembuatan pupuk organik untuk membantu memenuhi kebutuhan pupuk warga sendiri. Selain itu, Pemdes Jetis juga mendapatkan keluhan dari petani terkait penyakit tanaman yang menyerang tanaman mereka seperti busuk leher/jamur pada tanaman dan rata - rata pada tanaman padi	50 KK	Pelatihan Penanganan Busuk Leher Pada Tanaman Padi dan Pembuatan Pupuk Organik
3	Kabupaten Grobogan	Kecamatan Tegowanu	Desa Tegowanu Wetan	Permasalahan yang sering di hadapi oleh petani di antaranya kurangnya pasokan pupuk bagi petani meskipun sudah ada beberapa kelompok tani yang sekarang sudah mengembangkan pupuk organik dari sampah daun - daun kering akan tetapi kelompok tani yang sudah berinisiatif membuat pupuk organik namun masih sebagian kecil. Pemerintah Desa Tegowanu Wetan mempunyai rencana kedepannya desa mereka akan di jadikan obyek wisata terkait tanaman organik. Pemerintah Desa Tegowanu Wetan juga mengharapkan selain pengolahan sampah organik menjadi pupuk di harapkan juga warga masyarakat bias mengolah sampah rumah tangga guna di jadikan obat, pupuk maupun hal hal lainnya, selain itu karena konsep kedepannya akan dijadikan wisata organik pemerintah desa tegowanu wetan masih terkendala terkait serifikasi organiknya	50 KK	Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Guna Mendukung Pertanian Organik
4	Kabupaten Pati	Kecamatan Gabus	Desa Wuwur	Hasil utama pertanian di Desa Wuwur yaitu padi. Terkait permasalahan yang terdapat di Desa Wuwur yaitu hama tikus serta hama burung. Sementara ini penanganan masih menggunakan setrum/listrik untuk hama tikus serta hama burung hanya secara manual para petani yaitu di usir oleh tangan saja. Dalam hal ini, masyarakat Desa Wuwur membutuhkan penanganan yang efektif terkait permasalahan hama tikus dan hama burung tersebut.	50 KK	Kegiatan Akses Reform Pelatihan Pemanfaatan Burung Hantu (Tyto Alba) sebagai Pengendali Hama Tikus dengan pokok bahasan tata cara pemeliharaan dan pemanfaatan burung hantu untuk penanggulangan hama tikus serta penanganan hama tikus untuk meningkatkan perekonomian desa
5	Kabupaten Wonosobo	Kecamatan Kejajar	Desa Sigedang	Potensi yang berada di Desa Sigedang merupakan tanaman kentang, namun selama ini para warga menanam kentang dengan bibit yang di ekspor dari wilayah lain (Jawa Barat). Sejauh ini di Desa Sigedang yaitu belum terlalu banyak warga masyarakat maupun kelompok tani yang berminat untuk melakukan pembuatan bibit kentang sehingga produksi pembibitan kentang masih rendah, padahal telah dilakukan sertifikasi pembibitan	50 KK	Peningkatan Budidaya Bibit Kentang dan Pengembalian Fungsi Lahan Secara Organik

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA	KEBUTUHAN AKSES	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	BENTUK PELATIHAN/ STIMULAN/ PEMBERDAYAAN/ SOSIALISASI/ WORKSHOP
				kentang. Sehingga secara legalitas bibit kentang sudah dapat di komersilkan maupun di pakai sendiri.		
6	Kabupaten Sragen	Kecamatan Sambungmacan	Desa Sambung Macan	Desa Sambungmacan memiliki danau kecil yang ditengahnya terdapat pulau kecil, yang merupakan potensi untuk menjadi wisata desa. Dan harapan kedepannya di tengah pulau kecil di danau tersebut akan dikembangkan untuk wisata pertanian organik di Desa Sambungmacan	50 KK	Pelatihan Pertanian Organik untuk Mendukung Wisata Desa
7	Kabupaten Cilacap	Kecamatan Maos	Desa Mernek	Mernek telah memiliki 4 pilar MERNEK JENEK yaitu lingkungan lestari, pertanian, perikanan, & peternakan melimpah, kemandirian ekonomi serta desa aman dan kondusif. Potensi Desa Mernek yang salah satunya yaitu Gapoktan yang aktif memiliki kegiatan rutin dan menjadi salah satu factor untuk mengembangkan wisata Desa organik di Desa Mernek	50 KK	Pelatihan Pengelolaan Lahan Organik Menuju Wisata Desa

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah , 2022

2.9. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2021

Kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2021 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2021 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Permend Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar agri Nomor 86 Tahun 2017.

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKPPD) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.204.

Rekapitulasi Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2018-2023

Indikator	Jumlah Indika- tor	Tercapai \geq 100% Target Akhir RPJMD		Akan Tercapai 99% \leq 60% Target Akhir RPJMD		Perlu Upaya Keras < 60% Target Akhir RPJMD		NA	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
IKU	13	4	30,77	8	61,54	1	7,69	0	0
IKPPD	194	91	46,91	85	43,81	18	9,28	0	0

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022 (hasil analisis)

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, untuk Indikator Kinerja Utama dari 13 target indikator kinerja utama daerah terdapat 4 indikator tercapai, 8 indikator akan tercapai, 1 Indikator berstatus perlu upaya keras yaitu pertumbuhan ekonomi. dampak akibat pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi 2 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah namun pada triwulan III 2021 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara kumulatif membaik dan tumbuh

dibandingkan dengan kumulatif sampai dengan triwulan III 2021 dimana semua lapangan usaha selama tiga triwulan mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dari 194 target indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibagi dalam 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing terdapat 91 indikator tercapai, 85 indikator akan tercapai, 18 indikator perlu upaya keras dan 20.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya menyejahterakan masyarakat memerlukan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah tersebut dipengaruhi perekonomian global, nasional dan daerah, kinerja keuangan pada masa lalu, serta regulasi maupun kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan keuangan daerah diharapkan sumber daya ekonomi milik daerah dapat digunakan secara tepat dan setiap rupiah uang daerah digunakan secara efektif dan efisien dalam pembangunan. Memperhatikan kondisi tersebut, disusun proyeksi dan kerangka pendanaan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024–2026.

3.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian daerah tidak terlepas dari kondisi perekonomian global dan nasional yang digambarkan detail sebagai berikut:

3.1.1. Dinamika Perekonomian Global

Perekonomian global pascapandemi Covid-19 pada tahun 2022 yang belum sepenuhnya pulih dihadapkan pada tantangan dinamika geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global. Perang Rusia – Ukraina mengakibatkan krisis energi dan pangan (disrupsi sisi produksi) yang mendorong terjadinya lonjakan inflasi global berakibat adanya kebijakan menaikkan suku bunga acuan di banyak negara khususnya Amerika Serikat.

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diproyeksikan tumbuh melambat pada kisaran 3,2 persen dan tahun 2023 juga diproyeksikan tumbuh melambat pada kisaran 2,7 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi negara-negara maju juga diperkirakan akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan turun menjadi sebesar 1,6 persen pada tahun 2022 dan 1,0 persen pada tahun 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah 3,2 persen pada tahun 2022, dan 4,4 persen pada tahun 2023; Jepang diproyeksikan tumbuh 1,7 persen pada tahun 2022, dan 1,6 persen pada tahun 2023; dan negara Zona Eropa diproyeksikan tumbuh sebesar 3,1 persen pada tahun 2022, dan 0,5 persen pada tahun 2023.

Negara berkembang seperti India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 6,8 persen pada tahun 2022 dan 6,1 persen pada tahun 2023. Sedangkan proyeksi inflasi global tahun 2022 akan naik sebesar 8,8 persen dan tahun 2023 sebesar 6,5 persen. Tingkat inflasi di Amerika Serikat pada September 2022 sebesar 8,2 persen kemudian diikuti kenaikan tingkat suku bunga acuan sebesar 3,25 persen. Inflasi negara Inggris bulan September 2022 sebesar 10,1 persen yang direspon dengan kenaikan tingkat suku bunga acuan sebesar 2,25 persen. India dengan inflasi sebesar 7,4 persen di Bulan September 2022 menaikkan suku bunga acuannya sebesar 5,90 persen. Indonesia dengan inflasi bulan Desember 2022 sebesar 5,51 persen menaikkan suku bunga acuannya sebesar 5,50 persen (WEO IMF, 2022).

Spillover effect dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini harus diwaspadai khususnya terhadap kenaikan *cost of fund* untuk pembiayaan, baik APBN/APBD maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi

yang masih awal dan masih rapuh. Pergeseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan (*policy trade-off*) yang sangat sulit bagi negara-negara terdampak di dunia. Pilihan kebijakan dapat berupa pengembalian stabilitas harga yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan atau mendukung akselerasi pemulihan ekonomi. Kebijakan tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menggiring pada risiko terjadinya kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an. Kondisi ini akan berimbas negatif ke seluruh dunia terutama terhadap negara-negara berkembang dan *emerging market*.

3.1.2. Dinamika Ekonomi Nasional

Pemulihan ekonomi nasional menunjukkan tren membaik seperti pada saat sebelum Covid-19. Setelah mampu menjaga pertumbuhan positif sebesar 3,69 persen (*c-to-c*) pada tahun 2021 meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut pada triwulan I-2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,01 persen (*y-o-y*), triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,45 persen (*y-o-y*), triwulan III-2022 tumbuh sebesar 5,72 persen (*y-o-y*), dan pada akhir tahun 2022 tumbuh 5,31 persen (*c-to-c*). Perbaikan dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus menunjukkan tren peningkatan.

Pemulihan yang kuat terjadi hampir disemua sektor ekonomi terutama sector manufaktur dan perdagangan. Indikator *Prompt Manufacturing Index (PMI)* atau Indeks Manufaktur Indonesia pada Bulan Desember 2022 sebesar 50,9 yang menggambarkan berada pada fase ekspansi. Selain itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Secara kumulatif, pada Desember 2022 neraca perdagangan tercatat surplus US\$3,89 miliar. Surplus neraca perdagangan berasal dari tingginya surplus nonmigas yang dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit mentah atau *crude palm oil (CPO)*.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun mendekati level pra pandemi, menjadi 5,86 persen pada Agustus 2022 dari 6,49 persen pada Agustus 2021. Sementara, angka kemiskinan nasional juga konsisten menurun, dari sebelumnya 9,71 persen pada September 2021, turun menjadi sebesar 9,57 persen pada September 2022. Sedangkan inflasi naik akibat adanya kenaikan komoditas global khususnya energi dan pangan. Inflasi bulan Desember 2022 sebesar 5,51 persen (*y-o-y*) naik dari bulan November 2022 sebesar 5,42 persen. Namun dibandingkan dengan negara-negara G20, inflasi di Indonesia masih tergolong moderat.

Tekanan inflasi di Indonesia tidak setinggi di negara-negara tersebut karena kenaikan harga energi global (bahan bakar minyak, listrik, dan gas) diredam oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN (*shock absorber*) yang konsekuensinya menyebabkan kebutuhan belanja subsidi energi dan kompensasi meningkat tajam. Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal dan rapuh, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional.

3.2. Kondisi Perekonomian Daerah

Pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 5,31 persen (*c-to-c*) meningkat daripada capaian tahun 2021 sebesar 3,32 persen (*c-to-c*). Pemulihan ekonomi Jawa Tengah pascapandemi Covid-19 didukung ekspor, investasi, dan konsumsi rumah tangga, sedangkan dari sisi lapangan usaha ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, serta konstruksi. Tantangan ekonomi Jawa Tengah ke depan adalah melambatnya perekonomian global yang mengakibatkan pelambatan ekspor dan kenaikan inflasi global serta potensi cuaca ekstrem.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun mendekati level pra pandemi, menjadi 5,57 persen pada Agustus 2022 dari 5,95 persen pada Agustus 2021. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 11,25 persen pada September 2021, turun menjadi 10,98 persen pada September 2022. Sedangkan Inflasi di Jawa Tengah pada bulan Desember 2022 sebesar 5,63 persen (*y-o-y*), naik dibandingkan pada bulan November 2022 sebesar 5,16 persen (*y-o-y*).

3.3. Kinerja Keuangan Daerah

Gambaran kinerja keuangan daerah diuraikan dengan ruang lingkup keuangan daerah, yakni hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, hak melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah. Selain itu, keuangan daerah juga meliputi kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Lebih lanjut disajikan kondisi kemandirian keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

3.3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari tiga komponen yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Pendapatan transfer, dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang Sah.

Pada periode 2018 hingga 2022 pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami kontraksi 1,8 persen dari Rp25,859 triliun menjadi Rp25,393 triliun karena perkembangan ekonomi nasional yang kurang stabil sebagai imbas dari adanya pandemi Covid-19. Tahun 2021 merupakan masa pemulihan berbagai aspek kehidupan

pascapandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan realisasi pendapatan daerah yang tumbuh 4,88 persen pada tahun 2021 menjadi Rp26,633 triliun.

Tahun 2022 pendapatan daerah tumbuh negatif sebesar 9,26 persen menjadi Rp24,167 triliun. Hal ini karena sesuai dengan kebijakan pendapatan transfer yang sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, serta informasi resmi mengenai alokasi TKDD tahun anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Secara terperinci, realisasi pendapatan daerah tahun 2018–2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

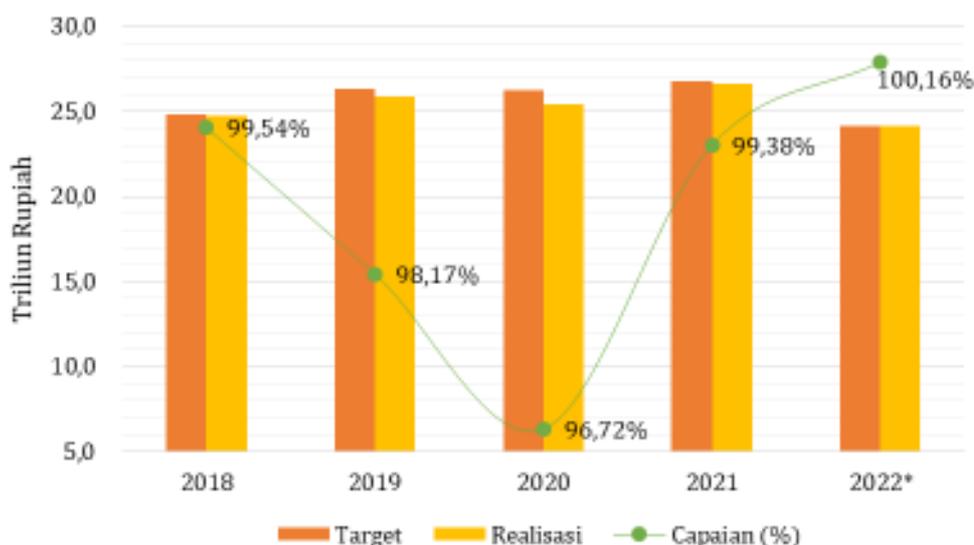
Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

Uraian	Jumlah (Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022*
PENDAPATAN DAERAH	24.702.318.190.582	25.859.780.137.936	25.393.735.934.148	26.633.000.085.963	24.167.935.634.127
PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.711.836.037.849	14.437.914.236.398	13.668.282.278.855	14.695.474.898.162	16.264.618.853.852
Pajak Daerah	11.507.119.643.262	11.951.919.535.383	11.139.173.309.780	11.718.378.320.505	13.484.851.151.740
Retribusi Daerah	104.870.144.923	114.861.058.851	93.279.121.699	91.634.269.205	115.158.014.199
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	459.626.767.964	512.701.993.939	530.091.029.137	508.263.876.971	546.717.104.899
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.640.219.481.700	1.858.431.648.225	1.905.738.818.239	2.377.198.431.481	2.117.892.583.014
PENDAPATAN TRANSFER	10.968.474.152.733	11.398.681.901.538	11.702.101.655.293	11.871.176.336.054	7.810.882.578.787
Dana Bagi Hasil Pajak	760.737.570.218	564.290.383.834	843.392.119.954	1.023.258.872.325	909.711.090.450
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.712.350.806	11.677.937.800	16.888.016.587	12.586.758.109	18.989.623.430,00
Dana Alokasi Umum	3.652.586.431.000	3.784.512.513.000	3.438.709.973.000	3.432.978.859.000	3.435.718.090.405
Dana Alokasi Khusus (fisik)	267.575.436.659	267.101.813.252	350.564.240.958	401.885.567.398	371.734.785.185
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	6.244.165.043.013	6.707.320.412.787	6.983.232.690.794	6.932.375.674.222	3.013.508.989.317
Dana Insentif Daerah	33.500.000.000	62.388.421.000	68.212.455.000	68.710.605.000	61.352.500.000
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.197.321.037	1.390.419.865	1.102.159.000	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.008.000.000	23.184.000.000	23.352.000.000	65.728.851.747	92.434.201.488
Pendapatan Hibah	22.008.000.000	23.184.000.000	23.352.000.000	18.958.300.000	92.161.740.403
Lain lain pendapatan sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	64.882.003.502	272.461.085

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2018 – 2022

*) Unaudited

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2018–2022 mengalami fluktuasi seiring situasi perekonomian. Realisasi tahun 2018 yang mencapai 99,54 persen mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 98,17 persen dan posisi terendah pada tahun 2020 dengan realisasi 96,72 persen karena dampak pandemi Covid-19. Seiring terjadinya pemulihan ekonomi, realisasi pendapatan daerah tahun 2021 meningkat hingga 99,38 persen. Meskipun tumbuh negative, pada realisasi pendapatan daerah tahun 2022 dapat melebihi target dengan realisasi sebesar 100,16 persen. Capaian ini diperoleh dari berbagai upaya untuk mencapai target pendapatan tahun 2022, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dinamika target dan realisasi pendapatan daerah tersebut sebagaimana tampak pada gambar berikut.



Sumber: *Bapenda Provinsi Jateng, 2018 – 2022*) unaudited*

Gambar 3.1.
Target, Realisasi, dan Capaian Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018–2022 tersebut ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD). PAD diharapkan menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pada periode 2018–2022 secara rata-rata pendapatan asli daerah berkontribusi sebesar 57,53 persen, sedangkan pendapatan transfer sebesar 42,29 persen, dan 0,18 persen merupakan kontribusi dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

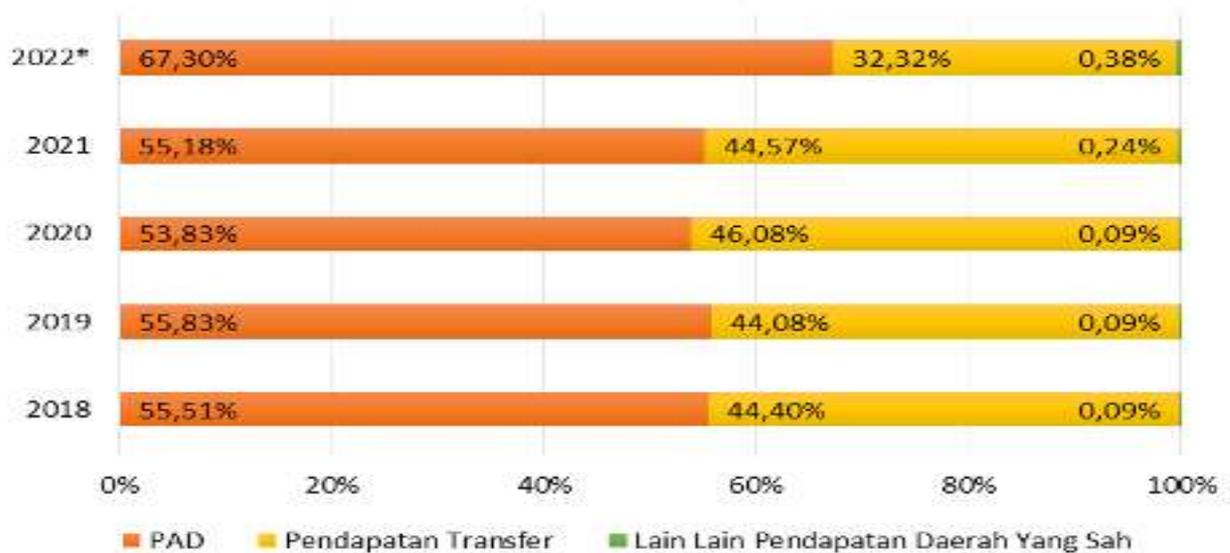


Sumber: Bapenda Provinsi Jateng, 2018 – 2022 *) Unaudited

Gambar 3.2.
Kontribusi Rata-Rata Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2018 – 2022 (%)

Kontribusi PAD cenderung mengalami peningkatan dan berbanding terbalik dengan kontribusi pendapatan transfer yang trennya mengalami penurunan. Kontribusi PAD terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan proporsi mencapai 67,30 persen dengan kontribusi pendapatan transfer sebesar 32,21 persen. Peningkatan kontribusi pendapatan transfer dan penurunan kontribusi PAD hanya terjadi pada tahun 2020. Meskipun kontribusinya relatif kecil, komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sejak tahun 2018–2020 sebesar 0,09 persen meningkat menjadi 0,24 persen pada tahun 2021, dan 0,38 persen pada tahun 2022.

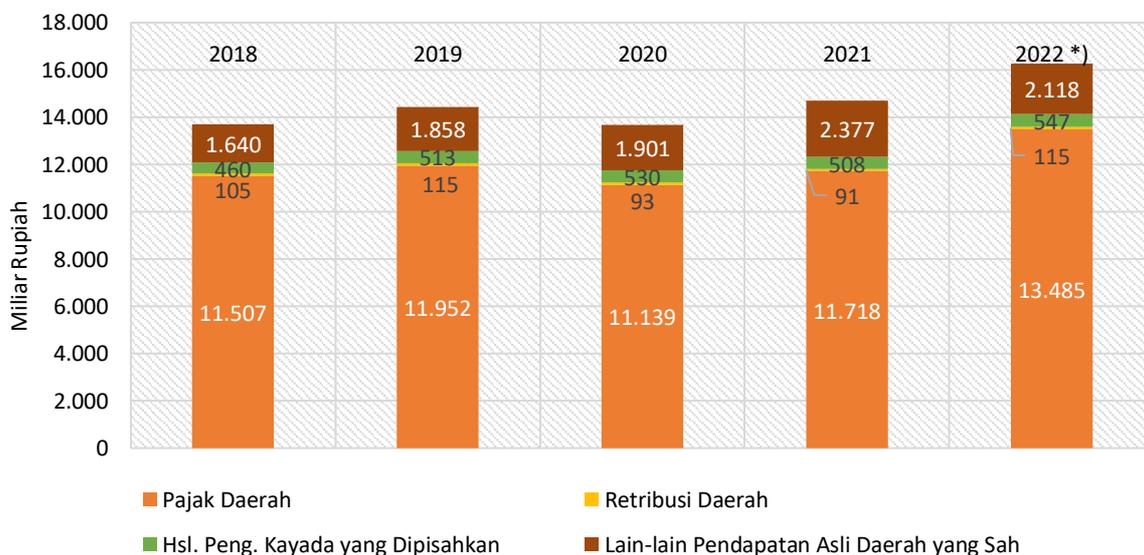
Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari pendapatan hibah sebesar Rp23,18 miliar merupakan hibah dari PT Jasa Raharja dan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp65,72 miliar atau naik 181,47 persen, yang bersumber dari alokasi program hibah jalan daerah (PHJD) untuk tahun 2022 sebesar Rp49,90 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat menjadi Rp92,43 miliar yang berasal dari pendapatan hibah dari Queensland Australia sebesar Rp20 miliar. Kontribusi komponen pendapatan daerah ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Bapenda Provinsi Jateng, 2018 – 2022, *) Unaudited

Gambar 3.3.
Kontribusi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2018–2022 (%)

Secara lebih detail, PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan sumber utama yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, nilai realisasi pajak daerah kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022.

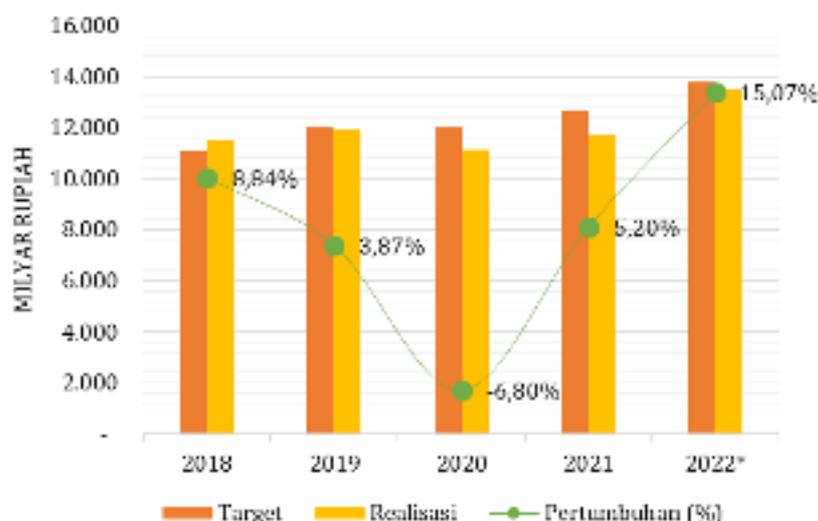


Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jateng 2018 – 2022 *) Unaudited

Gambar 3.4.
Perbandingan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022

Pada tahun 2020 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 6,8 persen daripada tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan pajak daerah merupakan dampak pandemi Covid-19 yang berakibat melambatnya laju pertumbuhan ekonomi sehingga prioritas pengeluaran masyarakat diarahkan pada kebutuhan dasar dan kesehatan dibanding membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) juga turun akibat rendahnya daya beli masyarakat dan lesunya pasar otomotif serta penutupan sebagian besar industri besar otomotif. Selain itu kebijakan pemerintah dalam penanganan pencegahan Covid – 19 untuk tidak mudik mengakibatkan konsumsi BBM turun rata-rata 26 persen serta turunnya harga jual BBM rata-rata 10,24 persen juga menjadi alasan turunnya penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).

Di sisi lain, pembatasan aktivitas masyarakat menjadikan kegiatan *door to door* dan razia tidak optimal. Penerimaan pajak daerah tumbuh 5,2 persen pada tahun 2021 menjadi Rp11,718 triliun seiring dengan meningkatnya pemulihan aktivitas ekonomi pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp13,484 triliun, tumbuh 15,08 persen dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pembelian bahan bakar motor (BBM) pada bulan April 2022 pada saat hari raya Idulfitri, serta adanya kenaikan tarif tiga jenis BBM pada tanggal 3 September 2022. Selain itu pajak air permukaan meningkat karena adanya obyek baru dan pengukuran ulang pada perusahaan daerah air minum (PDAM). Pajak rokok mengalami peningkatan cukup signifikan dikarenakan adanya kenaikan tarif cukai rokok. Perbandingan target dan realisasi pajak daerah periode 2018–2022 ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng 2018 – 2022 *) Unaudited

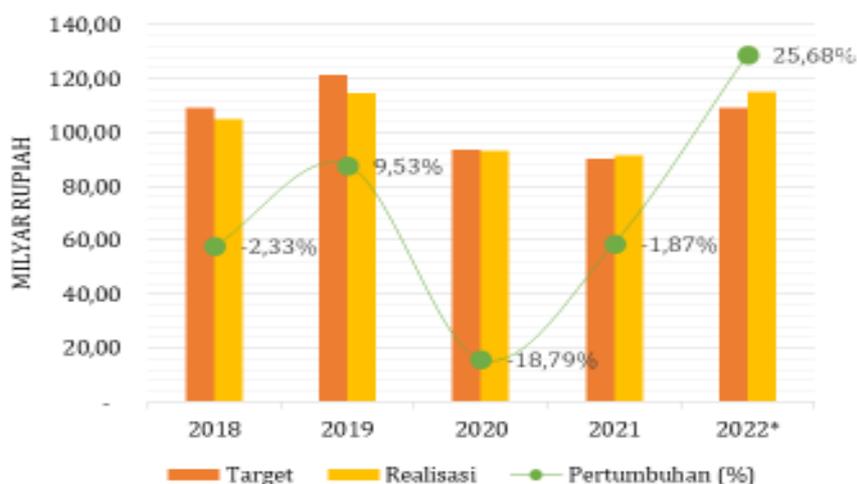
Gambar 3.5.

Target, Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)

Kenaikan pajak daerah mengindikasikan aktivitas ekonomi daerah yang mulai membaik. Namun, di sisi lain, masih terdapat kendala perekonomian daerah yang tercermin dari pos penerimaan lainnya. Retribusi daerah, misalnya, mengalami *shock* pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022. Realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020 dan 2021 tumbuh negatif sebesar 18,79 persen dan 1,87 persen.

Pertumbuhan negatif ini dikarenakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berdampak pada menurunnya penggunaan aula/asrama/gedung, penurunan okupansi penginapan, tutupnya beberapa obyek wisata, dan penurunan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal. Pandemi Covid-19 juga menurunkan jumlah kunjungan pasien ke balai kesehatan masyarakat, menurunnya aktivitas pembangunan yang berimbas pada turunnya jumlah penyewa alat berat, penurunan penjualan benih karena permintaan menurun, dan tutupnya pelayanan kantin sekolah karena adanya penerapan pembelajaran jarak jauh.

Pemulihan ekonomi mulai berdampak pada capaian retribusi daerah tahun 2021. Meskipun tumbuh negatif, realisasi penerimaan melampaui target. Pada tahun 2022 retribusi daerah tumbuh 25,68 persen mencapai 105,37 persen dengan nilai Rp115,15 miliar. Hal ini karena meningkatnya intensitas dan volume pemberian jasa dan layanan retribusi yang meliputi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Perkembangan target dan realisasi retribusi daerah serta pertumbuhannya dapat dilihat pada gambar berikut.



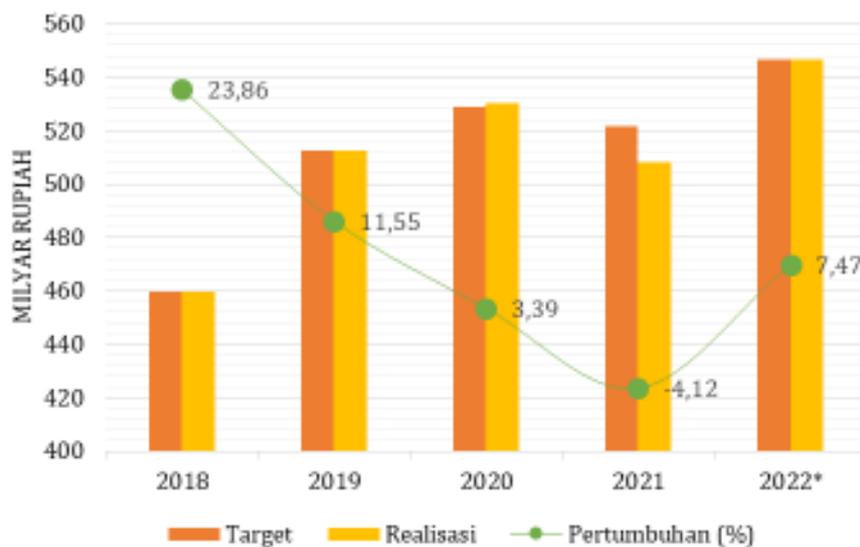
Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng 2018 – 2022 *) Unaudited

Gambar 3.6.

Target, Realisasi, dan Pertumbuhan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Selain retribusi, pos penerimaan lainnya yakni pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang justru mencatatkan tren peningkatan penerimaan dari tahun 2018 hingga 2020. Pos ini terdiri dari penerimaan deviden badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha milik negara (BUMN) kepada

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selalu meningkat setiap tahun, meskipun secara pertumbuhan mengalami penurunan. Pertumbuhan negatif baru terjadi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp508,26 miliar atau tumbuh negatif 4,12 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2020 yang disebabkan adanya koreksi perhitungan piutang tahun sebelumnya pada laporan keuangan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) sehingga memengaruhi penerimaan dividen yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Penerimaan ini kemudian tumbuh 7,47 persen pada tahun 2022 dengan nilai realisasi Rp546,71 miliar. Realisasi tersebut merupakan nilai tertinggi sepanjang periode 2018–2022. Hal ini disebabkan oleh semakin membaiknya kinerja BUMD yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan, target, dan realisasi Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng 2018 – 2022 *) Unaudited

Gambar 3.7.

Target, Realisasi, dan Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Di sisi lain, realisasi penerimaan di pos lain-lain PAD yang sah justru selalu meningkat sejak tahun 2018 hingga 2021 namun mengalami penurunan pada tahun 2022. Komponen lain-lain PAD yang sah pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan, tumbuh 24,71 persen dengan realisasi sebesar Rp2,377 triliun. Hal ini merupakan kenaikan penerimaan dari badan layanan umum daerah (BLUD)/rumah sakit yang sebagian besar dikontribusi dari peningkatan jasa layanan perawatan pasien Covid-19. Meskipun realisasinya masih melebihi target, lain-lain PAD yang sah pada tahun 2022 tumbuh negatif sebesar 10,94 persen sebagai dampak turunnya pendapatan pada BLUD dan jasa giro.



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng 2018 – 2022 *) Unaudited

Gambar 3.8.

Target, Realisasi, dan Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Dari berbagai komponen PAD tersebut dapat dilihat kontribusi rata-rata komponen PAD terhadap pendapatan daerah periode 2018–2022. Pajak daerah memiliki kontribusi tertinggi sebesar 47,29 persen. Adapun komponen PAD lain yakni lain-lain PAD yang sah memberi kontribusi rata-rata sebesar 7,80 persen sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi sebesar 2,02 persen. Retribusi daerah merupakan kontributor terkecil pada PAD dengan nilai rata-rata 0,41 persen.

Pendapatan daerah juga ditopang oleh kontribusi dari pos pendapatan transfer antara lain pada dana alokasi khusus (DAK) non fisik dengan kontribusi rata-rata mencapai 23,44 persen diikuti oleh dana alokasi umum (DAU) sebesar 14,01 persen. Dana bagi hasil pajak berkontribusi sebesar 3,24 persen, DAK fisik sebesar 1,31 persen, sedangkan Dana insentif daerah dan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) masing-masing berperan sebesar 0,23 persen dan 0,05 persen terhadap pendapatan daerah. Kontribusi tiap komponen dalam pendapatan daerah sebagaimana data pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

Uraian	Proporsi (%)					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022*	
PENDAPATAN DAERAH	100	100	100	100	100	100
PENDAPATAN ASLI DAERAH	55,51	55,83	53,83	55,18	67,30	57,53
Pajak Daerah	46,58	46,22	43,87	44,00	55,80	47,29
Retribusi Daerah	0,42	0,44	0,37	0,34	0,48	0,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,86	1,98	2,09	1,91	2,26	2,02
Lain-Lain PAD yang Sah	6,64	7,19	7,50	8,93	8,76	7,80
PENDAPATAN TRANSFER	44,40	44,08	46,08	44,57	32,32	42,29
Dana Bagi Hasil Pajak	3,08	2,18	3,32	3,84	3,76	3,24
Dana Bagi Hasil SDA	0,04	0,05	0,07	0,05	0,08	0,05
Dana Alokasi Umum	14,79	14,63	13,54	12,89	14,22	14,01
Dana Alokasi Khusus (fisik)	1,08	1,03	1,38	1,51	1,54	1,31
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	25,28	25,94	27,50	26,03	12,47	23,44
Dana Insentif Daerah	0,14	0,24	0,27	0,26	0,25	0,23
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,09	0,09	0,09	0,25	0,38	0,18
Pendapatan Hibah	0,09	0,09	0,09	0,24	0,38	0,18
Lain lain pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2018 – 2022 *) Unaudited

3.3.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Sejalan dengan pergerakan pendapatan daerah, jumlah belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,9 persen. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2020 karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa wilayah Jawa Tengah sebagai upaya menekan persebaran Covid-19. Kebijakan ini mengakibatkan berkurangnya kegiatan tatap muka dalam kegiatan pembelajaran siswa sekolah, pertemuan, bimbingan teknis, maupun sosialisasi sehingga berimbas pada berkurangnya realisasi belanja terhadap anggaran.

Belanja terbesar merupakan belanja operasi dengan proporsi rata-rata mencapai 63,76 persen dan nilai rata-rata pada kurun waktu 2018–2021 sebesar Rp16,28 triliun per tahun. Setelah itu berturut-turut adalah belanja transfer dengan nilai rata-rata Rp7,2 triliun per tahun dan belanja modal dengan nilai rata-rata sebesar Rp1,5 triliun per tahun. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja terbesar pada pos belanja operasi ini adalah belanja pegawai dengan porsi rata-rata mencapai 24,72 persen dari seluruh belanja. Nilai ini masih di bawah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan APBD yang mengatur bahwa belanja pegawai setinggi-tingginya 30 persen dari total belanja. Belanja operasi terbesar selanjutnya adalah belanja hibah dengan proporsi rata-rata mencapai 33,21 persen dan belanja barang dan jasa yang mencapai 27,68 persen.

Belanja terbesar kedua adalah belanja transfer dengan proporsi mencapai rata-rata 29,98 persen per tahun. Belanja transfer ini merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil merupakan bagian terbesar dari belanja transfer yang jumlahnya rata-rata mencapai Rp5,33 triliun per tahun.

Selanjutnya, belanja modal dengan proporsi rata-rata per tahun mencapai 6,30 persen mayoritas digunakan untuk belanja modal peralatan dan mesin dengan nilai rata-rata Rp615,88 miliar per tahun. Kemudian diikuti belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp433,9 miliar per tahun dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp355,04 miliar per tahun. Secara proporsi belanja daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3.

Proporsi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022

Uraian	Proporsi (%)					Rata-Rata
	2018	2019	2020	2021	2022*)	
Total Belanja	100	100	100	100	100	100
BELANJA OPERASI	64,15	62,54	63,25	65,11	56,19	62,25
Belanja Pegawai	26,42	25,21	25,28	22,00	24,67	24,72
Belanja Barang dan Jasa	16,52	17,45	16,00	20,68	22,42	18,61
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Belanja Hibah	21,04	19,72	21,80	22,17	8,75	18,69
Belanja Bantuan Sosial	0,17	0,17	0,17	0,26	0,33	0,22
BELANJA MODAL	6,87	8,03	3,89	5,60	7,12	6,30
Belanja Modal Tanah	0,11	0,65	0,06	0,31	0,07	0,24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,36	2,60	1,93	2,24	3,12	2,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,43	2,06	0,76	1,28	1,50	1,41

Uraian	Proporsi (%)					Rata-Rata
	2018	2019	2020	2021	2022*)	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,45	2,17	0,69	1,36	1,99	1,73
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,53	0,53	0,44	0,42	0,43	0,47
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,05	0,01	6,95	0,28	0,07	1,47
BELANJA TRANSFER	28,93	29,42	25,91	29,01	36,63	29,98
Belanja Bagi Hasil	20,31	20,07	18,06	22,19	25,44	21,21
Belanja Bantuan Keuangan	8,62	9,35	7,85	6,82	11,19	8,77

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2018 – 2022 *) Unaudited

Tabel 3.4.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022

Uraian	Jumlah (Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022 *)
BELANJA DAERAH	24.478.632.557.339	26.151.062.842.457	25.651.740.349.991	25.843.800.193.834	23.926.642.335.690
BELANJA OPERASI	15.702.411.154.886	16.354.554.423.473	16.223.988.285.131	16.826.577.831.470	13.444.434.582.073
Belanja Pegawai	6.468.261.263.572	6.591.903.141.578	6.483.761.623.794	5.685.925.255.020	5.902.903.886.767
Belanja Barang dan Jasa	4.042.705.957.394	4.562.499.451.144	4.104.637.788.228	5.345.399.454.776	5.365.112.494.972
Belanja Subsidi	-	-	-	90.482.166	4.958.884.836
Belanja Hibah	5.150.000.983.920	5.155.826.080.751	5.593.181.623.109	5.728.982.384.318	2.092.565.133.850
Belanja Bantuan Sosial	41.442.950.000	44.325.750.000	42.407.250.000	66.180.255.190	78.894.181.648
BELANJA MODAL	1.681.752.306.368	2.099.719.124.860	996.994.505.160	1.447.620.411.245	1.702.496.558.242
Belanja Modal Tanah	25.931.283.415	170.898.817.539	14.338.900.293	79.135.275.975	17.346.322.716
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	578.372.832.490	680.097.965.905	494.933.371.196	578.353.949.251	747.678.240.917
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	349.657.564.473	539.370.887.071	195.773.603.473	330.679.148.402	359.726.308.741
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	598.655.967.923	566.705.770.028	177.713.123.124	351.328.654.582	475.441.543.110
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	128.797.833.067	137.358.163.317	113.376.388.074	108.123.383.035	102.304.142.758
Belanja Modal Aset Lainnya	336.825.000	5.287.521.000	859.119.000	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	13.118.505.530	2.662.431.206	1.783.884.978.571	72.303.305.000	16.545.479.100
Belanja Tidak Terduga	13.118.505.530	2.662.431.206	1.783.884.978.571	72.303.305.000	16.545.479.100
BELANJA TRANSFER	7.081.350.590.555	7.694.126.862.918	6.646.872.581.129	7.497.298.646.119	8.763.165.716.275
Belanja Bagi Hasil	4.971.230.606.896	5.248.472.302.270	4.633.245.749.888	5.735.553.033.353	6.085.808.822.482
Belanja Bantuan Keuangan	2.110.119.983.659	2.445.654.560.648	2.013.626.831.241	1.761.745.612.766	2.677.356.893.793

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2018 – 2022 *) Unaudited

Gambaran realisasi belanja menunjukkan belanja pegawai mendominasi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kondisi ini merupakan dampak dari adanya pengalihan kewenangan satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus (SMA, SMK, dan SLB) ke pemerintah provinsi sehingga jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertambah secara signifikan.

Pada tahun 2020 belanja difokuskan untuk penanganan Covid-19 melalui belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana serta penanganan dampak Covid-19 yang meliputi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Sedangkan pada tahun 2021 peningkatan pada belanja hibah dan bantuan keuangan kabupaten/kota yang digunakan untuk mempercepat pencapaian indikator kinerja yang berada diluar kewenangan pemerintah provinsi utamanya pada pemberian bantuan pendidikan dan bantuan sarana prasarana infrastruktur.

Kondisi belanja daerah tahun 2022 dapat terserap secara optimal dengan realisasi serapan mencapai 95,14 persen. Kendala pada pelaksanaan APBD 2022 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dilaksanakan maupun tidak selesai dilaksanakan. Beberapa realisasi belanja mengalami kenaikan antara lain belanja pegawai dengan mulai dibayarkannya gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kenaikan belanja barang dan jasa karena adanya pelanggaran kegiatan masyarakat serta belanja subsidi yang digunakan dalam rangka penanganan inflasi. Realisasi belanja modal mengalami penurunan dikarenakan pengadaan lahan yang belum terlaksana karena persyaratan (*readiness criteria*) yang belum lengkap. Selain itu pada belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanganan dampak inflasi tidak dapat dicairkan.

3.3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah sejak 2018 hingga 2021 masih didominasi oleh penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Meski mendominasi, penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Selain itu, pencairan dana cadangan pada tahun 2018 dipergunakan untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah. Pembiayaan dari penerimaan pinjaman daerah pada tahun 2018 dan 2019 merupakan pinjaman dalam rangka manajemen kas BLUD dan dibayarkan seluruhnya pada tahun 2019.

Tabel 3.5.
Nilai Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Uraian	Jumlah (Rp)				
	2018	2019	2020	2021	2022 *)
PEMBIAYAAN	1.388.916.848.598	1.410.440.151.221	1.119.348.228.370	646.492.992.625	1.909.692.884.754
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.528.916.848.598	1.630.776.601.765	1.119.348.228.370	861.492.992.625	1.909.692.884.754
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.156.338.690.485	1.612.602.481.841	1.119.095.687.470	861.376.784.856	1.435.692.884.754
Pencairan dana Cadangan	350.000.000.000	-	-	-	-
Penerimaan pengembalian dana bergulir	-	140.403.868	-	-	-
Pembiayaan dari Sektor Perbankan	22.302.734.488	18.033.716.056	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	275.423.625		252.540.900	116.207.769	474.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	140.000.000.000	220.336.450.544	-	215.000.000.000	891.000.000.000
Pembentukan dana cadangan	-	-	-	200.000.000.000	400.000.000.000
Penyertaan modal	140.000.000.000	180.000.000.000	-	15.000.000.000	491.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	-	40.336.450.544	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2018 – 2022 *) Unaudited

Dari sisi pengeluaran, pembentukan dana cadangan mulai dilakukan tahun 2021 untuk pemenuhan kebutuhan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dalam kurun waktu 2018–2022 penyertaan modal selalu dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun pada tahun 2020 tidak dilakukan karena situasi pandemi Covid-19. Secara umum penyertaan modal dilakukan dalam rangka pengembangan usaha serta penugasan untuk mendukung program pemerintah kepada BUMD.

3.3.2. Kondisi Kesehatan Keuangan Daerah

Analisis kesehatan keuangan dilakukan dengan menghitung rasio kesehatan keuangan daerah dari sisi penerimaan yaitu kemandirian keuangan daerah dan ruang fiskal. Kemandirian keuangan daerah menjadi indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari pemerintah pusat. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah terwujud dari kondisi fiskal daerah yang sehat, yakni pada pendapatan daerah yang memadai, belanja daerah yang berkualitas, dan pembiayaan yang memadai dan digunakan secara bijaksana.

3.3.2.1. Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan pada aspek pendapatan daerah diukur melalui seberapa besar peran PAD untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam nilai rasio kemandirian keuangan. Semakin besar angka rasio PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Pada periode tahun 2018-2021 nilai rasio kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berfluktuasi. Pada tahun 2019, rasio kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai 55,83 persen yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mendapatkan pendapatan secara mandiri dari sumber pendapatan sendiri. Nilai tersebut kemudian menurun hingga 53,83 persen pada tahun 2020 karena PAD maupun pendapatan daerah secara total mengalami penurunan. Namun demikian, rasio kemandirian keuangan Jawa Tengah kembali meningkat pada tahun 2021 yang mencapai 55,18 persen karena nilai pendapatan total dan PAD meningkat seiring pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Pada tahun 2022 rasio kemandirian keuangan meningkat hingga 67,30 persen karena peningkatan realisasi pendapatan asli daerah.

Tabel 3.6.
Rasio Kemandirian Keuangan dari Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Total (Rp .000)	Pendapatan Asli Daerah (Rp .000)	Rasio Kemandirian Keuangan (%)
2018	24.702.318.190	13.711.836.037	55,51
2019	25.859.780.137	14.437.914.236	55,83
2020	25.393.735.934	13.668.282.278	53,83
2021	26.633.000.085	14.695.474.898	55,18
2022*)	24.167.935.634	16.264.618.853	67,30

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022 (hasil analisis)

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 (unaudited)

Secara lebih mendalam kemandirian memperoleh pendapatan tercermin dari rasio pajak (*tax ratio*) yang merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Spesifik untuk konteks keuangan daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak dan retribusi daerah dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB). PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dikenai pajak dan retribusi daerah serta kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi bagi pengenaan pajak di wilayah provinsi.

Tabel 3.7.
Tax Ratio Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak dan Retribusi Daerah (Rp. 000)	PDRB (Rp. 000)	Tax ratio (%)
2018	11.611.989.787	1.268.261.170.000	0,92
2019	12.066.780.593	1.360.960.130.000	0,89
2020	11.237.471.300	1.347.922.690.000	0,83
2021	11.810.012.589	1.420.799.910.000	0,83
2022*)	13.600.009.165	1.560.899.020.000	0,87

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022 (hasil analisis)

*) unaudited

Tax ratio Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dalam empat tahun terakhir semakin menurun. Jika melihat nilai PDRB tahun ke tahun maka penerimaan pajak dan retribusi belum sepenuhnya bisa mengikuti perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2018 ke tahun 2019 belum sebanding dengan kenaikan PDRB pada tahun yang sama. Hal ini terlihat pada penurunan *tax ratio* dari 0,92 persen pada tahun 2018 menjadi 0,89 persen pada tahun 2019. Lalu penurunan PDRB dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19 diikuti oleh pajak dan retribusi daerah, namun dengan penurunan yang lebih dalam. Hal ini tergambar pada penurunan *tax ratio* dari

0,89 persen ke 0,83 persen. Kondisi ekonomi menuju pemulihan pada tahun 2021 dengan kenaikan PDRB yang semula Rp1.347.922.690.000 menjadi Rp1.420.799.910.000 tidak diikuti peningkatan *tax ratio*. Namun pada tahun 2022, *tax ratio* kembali mengalami kenaikan menjadi 0,87 persen seiring dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dan peningkatan PDRB.

Selain dari aspek PAD terhadap total pendapatan, kemandirian keuangan juga tercermin dari kemampuan mendanai belanja pemerintah yang secara kuantitatif terlihat pada struktur keuangan pemerintah daerah, yakni pada rasio antara jumlah penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap jumlah pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah menunjukkan fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2019 dan 2020, mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 3.8.
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan (Rp.000)	Penerimaan Pembiayaan (Rp.000)	Total Penerimaan (Rp.000)	Total Belanja (Rp.000)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp.000)	Total Pengeluaran (Rp.000)	Rasio
2018	24.702.318.190	1.528.916.848	26.231.235.038	24.478.632.557	140.000.000	24.618.632.557	1,07
2019	25.859.780.137	1.630.776.601	27.490.556.737	26.151.062.842	220.336.450	26.371.399.292	1,04
2020	25.393.735.934	1.119.348.228	26.513.084.162	25.651.740.349	-	25.651.740.349	1,03
2021	26.633.000.085	861.492.992	27.494.493.077	25.843.800.193	215.000.000	26.058.800.193	1,06
2022*)	24.167.935.634	1.909.773.865	26.077.709.499	23.950.350.260	891.000.000	24.841.350.260	1,05

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022 (hasil analisis)

*) unaudited

Meskipun *tax ratio* cenderung mengalami penurunan dengan kemampuan mendanai belanja daerah yang masih fluktuatif, namun ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami tren peningkatan. Ruang fiskal dapat menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program atau kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan ruang fiskal ini diperoleh dengan mengurangi seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Ruang fiskal daerah ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel 3.9.**Ruang Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

Tahun	Total Pendapatan (Rp. 000)	Pendapatan Hibah (Rp. 000)	DAK (Rp. 000)	Belanja Pegawai (Rp. 000)	Ruang Fiskal (%)
2018	24.702.318.190	22.008.000	6.511.740.479	6.468.261.263	47,37
2019	25.859.780.137	23.184.000	6.974.422.226	6.591.903.141	47,45
2020	25.393.735.934	23.352.000	7.333.796.932	6.483.761.623	45,49
2021	26.633.000.085	64.882.003	7.334.261.242	5.685.925.255	50,87
2022*)	24.167.935.634	92.161.740	3.385.111.274	5.902.903.886	61,19

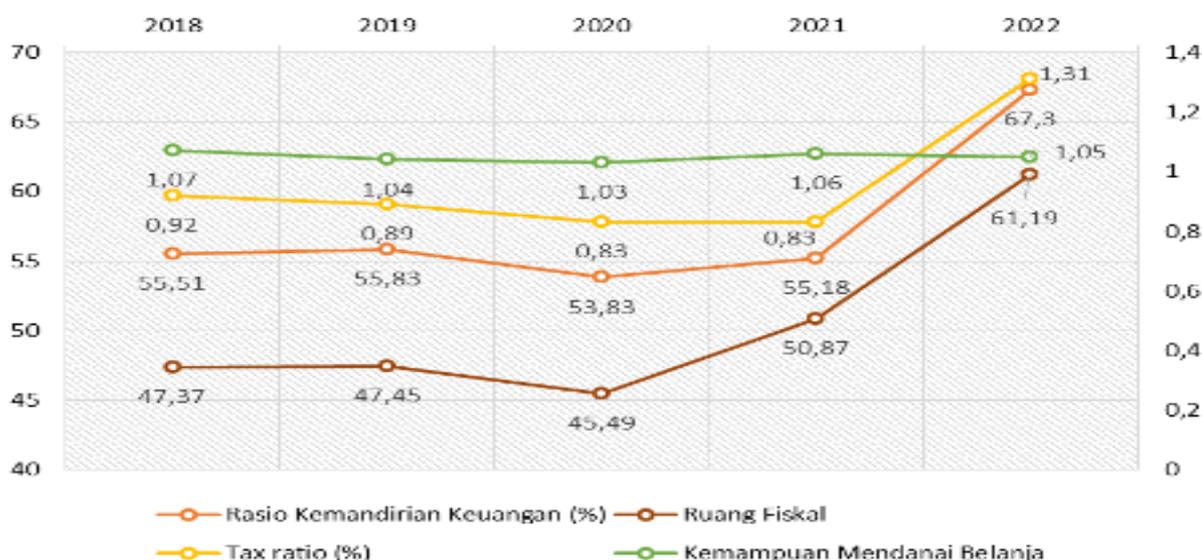
Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022 (hasil analisis)

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 (unaudited)

Ruang fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat dari 47,37 persen pada 2018, 47,45 pada 2019, sempat mengalami penurunan menjadi 45,49 persen pada 2020 kemudian meningkat kembali hingga mencapai 50,87 persen pada tahun 2021 dan 61,19 persen pada tahun 2022. Penurunan pada tahun 2020 disebabkan kontraksi pada pendapatan daerah sebagai dampak pandemi Covid-19.

Sejak mengalami *shock* pada tahun 2020, pergerakan rasio kemandirian keuangan, *tax ratio*, dan ruang fiskal menunjukkan perkembangan yang positif. Secara umum ruang fiskal tersebut bisa bertambah luas dengan adanya peningkatan pendapatan di berbagai sektor serta penurunan kewajiban pembayaran hutang. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran di suatu daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting.

Pergerakan positif pada ketiga indikator tersebut pada tahun 2021 dan 2022 meskipun tren kemampuan mendanai belanja yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2018 – 2022 (Tahun 2022 unaudited)

Gambar 3.9.

Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan, Tax Ratio, Ruang Fiskal, dan Kemampuan Mendanai Belanja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022

3.3.2.2. Belanja Daerah

Di sisi belanja daerah, analisis kemandirian keuangan dilakukan dengan melihat bagaimana kualitas belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kualitas ini dapat tercermin melalui rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja, dan rasio belanja modal per total belanja. Semua rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur seperti belanja pegawai.

Belanja pegawai merupakan belanja operasional terbesar di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian jika dilihat dari rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah, tren pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung semakin menurun. Semakin tinggi rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah menunjukkan semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah maka semakin kecil pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai pada APBD.

Rasio belanja pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022 rata-rata sebesar 23,97 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memiliki ruang yang memadai untuk pemenuhan belanja prioritas pembangunan lainnya. Angka ini juga menunjukkan bahwa belanja pegawai di Provinsi Jawa Tengah masih di bawah ketentuan pemerintah mengenai batas maksimal belanja pegawai pada APBD, yakni setinggi-tingginya 30 persen dari total belanja daerah.

Tabel 3.10.**Rasio Belanja Pegawai Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

Tahun	Belanja Pegawai (Rp. 000)	Total Belanja (Rp. 000)	Rasio Belanja Pegawai (%)
2018	6.468.261.264	24.478.632.557	26,42
2019	6.591.903.142	26.151.062.842	25,21
2020	6.483.761.623	25.651.740.350	25,28
2021	5.685.925.255	25.843.800.193	22,00
2022*)	5.902.903.886	23.950.350.260	24,65

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022 (hasil analisis)

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 (unaudited)

Dalam konteks belanja daerah, pemerintah daerah merupakan salah satu pelaku ekonomi di samping sektor swasta, sektor rumah tangga, dan luar negeri. Belanja pemerintah (*government spending*) dapat menjadi penggerak mesin ekonomi daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan demikian kebijakan penggunaan APBD untuk menggerakkan ekonomi menunjukkan semakin berkualitasnya belanja suatu pemerintah daerah.

Kualitas belanja pemerintah dapat diukur dari penggunaan APBD untuk belanja modal, barang, dan jasa. Penggunaan ini tercermin melalui rasio belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio menunjukkan semakin negatif pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio belanja barang dan jasa pada periode 2018–2022 rata-rata mencapai 18,61 persen dari total belanja APBD dengan tren menunjukkan peningkatan. Penurunan rasio yang terjadi pada 2020 dikarenakan pengalihan belanja barang dan jasa ke belanja tidak terduga untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Rasio belanja barang dan jasa daerah ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.11.**Rasio Belanja Barang dan Jasa Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022**

Tahun	Belanja Barang & Jasa (Rp. 000)	Total Belanja (Rp. 000)	Rasio Belanja Barang & Jasa (%)
2018	4.042.705.957	24.478.632.557	16,52
2019	4.562.499.451	26.151.062.842	17,45
2020	4.104.637.788	25.651.740.350	16,00
2021	5.345.399.455	25.843.800.193	20,68
2022*)	5.377.478.916	23.950.350.260	22,45

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022 (hasil analisis)

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 (unaudited)

Sedangkan untuk rasio belanja modal dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Rata-rata rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018-2022 sebesar 6,31 persen dari total belanja APBD. Belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk penambahan aset prioritas dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat. Pada periode ini aset tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diutamakan pada pemeliharaan aset yang sudah dimiliki. Biaya pemeliharaan aset tersebut sebagian besar dikeluarkan melalui belanja barang dan jasa untuk pemeliharaan. Selain itu, belanja modal yang merupakan belanja produktif diarahkan melalui bantuan keuangan infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 3.12.

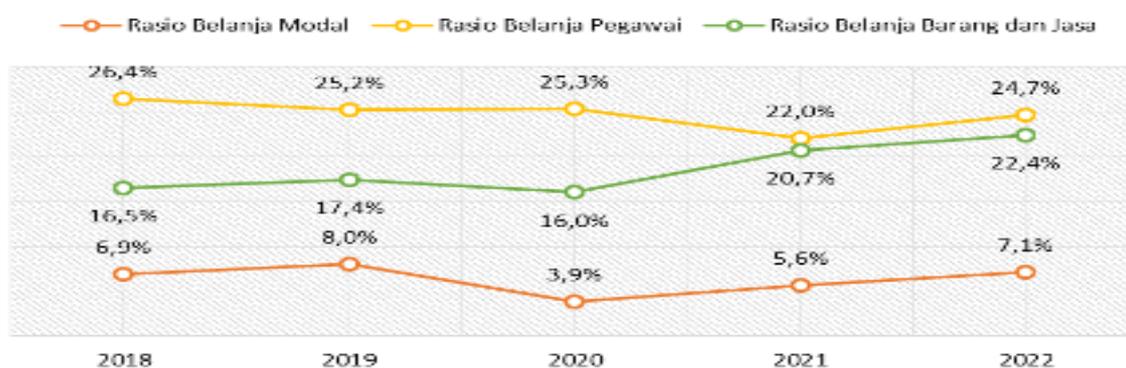
Rasio Belanja Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Modal (Rp.000)	Total Belanja (Rp.000)	Rasio Belanja Modal (%)
2018	1.681.752.306	24.478.632.557	6,87
2019	2.099.719.124	26.151.062.842	8,03
2020	996.994.505	25.651.740.350	3,89
2021	1.447.620.411	25.843.800.193	5,60
2022*)	1.713.641.630	23.950.350.260	7,15

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022 (hasil analisis)

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 (unaudited)

Tren peningkatan pada rasio belanja modal serta rasio belanja barang dan jasa pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan perkembangan positif pada kualitas belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun rasio belanja pegawai pada tahun 2022 juga mencatatkan peningkatan, namun rasionya masih di bawah kriteria maksimal sehingga masih dapat dikelola dengan baik, tidak terlampaui membebani APBD, dan memberikan ruang untuk membiayai program/kegiatan lainnya.



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2018 – 2022

Gambar 3.10.

Perbandingan Rasio Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

3.3.2.3. Pembiayaan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dalam konteks pembiayaan daerah adalah kemampuan daerah untuk menutup defisit APBD tanpa bergantung dari dana APBN. Hal tersebut karena dalam hal APBD mengalami defisit tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut. Surplus/defisit merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Besaran defisit yang ditunjukkan dengan nilai negatif menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah atau dengan kata lain belanja lebih besar dari pendapatan.

Provinsi Jawa Tengah mengalami dua kali defisit pada tahun 2019 sebesar Rp291,28 miliar atau sebesar 1,126 persen dan tahun 2020 sebesar Rp258,00 miliar atau sebesar 1,016 persen jika dibandingkan dengan pendapatan daerah tahun bersangkutan. Nilai ini masih di bawah batas defisit maksimal APBD yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan bagi daerah dengan kategori kapasitas fiskal sangat tinggi yakni sebesar 5 persen untuk tahun 2019 dan 4,5 persen untuk tahun 2020. Surplus/deficit pada APBD Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.13.

Surplus/Defisit APBD Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	Total Pendapatan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Surplus/Defisit (Rp)
2018	24.702.318.190.582	24.478.632.557.339	223.685.633.243
2019	25.859.780.137.936	26.151.062.842.457	(291.282.704.521)
2020	25.393.735.934.148	25.651.740.349.991	(258.004.415.843)
2021	26.633.000.085.963	25.843.800.193.834	789.199.892.129
2022*)	24.167.935.634.127	23.950.350.260.348	217.585.373.779

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022 (hasil analisis)

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 (unaudited)

Upaya untuk menutup defisit APBD yang terjadi adalah melalui pembiayaan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sumber penerimaan pembiayaan yang dapat menjadi alternatif pendanaan antara lain SiLPA tahun sebelumnya, penggunaan dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Di antara alternatif sumber penerimaan pembiayaan tersebut SiLPA merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman karena SiLPA merupakan dana milik daerah yang bersangkutan.

SiLPA terbentuk karena ada selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jika dibandingkan dengan total pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diperoleh rasio SiLPA. Rasio SiLPA terhadap pendapatan selain menggambarkan besaran belanja yang tertunda pelaksanaannya pada tahun sebelumnya juga dapat menggambarkan jumlah realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya

yang lebih besar dari proyeksinya. Pada tahun 2018 hingga 2022 rasio SiLPA Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan. Meski sempat meningkat pada tahun 2021 namun rasio SiLPA kembali turun pada tahun 2022. Jumlah dan rasio SiLPA terhadap total pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.14.

Rasio SiLPA terhadap Total Pendapatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2022

Tahun	SiLPA (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio
2018	1.612.602.481.842	24.702.318.190.582	0,065
2019	1.119.157.446.700	25.859.780.137.936	0,043
2020	861.343.812.527	25.393.735.934.148	0,034
2021	1.435.692.884.754	26.633.000.085.963	0,054
2022*)	1.236.359.239.592	24.167.935.634.127	0,052

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, 2022 (hasil analisis)

*) Dari Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 (unaudited)

Meskipun rasio SiLPA yang cenderung menurun, namun nilai SiLPA dari tahun anggaran sebelumnya masih cukup digunakan untuk mendanai defisit APBD yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Gambar berikut menunjukkan nilai SiLPA dari tahun sebelumnya masih lebih besar daripada nilai defisit yang terjadi di tahun 2019 dan 2020. Gambar tersebut juga menunjukkan fluktuasi rasio SiLPA yang searah dengan pergerakan SiLPA.



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2018 – 2022 *) Unaudited

Gambar 3.11.

Perbandingan Surplus/Defisit dan SiLPA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022

3.3.3. Kondisi Kemampuan Keuangan Daerah

Konteks kondisi kemampuan keuangan daerah pada bagian ini adalah bagaimana kemampuan suatu daerah dalam melunasi kewajiban-kewajibannya serta seberapa jauh suatu daerah dapat dibiayai dengan hutang. Kemampuan keuangan tersebut dapat diukur menggunakan metode analisis rasio, yakni analisis likuiditas, analisis solvabilitas, dan analisis leverage.

3.3.3.1. Analisis Likuiditas

Analisis likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar (*current ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah dengan kewajiban lancar (hutang jangka pendek). Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya. Pada tahun 2018 *current ratio* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 8,66 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 8,84 dan menurun menjadi 4,02 pada tahun 2020 karena peningkatan kewajiban lancar secara signifikan pada 2020. Rasio tersebut kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 9,89 seiring adanya peningkatan aktiva lancar dan penurunan kewajiban lancar dibandingkan tahun 2020. Kemampuan keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang cukup fluktuatif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15.

Current Ratio Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Tahun	Aktiva lancar (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Current Ratio
2018	4.075.221.853.382,00	470.345.881.167,00	8,66
2019	3.530.658.995.976,00	399.197.714.864,00	8,84
2020	3.316.755.368.542,00	824.663.799.218,45	4,02
2021	3.791.840.781.045,00	383.270.068.724,08	9,89

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2022

*) Realisasi s.d. 30 November 2022

Rasio Kas (*cash ratio*) membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. Pada rasio ini kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2018 hingga 2020 cenderung mengalami penurunan seiring dengan penurunan nilai kas. Rasio bahkan mencapai 1,05 pada tahun 2020 karena terdapat penurunan nilai kas di sisi lain terjadi kenaikan jumlah kewajiban lancar. Rasio kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021, lebih tinggi daripada 2018, menjadi 3,75.

Tabel 3.16.

Cash Ratio Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Tahun	Kas (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Cash Ratio
2018	1.615.363.817.893,00	470.345.881.167,00	3,43
2019	1.128.298.517.539,00	399.197.714.864,00	2,83
2020	864.937.343.735,00	824.663.799.218,45	1,05
2021	1.436.740.557.457,00	383.270.068.724,08	3,75

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Rasio cepat (*quick ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang telah dikurangi persediaan dibandingkan dengan kewajiban lancar. Rasio cepat mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dengan cepat. Semakin tinggi nilai rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah. Rasio cepat menunjukkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio cepat pada tahun 2018 sebesar 7,9 yang kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 8,3. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup dalam menjadi 3,4 dikarenakan dampak pandemic Covid-19 dan kembali naik mencapai 8,6 pada tahun 2021.

Tabel 3.17.

Quick Ratio Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Tahun	Aktiva lancar (Rp)	Persediaan (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Quick Ratio
2018	4.075.221.853.382,00	360.048.752.940,00	470.345.881.167,00	7,9
2019	3.530.658.995.976,00	214.197.582.489,00	399.197.714.864,00	8,3
2020	3.316.755.368.542,00	511.593.784.744,00	824.663.799.218,00	3,4
2021	3.791.840.781.045,00	513.729.554.970,00	383.270.068.724,00	8,6

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar berikut ini menunjukkan fluktuasi ketiga rasio tersebut menunjukkan arah yang sama dengan kecenderungan semakin meningkat lebih tinggi pada tahun 2021 setelah mengalami *shock* pada tahun 2020. Analisis likuiditas menunjukkan bahwa likuiditas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam upaya memenuhi kewajiban lancar, menunjukkan peningkatan dengan nilai *current ratio*, *cash ratio*, maupun *quick ratio* terakhir berada pada posisi yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2018 – 2022 (Tahun 2022 unaudited)

Gambar 3.12.

Perbandingan Rasio Likuiditas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2022

3.3.3.2. Analisis Solvabilitas

Kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang, dapat diketahui dari rasio solvabilitas. Suatu pemerintah daerah dikatakan *solvable* apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. Sebaliknya, apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan *insolvable*.

Tabel 3.18.

Rasio Solvabilitas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021

Tahun	Total Aktiva (Rp)	Total Kewajiban (Rp)	Rasio Solvabilitas
2018	36.382.807.647.907,00	470.345.881.167,00	77,35
2019	37.500.196.755.380,00	399.197.714.864,00	93,94
2020	37.222.304.291.653,00	824.663.799.218,00	45,14
2021	39.291.945.337.213,00	383.270.068.724,00	102,52

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2022

Rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018–2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 nilai rasio solvabilitas sebesar 77,35 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 93,94. Rasio tersebut sempat mengalami penurunan signifikan menjadi 45,14 pada tahun 2020 karena menurunnya total aktiva dan peningkatan total kewajiban. Rasio solvabilitas kemudian mencapai nilai tertinggi pada tahun 2021, yaitu 102,52, karena adanya peningkatan total aktiva dan penurunan total kewajiban secara signifikan.

3.3.3.3. Analisis Leverage

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana beban risiko hutang yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan terlihat pada rasio hutang (*leverage*). Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* yaitu rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio/DER*). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang. Rasio ini mengindikasikan serapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan hutang (*over-leveraged*) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian hutang semakin besar.

Rasio hutang (*leverage*) ini sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio hutang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlihat cenderung menurun pada periode 2018–2021. Kenaikan rasio hutang pada tahun 2020 terjadi karena peningkatan total kewajiban secara signifikan sementara total ekuitas mengalami penurunan. Rasio hutang ini kembali menurun pada tahun 2021 hingga mencapai nilai terendah sebesar 0,010.

Tabel 3.19.**Debt to Equity Ratio Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021**

Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Ekuitas (Rp)	Rasio <i>Leverage</i>
2018	470.345.881.167,00	35.912.461.766.739,00	0,013
2019	399.197.714.864,00	37.100.999.040.516,00	0,010
2020	824.663.799.218,00	36.397.640.492.434,00	0,023
2021	383.270.068.724,00	38.908.675.268.489,00	0,010

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2022

3.4. Arah Kebijakan dan Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2024-2026**3.4.1. Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2023**

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan. Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 berdampak pada terjadinya *shock* pada kondisi keuangan daerah, terutama pendapatan daerah. Namun demikian, diharapkan tahun 2023 pendapatan daerah ditargetkan mulai pulih dan mengalami peningkatan. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,20-5,60 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2019-2022, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp25,731 triliun. PAD ditargetkan sebesar Rp17,450 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp8,201 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp78,90 miliar.

Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp26,303 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp14,996 triliun; belanja modal sebesar Rp1,976 triliun; belanja tidak terduga sebesar Rp23,1 miliar; dan belanja transfer sebesar Rp9,307 triliun. Penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp942,20 miliar dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya termasuk SiLPA BLUD. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp370 miliar diarahkan untuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Kerangka pendanaan tahun 2023 secara lebih rinci sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.20.**Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1.	PAD	17.910.513.776.000
1.1.	Pajak Daerah	15.266.021.456.000
1.2.	Retribusi Daerah	137.900.740.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	631.115.007.000
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	1.875.476.573.000
2.	Pendapatan Transfer	8.201.542.504.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	8.201.542.504.000
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	78.908.038.000
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	26.190.964.318.000

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Operasi	15.147.464.497.000
1.1.	Belanja Pegawai	7.233.263.183.000
1.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.543.366.427.000
1.3.	Belanja Subsidi	850.000.000
1.4.	Belanja Hibah	2.237.267.527.000
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	132.717.360.000
2.	Belanja Modal	1.929.032.293.000
3.	Belanja Tidak Terduga	57.964.034.000
4.	Belanja Transfer	9.628.703.494.000
4.1.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	6.785.004.744.000
4.2.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Pemdes	2.843.698.750.000
5	Total Jumlah Belanja (1+2+3+4)	26.763.164.318.000
6	Surplus (defisit)	(572.200.000.000)
1	Penerimaan Pembiayaan	942.200.000.000
	SiLPA	942.200.000.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	370.000.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	300.000.000.000
	Penyertaan Modal	70.000.000.000
3	Pembiayaan Daerah	572.200.000.000
	SILPA	0

Sumber: Bapenda, Bappeda dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2022

3.4.2. Arah Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2024–2026 didasarkan pada beberapa asumsi. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) membawa konsekuensi adanya penurunan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada UU HKPD, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kabupaten/kota namun namun dengan tidak menambah beban wajib pajak.

Penerapan UU HKPD diproyeksikan akan menyebabkan penurunan pajak daerah sebesar 20,10 persen pada tahun 2025 yang disumbang oleh penurunan PKB sebesar 34,71 persen dan BBNKB sebesar 34,94 persen. Penghitungan proyeksi penerimaan PKB dan BBNKB ini dihitung berdasarkan data objek yang tercatat pada sistem Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jawa Tengah. Pajak daerah akan kembali meningkat sebesar 6,94 persen pada tahun 2026, namun secara nominal belum sebesar penerimaan pada tahun 2024.

Potensi pajak daerah baru dari pajak alat berat (PAB) dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) diproyeksikan akan menambah pendapatan daerah, namun belum sebanding dengan kontraksi yang dialami dari penurunan PKB dan BBNKB. PAB periode 2024 – 2026 diproyeksikan akan

mengalami pertumbuhan delapan persen sedangkan opsen pajak MBLB diproyeksikan tumbuh sebesar 4,55 persen. PBBKB, PAP, pajak rokok dan retribusi daerah untuk tahun 2024–2026 diproyeksikan mengalami kenaikan dengan penghitungan berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi 10 tahun terakhir (2012-2021) sesuai data yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (*audited*).

Demikian juga penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mengalami kenaikan pada periode 2024–2026 masing-masing sebesar rata-rata 2,75 persen dan 1,8 persen tiap tahun. Dengan memperhatikan asumsi tersebut maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 3.21.

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1		2	3	4
PENDAPATAN ASLI DAERAH		18.159.598.504.000	14.808.893.164.000	15.711.626.236.000
1	Pajak Daerah	15.456.349.398.000	12.184.082.081.000	13.029.221.496.000
2	Retribusi Daerah	136.399.313.000	106.149.242.000	113.809.487.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	689.418.000.000	664.112.968.000	679.363.220.000
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.877.431.793.000	1.854.548.873.000	1.889.232.033.000
PENDAPATAN TRANSFER		7.620.239.032.000	7.626.239.032.000	7.743.500.049.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.620.239.032.000	7.626.239.032.000	7.743.500.049.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		22.750.000.000	22.750.000.000	22.750.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		25.802.587.536.000	22.457.882.196.000	23.477.876.285.000

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2022 (hasil analisis)

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan di tahun 2024-2026, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan
 - a. Sarana dan prasarana pelayanan pembayaran;
 - b. Kemudahan pembayaran melalui kerjasama dengan penyedia aplikasi dompet digital (Gopay, OVO, Tokopedia, dan sejenisnya);
 - c. Penambahan titik layanan (kerja sama dengan BUMDes, BPR BKK, Mal Pelayanan Publik, dan badan usaha lainnya);

- d. Pemberian *reward* kepada wajib pajak melalui mekanisme pengundian;
 - e. Pembayaran melalui kartu kredit.
2. Penanganan Piutang
 - a. Pembenahan *database* dan aplikasi penanganan piutang secara *realtime*;
 - b. Kerja sama dengan kabupaten/kota, desa, kepolisian (razia kendaraan bermotor), ormas, pihak *leasing* dan dunia usaha.
 3. Optimalisasi Retribusi Daerah
 - a. Perhitungan ulang struktur dan besaran tarif retribusi;
 - b. Penyediaan digitalisasi pelayanan pembayaran retribusi;
 - c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian;
 - d. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan retribusi;
 - e. Peningkatan prasarana sarana pendukung objek retribusi.
 4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset
 - a. Perbaiki tata kelola (penatausahaan, pengamanan, sertifikasi) aset daerah;
 - b. Identifikasi dan inventarisasi aset berdasarkan penggunaannya;
 - c. Revitalisasi aset daerah;
 - d. Meningkatkan promosi aset daerah.
 5. Peningkatan Kinerja BUMD
 - a. Peningkatan profesionalisme BUMD;
 - b. Pemetaan penyertaan modal berdasarkan potensi kinerja BUMD.
 6. Peningkatan Dana Insentif Fiskal melalui peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah.

3.4.3. Arah Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024-2026

Kebijakan belanja daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 utamanya diarahkan pada pencapaian tujuan daerah untuk mewujudkan Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari serta untuk keberlanjutan pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan fokus utama pada:

1. Pencapaian sasaran daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
 - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
 - c. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis;
2. Antisipasi terhadap dampak tantangan dinamika geopolitik dan penetapan kebijakan moneter global, serta kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun nonalam;
3. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah, dan koordinasi dibidang perencanaan dengan

tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Sinergi pembangunan antarwilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sebagaimana arah kebijakan belanja daerah tersebut diatas maka struktur belanja daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 sebagai berikut.

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai termasuk belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS;
 - b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat, dan memperhatikan protokol Covid-19; belanja barang dan jasa di antaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja hibah antara lain digunakan untuk dukungan pelaksanaan pilkada serentak, menjaga kondusivitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
 - d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan di antaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal

- kapitalisasi aset; belanja modal di antaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan prasarana sarana;
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan prasarana/sarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
 4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya (pemerintah kabupaten/kota dan desa) meliputi:
 - a. Belanja bagi hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Belanja bantuan keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Untuk itu, proyeksi kebutuhan belanja daerah tahun 2024–2026 secara indikatif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.22.

Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1		2	3	4
BELANJA OPERASI		14.405.558.878.000	13.677.339.754.000	14.360.912.199.000
1	Belanja Pegawai	7.693.711.839.000	7.891.312.231.000	7.909.466.331.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.202.757.267.000	5.192.761.838.000	5.571.976.531.000
3	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	500.000.000
4	Belanja Hibah	1.415.589.772.000	497.765.685.000	780.469.337.000
5	Belanja Bantuan Sosial	93.000.000.000	95.000.000.000	98.500.000.000
BELANJA MODAL		2.383.508.147.000	2.062.056.452.000	2.621.106.962.000

URAIAN		JUMLAH (Rp)		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1		2	3	4
BELANJA TAK TERDUGA		25.000.000.000	26.500.000.000	28.500.000.000
BELANJA TRANSFER		9.968.520.511.000	6.771.985.990.000	6.797.357.124.000
1	Belanja Bagi Hasil	6.885.187.647.000	4.006.281.000.000	4.263.329.500.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	3.083.332.864.000	2.765.704.990.000	2.534.027.624.000
JUMLAH BELANJA		26.782.587.536.000	22.537.882.196.000	23.807.876.285.000

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2022 (hasil analisis)

3.4.4. Arah Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, pengeluaran pembiayaan untuk kebutuhan penyertaan modal BUMD tahun 2024–2026 direncanakan untuk peningkatan kinerja BUMD melalui ekspansi usaha, pengembangan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengadaan investasi aktiva, dan belanja teknologi, serta penyediaan dana cadangan penyelenggaraan pilkada serentak. Proyeksi pembiayaan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1		2	3	4
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		1.050.000.000.000	150.000.000.000	400.000.000.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150.000.000.000	150.000.000.000	400.000.000.000
2	Pencairan dana cadangan	900.000.000.000		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
1	Penyertaan modal	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		980.000.000.000	80.000.000.000	330.000.000.000

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2022 (hasil analisis)

3.4.5. Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Tahun 2024-2026

Berdasarkan analisis kebijakan dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya, kerangka pendanaan daerah Jawa Tengah secara indikatif untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.24.
Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024–2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1		2	3	4
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH		18.159.598.504.000	14.808.893.164.000	15.711.626.236.000
1	Pajak Daerah	15.456.349.398.000	12.184.082.081.000	13.029.221.496.000
2	Retribusi Daerah	136.399.313.000	106.149.242.000	113.809.487.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	689.418.000.000	664.112.968.000	679.363.220.000
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.877.431.793.000	1.854.548.873.000	1.889.232.033.000
PENDAPATAN TRANSFER		7.620.239.032.000	7.626.239.032.000	7.743.500.049.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.620.239.032.000	7.626.239.032.000	7.743.500.049.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		22.750.000.000	22.750.000.000	22.750.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		25.802.587.536.000	22.457.882.196.000	23.477.876.285.000
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI		14.405.558.878.000	13.677.339.754.000	14.360.912.199.000
1	Belanja Pegawai	7.693.711.839.000	7.891.312.231.000	7.909.466.331.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.202.757.267.000	5.192.761.838.000	5.571.976.531.000
3	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	500.000.000
4	Belanja Hibah	1.415.589.772.000	497.765.685.000	780.469.337.000
5	Belanja Bantuan Sosial	93.000.000.000	95.000.000.000	98.500.000.000
BELANJA MODAL		2.383.508.147.000	2.062.056.452.000	2.621.106.962.000
BELANJA TAK TERDUGA		25.000.000.000	26.500.000.000	28.500.000.000
BELANJA TRANSFER		9.968.520.511.000	6.771.985.990.000	6.797.357.124.000
1	Belanja Bagi Hasil	6.885.187.647.000	4.006.281.000.000	4.263.329.500.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	3.083.332.864.000	2.765.704.990.000	2.534.027.624.000
JUMLAH BELANJA		26.782.587.536.000	22.537.882.196.000	23.807.876.285.000
SURPLUS/DEFISIT		(980.000.000.000)	(80.000.000.000)	(330.000.000.000)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		1.050.000.000.000	150.000.000.000	400.000.000.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150.000.000.000	150.000.000.000	400.000.000.000
2	Pencairan dana cadangan	900.000.000.000		

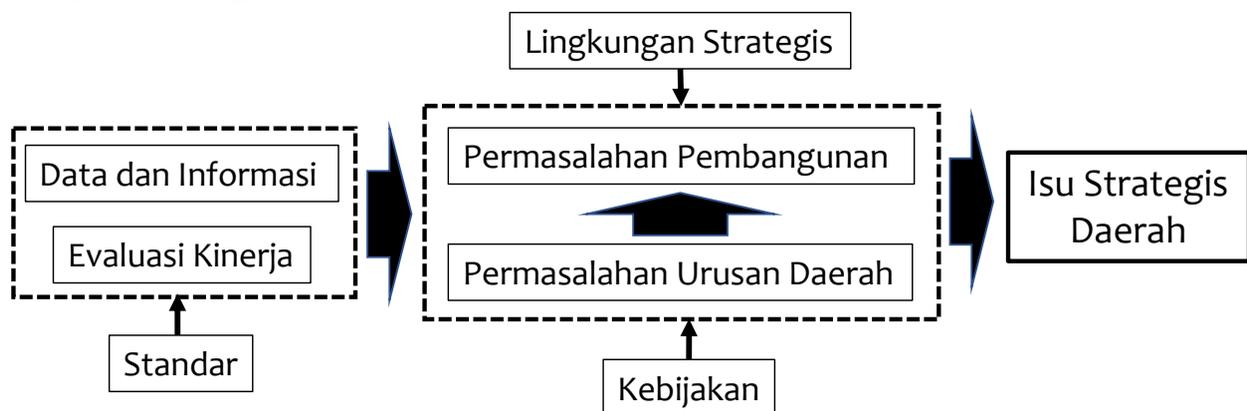
URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	2	3	4
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
1 Penyertaan modal	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	980.000.000.000	80.000.000.000	330.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2023 (hasil analisis)

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi faktor penyebab, baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya. Sedangkan isu strategis merupakan permasalahan pembangunan daerah yang dikategorikan sebagai permasalahan prioritas untuk diselesaikan atau isu yang berasal dari isu global, nasional, maupun regional.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, perumusan permasalahan pembangunan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data dan informasi pembangunan daerah, serta memperhatikan capaian kinerja, baik capaian kinerja makro daerah maupun capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Capaian kinerja pembangunan daerah tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkan dengan standar yang ada, baik yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), standar pelayanan minimum (SPM), Sustainable Development Goals (SDG's), atau standar nasional lainnya, maupun dengan membandingkan kinerja dengan tingkat nasional atau provinsi lainnya. Dari hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah kemudian dirumuskan isu strategis daerah dengan memperhatikan lingkungan strategis dan kebijakan yang ada.



Gambar 4.1

Alur Pikir Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan daerah makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui *cross cutting strategy*. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah Jawa Tengah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2018-2023. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah yang masih relevan dalam tiga tahun ke depan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2

Permasalahan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah sebagaimana gambar di atas dijabarkan sebagai berikut.

1. Masih cukup tingginya angka kemiskinan

Cukup tingginya kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2022 sebesar 10,98 persen, naik 0,05 persen daripada bulan Maret 2022, namun apabila dibandingkan dengan periode September 2021 yang sebesar 11,25 persen menurun 0,27 persen. Namun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 9,57 persen.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin. Karakteristik penduduk miskin di Jawa Tengah sebagian besar, antara lain, merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SLTP, penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal, pengeluaran penduduk lebih banyak untuk makanan, dan penghasilan utama bersumber dari sektor pertanian, serta kelompok penduduk yang masuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum, dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman serta masih adanya kawasan permukiman kumuh yang sebagian besar merupakan kawasan tempat tinggal penduduk miskin. Sementara itu, terkait dengan PPKS juga menjadi permasalahan dalam penanganan disebabkan masih tingginya jumlah PPKS

dan di sisi lain ketersediaan panti pelayanan PPKS terbatas dengan kondisi yang kurang memadai.

Di sisi lain, permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

2. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi era disrupsi

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Tantangan bonus demografi dan perubahan industri era digital atau revolusi industri 4.0 menuntut perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jawa Tengah. Hingga saat ini kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah dinilai belum memadai ditunjukkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022 sebesar 72,79, masih di bawah nasional yang sebesar 72,91, meskipun termasuk dalam kategori tinggi.

Salah satu yang memengaruhi kinerja IPM adalah kualitas pendidikan, ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah (RLS) yang pada tahun 2022 sebesar 7,39 tahun. Angka tersebut menggambarkan rata-rata penduduk Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan formal selama 7,93 tahun atau setara kelas VIII (SMP kelas II). Rata-rata lama bersekolah di Jawa Tengah yang masih rendah tersebut diperkuat dengan masih dijumpainya anak tidak sekolah (ATS) yang mencapai 500.000 jiwa, tertinggi ketiga secara nasional.

IPM juga dipengaruhi oleh harapan lama sekolah (HLS) yang pada tahun 2022 sebesar 12,81 tahun, artinya bahwa peluang bagi penduduk usia tujuh tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal selama 12,81 tahun atau setara diploma 1 (D1). Capaian kedua indikator tersebut pada tahun 2022 masih berada di bawah capaian nasional. Hal tersebut disebabkan masih belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah, yang ditandai, antara lain, masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, masih kurangnya mutu pendidikan, dan pembentukan karakter siswa yang belum optimal.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan usia harapan hidup. Usia harapan hidup Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 74,57 tahun, lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 71,85 tahun. Kualitas usia harapan hidup Jawa Tengah ini dipengaruhi kualitas kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan penguatan sistem kesehatan. Meskipun demikian, Jawa Tengah masih menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yaitu: 1) Masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa; 2) Masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan anak

berusia di bawah lima tahun (balita) yang juga berkaitan dengan masih rendahnya kualitas kesehatan reproduksi, kepesertaan program keluarga berencana (KB), dan masih tingginya perkawinan usia anak; 3) Masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan warga lanjut usia (lansia); 4) Masih tingginya angka *stunting* dan gizi buruk; 5) Belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan melayani sembilan prioritas layanan unggulan; dan 6) Keterbatasan prasarana dan sarana di rumah sakit.

Selain kualitas kesehatan, kebugaran juga menjadi salah satu prasyarat pembentukan kualitas sumber daya manusia. Fakta memperlihatkan bahwa budaya bugar atau gemar berolahraga masyarakat Jawa Tengah masih rendah, sebesar 27,56, berada di bawah capaian nasional, bahkan berada pada peringkat ke-23 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan kurangnya literasi masyarakat untuk hidup bugar sehingga partisipasi masyarakat dalam berolahraga masih rendah. Prestasi olahraga Jawa Tengah juga masih belum optimal. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pembangunan olahraga di Jawa Tengah masih belum optimal yang juga ditunjukkan oleh angka *Sport Development Index* (SDI) atau Indeks Pembangunan Olahraga pada tahun 2021 sebesar 0,34, menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,60.

Kualitas sumber daya manusia tidak hanya dinilai dari aspek pintar, sehat, dan bugar, namun juga dapat didukung dengan karakter yang kuat yang ditunjukkan, antara lain, dari seberapa besar internalisasi nilai budaya, keagamaan, dan sikap mental masyarakat, terutama dalam menghadapi era disrupsi saat ini. Salah satu indikator yang digunakan untuk merepresentasikan karakter ini adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang pada tahun 2021 sebesar 55,24, menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 59,12.

Penurunan IPK Jawa Tengah terjadi pada dimensi ekonomi budaya dan dimensi ekspresi budaya yang disebabkan, antara lain, menurunnya minat dan partisipasi masyarakat dalam beraktivitas seni budaya, termasuk sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni. Upaya memajukan kebudayaan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di tengah peradaban dunia, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK) dan cagar budaya (CB), juga belum optimal. Selain itu, di tengah era disrupsi saat ini, sumber daya manusia juga dituntut memiliki kemampuan literasi yang baik dan adaptif.

Budaya literasi di masyarakat Jawa Tengah juga masih belum optimal yang ditunjukkan oleh nilai dimensi budaya literasi dalam IPK tahun 2021 yang sebesar 50,00, menurun jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 59,90. Kondisi ini juga didukung dengan indikator lainnya yang menunjukkan pembangunan literasi masyarakat, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Data IPLM Jawa Tengah menunjukkan perbaikan angka IPLM dari tahun 2021 yang sebesar 11,33 menjadi 15,62 pada tahun 2022. Meskipun membaik namun IPLM Jawa Tengah masih belum optimal disebabkan, antara lain, masih rendahnya minat baca masyarakat serta masih rendahnya pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat, termasuk perpustakaan digital. Hal tersebut juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan tantangan era transformasi

digital, ketika aktivitas keseharian erat hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hingga saat ini proporsi penduduk usia 15-59 tahun di Jawa Tengah yang memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi baru mencapai 71,15 persen.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak terlepas dari peran keluarga dan peran perempuan. Keluarga dan perempuan memegang peranan penting, terutama sebagai pendidik awal bagi anak, dalam proses pembentukan manusia untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak sejak dini. Pembangunan keluarga dan pembangunan perempuan menjadi penting sebagai *supporting system* dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia seutuhnya. Keberhasilan atau kegagalan pembangunan keluarga dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang pada tahun 2021 sebesar 56,10, menurun jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 58,00. Indikator yang menunjukkan kinerja pembangunan perempuan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Kinerja IPG Jawa Tengah relatif cukup baik dan meningkat setiap tahun. IPG Jawa Tengah juga lebih baik jika dibandingkan dengan IPG nasional. Pada tahun 2022, IPG Jawa Tengah mencapai angka 92,83, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 92,48. Meskipun angkanya cukup baik, masih menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, terutama pada komponen rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Ketimpangan gender ini juga berkaitan dengan pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah yang masih perlu untuk terus ditingkatkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan kinerja IDG yang pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020, yaitu dari 71,73 pada tahun 2020 menjadi 71,64 pada tahun 2021.

Salah satu komponen yang memengaruhi adalah keterlibatan perempuan di parlemen yang dari tahun ke tahun menurun. Permasalahan lainnya terkait dengan pembangunan perempuan adalah masih ada kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan terhadap anak. Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat dari 8,51 per 100.000 penduduk pada 2017 menjadi 8,97 per 100.000 penduduk pada 2021. Gambaran tersebut menunjukkan pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah belum optimal, termasuk membangun kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Tantangan ke depan dalam pembangunan perempuan di Jawa Tengah adalah membangun kemauan atau motivasi ihwal pandangan atau budaya patriarki di masyarakat terhadap perempuan agar tidak ada lagi ada ketimpangan gender serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Permasalahan kualitas sumber daya manusia tersebut apabila tidak dioptimalkan akan berpengaruh terhadap daya saing tenaga kerja. Data ketenagakerjaan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa karakteristik penduduk bekerja di Jawa Tengah didominasi oleh lulusan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/tidak tamat SD/tamat SD) yang pada periode Agustus 2022 sebanyak 45,51 persen, meningkat jika dibandingkan pada periode sama pada tahun 2021 yang sebesar 43,09 persen. Sedangkan penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi, yaitu Diploma I/II/III dan universitas sebesar 8,65

persen, menurun jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 9,49 persen. Apabila dilihat dari status pekerjaan utama, pada tahun 2022 penduduk bekerja di Jawa Tengah paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai sebesar 36,81 persen, diikuti dengan status berusaha sendiri sebesar 21,33 persen. Penduduk bekerja dengan dua status pekerjaan utama tersebut pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang masing-masing sebesar 36,53 persen dan 19,79 persen.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Tengah periode Agustus tahun 2022 sebesar 5,57 persen, menurun dibandingkan dengan periode sama tahun 2021 yang sebesar 5,95 persen. Meskipun menurun, angka tersebut dinilai masih cukup tinggi, bahkan jika dilihat dari TPT berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, TPT tamatan SMK menjadi yang paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan yang lain, yaitu sebesar 8,42 persen, padahal pendidikan SMK ditujukan untuk mencetak lulusan yang siap kerja. TPT terendah berasal dari tamatan Diploma I/II/III sebesar 2,95 persen. Jika dibandingkan dengan periode Agustus tahun 2021, TPT jenjang pendidikan SD ke bawah mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 4,59 persen dari 3,70 persen pada tahun 2021, sedangkan TPT pada jenjang pendidikan lainnya menurun.

Permasalahan ketenagakerjaan juga tidak terlepas dari permasalahan pembangunan kepemudaan, salah satunya adalah pemuda yang memasuki usia kerja. Permasalahan pembangunan kepemudaan di Jawa Tengah, antara lain, adalah kurangnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, termasuk partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi yang dapat ditunjukkan dari TPT pemuda dan status pekerjaan pemuda. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa TPT pemuda sebesar 13,23 persen. TPT pemuda tertinggi berasal dari tamatan pendidikan jenjang sekolah menengah sebesar 14,07 persen diikuti dengan tamatan pendidikan tinggi sebesar 12,30 persen.

Tingginya angka ini disebabkan, antara lain, kecenderungan memilih pekerjaan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Pemuda juga didorong untuk mandiri dengan memiliki kemampuan berusaha sendiri atau berwirausaha sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Namun, data menunjukkan bahwa pemuda yang memiliki status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai justru cukup tinggi, yaitu sebesar 58,21 persen pada tahun 2021. Sedangkan yang berstatus berusaha sendiri sebesar 12,05 persen.

Kondisi tersebut menggambarkan daya saing tenaga kerja Jawa Tengah belum optimal di tengah persaingan tenaga kerja pada era globalisasi yang semakin kompetitif dan menuntut kompetensi tenaga kerja yang semakin tinggi. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia belum optimal sehingga berdampak pada masih tingginya penduduk usia kerja yang tidak bekerja (*not in employment, education, or training*), rendahnya produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja di Jawa Tengah, serta didukung belum optimalnya hubungan industrial.

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan kualitas sumber daya manusia Jawa Tengah, perlu didukung dengan kebijakan pembangunan kependudukan, salah satunya adalah pengendalian penduduk. Namun demikian, masih dijumpai permasalahan kependudukan, antara lain, belum

optimalnya pengendalian penduduk, yang ditandai dengan menurunnya *contraceptive prevalence rate* (CPR) dan meningkatnya *unmetneed*, meskipun *total fertility rate* (TFR) menurun. Penurunan CPR dan peningkatan *unmetneed* yang tidak terkendali dapat berakibat terjadinya ledakan penduduk. Namun, TFR yang semakin menurun juga dapat berdampak pada penurunan populasi penduduk usia produktif. Penduduk usia lanjut akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan usia harapan hidup.

Kebijakan pembangunan kependudukan juga salah satunya dilakukan dengan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Penataan persebaran penduduk dilaksanakan antara lain melalui program transmigrasi. Namun, program transmigrasi juga menghadapi permasalahan, yaitu terbatasnya kuota transmigrasi yang tidak sebanding dengan minat transmigrasi masyarakat Jawa Tengah. Hal tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait dengan program transmigrasi ini.

3. Kondisi kapasitas, daya saing, serta pemerataan perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat, didukung dengan peningkatan pelayanan infrastruktur

Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 meningkat positif jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 5,31 persen (*c to c*), pada tahun 2021 sebesar 3,32 persen (*c to c*). Meskipun ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 tumbuh positif, tidak diikuti dengan tingkat inflasi yang pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 5,63 persen dibandingkan inflasi tahun 2021 yang sebesar 1,7 persen.

Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan (pertanian dalam arti luas termasuk pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), kemudahan investasi, serta infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa. Tantangan ke depan adalah mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah yang ditunjukkan oleh rasio Gini Jawa Tengah. Tahun 2022, rasio Gini Jawa Tengah sebesar 0,366, menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,368.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan

Permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan di Jawa Tengah sebagai berikut:

1) Sektor pertanian (dalam arti luas)

Salah satu sektor yang menjadi unggulan perekonomian Jawa Tengah adalah sektor pertanian. Pada tahun 2022, sektor ini tumbuh sebesar 2,92 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 0,78 persen. Sektor pertanian juga memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Tengah sebesar 13,53 persen pada tahun 2022, menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 13,86 persen.

Pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian dinilai belum optimal yang disebabkan belum optimalnya produksi sektor pertanian dalam arti luas, meliputi produksi pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, perikanan budi daya, dan garam.

Secara umum produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan sudah memadai, tetapi masih perlu terus ditingkatkan. Sedangkan produksi komoditas kedelai masih perlu terus ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut juga didukung permasalahan terkait dengan ketersediaan jaringan irigasi yang kondisinya rusak sedang maupun ringan. Sampai dengan tahun 2022, jaringan irigasi dengan kondisi rusak sedang mencapai 78 persen dan rusak ringan sebesar 17 persen.

Adapun belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan prasarana dan sarana penangkapan yang belum memadai dan kondisi pelabuhan perikanan yang perlu pengembangan dari sisi fasilitas maupun tata kelola. Demikian juga produksi perikanan budi daya. Selain dikarenakan kondisi prasarana dan sarana, juga disebabkan penurunan kualitas dan kuantitas induk. Sedangkan pada produksi garam masih terdapat luasan tambak garam yang belum menerapkan teknologi sehingga proses produksi garam masih tergantung cuaca. Selain itu, pada ketiganya, baik perikanan tangkap, budi daya, dan garam, masih dibutuhkan upaya meningkatkan kompetensi dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk mendukung peningkatan produksi perikanan. Produksi perikanan juga dipengaruhi oleh kondisi ekosistem perikanan.

Kondisi saat ini menunjukkan di Jawa Tengah telah terjadi kerusakan ekosistem perikanan yang cukup tinggi. Kerusakan ekosistem perikanan khususnya di wilayah pesisir disebabkan abrasi dan akresi yang cukup tinggi yang imbasnya dapat menyebabkan terjadi banjir rob. Masih dibutuhkan edukasi terhadap semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan, khususnya lingkungan perairan. Sedangkan pada perikanan budi daya diperlukan upaya mempertahankan ikan jenis endemik lokal yang mulai menurun populasinya.

Belum optimalnya produksi pertanian juga dapat berpengaruh terhadap sektor pangan. Tantangan pada sektor pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Ketahanan pangan dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Pada aspek ketersediaan, secara umum komoditas pangan utama, yaitu beras, jagung, dan kedelai, telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun masih diperlukan upaya stabilisasi stok antar waktu dan antar wilayah. Adapun pada aspek keterjangkauan, berdasarkan peta kerawanan dan kerentanan pangan, masih terdapat daerah di Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori rawan pangan. Pada aspek pemanfaatan pangan, konsumsi pangan masyarakat belum seimbang antarkelompok pangan, terutama konsumsi pangan pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan kacang-kacangan.

2) Sektor perdagangan

Pada tahun 2022, sektor perdagangan tumbuh sebesar 4,32 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,8 persen. Demikian juga dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 13,6 persen dari 13,75 persen pada tahun 2021. Hal tersebut dipengaruhi permasalahan, antara lain, belum optimalnya ekspor dan impor Jawa Tengah, belum optimalnya nilai tambah produksi perdagangan, dan fluktuatifnya harga kelompok kebutuhan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

3) Sektor industri pengolahan

Sektor lain yang menjadi sektor unggulan Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan. Pada tahun 2022, sektor ini tumbuh sebesar 3,88 persen, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 2,34 persen. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PDRB Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 33,93 persen dari 34,31 persen pada tahun 2021. Beberapa permasalahan yang memengaruhinya, antara lain, belum optimalnya produksi industri, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah.

4) Sektor koperasi, usaha kecil, dan menengah (UKM)

Sektor lain yang menjadi unggulan perekonomian Jawa Tengah adalah usaha kecil dan menengah, serta koperasi. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB Jawa Tengah. Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah, antara lain, belum optimalnya omzet usaha kecil dan menengah serta belum optimalnya tingkat kesehatan koperasi. Pada tahun 2022, UKM yang dibina dan didampingi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 180.579 unit UKM, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebanyak 173.431 unit. Omzet yang dihasilkan oleh UKM binaan pemerintah tersebut dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2022 omzet yang dihasilkan sebesar Rp68.581 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp68.212 miliar. Koperasi yang dinilai sehat sebanyak 16,27 persen pada tahun 2022, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 13,06 persen.

5) Sektor pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Jawa Tengah dalam menyokong perekonomian daerah. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Namun, kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pada PDRB belum optimal, meskipun berdasarkan data kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 9,63 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 2,88 persen. Sedangkan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB pada tahun 2021

sebesar 3,06 persen. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maupun PDRB disebabkan beberapa permasalahan, antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara masih belum optimal, masih rendahnya pengeluaran wisatawan, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif.

b. Belum optimalnya pertumbuhan realisasi penanaman modal

Penanaman modal atau investasi menjadi salah satu faktor penting yang menyokong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pada tahun 2022, realisasi penanaman modal di Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,4 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 6,56 persen. Berbagai permasalahan yang memengaruhi belum optimalnya pertumbuhan realisasi penanaman modal di Jawa Tengah, antara lain, belum meratanya pertumbuhan dan persebaran penanaman modal di Jawa Tengah, masih adanya permasalahan terkait ketersediaan lahan dan kesesuaian tata ruang wilayah, belum andal/sempurnanya sistem *online single submission risk based approach* (OSS RBA), kurangnya ketersediaan informasi tenaga kerja sesuai jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan oleh calon investor, belum optimalnya infrastruktur penunjang dan pendukung kegiatan penanaman modal, belum optimalnya keberadaan kawasan industri, dinamika regulasi terkait kegiatan penanaman modal yang belum sepenuhnya disiapkan instrumen dan prasarana sarannya, serta masih rentannya kondusivitas wilayah dalam menjaga iklim penanaman modal.

c. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah

Ketersediaan infrastruktur menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan infrastruktur adalah masih adanya jalan provinsi yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Sampai dengan tahun 2022, kondisi jalan provinsi yang telah sesuai standar dengan lebar tujuh meter dan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton sebesar 41,56 persen. Sedangkan jalan provinsi dengan kondisi permukaan rusak berat sebesar 4,67 persen dan rusak ringan sebesar 2,84 persen. Masih terdapat titik rawan longsor di ruas-ruas jalan provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana.

Kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan keselamatan perjalanan transportasi juga masih diperlukan utamanya peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi dalam mendukung pengurangan tingkat kecelakaan. Sampai dengan tahun 2022, pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi sebesar 29,19 persen. Peningkatan kualitas layanan angkutan umum juga masih diperlukan terutama peningkatan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi serta integrasi antarmoda yang secara bertahap harus dipenuhi.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana tampungan air baku. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata). Sampai dengan tahun 2022, ketersediaan air baku mencapai 62 persen, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 61,5 persen.

Permasalahan lainnya yang masih dijumpai di Jawa Tengah adalah masih rendahnya konsumsi listrik per kapita. Tingkat konsumsi listrik erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Jika masyarakat pendapatannya bertambah, pola konsumsi listriknya berpotensi bertambah. Pada sisi *demand*, konsumsi listrik di Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah tetangga di Pulau Jawa. Konsumsi listrik di Jawa Tengah sebesar 745.59 kWh/kapita pada tahun 2022, Jawa Timur sebesar 907 kWh/kapita, Jawa Barat sudah mencapai 1.012 kWh/kapita, dan DKI Jakarta telah mencapai 3.248 kWh/kapita.

Potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan, juga mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif. Tingkat *availability* listrik di Jawa Tengah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan daya listrik yang pada tahun 2022 sebesar 1,46. Hal tersebut menunjukkan Jawa Tengah memiliki *reserve margin* (cadangan daya) sebesar 46 persen yang telah terintegrasi dalam sistem transmisi Jawa-Madura-Bali. *Reserve margin* yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas perekonomian daerah yang kuat diharapkan akan memberikan pengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku usaha perikanan sebagai pelaku utama dalam peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah Jawa Tengah. Kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku usaha perikanan masih perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai tukar petani (NTP) sebesar 107,27 pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 103,18. Meskipun meningkat, tantangannya adalah menjaga kemampuan dan daya beli petani tetap stabil.

Rendahahnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan berkaitan erat dengan produk perikanan yang mudah busuk (*perishable*) sehingga membutuhkan penanganan yang sesuai standar dari hulu ke hilir, sementara saat ini usaha masih didominasi usaha skala kecil dan belum sepenuhnya sesuai standar, ditambah jangkauan pemasaran yang masih terbatas. Hal yang lain adalah rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah. Ini membutuhkan dorongan lebih kuat untuk meningkatkan preferensi masyarakat terhadap ikan sebagai sumber protein hewani. Secara simultan dibutuhkan juga upaya untuk meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan sumber daya manusia (SDM) para pelaku usaha perikanan, serta secara khusus pada perikanan tangkap karena risiko terjadinya kecelakaan kerja masih cukup tinggi sehingga membutuhkan perlindungan.

Kuatnya perekonomian daerah Jawa Tengah juga ditopang oleh kuatnya perekonomian desa. Oleh karena itu, penting untuk mewujudkan

kemandirian desa di Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2021, desa yang termasuk kategori desa mandiri di Jawa Tengah sebanyak 199 desa atau 2,55 persen. Untuk mewujudkan desa mandiri perlu didorong inisiasi pengembangan kawasan perdesaan regional berbasis kewilayahan dan peningkatan kelembagaan desa seperti BUM desa, pasar desa, usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP), dan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K PKK).

4. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana

Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun, ditunjukkan dengan terlampauinya daya dukung daya tampung air dan pangan.

Beberapa tekanan lingkungan seperti perubahan tata guna lahan, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, dan pencemaran lingkungan. Tekanan lingkungan hidup di Jawa Tengah ditunjukkan melalui indikator indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2022 sebesar 67,53 yang masuk dalam kategori sedang. Permasalahan tersebut dikarenakan adanya perubahan tutupan lahan, masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan limbah.

Dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK. Salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi.

Persentase pemanfaatan EBT tahun 2022 sebesar 15,76 persen dari total bauran energi di Jawa Tengah. Sampai dengan saat ini, penggunaan energi fosil mendominasi, sebesar 84,24 persen. Efek buruk dari ketergantungan terhadap sumber energi fosil sebagai sumber energi utama adalah sifatnya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui sehingga berpotensi dapat menyebabkan krisis energi, selain dapat meningkatkan emisi GRK.

Permasalahan lain terkait dengan kualitas lingkungan hidup adalah masih rendahnya luasan tutupan lahan di Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh masih adanya lahan kritis dan lahan mangrove yang perlu direhabilitasi serta masih rendahnya penambahan industri pengolah hasil hutan yang memperoleh sertifikasi verifikasi legalitas kayu. Rendahnya luasan tutupan lahan juga mempengaruhi ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Permasalahan sumber daya air tidak hanya terkait ketersediaan air, namun lebih luas permasalahannya adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air disebabkan kurangnya sarana tampungan air

baku dan rusaknya jaringan irigasi untuk pertanian. Sementara itu, terkait dengan permasalahan belum optimalnya pengendalian daya rusak air ditunjukkan dengan adanya kerusakan prasarana sarana sungai dan pengendali banjir.

Selain permasalahan sumber daya air permukaan sebagaimana digambarkan sebelumnya, di Jawa Tengah juga terjadi peningkatan pemanfaatan air tanah yang berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan lahan. Jumlah pengambilan air tanah di Jawa Tengah cenderung naik secara fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 hingga tahun 2022 jumlah pengambilan air tanah menunjukkan penurunan.

Walaupun demikian, pengendalian dan pengawasan harus tetap dilaksanakan untuk semakin menurunkan laju pengambilan air tanah utamanya pada wilayah cekungan air tanah (CAT) kritis. Sebagai contoh, menurut hasil penelitian yang dipublikasikan dalam artikel *Land subsidence hazard in Indonesia: Present research and challenges ahead*, Sarah et al. (2021), penggunaan air tanah menjadi penyebab utama (80 persen) *land subsidence* di Semarang–Demak, sisanya adalah faktor beban bangunan (20 persen) di permukaan.

Penurunan kualitas lahan juga terjadi di Jawa Tengah sebagai akibat belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Potensi pertambangan di Jawa Tengah memiliki sebaran komoditas yang beragam dan cukup melimpah. Perkiraan kebutuhan material untuk proyek strategis nasional (PSN) di Jawa Tengah adalah sebesar kurang lebih 113 juta m³. Akan tetapi, kondisi saat ini Jawa Tengah hanya mampu memenuhi kurang lebih 31 juta m³.

Potensi mineral bukan logam dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya dan perlu mendasari aspek tata ruang karena rangkaian aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan, antara lain, berkurangnya vegetasi hutan, tumbuhan, dan lapisan tanah. Perlu dorongan untuk melaksanakan pertambangan dengan baik (*good mining practice*) agar dapat mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai lingkungan. Di Jawa Tengah terdapat 355 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan dari jumlah tersebut yang telah melaksanakan pertambangan yang baik sebesar 89 persen pada tahun 2022.

Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksi, apalagi Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan indeks risiko bencana Jawa Tengah yang sebesar 115,38 pada tahun 2022, menurun dari angka 125,73 pada tahun 2021. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, antara lain, masih belum semua kabupaten/kota memiliki dokumen perencanaan penanggulangan bencana, masih terbatasnya jumlah pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*) di wilayah rawan bencana, masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana, masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana, serta dalam perhitungan kebutuhan pascabencana dan rehabilitasi rekonstruksi bencana. Semua permasalahan terkait penurunan daya dukung

dan daya tampung lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana dipengaruhi oleh kebijakan dan penerapan tata ruang. Namun, permasalahan yang terjadi justru adalah belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang serta implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang juga belum optimal.

5. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi di Jawa Tengah dinilai cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut ditunjukkan dengan kinerja indikator indeks reformasi birokrasi (IRB) Jawa Tengah tahun 2022 yang mendapatkan predikat A dengan nilai 80,31. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang mendapatkan predikat BB dengan nilai 78,79. Meskipun kinerja reformasi birokrasi Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun, namun masih harus terus ditingkatkan terutama dalam pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur.

Hal tersebut juga dalam rangka menjawab tantangan ke depan, yaitu bagaimana birokrasi mampu menjadi katalisator dalam percepatan pencapaian kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah. Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah yang masih menjadi perhatian antara lain:

- a. Masih perlunya peningkatan pelayanan kepada publik maupun standar operasional tata kelola pelayanan karena masih dijumpai beberapa permasalahan seperti belum optimalnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan pertanahan yang ditandai dengan masih terdapat konflik atau sengketa permasalahan pertanahan dan belum optimalnya reforma agraria; belum optimalnya fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi kabupaten/kota serta rendahnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah; belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan ditandai dengan masih kurangnya penyediaan dan pengelolaan arsip untuk akses dan informasi masyarakat; belum semua bangunan gedung milik daerah dalam kondisi baik yang dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap pelayanan; serta belum optimalnya pelayanan kepada anggota DPRD yang dipengaruhi oleh belum optimalnya prasarana dan sarana pelayanan bagi anggota DPRD; termasuk juga belum optimalnya pelayanan kepada publik di unit-unit pelayanan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Belum optimalnya digitalisasi tata kelola pemerintahan yang disebabkan, antara lain, belum optimalnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, belum optimalnya implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta belum optimalnya keamanan data dan informasi pemerintahan yang disebabkan antara lain masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang persandian dan keamanan data;
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta dinamis yang ditunjukkan dengan beberapa permasalahan

seperti belum optimalnya kualitas kebijakan daerah yang dihasilkan yang disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur dalam melakukan proses analisis kebijakan daerah; belum optimalnya implementasi proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan daerah; masih perlunya mendorong kinerja perencanaan pembangunan daerah agar lebih berkualitas, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan, serta keselarasan perencanaan daerah dengan perencanaan di tingkat pusat maupun perencanaan sektoral lainnya, sementara di sisi lain dinamika kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi kualitas perencanaan dari aspek keselarasan antar perencanaan di tingkat pusat maupun daerah; belum optimalnya pengelolaan data baik data sektoral maupun geospasial dan perwujudan Satu Data Pemerintahan yang disebabkan antara lain kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum optimal; menurunnya kapasitas fiskal dikarenakan adanya regulasi baru (Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah/HKPD), belum optimalnya pendapatan asli daerah di luar penerimaan pajak daerah, belum optimalnya penanganan piutang pajak kendaraan bermotor, serta masih terbatasnya skema pendanaan di luar APBD; belum optimalnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dipengaruhi oleh permasalahan antara lain belum optimalnya kompetensi ASN dalam hal riset dan pengembangan inovasi, serta masih terbatasnya prasarana sarana riset dan inovasi; serta masih belum optimalnya pengawasan, pembinaan dan pendampingan bagi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebabkan antara lain masih belum optimalnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP);

- d. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur, yang ditunjukkan dengan masih belum optimalnya kinerja kematangan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; belum optimalnya meritokrasi dalam manajemen ASN terutama dipengaruhi oleh distribusi ASN yang belum sesuai kebutuhan dan kompetensi, dan belum optimalnya layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi; serta belum optimalnya kompetensi ASN Jawa Tengah yang disebabkan antara lain belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN dan belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten.

6. Masih perlunya upaya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah

Kondusivitas daerah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing daerah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang cukup kondusif. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari indikator indeks toleransi yang pada tahun 2022 sebesar 73,68, meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 72,64. Indikator lainnya yang dapat menggambarkan kondusivitas Jawa Tengah adalah indeks kerukunan umat beragama (IKUB) yang pada tahun 2022 sebesar 74,28, menurun dari tahun 2021 yang sebesar 75,12. Meskipun cukup kondusif, Jawa Tengah tetap menghadapi tantangan dan ancaman global, nasional, dan regional terkait semakin terbukanya informasi tanpa batas (*borderless*), ancaman kemanan dan ketertiban masyarakat, dan ancaman gangguan keamanan lainnya.

Permasalahan daerah yang harus menjadi perhatian untuk diantisipasi, antara lain, masih belum optimalnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum terutama terkait dengan belum optimalnya penegakan peraturan daerah (perda), pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta belum optimalnya kesatuan bangsa dan politik yang ditandai dengan stabilitas politik dan ketahanan bangsa yang perlu terus untuk dijaga terutama dalamantisipasi dampak pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.

4.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis di Jawa Tengah mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah), dan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah. Perumusan isu strategis dilakukan dengan berbagai metodologi, antara lain, analisis isu dari berbagai kebijakan, *focus group discussion* bersama *stakeholders pentahelix*, dan analisis pembobotan. Berbagai isu yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis daerah, baik isu secara global, nasional, maupun daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Daerah (RPJPD)	Isu Daerah (RPJMD)
1. Kemiskinan	1. Stabilitas politik dan keamanan	1. Sosial budaya dan kehidupan beragama	1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Pangan dan Gizi	2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien	2. Ekonomi	2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM
3. Kesehatan	3. Pemberantasan korupsi	3. Iptek	3. Daya Saing Ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
4. Pendidikan	4. Pertumbuhan ekonomi	4. Sarpras	4. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
5. Gender	5. Percepatan pemerataan dan keadilan	5. Politik dan Tata Pemerintahan	5. Kedaulatan pangan dan energi
6. Air bersih dan sanitasi	6. Keberlanjutan pembangunan	6. Keamanan dan Ketertiban	6. Kesenjangan Wilayah
7. Energi	7. Peningkatan kualitas SDM	7. Hukum dan Aparatur	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah
8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	8. Kesenjangan antar wilayah	8. Wilayah dan Tata Ruang	
9. Infrastruktur	9. Percepatan pembangunan kelautan	9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
10. Kesenjangan Kota dan Permukiman			
11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan			
12. Perubahan iklim			
13. Sumberdaya kelautan			
14. Ekosistem daratan			
15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan			
16. Kemitraan global			

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah serta isu-isu global, nasional, dan regional dan perubahan kebijakan nasional menyimpulkan isu strategis Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2024-2026. Isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 yang masih menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Pada periode bulan September tahun 2022, angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 10,98 persen, naik 0,05 persen daripada bulan Maret 2022, namun apabila dibandingkan

dengan periode September 2021 yang sebesar 11,25 persen menurun 0,27 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang sebesar 9,57 persen.

Isu lainnya adalah masih rendahnya pendapatan per kapita yang pada tahun 2022 sebesar Rp42,15 juta, meningkat daripada tahun 2021 (Rp38,65 juta), namun masih lebih rendah dibandingkan angka nasional (Rp71 juta). Ketimpangan pendapatan juga masih menjadi isu yang ditunjukkan dari rasio Gini yang pada tahun 2022 periode bulan September sebesar 0,366. Meskipun membaik jika dibandingkan periode September 2021 yang sebesar 0,368, masih termasuk kategori ketimpangan tinggi. Rasio Gini Jawa Tengah juga lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,381. Isu tersebut berkaitan dengan isu strategis lainnya yang masih menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Secara kumulatif, ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,31 persen (*c to c*), lebih baik dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,32 persen (*c to c*). Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,31 persen. Namun, tantangan ekonomi ke depan masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi, serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed dikarenakan inflasi yang tinggi. Hal ini berdampak pada perekonomian Indonesia maupun Jawa Tengah, yaitu potensi menurunnya ekspor karena melemahnya permintaan global serta turunnya nilai tukar rupiah yang berakibat pada meningkatnya harga impor bahan baku industri.

Perekonomian di Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, pertanian dalam arti luas, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata. Dilihat dari lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB secara berurutan pada tahun 2022 adalah industri pengolahan sebesar 33,93 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,60 persen, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,77 persen. Selain didukung sektor unggulan, perekonomian Jawa Tengah juga didukung investasi, konsumsi masyarakat, ekspor, dan pengelolaan keuangan daerah.

Kondisi perekonomian daerah berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Tengah yang ditunjukkan dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada periode Agustus 2022 sebesar 5,57 persen, menurun 0,38 poin dibandingkan periode Agustus 2021 yang sebesar 5,95 persen. Pengaruh lainnya adalah pada nilai tukar petani (NTP) Jawa Tengah yang pada bulan Desember 2022 sebesar 107,27, naik 1,91 persen dibandingkan NTP bulan November yang sebesar 105,26.

Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah pembangunan ekonomi yang semakin inklusif dengan memperhatikan laju pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutannya untuk menciptakan dan memperluas kesempatan perkembangan ekonomi serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat dan tuntutan akan pembangunan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup (ekonomi hijau).

Infrastruktur sebagai akses distribusi barang dan jasa, penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting untuk mendukung perekonomian yang inklusif dan berdaya saing. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan keserasian pembangunan antarwilayah sesuai dengan arah kebijakan delapan wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif

Pembangunan SDM dihadapkan pada tantangan seperti *megatrend* global, era disrupsi, globalisasi, serta upaya pemulihan dalam tatanan baru (*new normal*). Pembangunan SDM Jawa Tengah ke depan dihadapkan pada tantangan daya saing yang semakin meningkat yang digambarkan dari kondisi pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 72,79 dan masih berada di bawah IPM Nasional. Hal itu dikarenakan jumlah penduduk Jawa Tengah yang semakin meningkat, sebanyak empat juta jiwa dalam satu dekade, yang berpotensi memunculkan berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketersediaan pangan, dan degradasi lingkungan.

Pembangunan SDM berkualitas berkaitan erat dengan ketersediaan layanan kesehatan berkualitas yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular yang diperkuat dengan pembudayaan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan bugar, mobilisasi pembiayaan sektor nonpemerintah dalam penyediaan layanan kesehatan, dan beban ganda permasalahan gizi (kelebihan dan kekurangan gizi), serta akses, mutu, relevansi, dan partisipasi pendidikan masih menjadi persoalan penting dalam bidang pendidikan. Transisi demografi dari struktur penduduk usia produktif menuju penduduk usia tua juga memerlukan penyediaan layanan dan perlindungan bagi penduduk lanjut usia untuk menjaga kualitas hidup penduduk lanjut usia.

Tantangan lain dalam pembangunan SDM adalah menciptakan SDM berkarakter. Kecenderungan menurunnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ditandai dengan menurunnya indeks pembangunan kebudayaan (IPK) dari 59,12 pada tahun 2020 menjadi 55,24 pada tahun 2021. Tantangan era disrupsi, globalisasi, dan transformasi digital yang terjadi saat ini menuntut SDM Jawa Tengah agar lebih adaptif tanpa meninggalkan jatidiri sebagai masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya berbasis kearifan lokal. Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan SDM berkarakter adalah pendekatan keluarga.

Kinerja pembangunan keluarga di Jawa tengah ditunjukkan dengan indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang menunjukkan kecenderungan turun dari 58,00 pada 2020 menjadi 56,10 pada 2021. Adapun indeks pembangunan gender Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari 92,48 pada 2021 menjadi 92,83 pada 2022, tetapi masih terjadi ketimpangan pada komponen harapan lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup laki-laki, serta pengeluaran per kapita perempuan. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari 8,51 pada 2017

menjadi 8,97 pada 2021 serta angka pernikahan usia anak masih tinggi, yaitu 13.595 perkawinan.

3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera hidupnya. Sumber daya alam sebagai salah satu modal dasar pembangunan berkonsekuensi dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam di Jawa Tengah harus memperhatikan unsur-unsur lingkungan, tata ruang, serta masyarakat di sekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan sumber daya alam semakin meningkat, namun sumber daya alam jumlahnya semakin terbatas dan daya tampung lingkungan hidup juga semakin menurun. Potensi terjadinya bencana akibat pemanfaatan sumber daya alam juga perlu menjadi perhatian.

Untuk menjaga keberlangsungan pemenuhan sumber daya alam bagi masyarakat di Jawa Tengah, mengurangi risiko bencana alam dan mendukung kehidupan masyarakat menjadi lebih baik diperlukan upaya untuk meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana. Daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya akan berhasil apabila ketersediaan sumber daya alam dan jumlah penduduk di Jawa Tengah berimbang.

Oleh karena itu, pengelolaan, konservasi, kesadaran masyarakat, regulasi pemerintah, serta aksesibilitas di Jawa Tengah harus terjaga dengan baik. Daya tampung lingkungan hidup juga diperlukan untuk mengetahui kemampuan lingkungan hidup menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Untuk meningkatkan daya tampung lingkungan hidup, pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran dapat menjadi strategi di masa yang akan datang.

Provinsi Jawa Tengah selain memiliki potensi sumber daya alam juga memiliki ancaman bencana. Upaya mitigasi struktural dan non struktural diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Pemetaan potensi bencana di suatu daerah, perencanaan pembangunan yang adaptif bencana, pelatihan gladi bagi relawan maupun masyarakat umum, pemanfaatan teknologi untuk memperkirakan atau memberikan peringatan apabila bencana akan terjadi, maupun penyediaan logistik dan peralatan dalam menghadapi bencana, masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Kinerja tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah digambarkan dengan membaiknya indeks reformasi birokrasi yang pada tahun 2022 sebesar 80,31, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 78,79. Tantangan ke depan adalah mewujudkan birokrasi menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama penanggulangan kemiskinan,

pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Perubahan paradigma reformasi birokrasi tersebut menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan yang meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, dan penguatan pelayanan publik. Tantangan lainnya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerja sama antarpemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024–2026 adalah perencanaan pembangunan transisi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang akan berakhir pada tahun 2023 dan RPJMD setelah pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2024. Pada periode tahun tersebut, terjadi kekosongan Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sehingga dampaknya dari sisi perencanaan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode pembangunan tahun 2024-2026 yang akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sebagai dampak dari tidak adanya visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan isu strategis daerah aktual yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, dan analisis sasaran pokok atau arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat.

RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 memiliki visi pembangunan jangka panjang Jawa Tengah yaitu “Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Pencapaian visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari pembangunan daerah diarahkan pada sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Terwujudnya kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pengembangan jejaring;
4. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
5. Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender.

Berdasarkan isu strategis daerah yang telah dirumuskan sebelumnya dan dengan memperhatikan RPJPD Tahun 2005-2025 maka dibangun *logframe* kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah untuk tahun 2024-2026 sebagai berikut.



Gambar 5.1

Logframe Kinerja Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Logframe kinerja tersebut menggambarkan bahwa pembangunan daerah Jawa Tengah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari. Untuk mewujudkan Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari, didukung oleh tiga pilar kinerja utama yaitu:

- 1) Perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
- 2) Sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
- 3) Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Ketiga pilar ini bukanlah sistem yang berdiri sendiri, namun merupakan satu kesatuan sistem yang saling terhubung satu sama lain dan bersifat *cross cutting performance*. Untuk mendukung perwujudan tiga pilar tersebut diperkuat dengan pengarusutamaan pada tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis sebagai penggerak roda pembangunan daerah Jawa Tengah. Mendasarkan pada *logframe* kinerja tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 sebagai berikut.

Tujuan Daerah
Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari

Sasaran Daerah:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam tiga tahun kedepan adalah **Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari**. Mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah keberlanjutan dari tujuan pembangunan Jawa Tengah pada periode RPJMD sebelumnya dan merupakan mandat dari tujuan pembangunan jangka panjang Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJPD. Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata dan semua masyarakat memiliki hak yang sama atas pemenuhan kebutuhan dasarnya (*no one left behind*) agar masyarakat Jawa Tengah dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera juga dibarengi dengan lestari yang dimaknai sebagai pembangunan masyarakat Jawa Tengah yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keberhasilan pencapaian tujuan daerah selama tahun 2024-2026 ditunjukkan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita masyarakat Jawa Tengah dari tahun ke tahun, dan menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tersebut maka **sasaran daerah** yang akan diwujudkan yaitu:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan

Di tengah kondisi perekonomian global, nasional, dan regional yang tidak menentu, Pemerintah Jawa Tengah harus berupaya untuk memperkuat

perekonomian daerah agar lebih tangguh dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan risiko. Dengan perekonomian yang tangguh diharapkan lebih memperkuat perekonomian masyarakat agar tidak mudah terpuruk pada situasi gejolak perekonomian global, nasional, maupun regional. Perekonomian yang tangguh ditandai dengan perekonomian yang berdaya saing. Mengadopsi *global competitiveness index*, perekonomian yang berdaya saing ditunjukkan dengan kapasitas dan potensi Jawa Tengah yang bersaing dengan daerah lainnya untuk menarik talenta sumber daya manusia terbaik dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Pembangunan perekonomian yang berdaya saing bertujuan agar taraf hidup perekonomian masyarakat juga akan semakin kuat dan meningkat dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, dalam kondisi ancaman keberlanjutan sumber daya alam yang semakin mengkhawatirkan maka penguatan perekonomian daerah Jawa Tengah juga menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan atau *green economy*, agar peningkatan perekonomian tetap sejalan dengan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perwujudan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan tersebut tetap berprinsip pada perekonomian inklusif, artinya suatu kondisi perekonomian yang menjamin akses dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Pencapaian dari sasaran ini diukur dari empat indikator kinerja yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan nilai tukar petani.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif

Sumber daya manusia Jawa Tengah yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif diharapkan mampu menjawab dinamika dan tuntutan dalam era disrupsi, globalisasi, *megatrend*, dan geopolitik yang tidak menentu tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas Jawa Tengah. Sumber daya manusia berdaya saing dibutuhkan agar mampu berkompetisi baik pada tingkat lokal maupun global di era *industry 4.0* dan *society 5.0*, yang diarahkan pada penciptaan sumber daya manusia yang pintar, sehat, dan bugar secara inklusif. Penciptaan sumber daya manusia pintar akan dicapai dengan kualitas pendidikan yang semakin baik, melalui pemerataan akses pendidikan yang bermutu serta peningkatan partisipasi pendidikan.

Perwujudan sumber daya manusia sehat diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sumber daya manusia bugar lebih ditujukan pada pembentukan kebugaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi sehingga diharapkan produktivitasnya akan meningkat. Perwujudan sumber daya manusia pintar, sehat, dan bugar diimplementasikan secara inklusif, artinya memperhatikan kesetaraan dan pemberdayaan gender, serta kelompok rentan (miskin, difabel, ibu bayi, balita, lansia, dan remaja). Sumber daya manusia berkarakter dan adaptif ditunjukkan dalam bentuk sumber daya manusia Jawa Tengah yang dinamis dengan *softskill* yang memadai, serta memiliki *critical thinking*, daya juang, dan optimisme yang tinggi.

Perwujudan sumber daya manusia berkarakter dan adaptif dilakukan dengan mendorong sumber daya manusia yang memiliki literasi yang bagus, pengembangan dan peningkatan *softskill* yang adaptif, keterampilan yang

sesuai kebutuhan zaman, serta memiliki nilai sikap perilaku berbudaya yang berlandaskan nilai agama dan kearifan lokal. Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan kebudayaan, indeks pembangunan gender, dan indeks pembangunan keluarga.

3. Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan. Keberlanjutan proses pembangunan akan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, ketahanan energi, tutupan lahan, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan risiko bencana. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah indeks kualitas lingkungan hidup, dan persentase penurunan indeks risiko bencana.

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

Tata kelola pemerintahan yang dinamis atau *dynamic governance* adalah salah satu sasaran daerah yang akan menjadi *mainstreaming* pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah. Tata kelola pemerintahan yang dinamis ini akan dapat terwujud dengan memperkuat pemerintahan yang adaptif dan birokrasi yang kolaboratif. Birokrasi yang dinamis adalah birokrasi yang senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih *agile*).

Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Kolaborasi dalam proses pemerintahan untuk pembangunan daerah saat ini menjadi mutlak karena dependensi antar daerah pada akhirnya akan semakin besar. Tidak hanya kolaborasi antar daerah, namun daerah dengan pemangku kepentingan lainnya pun harus semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah indeks reformasi birokrasi.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 beserta indikatornya dalam bentuk diagram *cascading* dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5.2
Cascading Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2026. Penetapan target atau proyeksi per indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2024–2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja			Target Kinerja Akhir
				2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari									
		PDRB per Kapita	Juta Rupiah	42,15	40,87	45,82	47,60	49,68	49,68
		Angka Kemiskinan	%	10,98	9,86-9,05	9,76-8,96	9,28-8,08	8,67-7,28	8,67-7,28
		Rasio Gini	Angka	0,366	0,340	0,364	0,362	0,360	0,360
	Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan								
		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,31	5,20-5,60	4,70 - 5,50	4,90 - 5,60	5,00 - 5,80	5,00 - 5,80
		Inflasi	%	5,63	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,57	5,48-4,80	5,44 - 4,94	5,20 - 4,60	4,90 - 4,30	4,90 - 4,30
		Nilai Tukar Petani	Angka	107,27	104,05	107,45	107,52	107,68	107,68
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif								
		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,79	72,88	73,43	73,99	74,55	74,55
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	n.a.	n.a.	57,56	57,91	58,17	58,17
		Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,83	92,58	93,03	93,13	93,23	93,23
		Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,16	n.a.	58,20	58,50	59,00	59,00

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja			Target Kinerja Akhir
				2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup								
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,53 ³⁾	67,53 ³⁾	67,55	67,56	67,57	67,57
		Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	8,23	n.a.	4,00	4,00	4,00	4,00
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis								
		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,31	80,00	81,50	82,00	82,50	82,50

Keterangan:

- 1) Realisasi indikator kinerja RPJMD periode sebelumnya sampai dengan tahun 2022 dan/atau gambaran umum kondisi daerah pada tahun 2022; jika tertulis n.a. maka data tersebut belum dirilis;
- 2) Target/proyeksi tahun 2023 adalah target/proyeksi yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023; jika tertulis n.a. artinya bahwa indikator tersebut merupakan indikator baru yang tidak digunakan dalam RPJMD Tahun 2018-2023/RKPD Tahun 2023;
- 3) Nilai penyesuaian berdasarkan PermenLHK 27/2021 tentang IKLH, penambahan stasiun AQMS (Air Quality Monitoring Station) dan adanya penambahan titik sampel pemantauan kualitas air dari kabupaten/kota.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari dengan empat sasaran daerah yang juga harus diwujudkan, yaitu: 1) Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, 3) Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan 4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 adalah mewujudkan Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari yang diukur dari produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, rasio Gini, dan angka kemiskinan. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, terutama dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, perumusan strategi dan program pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 diarahkan berbasis pada pengarusutamaan strategi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem). Penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial antara lain bantuan siswa miskin (BSM), seragam siswa miskin, jaminan sosial, pemberian bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Kartu Jateng Sejahtera (KJS), serta bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia serta anak dan penyandang disabilitas. Selain program bantuan sosial tersebut terdapat program subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
2. Strategi peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya peningkatan akses pekerjaan melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin; peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan; peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan; pendampingan dan penguatan kewirausahaan melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar; serta pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
3. Penurunan wilayah kantong kemiskinan dilakukan melalui sinergi kebijakan, antara lain, pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan infrastruktur perumahan, jambanisasi, air minum dan sanitasi layak, peningkatan akses

layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Strategi utama tersebut didukung peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kewilayahan/spasial. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan yang dikelola oleh Dinas Sosial.

Sedangkan untuk pendekatan kewilayahan difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala dan dimensi spasial yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kewilayahan antara lain: 1) Penanganan kawasan kumuh, 2) Peningkatan aksesibilitas di wilayah dengan kesulitan geografis tinggi, 3) Peningkatan produktivitas pertanian, 4) Pemberdayaan nelayan dan sektor perikanan, dan 5) Pengembangan potensi lokal. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Selanjutnya dengan memperhatikan kebijakan perumusan strategi pembangunan daerah berbasis pada pengarusutamaan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 dirumuskan strategi pembangunan daerah berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan daerah pada setiap sasaran daerah dijabarkan sebagai berikut.

1. Meningkatnya Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan indikator kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan nilai tukar petani maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
 - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan, dan perikanan berbasis kelembagaan korporasi;
 - 3) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - 4) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri, pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang

- memadai, pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah, penguatan sumber daya tenaga kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), meningkatkan kapasitas UMKM dalam usaha, teknologi, dan akses finansial, mendorong investasi hijau dari perusahaan penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri (PMA/PMDN) dan UMKM, mendorong persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang, peningkatan pelayanan modal di daerah, penguatan kelembagaan mendukung industri berbasis teknologi, inovasi, dan investasi hijau, menguatkan kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM berbasis sektor unggulan wilayah, serta penguatan kerja sama antardaerah dalam mendorong penanaman modal yang berkelanjutan;
- 5) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - 6) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas daerah;
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
- 1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultramikro);
 - 2) Penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - 3) Peningkatan rumah layak huni dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
 - 4) Fasilitasi sistem penyediaan air minum (SPAM) kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - 5) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dalam panti, pemenuhan secara bertahap kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, penjajakan potensi kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga keterampilan untuk kemandirian PPKS, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan peran kabupaten/kota dalam penanganan PPKS di luar panti, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkata pendapatan kelompok fakir miskin, serta peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan meningkatkan kapasitas petugas puskesmas dan meningkatkan konektivitas pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) dan lembaga layanan sosial;
 - 6) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan;
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah, melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;

- d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang layak;
- e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan *database*, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM petani, peningkatan kapasitas usaha, peningkatan perlindungan, perluasan akses pemasaran berbasis teknologi informasi, serta mewujudkan kelembagaan petani berbasis korporasi.

2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Adaptif

Sasaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif dengan indikator kinerja indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan kebudayaan, indeks pembangunan gender, dan indeks pembangunan keluarga akan dicapai melalui strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata, melalui:
 - 1) Perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan akurat terhadap sumber daya, potensi dan permasalahan pendidikan termasuk anak tidak sekolah (ATS), pemenuhan layanan pendidikan pada wilayah *blankspot* terutama bagi ATS dan masyarakat miskin, perluasan cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, penyediaan layanan pendidikan yang terjangkau dengan model pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI), serta pemenuhan distribusi dan peningkatan kualitas guru, tenaga kerja kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan;
 - 2) Penguatan koordinasi secara lintas *stakeholders*, optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat, penguatan tata kelola pendidikan dengan optimalisasi dana operasional dan bantuan sekolah, pengendalian penyelenggaraan pendidikan, serta peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan terutama dalam evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - 3) Peningkatan kualitas kebijakan berorientasi pada akses dan mutu pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS, masyarakat miskin, dan inklusi; peningkatan implementasi kebijakan dengan evaluasi pengendalian berkala; serta penguatan kebijakan pembangunan pendidikan yang berorientasi pada sinergi lintas sektor dan *stakeholders*;
 - 4) Penguatan internalisasi pendidikan karakter dengan perluasan dan penguatan implementasi kurikulum adaptif yang diarahkan pada pembentukan karakter siswa agar mempunyai nilai kearifan lokal, sikap kritis, kreatif, inovatif, anti-*bullying*, anti-kekerasan, anti-diskriminasi, budaya literasi dan bugar, peduli lingkungan, etos kerja yang baik, serta mengarah pada peran serta aktif guru dan siswa dalam proses pembelajaran berorientasi pembentukan karakter;

- 5) Peningkatan relevansi pendidikan berorientasi pada identifikasi kesesuaian kompetensi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja, penyelesaian revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK), serta penguatan kerjasama multipihak;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui:
- 1) Peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana sarana kesehatan, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi penyusunan kebijakan, perbaikan *baseline* data, pemenuhan standar prosedur operasional;
 - 2) Perluasan penemuan kasus, penurunan kasus tular vektor, dan pengendalian faktor risiko;
 - 3) Peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan *surveilans* berbasis laboratorium;
 - 4) Penguatan klaster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana;
 - 5) Peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan demam berdarah *dengue* (DBD), penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa, serta kejadian luar biasa atau krisis bencana;
 - 6) Akselerasi dan kolaborasi layanan kesehatan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta;
 - 7) Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan;
- c. Meningkatkan kebugaran masyarakat serta prestasi olahraga melalui peningkatan kesadaran, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar; penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang memadai dan terjangkau, termasuk ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga; serta pemetaan potensi atlet, peningkatan pembinaan dan pelatihan atlet, dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. Meningkatkan literasi masyarakat termasuk di dalamnya literasi digital melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi melalui inovasi dan kreativitas layanan; identifikasi pemanfaatan perpustakaan yang berstandar nasional; peningkatan kualitas prasarana dan sarana literasi dan kapasitas SDM; serta peningkatan promosi informasi layanan rujukan/ *offline* maupun digital perpustakaan daerah;
- e. Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui peningkatan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
- f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat, melalui:
- 1) Peningkatan ekspresi budaya berbasis nilai kearifan lokal dengan optimalisasi pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan pengembangan cagar budaya; pengayaan *platform* media dan pemanfaatan teknologi informasi; serta pelibatan *stakeholders* dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan;
 - 2) Penguatan tata kelola kebudayaan yang diarahkan pada ketersediaan data informasi kebudayaan yang berkualitas termasuk sinergi antar pihak berbasis teknologi informasi; peningkatan kerjasama lintas sektor dan multipihak serta kualitas pengelolaan objek pemajuan kebudayaan

- dan cagar budaya; peningkatan kapasitas lembaga dan SDM kebudayaan berorientasi karya budaya;
- 3) Penguatan internalisasi nilai budaya, keagamaan, dan kearifan lokal dengan pendidikan, keluarga maupun masyarakat; asimilasi budaya dan kerja sama lintas sektor; serta pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya;
- g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek, perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan kemandirian sasaran peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas data pilah gender dan anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak, melalui:
- 1) Fasilitasi pembentukan, pemetaan layanan, dan penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten/kota;
 - 2) Penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi;
 - 3) Peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender;
 - 4) Peningkatan pendidikan antikekerasan sejak usia dini;
 - 5) Pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor;
 - 6) Peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA);
 - 7) Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Meningkatkan Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diukur dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup dan persentase penurunan indeks risiko bencana dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, melalui:
- 1) Peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien;
 - 2) Penyediaan prasarana sarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST regional, SPALD-S, TPS 3R, IPAL komunal);
 - 3) Peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara;
 - 4) Peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat;
 - 5) Peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - 6) Peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim;
 - 7) Penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon;
 - 8) Penyusunan perencanaan tata ruang serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif, melalui:
 - 1) Pengembangan energi berkelanjutan serta peningkatan pengembangan prasarana dan sarana energi baru dan terbarukan;
 - 2) Perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi terutama energi baru dan terbarukan;
 - 3) Peningkatan edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air, melalui:
 - 1) Pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan;
 - 2) Peningkatan konservasi air tanah dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah serta pembangunan prasarana dan sarana konservasi air tanah;
 - 3) Pengembangan SPAM regional;
 - 4) Pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
- d. Menurunkan risiko bencana, melalui:
 - 1) Penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
 - 3) Perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana;
 - 4) Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB);
 - 5) Peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini atau *early warning system* (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB);
 - 6) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif;
 - 7) Peningkatan kesiapan dan aktivasi klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota;
 - 8) Pengembangan *database* logistik dan peralatan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan provinsi;
 - 9) Penyusunan kebijakan dan implementasi mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana;
 - 10) Penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan sosial adaptif;
 - 11) Penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi; serta
 - 12) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan indikator kinerja indeks eeformasi birokrasi dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif melalui penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi; transformasi digitalisasi

- pemerintahan; evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis; pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, pengembangan pola karier, peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, pemetaan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik; penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis TI; penguatan pengawasan dan pengendalian sesuai tujuan dan risiko; perbaikan dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan, kependudukan; serta pemeringkatan kesejahteraan sosial;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antarpemerintah dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah; peningkatan peran masyarakat sebagai *co-creator*; serta memaksimalkan peran masyarakat dalam mendukung program pembangunan.

Tabel 6.1.

Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
1	2	3	4
Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari			
		PDRB per Kapita	
		Angka kemiskinan	
		Rasio Gini	
	Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan		
		Pertumbuhan ekonomi	
		Inflasi	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	
		Nilai Tukar Petani	
			1. Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
			a Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
			b Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan, dan perikanan berbasis kelembagaan korporasi;
			c Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			<p>d Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis green investment, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri, pemetaan potensi sumber daya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah, penguatan sumber daya tenaga kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), meningkatkan kapasitas UMKM dalam usaha, teknologi, dan akses finansial, mendorong investasi hijau dari perusahaan penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri (PMA/PMDN) dan UMKM, mendorong persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang, peningkatan pelayanan modal di daerah, penguatan kelembagaan mendukung industri berbasis teknologi, inovasi, dan investasi hijau, menguatkan kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM berbasis sektor unggulan wilayah, serta penguatan kerja sama antardaerah dalam mendorong penanaman modal yang berkelanjutan;</p>
			<p>e Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;</p>
			<p>f Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas daerah;</p>
			<p>2. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:</p>
			<p>a Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultramikro);</p>
			<p>b Penciptaan lapangan kerja yang layak;</p>
			<p>c Peningkatan rumah layak huni dan peningkatan kualitas kawasan permukiman;</p>
			<p>d Fasilitasi sistem penyediaan air minum (SPAM) kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;</p>
			<p>e Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) dalam panti, pemenuhan secara bertahap kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, penajakan potensi kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga keterampilan untuk kemandirian PPKS, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan peran kabupaten/kota dalam penanganan PPKS di luar panti, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, serta peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan meningkatkan kapasitas petugas puskesmas dan meningkatkan konektivitas pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) dan lembaga layanan sosial;</p>

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			f Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan;
			3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah, melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
			4. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang layak;
			5. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM petani, peningkatan kapasitas usaha, peningkatan perlindungan, perluasan akses pemasaran berbasis teknologi informasi, serta mewujudkan kelembagaan petani berbasis korporasi
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif		
		Indeks Pembangunan Manusia	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	
		Indeks Pembangunan Gender	
		Indeks Pembangunan Keluarga	

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata, melalui:
			a Perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan akurat terhadap sumber daya, potensi dan permasalahan pendidikan termasuk anak tidak sekolah (ATS), pemenuhan layanan pendidikan pada wilayah blankspot terutama bagi ATS dan masyarakat miskin, perluasan cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, penyediaan layanan pendidikan yang terjangkau dengan model pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI), serta pemenuhan distribusi dan peningkatan kualitas guru, tenaga kerja kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan;
			b Penguatan koordinasi secara lintas stakeholders, optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat, penguatan tata kelola pendidikan dengan optimalisasi dana operasional dan bantuan sekolah, pengendalian penyelenggaraan pendidikan, serta peningkatan pengelolaan manajemen pendidikan terutama dalam evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
			c Peningkatan kualitas kebijakan berorientasi pada akses dan mutu pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS, masyarakat miskin, dan inklusi; peningkatan implementasi kebijakan dengan evaluasi pengendalian berkala; serta penguatan kebijakan pembangunan pendidikan yang berorientasi pada sinergi lintas sektor dan stakeholders;
			d Penguatan internalisasi pendidikan karakter dengan perluasan dan penguatan implementasi kurikulum adaptif yang diarahkan pada pembentukan karakter siswa agar mempunyai nilai kearifan lokal, sikap kritis, kreatif, inovatif, anti-bullying, anti-kekerasan, anti-diskriminasi, budaya literasi dan bugar, peduli lingkungan, etos kerja yang baik, serta mengarah pada peran serta aktif guru dan siswa dalam proses pembelajaran berorientasi pembentukan karakter;
			e Peningkatan relevansi pendidikan berorientasi pada identifikasi kesesuaian kompetensi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja, penyelesaian revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK), serta penguatan kerjasama multipihak;
			2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui:
			a Peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana sarana kesehatan, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan standar prosedur operasional;
			b Perluasan penemuan kasus, penurunan kasus tular vektor, dan pengendalian faktor risiko;
			c Peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan surveilans berbasis laboratorium;

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			d Penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana;
			e Peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan demam berdarah dengue (DBD), penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa, serta kejadian luar biasa atau krisis bencana;
			f Akselerasi dan kolaborasi layanan kesehatan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta;
			g Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan;
			3. Meningkatkan kebugaran masyarakat serta prestasi olahraga melalui peningkatan kesadaran, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar; penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang memadai dan terjangkau, termasuk ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga; serta pemetaan potensi atlet, peningkatan pembinaan dan pelatihan atlet, dan peningkatan prestasi olahraga;
			4. Meningkatkan literasi masyarakat termasuk di dalamnya literasi digital melalui peningkatan dan perluasan akses layanan literasi melalui inovasi dan kreativitas layanan; identifikasi pemanfaatan perpustakaan yang berstandar nasional; peningkatan kualitas prasarana dan sarana literasi dan kapasitas SDM; serta peningkatan promosi informasi layanan rujukan/offline maupun digital perpustakaan daerah;
			5. Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui peningkatan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
			6. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat, melalui:
			a Peningkatan ekspresi budaya berbasis nilai kearifan lokal dengan optimalisasi pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan pengembangan cagar budaya; pengayaan platform media dan pemanfaatan teknologi informasi; serta pelibatan stakeholders dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan;
			b Penguatan tata kelola kebudayaan yang diarahkan pada ketersediaan data informasi kebudayaan yang berkualitas termasuk sinergi antar pihak berbasis teknologi informasi; peningkatan kerjasama lintas sektor dan multipihak serta kualitas pengelolaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; peningkatan kapasitas lembaga dan SDM kebudayaan berorientasi karya budaya;

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			c Penguatan internalisasi nilai budaya, keagamaan, dan kearifan lokal dengan pendidikan, keluarga maupun masyarakat; asimilasi budaya dan kerja sama lintas sektor; serta pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya;
			7. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek, perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan kemandirian sasaran peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas data pilah gender dan anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
			8. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak, melalui:
			a Fasilitasi pembentukan, pemetaan layanan, dan penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten/kota;
			b Penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi;
			c Peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender;
			d Peningkatan pendidikan antikekerasan sejak usia dini;
			e Pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor;
			f Peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA);
			g Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
	Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup		
		Indeks kualitas lingkungan hidup	
		Persentase penurunan indeks risiko bencana	
			1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, melalui:
			a Peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien;
			b Penyediaan prasarana sarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST regional, SPALD-S, TPS 3R, IPAL komunal);
			c Peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara;
			d Peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat;

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			e Peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
			f Peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim;
			g Penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon;
			h Penyusunan perencanaan tata ruang serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
			2. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif, melalui:
			a Pengembangan energi berkelanjutan serta peningkatan pengembangan prasarana dan sarana energi baru dan terbarukan;
			b Perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi terutama energi baru dan terbarukan;
			c Peningkatan edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
			3. Meningkatkan ketahanan sumber daya air, melalui:
			a Pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan;
			b Peningkatan konservasi air tanah dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah serta pembangunan prasarana dan sarana konservasi air tanah;
			c Pengembangan SPAM regional;
			d Pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
			4. Menurunkan risiko bencana, melalui:
			a Penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota;
			b Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
			c Perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana;
			d Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB);
			e Peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini atau early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB);
			f Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif;

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Strategi Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			g Peningkatan kesiapan dan aktivasi klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota;
			h Pengembangan database logistik dan peralatan kabupaten/kota yang terintegrasi dengan provinsi;
			i Penyusunan kebijakan dan implementasi mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana;
			j Penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan sosial adaptif;
			k Penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi;
			l Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis		
		Indeks reformasi birokrasi	
			1. Mewujudkan birokrasi yang adaptif melalui penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi; transformasi digitalisasi pemerintahan; evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis; pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, pengembangan pola karier, peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, pemetaan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik; penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis TI; penguatan pengawasan dan pengendalian sesuai tujuan dan risiko; perbaikan dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan, kependudukan; serta pemeringkatan kesejahteraan sosial;
			2. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antarpemerintah dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah; peningkatan peran masyarakat sebagai co-creator; serta memaksimalkan peran masyarakat dalam mendukung program pembangunan.

6.2. Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 akan lebih optimal dengan didukung oleh arah kebijakan yang akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan tahunan ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahun untuk penentuan prioritas daerah setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan keberlanjutan dengan arah kebijakan pada periode sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024-2026 dijabarkan sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 menjadi tahun awal masa transisi perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJMD Tahun 2018-2023. Untuk mengarahkan pembangunan daerah Jawa Tengah di tahun 2024, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 diarahkan pada Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Prioritas pembangunan pada tahun 2024 ditujukan untuk:

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugur, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
- d. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

2. Arah Kebijakan Tahun 2025

Sebagai tahun kedua dari masa RPD ini, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter dengan prioritas pembangunan diarahkan pada:

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugur, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

3. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tahun 2026 akan menjadi tahun terakhir dalam RPD sekaligus menjadi tahun pertama periode RPJPD dan RPJMD setelah terpilihnya kepala daerah hasil pilkada serentak. Untuk itu, agar tetap dapat menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dan menjaga keberlanjutan kebijakan pembangunan antara RPD dan RPJMD periode berikutnya, dirumuskan arah

kebijakan pembangunan tahun 2026 yaitu Penguatan Perekonomian Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia, Ketahanan Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup serta Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dengan prioritas diarahkan pada:

- a. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- b. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- c. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilakukan selama tahun 2024-2026 dirumuskan dengan menggunakan instrument *cascading*. Penjabaran program prioritas pembangunan daerah sebagaimana Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3. Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari							26.782.587.536.000		22.537.882.196.000		23.807.876.285.000		73.128.346.017.000			
		Angka Kemiskinan			%	9,76-8,96		9,28-8,08		8,67-7,28		8,67-7,28				
		PDRB per Kapita			Juta Rupiah	45,82		47,60		49,68		49,68				
		Rasio Gini			Angka	0,364		0,362		0,36		0,36				
	Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup						406.604.766.000		318.583.795.000		357.405.196.000		1.082.593.757.000			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Angka	67,55		67,56		67,57		67,57				
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				183.087.726.000		142.338.598.000		166.275.591.000		491.701.915.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang		
				Indeks kinerja sistem irigasi	Angka	69,14	27.500.000.000	69,31	21.768.096.000	69,49	22.535.089.000	69,49	71.803.185.000			
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	Angka	67,35	7.599.585.000	67,39	7.599.585.000	67,43	7.669.585.000	67,43	22.868.755.000			
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	Angka	71,82	6.657.738.000	71,84	5.898.115.000	71,86	5.968.115.000	71,86	18.523.968.000			
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	Angka	62,7	7.917.146.000	62,73	7.917.146.000	62,76	7.987.146.000	62,76	23.821.438.000			
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luik Ulo	Angka	77,36	4.464.329.000	77,38	4.464.329.000	77,4	4.534.329.000	77,4	13.462.987.000			
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	Angka	62,95	4.738.658.000	63,15	4.738.658.000	63,35	4.808.658.000	63,35	14.285.974.000			
				Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	Angka	72,65	5.215.557.000	73,37	5.215.557.000	74,11	5.285.557.000	74,11	15.716.671.000			
				Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	64,79	10.734.241.000	67,68	10.947.241.000	70,58	11.447.241.000	70,58	33.128.723.000			
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	9.000.000.000			
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	2.444.996.000	100	2.444.996.000	100	2.444.996.000	100	7.334.988.000			
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	3.847.324.000	100	3.847.324.000	100	3.847.324.000	100	11.541.972.000			
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luik Ulo	%	100	1.847.037.000	100	1.847.037.000	100	1.847.037.000	100	5.541.111.000			
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	2.761.321.000	100	2.761.321.000	100	2.761.321.000	100	8.283.963.000			
				Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	3.070.395.000	100	3.070.395.000	100	3.070.395.000	100	9.211.185.000			
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	77,78	873.365.000	77,8	873.365.000	77,82	873.365.000	77,82	2.620.095.000			
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	54,55	348.909.000	63,64	360.090.000	72,73	360.090.000	72,73	1.069.089.000			
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	34,79	764.865.000	34,8	764.865.000	34,81	764.865.000	34,81	2.294.595.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	92,21	254.749.000	92,23	254.749.000	92,25	254.749.000	92,25	764.247.000	
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	52,94	831.930.000	58,82	831.930.000	64,71	831.930.000	64,71	2.495.790.000	
				Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	76,5	279.235.000	78,79	279.235.000	81,15	279.235.000	81,15	837.705.000	
				Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	%	52,4	64.792.510.000	52,44	26.802.759.000	52,48	47.552.759.000	52,48	139.148.028.000	
				Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	%	50,06	4.036.637.000	50,1	4.785.079.000	50,14	4.785.079.000	50,14	13.606.795.000	
				Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	53,28	7.444.351.000	53,32	7.444.351.000	53,36	7.444.351.000	53,36	22.333.053.000	
				Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	%	61,9	11.662.848.000	67,29	14.422.375.000	72,61	15.922.375.000	72,61	42.007.598.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				52.109.134.000		50.977.068.000		35.068.242.000		138.154.444.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
				Persentase akses air minum layak	%	92,42	4.069.634.000	93,94	1.929.568.000	95,45	1.846.342.000	95,45	7.845.544.000	
				Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	48.039.500.000	100	49.047.500.000	100	33.221.900.000	100	130.308.900.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				5.670.000.000		5.750.000.000		5.833.250.000		17.253.250.000	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
				Persentase implementasi pemanfaatan ruang	%	68	1.000.000.000	76	1.000.000.000	88	1.000.000.000	88	3.000.000.000	
				Persentase ketersediaan rencana tata ruang	%	60,71	1.970.000.000	69,29	2.050.000.000	77,67	2.050.000.000	77,67	6.070.000.000	
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100	72.097.000	100	72.097.000	100	72.250.000	100	216.444.000	
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100	96.321.000	100	96.321.000	100	96.500.000	100	289.142.000	
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100	97.638.000	100	97.638.000	100	97.750.000	100	293.026.000	
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100	72.961.000	100	72.961.000	100	73.000.000	100	218.922.000	
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100	76.171.000	100	76.171.000	100	76.250.000	100	228.592.000	
				Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100	67.200.000	100	67.200.000	100	67.500.000	100	201.900.000	
				Persentase tertib ruang	%	56	2.217.612.000	61	2.217.612.000	67	2.300.000.000	67	6.735.224.000	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		3.900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	3.900.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				11.541.270.000		10.799.000.000		11.209.000.000		33.549.270.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase kabupaten/kota yang meningkatkan kualitas udara ambiennya	%	2,85	3.095.000.000	2,85	2.190.000.000	2,85	2.400.000.000	2,85	7.685.000.000	
				Persentase pemantauan kualitas udara	%	100	994.922.000	100	1.002.000.000	100	1.002.000.000	100	2.998.922.000	
				Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	%	100	733.070.000	100	784.000.000	100	784.000.000	100	2.301.070.000	
				Persentase pengujian kualitas air	%	100	1.018.278.000	100	1.023.000.000	100	1.023.000.000	100	3.064.278.000	
				Persentase sungai yang meningkatkan kualitasnya	%	4,76	5.700.000.000	4,76	5.800.000.000	4,76	6.000.000.000	4,76	17.500.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2.560.000.000		2.550.000.000		2.730.000.000		7.840.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	2,02	1.395.000.000	2,02	1.500.000.000	2,02	1.680.000.000	6,06	4.575.000.000	
				Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	%	2,6	1.165.000.000	2,6	1.050.000.000	2,6	1.050.000.000	7,8	3.265.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				300.000.000		300.000.000		350.000.000		950.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase limbah B3 yang terkelola	%	80	300.000.000	80	300.000.000	80	350.000.000	80	950.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				1.310.000.000		1.450.000.000		1.550.000.000		4.310.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase ketataan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	50	450.000.000	50	450.000.000	50	450.000.000	50	1.350.000.000	
				Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	100	860.000.000	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	2.960.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				5.076.833.000		5.450.000.000		5.650.000.000		16.176.833.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	%	34,29	3.000.000.000	40	3.100.000.000	45,71	3.200.000.000	45,71	9.300.000.000	
				Persentase lembaga/keompok yang ditingkatkan kapasitasnya	%	25	420.213.000	25	400.000.000	25	400.000.000	25	1.220.213.000	
				Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkatkan kepeduliannya	%	10,5	1.656.620.000	11	1.950.000.000	11,5	2.050.000.000	11,5	5.656.620.000	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.200.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.200.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				40.000.000.000		5.373.832.000		17.000.000.000		62.373.832.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase sampah yang tertangani	%	60	40.000.000.000	60	5.373.832.000	60	17.000.000.000	60	62.373.832.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				3.597.700.000		2.957.700.000		4.395.400.000		10.950.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	5	1.285.200.000	5	1.285.200.000	5	1.285.200.000	5	3.855.600.000	
				Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	3,7	941.900.000	4	621.900.000	4,5	1.271.900.000	4,5	2.835.700.000	
				Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	1,39	438.000.000	2,93	438.000.000	4,61	895.500.000	4,61	1.771.500.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	3,7	932.600.000	7,8	612.600.000	12,3	942.800.000	12,3	2.488.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	%	44,44	75.000.000	50	75.000.000	55,55	75.000.000	55,55	225.000.000	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.541.858.000		3.541.858.000		3.541.858.000		10.625.574.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	61	226.000.000	61	226.000.000	61	226.000.000	61	678.000.000	
				Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	61	130.262.000	61	130.262.000	61	130.262.000	61	390.786.000	
				Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	61	230.000.000	61	230.000.000	61	230.000.000	61	690.000.000	
				Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%	70	1.339.045.000	70	1.339.045.000	70	1.339.045.000	70	4.017.135.000	
				Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	%	2	465.900.000	2	465.900.000	2	465.900.000	2	1.397.700.000	
				Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	%	2	680.651.000	2	680.651.000	2	680.651.000	2	2.041.953.000	
				Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	%	2	470.000.000	2	470.000.000	2	470.000.000	2	1.410.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				35.789.684.000		31.393.000.000		44.250.029.000		111.432.713.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase lahan kritis tertangani	%	0,81	180.000.000	0,81	150.000.000	0,81	150.000.000	2,43	480.000.000	
				Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	%	0,05	1.946.027.000	0,05	1.810.000.000	0,05	2.910.000.000	0,15	6.666.027.000	
				Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	%	0,03	2.133.200.000	0,03	1.850.000.000	0,03	2.550.000.000	0,09	6.533.200.000	
				Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	%	0,07	1.900.000.000	0,07	1.570.000.000	0,07	2.377.029.000	0,21	5.847.029.000	
				Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	%	0,05	2.379.888.000	0,05	1.885.000.000	0,05	2.915.000.000	0,15	7.179.888.000	
				Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	%	0,05	2.295.000.000	0,05	1.925.000.000	0,05	2.925.000.000	0,15	7.145.000.000	
				Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	%	0,05	1.850.000.000	0,05	1.910.000.000	0,05	3.070.000.000	0,05	6.830.000.000	
				Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	%	0,08	2.525.000.000	0,08	2.210.000.000	0,08	2.870.000.000	0,24	7.605.000.000	
				Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	%	0,13	2.415.800.000	0,13	2.180.000.000	0,13	3.680.000.000	0,39	8.275.800.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	%	0,18	2.595.000.000	0,18	2.020.000.000	0,18	3.430.000.000	0,54	8.045.000.000	
				Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	%	0,04	2.401.666.000	0,04	1.850.000.000	0,04	3.620.000.000	0,12	7.871.666.000	
				Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	%	0,09	2.009.560.000	0,09	1.730.000.000	0,09	3.230.000.000	0,27	6.969.560.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.200.000.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 1	%	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	360.000.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 10	%	100	80.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	230.000.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 11	%	100	38.160.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	138.160.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 2	%	100	36.352.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	86.352.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 3	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 4	%	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	240.000.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 5	%	100	60.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	190.000.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 6	%	100	130.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	330.000.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (Gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 7	%	100	95.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	295.000.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 8	%	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	225.000.000	
				Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK 9	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	
				Persentase peningkatan produksi bibit	%	15	2.892.448.000	30	3.208.000.000	45	3.408.000.000	45	9.508.448.000	
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	35,4	2.030.000.000	45,99	1.495.000.000	56,58	1.495.000.000	56,58	5.020.000.000	
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 1	%	1,38	690.000.000	1,81	700.000.000	2,24	700.000.000	2,24	2.090.000.000	
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 10	%	1,03	330.000.000	1,29	330.000.000	1,55	330.000.000	1,55	990.000.000	
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 11	%	1,29	533.000.000	1,81	480.000.000	2,33	480.000.000	2,33	1.493.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 2	%	1,72	1.077.028.000	2,58	550.000.000	3,45	550.000.000	3,45	2.177.028.000	
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 3	%	1,64	490.000.000	2,41	340.000.000	3,19	340.000.000	3,19	1.170.000.000	
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 4	%	1,46	292.600.000	2,07	285.000.000	2,67	285.000.000	2,67	862.600.000	
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 5	%	1,29	299.000.000	1,64	370.000.000	1,98	370.000.000	1,98	1.039.000.000	
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 6	%	2,15	305.000.000	3,36	380.000.000	4,57	380.000.000	4,57	1.065.000.000	
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 7	%	1,55	400.000.000	2,15	385.000.000	2,76	385.000.000	2,76	1.170.000.000	
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 8	%	1,03	200.000.000	1,29	200.000.000	1,55	200.000.000	1,55	600.000.000	
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	%	1,46	354.955.000	2,07	350.000.000	2,67	350.000.000	2,67	1.054.955.000	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				4.986.265.000		4.029.000.000		4.049.000.000		13.064.265.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	Angka	70	2.057.000.000	71	1.575.000.000	72	1.575.000.000	72	5.207.000.000	
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	10	140.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000	30	360.000.000	
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 1	%	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	180.000.000	
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 10	%	5	58.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	458.000.000	
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 11	%	5	80.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	230.000.000	
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 2	%	5	36.260.000	5	38.000.000	5	38.000.000	5	112.260.000	
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 3	%	5	120.000.000	5	120.000.000	5	120.000.000	5	360.000.000	
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 4	%	5	80.000.000	5	80.000.000	5	80.000.000	5	240.000.000	
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 5	%	5	40.000.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	170.000.000	
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 6	%	5	140.000.000	5	140.000.000	5	140.000.000	5	420.000.000	
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 7	%	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	150.000.000	
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 8	%	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	75.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani di wilayah CDK 9	%	5	216.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	616.000.000	
				Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	40	900.000.000	60	160.000.000	80	160.000.000	80	1.220.000.000	
				Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 1	%	100	36.300.000	100	36.000.000	100	36.000.000	100	108.300.000	
				Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 10	%	100	-	100	60.000.000	100	60.000.000	100	120.000.000	
				Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 2	%	100	43.700.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	143.700.000	
				Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 3	%	100	150.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	550.000.000	
				Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 4	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000	
				Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 5	%	100	47.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	177.000.000	
				Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 6	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	
				Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 8	%	100	22.125.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	82.125.000	
				Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif di wilayah CDK 9	%	100	64.880.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	224.880.000	
				Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	%	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	960.000.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				11.056.730.000		11.200.000.000		11.205.000.000		33.461.730.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2,5	920.000.000	2,5	920.000.000	2,5	920.000.000	7,5	2.760.000.000	
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	%	0,3	949.000.000	0,3	1.050.000.000	0,3	1.060.000.000	0,9	3.059.000.000	
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	%	0,2	641.200.000	0,2	620.000.000	0,2	620.000.000	0,2	1.881.200.000	
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	%	0,2	401.000.000	0,2	305.000.000	0,2	305.000.000	0,6	1.011.000.000	
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	%	0,2	645.330.000	0,2	1.020.000.000	0,2	1.020.000.000	0,6	2.685.330.000	
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	%	0,2	1.080.000.000	0,2	1.090.000.000	0,2	1.090.000.000	0,6	3.260.000.000	
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	%	0,2	1.680.000.000	0,2	1.480.000.000	0,2	1.480.000.000	0,2	4.640.000.000	
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	%	0,3	1.383.000.000	0,3	1.430.000.000	0,3	1.430.000.000	0,9	4.243.000.000	
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	%	0,2	780.000.000	0,2	720.000.000	0,2	720.000.000	0,6	2.220.000.000	
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	%	0,3	1.020.000.000	0,3	1.070.000.000	0,3	1.070.000.000	0,9	3.160.000.000	
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	%	0,2	860.000.000	0,2	810.000.000	0,2	810.000.000	0,6	2.480.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	%	0,2	697.200.000	0,2	685.000.000	0,2	680.000.000	0,6	2.062.200.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				1.150.000.000		1.130.000.000		1.130.000.000		3.410.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	1.150.000.000	10	1.130.000.000	10	1.130.000.000	10	3.410.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				6.167.581.000		5.574.474.000		6.362.320.000		18.104.375.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase pelayanan pengujian air tanah	%	100	914.900.000	100	865.400.000	100	950.900.000	100	2.731.200.000	
				Persentase pengambilan air tanah	%	27,5	3.159.811.000	27,6	2.774.904.000	27,8	3.095.000.000	27,8	9.029.715.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	3,4	103.845.000	3,5	283.845.000	3,6	103.845.000	3,6	491.535.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2,4	54.400.000	2,5	235.900.000	2,6	57.400.000	2,6	347.700.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2,8	108.790.000	2,9	109.290.000	2,95	109.790.000	2,95	327.870.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	2,9	155.500.000	3	157.500.000	3,1	353.000.000	3,1	666.000.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	2,2	252.845.000	2,3	72.845.000	2,4	72.845.000	2,4	398.535.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1,6	78.870.000	1,7	78.870.000	1,8	78.870.000	1,8	236.610.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1,7	179.945.000	1,9	367.445.000	1,95	194.945.000	1,95	742.335.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	1,6	274.500.000	1,7	94.500.000	1,8	94.500.000	1,8	463.500.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2,7	477.565.000	2,8	117.565.000	2,9	477.565.000	2,9	1.072.695.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	4,1	233.290.000	4,2	240.790.000	4,3	420.790.000	4,3	894.870.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	1,6	93.250.000	1,7	95.550.000	1,8	272.800.000	1,8	461.600.000	
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,8	80.070.000	1,9	80.070.000	1,95	80.070.000	1,95	240.210.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				16.853.835.000		12.768.835.000		15.989.835.000		45.612.505.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	851.783,31	2.373.530.000	787.978,76	2.193.530.000	1.204.943,90	2.203.530.000	2.844.705,97	6.770.590.000	
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	78.666,36	496.000.000	78.666,36	456.000.000	78.666,36	456.000.000	235.999,08	1.408.000.000	
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	157.240,97	1.222.645.000	78.758,11	932.645.000	157.271,55	1.242.645.000	393.270,63	3.397.935.000	
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	275,25	688.145.000	275,25	688.145.000	78.788,69	1.048.145.000	79.339,19	2.424.435.000	
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	SBM	12.273,90	1.011.145.000	157.011,59	731.145.000	12.316,78	1.135.645.000	181.602,27	2.877.935.000	
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	275,25	670.500.000	330,40	1.070.500.000	78.758,11	960.500.000	79.363,76	2.701.500.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	39.333,18	517.000.000	39.333,18	426.000.000	51.576,50	1.430.500.000	130.242,86	2.373.500.000	
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	130.273,45	3.666.145.000	118.030,12	1.211.645.000	157.271,55	1.361.645.000	405.575,12	6.239.435.000	
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	SBM	78.666,36	773.645.000	39.394,34	544.645.000	78.666,36	764.645.000	196.727,06	2.082.935.000	
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	157.063,58	769.145.000	157.063,58	753.645.000	235.546,45	1.043.645.000	549.673,61	2.566.435.000	
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	78.666,36	754.645.000	122,33	315.645.000	157.088,05	895.645.000	235.876,74	1.965.935.000	
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	379,28	1.089.645.000	78.834,57	1.177.645.000	118.076,00	1.329.645.000	197.289,85	3.596.935.000	
				Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	SBM	118.669,37	2.821.645.000	40.158,93	2.267.645.000	917,50	2.117.645.000	159.745,80	7.206.935.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				12.216.150.000		11.610.430.000		11.325.671.000		35.152.251.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2)	%	63,81	2.638.650.000	68,81	3.570.490.000	73,77	2.706.640.000	73,77	8.915.780.000	
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	%	51,09	570.620.000	51,88	406.020.000	52,68	421.020.000	52,68	1.397.660.000	
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	%	49,66	1.147.430.000	49,98	1.124.930.000	50,3	1.225.080.000	50,3	3.497.440.000	
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	%	49,64	1.113.025.000	49,96	1.031.715.000	50,26	1.140.616.000	50,26	3.285.356.000	
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	%	51,86	468.090.000	52,92	453.090.000	53,98	475.590.000	53,98	1.396.770.000	
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	%	49,36	891.575.000	49,57	664.325.000	49,79	819.625.000	49,79	2.375.525.000	
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	%	49,08	816.725.000	49,21	644.625.000	49,35	667.125.000	49,35	2.128.475.000	
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	%	49,97	632.480.000	50,4	526.780.000	50,81	471.780.000	50,81	1.631.040.000	
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	%	49,57	815.335.000	49,87	807.835.000	50,15	815.335.000	50,15	2.438.505.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	%	49,59	899.565.000	49,88	634.815.000	50,18	706.905.000	50,18	2.241.285.000			
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	%	49,96	1.061.150.000	50,37	803.900.000	50,78	904.050.000	50,78	2.769.100.000			
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	%	49,7	581.625.000	50,03	417.025.000	50,35	432.025.000	50,35	1.430.675.000			
				Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	%	49,95	579.880.000	50,36	524.880.000	50,77	539.880.000	50,77	1.644.640.000			
		Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana			%	4,00		4,00		4,00		4,00				
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				7.815.000.000		7.615.000.000		7.715.000.000		23.145.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Persentase kabupaten/kota yang mengaktifasi klaster logistik	%	5,71	1.650.000.000	11,43	1.550.000.000	17,14	1.650.000.000	17,14	4.850.000.000			
				Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	%	5	550.000.000	10	475.000.000	15	550.000.000	15	1.575.000.000			
				Persentase penanganan darurat bencana	%	100	600.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	1.700.000.000			
				Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0,12	5.015.000.000	0,12	5.090.000.000	0,12	4.915.000.000	0,12	15.020.000.000			
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif						3.879.672.245.000		3.765.738.448.000		3.887.861.827.000		11.533.272.520.000			
		Indeks Pembangunan Gender			Angka	93,03		93,13		93,23		93,23				
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				2.370.000.000		2.370.000.000		2.370.000.000		7.110.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
				Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	%	60	2.370.000.000	65	2.370.000.000	70	2.370.000.000	70	7.110.000.000			
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				125.000.000		125.000.000		125.000.000		375.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
				Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	14,29	125.000.000	20	125.000.000	25,71	125.000.000	25,71	375.000.000			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				-		-		-		-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
				Persentase keterisian indikator oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) provinsi	%	25	-	30	-	35	-	35	-			
		Indeks Pembangunan Kebudayaan			Angka	57,56		57,91		58,17		58,17				
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				41.870.000.000		43.670.000.000		45.960.000.000		131.500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	Orang	50	14.450.000.000	75	14.325.000.000	100	14.500.000.000	100	43.275.000.000	
				Jumlah wirusaha muda mandiri	Orang	10	27.420.000.000	10	29.345.000.000	10	31.460.000.000	30	88.225.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				9.050.000.000		7.950.000.000		9.250.000.000		26.250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	%	47,61	2.400.000.000	52,38	2.000.000.000	57,14	2.600.000.000	57,14	7.000.000.000	
				Persentase cakupan pelestarian seni	%	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	2.750.000.000	100	8.250.000.000	
				Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	%	19,17	1.400.000.000	20,78	1.200.000.000	22,39	1.400.000.000	22,39	4.000.000.000	
				Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	%	23,76	2.500.000.000	26,16	2.000.000.000	28,55	2.500.000.000	28,55	7.000.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				12.000.000.000		10.000.000.000		12.100.000.000		34.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat partisipasi seni tradisi	%	8,89	12.000.000.000	11,1	10.000.000.000	13,31	12.100.000.000	13,31	34.100.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				675.000.000		525.000.000		675.000.000		1.875.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase akses literasi sejarah	%	52,9	675.000.000	53,1	525.000.000	63,13	675.000.000	63,13	1.875.000.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1.085.000.000		1.065.000.000		1.135.000.000		3.285.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase cagar budaya berperingkat nasional	%	12,71	190.000.000	13,15	170.000.000	13,59	190.000.000	13,59	550.000.000	
				Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	%	25,13	895.000.000	26,73	895.000.000	28,34	945.000.000	28,34	2.735.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				2.850.000.000		2.850.000.000		2.850.000.000		8.550.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Nilai survey kepuasan pengunjung museum	%	89,85	2.850.000.000	89,9	2.850.000.000	90	2.850.000.000	90	8.550.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				8.233.500.000		2.246.500.000		2.693.500.000		13.173.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	80	7.243.500.000	80	1.241.500.000	80	1.558.500.000	80	10.043.500.000	
				Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	%	80,56	660.000.000	88,89	660.000.000	100	775.000.000	100	2.095.000.000	
				Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	%	23,08	330.000.000	61,54	345.000.000	100	360.000.000	100	1.035.000.000	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				365.804.000		390.804.000		420.304.000		1.176.912.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	%	84,67	365.804.000	92,25	390.804.000	100	420.304.000	100	1.176.912.000	
		Indeks Pembangunan Keluarga			Angka	58,20		58,50		59,00		59,00		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.485.000.000		1.485.000.000		1.485.000.000		4.455.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	%	11	1.055.000.000	22	1.055.000.000	50	1.055.000.000	50	3.165.000.000	
				Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan perempuan secara berjejaring	%	11	-	22	-	50	-	50	-	
				Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	430.000.000	100	430.000.000	100	430.000.000	100	1.290.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				250.000.000		250.000.000		250.000.000		750.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	%	14,29	250.000.000	20	250.000.000	25,71	250.000.000	25,71	750.000.000	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				600.000.000		600.000.000		600.000.000		1.800.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	%	77,14	600.000.000	82,86	600.000.000	88,57	600.000.000	88,57	1.800.000.000	
				Persentase keterisian indikator Kabupaten/kota Layak Anak (KLA)	%	100	-	100	-	100	-	100	-	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				670.000.000		670.000.000		670.000.000		2.010.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase kabupaten/kota yang sudah melaksanakan pendataan kekerasan anak secara berjejaring	%	0	-	0	-	0	-	0	-	
				Persentase korban kekerasan anak terlayani	%	100	310.000.000	100	310.000.000	100	310.000.000	100	930.000.000	
				Rasio korban kekerasan terhadap anak per 100.000 penduduk		11,9	360.000.000	11,8	360.000.000	11,7	360.000.000	11,7	1.080.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				430.000.000		430.000.000		430.000.000		1.290.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase kabupaten/kota dalam pendataan angka pemakaian kontrasepsi (CPR)	%	51	-	57	-	62	-	62	-	
				Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	%	51	430.000.000	57	430.000.000	62	430.000.000	62	1.290.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				1.180.000.000		1.180.000.000		1.180.000.000		3.540.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	%	65,58	1.100.000.000	65,99	1.100.000.000	66,4	1.100.000.000	66,4	3.300.000.000	
				Unmetneed	%	10	80.000.000	9,9	80.000.000	9,8	80.000.000	9,8	240.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				500.000.000		500.000.000		500.000.000		1.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	32	500.000.000	34	500.000.000	36	500.000.000	36	1.500.000.000	
		Indeks Pembangunan Manusia			Angka	73,43		73,99		74,55		74,55		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				2.919.770.430.000		2.902.685.430.000		2.925.489.800.000		8.747.945.660.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	%	90,54	620.000.000	90,9	420.000.000	91,11	1.020.000.000	91,11	2.060.000.000	
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	%	76,59	1.000.000.000	76,84	700.000.000	76,97	1.200.000.000	76,97	2.900.000.000	
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	%	75,57	500.000.000	76,06	500.000.000	76,44	800.000.000	76,44	1.800.000.000	
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	%	25,69	638.383.000	25,85	638.383.000	26	1.588.383.000	26	2.865.149.000	
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	%	54,59	1.000.000.000	54,6	1.000.000.000	54,62	1.200.000.000	54,62	3.200.000.000	
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	%	93,71	700.000.000	94,23	700.000.000	94,64	1.294.370.000	94,64	2.694.370.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	%	79,86	650.000.000	80,17	650.000.000	80,52	650.000.000	80,52	1.950.000.000	
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	%	72,83	700.000.000	72,84	700.000.000	72,85	700.000.000	72,85	2.100.000.000	
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	%	77,11	600.000.000	77,25	600.000.000	77,46	800.000.000	77,46	2.000.000.000	
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	%	77,81	890.000.000	78,06	890.000.000	78,22	890.000.000	78,22	2.670.000.000	
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	%	87,73	500.000.000	88,14	500.000.000	88,46	1.200.000.000	88,46	2.200.000.000	
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	%	81	575.000.000	81,4	575.000.000	81,7	875.000.000	81,7	2.025.000.000	
				APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	%	88,25	400.000.000	88,26	400.000.000	88,27	700.000.000	88,27	1.500.000.000	
				Persentase angka putus sekolah SLB	%	3,53	2.337.500.000	3,2	2.337.500.000	2,85	2.337.500.000	2,85	7.012.500.000	
				Persentase angka putus sekolah SMA	%	2,3	10.947.000.000	2,28	10.947.000.000	2,25	10.947.000.000	2,25	32.841.000.000	
				Persentase angka putus sekolah SMK	%	0,026	14.537.950.000	0,024	14.537.950.000	0,021	14.537.950.000	0,021	43.613.850.000	
				Persentase cakupan distribusi sarpas pendidikan SLB	%	10,53	6.212.641.000	13,16	6.212.641.000	14,47	6.212.641.000	14,47	18.637.923.000	
				Persentase cakupan distribusi sarpas pendidikan SMA	%	65	75.557.584.000	75	75.557.584.000	85	76.057.584.000	85	227.172.752.000	
				Persentase cakupan distribusi sarpas pendidikan SMK	%	60	135.357.436.000	65	135.357.436.000	70	135.657.436.000	70	406.372.308.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	%	68,18	1.500.000.000	68,18	750.000.000	68,18	1.000.000.000	68,18	3.250.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	%	50	4.520.000.000	56	3.270.000.000	58	4.020.000.000	58	11.810.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	1,67	275.000.000	1,7	200.000.000	1,75	275.000.000	1,75	750.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	1	275.000.000	1	190.000.000	1	275.000.000	1	740.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	2,87	275.000.000	2,89	160.000.000	2,9	275.000.000	2,9	710.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	1,25	275.000.000	1,5	200.000.000	1,75	275.000.000	1,75	750.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	3,22	275.000.000	3,24	190.000.000	3,26	275.000.000	3,26	740.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	1,92	275.000.000	1,93	170.000.000	1,94	275.000.000	1,94	720.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	90	275.000.000	93	190.000.000	95	275.000.000	95	740.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	2,74	275.000.000	2,75	180.000.000	2,76	275.000.000	2,76	730.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	2,2	275.000.000	2,3	190.000.000	2,4	275.000.000	2,4	740.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	28,57	275.000.000	32,14	190.000.000	35,71	275.000.000	35,71	740.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	3,63	275.000.000	4,84	190.000.000	5,6	275.000.000	5,6	740.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	1,96	275.000.000	2,08	190.000.000	2,24	275.000.000	2,24	740.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	2,52	275.000.000	2,53	190.000.000	2,54	275.000.000	2,54	740.000.000	
				Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	%	57,35	2.000.000.000	58,82	1.500.000.000	60,29	1.750.000.000	60,29	5.250.000.000	
				Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	%	10	1.000.000.000	20	750.000.000	40	1.200.000.000	40	2.950.000.000	
				Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	%	80,3	4.000.000.000	84,1	2.400.000.000	88	4.400.000.000	88	10.800.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	%	0,9	56.499.633.000	0,95	56.499.633.000	1	56.499.633.000	1	169.498.899.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	%	40,11	31.751.600.000	40,41	31.651.600.000	40,71	31.851.600.000	40,71	95.254.800.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	%	69,8	45.127.850.000	69,9	45.027.850.000	70	45.227.850.000	70	135.383.550.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	%	69,8	32.432.350.000	71,25	32.232.350.000	71,85	32.632.350.000	71,85	97.297.050.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	%	79	73.848.400.000	79,2	73.548.400.000	79,3	74.148.400.000	79,3	221.545.200.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	%	78,7	45.939.700.000	78,9	45.839.700.000	79	46.039.700.000	79	137.819.100.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	%	90	50.638.700.000	93	50.238.700.000	95	50.838.700.000	95	151.716.100.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	%	85,55	31.691.200.000	85,6	31.691.200.000	85,75	31.691.200.000	85,75	95.073.600.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	%	76,12	41.943.250.000	76,13	41.843.250.000	76,14	42.043.250.000	76,14	125.829.750.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	%	84,74	51.984.950.000	85,17	51.784.950.000	85,59	52.184.950.000	85,59	155.954.850.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	%	44,94	31.210.650.000	48,73	31.110.650.000	52,53	31.310.650.000	52,53	93.631.950.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	%	80	54.520.500.000	83	54.420.500.000	85	54.620.500.000	85	163.561.500.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	%	79	32.273.300.000	79,5	32.273.300.000	79,9	32.273.300.000	79,9	96.819.900.000	
				Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	%	10	550.000.000	20	550.000.000	35	1.200.000.000	35	2.300.000.000	
				Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	10	80.150.867.000	10	77.510.867.000	10	80.150.867.000	10	237.812.601.000	
				Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	67,78	671.483.408.000	67,8	671.183.408.000	67,85	674.283.408.000	67,85	2.016.950.224.000	
				Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	%	50,35	1.288.263.721.000	53,49	1.287.613.721.000	56,64	1.292.538.721.000	56,64	3.868.416.163.000	
				Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	Angka	10	6.421.707.000	15	3.921.707.000	20	3.921.707.000	20	14.265.121.000	
				Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	Angka	36	15.260.850.000	36,86	10.960.850.000	38,85	10.960.850.000	38,85	37.182.550.000	
				Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	Angka	0,55	7.459.300.000	0,6	8.459.300.000	0,65	6.459.300.000	0,65	22.377.900.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				845.000.000		845.000.000		845.000.000		2.535.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	Angka	89,06	65.000.000	89,56	65.000.000	90,06	65.000.000	90,06	195.000.000	
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	Angka	81,22	65.000.000	81,72	65.000.000	82,22	65.000.000	82,22	195.000.000	
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	Angka	83,27	65.000.000	83,77	65.000.000	84,27	65.000.000	84,27	195.000.000	
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	Angka	81,77	65.000.000	82,27	65.000.000	82,77	65.000.000	82,77	195.000.000	
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	Angka	85,85	65.000.000	86,35	65.000.000	86,85	65.000.000	86,85	195.000.000	
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	Angka	88,34	65.000.000	88,84	65.000.000	89,34	65.000.000	89,34	195.000.000	
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	Angka	86,49	65.000.000	86,99	65.000.000	87,49	65.000.000	87,49	195.000.000	
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	Angka	88,83	65.000.000	89,33	65.000.000	89,83	65.000.000	89,83	195.000.000	
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	Angka	89,03	65.000.000	89,53	65.000.000	90,03	65.000.000	90,03	195.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
				Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	Angka	82,21	65.000.000	82,71	65.000.000	83,21	65.000.000	83,21	195.000.000			
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	Angka	83,27	65.000.000	83,77	65.000.000	84,27	65.000.000	84,27	195.000.000			
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	Angka	85,3	65.000.000	85,8	65.000.000	86,3	65.000.000	86,3	195.000.000			
				Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	Angka	86,06	65.000.000	86,56	65.000.000	87,06	65.000.000	87,06	195.000.000			
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				2.000.000.000		1.500.000.000		2.200.000.000		5.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	%	76,2	2.000.000.000	78,2	1.500.000.000	80,2	2.200.000.000	80,2	5.700.000.000			
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				900.000.000		900.000.000		900.000.000		2.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000			
				Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	%	15	100.000.000	16	100.000.000	17	100.000.000	17	300.000.000			
				Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	%	93,93	100.000.000	94,29	100.000.000	94,59	100.000.000	94,59	300.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	%	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	%	10	50.000.000	15	50.000.000	20	50.000.000	20	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	%	25	50.000.000	50	50.000.000	75	50.000.000	75	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	%	20	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	%	25	50.000.000	35	50.000.000	50	50.000.000	50	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	%	4,76	50.000.000	4,76	50.000.000	9,52	50.000.000	9,52	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000			
				Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	%	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				511.639.311.000		513.505.714.000		524.459.115.000		1.549.604.140.000	Dinas Kesehatan; RSUD/RSJD		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	66,6	434.651.818.000	68,5	434.683.958.000	70,4	435.075.798.000	70,4	1.304.411.574.000	
				Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	%	63,9	1.100.000.000	74,3	1.100.000.000	85,7	1.500.000.000	85,7	3.700.000.000	
				Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	%	63,9	850.000.000	74,3	850.000.000	85,7	1.200.000.000	85,7	2.900.000.000	
				Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	34,28	1.700.000.000	40	1.400.000.000	48,57	1.800.000.000	48,57	4.900.000.000	
				Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	%	51,42	6.350.000.000	57,14	3.550.496.000	62,85	6.633.656.000	62,85	16.534.152.000	
				Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	28,57	300.000.000	42,85	200.000.000	57,14	300.000.000	57,14	800.000.000	
				Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	28,57	200.000.000	42,86	100.000.000	57,14	200.000.000	57,14	500.000.000	
				Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42,85	200.000.000	57,14	200.000.000	71,42	200.000.000	71,42	600.000.000	
				Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	28,57	50.000.000	42,86	50.000.000	57,14	50.000.000	57,14	150.000.000	
				Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	%	42,85	200.000.000	57,14	175.000.000	71,42	175.000.000	71,42	550.000.000	
				Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	%	60	150.000.000	74,28	125.000.000	80	200.000.000	80	475.000.000	
				Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	80	1.300.000.000	85	800.000.000	90	800.000.000	90	2.900.000.000	
				Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	%	71,42	550.000.000	85,71	400.000.000	100	600.000.000	100	1.550.000.000	
				Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	%	28,57	305.000.000	42,86	200.000.000	57,14	280.000.000	57,14	785.000.000	
				Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	%	57,14	550.000.000	71,42	550.000.000	85,71	550.000.000	85,71	1.650.000.000	
				Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	%	28,57	450.000.000	42,86	300.000.000	57,14	375.000.000	57,14	1.125.000.000	
				Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	%	57,14	430.000.000	71,42	370.000.000	85,71	370.000.000	85,71	1.170.000.000	
				Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	%	100	2.302.000.000	100	1.750.000.000	100	2.200.000.000	100	6.252.000.000	
				Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	%	100	2.350.000.000	100	1.690.000.000	100	2.325.000.000	100	6.365.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	%	100	1.780.000.000	100	1.630.000.000	100	1.630.000.000	100	5.040.000.000	
				Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	%	100	2.780.000.000	100	1.725.000.000	100	2.725.000.000	100	7.230.000.000	
				Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	%	100	1.342.200.000	100	1.077.000.000	100	1.077.000.000	100	3.496.200.000	
				Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	%	80	345.000.000	85	345.000.000	90	345.000.000	90	1.035.000.000	
				Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	%	83	4.277.000.000	100	3.677.000.000	100	4.277.000.000	100	12.231.000.000	
				Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	%	80	750.000.000	85	750.000.000	100	750.000.000	100	2.250.000.000	
				Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	5.721.656.000	100	5.730.656.000	100	941.656.000	100	12.393.968.000	
				Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	205.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	415.000.000	
				Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	%	95	110.000.000	95	110.000.000	95	110.000.000	95	330.000.000	
				Persentase pemenuhan fasilitas layanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	%	100	14.763.444.000	100	15.433.604.000	100	15.453.644.000	100	45.650.692.000	
				Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Sockarjo	%	100	368.061.000	100	80.000.000	100	278.061.000	100	726.122.000	
				Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	480.000.000	100	480.000.000	100	480.000.000	100	1.440.000.000	
				Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	%	100	470.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	1.470.000.000	
				Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	1.940.000.000	100	1.840.000.000	100	3.260.000.000	100	7.040.000.000	
				Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	5.235.000.000	100	3.835.000.000	100	6.335.000.000	100	15.405.000.000	
				Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	%	95	4.560.000.000	95	7.193.000.000	95	10.717.300.000	95	22.470.300.000	
				Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi	%	100	2.510.000.000	100	3.010.000.000	100	3.010.000.000	100	8.530.000.000	
				Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	%	100	5.400.000.000	100	4.750.000.000	100	4.750.000.000	100	14.900.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	%	100	3.330.972.000	100	11.490.000.000	100	11.480.000.000	100	26.300.972.000	
				Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	1.282.160.000	100	1.250.000.000	100	1.400.000.000	100	3.932.160.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				127.490.000.000		127.180.000.000		177.580.000.000		432.250.000.000	Dinas Kesehatan; RSUD/RSJD
				Persentase capaian SDM kesehatan yang terlatih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	20	200.000.000	20	40.000.000	40	40.000.000	80	280.000.000	
				Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	80	800.000.000	85	800.000.000	85	800.000.000	85	2.400.000.000	
				Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih RSUD Dr. Moewardi	%	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	90	600.000.000	
				Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	20	35.000.000	20	35.000.000	30	35.000.000	70	105.000.000	
				Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	30	405.000.000	35	405.000.000	35	405.000.000	100	1.215.000.000	
				Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Surakarta	%	35	750.000.000	35	600.000.000	30	500.000.000	100	1.850.000.000	
				Persentase SDM kesehatan yang terlatih RS Khusus Mata	%	20	122.500.000.000	20	122.500.000.000	20	172.500.000.000	60	417.500.000.000	
				Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo	%	30	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	100	300.000.000	
				Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Tugurejo	%	33	1.000.000.000	33	1.000.000.000	34	1.000.000.000	100	3.000.000.000	
				Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bupelkes Provinsi	%	98	1.500.000.000	98	1.500.000.000	99	2.000.000.000	99	5.000.000.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				700.000.000		700.000.000		700.000.000		2.100.000.000	Dinas Kesehatan
				Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%	75	700.000.000	80	700.000.000	85	700.000.000	85	2.100.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.440.000.000		4.665.000.000		5.310.000.000		15.415.000.000	Dinas Kesehatan; RSUD/RSJD
				Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	15.000.000	
				Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	245.000.000	100	645.000.000	
				Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Surakarta	%	95	300.000.000	95	250.000.000	95	300.000.000	95	850.000.000	
				Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	
				Persentase capaian kegiatan promosi di tingkat provinsi RSJD Surakarta	%	95	200.000.000	95	150.000.000	95	200.000.000	95	550.000.000	
				Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	%	82,85	1.400.000.000	85,71	1.200.000.000	88,57	1.400.000.000	88,57	4.000.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RS Khusus Mata	%	50	1.100.000.000	60	1.100.000.000	75	1.100.000.000	75	3.300.000.000	
				Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Dr. Moewardi	%	90	100.000.000	92	100.000.000	95	100.000.000	95	300.000.000	
				Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	%	100	230.000.000	100	240.000.000	100	250.000.000	100	720.000.000	
				Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Sockarjo	%	100	200.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	280.000.000	
				Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28,57	250.000.000	42,85	150.000.000	57,14	250.000.000	57,14	650.000.000	
				Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28,57	300.000.000	42,86	160.000.000	57,14	250.000.000	57,14	710.000.000	
				Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42,85	375.000.000	57,14	400.000.000	71,42	425.000.000	71,42	1.200.000.000	
				Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	28,57	300.000.000	42,86	200.000.000	57,14	275.000.000	57,14	775.000.000	
				Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	%	42,85	80.000.000	57,14	70.000.000	71,42	70.000.000	71,42	220.000.000	
				Persentase ketercapaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Tugurejo	%	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				227.148.200.000		137.450.000.000		167.684.108.000		532.282.308.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPOP) yang berprestasi	Orang	100	49.088.200.000	105	23.000.000.000	110	47.086.170.000	315	119.174.370.000	
				Jumlah masyarakat yang bugar	Orang	960	3.300.000.000	1050	2.750.000.000	1155	2.602.000.000	3165	8.652.000.000	
				Persentase peningkatan perolehan medali	%	28,18	174.760.000.000	31,25	111.700.000.000	34,5	117.995.938.000	34,5	404.455.938.000	
	Meningkatnya perekonomian Tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan						11.518.163.571.000		7.865.765.222.000		8.450.704.715.000		27.834.633.508.000	
		Inflasi			%	3,0 ± 1		3,0 ± 1		3,0 ± 1		3,0 ± 1		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				9.850.000.000		7.480.000.000		9.175.000.000		26.505.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	60	4.350.000.000	55	3.580.000.000	70	4.600.000.000	70	12.530.000.000	
				Rasio cadangan pangan masyarakat	Angka	0,62	350.000.000	0,63	350.000.000	0,64	525.000.000	0,64	1.225.000.000	
				Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0,064	4.700.000.000	0,068	3.200.000.000	0,071	3.600.000.000	0,071	11.500.000.000	
				Rata-rata ketercukupan pangan	Angka	1,25	450.000.000	1,25	350.000.000	1,25	450.000.000	1,25	1.250.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				35.034.871.000		19.704.199.000		35.034.871.000		89.773.941.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	%	10	35.034.871.000	9	19.704.199.000	8	35.034.871.000	8	89.773.941.000	
		Nilai Tukar Petani			Angka	107,45		107,52		107,68		107,68		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				3.692.230.000		775.000.000		4.913.000.000		9.380.230.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Indeks harga yang diterima oleh nelayan	Angka	108,27	3.692.230.000	108,54	775.000.000	108,81	4.913.000.000	108,81	9.380.230.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	Angka	111,27	50.000.000	111,55	50.000.000	111,83	50.000.000	111,83	150.000.000	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				2.506.440.000		2.056.890.000		3.181.890.000		7.745.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah produksi olahan ikan	Ton	160.000	1.793.384.000	160.800	1.343.834.000	161.604	2.468.834.000	482.404	5.606.052.000	
				Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	713.056.000	4	713.056.000	4	713.056.000	4	2.139.168.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				700.000.000		700.000.000		700.000.000		2.100.000.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura	%	1,5	250.000.000	1,5	250.000.000	1,5	250.000.000	1,5	750.000.000	
				Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	%	1,5	200.000.000	1,5	200.000.000	1,5	200.000.000	1,5	600.000.000	
				Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan	%	1,5	250.000.000	1,5	250.000.000	1,5	250.000.000	1,5	750.000.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				1.100.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		3.200.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	%	10	1.100.000.000	12	1.000.000.000	15	1.100.000.000	15	3.200.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				500.000.000		500.000.000		500.000.000		1.500.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	%	2,8	500.000.000	3,5	500.000.000	4,3	500.000.000	4,3	1.500.000.000	
		Pertumbuhan Ekonomi			%	4,70-5,50		4,90-5,60		5,00-5,80		5,00-5,80		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				48.384.000.000		14.313.600.000		5.140.800.000		67.838.400.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
				Persentase akses air minum jaringan perpipaan	%	54,82	48.384.000.000	57,82	14.313.600.000	60,82	5.140.800.000	60,82	67.838.400.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				6.498.123.000		7.074.159.000		19.770.448.000		33.342.730.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
				Persentase akses air limbah domestik layak	%	93,58	6.498.123.000	95,18	7.074.159.000	96,78	19.770.448.000	96,78	33.342.730.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				662.774.475.000		337.991.815.000		791.306.544.000		1.792.072.834.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
				Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	%	100	6.112.367.000	100	6.152.475.000	100	6.301.344.000	100	18.566.186.000	
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	%	98,34	23.702.376.000	98,39	19.491.806.000	98,44	30.331.172.000	98,44	73.525.354.000	
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	%	95,54	34.938.800.000	95,59	18.279.720.000	95,64	37.675.395.000	95,64	90.893.915.000	
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	%	91,94	28.231.600.000	91,99	22.207.440.000	92,04	35.034.631.000	92,04	85.473.671.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	%	95,76	24.572.600.000	95,81	22.555.040.000	95,86	40.489.188.000	95,86	87.616.828.000	
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	%	80,66	33.601.400.000	80,71	27.815.610.000	80,76	45.739.476.000	80,76	107.156.486.000	
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	%	96,11	25.769.800.000	96,16	20.130.420.000	96,21	28.646.922.000	96,21	74.547.142.000	
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	%	93,97	42.161.600.000	94,02	33.235.590.000	94,07	50.273.128.000	94,07	125.670.318.000	
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	%	96,51	26.833.818.000	96,56	17.157.460.000	96,61	34.636.479.000	96,61	78.627.757.000	
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	%	91,97	25.611.600.000	92,02	22.588.640.000	92,07	30.047.511.000	92,07	78.247.751.000	
				Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksanaan Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	%	45,41	87.210.970.000	45,56	16.692.974.000	45,8	162.316.665.000	45,8	266.220.609.000	
				Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksanaan Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	39,74	139.557.780.000	39,89	39.173.298.000	40,13	161.115.115.000	40,13	339.846.193.000	
				Persentase panjang jalan yang dileger	%	75,79	583.380.000	87,42	628.200.000	100	670.880.000	100	1.882.460.000	
				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	%	83,65	3.874.160.000	83,7	1.539.746.000	83,75	1.767.361.000	83,75	7.181.267.000	
				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	%	93,65	1.082.400.000	93,7	1.843.150.000	93,75	2.945.256.000	93,75	5.870.806.000	
				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	%	93,82	1.241.475.000	93,87	3.448.958.000	93,92	5.673.995.000	93,92	10.364.428.000	
				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	%	88,49	10.639.060.000	88,54	1.670.386.000	88,59	4.849.691.000	88,59	17.159.137.000	
				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	%	91,18	5.650.590.000	91,23	2.117.253.000	91,28	5.258.242.000	91,28	13.026.085.000	
				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	%	85,51	2.717.375.000	85,56	1.024.621.000	85,61	2.744.487.000	85,61	6.486.483.000	
				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	%	94,78	4.387.950.000	94,83	6.576.297.000	94,88	8.589.684.000	94,88	19.553.931.000	
				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	%	86,14	4.019.500.000	86,19	2.698.400.000	86,24	6.878.780.000	86,24	13.596.680.000	
				Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	%	94,9	1.490.685.000	94,95	1.002.610.000	95	6.786.602.000	95	9.279.897.000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	40,32	51.863.953.000	69,23	22.767.113.000	100	39.912.901.000	100	114.543.967.000	
				Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	100	67.564.236.000	100	18.727.608.000	100	33.264.165.000	100	119.556.009.000	
				Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	31,88	9.355.000.000	65,22	8.467.000.000	100	9.357.474.000	100	27.179.474.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				50.375.000.000			39.490.000.000		50.370.000.000		140.235.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	0,68	39.480.000.000	1,17	29.570.000.000	1,85	39.465.000.000	1,85	108.515.000.000		
				Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	3,65	10.895.000.000	7,29	9.920.000.000	10,94	10.905.000.000	10,94	31.720.000.000		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				5.525.000.000			5.323.000.000		5.460.000.000		16.308.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	1.010.000.000	100	980.000.000	100	980.000.000	100	2.970.000.000		
				Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	%	3,18	4.515.000.000	7,72	4.343.000.000	13,17	4.480.000.000	13,17	13.338.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				1.565.000.000			900.000.000		1.560.000.000		4.025.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	%	40	1.565.000.000	60	900.000.000	100	1.560.000.000	100	4.025.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				285.000.000			275.000.000		285.000.000		845.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	285.000.000	100	275.000.000	100	285.000.000	100	845.000.000		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				958.200.000			958.200.000		1.200.000.000		3.116.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase penegakan produk hukum daerah	%	80	958.200.000	86,67	958.200.000	93,33	1.200.000.000	93,33	3.116.400.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				12.362.000.000			12.362.000.000		12.362.000.000		37.086.000.000	Dinas Sosial
				Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	7,7	12.362.000.000	15,41	12.362.000.000	23,11	12.362.000.000	23,11	37.086.000.000		
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				200.000.000			200.000.000		200.000.000		600.000.000	Dinas Sosial
				Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	600.000.000		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				83.108.533.000			83.108.533.000		83.108.533.000		249.325.599.000	Dinas Sosial
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlanjar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	%	1,92	12.497.250.000	3,84	12.497.250.000	5,75	12.497.250.000	5,75	37.491.750.000		
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlanjar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	0,06	2.200.788.000	0,13	2.200.788.000	0,19	2.200.788.000	0,19	6.602.364.000		
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlanjar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	%	0,06	2.210.765.000	0,13	2.210.765.000	0,19	2.210.765.000	0,19	6.632.295.000		
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlanjar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	0,11	3.552.726.000	0,21	3.552.726.000	0,32	3.552.726.000	0,32	10.658.178.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	%	0,06	2.054.550.000	0,12	2.054.550.000	0,18	2.054.550.000	0,18	6.163.650.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	0,12	3.976.806.000	0,24	3.976.806.000	0,36	3.976.806.000	0,36	11.930.418.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	0,08	2.927.572.000	0,16	2.927.572.000	0,24	2.927.572.000	0,24	8.782.716.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	0,03	1.553.101.000	0,07	1.553.101.000	0,1	1.553.101.000	0,1	4.659.303.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	%	0,05	2.293.650.000	0,1	2.293.650.000	0,16	2.293.650.000	0,16	6.880.950.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	%	0,07	2.740.288.000	0,15	2.740.288.000	0,22	2.740.288.000	0,22	8.220.864.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	0,07	2.248.861.000	0,14	2.248.861.000	0,21	2.248.861.000	0,21	6.746.583.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	0,11	3.492.013.000	0,22	3.492.013.000	0,33	3.492.013.000	0,33	10.476.039.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	0,1	3.221.942.000	0,21	3.221.942.000	0,31	3.221.942.000	0,31	9.665.826.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	%	0,03	1.533.901.000	0,07	1.533.901.000	0,1	1.533.901.000	0,1	4.601.703.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	0,09	2.696.151.000	0,17	2.696.151.000	0,26	2.696.151.000	0,26	8.088.453.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	0,05	1.752.522.000	0,11	1.752.522.000	0,16	1.752.522.000	0,16	5.257.566.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	0,06	2.396.195.000	0,12	2.396.195.000	0,19	2.396.195.000	0,19	7.188.585.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	0,07	2.436.367.000	0,15	2.436.367.000	0,22	2.436.367.000	0,22	7.309.101.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	0,12	4.584.666.000	0,25	4.584.666.000	0,37	4.584.666.000	0,37	13.753.998.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	0,11	3.803.086.000	0,22	3.803.086.000	0,34	3.803.086.000	0,34	11.409.258.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	%	0,04	1.328.325.000	0,08	1.328.325.000	0,12	1.328.325.000	0,12	3.984.975.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	0,04	1.743.638.000	0,08	1.743.638.000	0,12	1.743.638.000	0,12	5.230.914.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	0,11	3.894.634.000	0,22	3.894.634.000	0,33	3.894.634.000	0,33	11.683.902.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	%	0,03	1.439.832.000	0,06	1.439.832.000	0,1	1.439.832.000	0,1	4.319.496.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	0,06	2.126.213.000	0,12	2.126.213.000	0,19	2.126.213.000	0,19	6.378.639.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	0,09	2.771.602.000	0,17	2.771.602.000	0,26	2.771.602.000	0,26	8.314.806.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	%	0,08	3.148.701.000	0,16	3.148.701.000	0,25	3.148.701.000	0,25	9.446.103.000	
				Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	0,06	2.482.388.000	0,11	2.482.388.000	0,17	2.482.388.000	0,17	7.447.164.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				64.522.160.000		64.522.160.000		64.522.160.000		193.566.480.000	Dinas Sosial
				Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	%	80	58.172.160.000	82	58.172.160.000	85	58.172.160.000	85	174.516.480.000	
				Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	%	0,02	6.100.000.000	0,04	6.100.000.000	0,07	6.100.000.000	0,07	18.300.000.000	
				Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	%	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				4.138.000.000		4.138.000.000		4.138.000.000		12.414.000.000	Dinas Sosial
				Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	%	100	4.138.000.000	100	4.138.000.000	100	4.138.000.000	100	12.414.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				850.000.000		850.000.000		850.000.000		2.550.000.000	Dinas Sosial
				Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	%	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	2.550.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				4.530.000.000		3.100.000.000		4.805.000.000		12.435.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87,8	3.100.000.000	87,7	1.900.000.000	87,6	3.280.000.000	87,6	8.280.000.000	
				Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/kapita/tahun	87,8	1.000.000.000	87,7	850.000.000	87,6	1.000.000.000	87,6	2.850.000.000	
				Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	Angka	0,62	430.000.000	0,63	350.000.000	0,64	525.000.000	0,64	1.305.000.000	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				4.400.000.000		4.050.000.000		4.550.321.000		13.000.321.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	0,01	4.400.000.000	0,01	4.050.000.000	0,01	4.550.321.000	0,01	13.000.321.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				3.345.000.000		2.975.000.000		3.490.000.000		9.810.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	80	1.795.000.000	82	1.525.000.000	84	1.915.000.000	84	5.235.000.000	
				Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%	80	1.550.000.000	80	1.450.000.000	80	1.575.000.000	80	4.575.000.000	
			PROGRAM PENATAAN DESA				75.000.000		50.000.000		75.000.000		200.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	%	100	75.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	200.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				1.185.000.000		1.100.000.000		1.125.000.000		3.410.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	25,42	1.185.000.000	59,32	1.100.000.000	100	1.125.000.000	100	3.410.000.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				3.125.000.000		3.025.000.000		3.020.000.000		9.170.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	%	100	1.175.000.000	100	1.150.000.000	100	1.140.000.000	100	3.465.000.000	
				Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	%	100	1.950.000.000	100	1.875.000.000	100	1.880.000.000	100	5.705.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				3.225.000.000		3.135.000.000		3.180.000.000		9.540.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	9,39	1.500.000.000	10,54	1.480.000.000	11,67	1.500.000.000	11,67	4.480.000.000	
				Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	%	100	1.300.000.000	100	1.280.000.000	100	1.275.000.000	100	3.855.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	%	100	425.000.000	100	375.000.000	100	405.000.000	100	1.205.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				172.333.238.000		166.383.964.000		173.709.370.000		512.426.572.000	Dinas Perhubungan
				Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	65,38	1.200.000.000	67,34	1.200.000.000	69,36	1.200.000.000	69,36	3.600.000.000	
				Persentase perpindahan moda angkutan umum	%	51	119.366.742.000	53	122.064.885.000	55	131.188.385.000	55	372.620.012.000	
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,81	404.650.000	0,84	404.650.000	0,87	404.650.000	0,87	1.213.950.000	
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,81	115.950.000	0,84	115.950.000	0,87	115.950.000	0,87	347.850.000	
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,81	210.625.000	0,84	210.625.000	0,86	210.625.000	0,86	631.875.000	
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,81	197.800.000	0,84	197.800.000	0,87	197.800.000	0,87	593.400.000	
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,81	251.990.000	0,84	251.990.000	0,87	251.990.000	0,87	755.970.000	
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,81	195.500.000	0,84	195.500.000	0,87	195.500.000	0,87	586.500.000	
				Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Angka	0,5	830.000.000	0,52	230.000.000	0,55	230.000.000	0,55	1.290.000.000	
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,98	1.365.540.000	0,95	1.212.540.000	0,93	1.354.340.000	0,93	3.932.420.000	
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,97	1.215.120.000	0,94	1.177.570.000	0,92	1.287.920.000	0,92	3.680.610.000	
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,97	1.079.180.000	0,95	915.280.000	0,93	1.112.180.000	0,93	3.106.640.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,97	1.921.440.000	0,94	1.634.840.000	0,92	1.200.140.000	0,92	4.756.420.000	
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,97	1.618.340.000	0,95	1.088.840.000	0,92	2.058.340.000	0,92	4.765.520.000	
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,98	1.099.900.000	0,95	774.600.000	0,93	665.800.000	0,93	2.540.300.000	
				Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Angka	0,981	335.000.000	0,985	335.000.000	0,988	335.000.000	0,988	1.005.000.000	
				Rasio ketersediaan bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Angka	0,2	1.100.000.000	0,21	900.000.000	0,22	900.000.000	0,22	2.900.000.000	
				Rasio ketersediaan bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Angka	0,01	130.000.000	0,02	130.000.000	0,03	130.000.000	0,03	390.000.000	
				Rasio ketersediaan bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Angka	0,24	220.000.000	0,25	330.000.000	0,26	330.000.000	0,26	880.000.000	
				Rasio ketersediaan bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Angka	0,23	220.000.000	0,24	220.000.000	0,25	220.000.000	0,25	660.000.000	
				Rasio ketersediaan bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Angka	0,21	580.000.000	0,22	380.000.000	0,23	380.000.000	0,23	1.340.000.000	
				Rasio ketersediaan bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Angka	0,17	220.000.000	0,18	220.000.000	0,19	220.000.000	0,19	660.000.000	
				Rasio konektivitas perkotaan	Angka	0,494	3.189.118.000	0,519	6.200.000.000	0,532	3.000.000.000	0,532	12.389.118.000	
				Rasio pemanfaatan terminal	Angka	0,218	14.802.323.000	0,229	15.940.974.000	0,24	14.521.850.000	0,24	45.265.147.000	
				Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,47	19.341.820.000	0,52	9.319.820.000	0,59	11.372.820.000	0,59	40.034.460.000	
				Rasio trayek angkutan jalan	Angka	0,51	1.122.200.000	0,56	733.100.000	0,58	626.080.000	0,58	2.481.380.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				1.704.100.000		3.174.100.000		3.174.100.000		8.052.300.000	Dinas Perhubungan
				Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	Angka	0,31	1.654.100.000	0,38	3.124.100.000	0,45	3.124.100.000	0,45	7.902.300.000	
				Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Angka	0,2	50.000.000	0,4	50.000.000	0,6	50.000.000	0,6	150.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				3.137.583.000		2.583.395.000		2.680.233.000		8.401.211.000	Dinas Perhubungan
				Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Angka	0,04	3.137.583.000	0,24	2.583.395.000	0,36	2.680.233.000	0,36	8.401.211.000	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				4.450.000.000		3.550.000.000		4.775.000.000		12.775.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase koperasi berkualitas	%	25,02	4.450.000.000	26,74	3.550.000.000	27,28	4.775.000.000	27,28	12.775.000.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				2.000.000.000		2.000.000.000		2.200.000.000		6.200.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase SDM koperasi yang berkualitas	%	10	2.000.000.000	11,5	2.000.000.000	13	2.200.000.000	13	6.200.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				6.550.000.000		5.650.000.000		6.950.000.000		19.150.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase koperasi provinsi produktif	%	48,09	6.550.000.000	48,53	5.650.000.000	48,9	6.950.000.000	48,9	19.150.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				16.100.000.000		13.125.000.000		16.325.000.000		45.550.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	23	5.150.000.000	25	4.300.000.000	27	5.150.000.000	27	14.600.000.000	
				Persentase usaha mikro mandiri	%	81,2	10.950.000.000	82,3	8.825.000.000	82,9	11.175.000.000	82,9	30.950.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				11.100.000.000		9.175.000.000		11.550.000.000		31.825.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase UMKM siap bermitra	%	21,06	11.100.000.000	23,08	9.175.000.000	25,05	11.550.000.000	25,05	31.825.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				1.150.000.000		830.000.000		993.879.000		2.973.879.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	%	50	1.150.000.000	50	830.000.000	50	993.879.000	50	2.973.879.000	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				2.198.258.000		1.730.000.000		2.260.000.000		6.188.258.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	%	50	350.000.000	50	255.000.000	50	350.000.000	150	955.000.000	
				Persentase pengawasan kepininatan PMA/PMDN	%	46	1.848.258.000	67	1.475.000.000	75	1.910.000.000	75	5.233.258.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				2.978.052.000		2.253.172.000		2.925.062.000		8.156.286.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase pemenuhan standar pelayanan	%	100	693.356.000	100	532.216.000	100	693.356.000	100	1.918.928.000	
				Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	626.236.000	100	417.006.000	100	573.246.000	100	1.616.488.000	
				Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	90	1.658.460.000	91	1.303.950.000	92	1.658.460.000	92	4.620.870.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				1.696.000.000		1.280.000.000		1.779.000.000		4.755.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	20	1.696.000.000	22	1.280.000.000	25	1.779.000.000	25	4.755.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				1.345.200.000		1.055.000.000		1.283.040.000		3.683.240.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	1.345.200.000	10	1.055.000.000	10	1.283.040.000	10	3.683.240.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				1.859.567.000		1.259.567.000		1.859.567.000		4.978.701.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase produksi garam	%	1	1.859.567.000	2	1.259.567.000	3	1.859.567.000	3	4.978.701.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				20.494.032.000		11.941.939.000		18.034.709.000		50.470.680.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	72,72	1.163.190.000	72,72	663.190.000	72,72	663.190.000	72,72	2.489.570.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	100	1.134.616.000	100	934.616.000	100	1.284.616.000	100	3.353.848.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	63,63	632.483.000	72,27	632.483.000	72,27	632.483.000	72,27	1.897.449.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	%	70	1.420.948.000	70	1.220.948.000	70	1.870.948.000	70	4.512.844.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	72	1.051.835.000	72	526.835.000	72	1.026.835.000	72	2.605.505.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	%	63	3.022.035.000	63	1.172.035.000	63	1.372.035.000	63	5.566.105.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	81	1.237.530.000	81	855.626.000	81	1.345.626.000	81	3.438.782.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	100	3.222.398.000	100	1.359.979.000	100	3.859.979.000	100	8.442.356.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	62,62	1.028.826.000	71,72	828.826.000	81,82	1.128.826.000	81,82	2.986.478.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	72	2.387.900.000	72	1.187.900.000	72	1.937.900.000	72	5.513.700.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	81,82	2.356.440.000	81,82	776.440.000	81,82	1.076.440.000	81,82	4.209.320.000	
				Persentase produksi perikanan tangkap	%	5	1.835.831.000	5	1.783.061.000	5	1.835.831.000	5	5.454.723.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				10.894.200.000		9.144.200.000		13.444.200.000		33.482.600.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	1.242.890.000	100	1.242.890.000	100	1.242.890.000	100	3.728.670.000	
				Persentase produksi ikan konsumsi air laut	%	5	7.645.000.000	5	5.895.000.000	5	10.195.000.000	5	23.735.000.000	
				Produksi perikanan budidaya	Ton	600.000	2.006.310.000	609.000	2.006.310.000	618.135	2.006.310.000	1.827.135	6.018.930.000	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				4.725.000.000		4.625.000.000		4.850.000.000		14.200.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	13,33	4.725.000.000	26,67	4.625.000.000	40	4.850.000.000	40	14.200.000.000	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				5.850.000.000		5.750.000.000		5.975.000.000		17.575.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	49.985.228	5.850.000.000	54.069.703	5.750.000.000	60.662.997	5.975.000.000	164.717.928	17.575.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				850.000.000		800.000.000		850.000.000		2.500.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	Kabupaten/ Kota	6	850.000.000	8	800.000.000	10	850.000.000	24	2.500.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				4.825.000.000		4.725.000.000		4.825.000.000		14.375.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	33,87	4.825.000.000	33,87	4.725.000.000	33,87	4.825.000.000	33,87	14.375.000.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				90.731.575.000		70.507.788.000		91.851.575.000		253.090.938.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	Dokumen	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	12	1.200.000.000	
				Jumlah populasi ternak perah	(ST)/(AU)	112.876	2.275.000.000	113.440	2.015.000.000	114.008	2.275.000.000	114.008	6.565.000.000	
				Jumlah populasi ternak petelur	(ST)/(AU)	246.615	925.000.000	247.848	700.000.000	249.088	925.000.000	249.088	2.550.000.000	
				Jumlah populasi ternak potong	(ST)/(AU)	3.726.434	6.015.000.000	3.745.066	4.000.000.000	3.763.791	5.900.000.000	3.763.791	15.915.000.000	
				Persentase fasilitasi obat hewan	%	1	1.700.000.000	1	1.100.000.000	1	1.700.000.000	1	4.500.000.000	
				Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	%	3	13.829.580.000	3	12.750.000.000	3	13.704.580.000	3	40.284.160.000	
				Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	%	2	7.450.200.000	2	6.725.200.000	2	7.450.200.000	2	21.625.600.000	
				Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Surakarta	%	85	4.617.000.000	85	1.667.000.000	85	4.667.000.000	85	10.951.000.000	
				Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	%	85	4.549.000.000	85	1.649.000.000	85	4.599.000.000	85	10.797.000.000	
				Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	%	85	4.520.600.000	85	1.685.000.000	85	4.570.600.000	85	10.776.200.000	
				Persentase layanan sertifikasi benih	%	100	2.334.195.000	100	1.319.200.000	100	2.344.195.000	100	5.997.590.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	%	100	135.000.000	100	170.000.000	100	135.000.000	100	440.000.000	
				Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	%	2,5	967.000.000	2,5	701.388.000	2,5	967.000.000	2,5	2.635.388.000	
				Persentase luas lahan yang dioptimasi	%	2,5	1.061.500.000	2,5	1.061.500.000	2,5	1.061.500.000	2,5	3.184.500.000	
				Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	%	3	1.525.520.000	3	650.000.000	3	1.613.851.000	3	3.789.371.000	
				Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	%	1	2.791.980.000	1	1.014.500.000	1	2.778.649.000	1	6.585.129.000	
				Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	%	1	3.950.000.000	1	3.950.000.000	1	3.950.000.000	1	11.850.000.000	
				Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	%	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	
				Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	%	1	1.400.000.000	1	1.400.000.000	1	1.400.000.000	1	4.200.000.000	
				Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	1	4.650.000.000	1	4.250.000.000	1	4.650.000.000	1	13.550.000.000	
				Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	%	90	260.000.000	93	300.000.000	92	260.000.000	92	820.000.000	
				Produksi bawang merah	Ton	515.000	659.650.000	527.875	371.138.000	541.072	742.275.000	1.583.947	1.773.063.000	
				Produksi cabai	Ton	341.000	613.450.000	346.115	371.138.000	351.307	742.275.000	1.038.422	1.726.863.000	
				Produksi durian	Ton	149.668	613.450.000	153.410	366.342.000	157.245	773.175.000	460.323	1.752.967.000	
				Produksi jagung	Ton	3.576.577	850.000.000	3.583.730	500.000.000	3.590.898	1.000.000.000	10.751.205	2.350.000.000	
				Produksi jahe	Ton	34.862	490.760.000	35.908	296.909.000	36.985	593.820.000	107.755	1.381.489.000	
				Produksi kedelai	Ton	52.657	650.000.000	52.762	400.000.000	52.868	800.000.000	158.287	1.850.000.000	
				Produksi kelapa	Ton	166.687	475.000.000	167.187	475.000.000	167.689	600.000.000	501.563	1.850.000.000	
				Produksi kopi	Ton	25.927	550.000.000	26.005	500.000.000	26.083	600.000.000	78.015	1.650.000.000	
				Produksi melati	Ton	24.627	122.690.000	25.120	94.473.000	25.622	148.455.000	75.369	365.618.000	
				Produksi padi	Ton	9.594.280	1.000.000.000	9.613.469	600.000.000	9.632.696	1.200.000.000	28.840.445	2.800.000.000	
				Produksi tebu	Ton	2.554.553	18.350.000.000	2.562.216	18.025.000.000	2.569.903	18.300.000.000	7.686.672	54.675.000.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				9.401.920.000		8.737.112.000		9.401.920.000		27.540.952.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	m	7.420.274	5.901.920.000	7.420.274	6.017.112.000	7.420.274	5.901.920.000	22.260.822	17.820.952.000	
				Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	%	10	585.000.000	12	505.000.000	15	585.000.000	15	1.675.000.000	
				Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	%	10	1.840.000.000	12	1.210.000.000	15	1.840.000.000	15	4.890.000.000	
				Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	%	10	1.075.000.000	12	1.005.000.000	15	1.075.000.000	15	3.155.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				4.220.000.000		3.500.000.000		4.220.000.000		11.940.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	Dokumen	4	1.150.000.000	4	900.000.000	4	1.150.000.000	12	3.200.000.000	
				Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	Dokumen	4	1.300.000.000	4	1.100.000.000	4	1.300.000.000	12	3.700.000.000	
				Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	Dokumen	4	1.300.000.000	4	1.100.000.000	4	1.300.000.000	12	3.700.000.000	
				Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	%	3	470.000.000	7	400.000.000	12	470.000.000	12	1.340.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				6.074.991.000		5.349.991.000		6.074.991.000		17.499.973.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	%	5	125.000.000	10	85.000.000	15	125.000.000	15	335.000.000	
				Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	%	15	5.949.991.000	15	5.264.991.000	20	5.949.991.000	20	17.164.973.000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				15.154.800.000		12.339.800.000		15.329.800.000		42.824.400.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2,5	6.174.800.000	2,5	6.074.800.000	2,5	6.349.800.000	2,5	18.599.400.000	
				Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	%	100	5.980.000.000	100	3.785.000.000	100	5.980.000.000	100	15.745.000.000	
				Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	%	3,11	820.000.000	3,62	720.000.000	4,13	820.000.000	4,13	2.360.000.000	
				Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	%	2,27	480.000.000	2,29	420.000.000	2,31	480.000.000	2,31	1.380.000.000	
				Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	%	1,02	1.700.000.000	1,08	1.340.000.000	1,17	1.700.000.000	1,17	4.740.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				6.390.065.000		6.683.030.000		7.627.414.000		20.700.509.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara	%	100	369.580.000	100	389.660.000	100	408.644.000	100	1.167.884.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan	%	60	3.074.970.000	70	3.165.355.000	75	3.275.255.000	75	9.515.580.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	%	60	213.400.000	70	228.400.000	75	286.400.000	75	728.200.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	%	60	281.650.000	70	291.650.000	75	349.650.000	75	922.950.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	%	60	332.500.000	70	337.500.000	75	390.500.000	75	1.060.500.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	%	60	255.000.000	70	274.000.000	75	350.000.000	75	879.000.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	%	60	202.140.000	70	202.140.000	75	260.140.000	75	664.420.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	%	60	170.975.000	70	190.475.000	75	248.475.000	75	609.925.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	%	60	212.400.000	70	219.900.000	75	285.400.000	75	717.700.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	%	60	211.320.000	70	217.320.000	75	284.320.000	75	712.960.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	%	60	347.480.000	70	419.480.000	75	549.480.000	75	1.316.440.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	%	60	292.000.000	70	307.000.000	75	368.000.000	75	967.000.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	%	60	275.400.000	70	278.400.000	75	340.900.000	75	894.700.000	
				Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	%	60	151.250.000	70	161.750.000	75	230.250.000	75	543.250.000	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				480.000.000		680.000.000		680.000.000		1.840.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase kenaikan jumlah ejaesportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	%	8,5	100.000.000	8,6	100.000.000	8,7	100.000.000	8,7	300.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%	10	380.000.000	10	380.000.000	10	380.000.000	10	1.140.000.000	
				Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	%	0	-	10	200.000.000	20	200.000.000	20	400.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.465.000.000		1.465.000.000		1.465.000.000		4.395.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	%	10	1.465.000.000	15	1.465.000.000	25	1.465.000.000	25	4.395.000.000	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				607.700.000		662.700.000		662.700.000		1.933.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	447.700.000	91	502.700.000	91,5	502.700.000	91,5	1.453.100.000	
				Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	%	30	160.000.000	65	160.000.000	80	160.000.000	80	480.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				4.703.554.000		3.753.554.000		3.753.554.000		12.210.662.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	%	4	4.703.554.000	4,05	3.753.554.000	4,1	3.753.554.000	4,1	12.210.662.000	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				4.805.162.000		4.805.162.000		5.015.162.000		14.625.486.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	%	1	2.549.750.000	1,05	2.549.750.000	1,1	2.549.750.000	1,1	7.649.250.000	
				Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	%	10	933.160.000	10	933.160.000	10	1.143.160.000	10	3.009.480.000	
				Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	%	5	1.322.252.000	5	1.322.252.000	5	1.322.252.000	5	3.966.756.000	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				1.688.000.000		1.688.000.000		1.688.000.000		5.064.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	10	1.688.000.000	15	1.688.000.000	20	1.688.000.000	20	5.064.000.000	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				17.955.048.000		17.955.048.000		17.955.048.000		53.865.144.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	4,38	1.555.980.000	4,39	1.555.980.000	4,4	1.555.980.000	4,4	4.667.940.000	
				Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	3,45	2.224.300.000	6,67	2.224.300.000	9,38	2.224.300.000	9,38	6.672.900.000	
				Persentase pertumbuhan produksi industri agro	%	2,25	4.933.000.000	2,5	4.933.000.000	2,75	4.933.000.000	2,75	14.799.000.000	
				Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	%	2,25	2.121.280.000	2,5	2.121.280.000	2,75	2.121.280.000	2,75	6.363.840.000	
				Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	85	7.120.488.000	85	7.120.488.000	85	7.120.488.000	85	21.361.464.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				360.000.000		360.000.000		360.000.000		1.080.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	7	105.000.000	9	105.000.000	11	105.000.000	11	315.000.000	
				Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	10	255.000.000	13	255.000.000	16	255.000.000	16	765.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				1.136.152.000		1.136.152.000		1.136.152.000		3.408.456.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
				Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1,62	737.152.000	2,26	737.152.000	2,73	737.152.000	2,73	2.211.456.000			
				Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	2	399.000.000	2,26	399.000.000	2,73	399.000.000	2,73	1.197.000.000			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				10.014.688.737.000		6.819.182.347.000		6.847.025.914.000		23.680.896.998.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
				Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	9.993.520.511.000	100	6.798.485.990.000	100	6.825.857.124.000	100	23.617.863.625.000			
				Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	100	629.520.000	100	735.587.000	100	729.520.000	100	2.094.627.000			
				Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100	11.684.271.000	100	10.786.598.000	100	11.627.702.000	100	34.098.571.000			
				Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	5.293.580.000	100	5.586.888.000	100	5.267.952.000	100	16.148.420.000			
				Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	%	100	3.560.855.000	100	3.587.284.000	100	3.543.616.000	100	10.691.755.000			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				22.223.974.000		20.622.475.000		23.055.877.000		65.902.326.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	706.500.000	100	427.000.000	100	706.773.000	100	1.840.273.000			
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	21.517.474.000	100	20.195.475.000	100	22.349.104.000	100	64.062.053.000			
		Tingkat Pengangguran Terbuka			%	5,44-4,94		5,20-4,60		4,90-4,30		4,90-4,30				
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				300.000.000		300.000.000		490.000.000		1.090.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	62,85	300.000.000	68,57	300.000.000	74,28	490.000.000	74,28	1.090.000.000			
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				13.277.750.000		5.126.410.000		7.500.000.000		25.904.160.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	38,14	1.192.089.000	30,59	992.089.000	31,42	1.092.089.000	31,42	3.276.267.000			
				Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	2,88	3.914.406.000	3,2	619.525.000	3,49	1.613.406.000	3,49	6.147.337.000			
				Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	46,9	2.423.385.000	46,98	778.504.000	47,13	1.122.385.000	47,13	4.324.274.000			
				Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9,45	2.308.230.000	9,5	213.349.000	9,55	1.307.230.000	9,55	3.828.809.000			
				Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4,4	649.077.000	4,6	649.077.000	4,68	649.077.000	4,68	1.947.231.000			
				Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2,3	782.584.000	2,35	791.250.000	2,4	658.834.000	2,4	2.232.668.000			
				Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	%	13,13	2.007.979.000	13,22	1.082.616.000	13,3	1.056.979.000	13,3	4.147.574.000			
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				4.480.000.000		2.946.979.000		3.780.000.000		11.206.979.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
				Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	%	71,03	210.000.000	71,05	210.000.000	71,07	210.000.000	71,07	630.000.000			
				Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor informal	%	68,1	4.270.000.000	68,3	2.736.979.000	68,5	3.570.000.000	68,5	10.576.979.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				2.399.076.000		2.348.152.000		2.349.076.000		7.096.304.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98	343.609.000	98,2	343.609.000	98,4	343.609.000	98,4	1.030.827.000	
				Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,75	1.057.701.000	49,77	1.052.976.000	49,8	1.007.701.000	49,8	3.118.378.000	
				Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96,15	515.543.000	96,69	515.543.000	97,7	515.543.000	97,7	1.546.629.000	
				Persentase perusahaan yang merencanakan dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	44,27	482.223.000	45,54	436.024.000	46,81	482.223.000	46,81	1.400.470.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				4.219.805.000		3.076.629.000		3.369.805.000		10.666.239.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26,4	2.169.805.000	26,67	1.122.329.000	26,94	1.369.805.000	26,94	4.661.939.000	
				Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89,58	2.050.000.000	89,59	1.954.300.000	89,6	2.000.000.000	89,6	6.004.300.000	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				296.000.000		296.000.000		296.000.000		888.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3,61	76.000.000	3,71	76.000.000	3,81	76.000.000	3,81	228.000.000	
				Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3,61	220.000.000	3,71	220.000.000	3,81	220.000.000	3,81	660.000.000	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis						10.978.146.954.000		10.587.794.731.000		11.111.904.547.000		32.677.846.232.000	
		Indeks Reformasi Birokrasi			Angka	81,50		82,00		82,50		82,50		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				23.159.123.000		644.159.000		855.448.000		24.658.730.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
				Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	5,83	22.655.000.000	5,83	330.000.000	5,83	330.000.000	5,83	23.315.000.000	
				Persentase kompleks bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	11,94	504.123.000	12,23	314.159.000	11,17	525.448.000	11,17	1.343.730.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				4.048.300.000		4.265.549.000		4.868.943.000		13.182.792.000	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
				Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	%	45,38	200.000.000	61,61	200.000.000	72,79	200.000.000	72,79	600.000.000	
				Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	43,49	3.848.300.000	46,98	4.065.549.000	51,09	4.668.943.000	51,09	12.582.792.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.058.200.000		2.958.200.000		3.750.000.000		9.766.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketenteraman dan ketertiban umum	%	29,57	1.100.000.000	59,13	1.100.000.000	100	1.350.000.000	100	3.550.000.000	
				Persentase pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	%	78,83	958.200.000	80,29	958.200.000	91	1.250.000.000	91	3.166.400.000	
				Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	%	40,03	1.000.000.000	70,26	900.000.000	100	1.150.000.000	100	3.050.000.000	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				100.000.000		100.000.000		150.000.000		350.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	%	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	350.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				1.008.000.000		1.008.000.000		1.008.000.000		3.024.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
				Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	%	25	1.008.000.000	30	1.008.000.000	35	1.008.000.000	35	3.024.000.000			
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				450.000.000		400.000.000		450.000.000		1.300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
				Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	100	450.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	1.300.000.000			
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				830.000.000		915.000.000		915.000.000		2.660.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
				Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	100	830.000.000	100	915.000.000	100	915.000.000	100	2.660.000.000			
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				690.000.000		715.000.000		715.000.000		2.120.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
				Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	%	100	690.000.000	100	715.000.000	100	715.000.000	100	2.120.000.000			
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				400.000.000		390.000.000		390.000.000		1.180.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	97	400.000.000	98	390.000.000	99	390.000.000	99	1.180.000.000			
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				370.000.000		360.000.000		365.000.000		1.095.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	%	97	370.000.000	99	360.000.000	100	365.000.000	100	1.095.000.000			
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				430.000.000		410.000.000		420.000.000		1.260.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
				Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	33,33	430.000.000	66,67	410.000.000	100	420.000.000	100	1.260.000.000			
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				42.972.500.000		32.572.000.000		43.165.000.000		118.709.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Nilai keterbukaan informasi publik	Angka	31	2.960.000.000	33	2.572.000.000	35	2.965.000.000	35	8.497.000.000			
				Nilai survey kepuasan komunikasi publik	Angka	78	40.012.500.000	81	30.000.000.000	85	40.200.000.000	85	110.212.500.000			
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				29.659.684.000		22.872.184.000		27.872.184.000		80.404.052.000			
				Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	72	22.759.684.000	74	15.972.184.000	75	21.000.000.000	75	59.731.868.000			
				Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	%	24	6.900.000.000	47	6.900.000.000	69	6.872.184.000	69	20.672.184.000			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				2.040.000.000		1.428.000.000		1.835.000.000		5.303.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	%	24	2.040.000.000	48	1.428.000.000	100	1.835.000.000	100	5.303.000.000			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				4.200.000.000		3.000.000.000		4.000.000.000		11.200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	%	25	4.200.000.000	50	3.000.000.000	80	4.000.000.000	80	11.200.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				1.766.845.000		1.766.845.000		2.081.845.000		5.615.535.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	26,32	650.000.000	30,26	650.000.000	32,89	725.000.000	32,89	2.025.000.000	
				Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	%	100	516.845.000	100	516.845.000	100	606.845.000	100	1.640.535.000	
				Persentase peningkatan pengunjung arsip	%	19	600.000.000	79	600.000.000	100	750.000.000	100	1.950.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				244.616.000		244.616.000		244.616.000		733.848.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase arsip yang diselamatkan	%	32,96	120.756.000	65,92	120.756.000	100	120.756.000	100	362.268.000	
				Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	%	17,5	123.860.000	20	123.860.000	22,5	123.860.000	22,5	371.580.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				200.459.146.000		189.437.850.000		234.616.436.000		624.513.432.000	Sekretariat Daerah
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	90	275.000.000	90	250.000.000	90	295.000.000	90	820.000.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	6.671.500.000	100	6.065.000.000	100	7.811.000.000	100	20.547.500.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro APBJ	%	100	398.280.000	100	382.940.000	100	395.160.000	100	1.176.380.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%	100	271.707.000	100	235.457.000	100	288.707.000	100	795.871.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%	100	455.000.000	100	342.000.000	100	476.000.000	100	1.273.000.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	485.759.000	100	495.000.000	100	485.759.000	100	1.466.518.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	618.800.000	100	657.975.000	100	682.000.000	100	1.958.775.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	%	100	406.000.000	100	396.500.000	100	452.050.000	100	1.254.550.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	100	677.000.000	100	585.000.000	100	935.000.000	100	2.197.000.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	100	415.000.000	100	380.274.000	100	424.910.000	100	1.220.184.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	22.402.600.000	100	19.852.723.000	100	26.260.000.000	100	68.515.323.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	167.382.500.000	100	159.794.981.000	100	196.110.850.000	100	523.288.331.000	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				2.631.200.000		2.766.025.000		2.878.000.000		8.275.225.000	Sekretariat Daerah
				Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	14,29	280.200.000	17,14	295.000.000	20	306.000.000	20	881.200.000	
				Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%	85,71	221.000.000	88,57	232.500.000	91,43	242.000.000	91,43	695.500.000	
				Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%	66,67	375.850.000	69,05	395.000.000	71,43	411.000.000	71,43	1.181.850.000	
				Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	90	432.850.000	92	455.000.000	94	474.000.000	94	1.361.850.000	
				Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%	89,8	250.500.000	91,84	263.025.000	93,88	276.000.000	93,88	789.525.000	
				Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (FMPRB)nya A	%	74	230.200.000	78	242.000.000	82	251.000.000	82	723.200.000	
				Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%	66	410.400.000	70	431.500.000	74	447.000.000	74	1.288.900.000	
				Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	88,73	430.200.000	91,01	452.000.000	93,86	471.000.000	93,86	1.353.200.000	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				3.895.000.000		3.150.000.000		4.700.000.000		11.745.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	95	1.305.000.000	95	1.010.000.000	95	1.560.000.000	95	3.875.000.000	
				Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	1.260.000.000	95	950.000.000	95	1.480.000.000	95	3.690.000.000	
				Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%	95	1.330.000.000	95	1.190.000.000	95	1.660.000.000	95	4.180.000.000	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				349.881.025.000		329.871.784.000		349.881.025.000		1.029.633.834.000	Sekretariat Daerah
				Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	%	81	980.000.000	83	820.000.000	85	980.000.000	85	2.780.000.000	
				Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	%	82	1.229.500.000	84	1.229.500.000	85	1.229.500.000	85	3.688.500.000	
				Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	54	347.671.525.000	60	327.822.284.000	63	347.671.525.000	63	1.023.165.334.000	
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				4.182.000.000		4.118.250.000		4.225.000.000		12.525.250.000	Sekretariat Daerah
				Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	%	96	1.425.000.000	96	1.356.250.000	96	1.430.000.000	96	4.211.250.000	
				Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	535.000.000	96	535.000.000	96	535.000.000	96	1.605.000.000	
				Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	96	1.377.000.000	97	1.408.250.000	97	1.422.000.000	97	4.207.250.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%	96	845.000.000	96	818.750.000	96	838.000.000	96	2.501.750.000	
			PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN				7.030.000.000		5.623.000.000		7.369.000.000		20.022.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	85	811.000.000	85	526.000.000	85	822.000.000	85	2.159.000.000	
				Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	85	733.000.000	85	487.000.000	85	762.000.000	85	1.982.000.000	
				Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	87	901.000.000	87	595.000.000	87	940.000.000	87	2.436.000.000	
				Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%	81	325.000.000	82	325.000.000	83	390.000.000	83	1.040.000.000	
				Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%	85	1.475.000.000	86	1.175.000.000	87	1.350.000.000	87	4.000.000.000	
				Persentase nilai kemandirian BLUD	%	55	150.000.000	56	150.000.000	57	160.000.000	57	460.000.000	
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	83	785.000.000	84	815.000.000	85	1.020.000.000	85	2.620.000.000	
				Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	78	1.850.000.000	79	1.550.000.000	80	1.925.000.000	80	5.325.000.000	
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				3.701.720.000		3.617.060.000		3.804.840.000		11.123.620.000	Sekretariat Daerah
				Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	%	90	1.926.260.000	91	1.880.470.000	92	1.957.090.000	92	5.763.820.000	
				Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%	81	824.180.000	82	807.030.000	83	870.040.000	83	2.501.250.000	
				Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%	80	951.280.000	82	929.560.000	85	977.710.000	85	2.858.550.000	
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				2.967.000.000		2.751.500.000		3.261.000.000		8.979.500.000	Sekretariat Daerah
				Persentase capaian pelaksanaan APBD	%	98,7	702.000.000	98,8	642.000.000	98,85	786.000.000	98,85	2.130.000.000	
				Persentase capaian pelaksanaan APBN	%	95,5	430.000.000	95,5	416.500.000	95,5	489.000.000	95,5	1.335.500.000	
				Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	%	85	770.000.000	86	733.500.000	87	825.000.000	87	2.328.500.000	
				Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	955.000.000	85	856.500.000	85	1.051.000.000	85	2.862.500.000	
				Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasikan	%	100	110.000.000	100	103.000.000	100	110.000.000	100	323.000.000	
			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI				200.576.210.000		192.064.354.000		200.576.210.000		593.216.774.000	Sekretariat DPRD
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	156.873.108.000	100	156.873.108.000	100	156.873.108.000	100	470.619.324.000	
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	43.703.102.000	100	35.191.246.000	100	43.703.102.000	100	122.597.450.000	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				265.276.087.000		173.787.943.000		205.276.087.000		644.340.117.000	Sekretariat DPRD
				Persentase fasilitasi penyusunan raperda	%	95	94.420.750.000	95	75.931.488.000	95	94.420.750.000	95	264.772.988.000	
				Persentase layanan bagian humas	%	95	170.855.337.000	95	97.856.455.000	95	110.855.337.000	95	379.567.129.000	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				6.515.000.000		5.690.000.000		5.900.000.000		18.105.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase dokumen evaluasi yang diamankan regulasi	%	100	1.175.000.000	100	1.080.000.000	100	1.110.000.000	100	3.365.000.000	
				Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	%	100	5.340.000.000	100	4.610.000.000	100	4.790.000.000	100	14.740.000.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				8.350.000.000		6.411.000.000		6.930.000.000		21.691.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	650.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	1.850.000.000	
				Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	750.000.000	100	600.000.000	100	750.000.000	100	2.100.000.000	
				Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	%	100	1.200.000.000	100	890.000.000	100	1.060.000.000	100	3.150.000.000	
				Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	%	100	1.900.000.000	100	1.451.000.000	100	1.480.000.000	100	4.831.000.000	
				Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	%	100	2.250.000.000	100	1.690.000.000	100	1.640.000.000	100	5.580.000.000	
				Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	%	100	1.600.000.000	100	1.230.000.000	100	1.350.000.000	100	4.180.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				7.715.996.000		7.123.195.000		7.678.639.000		22.517.830.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	%	100	1.794.994.000	100	1.622.318.000	100	1.838.398.000	100	5.255.710.000	
				Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	%	84,02	1.775.000.000	89,86	1.430.195.000	95,69	1.584.539.000	95,69	4.789.734.000	
				Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD) tepat waktu	%	100	4.146.002.000	100	4.070.682.000	100	4.255.702.000	100	12.472.386.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				45.324.868.000		41.328.536.000		46.151.418.000		132.804.822.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
				Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	%	100	1.690.000.000	100	1.540.000.000	100	1.900.000.000	100	5.130.000.000	
				Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	%	100	9.632.439.000	100	9.482.439.000	100	9.842.439.000	100	28.957.317.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	20,31	433.000.000	22,35	470.500.000	24,59	433.000.000	24,59	1.336.500.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	20,26	724.931.000	22,29	791.631.000	24,52	724.931.000	24,52	2.241.493.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	20,24	454.500.000	22,26	362.900.000	24,49	454.500.000	24,49	1.271.900.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	20,31	509.950.000	22,35	521.850.000	24,59	509.950.000	24,59	1.541.750.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	20,48	530.600.000	22,53	568.700.000	24,78	530.600.000	24,78	1.629.900.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	20,83	852.924.000	22,92	513.024.000	25,22	852.924.000	25,22	2.218.872.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	20,24	762.229.000	22,27	572.429.000	24,5	762.229.000	24,5	2.096.887.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	%	19,8	609.400.000	21,78	538.000.000	23,97	609.400.000	23,97	1.756.800.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	19,94	739.850.000	21,94	659.650.000	24,14	739.850.000	24,14	2.139.350.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	10,98	689.625.000	18,91	637.625.000	26,83	689.625.000	26,83	2.016.875.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	21,21	559.300.000	23,33	424.100.000	25,67	559.300.000	25,67	1.542.700.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	%	20,99	556.025.000	23,1	652.025.000	25,42	556.025.000	25,42	1.764.075.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	20,75	573.857.000	22,83	528.957.000	25,12	573.857.000	25,12	1.676.671.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	20,93	720.600.000	23,02	696.100.000	25,33	720.600.000	25,33	2.137.300.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	20,31	503.050.000	22,35	485.550.000	24,59	503.050.000	24,59	1.491.650.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	22,12	561.150.000	24,35	556.250.000	26,79	561.150.000	26,79	1.678.550.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	19,45	691.500.000	21,39	636.200.000	23,53	691.500.000	23,53	2.019.200.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	20,16	533.800.000	22,18	289.600.000	24,4	533.800.000	24,4	1.357.200.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	20,84	722.050.000	22,96	507.250.000	25,26	722.050.000	25,26	1.951.350.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	%	20,9	590.550.000	23	607.150.000	25,3	590.550.000	25,3	1.788.250.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	22,01	341.058.000	24,22	321.558.000	26,66	341.058.000	26,66	1.003.674.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	19,33	366.580.000	21,27	271.780.000	23,4	366.580.000	23,4	1.004.940.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	19,97	601.900.000	21,97	261.700.000	24,18	601.900.000	24,18	1.465.500.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	%	19,89	630.778.000	21,89	375.878.000	24,08	630.778.000	24,08	1.637.434.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	20,94	557.900.000	23,04	299.200.000	25,36	557.900.000	25,36	1.415.000.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	20,57	804.608.000	22,63	588.508.000	24,9	804.608.000	24,9	2.197.724.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	21,35	354.600.000	23,49	336.000.000	25,86	354.600.000	25,86	1.045.200.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	20,4	367.300.000	22,45	260.000.000	24,71	367.300.000	24,71	994.600.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	20,95	341.700.000	23,06	312.800.000	25,37	341.700.000	25,37	996.200.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	21,76	340.836.000	23,99	289.036.000	26,4	340.836.000	26,4	970.708.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	20,29	276.600.000	22,33	169.200.000	24,56	276.600.000	24,56	722.400.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	-25,36	189.600.000	-20,31	27.960.000	-14,56	176.150.000	-14,56	393.710.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang I	%	20,87	641.820.000	22,97	476.620.000	25,27	641.820.000	25,27	1.760.260.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	20,09	558.079.000	22,1	462.179.000	24,31	558.079.000	24,31	1.578.337.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	20,2	402.775.000	22,22	301.183.000	24,45	402.775.000	24,45	1.106.733.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	20,21	445.200.000	22,23	178.900.000	24,47	445.200.000	24,47	1.069.300.000	
				Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	20,49	348.336.000	22,56	238.436.000	24,82	348.336.000	24,82	935.108.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	21,49	61.690.000	-20,02	61.690.000	-12,96	61.690.000	-12,96	185.070.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	19,52	109.250.000	-22,28	109.250.000	-15,96	109.250.000	-15,96	327.750.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	%	15,23	9.000.000	-24,77	9.000.000	-19,64	9.000.000	-19,64	27.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	%	19,93	4.500.000	-22,1	4.500.000	-17,52	4.500.000	-17,52	13.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	19,89	11.150.000	-22,35	11.150.000	-16,08	11.150.000	-16,08	33.450.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	20,1	8.060.000	-20,68	8.060.000	-13,98	8.060.000	-13,98	24.180.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	16,42	20.600.000	-25,49	20.600.000	-21,45	20.600.000	-21,45	61.800.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	%	20,8	5.625.000	-21,46	5.625.000	-15,86	5.625.000	-15,86	16.875.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	20,87	5.400.000	-21,71	5.400.000	-16,1	5.400.000	-16,1	16.200.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	14,71	2.250.000	-27,32	2.250.000	-24,51	2.250.000	-24,51	6.750.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	21,98	18.625.000	-20,06	18.625.000	-12,84	18.625.000	-12,84	55.875.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	20,82	51.056.000	-21,44	51.056.000	-15,43	51.056.000	-15,43	153.168.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	18,31	4.050.000	-23,08	4.050.000	-16,93	4.050.000	-16,93	12.150.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	18,99	19.050.000	-23,07	19.050.000	-17,34	19.050.000	-17,34	57.150.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2024		2025		2026		Target	Rp.		Target	Rp.
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	18,96	9.540.000	-23,32	9.540.000	-18,07	9.540.000	-18,07	28.620.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	19,55	32.500.000	-22,48	32.500.000	-17,33	32.500.000	-17,33	97.500.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	%	15,79	-	-26,44	-	-23,67	-	-23,67	-			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	19,62	1.350.000	-21,27	1.350.000	-14,06	1.350.000	-14,06	4.050.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	%	11,83	5.600.000	-29,31	5.600.000	-26,52	5.600.000	-26,52	16.800.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	28,72	4.050.000	-12,72	4.050.000	-0,83	4.050.000	-0,83	12.150.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	23,68	23.690.000	-18,42	23.690.000	-10,8	23.690.000	-10,8	71.070.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	%	18,71	18.750.000	-23,4	18.750.000	-18,28	18.750.000	-18,28	56.250.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	23,93	14.575.000	-18,37	14.575.000	-9,56	14.575.000	-9,56	43.725.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	25,8	11.340.000	-16,31	11.340.000	-6,75	11.340.000	-6,75	34.020.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	14,12	9.225.000	-26,86	9.225.000	-22,24	9.225.000	-22,24	27.675.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	23,36	2.700.000	-19,31	2.700.000	-12,85	2.700.000	-12,85	8.100.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	20,9	25.850.000	-21,1	25.850.000	-14,52	25.850.000	-14,52	77.550.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	22,39	66.800.000	-19,22	66.800.000	-12,39	66.800.000	-12,39	200.400.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	%	16,85	15.000.000	-23,76	15.000.000	-18,28	15.000.000	-18,28	45.000.000			
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	%	28,17	16.710.000	-12,93	16.710.000	-0,58	16.710.000	-0,58	50.130.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	%	23,51	13.500.000	-19,7	13.500.000	-11,53	13.500.000	-11,53	40.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang I	%	18,18	2.350.000	-23,12	2.350.000	-16,25	2.350.000	-16,25	7.050.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	%	18,66	2.500.000	-22,38	2.500.000	-15,09	2.500.000	-15,09	7.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	%	15,09	7.200.000	-26,1	7.200.000	-21,17	7.200.000	-21,17	21.600.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	%	19,79	32.560.000	-21,91	32.560.000	-14,36	32.560.000	-14,36	97.680.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	%	12,2	11.250.000	-28	11.250.000	-23,72	11.250.000	-23,72	33.750.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	13,44	6.525.000	21,93	6.525.000	31,01	6.525.000	31,01	19.575.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	%	13,75	22.250.000	22,25	22.250.000	31,35	22.250.000	31,35	66.750.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	%	13,44	38.100.000	21,92	38.100.000	30,93	38.100.000	30,93	114.300.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Biora	%	12,4	3.600.000	20,43	3.600.000	29,61	3.600.000	29,61	10.800.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	%	13,03	8.500.000	21,6	8.500.000	30,73	8.500.000	30,73	25.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	%	12,88	1.800.000	21,39	1.800.000	30,34	1.800.000	30,34	5.400.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	%	11,83	3.600.000	20,21	3.600.000	29,18	3.600.000	29,18	10.800.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	%	10,78	7.500.000	19,02	7.500.000	27,72	7.500.000	27,72	22.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	%	13,12	3.600.000	21,52	3.600.000	30,61	3.600.000	30,61	10.800.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	%	19	1.500.000	20,9	1.500.000	23	1.500.000	23	4.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	9,35	5.200.000	17,41	5.200.000	26,2	5.200.000	26,2	15.600.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	%	13,41	5.250.000	21,84	5.250.000	30,91	5.250.000	30,91	15.750.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	%	12,95	16.350.000	21,21	16.350.000	30,85	16.350.000	30,85	49.050.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	%	13,42	4.650.000	21,86	4.650.000	31,03	4.650.000	31,03	13.950.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	%	7,24	3.600.000	13,55	3.600.000	19,85	3.600.000	19,85	10.800.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	%	13,59	8.550.000	22,01	8.550.000	31,1	8.550.000	31,1	25.650.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	%	13,58	4.500.000	21,95	4.500.000	31,52	4.500.000	31,52	13.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	13,51	7.800.000	22	7.800.000	31,07	7.800.000	31,07	23.400.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	%	11,27	7.500.000	19,53	7.500.000	28,66	7.500.000	28,66	22.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	13,77	15.400.000	22,29	15.400.000	31,5	15.400.000	31,5	46.200.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	%	12,21	2.800.000	20,16	2.800.000	29	2.800.000	29	8.400.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	%	12,45	15.165.000	20,32	15.165.000	29,31	15.165.000	29,31	45.495.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	%	13,7	7.200.000	22,35	7.200.000	31,5	7.200.000	31,5	21.600.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	%	8,21	2.250.000	14,58	2.250.000	20,94	2.250.000	20,94	6.750.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	1,76	4.500.000	9,26	4.500.000	17,47	4.500.000	17,47	13.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	%	13,27	3.000.000	21,75	3.000.000	30,78	3.000.000	30,78	9.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	%	13,59	12.450.000	22,05	12.450.000	31,22	12.450.000	31,22	37.350.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	12,75	-	21,07	4.200.000	30	-	30	4.200.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	13,38	25.000.000	21,75	25.000.000	30,82	25.000.000	30,82	75.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	%	9,11	10.200.000	17,29	10.200.000	26,38	10.200.000	26,38	30.600.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	%	6,69	3.600.000	12,84	3.600.000	19	3.600.000	19	10.800.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	%	12,53	1.500.000	20,9	1.500.000	29,97	1.500.000	29,97	4.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	%	12,2	7.200.000	20,46	7.200.000	29,53	7.200.000	29,53	21.600.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	45,72	66.975.000	-3,1	66.975.000	6,32	66.975.000	6,32	200.925.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	%	25,25	14.500.000	-17,39	14.500.000	-10,31	14.500.000	-10,31	43.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	%	38,33	104.000.000	-7,58	104.000.000	2,01	104.000.000	2,01	312.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	%	13,4	111.400.000	-25,71	111.400.000	-20,08	111.400.000	-20,08	334.200.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	%	23,05	71.000.000	-19,73	71.000.000	-14,14	71.000.000	-14,14	213.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	%	44	99.900.000	-3,72	99.900.000	6,36	99.900.000	6,36	299.700.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	%	23,27	91.800.000	-18,87	91.800.000	-12,17	91.800.000	-12,17	275.400.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	%	23,16	188.000.000	-18,39	188.000.000	-10,87	188.000.000	-10,87	564.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	%	22,34	80.900.000	-19,3	80.900.000	-12,37	80.900.000	-12,37	242.700.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	%	22,63	136.500.000	-18,46	136.500.000	-10,54	136.500.000	-10,54	409.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	%	30,62	111.650.000	-16,22	111.650.000	-12,42	111.650.000	-12,42	334.950.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	%	25,05	102.650.000	-18,43	102.650.000	-12,74	102.650.000	-12,74	307.950.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	%	32,43	150.285.000	-12,63	150.285.000	-5,13	150.285.000	-5,13	450.855.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	%	24,85	140.900.000	-19,18	140.900.000	-14,44	140.900.000	-14,44	422.700.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	%	12,4	86.950.000	-27,87	86.950.000	-24,56	86.950.000	-24,56	260.850.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	%	34,47	83.000.000	-13,76	83.000.000	-9,87	83.000.000	-9,87	249.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	%	16,61	88.800.000	-24,49	88.800.000	-20,02	88.800.000	-20,02	266.400.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pematang	%	30,76	144.650.000	-13,05	144.650.000	-4,6	144.650.000	-4,6	433.950.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	%	14,57	138.550.000	-24,1	138.550.000	-17,12	138.550.000	-17,12	415.650.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	%	4,96	103.800.000	-32,53	103.800.000	-29,26	103.800.000	-29,26	311.400.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	%	11,59	204.400.000	-26,61	204.400.000	-20,63	204.400.000	-20,63	613.200.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	%	9,5	325.810.000	-28,09	125.810.000	-22,38	325.810.000	-22,38	777.430.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	%	19,63	196.250.000	-22,46	196.250.000	-17,78	196.250.000	-17,78	588.750.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	23	108.000.000	-20,82	108.000.000	-16,81	108.000.000	-16,81	324.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	%	66,86	85.450.000	11,32	85.450.000	22,66	85.450.000	22,66	256.350.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	%	32,03	83.200.000	-14,54	83.200.000	-9,54	83.200.000	-9,54	249.600.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	%	11,97	70.550.000	-27,34	70.550.000	-22,83	70.550.000	-22,83	211.650.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	%	24,01	1.350.000	-19,18	1.350.000	-13,64	1.350.000	-13,64	4.050.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	%	-53,02	190.960.000	-70	190.960.000	-68,85	190.960.000	-68,85	572.880.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	%	-25,14	121.899.000	-51,25	121.899.000	-47,97	121.899.000	-47,97	365.697.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	%	2,24	123.100.000	-33,96	123.100.000	-30,29	123.100.000	-30,29	369.300.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang I	%	24,91	148.400.000	-19,25	148.400.000	-14,67	148.400.000	-14,67	445.200.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	%	6,61	226.100.000	-31,32	226.100.000	-27,79	226.100.000	-27,79	678.300.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	%	21,98	190.250.000	-21,44	190.250.000	-17,42	190.250.000	-17,42	570.750.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	%	3,8	163.600.000	-33,21	163.600.000	-29,88	163.600.000	-29,88	490.800.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	%	-25,92	118.694.000	-51,13	118.694.000	-46,93	118.694.000	-46,93	356.082.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	%	41,78	77.400.000	-5,84	77.400.000	3,13	77.400.000	3,13	232.200.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	%	-7,67	3.378.823.000	-5,54	3.228.823.000	-3,47	3.588.823.000	-3,47	10.196.469.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-25,11	3.300.000	-20,05	3.300.000	-14,28	3.300.000	-14,28	9.900.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	%	-25,89	9.450.000	-20,88	9.450.000	-15,17	9.450.000	-15,17	28.350.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	%	-23,43	22.500.000	-18,25	22.500.000	-12,35	22.500.000	-12,35	67.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	%	-18,49	1.800.000	-12,98	1.800.000	-6,7	1.800.000	-6,7	5.400.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	%	-25,7	2.000.000	-20,67	2.000.000	-14,95	2.000.000	-14,95	6.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	%	-22,26	3.000.000	-17	3.000.000	-11,01	3.000.000	-11,01	9.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	%	-13,57	3.600.000	-7,73	3.600.000	-1,07	3.600.000	-1,07	10.800.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	%	-20,94	3.600.000	-15,6	3.600.000	-9,5	3.600.000	-9,5	10.800.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	%	-22,19	1.500.000	-16,93	1.500.000	-10,94	1.500.000	-10,94	4.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-16,8	450.000	-11,18	450.000	-4,76	450.000	-4,76	1.350.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	%	-25,77	1.050.000	-20,75	1.050.000	-15,03	1.050.000	-15,03	3.150.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	%	-24,67	2.100.000	-19,58	2.100.000	-13,77	2.100.000	-13,77	6.300.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	%	-21,23	6.060.000	-15,9	6.060.000	-9,83	6.060.000	-9,83	18.180.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	%	-25,13	1.800.000	-20,07	1.800.000	-14,3	1.800.000	-14,3	5.400.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	%	-18,76	8.250.000	-13,27	8.250.000	-7,01	8.250.000	-7,01	24.750.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-20,86	1.350.000	-15,51	1.350.000	-9,41	1.350.000	-9,41	4.050.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	%	-17,02	2.500.000	-11,41	2.500.000	-5,01	2.500.000	-5,01	7.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	%	-15,51	1.800.000	-9,8	1.800.000	-3,29	1.800.000	-3,29	5.400.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	%	-12,81	7.200.000	-6,91	7.200.000	-0,19	7.200.000	-0,19	21.600.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	%	-15,14	4.350.000	-9,4	4.350.000	-2,86	4.350.000	-2,86	13.050.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	%	-20,16	1.500.000	-14,76	1.500.000	-8,61	1.500.000	-8,61	4.500.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-25,99	4.500.000	-20,99	4.500.000	-15,28	4.500.000	-15,28	13.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	%	-25,7	9.300.000	-20,67	9.300.000	-14,95	9.300.000	-14,95	27.900.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	%	-20,87	2.025.000	-15,52	2.025.000	-9,42	2.025.000	-9,42	6.075.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-20,99	3.600.000	-15,65	1.200.000	-9,56	3.600.000	-9,56	8.400.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-24,77	11.500.000	-19,68	11.500.000	-13,88	11.500.000	-13,88	34.500.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	%	-13,62	1.800.000	-7,78	1.800.000	-1,12	1.800.000	-1,12	5.400.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	%	-16,7	8.880.000	-11,07	8.880.000	-4,65	8.880.000	-4,65	26.640.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	%	20,52	7.200.000	22,59	7.200.000	24,88	7.200.000	24,88	21.600.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang I	%	-21,85	3.600.000	-16,57	3.600.000	-10,55	3.600.000	-10,55	10.800.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	%	-17,94	4.650.000	-12,4	4.650.000	-6,07	4.650.000	-6,07	13.950.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	%	-17,96	6.000.000	-12,41	6.000.000	-6,09	6.000.000	-6,09	18.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	%	-22,24	207.000.000	-16,99	207.000.000	-10,99	207.000.000	-10,99	621.000.000	
				Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	%	19,25	4.500.000	27,31	4.500.000	36,5	4.500.000	36,5	13.500.000	
				Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	%	72	4.891.721.000	73	5.241.721.000	74	5.101.721.000	74	15.235.163.000	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				17.049.054.000		16.197.584.000		17.167.354.000		50.413.992.000	Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	%	100	6.043.254.000	100	5.531.954.000	100	5.971.554.000	100	17.546.762.000	
				Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	%	100	575.000.000	100	515.000.000	100	575.000.000	100	1.665.000.000	
				Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	%	100	1.080.000.000	100	1.055.000.000	100	1.080.000.000	300	3.215.000.000	
				Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	%	100	1.305.800.000	100	1.265.800.000	100	1.360.800.000	100	3.932.400.000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	%	100	230.000.000	100	195.000.000	100	230.000.000	100	655.000.000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	425.000.000	100	405.000.000	100	425.000.000	100	1.255.000.000	
				Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	%	100	5.315.000.000	100	5.189.830.000	100	5.315.000.000	100	15.819.830.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	%	100	2.075.000.000	100	2.040.000.000	100	2.210.000.000	100	6.325.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				26.500.000.000		22.275.279.000		24.383.589.000		73.158.868.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	Angka	3,5	485.834.000	3,5	471.279.000	3,5	440.000.000	3,5	1.397.113.000	
				Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100	3.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	100	7.500.000.000	
				Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	%	100	19.000.000.000	100	17.000.000.000	100	18.000.000.000	100	54.000.000.000	
				Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	%	100	3.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	100	7.500.000.000	
				Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	284.966.000	100	270.500.000	100	273.279.000	100	828.745.000	
				Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	%	100	729.200.000	100	533.500.000	100	670.310.000	100	1.933.010.000	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				12.000.000.000		11.000.000.000		13.350.000.000		36.350.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
				Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	%	100	4.000.000.000	100	3.500.000.000	100	4.400.000.000	100	11.900.000.000	
				Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	%	100	2.500.000.000	100	2.250.000.000	100	2.800.000.000	100	7.550.000.000	
				Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	%	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.300.000.000	100	9.300.000.000	
				Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	%	100	2.500.000.000	100	2.250.000.000	100	2.850.000.000	100	7.600.000.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				4.189.196.000		4.289.196.000		4.289.196.000		12.767.588.000	Badan Penghubung
				Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	%	100	4.189.196.000	100	4.289.196.000	100	4.289.196.000	100	12.767.588.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				8.500.000.000		6.700.000.000		7.170.485.000		22.370.485.000	Inspektorat
				Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	%	83	700.000.000	84	600.000.000	85	620.485.000	85	1.920.485.000	
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	%	85	1.900.000.000	86	1.550.000.000	87	1.675.000.000	87	5.125.000.000	
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	%	85	1.900.000.000	86	1.400.000.000	87	1.500.000.000	87	4.800.000.000	
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	%	85	2.000.000.000	86	1.550.000.000	87	1.675.000.000	87	5.225.000.000	
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	85	2.000.000.000	86	1.600.000.000	87	1.700.000.000	87	5.300.000.000	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3.260.000.000		2.717.328.000		3.055.000.000		9.032.328.000	Inspektorat
				Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 3	%	10,2	1.745.000.000	12,24	1.480.000.000	14,29	1.630.000.000	14,29	4.855.000.000	
				Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	%	10,2	1.515.000.000	12,24	1.237.328.000	14,29	1.425.000.000	14,29	4.177.328.000	

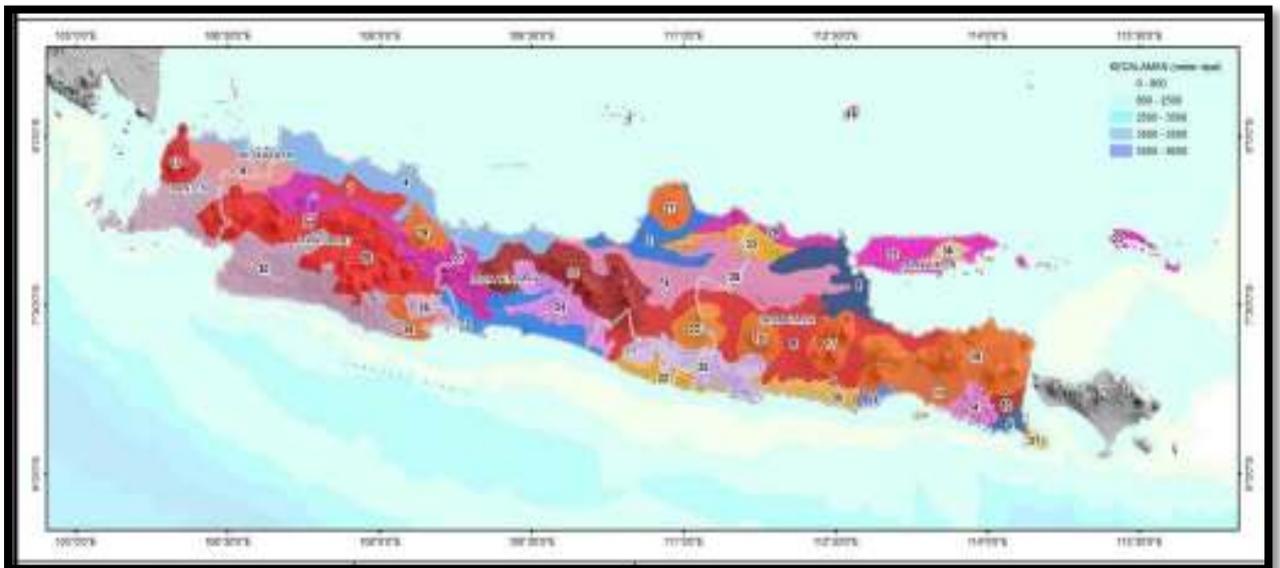
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2024		2025		2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				5.030.650.000		3.637.455.000		3.743.759.000		12.411.864.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Indeks Ideologi Pancasila	Nilai	3	5.030.650.000	3,1	3.637.455.000	3,2	3.743.759.000	3,2	12.411.864.000	
			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				40.692.168.000		28.064.940.000		38.382.239.000		107.139.347.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	Nilai	75	40.692.168.000	76	28.064.940.000	77	38.382.239.000	77	107.139.347.000	
			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				7.427.242.000		7.109.735.000		6.140.351.000		20.677.328.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Indeks kinerja ormas	Nilai	75,34	7.427.242.000	77,87	7.109.735.000	79,82	6.140.351.000	79,82	20.677.328.000	
			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				4.185.255.000		3.816.296.000		2.898.364.000		10.899.915.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Indeks penguatan dampak ekonomi	%	3	3.561.025.000	3,1	3.501.151.000	3,2	2.409.554.000	3,2	9.471.730.000	
				Indeks toleransi	%	74,1	624.230.000	74,3	315.145.000	74,5	488.810.000	74,5	1.428.185.000	
			PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				15.774.720.000		14.445.833.000		14.487.829.000		44.708.382.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Indeks kewaspadaan Nasional	Angka	73	15.774.720.000	73,5	14.445.833.000	74	14.487.829.000	74	44.708.382.000	
			PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				9.609.606.149.000		9.425.751.035.000		9.800.502.690.000		28.835.859.874.000	
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	80	127.269.202.000	81	115.163.807.000	82	129.476.938.000	82	371.909.947.000	Seluruh PD
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	7.843.230.333.000	100	7.680.770.024.000	100	7.930.478.838.000	100	23.454.479.195.000	Seluruh PD
				Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	%	82	810.000.000.000	82	810.000.000.000	82	900.000.000.000	82	2.520.000.000.000	RSUD Dr. Moewardi
				Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	82	400.000.000.000	83	401.000.000.000	84	402.000.000.000	84	1.203.000.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
				Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	%	53,54	195.787.614.000	55,87	184.907.204.000	55,8	188.026.914.000	55,8	568.721.732.000	RSUD Tugurejo
				Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	%	35	44.900.000.000	40	44.900.000.000	40	52.670.000.000	40	142.470.000.000	RSUD Kelet Donorejo
				Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	43	49.419.000.000	43	49.510.000.000	44	53.850.000.000	44	152.779.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
				Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	46,5	46.500.000.000	47,47	47.000.000.000	46,57	47.500.000.000	46,57	141.000.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
				Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	%	33	42.500.000.000	33	42.500.000.000	33	46.500.000.000	33	131.500.000.000	RSJD Surakarta
				Cost Recovery Rate Total RS Khusus Mata	%	20	50.000.000.000	30	50.000.000.000	40	50.000.000.000	40	150.000.000.000	Rumah Sakit Khusus Mata

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH

7.1. Kebijakan Umum Pembangunan Wilayah

Arah kebijakan pembangunan di Jawa Tengah mengacu dan memedomani pada rencana tata ruang dan rencana pembangunan. Pembangunan di Jawa Tengah diarahkan pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah. Kelestarian alam dapat terwujud dengan pembangunan daerah yang memperhatikan keseimbangan hulu-hilir, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta memperhitungkan daya dukung dan daya tampung yang mempertimbangkan wilayah ekoregion. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion di Indonesia, di Provinsi Jawa Tengah terdapat 17 dari 36 ekoregion di Pulau Jawa. Adapun secara spasial ekoregion di Pulau Jawa sebagaimana gambar berikut.

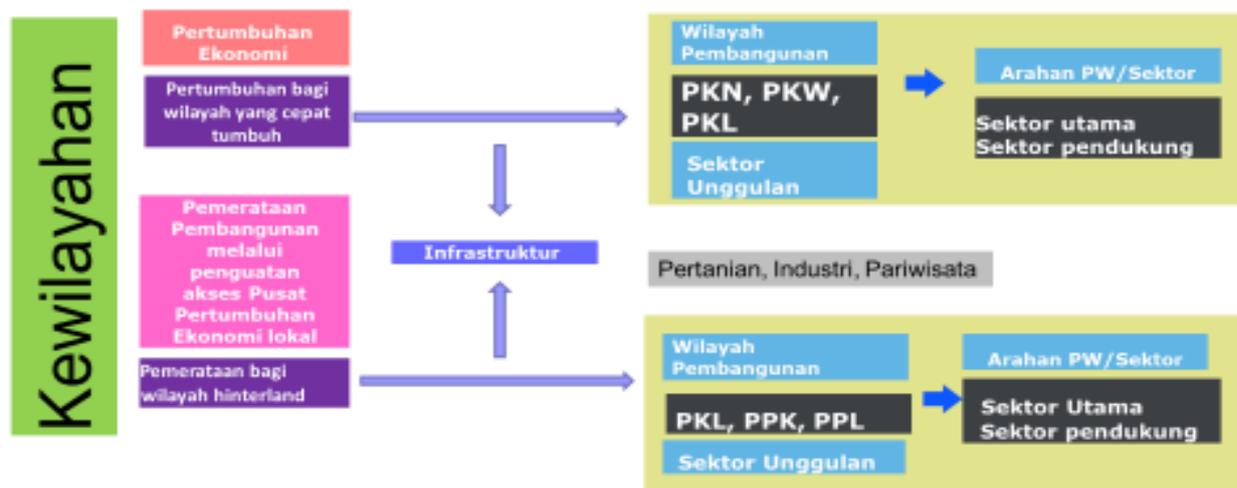


Sumber: Keputusan Menteri LHK No. 8 Tahun 2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion di Indonesia

Gambar 7.1
Peta Ekoregion di Pulau Jawa

Pembangunan daerah yang memperhatikan keseimbangan hulu-hilir ditempuh antara lain melalui konservasi daerah penyangga dan pengendalian kawasan di bawahnya. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ditempuh melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta meningkatkan daya dukung dan daya tampung utamanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ketersediaan pasokan air. Upaya tersebut dilakukan juga dalam rangka mengurangi risiko bencana dan degradasi lingkungan yang dapat menjadi ancaman terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan tinggi dan sangat tinggi. Selain itu, guna mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah di Jawa Tengah dalam rangka mengurangi kesenjangan/disparitas antarwilayah maupun di dalam wilayah dilaksanakan melalui upaya peningkatan aksesibilitas dan sumberdaya manusia, pengoptimalan sektor unggulan, serta penguatan kelembagaan.

Kebijakan umum pengembangan wilayah Jawa Tengah diarahkan berorientasi pada pendekatan pertumbuhan dan pemerataan dengan upaya: 1) Mengurangi ketimpangan antarwilayah; 2) Penguatan pusat pertumbuhan wilayah; 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing; dan 4) Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

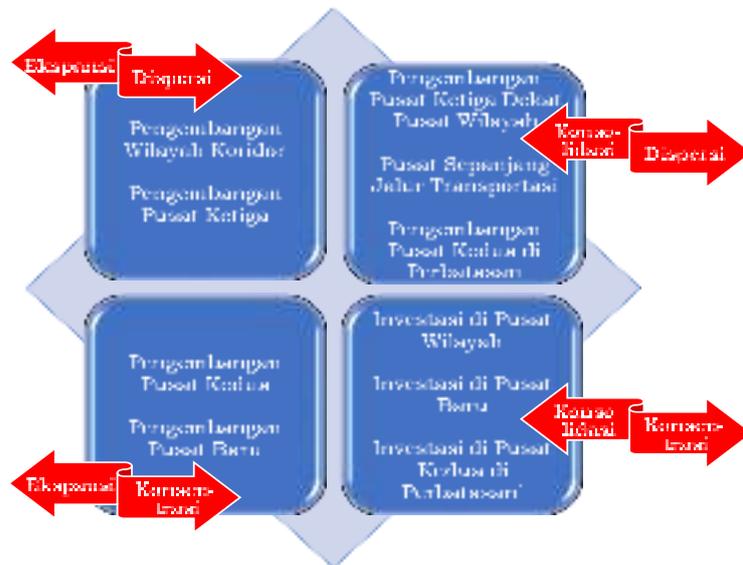
Gambar 7.2
Konsep Arah Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah
Provinsi Jawa Tengah

7.2. Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

7.3.1. Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Secara konseptual, tujuan pengembangan wilayah adalah: 1) Ekspansi/perluasan yaitu memperluas cakupan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah; dan 2) Konsolidasi/pemantapan yaitu mengintensifkan sistem keruangan yang ada supaya sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun pola pengembangan yang dilakukan adalah secara: 1) Dispersi/menyebar berupa penyebaran kegiatan ke seluruh bagian wilayah; dan 2) Konsentrasi/mengumpul berupa pemusatan kegiatan pada pusat-pusat tertentu.

Berdasarkan tujuan dan pola pengembangan wilayah tersebut maka konsep tipologi strategi pengembangan wilayah dari aspek struktur ruang yang dapat diterapkan antara lain dapat berbentuk pengembangan wilayah koridor, pengembangan pusat pertumbuhan kedua, pengembangan pusat kedua di kawasan perbatasan, pengembangan pusat ketiga, pengembangan pusat ketiga di dekat pusat wilayah, pusat sepanjang jalur transportasi, pengembangan pusat baru, investasi di pusat wilayah, investasi di pusat baru, dan investasi di pusat kedua di perbatasan. Secara diagram, konsep tipologi strategi tersebut sebagaimana gambar sebagai berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.3

Konsep Strategi Pengembangan Wilayah Mendasarkan Tujuan dan Pola Pengembangan

Mempertimbangkan kondisi umum wilayah, infrastruktur, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim, serta dengan mempertimbangkan konsep pengembangan wilayah sebagaimana diuraikan di atas, maka secara umum arah pengembangan wilayah di Jawa Tengah terbagi dalam empat koridor utama yaitu sebagai berikut:

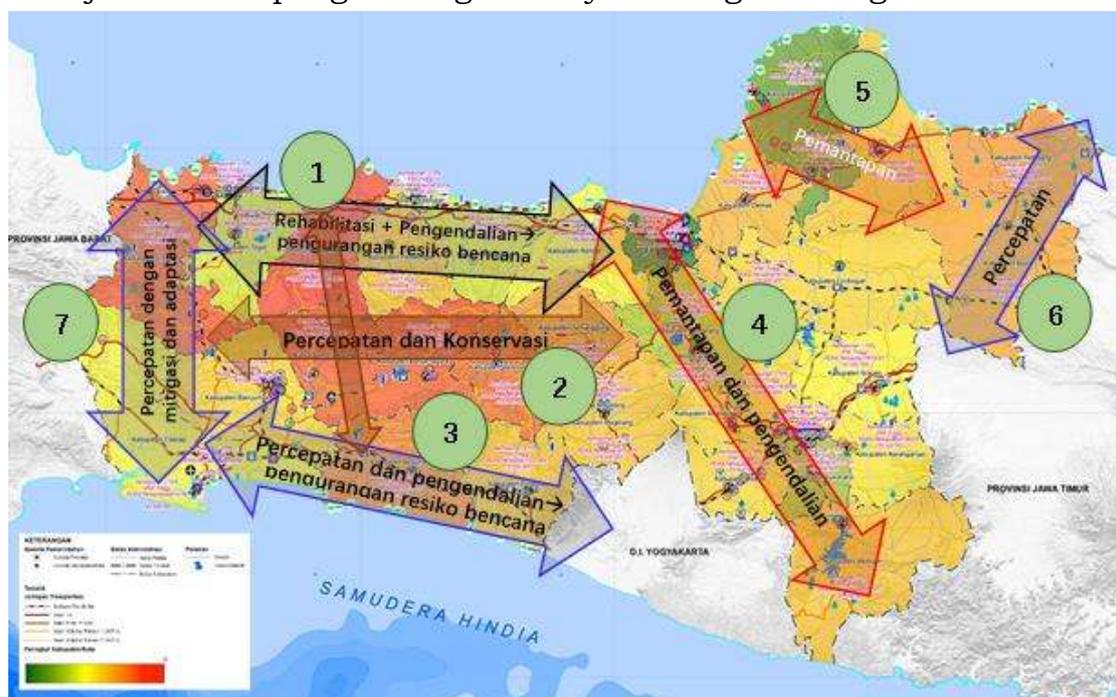
1. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan, pengendalian dan rehabilitasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana di sepanjang koridor pantai utara dan pantai selatan Jawa;
2. Koridor yang dikembangkan dengan memantapkan pembangunan serta pengendalian di sepanjang koridor Semarang hingga Solo dan koridor Jepara-Kudus-Rembang;
3. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan dengan mitigasi berada pada koridor utara-selatan, di bagian barat Jawa Tengah sepanjang koridor Brebes hingga Cilacap, dan koridor Rembang-Blora di bagian timur Jawa Tengah; dan
4. Koridor yang dikembangkan dengan percepatan dan upaya konservasi karena merupakan bagian hulu di Jawa Tengah berada pada koridor wilayah tengah Jawa Tengah.

Strategi yang ditetapkan dalam pengembangan wilayah empat koridor di Jawa Tengah tersebut antara lain adalah:

- 1. Strategi terkait dengan upaya perwujudan struktur ruang wilayah**
 - a. Pemantapan pusat pertumbuhan ekonomi di tiap perwilayahan pembangunan;
 - b. Pengembangan jalur perembetan pusat pertumbuhan di tiap perwilayahan pembangunan;
 - c. Pengembangan prasarana dan sarana sesuai dengan hirarki perkotaan;
 - d. Pemantapan sistem perkotaan menuju perwujudan perkotaan yang kompak;
- 2. Strategi terkait dengan upaya perwujudan fungsi ruang wilayah**
 - a. Pelestarian dan pengendalian lahan sawah dilindungi (LSD);

- b. Optimalisasi kawasan industri;
- c. Optimalisasi pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata strategis;
- d. Pengendalian dan rehabilitasi kawasan lindung;
- e. Optimalisasi dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Mitigasi dan adaptasi sebagai dasar penyusunan tata ruang;
- g. Harmonisasi kawasan pesisir di matra darat dan laut;
- h. Pengaturan penggunaan lahan dengan pertimbangan hulu hilir (terutama pada kegiatan budidaya yang tidak berkesesuaian dengan kelas fungsi lahan).

Selanjutnya, berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kebijakan pengembangan wilayah terbagi dalam tujuh arahan pengembangan wilayah sebagaimana gambar berikut.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Revisi RTRW)

Gambar 7.4

Arahan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah

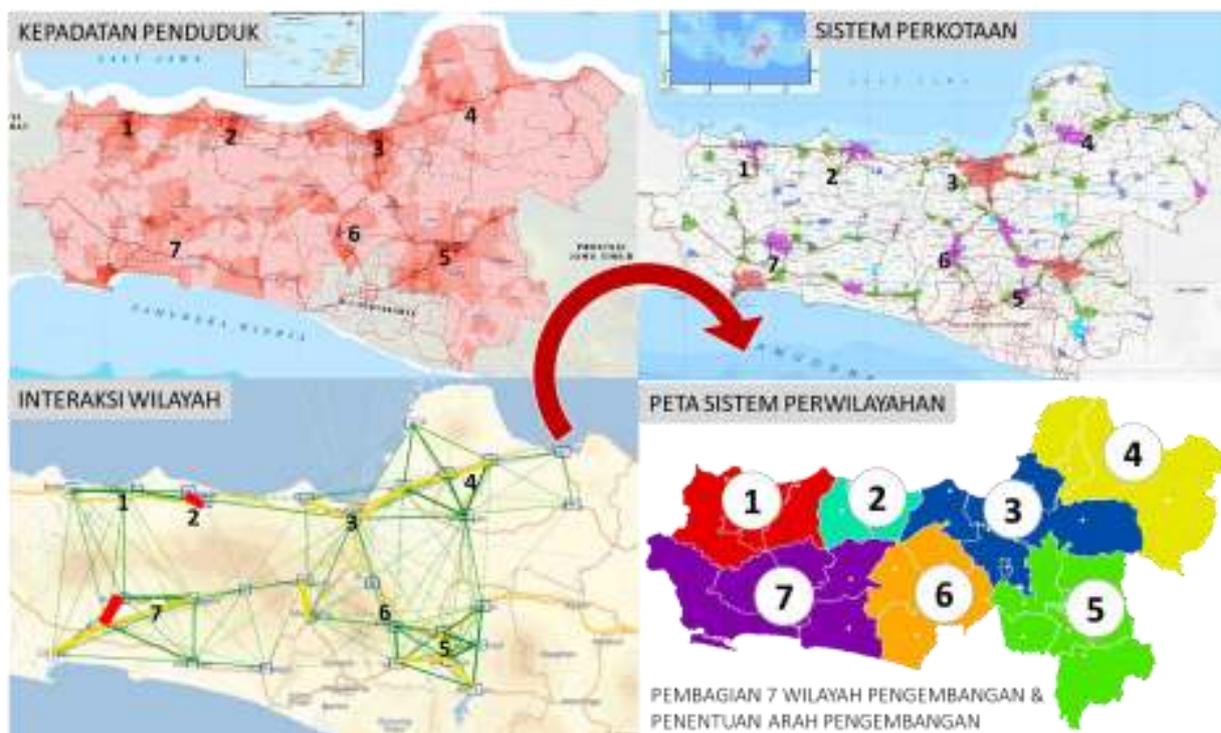
Strategi penanganan yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan gambar di atas adalah sebagai berikut.

1. Strategi penanganan (1): rehabilitasi dan pengendalian pengurangan risiko bencana, di antaranya:
 - a. Merehabilitasi prasarana perkotaan terdampak bencana perubahan iklim di wilayah pesisir utara (Brebes, Tegal, Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak);
 - b. Mitigasi bencana dengan penguatan desain struktur infrastruktur dan adaptasi dan harmoni dengan alam;
 - c. Pengendalian pertumbuhan perkotaan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung;
 - d. Optimalisasi dan pengembangan kawasan industri;
 - e. Pelestarian dan pengendalian lahan sawah dilindungi;

2. Strategi penanganan (2): peningkatan pembangunan dan konservasi dengan pemanfaatan jasa lingkungan, di antaranya:
 - a. Pemantapan pusat pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan konservasi lingkungan untuk wisata hijau; pengembangan wisata hijau (berbasis konservasi);
 - b. Pengendalian (pengawasan dan penertiban) dan rehabilitasi kawasan lindung;
 - c. Pengembangan prasarana dan sarana yang sesuai untuk mendukung mitigasi bencana;
 - d. Optimalisasi pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata strategis.
3. Strategi penanganan (3): percepatan dan pengendalian guna pengurangan risiko bencana dan pengendalian ruang pertahanan negara, di antaranya:
 - a. Pemantapan jalur ekonomi lintas selatan;
 - b. Inisiasi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Kebumen dan Cilacap;
 - c. Peningkatan desain struktur untuk mitigasi bencana terhadap tsunami dan gempa tektonik;
 - d. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Pemantapan sistem perkotaan menuju perwujudan perkotaan yang kompak;
 - f. Pengendalian ruang pesisir untuk pertahanan negara.
4. Strategi penanganan (4) dan (5): pemantapan dan pengendalian koridor Semarang, Solo, Jogja dan Jepara-Kudus-Pati, di antaranya:
 - a. Penguatan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Borobudur-Temanggung-Dieng, Borobudur, Boyolali, Solo;
 - b. Penguatan jalur Jepara-Kudus-Juwana-Pati.
5. Strategi penanganan (6) dan (7): percepatan dan mitigasi bencana, di antaranya:
 - a. Peningkatan akses di Brebes-Cilacap dan Blora-Rembang;
 - b. Peningkatan kerapatan jaringan pendukung di Brebes-Cilacap dan Blora-Rembang;
 - c. Pengembangan kawasan perbatasan;
 - d. Penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk pengendali banjir dan kekeringan.

7.3.2. Pembagian Wilayah Pengembangan di Jawa Tengah

Pembagian wilayah pengembangan (WP) di Jawa Tengah merupakan bagian sistem perwilayahan yang bertujuan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai potensi dan karakteristik wilayah. Pembagian wilayah ini mempertimbangkan kepadatan penduduk, sistem perkotaan, dan interaksi antar wilayah, sebagaimana digambarkan sebagai berikut.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Revisi RTRW)

Gambar 7.5

Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) di Provinsi Jawa Tengah

Wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana gambar di atas dibagi menjadi tujuh wilayah pengembangan meliputi:

1. Wilayah pengembangan (WP) Bregasmalang berpusat di kawasan perkotaan Tegal terdiri dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal;
2. Wilayah pengembangan (WP) Petanglong berpusat di kawasan perkotaan Pekalongan terdiri dari Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan;
3. Wilayah pengembangan (WP) Kedungsepur berpusat di kawasan perkotaan Semarang terdiri dari Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, dan Kota Semarang;
4. Wilayah Wanarakuti dan Banglor, yang selanjutnya disebut dengan wilayah pengembangan (WP) Jekutibanglor dengan pusat pengembangan baru berpusat di kawasan perkotaan Kudus dan Rembang terdiri dari Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora;
5. Wilayah pengembangan (WP) Subosukawonosraten berpusat di kawasan perkotaan Surakarta terdiri dari Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen Kabupaten Klaten, dan Kota Surakarta;
6. Wilayah pengembangan (WP) Purwomanggung berpusat di kawasan perkotaan Magelang terdiri dari Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang;
7. Wilayah pengembangan (WP) Barlingmascakeb berpusat di kawasan perkotaan Purwokerto terdiri dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan pembangunan maka diperlukan upaya mengurangi kesenjangan/disparitas antarwilayah dan dalam wilayah pengembangan. Pembangunan di Jawa Tengah diarahkan untuk mendorong wilayah yang lambat berkembang serta mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif. Kesenjangan/disparitas kabupaten/kota dalam wilayah pengembangan adalah sebagai berikut:

1. WP Bregasmalang memiliki kesenjangan/disparitas sedang. Kondisi PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota tidak terpaut terlalu jauh namun mayoritas di bawah rata-rata provinsi kecuali Kota Tegal bahkan di atas rata-rata nasional. Sedangkan IPM semua kabupaten/kota di bawah rata-rata provinsi, dan tingkat kemiskinan rata-rata di atas provinsi dan nasional;
2. WP Petanglong memiliki kesenjangan/disparitas rendah. Kondisi PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota rendah dan di bawah rata-rata provinsi, IPM mayoritas rendah di bawah rata-rata provinsi, dan tingkat kemiskinan mayoritas di bawah rata-rata provinsi dan nasional;
3. WP Kedungsepur memiliki kesenjangan/disparitas tinggi. Kota Semarang dan Kota Salatiga memiliki PDRB per kapita yang tinggi di atas rata-rata nasional. Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata provinsi. Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan memiliki PRDB per kapita di bawah rata-rata provinsi. Di wilayah Kedungsepur ini terjadi kesenjangan/disparitas antara *primary city* dengan *secondary city* yang cukup tinggi;
4. WP Jekutibanglor memiliki kesenjangan/disparitas sedang. Kondisi PDRB per kapita antar kabupaten/kota tidak terpaut terlalu jauh, namun mayoritas di bawah rata-rata provinsi kecuali Kabupaten Kudus di atas rata-rata nasional;
5. WP Subosukawonosraten memiliki kesenjangan/disparitas sedang. Kondisi PDRB per kapita antar kabupaten/kota tidak terpaut jauh dan tingkat kemiskinan mayoritas berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional;
6. WP Purwomanggung memiliki kesenjangan/disparitas rendah. Kondisi PDRB per kapita antarkabupaten berada di bawah rata-rata provinsi, IPM tidak terlalu jauh disparitasnya, dan tingkat kemiskinan mayoritas masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional;
7. WP Barlingmascakeb memiliki kesenjangan/disparitas tinggi dikarenakan PDRB per kapita Kabupaten Cilacap di atas rata-rata provinsi, namun kabupaten lainnya di bawah rata-rata provinsi. Kondisi sumberdaya manusia juga tidak merata, dan investasi berfokus pada *primary city* sehingga terjadi kesenjangan antara *primary city* dengan *secondary city*.

Pengembangan tujuh wilayah pengembangan tersebut bertujuan untuk lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk, serta menciptakan pemerataan pembangunan yang berciri kuat dengan terciptanya produk unggulan.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Revisi RTRW)

Gambar 7.6

Persandingan Sektor Unggulan Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Kebijakan pembangunan pada tujuh wilayah pengembangan tersebut terintegrasi dalam RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 agar tercipta arah pembangunan wilayah yang berdaya saing yang memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan.

7.3. Arah Per Wilayah Pengembangan

7.3.1. Wilayah Pengembangan (WP) Kedungsepur

a. Isu strategis WP Kedungsepur

Secara kewilayahan, terdapat beberapa isu strategis di WP Kedungsepur yang mempunyai dampak secara regional di Provinsi Jawa Tengah dan memerlukan perhatian untuk dapat diselesaikan secara bertahap dalam jangka menengah tahun 2024–2026. Isu strategis di wilayah Kedungsepur antara lain:

1. Dimensi sumberdaya manusia
 - a. Kemiskinan terutama terkait dengan kesejahteraan petani;
 - b. Kompetensi dan keterampilan tenaga kerja yang belum sesuai potensi kebutuhan kawasan industri yang sedang dikembangkan;
 - c. *Stunting* di antaranya terkait dengan kualitas penyediaan air bersih dan pemenuhan gizi anak;
 - d. Masih adanya anak putus sekolah.
2. Dimensi perekonomian
 - a. Pengembangan aglomerasi pariwisata yang masih perlu didukung dengan pemenuhan infrastruktur dan promosi bersama yang melibatkan pelaku wisata, ekonomi kreatif dan UMKM;
 - b. Tingkat produktivitas pertanian dan pemenuhan cadangan pangan terutama terkait dengan *food supply chain* untuk mencegah inflasi;
 - c. Peningkatan jaringan irigasi dan pemenuhan infrastruktur pendukung investasi yang masih perlu ditingkatkan.

3. Dimensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup:
 - a. Banjir, sedimentasi, rob, abrasi, dan *land subsidence*;
 - b. Konservasi lingkungan yang perlu lebih terintegrasi dari hulu – hilir;
 - c. Pencegahan alih fungsi lahan.

b. Analisis capaian kinerja pembangunan WP Kedungsepur

Capaian kinerja indikator makro pembangunan di WP Kedungsepur yang masih memerlukan perhatian karena di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan nasional adalah dari aspek penanganan pengangguran. Capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) empat kabupaten/kota di WP Kedungsepur pada tahun 2022 di bawah capaian TPT provinsi. Secara rata-rata angka kemiskinan di WP Kedungsepur juga memerlukan perhatian karena di atas angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Secara lengkap capaian kinerja indikator makro pembangunan di WP Kedungsepur pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7.1.

Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Kedungsepur Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%)	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Grobogan	5,98	11,80	4,40	70,97
2	Kabupaten Demak	5,25	12,09	6,11	73,76
3	Kabupaten Semarang	5,31	7,27	4,81	74,67
4	Kabupaten Kendal	5,69	9,48	7,34	73,19
5	Kota Semarang	5,73	4,25	7,60	84,08
6	Kota Salatiga	5,53	4,73	5,58	84,35
Rata-rata WP		5,58	8,27	5,97	76,84
Jawa Tengah		5,31	10,93	5,57	72,79
Nasional		5,31	9,57	5,86	72,91

Sumber: BPS,2022

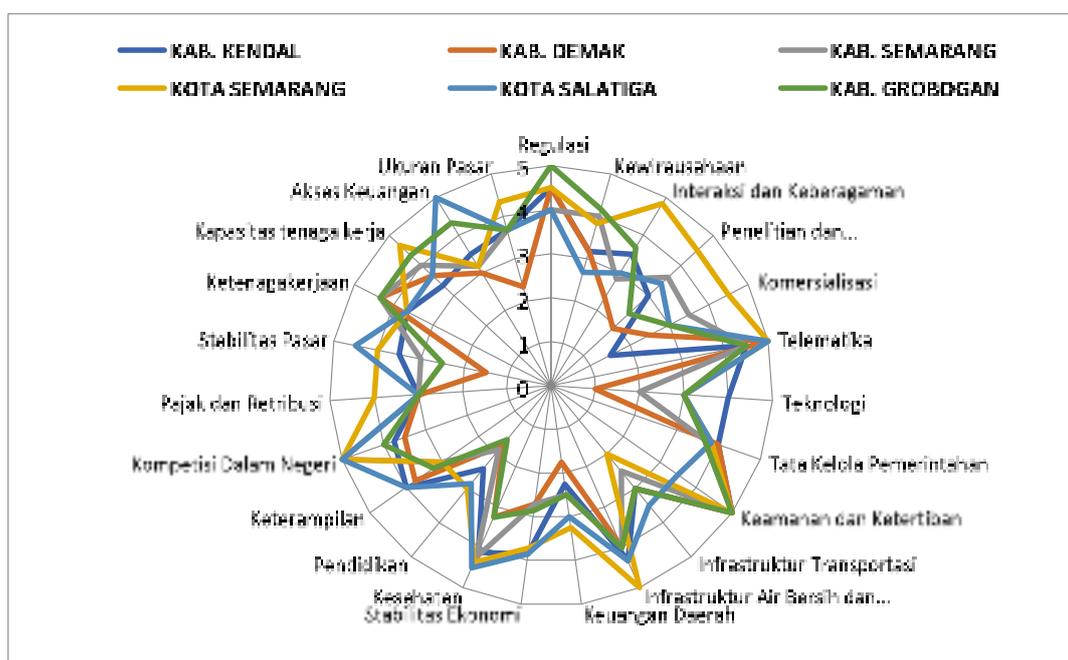
Di WP Kedungsepur terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah di antaranya sektor perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, *real estate*, serta penyediaan akomodasi dan pengadaan air. Kawasan strategis di WP Kedungsepur yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya antara lain Kawasan Masjid Agung Demak (Kawasan Strategis Provinsi/KSP) dan Candi Gedongsongo (KSP);
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi antara lain Kawasan Perkotaan Kedungsepur (Kawasan Strategis Nasional/KSN), Kawasan Industri (KI) Kendal–Semarang–Demak (KSP), dan Kawasan Agropolitan Semarbojong (KSP);
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain Kawasan Rawa Pening (KSP).

c. Analisis daya saing WP Kedungsepur

Nilai rata-rata Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) WP Kedungsepur tahun 2022 adalah sebesar 3,577, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya sebesar

3,531. Nilai ini merupakan yang tertinggi kedua jika dibandingkan dengan WP lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dalam tinjauan internal WP Kedungsepur, nilai IDSD Kota Semarang merupakan yang tertinggi yakni sebesar 3,937. Untuk nilai IDSD Kota Salatiga dan Kabupaten Kendal berada di atas rata-rata nilai IDSD WP Kedungsepur dengan nilai masing-masing sebesar 3,812 dan 3,628. Di sisi lain, nilai IDSD Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak berada di bawah rata-rata nilai IDSD WP Kedungsepur, dengan nilai masing-masing sebesar 3,499, 3,481, dan 3,107. Secara umum, nilai IDSD WP Kedungsepur ini memiliki kecenderungan yang rendah pada dimensi pendidikan, keuangan daerah, dan infrastruktur transportasi. Selain itu, penilaian pada dimensi teknologi dan stabilitas pasar, beberapa kabupaten/kota memiliki nilai sangat rendah terutama Kabupaten Demak.



Sumber: Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.7

Nilai IDSD Kabupaten/Kota di WP Kedungsepur Tahun 2022

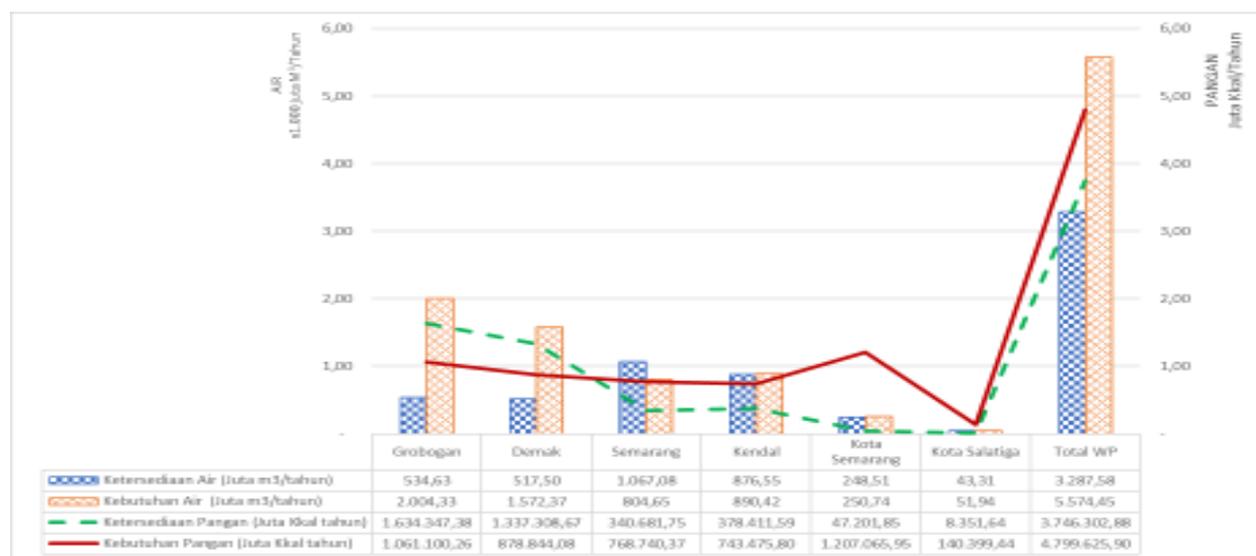
Kondisi daya saing WP Kedungsepur masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai beberapa indikator faktor pendukung daya saing yang masih rendah, antara lain pada dimensi teknologi dan stabilitas pasar. Beberapa indikator yang berkontribusi pada rendahnya nilai daya saing wilayah ini antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, rendahnya investasi nasional, rendahnya kapasitas infrastruktur jalan, serta kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi.

Dengan memperhatikan potensi pengembangan perdagangan dan jasa pada wilayah ini, serta memperhatikan fungsi dan peran, maka penguatan interaksi antarkabupaten/kota perlu ditingkatkan dalam rangka efisiensi. Berkaitan dengan hal ini, maka perlu peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan kreativitas untuk meningkatkan pendapatan daerah, serta penguatan investasi produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal tinggi. Di samping itu, penguatan kolaborasi perlu dilakukan antara lain dengan perguruan tinggi lokal untuk peningkatan inovasi dan teknologi.

d. Analisis daya dukung dan daya tampung terhadap air dan pangan di WP Kedungsepur

Daya dukung dan daya tampung terhadap air dan pangan di WP Kedungsepur telah terlampaui. Dari enam kabupaten/kota di WP Kedungsepur hanya Kabupaten Semarang yang status daya dukung dan daya tampung airnya masih belum terlampaui. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi dengan memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan akan penyediaan air. Untuk itu diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui pembangunan waduk, bendungan, pengendalian beban pencemar pada sungai serta pemulihan kerusakan *catchment area* pada daerah hulu untuk memenuhi kebutuhan air.

Adapun daya dukung dan daya tampung pangan yang telah terlampaui dimiliki oleh Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kota Salatiga. Sementara Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak status daya dukung dan daya tampung pangannya masih belum terlampaui. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, konsumsi beras diturunkan, serta konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.



Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.8

Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Kedungsepur

e. Sasaran kinerja pembangunan WP Kedungsepur

Untuk mencapai sasaran kinerja pembangunan daerah jangka menengah di Provinsi Jawa Tengah yang diukur dengan empat indikator kinerja makro pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, TPT, dan IPM, diperlukan dukungan sasaran kinerja pembangunan daerah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan memperhitungkan capaian kinerja pada tahun 2022 dan target kinerja pada tahun 2023 dari keempat indikator makro tersebut maka dukungan sasaran kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di WP Kedungsepur pada tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 7.2.
Sasaran Kinerja Pertumbuhan Ekonomi (%) WP Kedungsepur
Tahun 2024-2026

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Kabupaten Grobogan	4,00 – 6,00	5,67 – 6,11	5,79 – 6,33
2	Kabupaten Demak	5,55 – 5,94	5,79 – 6,05	5,90 – 6,26
3	Kabupaten Semarang	5,20 – 5,60	5,42 – 5,70	5,53 – 5,91
4	Kabupaten Kendal	5,50 – 5,95	5,73 – 6,06	5,85 – 6,27
5	Kota Semarang	5,70 – 6,50	5,94 – 6,62	6,06 – 6,85
6	Kota Salatiga	5,29 – 5,96	5,52– 6,07	5,63 – 6,28

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.3.
Sasaran Kinerja Angka Kemiskinan (%) WP Kedungsepur
Tahun 2024-2026

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Kabupaten Grobogan	10,03 – 10,64	9,93 – 9,64	9,51 – 9,13
2	Kabupaten Demak	11,02 – 10,42	10,19 – 9,89	9,76 – 9,37
3	Kabupaten Semarang	7,10 – 6,34	6,24 – 6,06	6,01 – 5,79
4	Kabupaten Kendal	9,39 – 8,15	7,79 – 7,72	7,40 – 7,32
5	Kota Semarang	4,00 – 3,82	3,73 – 3,70	3,63 – 3,59
6	Kota Salatiga	4,32 – 4,18	3,80 – 3,73	3,58 – 5,84

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tabel 7.4.
Sasaran Kinerja TPT (%) WP Kedungsepur Tahun 2024-2026

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Kabupaten Grobogan	4,18	4,00 – 3,98	3,77 – 3,64
2	Kabupaten Demak	6,10 – 5,10	5,83 – 4,75	5,49 – 4,44
3	Kabupaten Semarang	4,50 – 4,00	4,19 – 3,82	3,92 – 3,60
4	Kabupaten Kendal	5,43	5,19 – 5,06	4,89 – 4,73
5	Kota Semarang	7,60 – 6,50	7,26 – 6,05	6,85 – 5,66
6	Kota Salatiga	5,70 – 5,20	5,45 – 4,84	5,13 – 4,53

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.5.
Sasaran Kinerja IPM WP Kedungsepur Tahun 2024-2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1	Kabupaten Grobogan	72,10	72,91	73,90
2	Kabupaten Demak	73,92	74,26	74,58
3	Kabupaten Semarang	75,20	75,60	76,00
4	Kabupaten Kendal	75,61	75,38	76,01
5	Kota Semarang	84,4–86,00	86,67	87.35
6	Kota Salatiga	85,10	85,69	86,18

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

f. Indikasi program pembangunan WP Kedungsepur

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, diperlukan beberapa strategi dan rencana program yang secara terintegrasi lintas kewenangan dan sektor. Di WP Kedungsepur terdapat

beberapa proyek strategis nasional (PSN), program prioritas strategis nasional (*Majorproject* RPJMN), indikasi program penataan ruang (RTRW) dan rencana program sektoral yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, diantaranya:

1. PSN antara lain pembangunan jalan tol (Semarang–Demak, Bawen–Yogyakarta, dan Semarang *Harbour*); pengembangan kereta api Jakarta–Surabaya; pengembangan *underground* Simpang Lima Kota Semarang; pembangunan Bendung Jragung Kabupaten Semarang; rehabilitasi daerah irigasi Glapan (Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan); pembangunan SPAM Semarang Barat, dan pembangunan transmisi pipa gas ruas Cirebon–Semarang;
2. RPJMN antara lain pengembangan kereta api kecepatan tinggi Pulau Jawa (Jakarta–Semarang); pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan metropolitan Semarang; pengamanan pesisir perkotaan pantura Jawa (Kota Semarang dan Kabupaten Demak); revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan tambak di pantura Jawa;
3. RTRW antara lain memadukan pembangunan Kota Semarang dan wilayah sekitarnya didasarkan pada sektor unggulan yang meliputi perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, *real estate*, penyediaan akomodasi, pengadaan air, dan pariwisata;
4. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) antara lain pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional Joglosemar dan Kedungsepur; dan pengembangan jaringan dan layanan kereta api perkotaan Semarang.

Selain itu, terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada tahun 2024–2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota di WP Kedungsepur antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, di antaranya melalui:
 - a. Penyediaan rumah/unit hunian untuk golongan menengah bawah seperti pekerja industri di wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) Semarang-Kendal-Demak dan Kabupaten Grobogan, serta petani yang lahannya ditetapkan sebagai bagian dari LSD;
 - b. Peningkatan layanan penyediaan air bersih pada permukiman di kampung pesisir dan padat;
 - c. Peningkatan jaminan ketersediaan pangan (makanan pokok baik nabati maupun hewani);
 - d. Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
2. Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas di antaranya melalui peningkatan pendidikan kejuruan yang dibutuhkan sektor industri di WPPI dan Kawasan peruntukan industri (KPI);
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, di antaranya melalui peningkatan pelayanan, sebaran dan kualitas pelayanan kesehatan ditingkat bawah (puskesmas-polindes) terutama di kawasan perbatasan dan perdesaan yang aksesnya masih rendah;
4. Peningkatan sektor ketenagakerjaan, di antaranya melalui:
 - a. Meningkatkan penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan

- industri dan dunia usaha khususnya disektor perdagangan dan jasa (tekstil dan produk tekstil, alas kaki, barista, *housekeeping*);
- b. Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - c. Peningkatan kompetensi instruktur dan *upgrading* prasarana dan sarana balai latihan kerja (BLK) dan SMK;
 - d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
5. Pemantapan ketahanan pangan, di antaranya melalui:
- a. Pengendalian alih fungsi lahan baku sawah (LSD) ataupun LP2B (sawah utama);
 - b. Peningkatan pasokan air baku, khususnya di masa tanam kedua dan ketiga;
 - c. Rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi (DI) Dolok, DI Penggaron, DI Pelayaran, DI Sinongko, DI Sojomerto, DI Senjoyo, DI Kedungwaru, DI Isep-isep, DI Kedung Pengilon, dan DI Guntur;
 - d. Rehabilitasi Embung Triharjo, Embung Bancak, Embung Jeruk Gulung, dan Embung Sido Kumpul;
 - e. Penyediaan pasar stasiun agro untuk memudahkan petani menjual produk dan untuk menjaga tingkat harga (menghindari tengkulak).
6. Peningkatan ketahanan air dan lahan berbasis ekoregion di antaranya ditempuh melalui:
- a. Peningkatan ketahanan air, terutama normalisasi sistem Sungai Silandak Semarang, anak sungai Rawa Pening; pembangunan perkuatan tebing Sungai Blukar, Sungai Bodri, Sungai Waridin; rehabilitasi pesisir Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang; pembangunan waduk dan bendungan di antaranya Waduk Jragung dengan salah satu fungsinya sebagai SPAB Jragung untuk menyediakan SPAM Kota Semarang – Grobogan - Demak, Bendungan Bodri Kabupaten Kendal, Bendung Karet Sungai Bodri Kabupaten Kendal; pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Semarang-Demak, CAT Kudus, CAT Kendal, CAT Subah, CAT Sumowono, CAT Ungaran, CAT Rawapening, CAT Salatiga, dan CAT Magelang-Temanggung;
 - b. Peningkatan ketahanan lahan, terutama rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS Tuntang, DAS Bodri, DAS Garang; rehabilitasi dan konservasi Rawa Pening; inisiasi pengembangan Tahura Gunung Ungaran; pengawasan usaha pertambangan serta penertiban pertambangan tanpa izin (PETI).
7. Peningkatan daya saing pariwisata, di antaranya melalui:
- a. Dukungan promosi bersama untuk daya tarik wisata Jateng Valley, wisata religi, kawasan wisata Rawa Pening, Candi Gedongsongo, serta pengembangan daya tarik Kota Lama dan kampung wisata di pinggiran Kota Semarang;

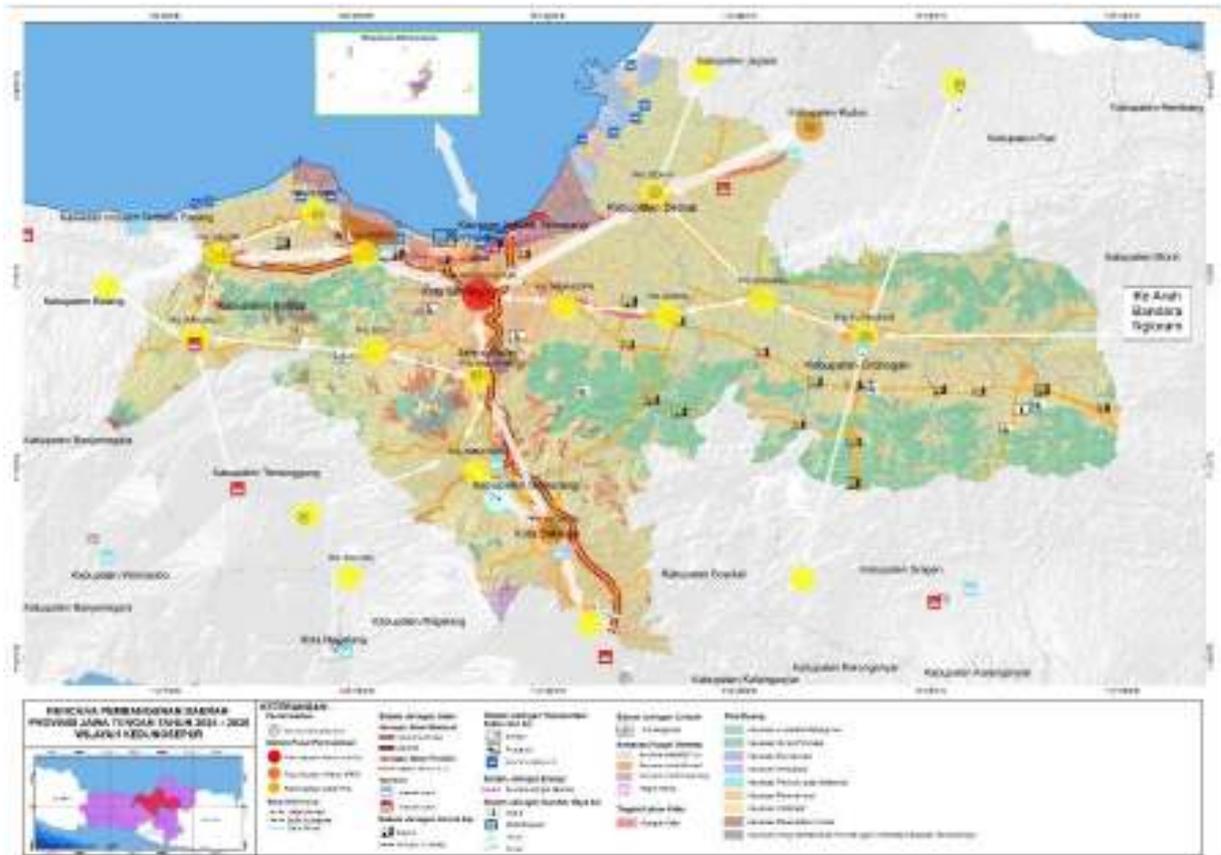
- b. Pengembangan desa wisata berbasis konservasi di dataran tinggi (Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal);
 - c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
 - d. Fasilitasi *event* promosi pariwisata di kawasan strategis pariwisata provinsi (KSPP) Kota Semarang dan sekitarnya, KSPP Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya, dan KSPP Kendal dan sekitarnya.
8. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, di antaranya melalui:
 - a. Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
 - b. Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
 - c. Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
 - d. Pendampingan pelatihan *digital marketing* bagi pelaku UMKM.
 9. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, di antaranya melalui:
 - a. Peningkatan sistem jaringan jalan, terutama pada penuntasan koridor Semarang–Purwodadi–Blora, Purwodadi–Gemolong–Solo; peningkatan koridor Wirosasri–Singget (ke arah Cepu), dan Salatiga–Gubug.
 - b. Penyediaan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan pada koridor Stasiun Tawang–Terminal Bawen, Terminal Mangkang–Weleri, dan Terminal Penggaron–Gubug via Godong;
 - c. Pengembangan simpul transportasi, terutama peningkatan terminal tipe B Purwodadi.
 10. Peningkatan ketahanan energi, di antaranya melalui fasilitasi pengembangan transmisi SUTET Ungaran–Ampel–Pedan sirkit II, fasilitasi gardu induk (GI) 150 KV KTT KEK Kendal dan SUTT Inc (Weleri–Kaliwungu) dan Tambak Lorok II/Gajah, dan SUTT Inc (Sayung–Kudus); pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) potensi lokal (biogas, gas rawa, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap); fasilitasi pemanfaatan energi alternatif berbasis potensi lokal (pengembangan panas bumi wilayah kerja penambangan (WKP) Gunung Ungaran dan WKP Umbul Telomoyo), dan fasilitasi pembangunan pipa gas distribusi Semarang–Batang–Cirebon.

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan kabupaten/kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan simpul transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota (terminal tipe C) dan *re-routing* trayek angkutan perkotaan dan/atau pedesaan sebagai upaya integrasi rencana pengembangan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan;
- 2) Peningkatan status terminal tipe C Sukorejo Kabupaten Kendal menjadi terminal tipe B;
- 3) Peningkatan penyediaan jaringan jalan wisata antarkabupaten di antaranya ruas jalan kabupaten penghubung Kabupaten Semarang–Kabupaten Demak, ruas Ambarawa–Limbangan–Bawang;
- 4) Peningkatan kapasitas jalan antarpusat kegiatan lokal (PKL) dan pusat pelayanan Kawasan (PPK) untuk meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat pertumbuhan/produksi di pedesaan;

- 5) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, di antaranya melalui penanganan *stunting* dengan peningkatan kualitas air bersih dan peningkatan pengetahuan orang tua terkait pemberian gizi dan pola asuh anak.

Arah pengembangan wilayah untuk WP Kedungsepur dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.9

Arah Pengembangan Wilayah Pengembangan Kedungsepur

7.3.2. Wilayah Pengembangan Jekutibanglor

a. Isu Strategis Wilayah Jekutibanglor

Secara kewilayahan, terdapat beberapa isu strategis di wilayah Jekutibanglor yang mempunyai dampak secara regional ditingkat Jawa Tengah dan memerlukan perhatian untuk dapat diselesaikan secara bertahap secara jangka menengah 2024 – 2026, antara lain:

- 1) Dimensi Sumber Daya Manusia:
 - a. Peningkatan pendidikan calon pencari kerja dan kompetensi tenaga kerja;
 - b. Peningkatan penanganan anak putus sekolah (pekerja anak usia sekolah) dan peningkatan rata-rata lama sekolah;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penyediaan akses rumah sakit.
- 2) Dimensi Perekonomian:
 - a. Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pengembangan pariwisata dan industri serta peningkatan aksesibilitas dengan Provinsi Jawa Timur;
 - b. Pengembangan potensi industri perikanan dan kelautan di kawasan pesisir utara;
 - c. Peningkatan penyaluran hasil pertanian dengan terminal agribisnis.
- 3) Dimensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
 - a. Penyediaan air baku untuk air minum dan pertanian;
 - b. Penanganan daerah aliran sungai dan konservasi lingkungan secara terpadu (hulu hilir) untuk pengendalian banjir, penanganan pesisir pantai

- utara secara komprehensif dan menyeluruh untuk mengatasi permasalahan banjir, rob, abrasi dan sedimentasi;
- c. Pengelolaan pertambangan terutama pada pencegahan tambang ilegal dan pemanfaatan potensi migas;
- d. Penanganan kawasan permukiman kumuh;
- e. Pencegahan alih fungsi lahan.

b. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Wilayah Jekutibanglor

Capaian kinerja pembangunan makro di Jekutibanglor yang masih memerlukan perhatian yaitu IPM dan Pertumbuhan Ekonomi karena secara rata-rata masih dibawah capaian Jawa Tengah dan Nasional. Secara lengkap capaian makro pembangunan di Wilayah Pengembangan Wanarakuti dan Banglor pada Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.6.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Jekutibanglor Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%) 2022	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Jepara	5,95	6,88	4,10	73,15
2	Kab. Kudus	2,23	7,41	3,21	75,89
3	Kab. Pati	5,56	9,33	4,45	73,14
4	Kab. Blora	2,68	11,53	3,70	69,95
5	Kab. Rembang	5,55	14,65	1,76	71,00
Rata-Rata WP		4,39	9,96	3,44	72,63
Jawa Tengah		5,31	10,93	5,57	72,79
Nasional		5,31	9,57	5,86	72,91

Sumber: BPS,2022

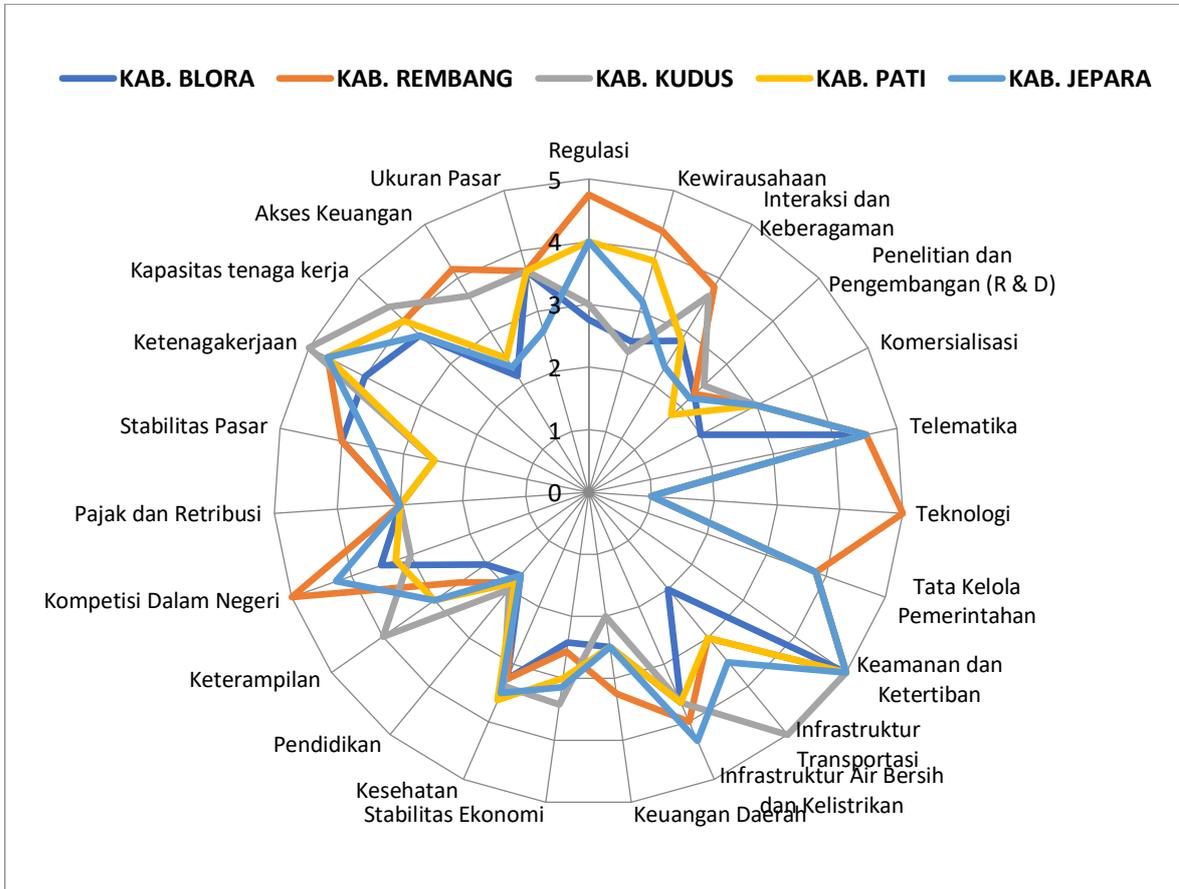
*) Menunggu release BPS untuk PE Tahun 2022, Maret 2022

Di Wilayah Pengembangan Rangkutibanglor terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah, diantaranya: Perdagangan dan Jasa, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Penyediaan Akomodasi. Sedangkan untuk Banglor terdiri dari: Pertambangan dan Penggalian, Penyediaan Akomodasi, Perdagangan dan Jasa

Kawasan strategis yang berada di Wilayah Pengembangan Rangkutibanglor yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain : Kawasan Industri Rembang; Destinasi Pariwisata Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya; Kawasan Strategis Pariwisata Rembang – Lasem dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Pariwisata Blora – Cepu dan sekitarnya.

c. Analisis Daya Saing Wilayah Jekutibanglor

Nilai rata-rata IDSD Wilayah Jekutibanglor tahun 2022 adalah sebesar 3,271, menurun dari rata-rata tahun sebelumnya 3,392. Nilai rata-rata IDSD wilayah ini merupakan yang tertinggi ke-5. Dalam tinjauan internal wilayah Jekutibanglor, nilai IDSD yang tertinggi sebesar 3,619 milik Kabupaten Rembang. Nilai IDSD Kabupaten Kudus merupakan tertinggi ke-2 di wilayah ini, dengan nilai sebesar 3,385. Selain itu, nilai IDSD pada Kabupaten Pati, Jepara, dan Blora, masing-masing sebesar 3,238; 3,196; dan 2,917, berada di bawah rata-rata nilai IDSD Wilayah Pakujembara. Secara umum nilai ini masih relatif rendah pada Dimensi Pendidikan, Teknologi, serta Penelitian dan Pengembangan.



Sumber: Diolah berdasarkan hasil Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.10
Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Jekutibanglor Tahun 2022

Kondisi daya saing wilayah Jekutibanglor masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Beberapa indikator pada faktor pendukung daya saing wilayah ini masih lemah, khususnya pada jumlah masyarakat berpendidikan tinggi maupun berkeahlian (*skilled*), rendahnya kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi, serta geliat ekonomi lokal pada sektor UMKM yang cenderung pasif. Dalam rangka mendukung pengembangan potensi perdagangan dan jasa pada wilayah ini, maka diperlukan program dalam rangka meningkatkan pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK serta kemampuan keahlian (*skill*). Di samping itu, perlu penguatan investasi produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal tinggi, serta penguatan kolaborasi perlu dilakukan, antara lain dengan perguruan tinggi lokal untuk peningkatan inovasi dan teknologi.

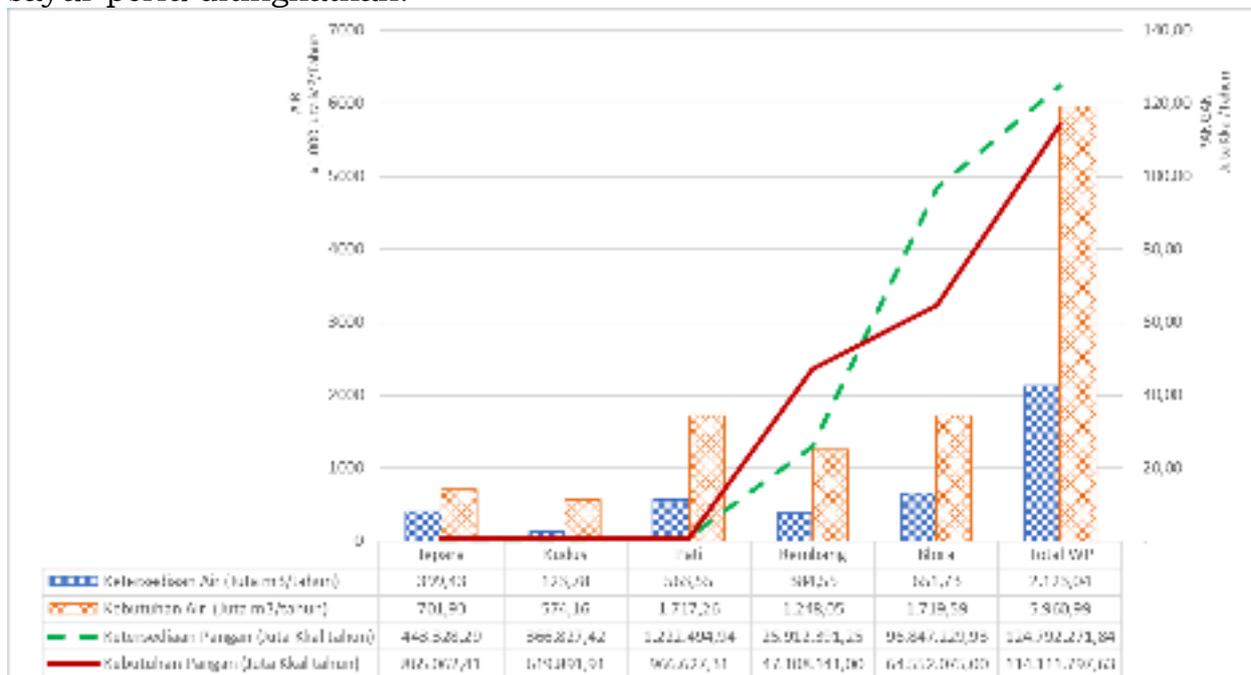
d. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air dan Pangan di Wilayah Rangkutibanglor

Kondisi daya dukung dan daya tampung air di lima kabupaten/kota wilayah Jekutibanglor telah terlampaui. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui pembangunan waduk, bendungan, serta rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Status daya dukung dan daya tampung pangan di kabupaten Rembang telah terlampaui, akan tetapi di Kabupaten Blora masih terpenuhi. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

Sementara itu kondisi Daya dukung dan daya tampung pangan di wilayah Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus telah terlampaui, sedangkan

di Kabupaten Pati masih terpenuhi. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.



Sumber: Analisis dari Dokumen D3TLH Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.11
Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Jekutibanglor

e. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Jekutibanglor

Dalam rangka untuk mencapai target pembangunan jangka menengah di Jawa Tengah, diperlukan dukungan dari Kabupaten/Kota di wilayah pengembangan Jekutibanglor pada tahun 2024 sampai 2026 dengan memperhitungkan target pada RKPDP Provinsi Tahun 2022 dan 2023 untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 7.7.
Target Kinerja Pertumbuhan Ekonomi (%) WP Jekutibanglor Tahun 2024 - 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1	Kab. Jepara	5,20 – 6,20	5,42 – 6,31	5,53 – 6,54
2	Kab. Kudus	2,50 – 3,50	2,61 – 3,56	2,71 – 3,69
3	Kab. Pati	4,36 – 5,28	4,55 – 5,38	4,64 – 5,57
4	Kab. Blora	5,37 – 6,06	5,60 – 6,17	5,71 – 6,39
5	Kab. Rembang	4,53 – 5,33	4,72 – 5,43	4,82 – 5,62

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.8.
Target Kinerja Angka Kemiskinan (%) WP Jekutibanglor Tahun 2024 - 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1	Kab. Jepara	6,65 – 5,95	5,67 – 5,52	5,40 – 5,19
2	Kab. Kudus	6,96	5,75 – 5,36	5,60 – 5,18
3	Kab. Pati	8,58 - 8,3	7,79 – 7,80	7,67 – 7,44
4	Kab. Blora	10,31-10,23	9,97 – 9,86	9,64 – 9,49
5	Kab. Rembang	13,35-13,19	12,35 -12,10	11,83 – 11,50

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.9.
Target Kinerja TPT (%) WP Jekutibanglor Tahun 2022 - 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1	Kab. Jepara	4,00 – 3,60	3,82 – 3,35	3,60 – 3,13
2	Kab. Kudus	3,19	3,05 – 2,97	2,87 – 2,78
3	Kab. Pati	3,66 – 3,32	3,50 – 3,09	3,30 – 2,89
4.	Kab. Blora	4,27 – 3,88	4,08 – 3,61	3,85 – 3,38
5.	Kab. Rembang	3,38 – 3,07	3,23 – 2,86	3,04 – 2,67

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.10.
Target Kinerja IPM WP Jekutibanglor Tahun 2022 - 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1	Kab. Jepara	74,00	74,46	75,14
2	Kab. Kudus	76,32 – 76,78	78,08	78,67
3	Kab. Pati	74,34	74,98	75,61
4	Kab. Blora	71,1	72,03	72,91
5	Kab. Rembang	72,04	72,86	73,63

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

f. Indikasi Program Pembangunan Jekutibanglor 2024 – 2026)

Dalam rangka mencapai target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, diperlukan beberapa upaya penanganan secara terintegrasi lintas kewenangan dan sektor.

Di Wilayah Pembangunan Wanarakuti dan Banglor terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Prioritas Strategis Nasional (*Majorproject* RPJMN), Indikasi Program Penataan Ruang (RTRW) dan Rencana Sektorial yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, diantaranya:

- 1) PSN: Bendungan Randugunting
- 2) RPJMN: Pembangunan Desa Terpadu; Pengembangan komoditas unggulan Kopi; Peningkatan komoditas unggulan tebu; Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap
- 3) RTRW: Pengembangan sektor unggulan berbasis Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa, Perikanan, Pertambangan dan Pariwisata, peningkatan kualitas jalur logistik ke pelabuhan Tanjung mas dari KPI serta Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih, peningkatan kerapatan dan kualitas jalan khususnya jalan penghubung antar kabupaten dan antar PKL.
- 4) Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS): Reaktivasi dan Peningkatan (Revitalisasi) Jalur KA Semarang - Demak – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo – Bojonogoro.

Terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada Tahun 2024 – 2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten / kota antara lain:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya melalui: Peningkatan penyediaan rumah layak huni untuk MBR; Peningkatan layanan air bersih; Peningkatan layanan sanitasi dan persampahan di perkotaan/ permukiman padat; Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
- 2) Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, diantaranya melalui: Peningkatan akses pendidikan dasar 9 tahun.
- 3) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, diantaranya melalui: Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Parang-Nyamuk).

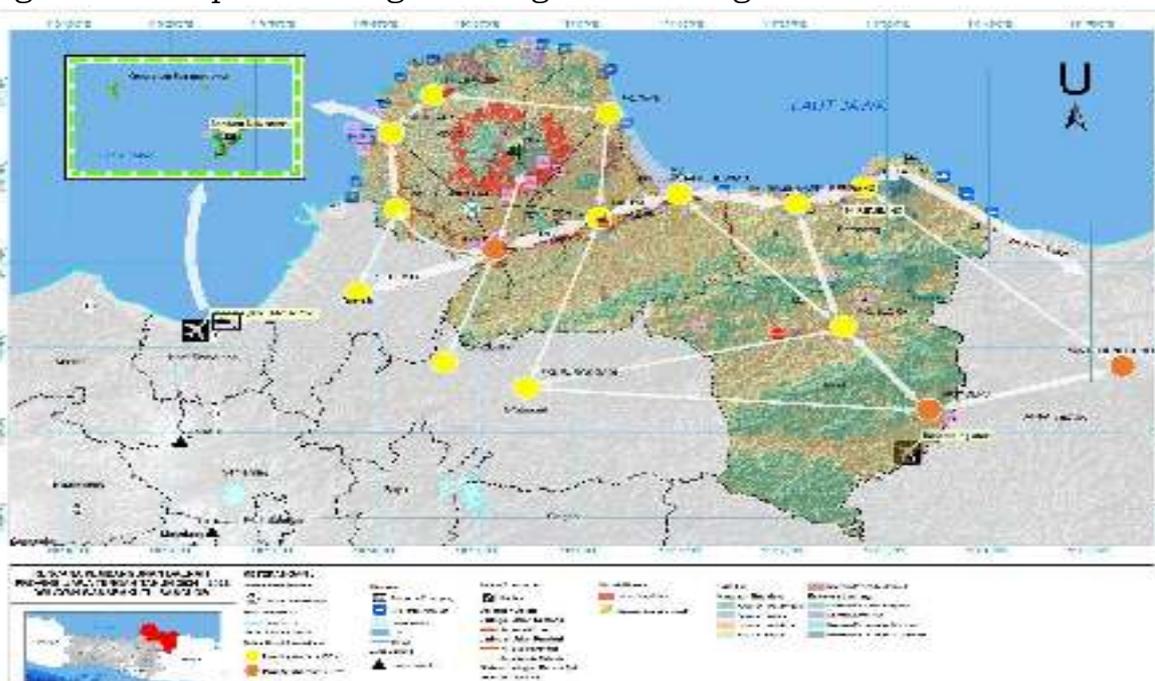
- 4) Peningkatan sektor ketenagakerjaan, diantaranya melalui:
 - Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (pengolahan non kayu, pengolahan baku lokal (kayu jati), dll);
 - Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - *Upskilling* terhadap instruktur dan *upgrading* sarana prasarana BLK dan SMK;
 - Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
- 5) Pemantapan ketahanan pangan, diantaranya melalui :
 - Pengembangan kegiatan mina industri (perikanan budidaya bandeng) dan perikanan tangkap (kepiting/rajungan); Perlindungan lahan pangan berkelanjutan;
 - Rehabilitasi jaringan irigasi DI Siwayut, DI Kramat, DI Medani, DI Jaban, DI Kedungsapen, DI Widodaren, DI Logung;
 - Rehabilitasi Embung Ketileng, Embung Sridadi, Embung Dukuh Mulyo, Embung Tamansari, Embung Sidokerto, dan Embung Sembatur Agung.
- 6) Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion diantaranya ditempuh melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan air, utamanya pada: Fasilitasi Penanganan DAS Sungai Juwana dan Fasilitasi Inisiasi Proses Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dadi Muria; Pembangunan Bendungan Karangnongko. Kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Lasem, CAT Randublatung, CAT Watuputih, CAT Semarang-Demak, CAT Jepara, CAT Pati-Rembang.
 - b. Peningkatan ketahanan lahan, utamanya pada: Pengelolaan pertambangan terutama pada jalur tambang di Kendeng; Rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Solo, DAS Serang, DAS Juwana, Kawasan Pati Ayam dan Kawasan Muria, Pendampingan pengembangan geopark Kawasan Cepu; Pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.
- 7) Peningkatan daya saing pariwisata, diantaranya melalui:
 - Fasilitasi integrasi pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) Karimunjawa dan Aglomerasi wisata religi Pati-Kudus-Demak (Raden Patah, Sunan Kalijaga, Sunan Muria dan Sunan Kudus);
 - Pengembangan destinasi wisata baru berbasis potensi lokal (ex desa pertambangan minyak tradisional, kereta api mesin uap dengan bahan bakar kayu jati), wisata alam (karst dan hutan jati);
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
 - Fasilitasi Event Promosi Pariwisata di Wilayah KSPP Karimunjawa dan sekitarnya, KSPP Demak-Kudus dan sekitarnya serta KPPP Pati dan sekitarnya.
- 8) Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantaranya melalui :
 - Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
 - Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan;
 - Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
 - Pendampingan pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM.

- 9) Peningkatan investasi, diantaranya melalui: Inisiasi proses pembangunan kawasan industri utamanya memfasilitasi investor masuk;
- 10) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, diantaranya melalui:
 - Peningkatan sistem jaringan jalan, utamanya pada: penuntasan ruas Lasem – Sale (perbatasan provinsi Jawa Timur); peningkatan jalan koridor Cepu – Singget (ke arah Grobogan), koridor Jepara – Keling – Pati, koridor Juwana – Ngawen.
 - Pengembangan simpul transportasi, diantaranya melalui: fasilitasi pengembangan Bandara Ngloram Cepu; fasilitasi pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Sluke Rembang.
 - Pengembangan simpul transportasi, utamanya: peningkatan Terminal Tipe B Gagak Rimang Kabupaten Blora.
- 11) Peningkatan ketahanan energi, diantaranya melalui: Fasilitasi pengembangan gardu induk 150kV Kudus II/Nalumsari dan SUTT Inc (Kudus – Jepara); Fasilitasi Rencana Pengembangan Lapangan Pertama (POD I) lapangan RBG Blok I wilayah Kerja Blora; Pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (Biogas, Gas Rawa, PLTMH, PLTS Atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, diantaranya melalui: Penuntasan jalan akses menuju Bandara Ngloram;
- 2) Peningkatan status Terminal Tipe C Lasem Rembang, Welahan Jepara dan di Kabupaten Pati menjadi Terminal Tipe B;
- 3) Penyediaan infrastruktur dasar industri (jalan menuju KPI dan ketersediaan air baku untuk mendukung industri);
- 4) Penanganan sampah dan limbah B3, diantaranya melalui : penyediaan TPA
- 5) Peningkatan daya saing pariwisata, diantaranya melalui: pengembangan Kota Pusaka Lasem.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Jekutibanglor untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut:



Sumber: Analisis, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.12
Arah Pengembangan Wilayah Jekutibanglor

7.3.3. Wilayah Pengembangan Purwomanggung

a) Isu Strategis Wilayah Purwomanggung

Secara kewilayahan, terdapat beberapa isu strategis di wilayah Purwomanggung yang mempunyai dampak secara regional ditingkat Jawa Tengah dan memerlukan perhatian untuk dapat diselesaikan secara bertahap secara jangka menengah 2024 – 2026, antara lain:

- 1) Dimensi Sumber Daya Manusia:
 - a. Peningkatan rata-rata lama sekolah;
 - b. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Dimensi Perekonomian:
 - a. Pengembangan *food estate* sebagai langkah penguatan ketahanan pangan dan mengurangi angka kemiskinan.
 - b. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam pengurangan kemiskinan yang fokus pada pengembangan pengelolaan, konektivitas dan aksesibilitas.
- 3) Dimensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
 - a. Pemenuhan sumber air baku untuk kebutuhan domestik dan pertanian;
 - b. Peningkatan kerjasama antar wilayah dalam penanganan sedimentasi pada daerah aliran sungai (DAS);
 - c. Kelestarian lingkungan terutama penanganan sampah dan limbah;
 - d. Peningkatan kerjasama terkait ketahanan terhadap bencana.

b. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Wilayah Purwomanggung

Capaian kinerja pembangunan makro di Purwomanggung yang masih memerlukan perhatian karena dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah dari aspek penanganan kemiskinan, terdapat 3 Kabupaten/Kota yang dibawah angka kemiskinan provinsi.

Secara lengkap capaian makro pembangunan di Wilayah Pengembangan Purwomanggung pada Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.11.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Purwomanggung Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%) 2022	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kabupaten Purworejo	5,36	11,53	4,45	73,60
2	Kabupaten Wonosobo	5,02	16,17	5,01	68,89
3	Kabupaten Magelang	5,46	11,09	4,97	70,85
4	Kabupaten Temanggung	5,20	9,33	2,54	70,77
5	Kota Magelang	5,77	7,10	6,71	80,39
Rata-rata WP		5,36	11,04	4,74	72,90
Jawa Tengah		5,31	10,93	5,57	72,79
Nasional		5,31	9,57	5,86	72,91

Sumber: BPS,2022

Di Wilayah Pengembangan Purwomanggung terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah, diantaranya: perdagangan dan jasa, pengadaan air, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, dan *realestate*.

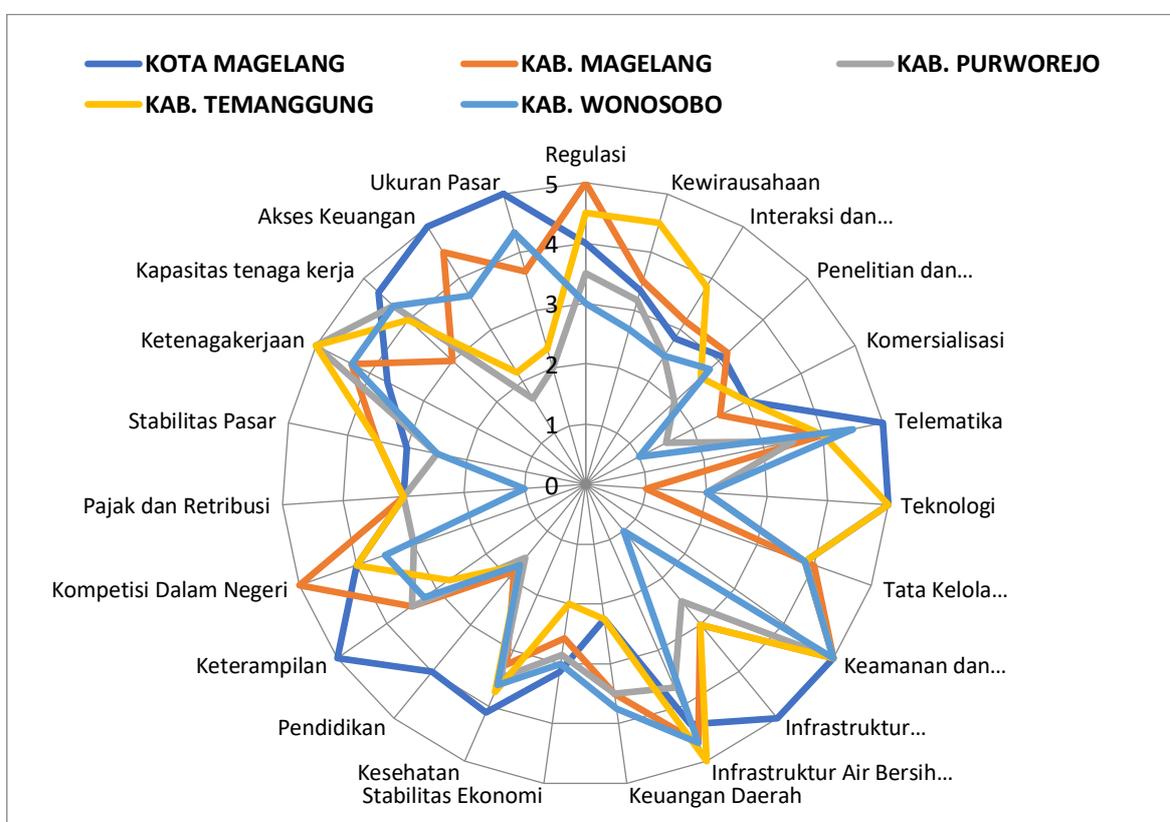
Kawasan strategis yang berada di Wilayah Pengembangan Purwomanggung yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

- 1) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial budaya (KSN Borobudur dan sekitarnya); Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya (Kawasan Candi Dieng);

- 2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup (KSN Taman Nasional Gunung Merapi); Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan lingkungan hidup (Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Gunung Sindoro-Sumbing);
- 3) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; Kawasan Agropolitan SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang), dan SOBOBANJAR (Wonosobo, Banjarnegara).

c. Analisis Daya Saing Wilayah Purwomanggung

Nilai rata-rata IDSD Wilayah Purwomanggung tahun 2022 adalah sebesar 3,457, meningkat cukup tinggi dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya sebesar 3,107. Dalam tinjauan internal wilayah Purwomanggung, nilai IDSD pada Kota Magelang merupakan yang tertinggi, yakni sebesar 4,124, yang diikuti oleh Kabupaten Magelang sebesar 3,476. Untuk nilai daya saing pada Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo berada di bawah rata-rata nilai daya saing wilayah Purwomanggung, dengan nilai masing-masing sebesar 3,420; 3,247; dan 3,016. Secara umum, nilai daya saing wilayah ini cenderung rendah pada Dimensi Pendidikan, Komersialisasi, Pajak dan Retribusi, serta Stabilitas Ekonomi.



Sumber: Diolah berdasarkan hasil Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.13
Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Purwomanggung
Tahun 2022

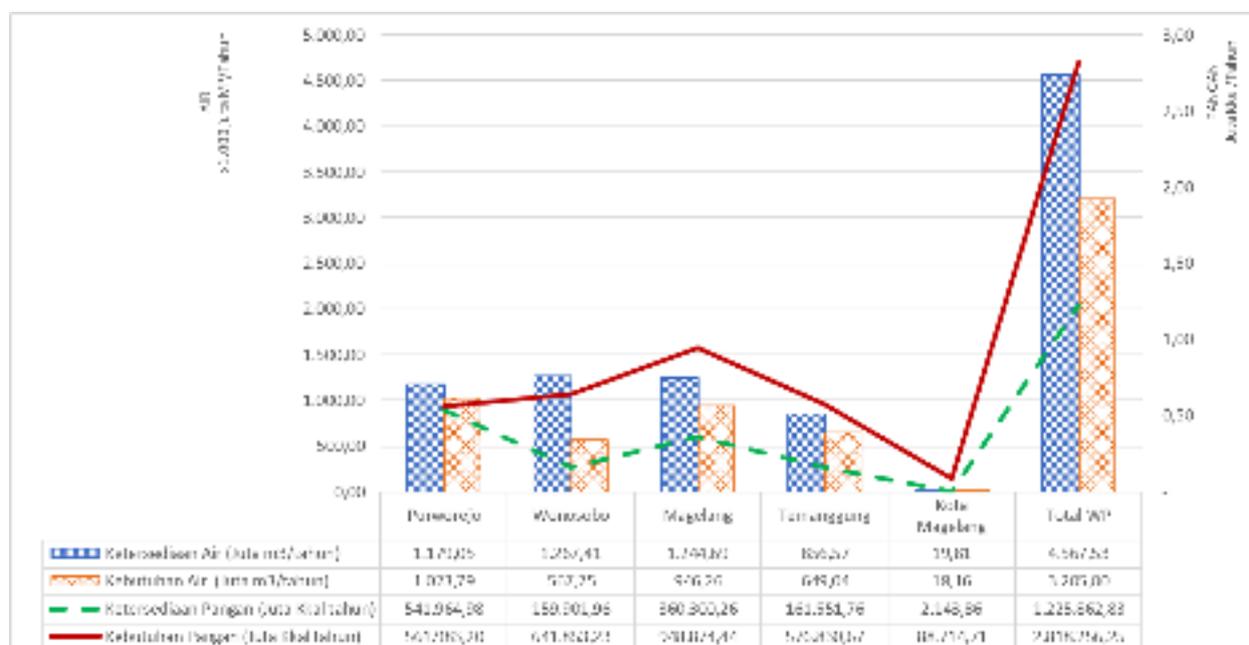
Kondisi daya saing wilayah Purwomanggung memiliki kelemahan pada beberapa indikator, antara lain pada rendahnya komersialisasi terhadap inovasi teknologi, kurangnya kolaborasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi, serta rendahnya pendapatan daerah. Di samping itu, masyarakat wilayah ini memiliki ciri tingkat pendidikan yang rendah, namun berkeahlian (*skilled*), serta dukungan Pemerintah untuk peningkatan *skill* melalui sekolah vokasi dan Balai Latihan Kerja sangat tinggi. Dengan memperhatikan potensi pengembangan perdagangan dan jasa pada wilayah ini, maka diperlukan program yang mampu mengungkit tingkat pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK. Di samping itu, perlu program peningkatan kreativitas untuk pendapatan daerah, serta riset dan inovasi teknologi perlu diarahkan

pada penguatan hilir untuk mendorong peningkatan komersialisasi. Selain itu juga perlu penguatan kolaborasi, khususnya dengan perguruan tinggi lokal untuk peningkatan inovasi dan teknologi.

d. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air dan Pangan di Purwomanggung

Status Daya dukung dan Daya Tampung air di wilayah Purwomanggung secara garis besar masih baik. dari 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang dan Kota Magelang, hanya Kota Magelang yang status daya dukung dan daya tampung airnya telah terlewati. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui penanganan sedimentasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, dan pengembangan kebun regional.

Disisi lain, status daya dukung dan daya tampung pangan di wilayah Purwomanggung telah terlewati. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.



Sumber: Analisis dari Dokumen D3TLH Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.14

Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Purwomanggung

e. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Purwomanggung

Dalam rangka untuk mencapai target pembangunan jangka menengah di Jawa Tengah, diperlukan dukungan dari Kabupaten/Kota di wilayah pengembangan Purwomanggung pada tahun 2024 sampai 2026 dengan memperhitungkan target pada RKPD Provinsi Tahun 2022 dan 2023 untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 7.12.

Target Kinerja Pertumbuhan Ekonomi (%) WP Purwomanggung 2024–2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Purworejo	4,57 - 5,57	4,76 - 5,67	4,86 - 5,87
2.	Kab. Wonosobo	3,60 - 4,70	3,75 - 4,79	3,83 - 4,96
3.	Kab. Magelang	4,14 - 5,26	4,32 - 5,36	4,40 - 5,55

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
4.	Kab. Temanggung	5,27	5,37 – 5,49	5,56 – 5,61
5.	Kota Magelang	5,13-5,77	5,35 – 5,87	5,46 – 6,08

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.13.

Target Kinerja Angka Kemiskinan (%) WP Purwomanggung 2024 – 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Purworejo	10,62 – 9,45	9,88 – 9,62	9,51 – 9,18
2.	Kab. Wonosobo	15,08 – 14,50	14,28 – 13,79	13,91 – 13,29
3.	Kab. Magelang	10,07 – 9,32	9,83 – 9,65	9,59 – 9,35
4.	Kab. Temanggung	8,50	7,90 – 7,83	7,58 – 7,48
5.	Kota Magelang	6,80 – 6,36	6,03 - 6,01	5,80 – 5,77

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.14.

Target Kinerja TPT (%) WP Purwomanggung Tahun 2024 – 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Purworejo	3,27	3,13 – 3,04	2,95 – 2,85
2.	Kab. Wonosobo	3,00 – 4,00	3,82 – 2,79	3,60 – 2,61
3.	Kab. Magelang	4,91- 4,48	4,69 – 4,17	4,42 – 3,90
4.	Kab. Temanggung	2,52	2,41 – 2,35	2,27 – 2,19
5.	Kota Magelang	6,50 – 5,80	6,21 – 5,40	5,85 – 5,05

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.15.

Target Kinerja IPM WP Purwomanggung Tahun 2024 – 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Purworejo	74,21	74,59	75,04
2.	Kab. Wonosobo	70,20	70,72	71,30
3.	Kab. Magelang	71,42	72,89	73,50
4.	Kab. Temanggung	71,77	72,76	73,58
5.	Kota Magelang	81,94	82,23	82,85

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

e. Indikasi Program Pembangunan Purwomanggung (2024 – 2026)

Dalam rangka mencapai target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, diperlukan beberapa upaya penanganan secara terintegrasi lintas kewenangan dan sektor.

Di Wilayah Pembangunan Purwomanggung terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Prioritas Strategis Nasional (*Majorproject* RPJMN), Indikasi Program Penataan Ruang (RTRW) dan Rencana Sektorial yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, diantaranya:

- 1) PSN: Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab.Magelang; Pembangunan Jalan Magelang-Kaliangkrik-B.ts.Kab.Wonosobo, Kab. Magelang; Peningkatan jalan akses ke Zona Otorita Borobudur dari Purworejo (Benowo-Bener atau Sedayu-Loano), Kab. Purworejo; Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang; Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang; Peningkatan Terminal Tipe A Tidar, Kota Magelang; Pengembangan panas bumi WKP Dieng Area Dieng, Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara; Pengembangan Geopark Dieng, Kab. Wonosobo; Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang; Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Bendungan Bener, *Double Track* Jalur Selatan, Kab. Purworejo.

- 2) RTRW: Pengembangan Kawasan perkotaan Purworejo – Kutoarjo menjadi Pusat kegiatan Wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi perdagangan dan jasa; pengadaan air; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; informasi dan komunikasi; *real estate*; dan pariwisata.

Terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada Tahun 2024 – 2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten/kota antara lain :

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya melalui:
Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin
- 2) Peningkatan sektor ketenagakerjaan, diantaranya melalui :
 - Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian) serta pariwisata;
 - Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - *Upskilling* terhadap instruktur dan upgrading sarana prasarana BLK dan SMK;
 - Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demanddan supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
- 3) Pemantapan ketahanan pangan, diantaranya melalui: Pengembangan *Food Estate*, Pengembangan STA Temanggung, Rehabilitasi jaringan irigasi DI Watujagir, DI Soropadan, DI Galeh, DI Kalibutek, DI Tangsi, DI Catgawen.
- 4) Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion diantaranya ditempuh melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan air, utamanya pada: Kerjasama antar wilayah dalam penangan sedimentasi DAS Bodri, Serayu, dan Bogowonto dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Reg.) Keburejo. Kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Wonosobo, CAT Kebumen-Purworejo, CAT Magelang-Temanggung, CAT Subah, CAT Sumowono.
 - b. Peningkatan ketahanan lahan, utamanya pada : rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Progo, DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Wawar Medono, inisiasi pengembangan Geopark Kawasan Dieng (Wonosobo – Banjarnegara), Pembangunan TPST Regional Magelang, Pembangunan TPS3R di wilayah KSPN Borobudur dan Dieng; Pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.
- 5) Peningkatan daya saing pariwisata, diantaranya melalui:
 - Dukungan promosi dan event wisata di kawasan DPP Borobudur-Dieng;
 - Pengembangan daya tarik wisata di wilayah Purworejo berbasis pelestarian hutan;
 - Pengembangan desa wisata berbasis pertanian perkebunan, kawasan hutan dan kearifan lokal;
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
 - Fasilitasi Event Promosi Pariwisata di Wilayah DPP Borobudur-Dieng dan sekitarnya.
- 6) Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantaranya melalui :
 - Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
 - Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan
 - Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;

Tengah dan memerlukan perhatian untuk dapat diselesaikan secara bertahap secara jangka menengah 2024 – 2026, antara lain:

- 1) Dimensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan fasilitas pendidikan;
 - b) Peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk penanganan stunting, pengurangan kematian ibu, bayi dan balita.
- 2) Dimensi Perekonomian meliputi peningkatan integrasi dan konektivitas antar wilayah utamanya untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata;
- 3) Dimensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:
 - a) Pemenuhan air baku untuk air minum dan pertanian;
 - b) Penanganan daerah aliran sungai secara terpadu (hulu hilir) untuk pengendalian banjir;
 - c) Pengelolaan pertambangan terutama pada jalur tambang;
 - d) Penanganan lahan kritis dan konservasi sumber air;
 - e) Pengelolaan limbah UMKM, penanganan sampah dan limbah B3;
 - f) Pengembangan geopark.

b. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Wilayah Subosukowonosraten

Capaian kinerja pembangunan makro di Subosukowonosraten yang masih memerlukan perhatian karena dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah dari aspek penanganan kemiskinan, terdapat 5 Kabupaten/Kota yang dibawah tingkat kemiskinan provinsi.

Secara lengkap capaian makro pembangunan di Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten pada Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.16.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Subosukawonosraten Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%) 2022	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Boyolali	6,33	9,82	4,92	74,97
2	Kab. Sukoharjo	5,61	7,61	2,47	77,94
3	Kab. Karanganyar	5,87	9,85	5,70	76,58
4	Kab. Wonogiri	5,63	10,99	1,95	71,04
5	Kab. Sragen	5,76	12,94	4,69	74,65
6	Kab. Klaten	5,90	12,33	4,31	76,95
7	Kota Surakarta	6,25	8,84	5,83	83,08
Rata-rata WP		5,90	10,34	4,27	76,46
Jawa Tengah		5,31	10,93	5,57	72,79
Nasional		5,31	9,57	5,86	72,91

Sumber: BPS,2022

Di Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah, diantaranya: industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, perdagangan dan jasa, pengadaan air, penyediaan akomodasi dan real estate.

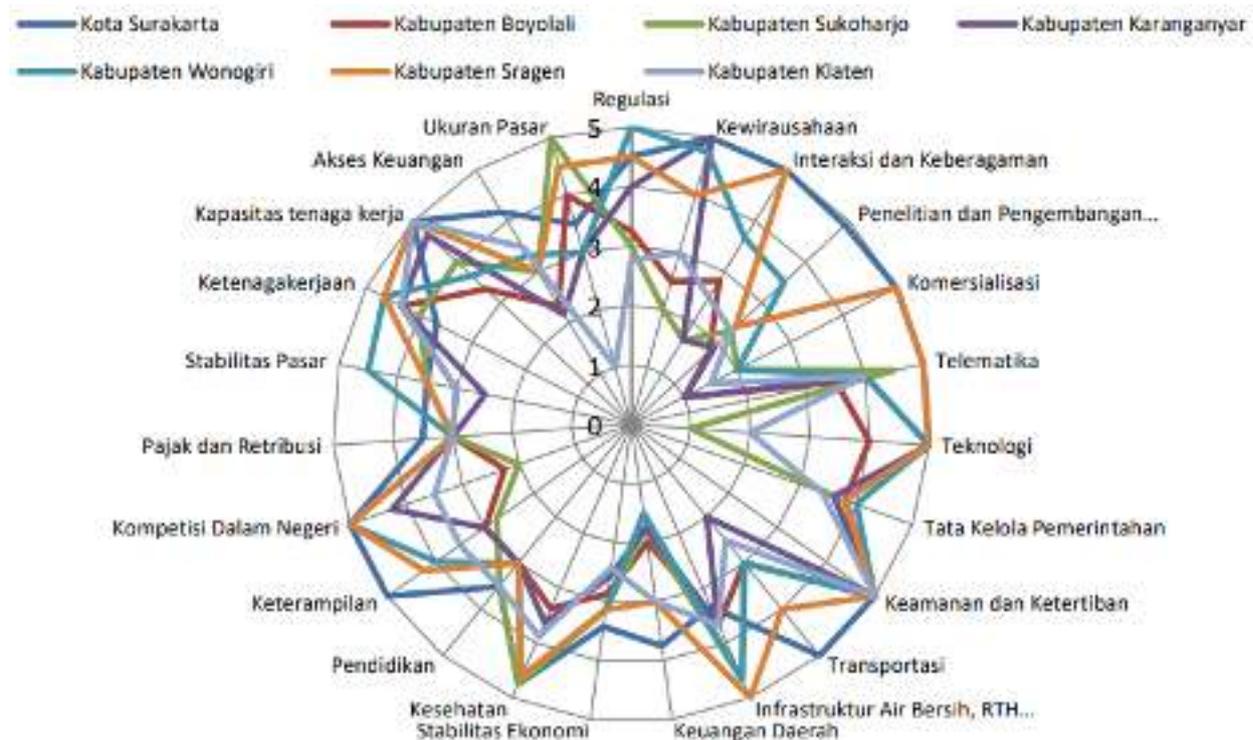
Kawasan strategis yang berada di Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya (KSN Prambanan dan KSN Sangiran); Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya (Candi Cetho – Suku dan Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran);
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: (KSP Kawasan Agropolitan GIRISUKA dan SEMARBOYONG); KSP Kawasan Perkotaan Subosukawonosraten; KSP Pariwisata Terpadu (Kawasan Surakarta dsk);

3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup: KSP Gunung Lawu.

c. Analisis Daya Saing Wilayah Subosukowonosraten

Berdasarkan perhitungan IDSD pada tahun 2021, kewilayahan Subosukowonosraten merupakan kewilayahan dengan nilai tertinggi dengan rata-rata nilai 3,62. Bila dilihat secara internal Subosukowonosraten, nilai yang ada di Kota Surakarta merupakan nilai tertinggi dengan total rata-rata nilai 4,36 atau menjadi posisi tertinggi di Jawa Tengah. Setelah Kota Surakarta, nilai rata-rata kabupaten/kota di Subosukowonosraten ini secara berurutan adalah Kabupaten Sragen (4,15), Kabupaten Wonogiri (3,85), Kabupaten Sukoharjo (3,39), Kabupaten Karanganyar (3,28), Kabupaten Klaten (3,19), dan nilai terendah adalah Kabupaten Boyolali (3,15).



Sumber: Analisis IDSD Dalam Perwilayahan Ekonomi Jawa Tengah, 2021

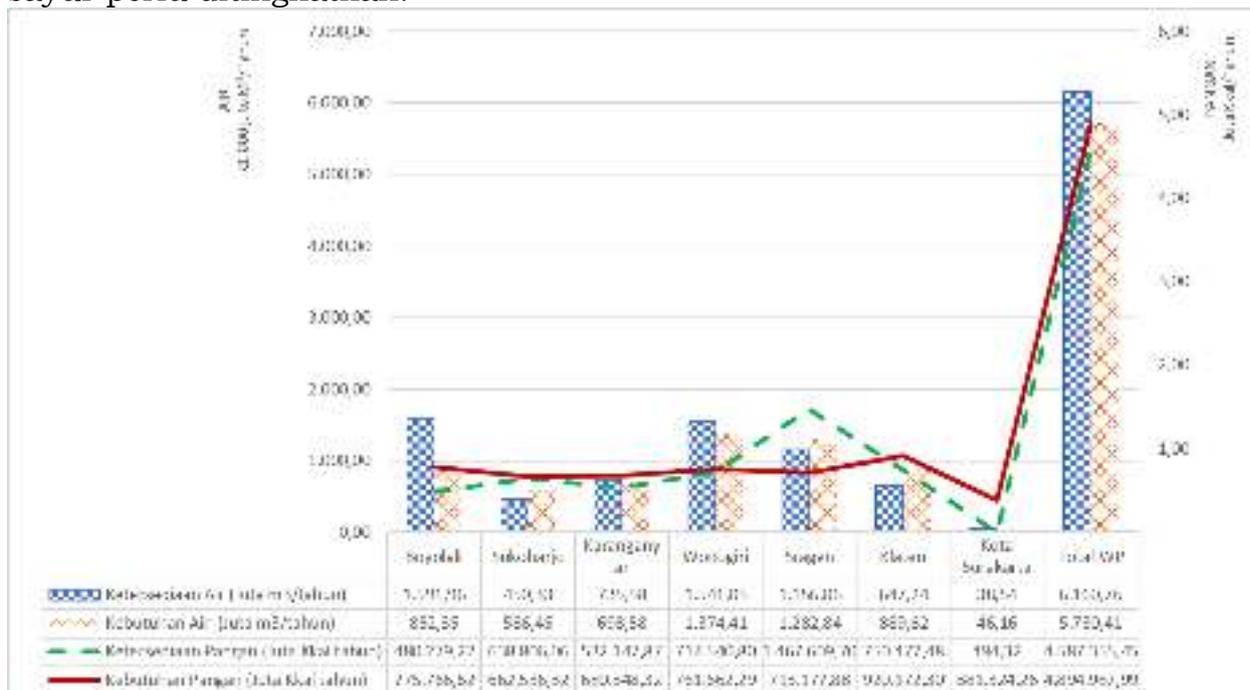
Gambar 7.16
Nilai Dimensi IDSD Kabupaten/Kota di Subosukowonosraten

Wilayah Subosukawonosraten masih pada tahap kapasitas berperan pada tingkat basik kecuali Kabupaten Wonogiri dan Kota Surakarta yang sudah mampu berada pada tahap efisiensi pasar dan inovasi sebagai penunjang daya saing. Perlu peningkatan faktor penguat dan penunjang daya saing serta efisiensi pasar untuk meningkatkan kapasitas berperan dalam kewilayahan. Kabupaten Wonogiri dan Kota Surakarta dapat menjadi leading actor dalam peningkatan daya saing daerah di wilayah Subosukawonosraten.

d. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air dan Pangan di Wilayah Subosukowonosraten

Status Daya dukung dan daya Tampung Air di wilayah Subosukowonosraten, 4 (empat) Kabupaten/Kota telah terlampaui yaitu Kabupaten Sukoharjo, Sragen, Klaten dan Kota surakarta. Sedangkan Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, dan Boyolali status Daya Dukung Daya Tampung Air masih belum terlampaui. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui penangan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengembangan SPAM regional.

Status Daya dukung dan daya Tampung Pangan di wilayah Subosukowonosraten, dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Boyolali, sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Kota surakarta telah terlampaui kecuali Kabupaten Sragen. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.



Sumber: Analisis dari Dokumen D3TLH Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.17

Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten

e. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Subosukowonosraten

Dalam rangka untuk mencapai target pembangunan jangka menengah di Jawa Tengah, diperlukan dukungan dari Kabupaten/Kota di wilayah pengembangan Subosukowonosraten pada tahun 2024 sampai 2026 dengan memperhitungkan target pada RKPD Provinsi Tahun 2022 dan 2023 untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 7.17.

Target Kinerja Pertumbuhan Ekonomi (%) WP Subosukowonosraten Tahun 2024 – 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Boyolali	5,65 – 6,50	5,89 – 6,62	6,01 – 6,85
2.	Kab. Sukoharjo	4,90 - 5,37	5,11 – 5,47	5,21 – 5,66
3.	Kab. Karanganyar	6,00	6,11 – 6,56	6,33 – 6,69
4.	Kab. Wonogiri	6,00	6,06 – 6,46	6,28 – 6,59
5.	Kab. Sragen	5,90	6,01 – 6,35	6,22 – 6,48
6.	Kab. Klaten	6,00-6,50	6,26 – 6,62	6,38 – 6,85
7.	Kota Surakarta	6,30	6,41 – 6,67	6,64 – 6,80

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.18.

Target Kinerja Angka Kemiskinan (%) Subosukowonosraten 2024 - 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Boyolali	7,18 – 5,68	8,44 – 8,26	8,15 – 7,90
2.	Kab. Sukoharjo	7,20 – 6,96	6,45 – 5,35	6,19 – 6,06

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
3.	Kab. Karanganyar	8,52	8,43 – 8,28	8,12 – 7,92
4.	Kab. Wonogiri	9,18 – 6,62	9,13 – 8,87	8,71 – 8,36
5.	Kab. Sragen	11,18	11,19 – 11,11	10,81 – 10,71
6.	Kab. Klaten	11,09	10,83 – 10,59	10,53 – 10,22
7.	Kota Surakarta	7,56	7,19 – 7,10	6,81 – 6,69

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.19.

Target Kinerja TPT (%) Subosukowonosraten Tahun 2024– 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Boyolali	3,92	3,75 – 3,65	3,53 – 3,41
2.	Kab. Sukoharjo	4,57 – 4,48	4,47 – 3,77	4,01 – 3,33
3.	Kab. Karanganyar	5,30	5,07 – 4,94	4,77 – 4,61
4.	Kab. Wonogiri	1,95 – 1,75	1,86 – 1,63	1,76 – 1,52
5.	Kab. Sragen	4,00	3,98 – 3,72	3,75 – 3,48
6.	Kab. Klaten	4,00	3,92 – 3,66	3,70 – 3,43
7.	Kota Surakarta	5,62 – 5,10	5,37 – 4,75	5,06 – 4,44

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.20.

Target Kinerja IPM Tahun 2024– 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Boyolali	76,31	76,67	77,15
2.	Kab. Sukoharjo	78,06	79,45	79,96
3.	Kab. Karanganyar	77,20	77,64	78,19
4.	Kab. Wonogiri	73,60	72,44	72,95
5.	Kab. Sragen	75,21	76,41	76,98
6.	Kab. Klaten	77,30	79,42	80,48
7.	Kota Surakarta	84,02	84,59	85,06

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

f. Indikasi Program Pembangunan Subosukowonosraten (2024 – 2026)

Dalam rangka mencapai target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, diperlukan beberapa upaya penanganan secara terintegrasi lintas kewenangan dan sektor.

Di Wilayah Pembangunan Subosukowonosraten terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Prioritas Strategis Nasional (*Majorproject* RPJMN), Indikasi Program Penataan Ruang (RTRW) dan Rencana Sektoral yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, diantaranya :

- 1) PSN : Penambahan Lingkup Tol Solo – Yogyakarta – Kulonprogo; Pengembangan Bandara Adi Soemarmo; Pembangunan Bendungan Pidekso Wonogiri dan Jlantah Karanganyar; Pembangunan SPAM Regional Wososukas (Wonogiri, Solo, Sukoharjo dan Karanganyar).

Terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada Tahun 2024 – 2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten / kota antara lain :

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya melalui:
 - Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin
- 2) Peningkatan sektor ketenagakerjaan, diantaranya melalui :
 - Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian, furniture) serta pariwisata;

- Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - *Upskilling* terhadap instruktur dan upgrading sarana prasarana BLK dan SMK;
 - Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
- 3) Pemantapan ketahanan pangan, diantaranya melalui:
- Perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
 - Rehabilitasi jaringan irigasi DI Bapang, DI Cengklik, DI Jaban, DI Klego, DI Wonotoro, DI Kepoh, DI Munggur, DI Gisik, DI Parean, DI Trani, DI Bonggo, DI Braholo, DI Kedungboyo, DI Lemahbang II, DI Walikan, DI Mantren, DI Blingi, DI Brajan, DI Jetu, DI Kwangsang, DI Menggok, DI Cangkring, DI Sidomakmur, DI Srambang, DI Glodog, DI Gunung Maling;
 - Pembangunan Embung Kembang dan Embung Sempu;
 - Rehabilitasi Embung Turi Sundang;
 - Peningkatan ketersediaan air baku irigasi untuk masa tanam 2 dan 3.
- 4) Peningkatan daya saing pariwisata, diantaranya melalui :
- Dukungan promosi dan event wisata di kawasan DPP Solo–Sangiran;
 - Pengembangan desa wisata dan fasilitas pendukungnya;
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
 - Fasilitasi Event Promosi Pariwisata di Wilayah DPP Solo–Sangiran;
 - Fasilitasi integrasi pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) Sangiran – Prambanan – Borobudur.
- 5) Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantaranya melalui:
- Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk
 - Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan
 - Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital
 - Pendampingan pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM
- 6) Peningkatan investasi, diantaranya melalui: fasilitasi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Wonogiri;
- 7) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, diantaranya melalui :
- Peningkatan sistem jaringan jalan, utamanya pada: penuntasan koridor Surakarta – Grobogan; pemantapan Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri; penuntasan koridor Wonogiri – Biting ke Arah Jawa Timur; pemantapan koridor Klaten – Boyolali, koridor Boyolali -Jrakah – Ke Arah Kabupaten Magelang; peningkatan Palur – Karanganyar – Tawangmangu – Ke Arah Jawa Timur;
 - Penyediaan layanan angkutan umum dikawasan aglomerasi perkotaan pada koridor Solo – Sumberlawang via Sangiran dan Solo – Sukoharjo - Wonogiri;
 - Fasilitasi optimalisasi layanan antar moda transportasi untuk mewujudkan Subosukowonosraten sebagai salah satu pintu masuk ke Jawa Tengah dalam hal menunjang pengembangan pariwisata;
 - Pengembangan simpul transportasi, utamanya: peningkatan Terminal Tipe B Baturetno dan Sukoharjo.
- 8) Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion diantaranya ditempuh melalui:
- a. Peningkatan ketahanan air, utamanya pada: Fasilitasi Penanganan DAS Sungai Dengkeng Kabupaten Klaten, Sungai Bengawan Solo Kabupaten Sukoharjo, dan Sungai Pepe Kota Surakarta; Pembangunan IPAL

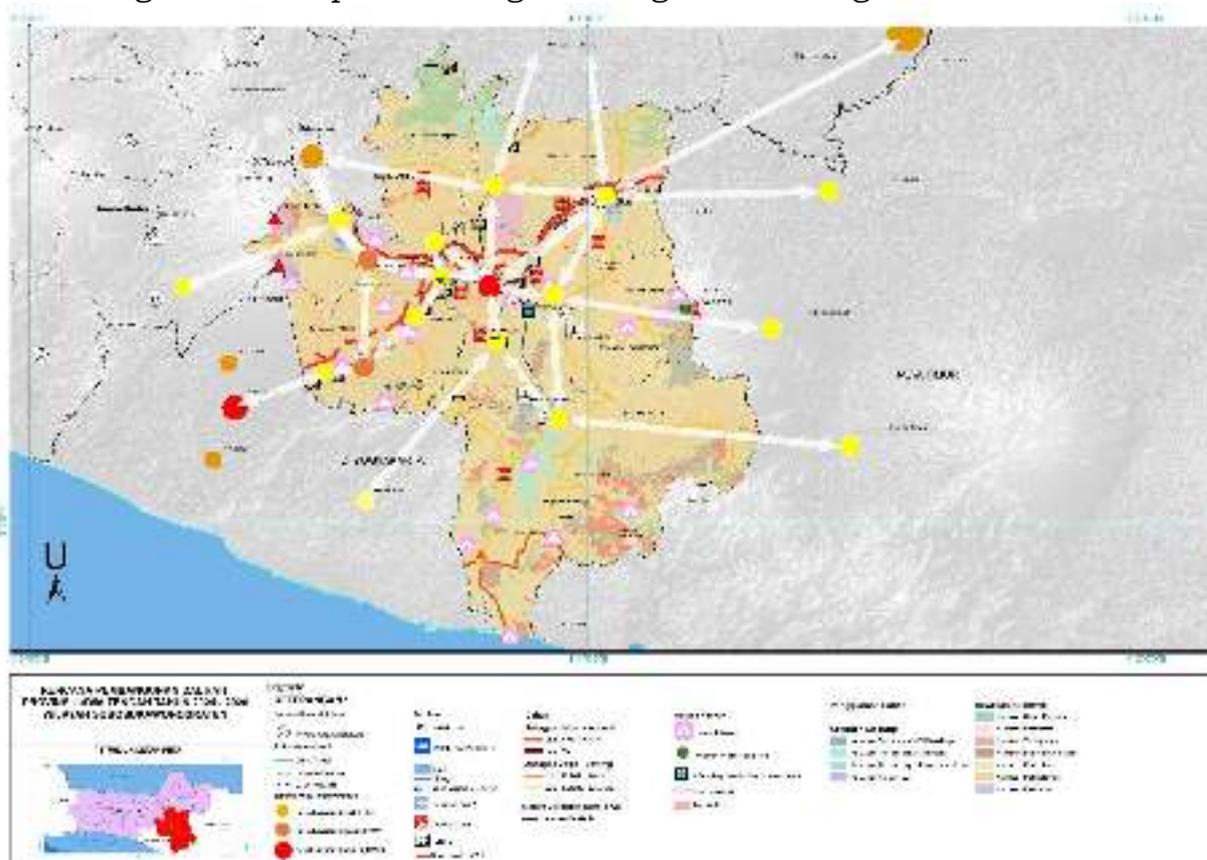
Komunal Industri Rumah Tangga (Klaten); Pembangunan jaringan Daerah Irigasi Pidekso Kabupaten Wonogiri; Fasilitasi dan pembangunan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Reg.) Wososukas; Kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Karanganyar-Boyolali, CAT Wonosari, CAT Ngawi-Ponorogo, dan CAT Eromoko.

- b. Peningkatan ketahanan lahan, utamanya pada : Rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Solo, Kawasan Merapi dan Lawu (Kabupaten Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen); Fasilitasi Inisiasi pengembangan Geopark Kawasan Bayat; Pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.
- 9) Peningkatan ketahanan energi, diantaranya melalui: Fasilitasi pengembangan transmisi SUTET Ungaran-Ampel-Pedan sirkuit II, Fasilitasi pengembangan transmisi rekondukturing SUTT 150 kV Outlet GITET Ampel; Pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (Biogas, Gas Rawa, PLTMH, PLTS Atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan simpul transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Terminal Tipe C), utamanya yang dilewati oleh rencana pengembangan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan;
- 2) Pengembangan PLTSA Putri Cempo secara terintegrasi;

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Subosukowonosraten untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut:



Sumber: Analisis, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.18
Arah Pengembangan Wilayah Subosukowonosraten

7.3.5. Wilayah Pengembangan Bregasmalang

a. Isu Strategis Wilayah Bregasmalang

Secara kewilayahan, terdapat beberapa isu strategis di wilayah Bregasmalang yang mempunyai dampak secara regional ditingkat Jawa Tengah dan memerlukan perhatian untuk dapat diselesaikan secara bertahap secara jangka menengah 2024 – 2026, antara lain:

- 1) Dimensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Penanganan stunting diantaranya melalui pemenuhan fasilitas air bersih, sanitasi, penanganan rumah tidak sehat;
 - b) Pengurangan pengangguran dengan meningkatkan kualitas/keterampilan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kawasan industri;
- 2) Dimensi Perekonomian :
 - a) Percepatan implementasi kegiatan pendukung pertumbuhan ekonomi yang telah tertuang dalam Perpres 79 Tahun 2019;
 - b) Pemenuhan air baku untuk keperluan domestik dan pertanian;
- 3) Dimensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup :
 - a) Penanganan pesisir pantai utara secara komprehensif dan menyeluruh untuk mengatasi permasalahan banjir, rob, abrasi dan sedimentasi;
 - b) Penanganan lahan kritis dan konservasi sumber air;
 - c) Pengelolaan pertambangan yang menerapkan *Good Mining Practice* (GMP);
 - d) Pengembangan *geopark*.

b. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Wilayah Bregasmalang

Capaian kinerja pembangunan makro di Bregasmalang yang masih memerlukan perhatian karena dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah dari aspek penanganan pengangguran terbuka (TPT), dimana seluruh Kabupaten/Kota di Bregasmalang (4 Kabupaten/Kota) capaiannya dibawah angka provinsi dan nasional, disamping itu secara rata-rata IPM dan kemiskinan juga dibawah capaian provinsi dan nasional.

Secara lengkap capaian makro pembangunan di Wilayah Pengembangan Bregasmalang pada Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.21.

Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Bregasmalang Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%) 2022	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Brebes	5,61	16,05	9,48	67,03
2	Kab. Tegal	5,14	7,90	9,64	69,53
3	Kab. Pemalang	5,08	15,06	6,63	67,19
4	Kota Tegal	5,16	7,91	6,68	76,15
Rata-rata WP		5,25	11,73	8,11	69,98
Jawa Tengah		5,31	10,93	5,57	72,79
Nasional		5,31	9,57	5,86	72,91

Sumber: BPS,2022

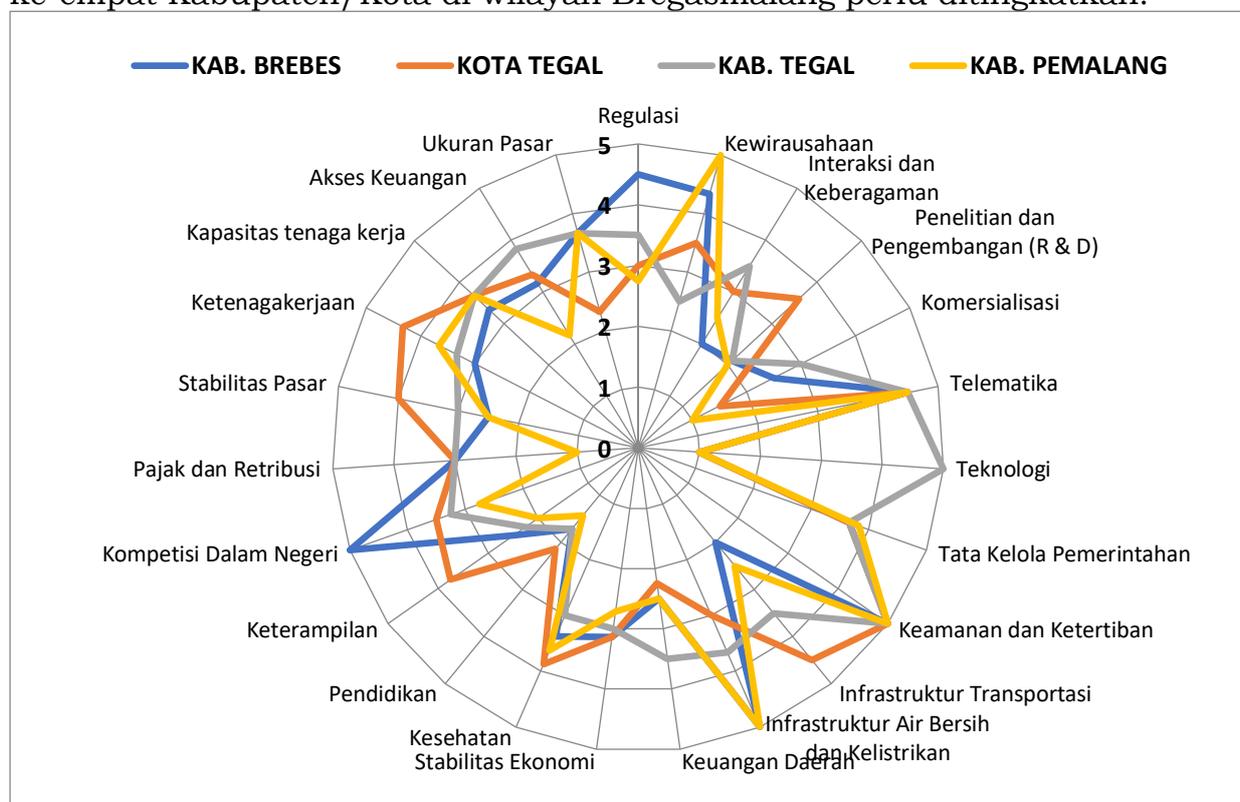
Di WP Bregasmalang terdapat beberapa sektor unggulan sebagai potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah, diantaranya: industri, perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, perikanan, kehutanan dan pertambangan.

Kawasan strategis yang berada di Wilayah Pengembangan Bregasmalang yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain: Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi : Kawasan Industri Brebes (KSP), Kawasan Agropolitan MANGGAMAS (KSP), Kawasan Perkotaan Bregasmalang (KSP).

c. Analisis Daya Saing Wilayah Bregasmalang

Nilai rata-rata IDSD Wilayah Bregasmalang Tahun 2022 adalah sebesar 3,202, meningkat dari rata-rata nilai tahun sebelumnya 3,002. Masih seperti tahun sebelumnya, nilai rata-rata daya saing pada wilayah ini merupakan yang terendah dibandingkan wilayah lain di Jawa Tengah. Secara umum dimensi yang perlu diungkit pada wilayah ini adalah pada Pendidikan, Komersialisasi, dan Keuangan Daerah.

Dalam tinjauan internal wilayah Bregasmalang, nilai IDSD pada Kabupaten Tegal merupakan yang tertinggi, yakni sebesar 3,318. Untuk nilai IDSD Kota Tegal lebih rendah, sebesar 3,299, namun demikian masih di atas rata-rata nilai IDSD wilayah Bregasmalang. Nilai IDSD Kabupaten Brebes dan Pemalang, masing-masing sebesar 3,197 dan 2,994, berada di bawah rata-rata daya saing wilayah Bregasmalang. Mengingat nilai daya saing pada wilayah Bregasmalang merupakan yang terendah, maka perhatian terhadap dimensi daya saing, khususnya Pendidikan, Komersialisasi, dan Keuangan Daerah, pada ke-empat Kabupaten/Kota di wilayah Bregasmalang perlu ditingkatkan.



Sumber: Diolah berdasarkan hasil Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.19

Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Bregasmalang Tahun 2022

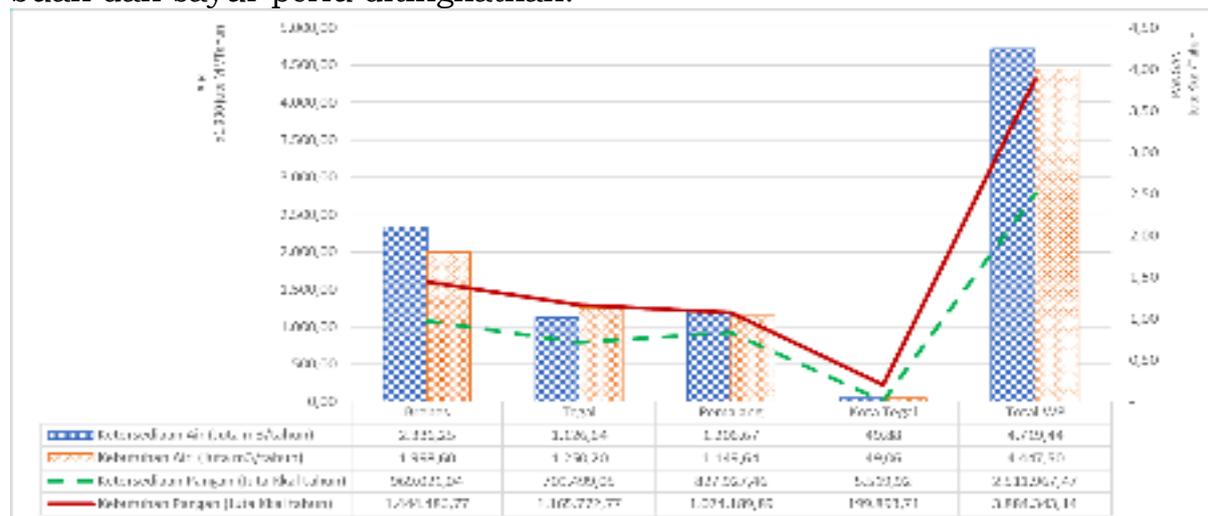
Kondisi daya saing wilayah Bregasmalang masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai pada beberapa indikator faktor pendukung daya saing yang masih lemah, antara lain pada relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, angka kemiskinan yang tinggi, lemahnya investasi nasional, dan geliat ekonomi lokal pada sektor UMKM yang cenderung pasif. Mengacu pada arah pengembangan wilayah Bregasmalang untuk pengembangan potensi industri serta perdagangan dan jasa, diperlukan program yang mampu optimal mengungkit tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan tinggi maupun vokasi, di samping mendorong investasi produktif yang memiliki *multiplier effect* terhadap ekonomi lokal tinggi.

d. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air dan Pangan di Wilayah Bregasmalang

Berdasarkan perhitungan Daya dukung dan Daya Tampung Air, wilayah Bregasmalang status Daya Dukung dan Daya Tampung Air belum terlampaui kecuali Kabupaten Tegal. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas

ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui Pembangunan Bendung, Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Reg.) dan Konservasi sumber air/CAT.

Sedangkan Status Daya dukung dan Daya Tampung Pangan di wilayah Bregasmalang telah terlampaui baik di Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal maupun Kabupaten Pemalang. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.



Sumber: Analisis dari Dokumen D3TLH Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.20

Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Bregasmalang

e. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Bregasmalang

Dalam rangka untuk mencapai target pembangunan jangka menengah di Jawa Tengah, diperlukan dukungan dari Kabupaten/Kota di wilayah pengembangan Bregasmalang pada tahun 2024 sampai 2026 dengan memperhitungkan target pada RKPD Provinsi Tahun 2022 dan 2023 untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 7.22.

Target Kinerja Pertumbuhan Ekonomi (%) WP Bregasmalang 2024 - 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Brebes	5,65 – 5,84	5,89 – 5,95	6,01 – 6,16
2.	Kab. Tegal	5,20 – 5,50	5,42 – 5,60	5,53 – 5,80
3.	Kab. Pemalang	4,80 – 5,40	5,00 – 5,50	5,11 – 5,69
4.	Kota Tegal	5,00 – 6,00	5,21 – 6,11	5,32 – 6,33

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.23.

Target Kinerja Angka Kemiskinan (%) WP Bregasmalang Tahun 2024-2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Brebes	15,5 – 14,75	13,70 – 13,53	13,18 – 12,96
2.	Kab. Tegal	7,80 – 7,10	6,51 – 6,28	6,19 – 5,89
3.	Kab. Pemalang	15,18 – 14,18	13,34 – 13,27	13,01 – 12,91
4.	Kota Tegal	6,65 - 5,79	6,21 – 5,25	5,99 – 5,02

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.24.
Target Kinerja TPT (%) WP Bregasmalang Tahun 2024 – 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Brebes	9,41 – 8,55	8,99 – 7,96	8,48 – 7,44
2.	Kab. Tegal	9,64 – 9,40	9,21 – 8,75	8,68 – 8,18
3.	Kab. Pemalang	6,48 – 5,88	6,19 – 5,48	5,84 – 5,12
4.	Kota Tegal	6,53 – 5,93	6,24 – 5,52	5,88 – 5,16

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.25.
Target Kinerja IPM WP Bregasmalang Tahun 2024 – 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Brebes	67,5 – 68,3	69,12	69,74
2.	Kab. Tegal	71,00	71,78	72,47
3.	Kab. Pemalang	68,95	69,67	70,58
4.	Kota Tegal	77,01	77,45	77,90

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

f. Indikasi Program Pembangunan Bregasmalang (2024 – 2026)

Dalam rangka mencapai target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, diperlukan beberapa upaya penanganan secara terintegrasi lintas kewenangan dan sektor.

Di Wilayah Pembangunan Bregasmalang terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Prioritas Strategis Nasional (*Majorproject* RPJMN), Indikasi Program Penataan Ruang (RTRW) dan Rencana Sektor yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, diantaranya:

- 1) PSN: Kereta Api Jakarta – Surabaya; Pembangunan Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon – Semarang;
- 2) RPJMN: Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Tambak di Pantura Jawa
- 3) RTRW: pembangunan jalan menuju KI brebes, Peningkatan akses Brebes menuju keselatan, konservasi dan pengendalian kawasan atas.

Terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada Tahun 2024 – 2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten / kota antara lain:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya melalui: Penyediaan perumahan untuk MBR Perkotaan dan Sekitar KPI/KI; Penyediaan jaringan air bersih permukiman sekitar KPI dan KI; Penyediaan jaringan sanitasi dan persampahan permukiman sekitar KPI dan KI; Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
- 2) Peningkatan sektor ketenagakerjaan, diantaranya melalui:
 - Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (*handycraft*, makanan minuman, produk hasil pertanian), pertanian hortikultura, serta pariwisata (agrowisata);
 - Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - *Upskilling* terhadap instruktur dan upgrading sarana prasarana BLK dan SMK;
 - Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demand* dan *supply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.

- 3) Pemantapan ketahanan pangan, diantaranya melalui :
 - Pelestarian LSD/LP2B; Penataan air untuk kebutuhan pertanian dan industri-domestik; Rehabilitasi jaringan irigasi DI Pesayangan, DI Kemaron, DI Sidapurna, DI Gangsa Lumingsir, DI Gondang, DI Parakan Kidang, DI Lenggong, DI Mejagong, DI Beji;
 - Pembangunan Ebung Kemurang Wetan;
 - Rehabilitasi Embung Slarang Lor, Embung Kertasari, Embung Kebasen, Embung Sitanggal.
- 4) Peningkatan daya saing pariwisata, diantaranya melalui:
 - Pendampingan pengemasan produk wisata alam dataran tinggi (pengemasan *geopark* atau KEE) agar potensi unik tetap lestari;
 - Fasilitasi jalan wisata dari Pemalang menuju dataran tinggi;
 - Dukungan promosi dan event wisata di Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes;
 - Pengembangan desa wisata serta dukungan fasilitasnya;
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
 - Fasilitasi Event Promosi Pariwisata di Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes
- 5) Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantaranya melalui :
 - Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
 - Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan
 - Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
 - Pendampingan pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM.
- 6) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, diantaranya melalui:
 - Peningkatan sistem jaringan jalan, utamanya: peningkatan dan antisipasi kerusakan akibat longsor pada koridor Bantarsari (Perbatasan Jawa Barat) – Slawi Ke Arah Kabupaten Pekalongan, koridor Pemalang – Randudongkal – Ke Arah Kabupaten Purbalingga, koridor Salem – Bumiayu – Sirampok ke arah Pemalang, Kersana – Salem – Ke Arah Kabupaten Cilacap;
 - Pengembangan simpul transportasi, diantaranya melalui: fasilitasi optimalisasi Pelabuhan Pengumpul Tegal.
- 7) Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion diantaranya ditempuh melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan air, utamanya pada: Pengendalian banjir dengan perkuatan tebing, sungai/anak sungai Pemali I dan II, Sungai Gangsa, Sungai Comal, Sungai Gung, Sungai Pakijangan; Pembangunan Groundsill/Cek dam Sungai Plompong; Normalisasi/Restorasi Sungai Rambut, Sungai Conang, Sungai Comal, Sungai Cacaban, Sungai Jimat; Rehabilitasi pesisir dengan pembangunan break water Pantai Randusanga Kulon, Groin Desa Sugih Waras, Jetty Kali Kemriri, Jetty Kali Sibelis, Jetty dan Seawall Kali Bacin, Seawall Pantai Alam Indah Kota Tegal; Pembangunan Bendung Karet (Sungai Pemali, Sungai Kabuyutan, Sungai Babakan, dan Sungai Cisanggarung Kabupaten Brebes); Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Reg.) Bregas; Kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Tegal-Brebes, CAT Lebaksiu, dan CAT Pekalongan-Pemalang.
 - b. Peningkatan ketahanan lahan, utamanya pada: Penanganan/rehabilitasi lahan kritis (di Kabupaten Tegal, perbatasan Brebes – Kuningan, Pemalang); Rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Cacaban, DAS Pemali dan DAS Comal; Fasilitasi Inisiasi pengembangan Geopark Kawasan Bumiayu, KEE Kaliwlingi; Pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.

- 8) Peningkatan ketahanan energi, diantaranya melalui: Pembangunan pipa gas transmisi Cirebon-Semarang; Pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (Biogas, Gas Rawa, PLTMH, PLTS Atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan agropolitan MANGGAMAS;
- 2) Penyediaan infrastruktur pendukung KPI dan KI terutama jalan menuju KPI/KI dan jaringan air bersih (penyediaan air baku) dan Peningkatan ruang jalur perembetan dari exit tol, untuk ruang-ruang pemasaran/penarik kegiatan baru.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Bregasmalang untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut:



Sumber: Analisis, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.21
Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang

7.3.6. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb

a. Isu Strategis Wilayah Barlingmascakeb

Secara kewilayahan, terdapat beberapa isu strategis di wilayah Barlingmascakeb yang mempunyai dampak secara regional dan memerlukan perhatian untuk dapat diselesaikan secara bertahap, antara lain:

- 1) Dimensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Peningkatan pemenuhan tenaga kerja yang utamanya mendukung sektor industri;
- 2) Dimensi Perekonomian :
 - a) Peningkatan kerjasama antar wilayah untuk pemasaran hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga;
 - b) Pengembangan integrasi dan keterpaduan pariwisata antar wilayah serta penerapan wisata hijau;
 - c) Pengembangan kawasan industri.

- 3) Dimensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup :
- Perbaikan pola pertanian untuk penanganan sedimentasi;
 - Peningkatan konservasi dan revitalisasi sumber air baku, daerah aliran sungai dan CAT;
 - Penanganan sampah secara terpadu;
 - Penanganan kerusakan pesisir.

b. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Wilayah Barlingmascakeb

Secara rata-rata wilayah pengembangan, capaian kinerja pembangunan makro di Barlingmascakeb semua masih memerlukan perhatian karena dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Yang paling prioritas adalah penanganan kemiskinan, karena seluruh Kabupaten/Kota di Barlingmascakeb capaiannya dibawah angka kemiskinan provinsi. Secara lengkap capaian makro pembangunan di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb pada Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.26.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM
WP Barlingmascakeb Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%) 2022	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Banjarnegara	5,29	15,52	6,38	68,61
2	Kab. Purbalingga	5,41	15,30	5,23	69,54
3	Kab. Banyumas	5,86	12,84	6,05	73,17
4	Kab. Cilacap	5,13	11,02	9,62	70,99
5	Kab. Kebumen	5,79	16,41	5,92	70,79
Rata-rata WP		5,49	14,22	6,64	70,62
Jawa Tengah		5,31	10,93	5,57	72,79
Nasional		5,31	9,57	5,86	72,91

Sumber: BPS,2022

Di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah, diantaranya: pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, real estate dan pertanian.

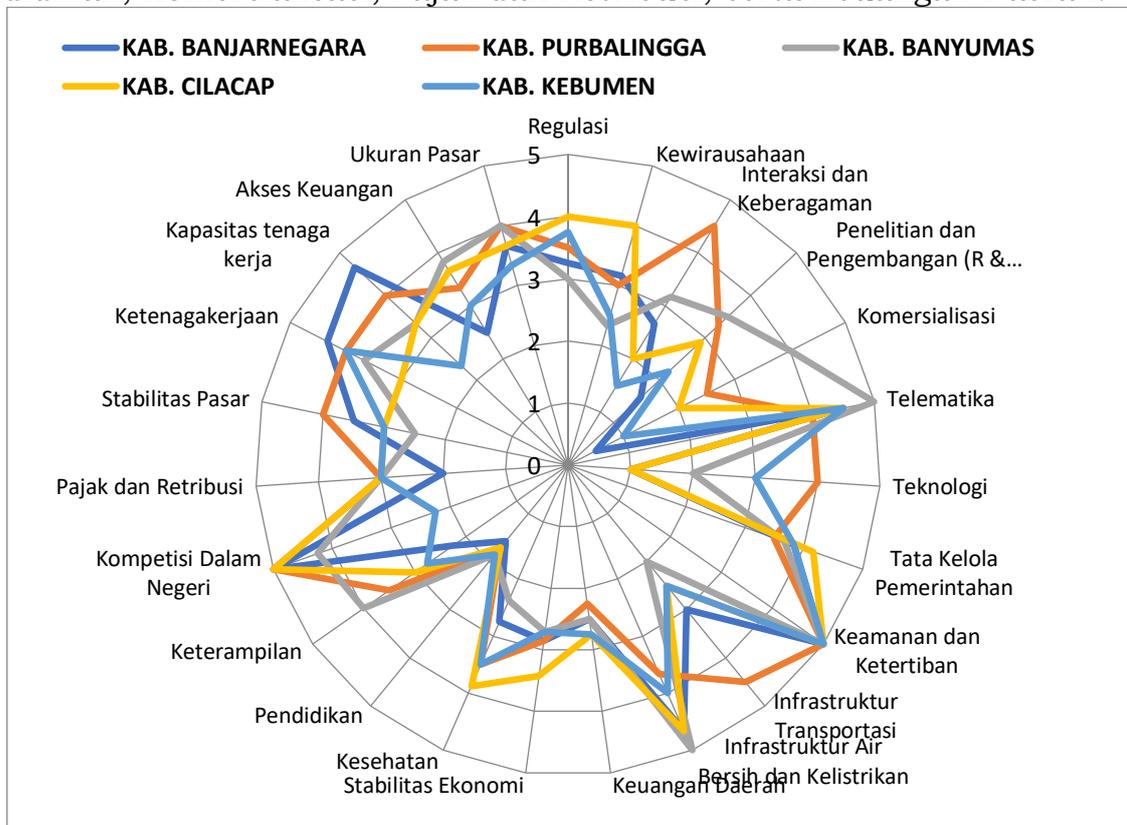
Kawasan strategis di WP Barlingmascakeb yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain:

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: KSP Kawasan Industri Terpadu (Cilacap dan Kebumen), KSP Kawasan Agropolitan SOBOBANJAR (Wonosobo-Banjarnegara), MANGGA EMAS (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas), Kawasan Strategis Pariwisata Terpadu (Kawasan Borobudur – Dieng – Kebumen);
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup: (KSN Kawasan Pangandaran – Kalipuncang – Segara Anakan – Nusakambangan(Pacangsanak); Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya (KSP).

c. Analisis Daya Saing Wilayah Barlingmascakeb

Nilai rata-rata IDSD wilayah Barlingmascakeb tahun 2022 adalah sebesar 3,240, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya 3,258. Dalam tinjauan internal, nilai IDSD tertinggi adalah pada Kabupaten Purbalingga, dengan nilai sebesar 3,519, yang dilanjutkan dengan nilai IDSD pada Kabupaten Cilacap dan Banyumas, masing-masing sebesar 3,357 dan 3,255. Untuk nilai IDSD Kabupaten Kebumen dan Banjarnegara berada di bawah rata-rata nilai daya saing wilayah Barlingmascakeb, dengan nilai masing-masing sebesar 3,061 dan

3,008. Nilai daya saing wilayah Barlingmascakeb relatif rendah pada Dimensi Pendidikan, Komersialisasi, Pajak dan Retribusi, serta Keuangan Daerah.



Sumber: Diolah berdasarkan hasil Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

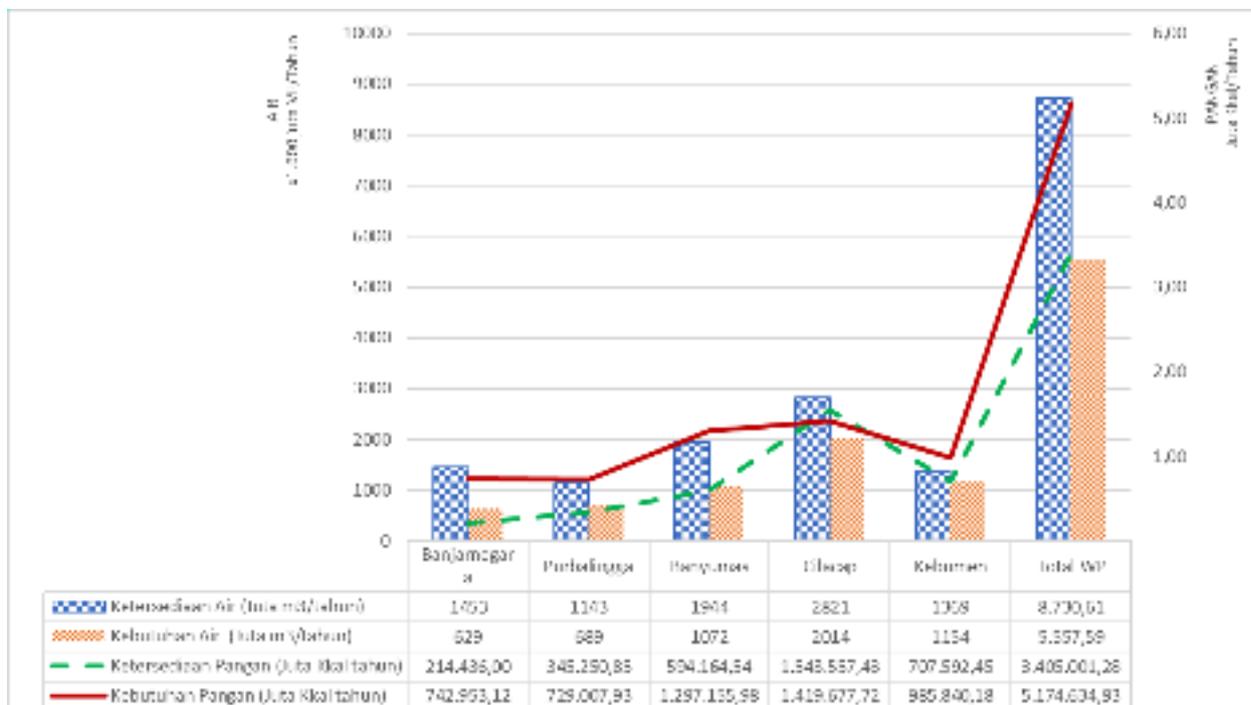
Gambar 7.22
Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Barlingmascakeb Tahun 2022

Kondisi daya saing wilayah Barlingmascakeb memiliki kelemahan pada beberapa indikator, antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat, rendahnya pendapatan daerah, lemahnya investasi nasional, rendahnya pertumbuhan dan dukungan permodalan untuk petani, nelayan, dan UMKM. Dalam rangka mendukung pengembangan potensi pertanian, serta pertambangan dan penggalian, maka diperlukan upaya meningkatkan pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada peningkatan inovasi dan teknologi pertanian dan pertambangan. Di samping itu, dukungan permodalan pada sektor pertanian perlu dioptimalkan, di samping peningkatan investasi yang diarahkan untuk hilirisasi hasil pertanian.

d. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air dan Pangan di Wilayah Barlingmascakeb

Status daya dukung dan daya tampung air di wilayah barlingmascakeb belum terlampaui baik di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap maupun Kebumen. Kecenderungan penurunan daya dukung air akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air sehingga diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui rehabilitasi dan konservasi DAS di wilayah tersebut.

Akan tetapi Status daya dukung dan daya tampung pangan di wilayah Barlingmascakeb telah terlampaui kecuali di Kabupaten Cilacap. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.



Sumber: Analisis dari Dokumen D3TLH Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.23

Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb

e. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Barlingmascakeb

Dalam rangka untuk mencapai target pembangunan jangka menengah di Jawa Tengah, diperlukan dukungan dari Kabupaten/Kota di wilayah pengembangan Barlingmascakeb pada tahun 2024 sampai 2026 dengan memperhitungkan target pada RKPD Provinsi Tahun 2022 dan 2023 untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 7.27.

Target Kinerja Pertumbuhan Ekonomi (%) WP Barlingmascakeb 2024-2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Banjarnegara	4,50 – 5,50	4,69 – 5,60	4,79 – 5,80
2.	Kab. Purbalingga	5,00 – 6,00	5,21 – 6,11	5,32 – 6,33
3.	Kab. Banyumas	5,90 – 6,40	6,15 – 6,52	6,28 – 6,75
4.	Kab. Cilacap	5,20 – 6,00	5,42 – 6,11	5,53 – 6,33
5.	Kab. Kebumen	5,20 - 5,80	5,42 – 5,91	5,53 – 6,12

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.28.

Target Kinerja Angka Kemiskinan (%) WP Barlingmascakeb 2024 - 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Banjarnegara	14,46 – 13,59	13,37 – 13,16	13,01 - 12,73
2.	Kab. Purbalingga	14,5 – 13,5	12,54 – 12,34	11,90 – 11,64
3.	Kab. Banyumas	10,90 – 9,96	9,59 – 9,52	9,15 – 9,05
4.	Kab. Cilacap	10,33	9,14 – 8,92	8,58 – 8,31
5.	Kab. Kebumen	14,00 - 15,00	14,12 – 13,99	13,63 – 13,45

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.29.

Target Kinerja TPT (%) WP Barlingmascakeb Tahun 2024 – 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Banjarnegara	6,54 – 5,94	6,25 – 5,53	5,89 – 5,17
2.	Kab. Purbalingga	5,40 – 4,70	5,16 – 4,38	4,86 – 4,09

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
3.	Kab. Banyumas	6,00 – 5,61	5,74 – 5,22	5,40 – 4,88
4.	Kab. Cilacap	7,24	6,92 – 6,74	6,52 – 6,30
5.	Kab. Kebumen	5,30 - 5,40	5,16 – 4,94	4,86 – 4,61

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Tabel 7.30.
Target Kinerja IPM WP Barlingmascakeb Tahun 2024 – 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Banjarnegara	69,74	70,85	71,51
2.	Kab. Purbalingga	70,16	70,60	70,88
3.	Kab. Banyumas	75,50	74,93	75,49
4.	Kab. Cilacap	71,74	72,08	72,50
5.	Kab. Kebumen	71,2 - 71,80	72,87	73,50

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

f. Indikasi Program Pembangunan Barlingmascakeb (2024 – 2026)

Dalam rangka mencapai target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, diperlukan beberapa upaya penanganan secara terintegrasi lintas kewenangan dan sektor.

Di Wilayah Pembangunan Barlingmascakeb terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Prioritas Strategis Nasional (*Majorproject* RPJMN), Indikasi Program Penataan Ruang (RTRW) dan Rencana Sektoral yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, diantaranya:

- 1) PSN: *Double Track* Jawa Selatan, Pembangunan Bahan Bakar Hijau (*Green Diesel Bio Refinery Revamping* RU IV Cilacap).

Terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada Tahun 2024 – 2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten / kota antara lain:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya melalui:
 - Peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman di perbatasan (Air bersih);
 - Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin;
- 2) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, diantaranya melalui: Peningkatan sebaran dan kualitas pelayanan kesehatan di desa-desa kawasan perbatasan.
- 3) Peningkatan sektor ketenagakerjaan, diantaranya melalui:
 - Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor pertambangan dan penggalian (las), minyak, perdagangan dan jasa (otomotif, listrik, ac);
 - Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - *Upskilling* terhadap instruktur dan upgrading sarana prasarana BLK dan SMK;
 - Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan *demandandansupply* tenaga kerja secara *online* dan *real time* antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
- 4) Pemantapan ketahanan pangan, diantaranya melalui: Pencegahan alih fungsi lahan pertanian(lahan baku sawah)/LSD; Rehabilitasi jaringan

- irigasi DI Buniayu, DI Piasa, DI Kebasen, DI Dwicupaksari, DI Banjaran; DI Cileumeuh, DI Andongbang, DI Krenceng, DI Bodag; Rehabilitasi Embung Kalong; dan Pembangunan pasar AGRO.
- 5) Peningkatan daya saing pariwisata, diantaranya melalui:
 - Pengembangan paket wisata aglomerasi wisata budaya Borobudur, Temanggung, Dataran tinggi Sindoro-Sumbing);
 - Pengembangan wisata hijau (wisata berbasis konservasi alam) melalui Penerapan eco tourism di Desa Wisata dataran tinggi Sindoro-Sumbing;
 - Peningkatan promosi dan pemasaran wisata berbasis alam (*Geopark*).
 - Dukungan promosi dan event wisata di kawasan DPP Nusakambangan-Baturraden;
 - Pengembangan desa wisata;
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
 - Fasilitasi Event Promosi Pariwisata di Wilayah DPP Nusakambangan-Baturraden.
 - 6) Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantaranya melalui:
 - Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;
 - Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan
 - Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
 - Pendampingan pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM.
 - 7) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, diantaranya melalui :
 - Fasilitasi Peningkatan jalur logistik (JLSS) sesi Cilacap Kebumen;
 - Peningkatan sistem jaringan jalan, utamanya pada: penuntasan Sokaraja – Purbalingga – Bobotsari - Ke Arah Pemalang; pemantapan Purbalingga – Klampok, Purwokerto - Baturaden; peningkatan koridor Cilopadang – Salem – Ke Arah Brebes, koridor Karang Pucung – Cukangleuleus.
 - Penyediaan layanan angkutan umum dikawasan aglomerasi perkotaan pada koridor Purwokerto – Purbalingga;
 - Pengembangan simpul transportasi, utamanya pada Fasilitasi Optimalisasi Bandara JB. Soedirman Purbalingga;
 - 8) Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion diantaranya ditempuh melalui:
 - a. Peningkatan ketahanan air, utamanya pada: pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Reg.) Keburejo dan Kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Sidareja, CAT Majenang, CAT Nusakambangan, CAT Cilacap, CAT Kroya, CAT Banyumudal, CAT Purwokerto-Purbalingga, CAT Karangobar, dan CAT Kebumen-Purworejo;
 - b. Peningkatan ketahanan lahan, utamanya pada: Penanganan lahan kritis; Rehabilitasi dan konservasi di Segara Anakan, DAS Citanduy, DAS Wawar Medono, DAS Serayu, Dieng, Gunung Slamet; Pendampingan Geopark Kawasan Karangsambung dan Geopark Kawasan Dieng (Wonosobo - Banjarnegara); Inisiasi pengembangan KEE Segara Anakan; Inisiasi proses pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Regional Banjarnegara – Purbalingga; Pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.
 - 9) Peningkatan ketahanan energi, diantaranya melalui: Fasilitasi pengembangan transmisi SUTET 500 kV Rawalo/Kesugihan – Incomer (Adipala – Cilacap); Fasilitasi pengembangan transmisi SUTT 150 kV Lomanis-Inc (Semen Nusantara – Rawalo), Fasilitasi Pengembangan panas bumi WKP Baturaden dan Pembangunan pertamina RDMP RU IV Cilacap; Pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (Biogas, Gas Rawa, PLTMH, PLTS Atap).

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyediaan layanan angkutan umum perkotaan Purwokerto dan sekitarnya;
- 2) Peningkatan aksesibilitas ke Bandara JB. Soedirman;
- 3) Peningkatan status Terminal Tipe C Kabupaten Cilacap menjadi Terminal Tipe B;

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Barlingmascakeb untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut:



Sumber: Analisis, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.24
Arah Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb

7.3.7. Wilayah Pengembangan Petanglong

a. Isu Strategis Wilayah Petanglong

Secara kewilayahan, terdapat beberapa isu strategis di wilayah Petanglong yang mempunyai dampak secara regional ditingkat Jawa Tengah dan memerlukan perhatian untuk dapat diselesaikan secara bertahap secara jangka menengah 2024 – 2026, antara lain:

- 1) Dimensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Pemerataan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah;
 - b) Peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kawasan industri (*link and match*);
 - c) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat terkait penanganan stunting dan peningkatan usia harapan hidup.
- 2) Dimensi Perekonomian :
 - a) Pengembangan aglomerasi pariwisata memerlukan aksesibilitas infrastruktur yang didukung pengembangan industry pariwisata (atraksi, amenitas, akomodasi, dan aktivitas);
 - b) Pemberdayaan potensi ekonomi kreatif sesuai produk unggulan daerah;

- c) Penyediaan infrastruktur air bersih secara regional.
- 3) Dimensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup :
- Penanganan wilayah pesisir secara komprehensif untuk mengatasi banjir, rob dan abrasi;
 - Penanganan pencemaran lingkungan akibat limbah industri;
 - Konservasi lingkungan secara terintegrasi dari hulu sampai hilir dan pengendalian perubahan fungsi lahan untuk mencegah kerusakan lingkungan (penurunan muka tanah, kekeringan, sedimentasi dan banjir);
 - Pengelolaan sampah secara regional.

b. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Wilayah Petanglong

Capaian kinerja pembangunan makro di Petanglong yang masih memerlukan perhatian karena dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah dari aspek Indek Pendidikan Manusia (IPM), terdapat 2 Kabupaten/Kota yang dibawah IPM provinsi, dan secara rata-rata IPM kewilayahan juga dibawah IPM Provinsi. Capaian TPT di Petanglong juga perlu perhatian khusus karena 2 Kabupaten/Kota capaiannya dibawah capaian Provinsi, walaupun secara rata-rata capaian TPT kewilayahan masih lebih baik dibandingkan TPT Provinsi.

Secara lengkap capaian makro pembangunan di Wilayah Pengembangan Petanglong pada Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.31.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, TPT, dan IPM WP Petanglong Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	PE (%) 2022	Angka Kemiskinan (%)	TPT (%)	IPM
1	Kab. Pekalongan	5,11	9,67	3,23	70,81
2	Kab. Batang	5,97	8,98	6,64	69,45
3	Kota Pekalongan	5,76	7,00	4,98	75,90
Rata-rata WP		5,61	8,55	4,95	72,05
Jawa Tengah		5,31	10,93	5,57	72,79
Nasional		5,31	9,57	5,86	72,91

Sumber: BPS,2022

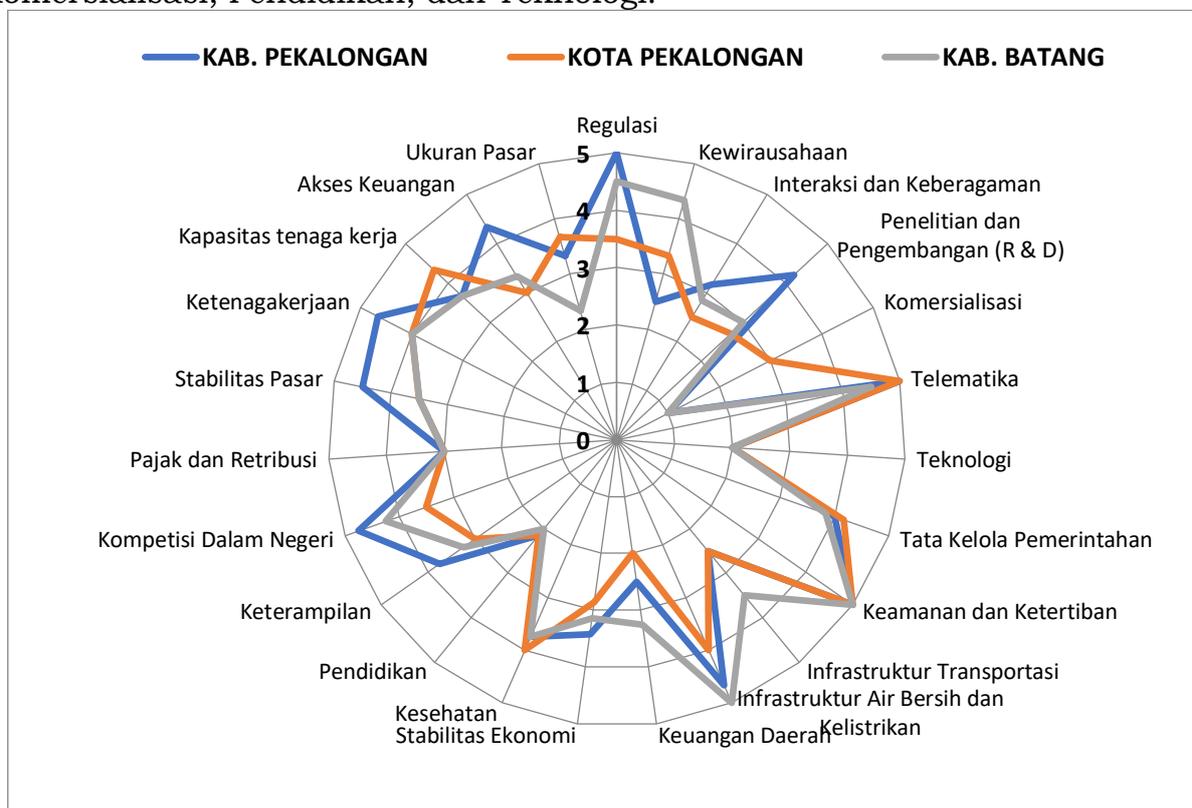
Di Wilayah Pengembangan Petanglong terdapat beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi potensi kewilayahan untuk dapat dioptimalkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan wilayah, diantaranya: perdagangan dan jasa, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, penyediaan akomodasi, pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi dan real estate.

Kawasan strategis yang berada di Wilayah Pengembangan Petanglong yang dapat dijadikan sebagai daya ungkit pencapaian kinerja pembangunan kewilayahan antara lain: Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: Kawasan Industri Terpadu Batang (KSP), Kawasan Perkotaan Petanglong (KSP).

c. Analisis Daya Saing Wilayah Petanglong

Nilai rata-rata IDSD Wilayah Petanglong Tahun 2022 adalah sebesar 3,462, sedikit meningkat dari rata-rata tahun sebelumnya 3,405. Nilai rata-rata ini merupakan yang tertinggi ke-3 pada perwilayahan di Jawa Tengah, di bawah Wilayah Subosukawonosraten dan Kedungsepur. Dalam tinjauan internal wilayah Petanglong, nilai IDSD pada Kabupaten Pekalongan merupakan yang tertinggi, yakni sebesar 3,589. Untuk nilai IDSD Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan lebih rendah, masing-masing sebesar 3,432 dan 3,366, yang keduanya berada di bawah rata-rata daya saing wilayah Petanglong. Secara

umum, nilai IDSD pada wilayah Petanglong ini rendah pada Dimensi Komersialisasi, Pendidikan, dan Teknologi.



Sumber: Diolah berdasarkan hasil Pemetaan Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2022

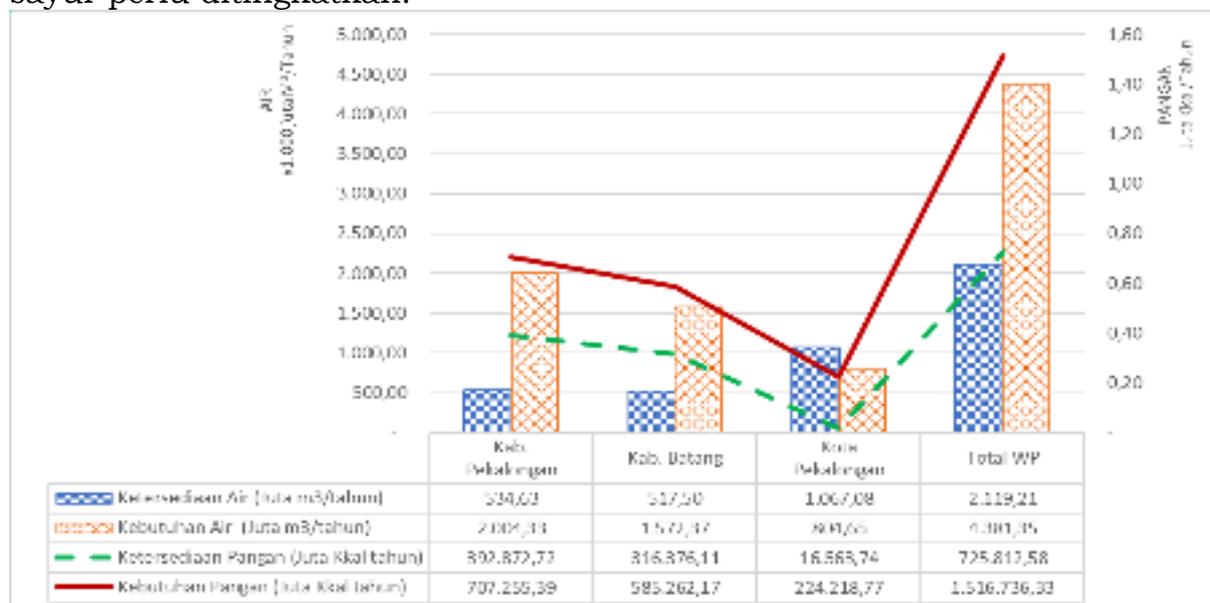
Gambar 7.25
Nilai IDSD Kabupaten/Kota di Wilayah Petanglong Tahun 2022

Kondisi daya saing wilayah Petanglong masih berada pada tahap penguatan kapasitas daya saing. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai pada beberapa indikator faktor pendukung daya saing yang masih lemah, antara lain pada dimensi pendidikan, komersialisasi, dan teknologi. Beberapa indikator yang menyebabkan rendahnya dimensi ini antara lain dipengaruhi oleh jumlah komersialisasi riset dan kondisi *Techno Park*, rendahnya jumlah penduduk berpendidikan tinggi, serta komersialisasi terhadap inovasi teknologi. Dengan memperhatikan potensi pengembangan perdagangan dan jasa, serta keberadaan Kawasan Industri di wilayah ini, diperlukan program yang mampu optimal mengungkit tingkat pendidikan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada penguasaan IPTEK serta kemampuan keahlian (*skill*). Di samping itu, program riset dan inovasi teknologi perlu diarahkan pada penguatan hilir untuk mendorong peningkatan komersialisasi.

d. Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air dan Pangan di Wilayah Petanglong

Status daya dukung dan daya tampung air di wilayah petanglong belum terlampaui kecuali Kota Pekalongan, akan tetapi status daya dukung dan daya tampung di wilayah petanglong telah terlampaui, baik di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang maupun Kota Pekalongan. Kecenderungan penurunan daya dukung air maupun pangan akan terus terjadi mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan akan penyediaan air dan pangan. Untuk mendukung keberlanjutan daya dukung dan daya tampung air diperlukan strategi peningkatan tangkapan air melalui pembangunan waduk, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Reg) serta Konservasi sumber air di CAT. Sedangkan untuk peningkatan daya dukung dan daya tampung pangan diperlukan strategi peningkatan ketahanan pangan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, selain itu juga konsumsi beras perlu

diturunkan, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.



Sumber: Analisis dari Dokumen D3TLH Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.26
Status Daya Dukung dan Tampung Terhadap Air dan Pangan di Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb

e. Target Kinerja Pembangunan Wilayah Petanglong

Dalam rangka untuk mencapai target pembangunan jangka menengah di Jawa Tengah, diperlukan dukungan dari Kabupaten/Kota di wilayah pengembangan Petanglong pada tahun 2024 sampai 2026 dengan memperhitungkan target pada RKPD Provinsi Tahun 2022 dan 2023 untuk mencapai sasaran kinerja 4 (empat) indikator utama sebagai berikut.

Tabel 7.32.
Target Kinerja Pertumbuhan Ekonomi (%) WP Petanglong 2022 - 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Pekalongan	5,50 - 5,75	5,73 - 5,85	5,82 - 6,06
2.	Kab. Batang	5,70 - 6,20	5,94 - 6,31	6,06 - 6,54
3.	Kota Pekalongan	5,40 - 5,80	5,63 - 5,91	5,74 - 6,12

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.33.
Target Kinerja Angka Kemiskinan (%) WP Petanglong 2022 - 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Pekalongan	9,10 - 8,70	8,00 - 7,86	7,61 - 7,43
2.	Kab. Batang	8,34 - 7,90	7,17 - 7,07	6,73 - 6,60
3.	Kota Pekalongan	6,30 - 5,93	6,12 - 6,05	5,94 - 5,84

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.34.
Target Kinerja TPT (%) WP Petanglong Tahun 2022 - 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Pekalongan	3,10 - 3,00	2,96 - 2,79	2,79 - 2,61
2.	Kab. Batang	5,60	5,35 - 5,21	5,04 - 4,87
3.	Kota Pekalongan	4,50 - 4,70	4,49 - 4,19	4,23 - 3,92

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Tabel 7.35.
Target Kinerja IPM WP Petanglong Tahun 2022 – 2026

No	Kabupaten/Kota	RPD 2024	RPD 2025	RPD 2026
1.	Kab. Pekalongan	72,00	72,90	73,83
2.	Kab. Batang	70,04	70,36	70,63
3.	Kota Pekalongan	76,70	77,39	77,89

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2023

f. Indikasi Program Pembangunan Petanglong (2024 – 2026)

Dalam rangka mencapai target indikator makro pembangunan dalam mendukung agregat makro capaian ditingkat provinsi, diperlukan beberapa upaya penanganan secara terintegrasi lintas kewenangan dan sektor.

Di Wilayah Pembangunan Petanglong terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Prioritas Strategis Nasional (*Majorproject* RPJMN), Indikasi Program Penataan Ruang (RTRW) dan Rencana Sektorial yang dapat menjadi pengungkit pembangunan, diantaranya:

- 1) PSN: Kereta Api Jakarta – Surabaya, Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Pembangunan Transmisi Pipa Gas Ruas Cirebon – Semarang,
- 2) RPJMN: Pengamanan Pesisir Perkotaan Pantura Jawa, Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Tambak di Pantura Jawa,

Keberadaan KIT Batang berpotensi untuk mengembangkan konsep Mega Wilayah Pengembangan (MWP) / Super Koridor Wilayah Petanglong – Kedungsepur sebagai *prime mover* pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Terdapat beberapa prioritas rencana program pembangunan provinsi pada Tahun 2024 – 2026 yang memerlukan elaborasi atau dukungan program upaya dari pemerintah kabupaten / kota antara lain:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya melalui:
 - Pemasangan sambungan listrik murah dan hemat bagi rumah tangga miskin.
- 2) Peningkatan sektor ketenagakerjaan, diantaranya melalui:
 - Penciptaan/perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi SDM ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha khususnya di sektor perdagangan dan jasa (batik, makanan minuman, produk hasil pertanian dan perikanan);
 - Penguatan lembaga pelatihan kerja baik milik swasta dan pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas daya tampung pelatihan, serta mendorong jumlah pelatihan yang terakreditasi;
 - Upskilling terhadap instruktur dan upgrading sarana prasarana BLK dan SMK;
 - Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Optimalisasi peran aplikasi e-makaryo dalam rangka menciptakan demand dan supply tenaga kerja secara online dan real time antara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan pencari kerja.
- 3) Pemantapan ketahanan pangan, diantaranya melalui: Rehabilitasi jaringan irigasi DI Padurekso, DI Sudikampir, DI Tapak Menjangan, DI Asem Siketek.
- 4) Peningkatan daya saing pariwisata, diantaranya melalui:
 - Dukungan promosi dan event wisata di Kabupaten Batang, Kabupaten/Kota Pekalongan;
 - Pengembangan desa wisata beserta dukungannya
 - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi ;
 - Fasilitasi Event Promosi Pariwisata di Wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten/Kota Pekalongan
- 5) Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, diantaranya melalui :
 - Pendampingan promosi dan pengemasan produk, serta jaminan kualitas kelayakan produk;

- Kemudahan perolehan/penyediaan bahan baku dan akses permodalan
 - Pelatihan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital;
 - Pendampingan pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM
- 6) Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, diantaranya melalui:
- Peningkatan sistem jaringan jalan, utamanya pada ruas : pemantapan Kesesi (Perbatasan Pemalang) – Kajen – Bawang – Ke Arah Sukorejo Kabupaten Kendal; penuntasan koridor Pekalongan – Kajen – Ke Arah Banjarnegara dan Wonosobo (Pendukung aksesibilitas kawan dieng dari utara);
 - Pengembangan simpul transportasi, diantaranya melalui: fasilitasi pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Batang dan Peningkatan Terminal Tipe B Kajen dan Banyuputih.
- 7) Pendekatan pembangunan berbasis ekoregion diantaranya ditempuh melalui:
- a. Peningkatan ketahanan air, utamanya pada: Pengendalian banjir dengan pembangunan tebing Sungai Bremsi Meduri, Sungai Sengakarang, Sungai Pengendalian banjir dan rob di Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Kota Pekalongan; Penanganan limbah batik; Pembangunan Waduk Petanglong; Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Regional (SPAM Reg.) Petanglong; Kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah dalam rangka upaya konservasi air tanah pada CAT Pekalongan-Pemalang dan CAT Subah.
 - b. Peningkatan ketahanan lahan, diantaranya melalui: Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis di DAS Comal dan Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang); Pengawasan usaha pertambangan serta penertiban PETI.
- 8) Peningkatan ketahanan energi, diantaranya melalui: Pembangunan infrastruktur EBT potensi lokal (Biogas, Gas Rawa, PLTMH, PLTS Atap); Fasilitasi Pembangunan pipa gas distribusi Semarang-Batang-Cirebon.

Beberapa kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang diperlukan sebagai sinergi pengembangan kawasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan aksesibilitas Pelabuhan Pengumpan Regional Batang (eksisting) dan Ruas Jalan Bawang – Dieng.

Potensi kewilayahan dan indikasi kebutuhan rencana pengembangan wilayah Petanglong untuk mencapai agregat capaian makro Provinsi Jawa Tengah secara spasial sebagaimana gambar sebagai berikut:



Sumber: Analisis, BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 7.27

Arah Pengembangan Wilayah Petanglong

7.3.8. Arah Pengembangan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi

Ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik seringkali terjadi pada wilayah perbatasan daerah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena fokus dan arah pembangunan yang belum cermat, kondisi geografis yang kurang menguntungkan, serta kurangnya dukungan prasarana dan sarana infrastruktur dan pelayanan publik seperti pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial). Di sisi lain wilayah perbatasan mempunyai fungsi yang strategis sebagai etalase gambaran daerah/wilayah bersangkutan.

Dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif dan intensif melakukan sinergi pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 5 (lima) konsep pengembangan pembangunan wilayah perbatasan, yaitu:

1. Keterpaduan dan sinergi penggunaan sumber daya untuk menserasikan pembangunan antar wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
2. Keselarasan adalah keberlanjutan pembangunan;
3. Penanganan konflik/potensi konflik;
4. Pemanfaatan bersama adalah pemanfaatan fasilitas/sarana prasarana pada wilayah perbatasan; dan
5. Pengawasan dan penanganan bersama adalah upaya pelaksanaan/ implementasi peraturan.

BAB VIII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 35 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sebanyak 36 juta jiwa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi dinamika pembangunan yang bervariasi. Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan modal yang terangkum dalam struktur keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, struktur keuangan pemerintah daerah terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui program/kegiatan.

Pelaksanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan sebagaimana tertuang dalam Bab III. Pendapatan daerah pada tahun 2024-2026 diproyeksikan mengalami fluktuasi sebagai dampak penerapan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD. Proyeksi kerangka pendanaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 secara lengkap sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.1.
Kerangka Pendanaan Daerah Indikatif Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024–2026

URAIAN		JUMLAH (Rp)		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1		2	3	4
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH		18.159.598.504.000	14.808.893.164.000	15.711.626.236.000
1	Pajak Daerah	15.456.349.398.000	12.184.082.081.000	13.029.221.496.000
2	Retribusi Daerah	136.399.313.000	106.149.242.000	113.809.487.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	689.418.000.000	664.112.968.000	679.363.220.000
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.877.431.793.000	1.854.548.873.000	1.889.232.033.000
PENDAPATAN TRANSFER		7.620.239.032.000	7.626.239.032.000	7.743.500.049.000
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.620.239.032.000	7.626.239.032.000	7.743.500.049.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		22.750.000.000	22.750.000.000	22.750.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		25.802.587.536.000	22.457.882.196.000	23.477.876.285.000
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI		14.405.558.878.000	13.677.339.754.000	14.360.912.199.000
1	Belanja Pegawai	7.693.711.839.000	7.891.312.231.000	7.909.466.331.000
2	Belanja Barang dan Jasa	5.202.757.267.000	5.192.761.838.000	5.571.976.531.000
3	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	500.000.000
4	Belanja Hibah	1.415.589.772.000	497.765.685.000	780.469.337.000

URAIAN		JUMLAH (Rp)		
		TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1		2	3	4
5	Belanja Bantuan Sosial	93.000.000.000	95.000.000.000	98.500.000.000
BELANJA MODAL		2.383.508.147.000	2.062.056.452.000	2.621.106.962.000
BELANJA TAK TERDUGA		25.000.000.000	26.500.000.000	28.500.000.000
BELANJA TRANSFER		9.968.520.511.000	6.771.985.990.000	6.797.357.124.000
1	Belanja Bagi Hasil	6.885.187.647.000	4.006.281.000.000	4.263.329.500.000
2	Belanja Bantuan Keuangan	3.083.332.864.000	2.765.704.990.000	2.534.027.624.000
JUMLAH BELANJA		26.782.587.536.000	22.537.882.196.000	23.807.876.285.000
SURPLUS/DEFISIT		(980.000.000.000)	(80.000.000.000)	(330.000.000.000)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		1.050.000.000.000	150.000.000.000	400.000.000.000
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	150.000.000.000	150.000.000.000	400.000.000.000
2	Pencairan dana cadangan	900.000.000.000		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
1	Penyertaan modal	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO		980.000.000.000	80.000.000.000	330.000.000.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0	0	0

Sumber: TAPD Provinsi Jawa Tengah, 2023 (hasil analisis)

8.2. Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Jawa Tengah tahun 2024–2026 didukung dengan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah. Rencana program prioritas yang ditetapkan menjadi program prioritas perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 menjadi kegiatan dan subkegiatan.

Rencana program prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024-2026 dijabarkan dalam enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, dua unsur pendukung urusan pemerintahan, enam unsur penunjang urusan pemerintahan, satu unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan satu unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada perluasan akses pemerataan dan mutu layanan pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada penguatan implementasi kurikulum adaptif berbasis karakter dan pengembangan *softkill*.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, dan pemerataan layanan pendidikan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemetaan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan warga lanjut usia sesuai standar; percepatan perbaikan gizi masyarakat; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, serta kesehatan jiwa; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit khusus mata, serta peningkatan mutu pelayanan di tujuh RSUD/RSJD.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pemenuhan obat dan bahan habis pakai.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan; serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA); normalisasi/restorasi sungai; operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *flood forecasting and warning system (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan

pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota melalui pengembangan SPAM regional, hibah prasarana dan sarana SPAM perdesaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional melalui penyediaan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), hibah prasarana dan sarana SPAL-D skala komunal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan prasarana dan sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

e. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar tujuh meter dengan muatan sumbu terberat (MST) delapan ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antarwilayah serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan wilayah dan kajian tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota, sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), serta bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana permukiman, serta penyusunan dokumen pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi, serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan masyarakat dan satuan tugas perlindungan masyarakat (satgas linmas).

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*/EWS) di daerah rawan bencana, satuan pendidikan aman bencana (SPAB), unit layanan inklusi disabilitas (Unit LIDi), penyusunan kajian risiko bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); evakuasi dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P).

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta daerah rawan kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas potensi sosial kesejahteraan sosial (PSKS), koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, warga lanjut usia (lansia) telantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar-warga negara Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), pelatihan *housekeeping*, *tour guide*, *waiters*, barista, pelatihan SSW (*specified skilled worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, pelayanan antarkerja lintas daerah kabupaten/kota

berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antarkerja antardaerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme, dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam satu daerah provinsi.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan lembaga kerja sama (LKS) bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, serta koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penarikan pekerja anak, pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak (PPA), penanganan kasus ketenagakerjaan, pemeriksaan dan pengujian obyek keamanan dan keselamatan (K3) di perusahaan, serta pembinaan dan pemeriksaan norma K3 di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, rehabilitasi gudang cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan kerawanan pangan dengan penanganan desa *stunting* dan pengembangan desa mandiri pangan melalui fasilitasi usaha produktif di lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, pembinaan *higiene* sanitasi, serta penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui penetapan lokasi.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diarahkan pada fasilitasi peksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup

(DIKPLHD), serta fasilitasi dan validasi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) UMKM dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim di lokasi super prioritas kerentanan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui penanganan ruang terbuka hijau/RTH, serta pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada pembinaan ke pelaku usaha/kegiatan terkait pengelolaan limbah B3 dan sosialisasi pengelolaan limbah B3 bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan/AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan/UKL-UPL, dokumen evaluasi lingkungan hidup/DELH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana persampahan antara lain tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) regional.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis (bimtek)

peningkatan kapasitas aparaturnya pendaftaran penduduk, rapat koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil), sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, serta monitor ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten/kota.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparaturnya pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparaturnya dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerja sama antardesa melalui fasilitasi kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerja sama antarkawasan perdesaan di Jawa Tengah.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparaturnya dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, serta fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan badan usaha milik desa (BUM-Des) dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pepaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kepesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah provinsi berupa operasionalisasi layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan; pengelolaan terminal penumpang tipe B berupa pembangunan dan peningkatan terminal; penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di ruas jalan provinsi.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi berupa pembangunan dermaga sungai dan pengadaan/pemasangan lampu penerangan pada penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota; penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses pelimpahan aset); penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis izin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api nonaktif.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan layanan informasi dan komunikasi baik terutama antar perangkat daerah melalui layanan jaringan intra, layanan pengaduan, dan layanan *data center*.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi seperti melalui pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek kesehatan koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, peningkatan kapasitas SDM serta prasarana dan sarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, yang diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, digital forensik, pemantapan kinerja tim *computer security response team* (CSRT), dan layanan *penetration testing* sertifikasi elektronik, kontra pengindraan, dan *jamming*. Upaya peningkatan keamanan informasi melalui penerapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi Jawa Tengah.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelestarian seni, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK).

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, serta organisasi kebudayaan dalam rangka pengembangan ekspresi budaya.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan kewenangan provinsi sesuai standar nasional perpustakaan (SNP), peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan lembaga kearsipan daerah (LKD) provinsi dan perangkat daerah, serta lembaga kearsipan daerah (LKD) kabupaten/kota.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana usaha ekonomi bagi masyarakat pesisir; pengelolaan kawasan konservasi melalui

peneggelaman terumbu karang buatan/TKB, penanaman bibit mangrove; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional pelabuhan perikanan pantai; koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perizinan kapal perikanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi prasarana dan sarana budi daya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CPPIB (cara pembuatan pakan ikan yang baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi prasarana dan sarana loka budi daya; dan penanganan hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budi daya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan angka konsumsi ikan di Jawa Tengah melalui kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) melalui kerja sama dengan *stakeholders*; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (sertifikat kelayakan pengolahan), rekomendasi SNI (standar nasional Indonesia), dan sertifikat hasil uji (CAT/*certificate of analysis*); diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan; penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata baik dalam dan luar negeri; pengembangan daya tarik wisata unggulan; penetapan kawasan strategis pariwisata provinsi; perencanaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi prasarana dan sarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; penerbitan tanda usaha pariwisata lintas

daerah kabupaten/kota; pengelolaan investasi pariwisata; serta pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi baik dalam dan luar negeri antara lain dilakukan melalui fasilitasi *event* pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata provinsi; penguatan promosi melalui media luar ruang, media digital, media elektronik, dan media cetak baik dalam dan luar negeri.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana kota kreatif melalui sosialisasi dan pendampingan pengisian borang; pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI), pembinaan teknis, pendampingan dan fasilitasi HKI bagi pelaku ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjut melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (kelompok sadar wisata atau pokdarwis, sadar wisata dan sapta pesona, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, temu mitra parekraf, temu bisnis pelaku ekonomi kreatif atau ekraf); pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan/bimbingan teknis atau bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor, pembentukan korporasi, subsidi suku bunga kredit, asuransi petani, pembentukan *food estate*, optimalisasi fungsi Kartu Tani sebagai *database* petani dan lahan, peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan, revitalisasi kebun benih, penyediaan alat mesin pertanian atau alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi cara produksi pakan yang baik (CPPB), fasilitasi *good breeding practices* (GBP), dan fasilitasi *good farming practices* (GFP).

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak

untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi nomor kontrol veteriner (NKV).

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih, serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan yang diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan sumber daya manusia atau SDM penyuluh. Program ini juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (supra).

4. Kehutanan

Rencana program prioritas urusan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu/HHBK dan jasa lingkungan; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pengolahan hasil hutan dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun; rehabilitasi lahan kritis melalui pengembangan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove, dan pembangunan bangunan konservasi tanah dan air; penanganan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan; perlindungan dan pengamanan hutan dan perbenihan tanaman hutan, serta fasilitasi penataan areal IPHPS (izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial).

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya Mangkunegoro I, pengelolaan Kebun Raya Baturraden, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam melalui perencanaan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE), pendampingan masyarakat penyangga KEE; inisiasi peningkatan/perubahan status kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) berupa pengembangan kawasan konservasi baru yang menjadi kewenangan provinsi (taman hutan rakyat atau tahura) di Kawasan Gunung Muria, Gunung Ungaran, maupun KHDPK lain yang potensial menjadi kawasan konservasi di Jawa Tengah; perlindungan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*appendix*) CITES

melalui penanganan konflik satwa liar dan pengendalian pemanfaatan TSL, serta pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah.

c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat berupa penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan dan perhutanan sosial, peningkatan kapasitas SDM kehutanan; pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial dengan sosialisasi, pendampingan penguatan pengelolaan untuk kelembagaan, kawasan dan usaha, serta penguatan pokja percepatan perhutanan sosial (PPS), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial; serta pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM)/pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan (kulin KK)/izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS).

d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan DAS dalam satu kabupaten/kota melalui peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS, gerakan pemulihan DAS, serta peningkatan peran badan usaha dan lembaga masyarakat dalam rehabilitasi DAS.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk menjaga keseimbangan neraca konservasi air tanah, penyusunan kajian studi kelayakan dalam perizinan air tanah, serta penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah serta pendampingan *geopark* di Jawa Tengah sehingga diharapkan akan mengurangi risiko akibat bencana geologi (*geological hazard*).

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan pada peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral dan penetapan harga patokan mineral, penyusunan statistik pertambangan, dan rekonsiliasi data produksi. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*good mining practice*), terwujudnya tertib usaha pertambangan dan penertiban pertambangan tanpa izin (PETI), dan peningkatan produktivitas dan produksi usaha pertambangan melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha pertambangan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan pertambangan di Jawa Tengah.

c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi melalui pengembangan prasarana dan sarana EBT, meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT, meningkatkan edukasi kepada masyarakat

terhadap pemanfaatan energi alternatif, serta pengembangan desa mandiri energi dengan pengembangan potensi energi lokal.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan konsumsi tenaga listrik per kapita melalui kegiatan penerbitan rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan disertai pengawasan, pengendalian dan pembinaan, peningkatan keselamatan ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk terwujudnya kehandalan pasokan listrik, peningkatan peran energi listrik dalam perekonomian daerah, dan pemenuhan akses listrik terhadap masyarakat miskin.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA dan angka pengenal importir (API) melalui *post audit* dan verifikasi ekspor/impor di kabupaten/kota.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang sistem resi gudang (SRG).

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya, serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *export coaching program* (ECP), *coaching program for new exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *one on one meeting* dengan atase perdagangan (Atdag)/*Indonesian trade promotion center* (ITPC).

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan industri baik industri agro dan nonagro melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok usaha industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi industri kecil menengah (IKM).

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin serta pengawasan terhadap usaha industri agro dan nonagro.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk izin usaha industri/IUI, izin perluasan usaha industri/IPUI, izin usaha kawasan industri/IUKI, dan izin perluasan kawasan industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi antarpemerintah daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, dan pelatihan transmigrasi lokal.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi umum yang menunjang pelaksanaan kegiatan di lingkup sekretariat daerah.

b. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan provinsi; fasilitasi penataan kelembagaan kabupaten/kota; fasilitasi penyusunan analisis jabatan serta evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan diantaranya melalui penyusunan peta proses bisnis daerah dan fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja.

c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerja sama antarpemerintah; fasilitasi kerja sama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerja sama daerah; evaluasi pelaksanaan kerja sama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

d. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan prasarana dan sarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan nonpelayanan dasar.

e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah nonlitigasi dan hak asasi manusia atau HAM.

f. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD).

g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan, dan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.

h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi

Program ini diarahkan pada kegiatan penunjang pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan, serta perencanaan dan evaluasi kinerja sekretariat DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerja sama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup perekonomian; konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkup pemerintahan sosial dan budaya; serta konsistensi, keselarasan, dan ketercapaian perencanaan lingkungan hidup. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, penyusunan

dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang diamankan, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah** yang diarahkan dalam rangka mewujudkan distribusi aparatur sipil negara atau ASN yang tepat dan akuntabel serta memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan sistem informasi melalui perencanaan pengadaan ASN sesuai kebutuhan baik melalui rekrutmen CASN dan/atau fasilitasi mutasi pegawai negeri sipil atau PNS lintas instansi pemerintah yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan *assessment test*; promosi dan mutasi ASN yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai berdasarkan sistem merit melalui *talent scouting* maupun seleksi terbuka; pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dengan tugas/izin belajar; monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki; memberikan pembinaan disiplin, perlindungan dan penghargaan yang layak bagi ASN; serta pengelolaan data kepegawaian dan layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerja sama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6. Penghubung

Rencana program prioritas unsur penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan

publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan dalam rangka pengawasan internal pemerintah pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja perangkat daerah, akuntabilitas keuangan daerah, serta pengawasan dengan tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; melaksanakan pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah terkait reformasi birokrasi dan manajemen risiko, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi kepada elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**.

Secara rinci rencana program prioritas pembangunan daerah tahun 2024-2026 beserta indikator dan pagu indikatifnya dapat dilihat dalam Tabel 8.2 berikut.

BAB IX

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi indikator kinerja utama daerah (IKU Daerah) dan indikator kinerja daerah (IKD). IKU Daerah menggambarkan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. IKD menggambarkan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026.

9.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 sebagai berikut.

Tabel 9.1.

Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Perangkat Daerah Koordinator
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	42,15	40,87	45,82	47,60	49,68	Sekretariat Daerah
2	Angka Kemiskinan	%	10,98	9,86-9,05	9,76-8,96	9,28-8,08	8,67-7,28	Sekretariat Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,366	0,340	0,364	0,362	0,360	Sekretariat Daerah
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,31	5,20-5,60	4,70-5,50	4,90-5,60	5,00-5,80	Sekretariat Daerah
5	Inflasi	%	5,63	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,57	5,48-4,80	5,44-4,94	5,20-4,60	4,90-4,30	Sekretariat Daerah
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,27	104,05	107,45	107,52	107,68	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,79	72,88	73,43	73,99	74,55	Sekretariat Daerah
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	n.a.	n.a.	57,56	57,91	58,17	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Perangkat Daerah Koordinator
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,83	92,58	93,03	93,13	93,23	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,16	n.a.	58,20	58,50	59,00	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,53 ³⁾	67,53 ³⁾	67,55	67,56	67,57	Sekretariat Daerah
13	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	8,23	n.a.	4,00	4,00	4,00	Sekretariat Daerah
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,31	80,00	81,50	82,00	82,50	Sekretariat Daerah

Keterangan:

- 1) Realisasi indikator kinerja RPJMD periode sebelumnya sampai dengan tahun 2022 dan/atau gambaran umum kondisi daerah pada tahun 2022; jika tertulis n.a. maka data tersebut belum dirilis;
- 2) Target/proyeksi tahun 2023 adalah target/proyeksi yang tertuang dalam RKPDP Tahun 2023; jika tertulis n.a. artinya bahwa indikator tersebut merupakan indikator baru yang tidak digunakan dalam RPJMD Tahun 2018-2023/RKPDP Tahun 2023;
- 3) Nilai penyesuaian berdasarkan PermenLHK 27/2021 tentang IKLH, penambahan stasiun AQMS (Air Quality Monitoring Station) dan adanya penambahan titik sampel pemantauan kualitas air dari kabupaten/kota.

9.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan kinerja seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. IKD merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta indikator tujuan dan/atau sasaran seluruh perangkat daerah. Indikator kinerja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 9.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Akhir
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	42,15	40,87	45,82	47,60	49,68	49,68
2	Angka Kemiskinan	%	10,98	9,86-9,05	9,76-8,96	9,28-8,08	8,67-7,28	8,67-7,28
3	Rasio Gini	Angka	0,366	0,340	0,364	0,362	0,360	0,360
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,31	5,20-5,60	4,70 - 5,50	4,90 - 5,60	5,00 - 5,80	5,00 - 5,80
5	Inflasi	%	5,63	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,57	5,48-4,80	5,44 - 4,94	5,20 - 4,60	4,90 - 4,30	4,90 - 4,30
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,27	104,05	107,45	107,52	107,68	107,68
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,79	72,88	73,43	73,99	74,55	74,55
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	n.a.	n.a.	57,56	57,91	58,17	58,17
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,83	92,58	93,03	93,13	93,23	93,23
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,16	n.a.	58,20	58,50	59,00	59,00
B	Aspek Pelayanan Umum							
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar							
	Pendidikan							
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,81	12,94	12,94	12,96	12,98	12,98
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,93	7,90	8,08	8,14	8,20	8,20
	Kesehatan							
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,52	74,73	74,60	74,65	74,68	74,68
2	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	n.a.	n.a.	2,00	2,00	2,00	2,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Akhir
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	68,57	n.a.	60,00	74,28	85,71	85,71
4	Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting	%	75,00	n.a.	80,00	85,00	90,00	90,00
5	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa	%	74,00	n.a.	78,00	82,00	86,00	86,00
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	24,95	n.a.	49,89	51,69	53,49	53,49
8	Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	86,03	n.a.	87,00	87,00	87,00	87,00
9	Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90,00	n.a.	90,00	90,00	90,00	90,00
10	Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90,00	n.a.	90,00	90,00	90,00	90,00
11	Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	87,00	n.a.	88,00	89,00	90,00	90,00
12	Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98,00	n.a.	98,00	98,00	98,00	98,00
13	Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,17	n.a.	98,17	98,20	98,25	98,25
14	Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	97,00	n.a.	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase capaian SPM di RS Mata	%	n.a.	n.a.	100,00	100,00	100,00	100,00
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap ³⁾	%	92,49	92,35	93,20	93,50	94,35	94,35
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	43,50	44,24	45,09	45,39	46,24	46,24

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Akhir
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
3	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	88,21	n.a.	91,18	91,48	92,33	92,33
4	Persentase akses air minum aman	%	88,27	n.a.	40,93	42,93	44,93	44,93
5	Persentase akses air limbah domestik aman	%	90,38	n.a.	10,97	11,49	12,00	12,00
6	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	n.a.	n.a.	49,42	61,65	72,82	72,82
7	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	n.a.	n.a.	62,06	64,17	66,29	66,29
8	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	n.a.	n.a.	61,57	68,76	77,56	77,56
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%						
1	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat ⁶⁾	%	n.a.	n.a.	14,29	28,57	42,86	42,86
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	n.a.	n.a.	0,20	0,35	0,55	0,55
3	Persentase penurunan kawasan kumuh ⁶⁾	%	n.a.	n.a.	55,21	53,30	51,40	51,40
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	n.a.	n.a.	82,00	85,00	88,00	88,00
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,65	3,60	0,74 ⁴⁾	0,75 ⁴⁾	0,76 ⁴⁾	0,76 ⁴⁾
	Sosial							
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	n.a.	n.a.	0,55	1,10	1,66	1,66
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
	Tenaga Kerja							
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,02	n.a.	28,60	28,64	28,70	28,70
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	34,00	57,14	62,85	68,57	74,28	74,28

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Akhir
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	(Juta Rp)	57,11	54,62	56,00	56,50	57,00	57,00
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	12,20	8,19	9,24	10,15	10,53	10,53
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	70,52	71,01	71,04	71,06	71,08	71,08
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	90,83	91,67	91,07	91,58	92,09	92,09
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	88,10	82,97	81,53	80,96	80,38	80,38
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	n.a.	n.a.	35,00	35,00	40,00	40,00
2	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan ⁵⁾	Per 100.000	4,38	5,64	4,25	4,20	4,15	4,15
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	n.a.	n.a.	66,00	67,00	68,00	68,00
	Pangan							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,95	n.a.	83,00	83,05	83,10	83,10
	Pertanahan							
1	Persentase terselesainya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	n.a.	n.a.	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria	%	n.a.	n.a.	100,00	100,00	100,00	100,00
	Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Air	Angka	50,63	50,65	50,66	50,67	50,68	50,68
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,96 ³⁾	85,00	85,01	85,02	85,03	85,03
3	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,38 ³⁾	3,38 ³⁾	3,37	3,35	3,33	3,33
4	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,3707 ³⁾	0,37 ³⁾	0,37	0,37	0,37	0,37

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Akhir
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
	Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	n.a.	n.a.	4,00	4,00	4,00	4,00
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	%	n.a.	n.a.	0,73	0,76	0,80	0,80
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,15	2,19	2,13	2,12	2,11	2,11
	Perhubungan							
1	Indeks pelayanan transportasi	Angka	n.a.	n.a.	6,07	6,31	6,53	6,53
2	Rasio konektivitas provinsi	Angka	n.a.	n.a.	0,39	0,42	0,46	0,46
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	n.a.	n.a.	16,07	15,24	14,48	14,48
4	On Time Performance layanan transportasi	%	n.a.	n.a.	83,21	85,05	86,88	86,88
	Komunikasi dan Informatika							
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,34	3,33	3,07	3,39	3,77	3,77
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	9,14	5,64	12,53	12,99	13,41	13,41
2	Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	n.a.	n.a.	0,29	0,38	0,46	0,46
3	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	9,94	29,68	7,16	7,39	7,74	7,74
	Penanaman Modal							
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,40	9,00-10,00	4,00	4,25	4,50	4,50
2	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	103,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	94,28	90,00	90,00	91,00	92,00	92,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Akhir
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
	Kepemudaan dan Olahraga							
1	Sport Development Index (SDI)	%	n.a.	n.a.	0,43	0,45	0,47	0,47
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	54,50	55,15	57,85	58,25	58,54	58,54
	Statistik							
1	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	n.a.	n.a.	32,00	64,00	100,00	100,00
	Persandian							
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	3,00 (634)	3,00	636,00	638,00	640,00	640,00
	Kebudayaan							
1	Angka Melek Budaya	%	n.a.	n.a.	52,32	53,82	55,32	55,32
	Perpustakaan							
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	15,62	n.a.	16,00	17,00	17,50	17,50
	Kearsipan							
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	93,45	n.a.	94,00	95,00	96,00	96,00
	Urusan Pilihan							
	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan	Ton	879.300,00	882.317,00 ⁷⁾	927.350	952.718	979.038	2.859.106,00
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	104,86	n.a.	105,00	105,50	106,00	106,00
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Angka	109,95	n.a.	110,00	110,50	112,00	112,00
	Pariwisata							
1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	16,99	n.a.	8,01	8,26	8,50	8,50
2	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	n.a.	n.a.	1.686.000.000.000	1.737.000.000.000	1.789.000.000.000	1.789.000.000.000
	Pertanian							
1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	2,90	n.a.	3,00	3,10	3,15	3,15

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Akhir
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
2	Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	96,91	n.a.	100,50	100,80	101,00	101,00
3	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	n.a.	n.a.	0,58	0,16	0,13	0,13
4	NTP Tanaman Pangan	Angka	108,64	n.a.	105,19	105,57	105,95	105,95
5	NTP Hortikultura	Angka	115,18	n.a.	108,11	108,49	108,95	108,95
6	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	103,31	n.a.	100,59	100,97	101,35	101,35
Kehutanan								
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	41,86 ³⁾	42,40 ³⁾	42,45	42,46	42,47	42,47
2	Luas tutupan lahan	Ha	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457,00
Energi dan Sumber Daya Mineral								
1	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	15,76	15,96	18,41	21,32	21,60	21,60
2	Tingkat konsumsi tenaga listrik	kWh/kapita	745,59	n.a.	768,1	779,63	791,32	791,32
3	Indeks Ketersediaan Air Tanah ⁸⁾	Angka	3,59	3,60	3,60	3,63	3,65	3,65
4	Persentase penerapan Good Mining Practice ⁹⁾	%	43,62	44,45	53,00	57,00	62,00	62,00
Perdagangan								
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4,32	5,90	4,51	4,59	5,36	5,36
Perindustrian								
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,88	5,65	3,25	3,50	3,75	3,75
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
Sekretariat Daerah								
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	n.a.	n.a.	36,10	37,10	38,10	38,10
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%	n.a.	n.a.	80,00	80,00	80,00	80,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Akhir
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
3	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	n.a.	n.a.	90,00	90,00	90,00	90,00
4	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat	%	n.a.	n.a.	90,00	90,00	90,00	90,00
Sekretariat DPRD								
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	n.a.	n.a.	90,00	91,00	92,00	92,00
2	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	n.a.	n.a.	75,00	76,00	77,00	77,00
3	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	n.a.	n.a.	75,00	76,00	77,00	77,00
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
Perencanaan								
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	n.a.	n.a.	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	n.a.	n.a.	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	n.a.	n.a.	100,00	100,00	100,00	100,00
Keuangan								
1	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	n.a.	n.a.	13,09	-9,65	-3,38	-3,38
2	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	n.a.	n.a.	-7,67	-5,54	-3,47	-3,47
3	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	n.a.	n.a.	97,75	97,91	98,00	98,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Akhir
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	n.a.	n.a.	84,02	89,86	95,69	95,69
	Kepegawaian							
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,82	0,82	0,86	0,87	0,87	0,87
	Pendidikan dan Pelatihan							
1	Indeks Kompetensi ASN	Angka	n.a.	n.a.	3,07	3,08	3,10	3,10
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	n.a.	n.a.	8,67	17,34	26,10	26,10
3	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	n.a.	n.a.	100,00	100,00	100,00	100,00
	Penelitian dan Pengembangan							
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	71,32	71,00	72,50	73,00	74,00	74,00
	Pengelolaan Penghubung							
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	83,06	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
	Unsur Pengawasan Pemerintahan							
1	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3,00	n.a.	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Level Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3,00	n.a.	3,00	3,00	3,00	3,00
	Unsur Pemerintahan Umum							
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	n.a.	n.a.	2,75	2,91	3,07	3,07
C	Aspek Daya Saing							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,53 ³⁾	67,53 ³⁾	67,55	67,56	67,57	67,57
2	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	8,23	n.a.	4,00	4,00	4,00	4,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Tahun			Kondisi Kinerja Akhir
			2022 ¹⁾	2023 ²⁾	2024	2025	2026	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	80,31	80,00	81,50	82,00	82,50	82,50

Keterangan:

- 1) Realisasi indikator kinerja RPJMD periode sebelumnya sampai dengan tahun 2022 dan/atau gambaran umum kondisi daerah pada tahun 2022; jika tertulis n.a. maka data tersebut belum dirilis;
- 2) Target/proyeksi tahun 2023 adalah target/proyeksi yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023; jika tertulis n.a. artinya bahwa indikator tersebut merupakan indikator baru yang tidak digunakan dalam RPJMD Tahun 2018-2023/RKPD Tahun 2023;
- 3) Nilai penyesuaian berdasarkan PermenLHK 27/2021 tentang IKLH, penambahan stasiun AQMS (Air Quality Monitoring Station) dan adanya penambahan titik sampel pemantauan kualitas air dari kabupaten/kota;
- 4) Target/proyeksi tahun 2024-2026 dihitung dengan menggunakan metodologi baru yang dirilis oleh BNPB;
- 5) Formulasi dan definisi operasional indikator sama dengan indikator dalam RPJMD Tahun 2018-2023/RKPD Tahun 2023, meskipun uraian indikatornya berbeda;
- 6) Formulasi dan definisi operasional indikator berbeda dengan indikator dalam RPJMD Tahun 2018-2023/RKPD Tahun 2023 meskipun uraian indikatornya sama;
- 7) Angka yang dicantumkan merupakan angka proyeksi untuk tahun 2023, bukan target/proyeksi dalam RKPD Tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi pada tahun 2022;
- 8) Perhitungan Indeks ketersediaan air tanah tahun 2024-2026 menggunakan variabel lebih lengkap terkait dengan jenis pengambilan air tanah; nilai pada tahun 2022 dan 2023 adalah nilai penyesuaian dengan metode perhitungan tahun 2024-2026;
- 9) Perhitungan penerapan good mining practice menggunakan kriteria penilaian yang lebih rinci didasarkan pada lima aspek sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; nilai pada tahun 2022 dan 2023 adalah nilai penyesuaian dengan metode perhitungan tahun 2024-2026.

BAB X

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan kebijakan yang terlebih dahulu diundangkan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dan regulasi serta kebijakan lainnya yang masih berlaku. Selain itu, capaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dan isu-isu strategis relevan yang masih akan berkembang sampai dengan tahun 2026 juga dijadikan acuan dalam penyusunan RPD. Oleh karena itu, rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program kerja, pendanaan dan indikator keberhasilannya tepat untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Keseluruhan bab dalam RPD ini selaras untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024-2026 untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari". Penjabaran atas tujuan tertuang dalam empat sasaran daerah yaitu: 1) Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; 3) Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan akan tercapai pada tahun 2024-2026.

Akhirnya, pada masa transisi pergantian Gubernur Jawa Tengah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ini Penjabat Gubernur Jawa Tengah dapat memedomani RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Jawa Tengah. Bagi perangkat daerah, RPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Selanjutnya RPD Tahun 2024-2026 ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024-2026.

Demikian semoga bermanfaat bagi kita bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

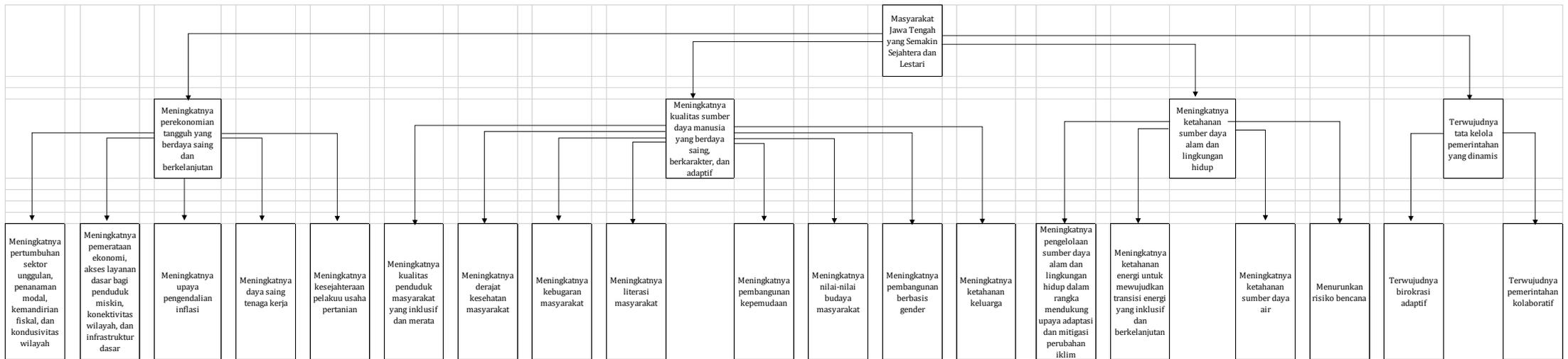


Ditandatangani secara elektronik oleh:

GANJAR PRANOWO

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR **12** TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2026



Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja atau sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebuah organisasi secara vertikal dari atas ke bawah dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Dalam konteks penyusunan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, perumusan *cascading* kinerja dilakukan dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah ke dalam program prioritas daerah beserta indikator kinerja dan targetnya dengan tepat, secara vertikal dari level daerah sampai dengan perangkat daerah. Diharapkan dengan *cascading* kinerja yang tepat akan memberikan arahan dan tanggung jawab yang lebih jelas kepada perangkat daerah dalam melaksanakan program prioritas daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024-2026 yaitu mewujudkan “Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari”.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003